



PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG



**RENCANA
PEMBANGUNAN
DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG 2024-2026**



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 serta untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
10. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan.

12. Sasaran ...

12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 2

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 memuat:

- a. Tujuan, Sasaran dan Strategi;
- b. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah; dan
- c. Program Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3

- (1) Isi dan uraian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. BAB III gambaran keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX penutup.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD, rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 April 2023



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 28 April 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 42

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	I-1
PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPD.....	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-10
1.3.1. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2026	I-11
1.3.2. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	I-11
1.3.3. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025.....	I-11
1.3.4. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	I-12
1.3.5. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038	I-13
1.3.6. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Sektoral.....	I-13
1.4. Maksud dan Tujuan	I-13
1.4.1. Maksud	I-13
1.4.2. Tujuan	I-14
1.5. Sistematika Penulisan	I-15
BAB II	II-1
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi	II-1
2.1.2. Demografi.....	II-9
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-15
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Indikator <i>Impact/Makro</i>).....	II-15
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-32
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-44
2.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-52
2.3.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	II-52
2.3.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	II-57

2.3.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-74
2.3.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	II-77
2.3.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II-79
2.3.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	II-85
2.4. Aspek Pelayanan Umum.....	II-88
2.4.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-88
2.4.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-113
2.4.3. Fokus Urusan Pilihan.....	II-200
2.5. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-226
2.6. Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	II-237
2.6.1. Capaian Kinerja Sasaran	II-237
2.6.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023	II-238
2.6.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023	II-245
BAB III	III-1
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2. Neraca Daerah.....	III-10
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-11
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-12
3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	III-16
3.3. Kerangka Pendanaan.....	III-17
3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	III-21
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-26
BAB IV	IV-1
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2. Isu Strategis	IV-5
4.2.1. Telaahan Kebijakan/Isu Strategis Internasional.....	IV-5
4.2.2. Telaahan Kebijakan/Isu Strategis Nasional.....	IV-17
4.2.3. Telaahan Kebijakan Provinsi Jawa Barat	IV-20
4.2.4. Telaahan RPJMD dan RPD Kabupaten Berbatasan Kabupaten Sumedang	IV-42
4.2.5. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.....	IV-47
4.2.6. Isu Strategis Kabupaten Sumedang	IV-49
4.2.7. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	IV-59
BAB V	V-1
TUJUAN, DAN SASARAN.....	V-1
5.1. Tujuan dan Sasaran	V-1

BAB VI	VI-1
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN.....	VI-1
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026	VI-1
6.2. Program Pembangunan	VI-13
6.2.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	VI-13
6.2.2. Program Perangkat Daerah.....	VI-16
6.3. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial.....	VI-77
6.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Tata Ruang	VI-77
6.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan ..	VI-88
BAB VII	VII-1
KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT PEMBANGUNAN DAERAH.....	VII-1
BAB VIII	VIII-1
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
8.1. Indikator Makro	VIII-1
8.2. Indikator Kinerja Utama (Iku).....	VIII-2
8.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	VIII-6
BAB IX	IX-1
PENUTUP	IX-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026	I-3
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Sumedang	II-1
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang	II-4
Gambar 2.3	Peta Hidrologi Kabupaten Sumedang	II-6
Gambar 2.4	Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang	II-9
Gambar 2.5	Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-12
Gambar 2.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022	II-13
Gambar 2.7	Struktur Umur Penduduk Kabupaten Sumedang	II-14
Gambar 2.8	Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita (ADHK) Tahun 2018-2022	II-16
Gambar 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat, dan Sumedang	II-16
Gambar 2.10	Pemetaan Posisi Kab/kota di Jabar Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita	II-17
Gambar 2.11	Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-18
Gambar 2.12	Proporsi Komponen Pengeluaran PDRB (%)	II-19
Gambar 2.13	Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah dan PDRB (%) ..	II-20
Gambar 2.14	Proporsi Konsumen dan Konsumsi Pangan Pokok di Kabupaten Sumedang	II-22
Gambar 2.15	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang	II-24
Gambar 2.16	Komparasi Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat ..	II-24
Gambar 2.17	Proporsi Penerima Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Sumedang	II-25
Gambar 2.18	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..	II-26
Gambar 2.19	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat	II-27
Gambar 2.20	Tren Gini Ratio Kabupaten Sumedang	II-28
Gambar 2.21	Komparasi Gini Ratio Kabupaten Kota di Jawa Barat ...	II-29
Gambar 2.22	Perbandingan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Sumedang	II-30
Gambar 2.23	IPM Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-33
Gambar 2.24	Komparasi IPM Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022	II-33
Gambar 2.25	Tren Capaian Komponen IPM Kabupaten Sumedang	II-34
Gambar 2.26	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	II-37
Gambar 2.27	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Tahun 2022	II-38
Gambar 2.28	Penyebab Kematian Bayi Tahun 2022	II-40
Gambar 2.29	Penyebab Kematian Ibu Tahun 2022	II-40
Gambar 2.30	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang ..	II-41
Gambar 2.31	Komparasi TPT Kabupaten Kota di Jawa Barat	II-42
Gambar 2.32	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-44
Gambar 2.33	Cabang Olahraga Berprestasi dan Atlit Dibina di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-51

Gambar 2.34	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%)	II-53
Gambar 2.35	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022	II-54
Gambar 2.36	Rombongan Belajar Paket A, Paket B dan Paket C di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%)	II-56
Gambar 2.37	Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%)	II-56
Gambar 2.38	Cakupan Pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang Tahun 2012 – 2022	II-59
Gambar 2.39	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022	II-60
Gambar 2.40	Cakupan Kunjungan Neonatus dan Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 ..	II-61
Gambar 2.41	Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%)	II-62
Gambar 2.42	Cakupan Kunjungan Balita di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-63
Gambar 2.43	Cakupan Kunjungan Balita di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-63
Gambar 2.44	Posyandu Menurut Strata Tahun 2018 – 2022	II-64
Gambar 2.45	Jumlah Bayi Lahir Hidup dan Jenis Imunisasi yang Diperoleh Tahun 2022.....	II-65
Gambar 2.46	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%)	II-66
Gambar 2.47	Tren Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2022	II-75
Gambar 2.48	Capaian Rumah Tangga ber-Sanitasi (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-76
Gambar 2.49	Jenis Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2022.....	II-80
Gambar 2.50	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (orang) Tahun 2018-2022	II-82
Gambar 2.51	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2018-2022	II-83
Gambar 2.52	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – Tahun 2022	II-88
Gambar 2.53	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022	II-89
Gambar 2.54	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022	II-90
Gambar 2.55	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2022	II-91
Gambar 2.56	Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-92
Gambar 2.57	Kondisi Jalan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-97
Gambar 2.58	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022.....	II-98

Gambar 2.59	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-100
Gambar 2.60	Jumlah Timbulan Sampah, Sampah Dikelola dan Sampah Tidak Terkelola Tahun 2019-2022 (Ton).....	II-101
Gambar 2.61	Rumah Tidak Layak Huni Diperbaiki di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-102
Gambar 2.62	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang Tertangani di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-107
Gambar 2.63	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-108
Gambar 2.64	Indeks Risiko Bencana Tahun 2018-2022	II-109
Gambar 2.65	Intensitas Kejadian Bencana di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-109
Gambar 2.66	Pencari Kerja Berdasarkan Lulusan Pendidikan Tahun 2022	II-114
Gambar 2.67	Angkatan Kerja (15 -64 Tahun) Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2022	II-114
Gambar 2.68	Instruktur BLK Tahun 2018-2022	II-116
Gambar 2.69	Pelatihan Penumbuhan Wirausahawan Baru (Orang) Tahun 2019-2022	II-116
Gambar 2.70	Peserta Pelatihan Ditempatkan (Orang) Tahun 2019-2022	II-117
Gambar 2.71	Kasus Konflik antara Pekerja dengan Pengusaha Tahun 2018-2022	II-118
Gambar 2.72	Tenaga Fungsional Mediator Hubungan Industri (Orang) Tahun 2018-2022	II-119
Gambar 2.73	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Ditangani Tahun 2018-2021	II-120
Gambar 2.74	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-122
Gambar 2.75	Ketersediaan Pangan Pokok (Kg/Kapita/Tahun) Tahun 2018-2022	II-123
Gambar 2.76	Lahan Milik Pemerintah Sudah Bersertifikat (%) Tahun 2018-2022	II-124
Gambar 2.77	Indeks Kualitas Air (poin) Tahun 2018-2022	II-125
Gambar 2.78	Indeks Kualitas Udara (poin) Tahun 2018-2022	II-126
Gambar 2.79	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (poin) Tahun 2018-2022	II-127
Gambar 2.80	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin) Tahun 2019-2022	II-128
Gambar 2.81	IKM Bidang Kependudukan Tahun 2018-2022	II-129
Gambar 2.82	Rasio Penduduk ber-KTP Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-130
Gambar 2.83	Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2018-2022	II-131
Gambar 2.84	Status Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-131
Gambar 2. 85	Persentase peran BUMDes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa (%) Tahun 2018-2021.....	II-132
Gambar 2.86	Klasifikasi Keluarga Berdasarkan Kesejahteraan (Keluarga) Tahun 2018-2022	II-133
Gambar 2.87	Cakupan Pasangan Usia Subur Menggunakan Alat Kontrasepsi (%) Tahun 2018-2022	II-134
Gambar 2.88	Peserta KB per Jenis Kelamin Tahun 2018-2022	II-135

Gambar 2.89	Angka <i>Drop Out</i> Peserta KB (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-135
Gambar 2.90	Kader KB per Desa Tahun 2018-2022	II-136
Gambar 2.91	Pengujian Mobil Penumpang (Unit) Tahun 2018-2022	II-139
Gambar 2.92	Pengujian Mobil Bus (Unit) Tahun 2018-2022	II-140
Gambar 2.93	Pengujian Mobil Barang (Unit) Tahun 2018-2022	II-141
Gambar 2.94	Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas (Unit) Tahun 2017-2021	II-142
Gambar 2.95	Indeks SPBE (poin) Tahun 2018-2022.....	II-145
Gambar 2.96	Titik Blank Spot di Kabupaten Sumedang (Desa) Tahun 2018-2022	II-148
Gambar 2.97	Jumlah Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat (unit) Tahun 2018-2022	II-167
Gambar 2.98	Jumlah Anggota Koperasi (orang) Tahun 2018-2022...	II-168
Gambar 2.99	Sumber Permodalan Koperasi (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022	II-169
Gambar 2.100	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-170
Gambar 2.101	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah yang Mendapatkan Pelatihan Tahun 2018-2022.....	II-171
Gambar 2.102	Investasi di Kabupaten Sumedang (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022	II-175
Gambar 2.103	Pinjaman Investasi dari Bank Umum dan BPR Berdasarkan Jenis Mata Uang (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022	II-176
Gambar 2.104	Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Tahun 2019-2022	II-177
Gambar 2.105	Event Kepemudaan dan Event Olahraga Tahun 2019-2022	II-181
Gambar 2.106	Jumlah Sarana Olahraga Tahun 2018-2022	II-182
Gambar 2.107	Jumlah Atlet dan Atlet Berprestasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-183
Gambar 2.108	Ketersediaan Data Tahun 2018-2022.....	II-183
Gambar 2.109	Hasil Assesment Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022	II-185
Gambar 2.110	Promosi Event Kebudayaan Tahun 2018-2022	II-188
Gambar 2.111	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2018-2022 .	II-191
Gambar 2.112	Pemanfaatan Bacaan <i>Digital i-Sumedang</i> Tahun 2019-2022	II-192
Gambar 2.113	Jumlah Pejabat Fungsional Arsip di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-200
Gambar 2.114	Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2018 - 2022	II-201
Gambar 2.115	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022	II-203
Gambar 2.116	Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022	II-203
Gambar 2.117	Jumlah Kebutuhan Baku Ikan Untuk Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2018 - 2022	II-204
Gambar 2.118	Luas Kolam Air Tenang (Ha) Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022	II-205

Gambar 2.119	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang) Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022	II-206
Gambar 2.120	Jumlah Promosi Pariwisata (Event) Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022	II-210
Gambar 2.121	Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata dan Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata Dibina (Orang) Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022	II-211
Gambar 2.122	Jumlah Hotel dan Rumah Makan Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022	II-211
Gambar 2.123	Jumlah Komoditas Pertanian di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-213
Gambar 2.124	Jumlah Kelompok Ternak di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-215
Gambar 2.125	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Ha) Tahun 2022 ...	II-219
Gambar 2.126	Jumlah Usaha Perdagangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-220
Gambar 2.127	Jenis Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2021	II-221
Gambar 2.128	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-222
Gambar 2.129	Proses Bisnis Aplikasi Simpati Kabupaten Sumedang.	II-228
Gambar 2.130	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-229
Gambar 2.131	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin) Bidang Perizinan Tahun 2018-2022	II-230
Gambar 6.1	Fokus RPD Tahun 2024-2026.....	VI-16
Gambar 6.2	Peta Rencana Struktur Ruang	VI-85
Gambar 6.3	Peta Rencana Pola Ruang	VI-86
Gambar 6.4	Kawasan Strategis Kabupaten	VI-87
Gambar 6.5	Kawasan Strategis Kabupaten	VI-88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan	II-2
Tabel 2.2	Curah Hujan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-4
Tabel 2.3	Suhu Udara Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-5
Tabel 2.4	Kawasan Rawan Bencana.....	II-7
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-10
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk dan Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....	II-31
Tabel 2.7	Indikator Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-38
Tabel 2.8	Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha	II-43
Tabel 2.9	Objek Cagar Budaya di Kabupaten Sumedang yang Telah Ditetapkan.....	II-45
Tabel 2.10	Objek Diduga Cagar Budaya.....	II-47
Tabel 2.11	Jenis Pelaku Seni per Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-49
Tabel 2.12	Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022	II-57
Tabel 2.13	Usia Produktif Mendapat Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....	II-67
Tabel 2.14	Data Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022	II-68
Tabel 2.15	Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022	II-69
Tabel 2.16	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022	II-69
Tabel 2.17	Data Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022	II-70
Tabel 2.18	Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022	II-70
Tabel 2.19	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022	II-77
Tabel 2.20	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022	II-78
Tabel 2.21	Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022	II-79
Tabel 2.22	Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten Sumedang	II-81
Tabel 2.23	Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022	II-84
Tabel 2.24	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial (Orang) Tahun 2018-2022	II-86
Tabel 2.25	Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022	II-86
Tabel 2.26	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022..	II-93
Tabel 2.27	Tenaga Kesehatan Tahun 2022.....	II-94

Tabel 2.28	Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-95
Tabel 2.29	Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-99
Tabel 2.30	Jumlah Backlog Rumah Kabupaten Sumedang Tahun 2020	II-103
Tabel 2.31	Luas Kawasan Kumuh (Ha) Tahun 2018-2022	II-105
Tabel 2.32	Daftar Kawasan Kumuh Di Kabupaten Sumedang Berdasarkan SK Kumuh Kabupaten Sumedang Nomor 122 Tahun 2022	II-106
Tabel 2.33	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Oktober 2022.....	II-110
Tabel 2.34	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Orang) Tahun 2018-2022	II-112
Tabel 2.35	Kategori Indeks Kualitas Air	II-124
Tabel 2.36	Kategori Indeks Kualitas Udara	II-126
Tabel 2.37	Jalur Trayek Angkutan Kota.....	II-137
Tabel 2.38	Jalur Trayek Angkutan Pedesaan	II-137
Tabel 2.39	Lokasi CCTV Terkoordinasi dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tahun 2022.....	II-143
Tabel 2.40	Lokasi Perangkat <i>Traffic Counting</i> Terpasang Tahun 2022	II-143
Tabel 2.41	Lokasi CCTV Berdasarkan Jenis Kamera Terpasang Tahun 2022	II-143
Tabel 2.42	Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2022	II-146
Tabel 2.43	Layanan Jaringan Internet Blank Spot di Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-150
Tabel 2.44	Pinjaman Bank Umum Kepada UMKM Kabupaten Sumedang Berdasarkan Skala Usaha (Ribu Rupiah) Tahun 2018-2022	II-172
Tabel 2.45	Pinjaman Bank Umum dan BPR Kepada UMKM Kabupaten Sumedang Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022	II-173
Tabel 2.46	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-177
Tabel 2.47	Data Seni dan Budaya Tahun 2018-2022	II-185
Tabel 2.48	Jenis Perpustakaan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-189
Tabel 2.49	Jumlah Arsip Aktif, Arsip Inaktif dan Arsip Statis di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022	II-193
Tabel 2.50	Tempat Penyimpanan Arsip di Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....	II-193
Tabel 2.51	Sosialisasi Pemahaman Arsip terhadap Perangkat Daerah dan BUMD Tahun 2022	II-199
Tabel 2.52	Jenis Ikan pada Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2018 - 2022	II-201
Tabel 2.53	Jenis Ikan pada Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022	II-202
Tabel 2.54	Jenis Wisata dan Jumlah Wisatawan Tahun 2022.....	II-206
Tabel 2.55	Jumlah Pengusaha pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumedang (Orang) Tahun 2018 - 2022.....	II-212

Tabel 2.56	Jumlah Kasus Hewan Ternak yang Terinfeksi Penyakit Menular di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022.....	II-216
Tabel 2.57	Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status di Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....	II-217
Tabel 2.58	Jumlah Usaha Industri Pengolahan yang Sudah Tersertifikasi Tahun 2018 - 2022.....	II-222
Tabel 2.59	Penempatan Transmigran Asal Kabupaten Sumedang.....	II-225
Tabel 2.60	Jenis Layanan pada MPP Kabupaten Sumedang	II-230
Tabel 2.61	Indikator Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi Tahun 2016-2022	II-233
Tabel 2.62	Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2022	II-235
Tabel 2.63	Rasio Pencari Kerja Lulusan S-1/S-2/S-3 di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2022 (%).....	II-236
Tabel 2.64	Jumlah PNS yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan	II-237
Tabel 2.65	Capaian Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2021 (Sebelum Perubahan)	II-239
Tabel 2.66	Capaian Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Sesudah Perubahan).....	II-242
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2021 (Sebelum Perubahan)	II-246
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Sesudah Perubahan).II-	271
Tabel 2.69	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....	II-273
Tabel 2.70	Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-274
Tabel 2.71	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....	II-277
Tabel 2.72	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....	II-279
Tabel 2.73	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-281
Tabel 2.74	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-283
Tabel 2.75	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-284
Tabel 2.76	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-284
Tabel 2.77	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-285
Tabel 2.78	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-286
Tabel 2.79	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-288
Tabel 2.80	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan	

	Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-289
Tabel 2.81	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-290
Tabel 2.82	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-291
Tabel 2.83	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-292
Tabel 2.84	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-293
Tabel 2.85	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-294
Tabel 2.86	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-295
Tabel 2.87	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-297
Tabel 2.88	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....	II-298
Tabel 2.89	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....	II-299
Tabel 2.90	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-300
Tabel 2.91	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-301
Tabel 2.92	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-301
Tabel 2.93	Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-302
Tabel 2.94	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....	II-302
Tabel 2.95	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-303
Tabel 2.96	Rekapitulasi Capaian indikator Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022	II-304
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 Sampai dengan Tahun 2022.....	III-5
Tabel 3.2	Necara Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022	III-10
Tabel 3.3	Proporsi Realiasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022	III-13
Tabel 3.4	Kontirubusi Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah Tahun 2018 -2023	III-15
Tabel 3.5	Kontribusi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Tahun 2018 – 2023	III-15
Tabel 3.6	Defisit Rill Kabupaten Sumedang.....	III-16
Tabel 3.7	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sumedang	III-17
Tabel 3.8	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sumedang	III-17

Tabel 3.9	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 sampai dengan 2026 Kabupaten Sumedang ..	III-23
Tabel 3.10	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah	III-26
Tabel 3.11	Rencana Penggunaan Kapasitas Ril Keuangan Daerah	III-26
Tabel 4.1	Telaahan RPJMD/RPD Kabupaten Berbatasan Kabupaten Sumedang	IV-42
Tabel 4.2	Keselarasan Isu Strategis Nasional dengan Isu Strategis Kabupaten Sumedang	IV-51
Tabel 4.3	Keselarasan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dengan Isu Strategis Kabupaten Sumedang.....	IV-54
Tabel 4.4	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang	IV-59
Tabel 5.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026	V-8
Tabel 5.2	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026	V-12
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026	VI-6
Tabel 6.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026	VI-17
Tabel 6.3	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah	VI-78
Tabel 6.4	Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Sumedang	VI-86
Tabel 6.5	Pemetaan Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan	VI-90
Tabel 6.6	Daftar Program/Proyek Perpres No. 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan Di Kabupaten Sumedang	VI-103
Tabel 7.1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026	VII-4
Tabel 8.1	Indikator Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026	VIII-2
Tabel 8.2	Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026	VIII-3
Tabel 8.3	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat Dampak (Impact) Tahun 2024-2026	VIII-7
Tabel 8.4	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat Hasil (Outcome) Tahun 2024-2026	VIII-70

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bentuk proses kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk menghasilkan pembangunan yang baik dan berkualitas diperlukan sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Penyusunan dokumen pembangunan daerah yang terukur, efektif dan efisien perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, holistik, teknokratik, integratif dan spasial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 akan berakhir pada Tahun 2023 sesuai dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode Tahun 2018 - 2023. Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Sumedang yang baru akan dilakukan pada tahun 2024 melalui pilkada serentak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam upaya mewujudkan dan menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Pusat melalui Kememterian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-2026 yang

selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun secara teknokratik dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud dengan memperhatikan:

1. Target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
4. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi berlaku.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menerapkan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan daerah antara lain :

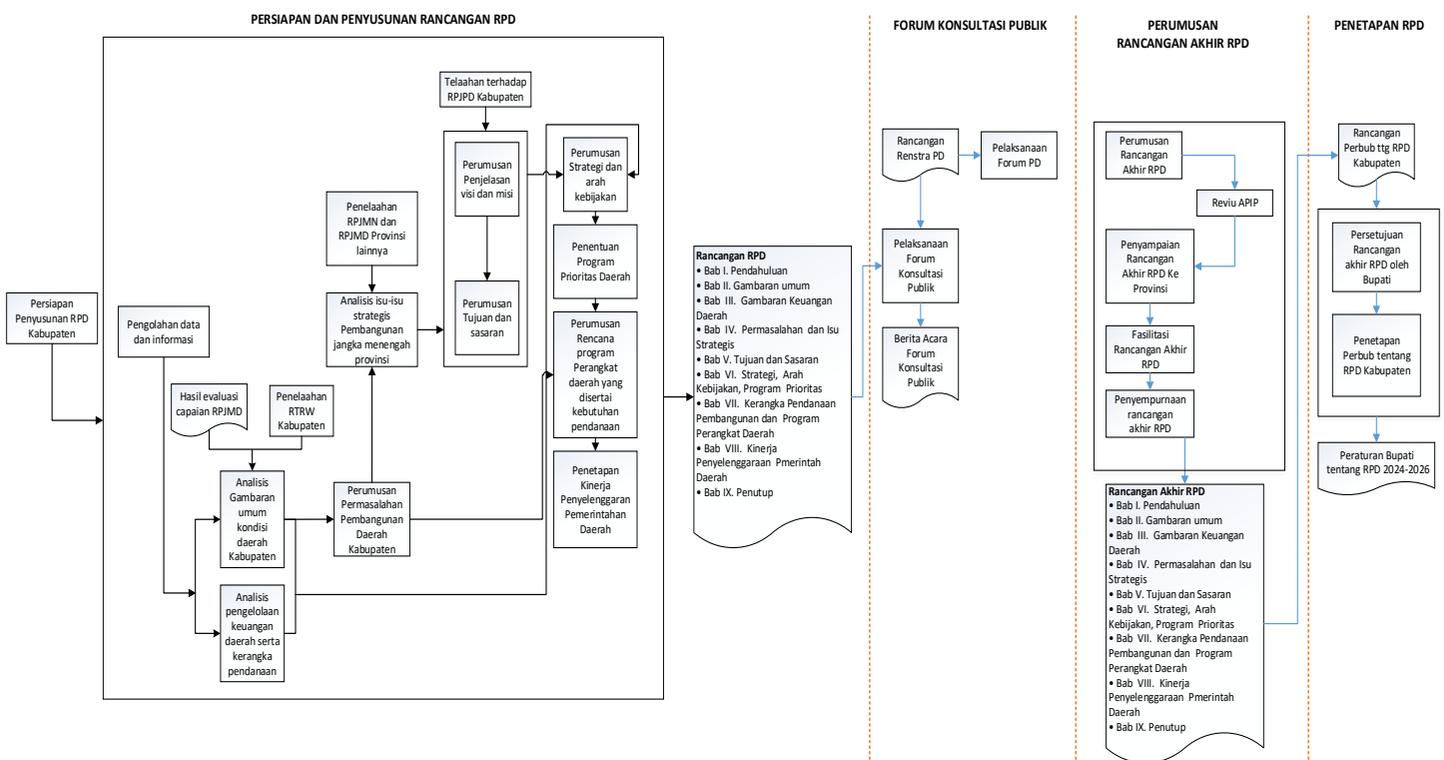
1. Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
3. Pendekatan Holistik-Tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
4. Pendekatan Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus

yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, forum konsultasi publik, perumusan rancangan akhir, fasilitasi rancangan akhir dan penetapan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Alur penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang
Tahun 2024-2026



Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan digunakan Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada Tahun 2024 serta dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024-2026 dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPD

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
25. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 2021, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
35. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional antara pusat dan daerah.

1.3.1. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2026

Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2026 dilaksanakan dengan menyelaraskan target indikator makro dan program prioritas nasional yang tercantum dalam Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

1.3.2. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

Dokumen RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dengan menyelaraskan indikator makro dan program prioritas daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3.3. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025

Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 02 Tahun—2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 yang termuat dalam Visi dan Misi Kabupaten Sumedang 20 tahun kedepan. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024–2026 didasarkan pada visi RPJPD Kabupaten, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

1.3.4. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 pada rentang waktu 3 (tiga) tahun, dimana Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran teknis RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pemerintahan untuk jangka 3 (tiga) tahun. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Kabupaten Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten dan Renstra PD agar memperhatikan:

- a. Penyelarasan Program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD Tahun 2018-2023 masing–masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2023;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2023 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;

Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

1.3.5. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2026 memperhatikan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2038 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah Kabupaten Sumedang dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

1.3.6. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain hubungannya dengan beberapa dokumen perencanaan tersebut, RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2026 juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain:

1. RPJMD/RPD dan RTRW Kabupaten sekitar;
2. Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs);
3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
4. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Kabupaten Sumedang.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2026 dengan peraturan perundangan–undangan yang berlaku, perkembangan pembangunan dan capaiannya serta permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir serta penyesuaian nomenklatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Dokumen hasil RPD ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama.

1.4.2. Tujuan

Selanjutnya, tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2026 adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), distrik maupun kampung/kelurahan;
- b. Memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan pada level pemerintah, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama tahun 2024–2026;
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang;
- e. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RPD ini;
- f. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024–2026;
- g. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 oleh Penjabat Kepala Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan RPD yang terdiri dari: (1) Latar Belakang, (2) Dasar Hukum, (3) Hubungan antar Dokumen, (4) Maksud dan Tujuan serta (5) Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam bab ini menjelaskan dan menyajikan tentang Gambaran Umum selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi: (1) Aspek Geografi dan Demografi; (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (3) Aspek Pelayanan Umum; dan (4) Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data serta analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: (1) Gambaran Keuangan Daerah terdiri dari kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah; (2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu terdiri atas Proporsi Penggunaan Anggaran dan Analisis Pembiayaan; serta (3) Kerangka Pendanaan 3 (tiga) tahun yang terdiri atas Proyeksi Pendapatan dan Belanja serta Penghitungan Kerangka Pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam bab ini berisi penyajian isu–isu strategis meliputi: (1) Permasalahan Pembangunan; dan (2) Isu Strategis yang memperhatikan isu/kebijakan global, nasional, regional, daerah sekitar dan kebijakan Kabupaten Sumedang.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini berisi penyajian terhadap Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024–2026.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGNAN DAERAH

Dalam bab ini berisi tentang: (1) Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran; serta (2) Arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 3 (tiga) tahun.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Target, Perangkat Daerah Penanggung Jawab berdasarkan bidang urusan yang terdiri dari Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah dan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Bab ini menguraikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode.

BAB IX PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan tentang RPD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD dibawah kepemimpinan Penjabat Kepala Daerah. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPD dijadikan pedoman bagi setiap kepala PD dalam menyusun Renstra PD dan setelah ditetapkannya RPD maka Renstra PD akan menyesuaikan.

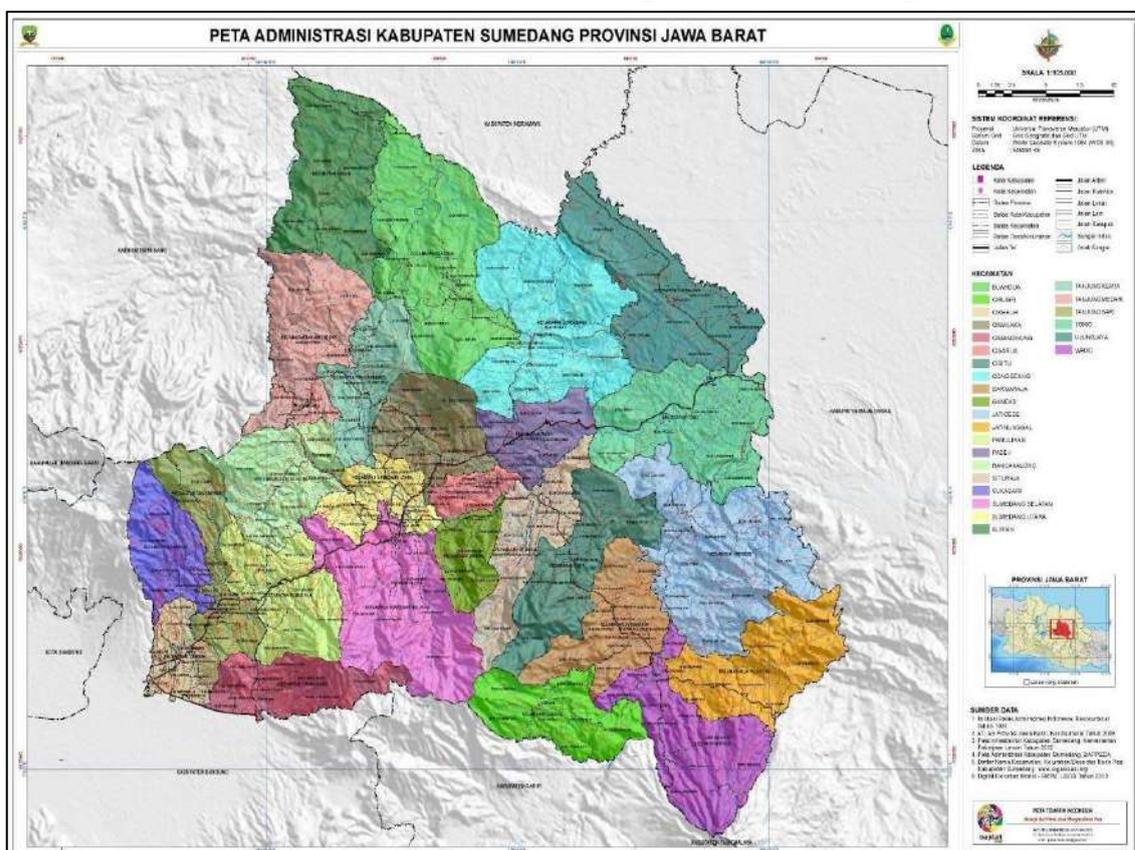
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat $06^{\circ}34'46,18''$ - $7^{\circ}00'56,25''$ Lintang Selatan dan $107^{\circ}01'45,63''$ - $108^{\circ}12'59,04''$ Bujur Timur (Gambar 2.1).

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Sumedang



Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

Batas Wilayah:

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu;
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya;
- c) Sebelah Barat : Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung; dan

d) Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung.

Adapun luas wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dan terbagi menjadi 270 desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Jatigede sebesar 11.394 Ha, dan luasan terkecil adalah Kecamatan Cisarua sebesar 1.452 Ha. Adapun luas wilayah per Kecamatan, sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan
di Kabupaten Sumedang

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Desa	Kelurahan	Presentase (%)
1	Wado	7.331	10		4,71%
2	Jatinunggal	6.322	9		4,05%
3	Darmaraja	5.413	12		3,47%
4	Cibugel	5.004	7		3,21%
5	Cisitu	6.410	10		4,10%
6	Situraja	5.668	15		3,64%
7	Conggeang	11.168	12		7,20%
8	Paseh	3.387	10		2,17%
9	Surian	7.630	9		4,90%
10	Buahdua	11.156	14		7,15%
11	Tanjungsari	4.325	12		2,77%
12	Sukasari	3.904	7		2,50%
13	Pamulihan	5.377	11		3,44%
14	Cimanggung	4.305	11		2,76%
15	Jatinangor	2.570	12		1,64%
16	Rancakalong	5.505	10		3,59%
17	Sumedang Selatan	9.675	10	4	6,20%
18	Sumedang Utara	3.141	10	3	2,01%
19	Ganeas	2.531	8		1,62%
20	Tanjungkerta	4.399	12		2,82%
21	Tanjungmedar	6.687	9		4,29%
22	Cimalaka	4.763	14		3,05%
23	Cisarua	1.452	7		0,93%

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Desa	Kelurahan	Presentase (%)
24	Tomo	7.541	9		4,87%
25	Ujungjaya	8.692	9		5,61%
26	Jatigede	11.394	11		7,31%
Jumlah		155.872	270	7	100%

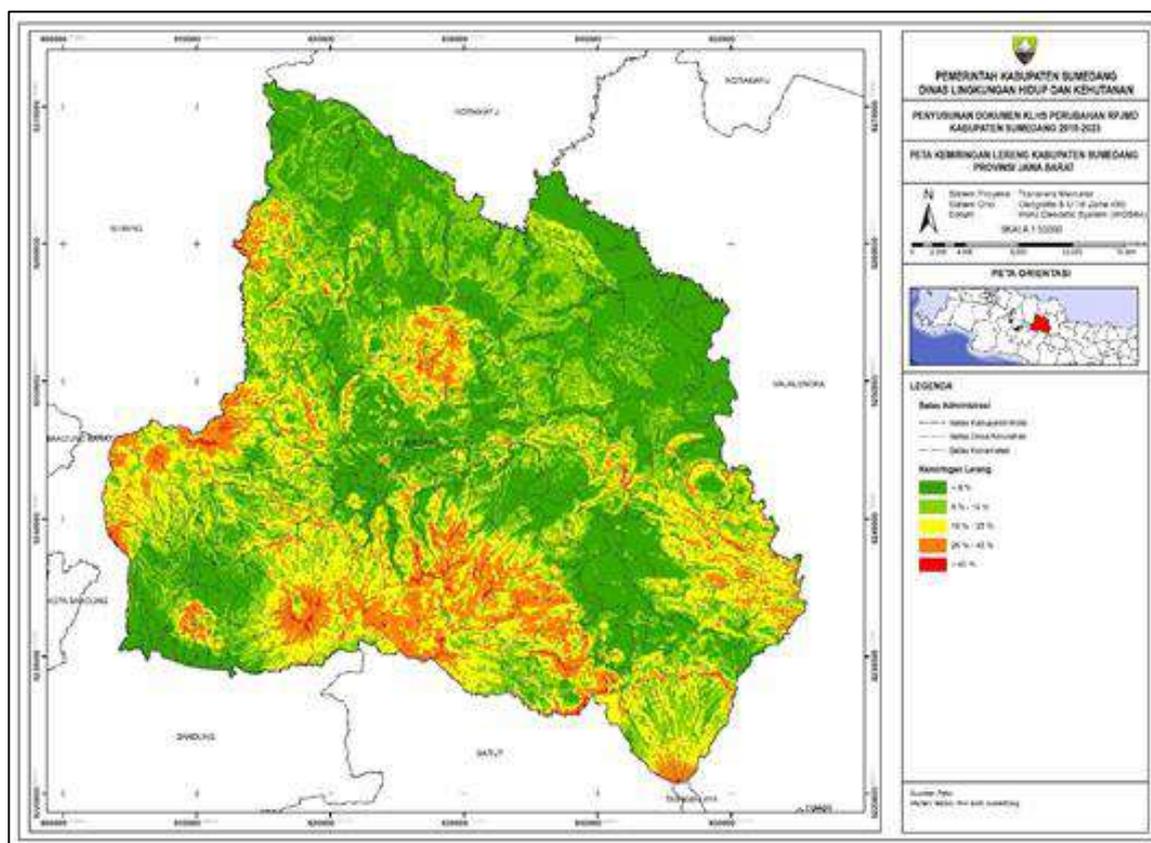
Sumber: BPS Kabupaten Sumedang Dalam Angka Tahun 2022

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Dataran terendah yang terdapat di Kabupaten Sumedang ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan laut dengan puncak tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

1. 0-8%, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan per kabupaten-an;
2. 8-15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;
3. 15-25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;
4. 25-40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;
5. Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

Peta Kemiringan Kabupaten Sumedang yang bersumber dari RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 diperlihatkan pada Gambar 2.2 dibawah ini.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang



Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis serta pertemuan arus udara. Kabupaten Sumedang memiliki iklim tropis, suhu rata-rata tahunan adalah $27,9^{\circ}\text{C}$. Curah hujan tertinggi sepanjang Tahun 2022 terjadi pada Bulan Maret yang mencapai $431,9\text{ mm}^3$ dengan jumlah hari hujan 22 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Agustus yaitu $22,3\text{ mm}^3$. Berikut adalah data curah hujan di Kabupaten Sumedang sepanjang Tahun 2022.

Tabel 2.2
Curah Hujan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	324,4	21
Februari	349,8	23
Maret	431,9	22

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
April	428,0	22
Mei	241,3	18
Juni	105,8	17
Juli	165,2	11
Agustus	22,3	2
September	37,3	6
Oktober	360,4	19
November	374,6	21
Desember	223,7	23

Sumber: *id.climate-data.org*, hasil pengolahan 2020

Sedangkan berdasarkan data keadaan iklim, bulan September merupakan bulan terhangat sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 28,5 °C, dan bulan Februari merupakan bulan dengan suhu terendah yaitu 26,6 °C (Tabel 2.3).

Tabel 2.3
Suhu Udara Kabupaten Sumedang Tahun 2022

Bulan	Suhu rata-rata (°C)	Suhu maksimum rata-rata (°C)	Suhu minimum rata-rata (°C)
Januari	27,2	34,2	22,9
Februari	26,6	33,8	22,6
Maret	27,3	35	22,8
April	27,7	34,9	23,3
Mei	27,9	35,8	22,8
Juni	26,9	33,7	21,9
Juli	27,5	34,4	19,8
Agustus	28,1	35	22,4
September	28,5	36,2	22,8
Oktober	27,4	35,6	22,8
November	27,3	35	22,9
Desember	26,9	35	22,6
Rata-rata tahunan	27,44	34,88	22,47

Sumber : *accuweather.com*, diolah (2023)

Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan di dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah. Wilayah Sungai (WS) Kabupaten Sumedang sebagian besar merupakan jaringan lintas kabupaten, yaitu sungai yang hulu atau hilirnya berada di antara Wilayah Kabupaten Sumedang dengan wilayah Kabupaten tetangga. Wilayah Sungai tersebut meliputi:

1. WS Cipunagara terkait dengan Kabupaten Subang adalah Sungai Cipunagara;
2. WS Ciplanas terkait dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka adalah Sungai Ciplanas, Sungai Cigalagah, dan Sungai Cikandung;
3. WS Citarum terkait dengan Kabupaten Bandung adalah Sungai Cikeruh dan Sungai Citarik (relatif kecil);
4. WS Cimanuk terkait dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Majalengka adalah Sungai Cipelang, Sungai Cimanuk, dan Sungai Cilutung.

Gambar 2.3
Peta Hidrologi Kabupaten Sumedang



Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

Berdasarkan hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah Kabupaten Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 4 (empat) DAS dengan 6 (enam) Sub DAS, yaitu:

1. DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Sub DAS Cipeles, Sub DAS Cimanuk Hilir, dan Sub DAS Cilutung;
2. DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik;
3. DAS Cipunagara meliputi Sub DAS Cikandung; dan
4. DAS Cipanas.

Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung, dan gempa bumi. Gerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada umumnya dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam batuan dasar pembentuk lereng.

Sifat fisik batuan/tanah pelapukan merupakan salah satu faktor alam penyebab terjadinya gerakan tanah disamping faktor-faktor alam lainnya seperti curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlipatan terhadap kemiringan lerengnya), tata guna lahan, morfologi, dan kegempaan. Kawasan rawan bencana Gerakan tanah di Kabupaten Sumedang memiliki luas kurang lebih 21.671 hektar yang tersebar di sebagian wilayah Sumedang. Sedangkan bencana banjir sering disebabkan oleh drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan. Secara rinci Kawasan bencana Kabupaten Sumedang disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4 Kawasan Rawan Bencana

No	Kawasan Bencana	Lokasi	Keterangan
1	Gerakan Tanah	Tersebar di sebagian wilayah Kabupaten, terutama di sekitar Kecamatan Surian, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Conggeang,	Luas kurang lebih 21.612 Ha

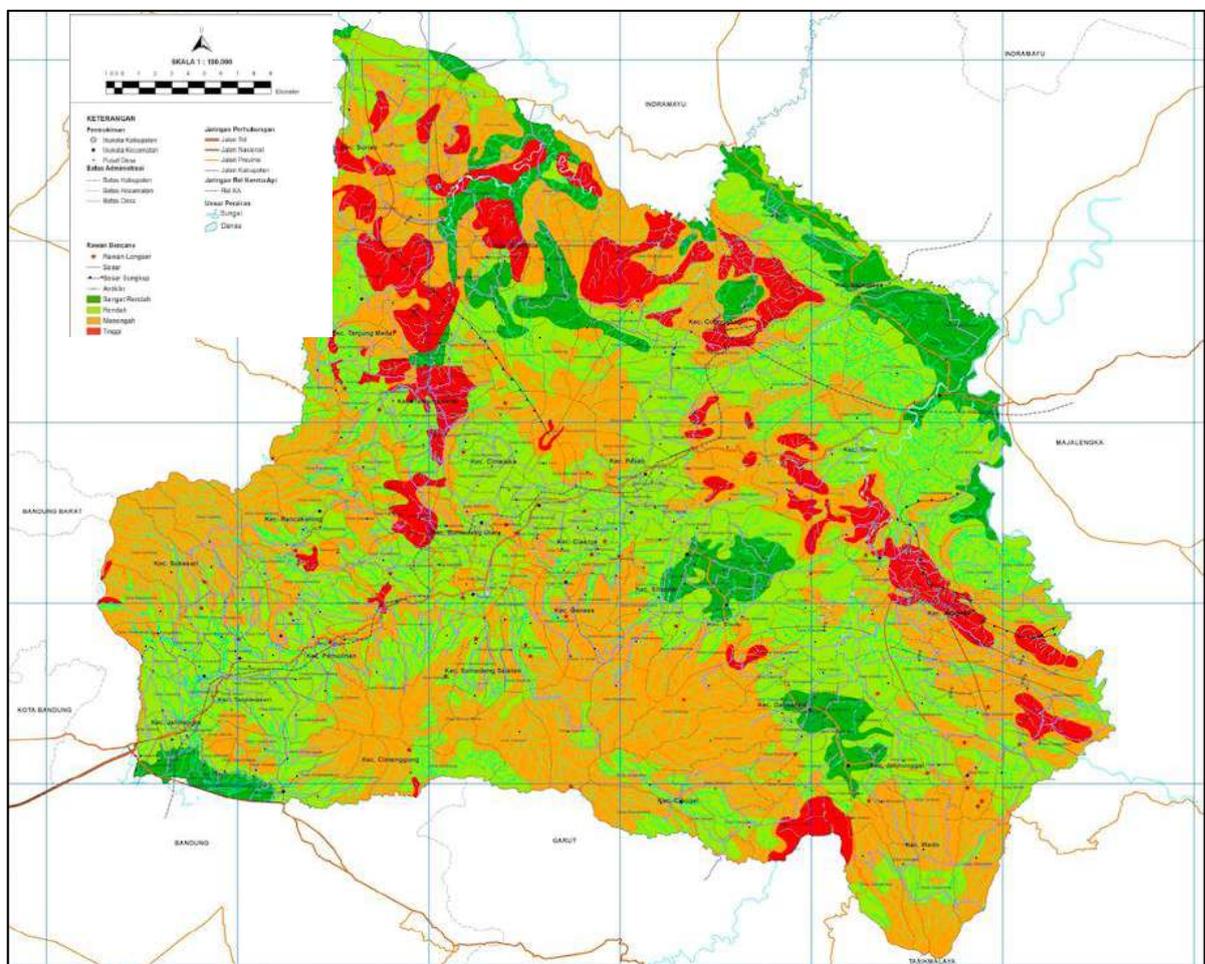
No	Kawasan Bencana	Lokasi	Keterangan
		Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Tomo, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Darmaraja, dan Kecamatan Jatinunggal	
2	Banjir	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Ujungjaya; d. Kecamatan Tomo; e. Kecamatan Sumedang Utara; dan f. Kecamatan Sumedang Selatan.	Terjadi akibat dari drainase yang kurang memadai, tutupan lahan, dan peningkatan debit air di beberapa titik lintasan sungai.
3	Puting Beliung	a. Kecamatan Cimanggung; b. Kecamatan Cimalaka; c. Kecamatan Cisarua; d. Kecamatan Ujungjaya; dan e. Kecamatan Wado.	-
4	Gempa Bumi	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungsari; e. Kecamatan Sukasari; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Utara; h. Kecamatan Sumedang Selatan; i. Kecamatan Ganeas; j. Kecamatan Cisarua; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Paseh; m. Kecamatan Tanjungkerta; n. Kecamatan Tanjungmedar; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisitua; q. Kecamatan Darmaraja; r. Kecamatan Wado; s. Kecamatan Jatinunggal; t. Kecamatan Jatigede; u. Kecamatan Tomo; v. Kecamatan Ujungjaya;	-

No	Kawasan Bencana	Lokasi	Keterangan
		w. Kecamatan Conggeang; x. Kecamatan Buahdua; dan y. Kecamatan Surian.	

Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Secara umum daerah rawan bencana di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Gambar 2.4 dibawah ini:

Gambar 2.4
Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang



Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038

2.1.2. Demografi

Berdasarkan data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2022 semester II mengenai Jumlah Penduduk, Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga yang tersebar di 26 Kecamatan dapat diketahui bahwa total jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang sebanyak 1.187.620 jiwa yang terdiri atas 598.352 jiwa penduduk laki-laki

dan 589.268 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 11.602 jiwa. Sedangkan untuk kepadatan penduduk mencapai angka 762 jiwa per Km² dan wilayah terpadat terdapat di Kecamatan Sumedang Utara dengan angka kepadatan 3.331 jiwa per km². Dari segi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Cimanggung sebanyak 2.764 jiwa, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Jatigede sebanyak 222 jiwa.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk
serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten
Sumedang Tahun 2022

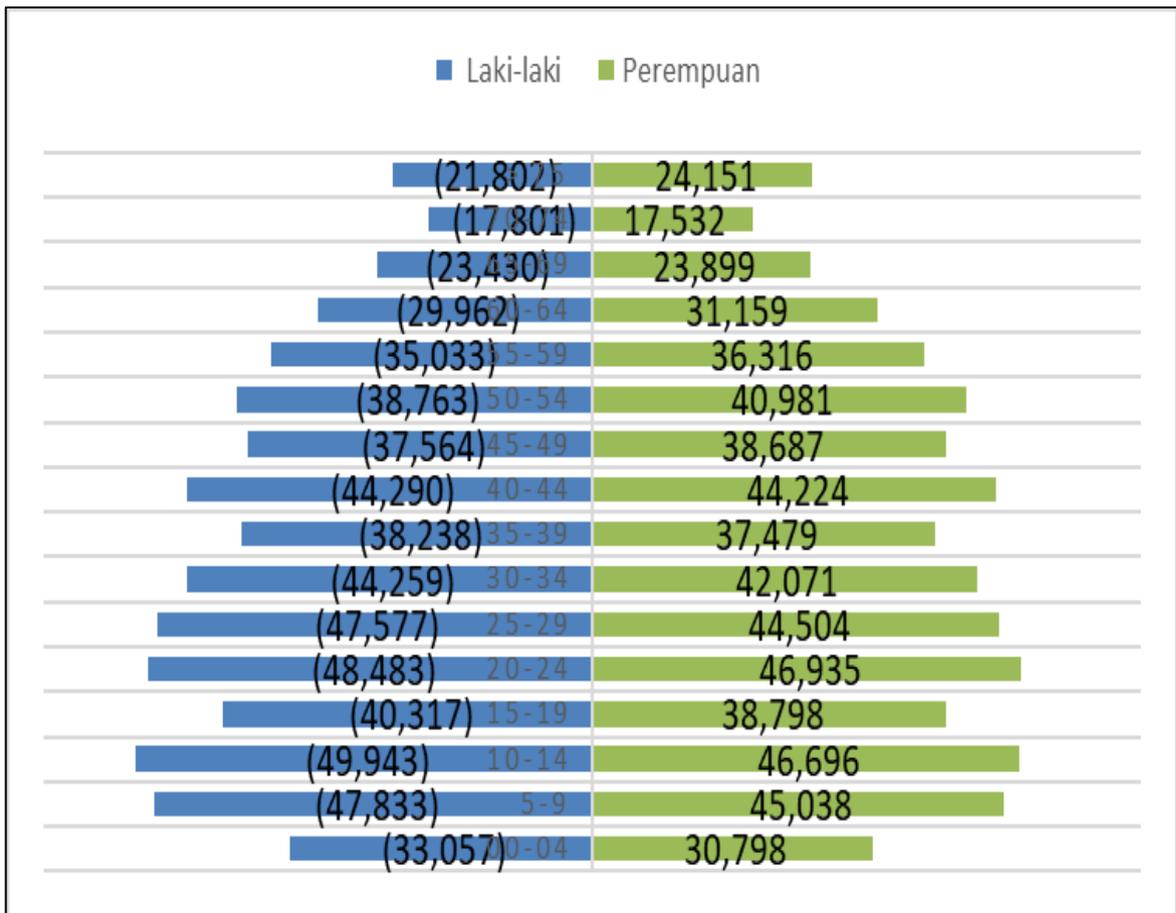
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Pertumbuhan
1	Wado	44.983	84,27	534	729
2	Jatinunggal	46.486	72,12	645	674
3	Darmaraja	37.597	49,38	762	647
4	Cibugel	25.174	59,52	423	294
5	Cisitu	31.090	65,03	478	541
6	Situraja	43.135	43,23	998	883
7	Conggeang	29.409	106,98	275	516
8	Paseh	38.731	31,62	1.225	761
9	Surian	12.009	70,88	169	289
10	Buahdua	33.477	107,68	311	536
11	Tanjungsari	86.931	44,86	1,938	1.948
12	Sukasari	34.381	41,82	822	664

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Pertumbuhan
13	Pamulihan	64.182	50,70	1,266	1.559
14	Cimanggung	90.551	55,55	1,630	2.764
15	Jatinangor	92.738	31,60	2,935	1.347
16	Rancakalong	41.924	55,07	761	918
17	Sumedang Selatan	82.123	92,51	888	1.247
18	Sumedang Utara	101.269	30,40	3,331	2.146
19	Ganeas	26.352	22,90	1,151	459
20	Tanjungkerta	35.285	43,72	807	686
21	Tanjungmedar	26.956	60,67	444	525
22	Cimalaka	63.397	43,29	1,464	1.118
23	Cisarua	21.349	17,71	1,205	282
24	Tomo	23.623	84,74	279	322
25	Ujungjaya	31.780	86,23	369	496
26	Jatigede	22.688	106,24	214	222
Total Kabupaten		1.187.620	1.558,72	762	22.573

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2023)

Selanjutnya penduduk di Kabupaten Sumedang dapat dianalisis berdasarkan struktur umurnya sebagaimana digambarkan dalam Gambar 2.5.

Gambar 2.5
Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2022



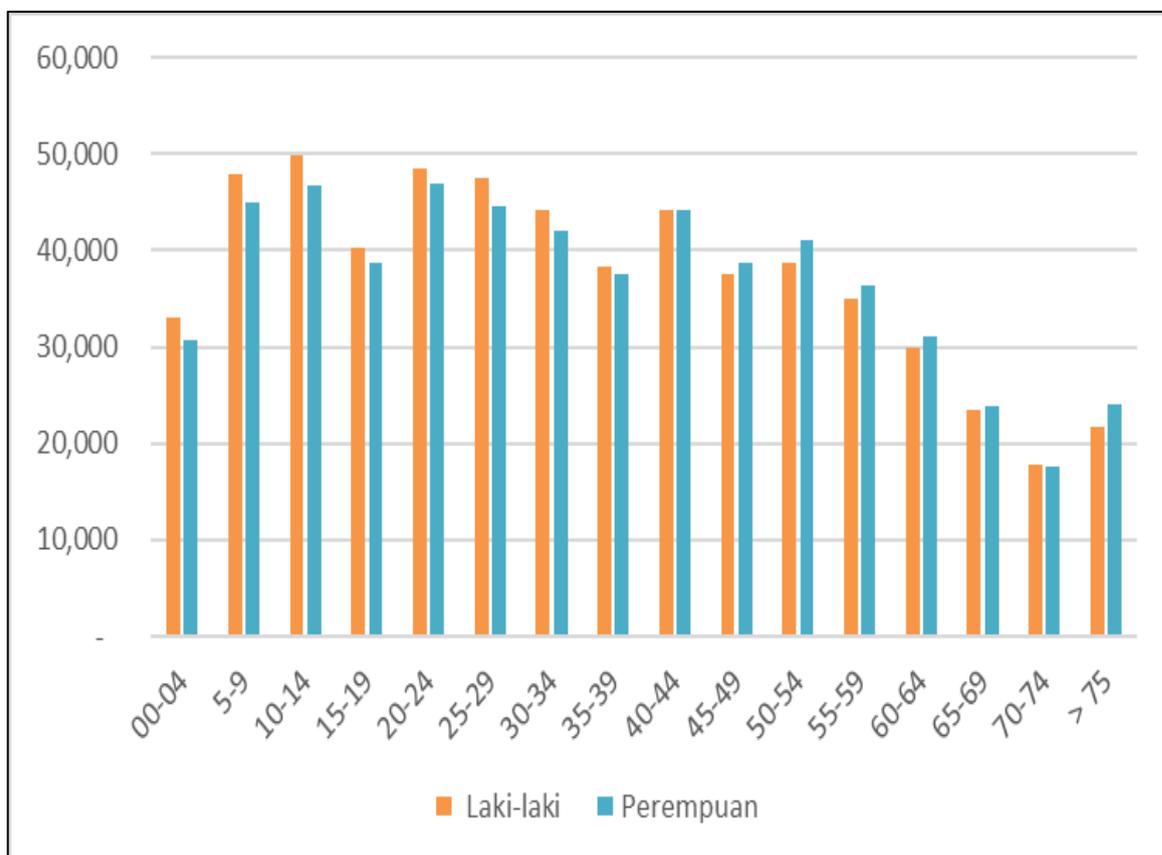
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2023)

Terlihat dari bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga, Penduduk Kabupaten Sumedang dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0 – 14 tahun) sebesar 26,48 persen, jumlah penduduk yang berusia produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 67,83 persen, dan jumlah penduduk lansia (\geq 65 tahun) tergolong kecil yaitu 10,83 persen. Dengan struktur seperti tersebut diatas merupakan bonus demografi bagi Kabupaten Sumedang apabila bisa memanfaatkan struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna.

Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga digunakan untuk melihat Angka Beban Tanggungan (ABT). Pada tahun 2022 ABT di Kabupaten

Sumedang sebesar 55 persen. Angka ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat 55 orang usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang. Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan ABT Tahun 2021 sebesar 47 persen.

Gambar 2.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

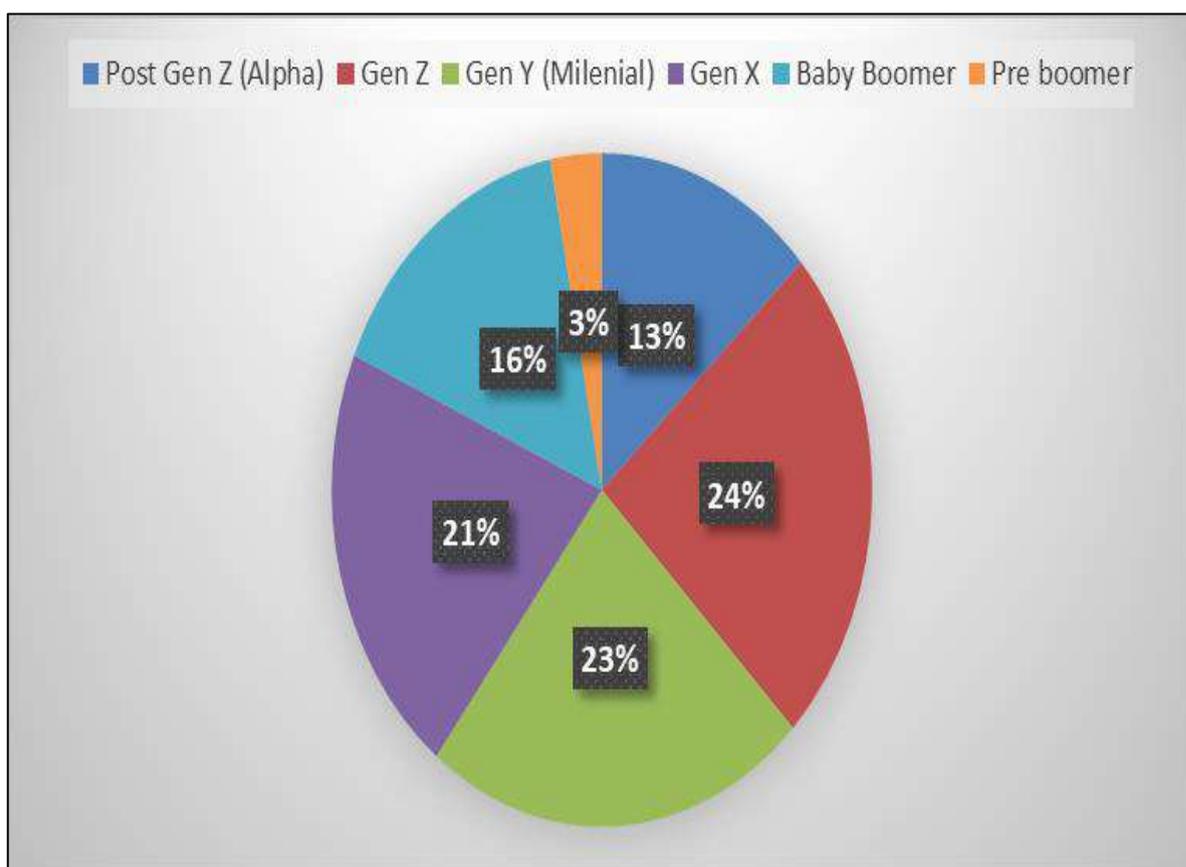


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang (2023)

Dari Gambar 2.6 dapat dilihat bahwa untuk penduduk laki-laki jumlah terbesar berada pada rentang umur 10 – 14 Tahun sebanyak 49.943 jiwa dengan proporsi sebesar 4,20%, dan jumlah penduduk Laki-laki terendah berada pada rentang umur 70 - 74 Tahun sebanyak 17.801 jiwa atau sebesar 1,50%. Begitu pula bagi penduduk perempuan, jumlah terbesar berada di rentang usia 20 - 24 Tahun sebanyak 46,935 jiwa atau 3,95% dari jumlah total penduduk, sedangkan jumlah terkecil berada di rentang usia 70 – 74 Tahun sebanyak 17.532 jiwa atau 1,48%. Jika dilihat dari data di atas, Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten berpopulasi tinggi dengan jumlah usia produktif (15 sampai 64 Tahun) yang sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini,

Kabupaten Sumedang diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan mutu Pendidikan diperlukan sehingga kedepannya masyarakat Sumedang menjadi masyarakat yang maju. Oleh karena itu sebaiknya Pemerintah Daerah harus dapat mengelola dan memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya, karena jika tidak dikelola dan dimanfaatkan atau tidak adanya sistem serta persiapan yang baik akan menyebabkan peningkatan angka pengangguran.

Gambar 2.7
Struktur Umur Penduduk Kabupaten Sumedang
Tahun 2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang (diolah) (2023)

Berdasarkan Gambar 2.7 menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 komposisi penduduk sesuai struktur umur didominasi oleh generasi Z atau tahun kelahiran 1997-2012 sebanyak 288.564 orang atau 24% dari jumlah total penduduk dengan kisaran usia 10 sampai dengan 25 tahun.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

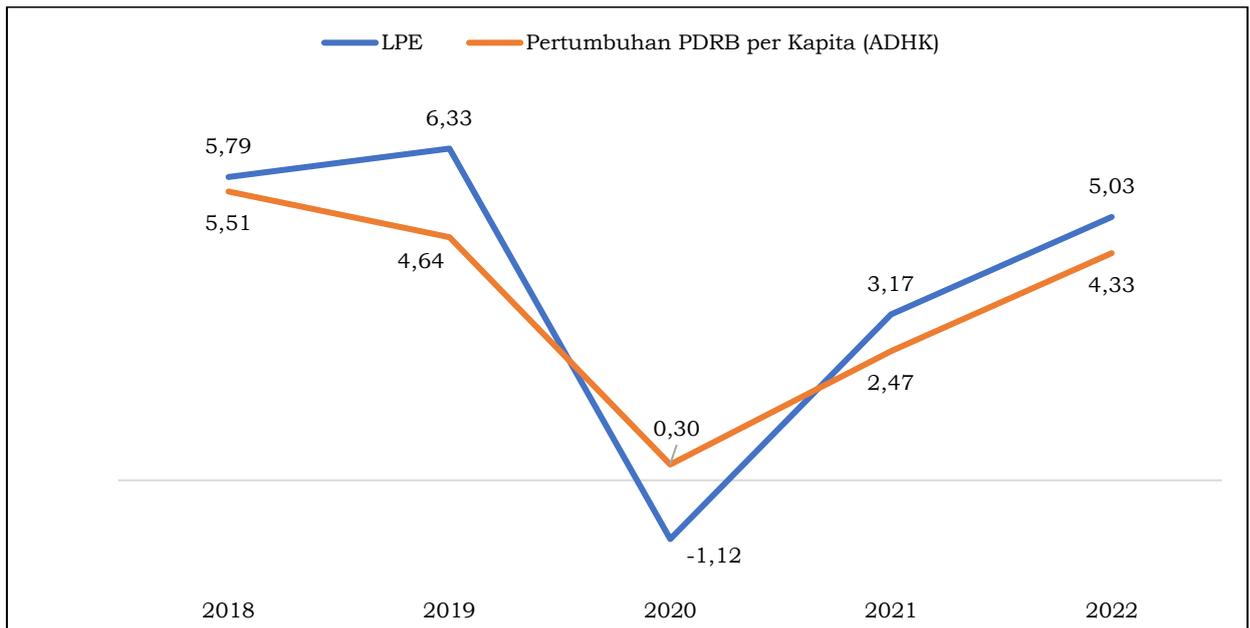
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Indikator *Impact/Makro*)

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang sudah menunjukkan tren positif sejak berkontraksi akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Berkat upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, di tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang tahun 2022 mampu mencapai 5,03 % dari target 4,70 - 5,70 atau meningkat sebesar 1,86 persen poin atau meningkat 58,68 persen dibandingkan capaian tahun 2021.

PDRB per kapita juga tumbuh 4,36% (ADHK) atau naik 2,33 juta rupiah (ADHB) menjadi 34,46 juta rupiah dari target 32,0 - 33,8 juta rupiah. Capaian ini tentu sudah melampaui target karena pencapaian PDRB yang kembali tumbuh setelah pandemi. Dilihat dari nilai harga konstan, pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Sumedang masih bisa lebih cepat dari Jawa Barat (4,12%), meski secara nilai nominal atau harga berlaku masih berada di bawah Jawa Barat yang mencapai 49,04 juta rupiah. Masih tertinggalnya PDRB per kapita Kabupaten Sumedang disebabkan rendahnya kontribusi pada PDRB Jawa Barat yang didominasi wilayah industri seperti Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Karawang, serta wilayah sentra perdagangan dan jasa seperti Kota Bandung.

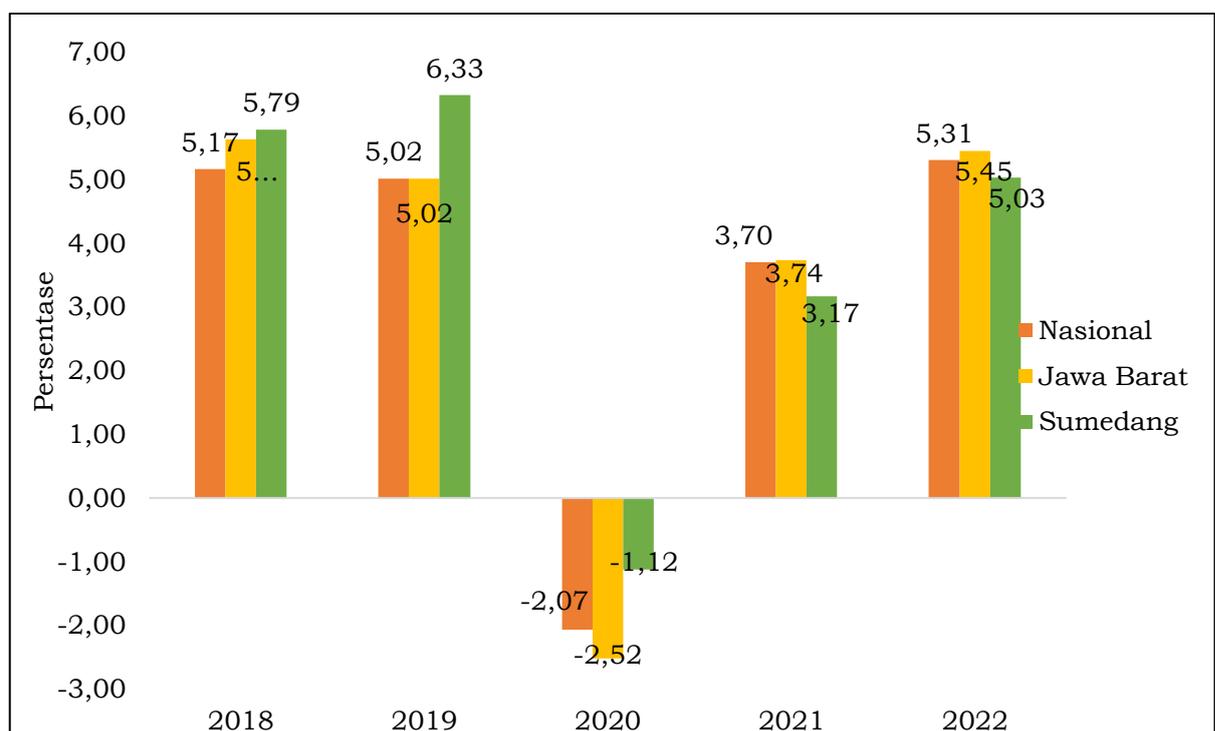
Gambar 2.8
Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita (ADHK)
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2023)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pasca pandemi *Covid-19* menjadi lebih lambat dari pertumbuhan di level regional Jawa Barat dan nasional. Padahal sebelum pandemi mampu tumbuh lebih cepat, bahkan di saat awal pandemi *Covid-19* (2020) masih bisa menahan kontraksi yang lebih baik.

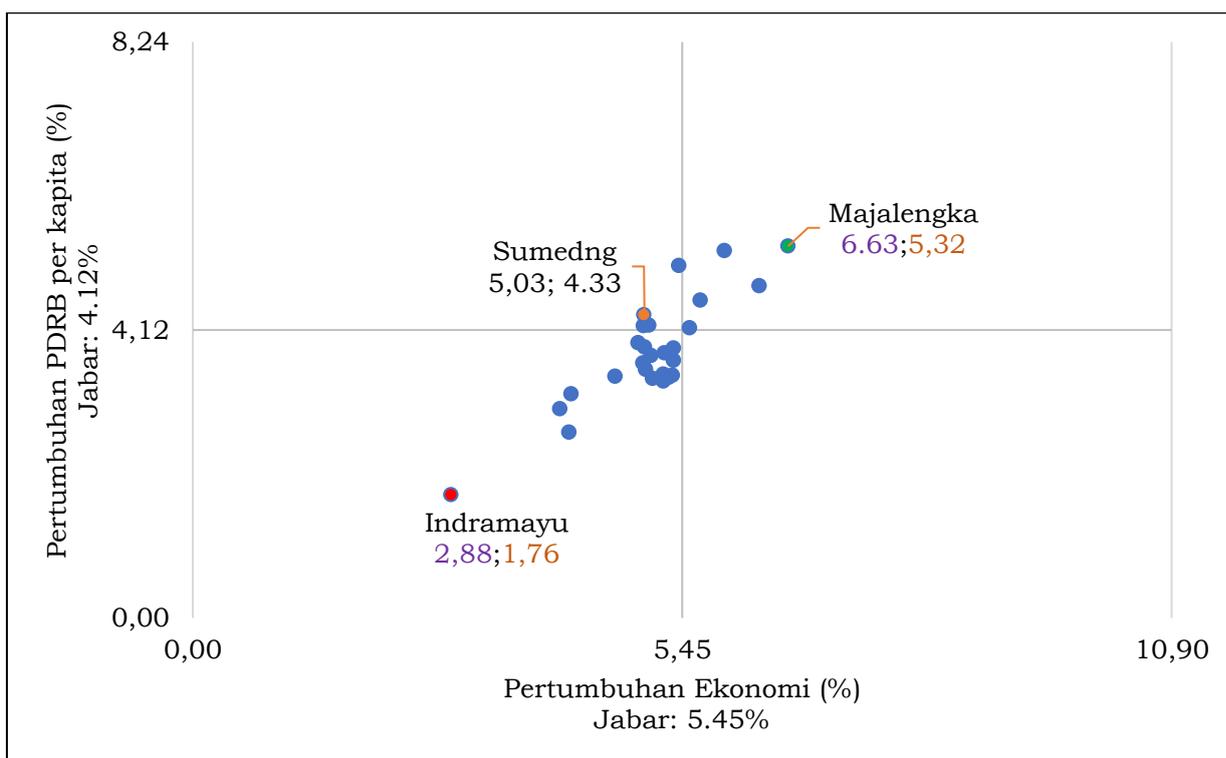
Gambar 2.9
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat, dan Sumedang



Sumber: BPS (2023)

Jika dibandingkan secara lebih luas di tingkat regional Jawa Barat, posisi Kabupaten Sumedang ada di kuadran 2 (dua), yaitu kelompok kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata Jawa Barat, namun pertumbuhan PDRB per kapita lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rakyat secara agregat relatif lebih baik meskipun pertumbuhan ekonomi belum secepat ketika tidak terjadi guncangan pada perekonomian. Sebagian besar kabupaten kota bahkan berada di kuadran 3 (tiga) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita berada di bawah rata-rata Jawa Barat.

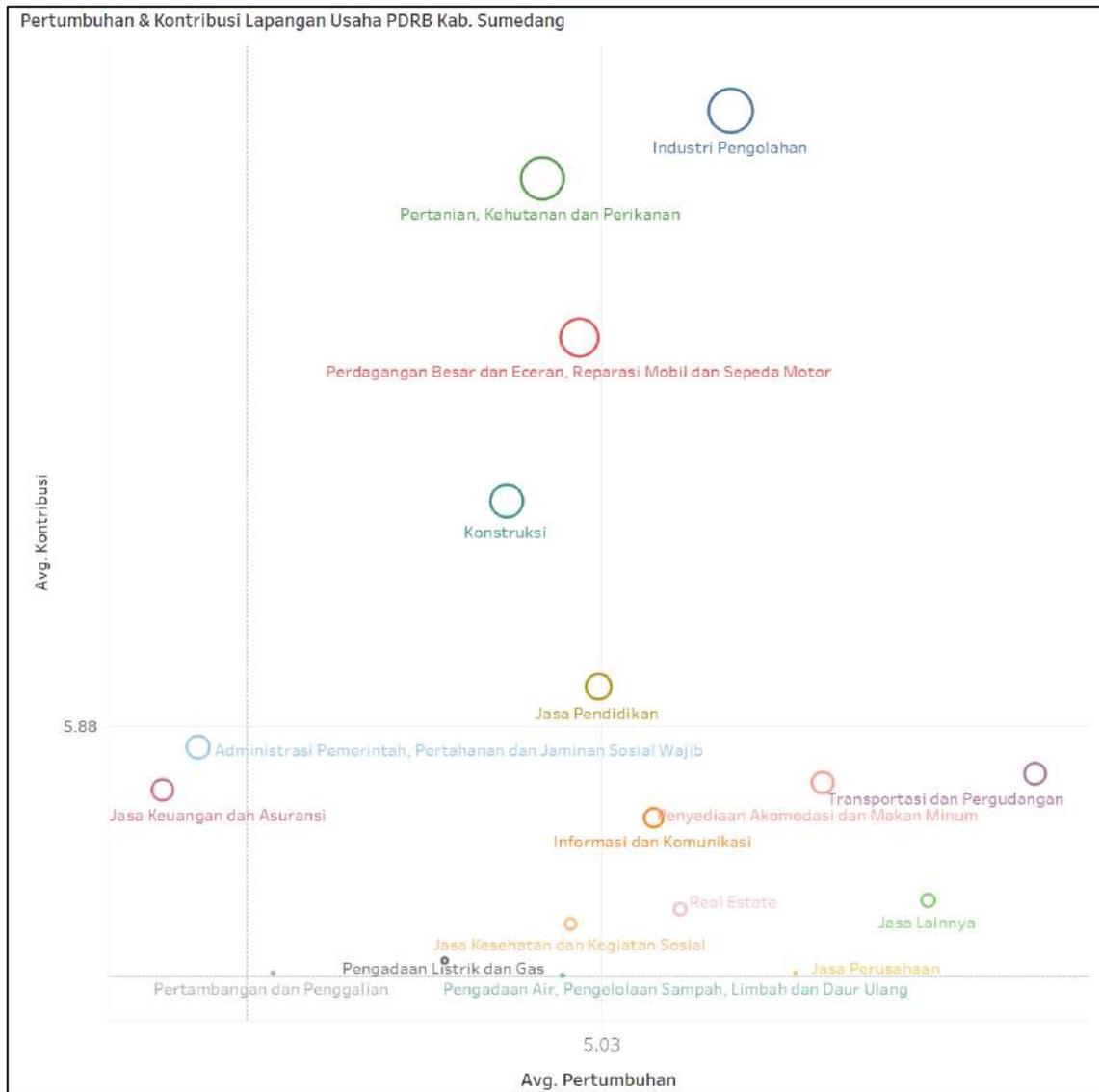
Gambar 2.10
Pemetaan Posisi Kab/kota di Jabar Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Masih lebih lambat nya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan regional Jawa Barat, dapat dijelaskan dengan melihat struktur PDRB berdasarkan lapangan usaha dimana masih terdapat dua sektor yang mengalami kontraksi pada Tahun 2022, yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanian, dan Jaminan Sosial Wajib, serta sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, masing-masing berkontraksi menjadi -0,69% dan -1,20%.

Gambar 2.11
Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB
Kabupaten Sumedang Tahun 2022



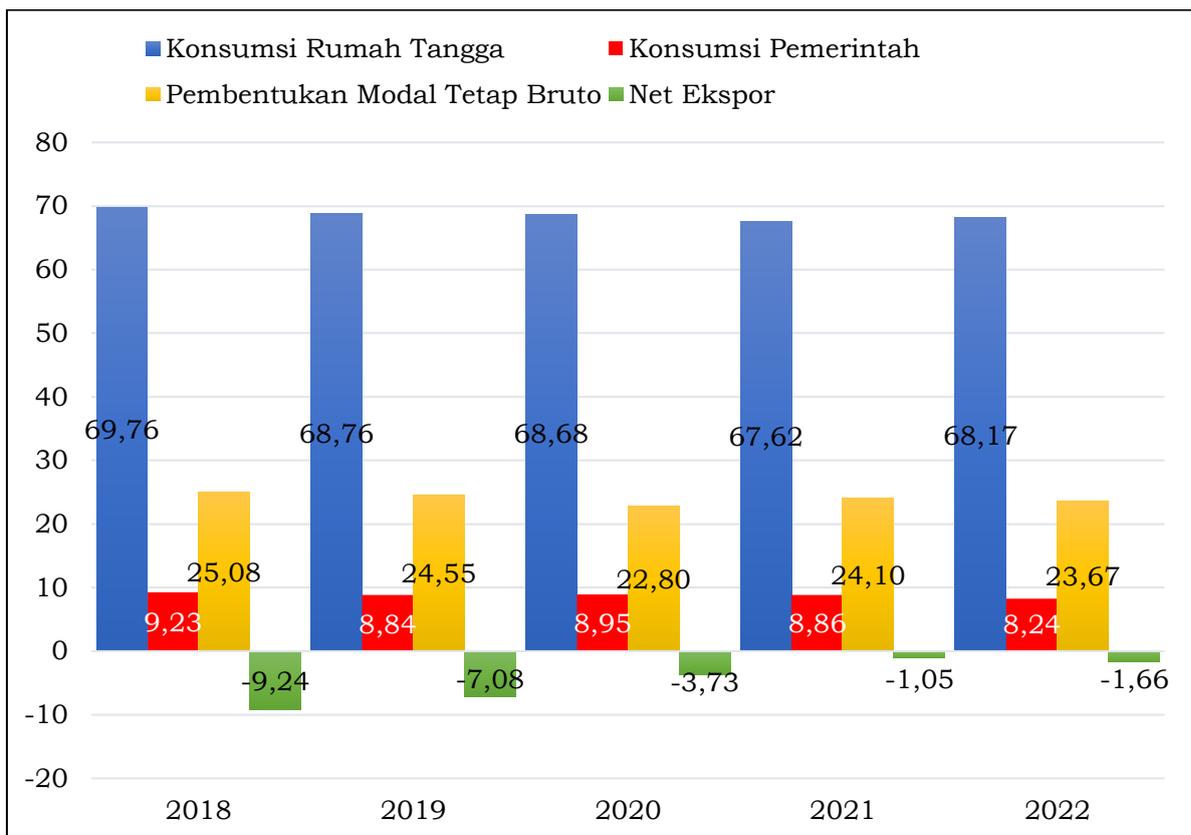
Sumber : BPS, 2023 (diolah)

Lapangan usaha utama di Kabupaten Sumedang tidak banyak mengalami perubahan struktural, dimana sektor yang mendominasi masih pada sektor industri pengolahan, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Perubahan yang terjadi hanya pada kontribusi terbesar yang bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri sejak tahun 2019. Sektor lain yang dipandang penting untuk mendukung upaya Kabupaten Sumedang menjadi kabupaten pariwisata adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang perlu mendapat perhatian khususnya dalam mendorong inovasi dan kolaborasi

pengembangan ekonomi lokal yang menjadi salah satu arah kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2024.

Adapun PDRB dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama perekonomian Kabupaten Sumedang sekalipun proporsinya menunjukkan tren menurun, namun kembali meningkat di tahun 2022 yang menandai pulihnya konsumsi masyarakat. Konsumsi rumah tangga yang tinggi akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, konsumsi rumah tangga yang tinggi juga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha di Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.12
Proporsi Komponen Pengeluaran PDRB (%)

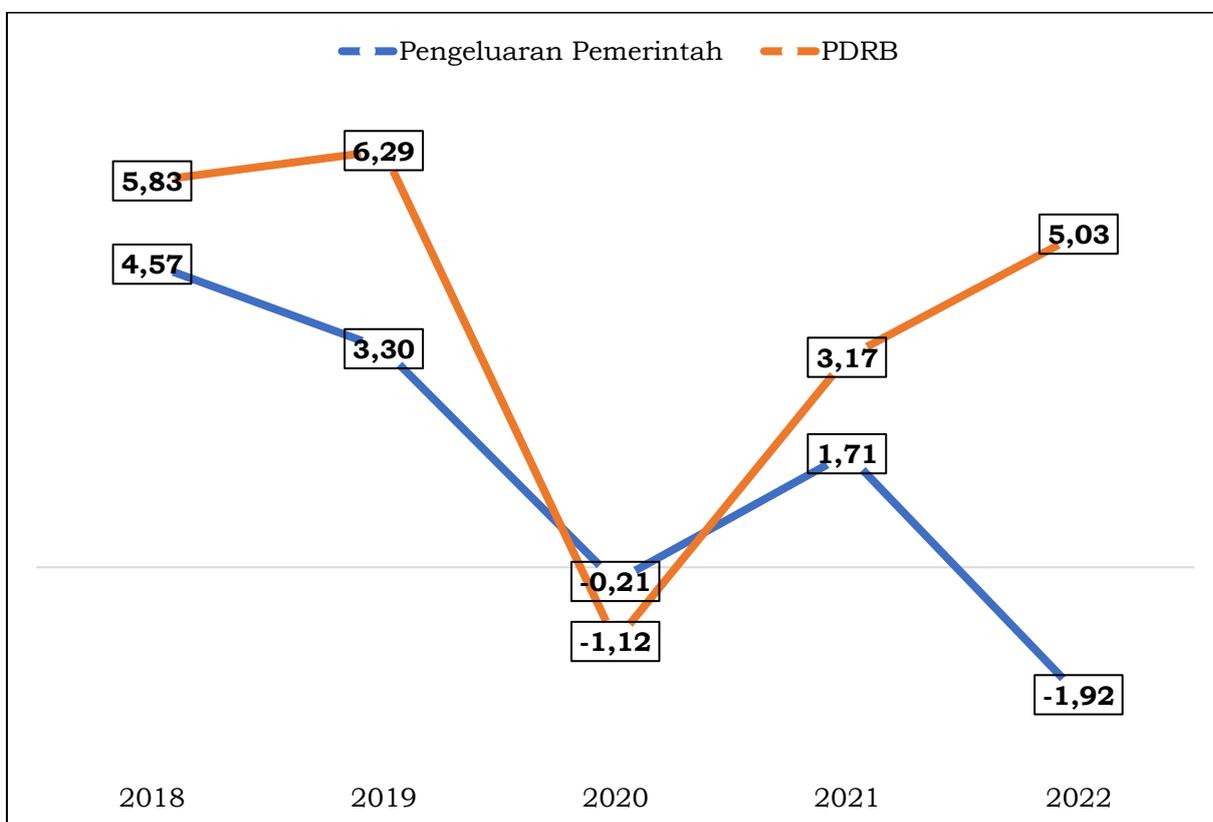


Sumber: BPS, 2023

Pengeluaran pemerintah proporsinya semakin mengecil dan tumbuh lebih lambat dari PDRB mengindikasikan kapasitas fiskal semakin terbatas. Berdasarkan hasil kajian CEDS Unpad (2020), pengeluaran pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan klasifikasi belanja selama kurun 2010-2019, sebagian alokasi

belanja sudah searah dengan target dimana peningkatan pengeluaran berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM yang lebih tinggi, dan berkorelasi dengan penurunan kemiskinan. Namun, sebagian besar klasifikasi belanja lainnya belum memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

Gambar 2.13
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah dan PDRB (%)



Sumber: BPS, 2023

Perbaikan perencanaan dan penganggaran menjadi upaya yang harus dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat secara signifikan berdampak pada capaian semua indikator makro pembangunan yang lebih progresif meskipun kemampuan fiskal daerah semakin terbatas. Berdasarkan hasil kajian CEDS Unpad (2020), pengeluaran pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan klasifikasi belanja selama kurun 2010-2019, sebagian alokasi belanja sudah searah dengan target dimana peningkatan pengeluaran berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM yang lebih tinggi, dan berkorelasi dengan penurunan kemiskinan. Namun, sebagian besar klasifikasi belanja lainnya

belum memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

Perbaikan perencanaan dan penganggaran menjadi upaya yang harus dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat secara signifikan berdampak pada capaian semua indikator makro pembangunan yang lebih progresif meskipun kemampuan fiskal daerah semakin terbatas. Oleh karena itu, penerapan penganggaran melalui Perencanaan Bebas Kinerja (*Performance Based Budgeting*) harus ditingkatkan efektivitasnya di seluruh unit pemerintahan. Capaian SPBE Kabupaten Sumedang yang pada tahun 2023 menjadi terbaik dibandingkan seluruh kabupaten kota di Indonesia dengan skor 3,84, dapat menjadi modal utama untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan efisien.

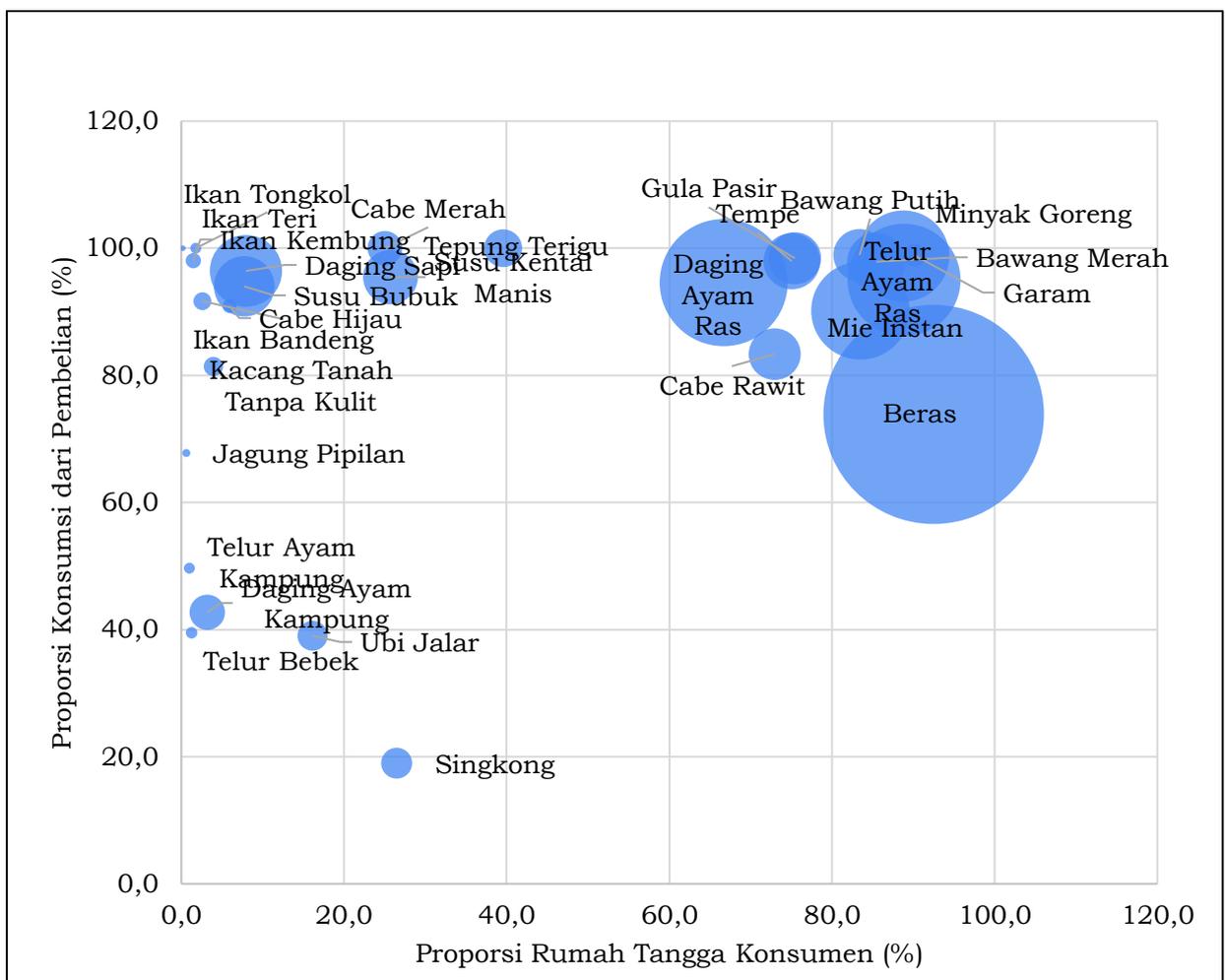
Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sekalipun proporsinya memperlihatkan tren menurun, namun investasi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Investasi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Kemudahan investasi di Kabupaten Sumedang perlu ditingkatkan untuk mengimbangi Upah Minimum Kabupaten Sumedang yang kurang kompetitif jika dibandingkan kabupaten tetangga di wilayah timur. UMK tahun 2023 untuk Kabupaten Sumedang adalah Rp 3.471.134, sementara Kabupaten tetangga di wilayah timur, yaitu Kabupaten Majalengka hanya Rp 2.180.602.

Selain itu, *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Sumedang di tahun 2022 masih berada di angka 4,9 sehingga belum cukup efisien untuk berinvestasi di Sumedang juga perlu menjadi perhatian. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan yang dapat menekan biaya transportasi dan mempermudah konektivitas, penyediaan air bersih dan energi yang memadai, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, termasuk pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri yang akan dikembangkan.

Net ekspor masih bernilai negatif sekalipun sudah semakin baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun, mengindikasikan bahwa produk yang masuk ke wilayah Sumedang masih lebih tinggi dibandingkan produk yang dijual ke luar wilayah Sumedang, baik komoditas pangan maupun non pangan.

Bidang Litbang Bappppeda (2022) memetakan konsumsi bahan pangan pokok rumah tangga dalam modul konsumsi Susenas bulan Maret 2021 sehingga diperoleh informasi komoditas apa saja yang banyak dikonsumsi dan seberapa besar dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Pemetaan komoditas pangan pokok tersebut disajikan pada Gambar 2.14.

Gambar 2.14
Proporsi Konsumen dan Konsumsi Pangan Pokok di Kabupaten Sumedang



Sumber: Litbang Bappppeda, 2022

Dari sekian banyak kebutuhan pangan yang dikonsumsi rumah tangga di Kabupaten Sumedang, hanya beras, daging ayam, dan cabai rawit yang dapat dipenuhi secara mandiri oleh produksi

daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Sumedang terhadap produk luar daerah masih tinggi.

Adapun sektor dominan di Kabupaten Sumedang meskipun sudah terjadi peralihan kontributor utama dari sektor pertanian ke industri, namun perbedaan nilai kedua sektor tidak berbeda jauh. Dengan kata lain, peran sektor industri di Kabupaten Sumedang belum menjadi motor penggerak ekonomi wilayah yang dominan seperti di wilayah industri, melainkan sebagai transisi pergeseran struktur ekonomi. Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar untuk mengembangkan wilayah menjadi salah satu kawasan industri seiring dengan pengembangan infrastruktur jalan tol Cisumdawu yang akan beroperasi penuh di tahun 2023 sehingga meningkatkan aksesibilitas arus barang, modal, dan penduduk. Selain itu beroperasinya bandar udara internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka dan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Kabupaten Sumedang akan semakin meningkatkan potensi pengembangan ekonomi di masa depan. Saat ini, pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Sumedang didorong oleh peningkatan aktivitas perekonomian wilayah yang tercermin dalam PDRB, dan jumlah penduduk yang relatif terkendali. Berdasarkan Laporan Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2023, laju pertumbuhan penduduk Sumedang hanya 0,72%, lebih rendah dari Jawa Barat yang mencapai 1.33%.

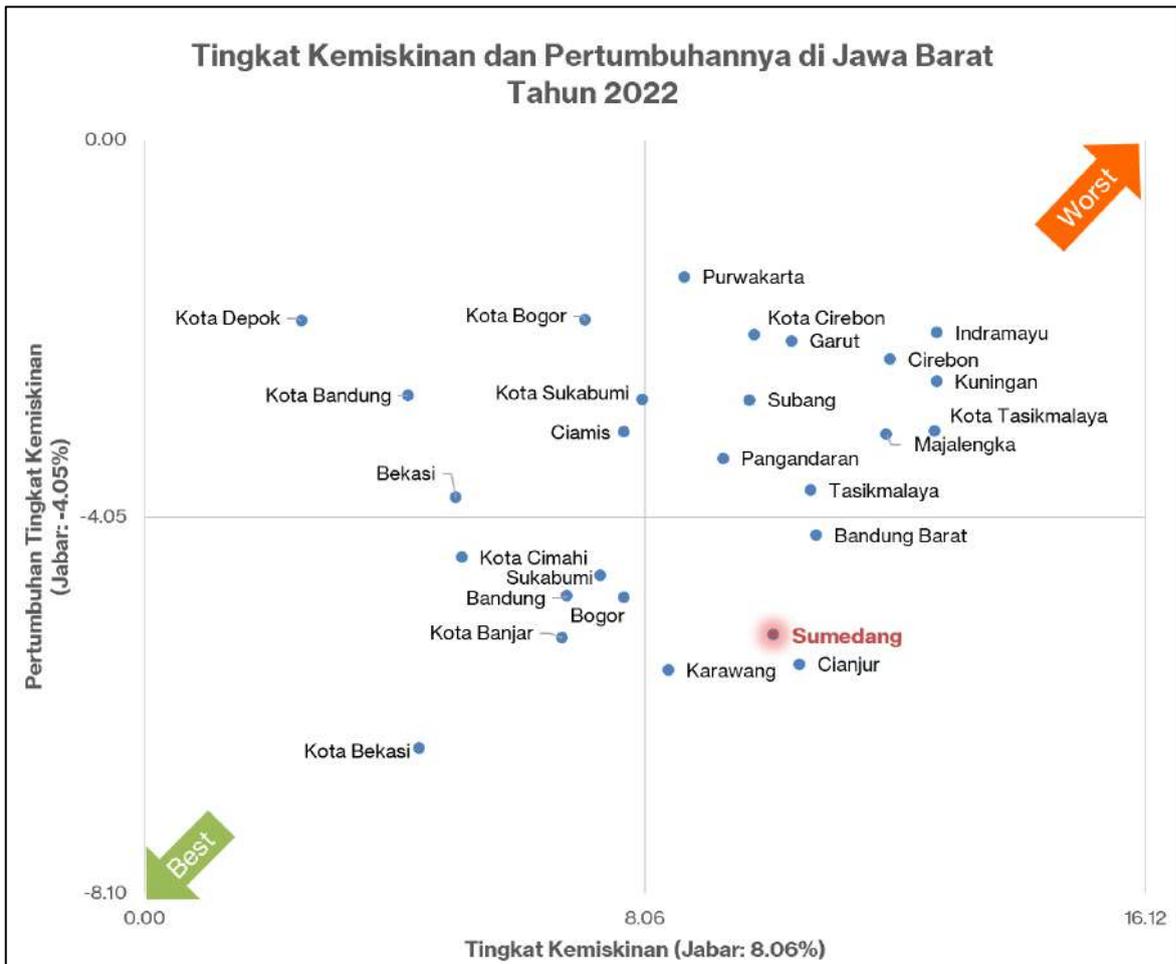
Kemiskinan biasanya diukur dengan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau dengan kata lain kemiskinan dipandang dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang tahun 2022 yaitu 10,14% dari target 10,41 - 9,54 % (menurun 5% dibandingkan tahun 2021), sehingga gap tingkat kemiskinan dari tahun 2021 ke 2022 yakni -0,57% poin menjadi ke-2 terbaik di Jawa Barat. Progress penurunan kemiskinan yang relatif lebih baik pada tahun 2022 juga mengindikasikan program pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang lebih efektif meski jika dilihat dari capaiannya masih lebih tinggi dari Jawa Barat (Gambar 2.15).

Gambar 2.15
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang



Sumber: BPS 2023 (diolah)

Gambar 2.16
Komparasi Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat



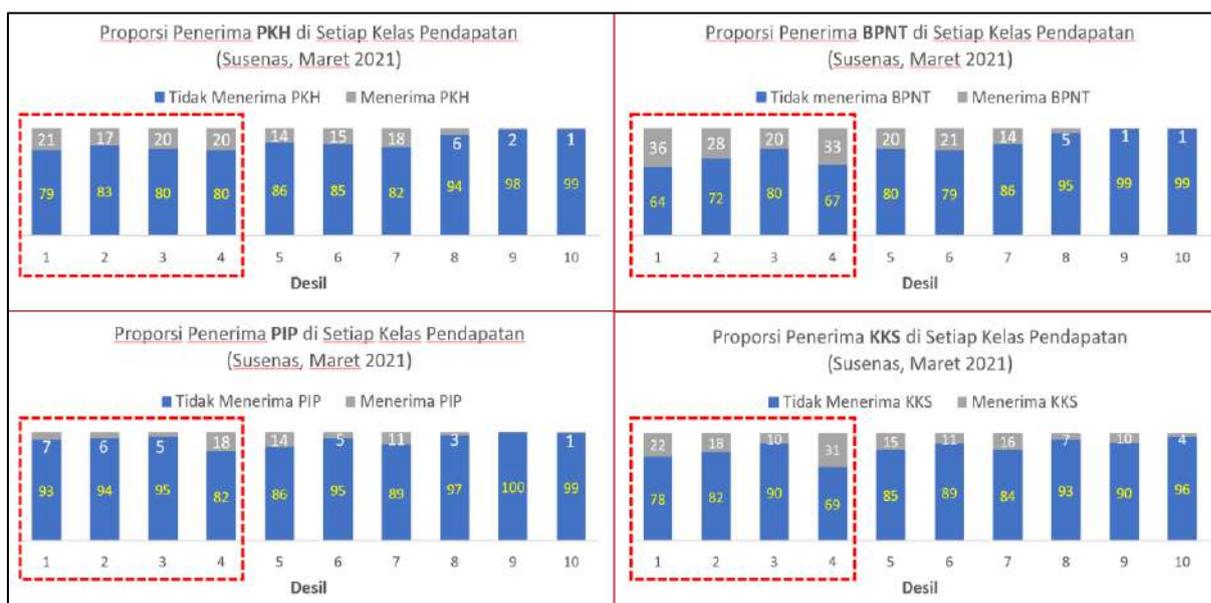
Sumber: BPS 2023 (diolah)

Menurunnya kemiskinan di Kabupaten Sumedang sejalan dengan pencapaian indikator pembangunan lainnya seperti

menurunnya pengangguran karena kondisi perekonomian yang sudah mulai pulih dari pandemi *Covid-19* sehingga sebagian besar lapangan usaha, khususnya yang banyak menyerap tenaga kerja seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri, dan sektor konstruksi dapat kembali tumbuh. Implikasi meningkatnya aktivitas perekonomian adalah meningkatnya pengeluaran per kapita masyarakat sehingga lebih sedikit penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Hal ini karena tingkat kemiskinan diukur dari pengeluaran per kapita untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan (Gambar 2.16).

Namun demikian, efektivitas penyaluran bantuan sosial masih perlu diperbaiki mengingat masih terjadi *inclusion* dan *exclusion error*, dimana penerima bantuan belum sepenuhnya layak atau sebaliknya ada sebagian penduduk yang seharusnya menerima bantuan tapi belum menerima bansos. Berdasarkan data Susenas Maret 2021, distribusi program perlindungan sosial (perlinsos) masih belum efektif diterima oleh rumah tangga pada desil terendah, dimana proporsi penerima perlinsos pada Bottom 40 adalah PIP: 51%, KKS: 57%, PKH: 58%, dan BPNT: 66% (Gambar 2.17).

Gambar 2.17
Proporsi Penerima Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Sumedang

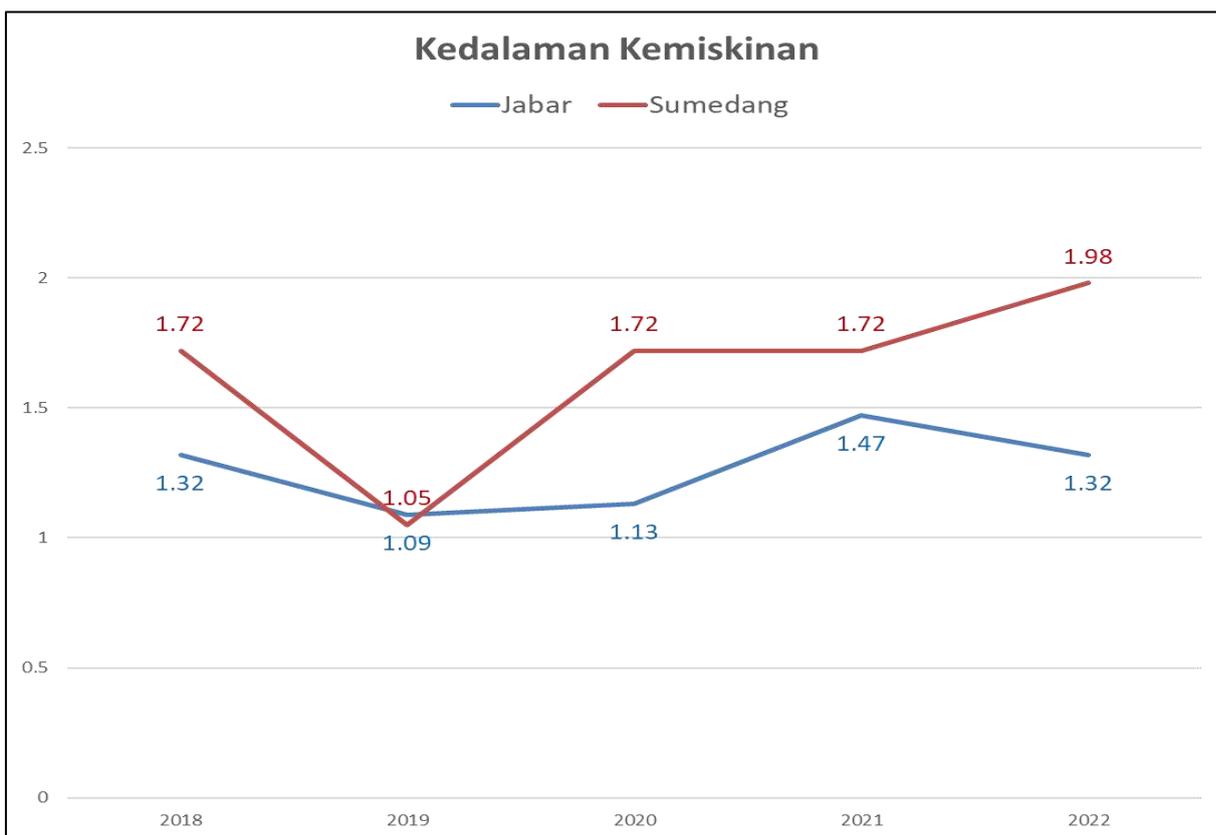


Sumber: Susenas 2021 (diolah)

Tingkat kemiskinan penduduk pun tidak lepas dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan Indeks

Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berikut adalah perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan antara Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

Gambar 2.18
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

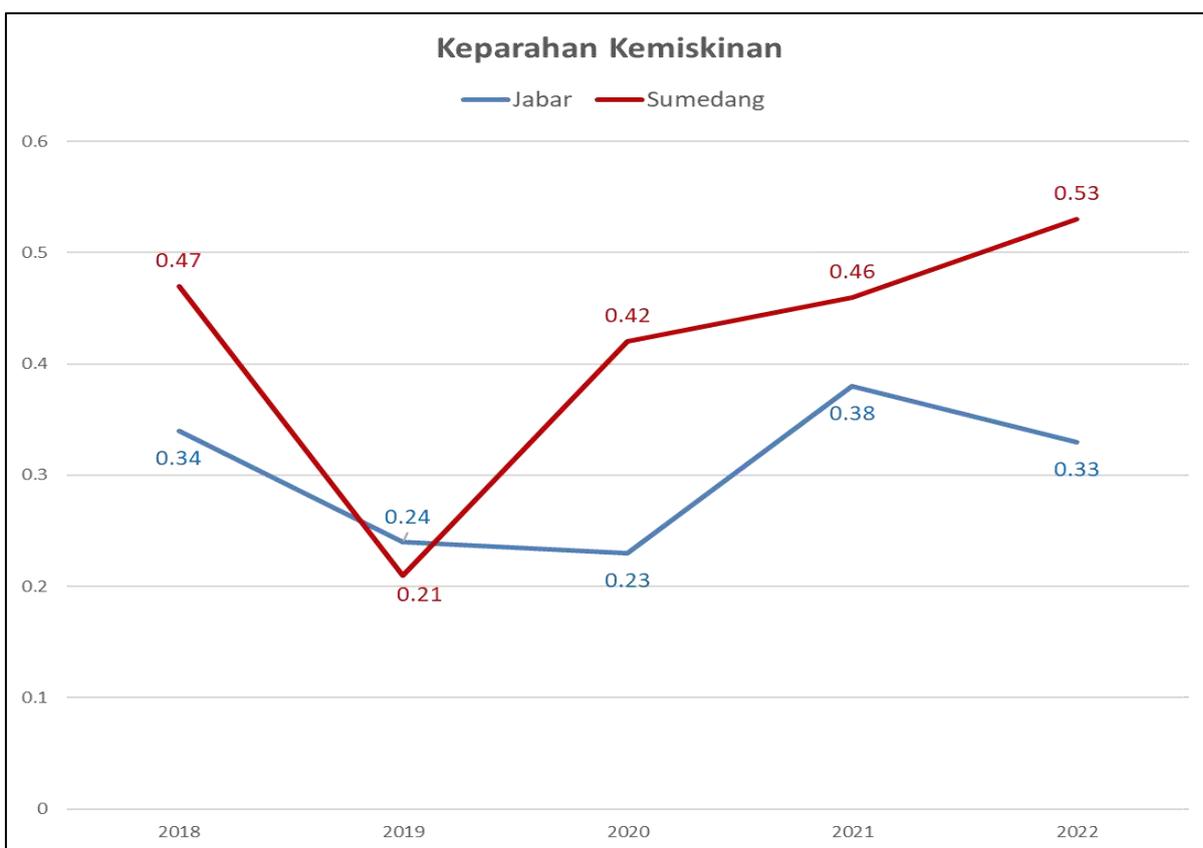


Sumber. BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2023)

Berdasarkan Gambar 2.18 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Sumedang yang lebih tinggi dari Jawa Barat, menunjukkan semakin besar effort yang diperlukan untuk mengeluarkan penduduk miskin dari kemiskinan, khususnya pasca pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketimpangan pengeluaran pendapatan masyarakat miskin di Kabupaten Sumedang masih belum membaik atau belum merata.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Sumedang juga cenderung meningkat. Capaian terendah P2 terjadi pada Tahun 2019 sebesar 0,21% lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 0,24%. Namun Tahun berikutnya capaian P2 meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sumedang yang lebih tinggi dari Jawa Barat, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin terutama dipicu adanya pandemi Covid-19. Gambar Indeks Keparahan Kemiskinan disajikan Gambar 2.19 sebagai berikut.

Gambar 2.19
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat

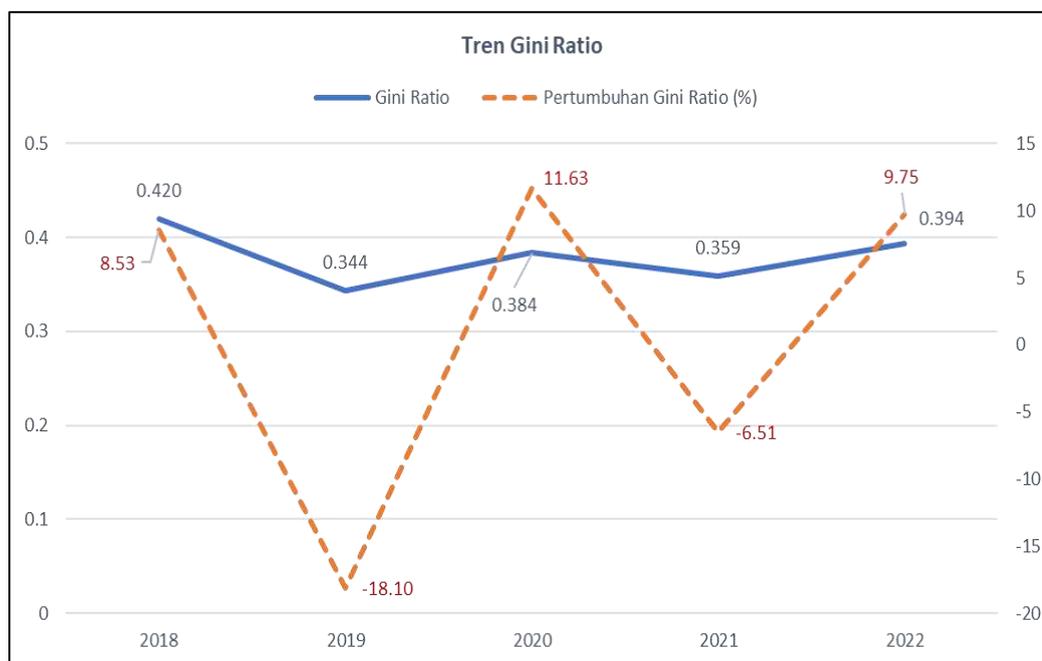


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2023)

Selain ketimpangan di antara penduduk miskin meningkat di tahun 2022, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat secara umum yang diukur dengan gini ratio juga masih fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Namun demikian, ketimpangan masih berada dalam kategori rendah ($< 0,4$) sejak 2019.

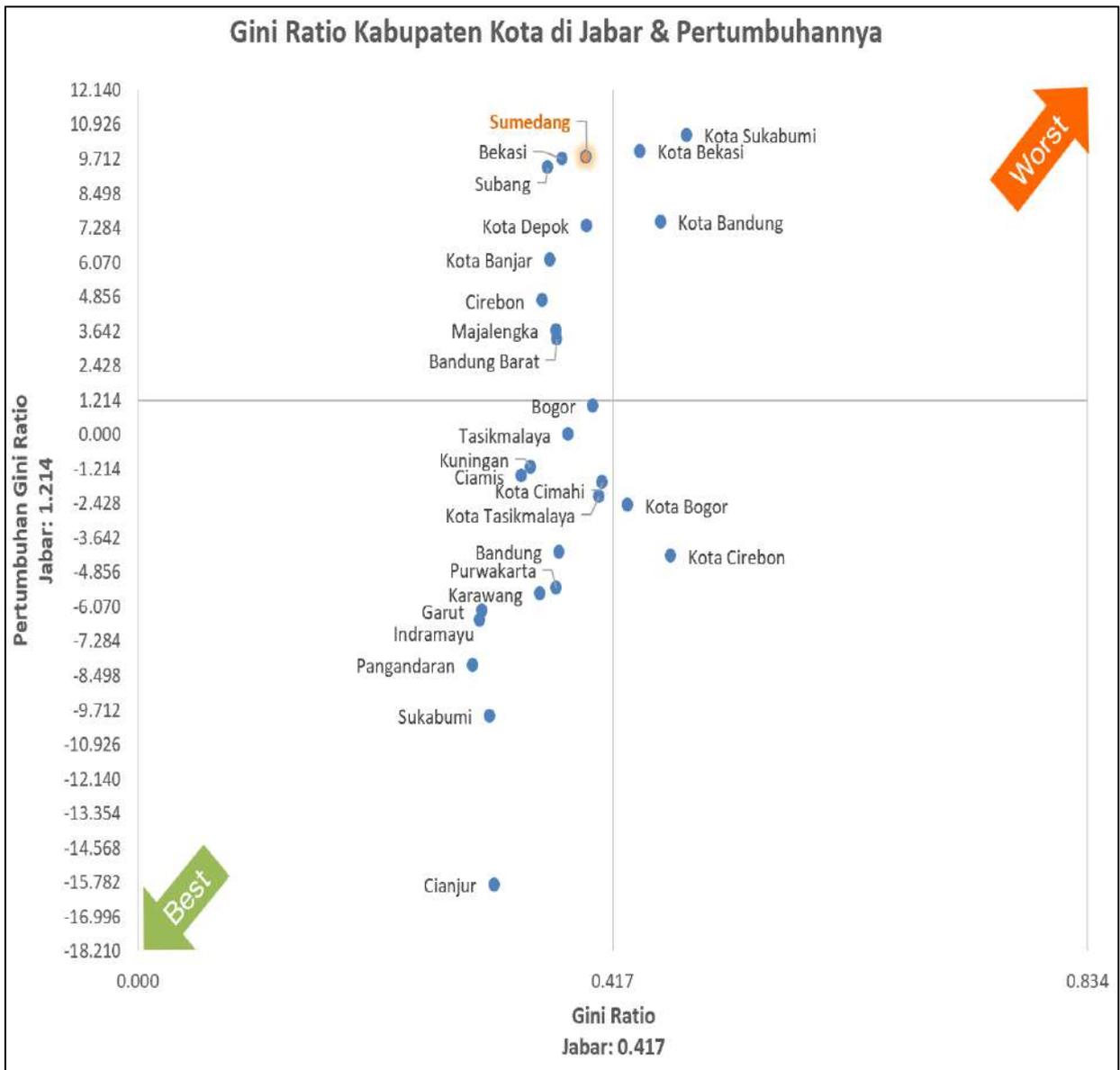
Gini ratio Kabupaten Sumedang tahun 2022 yaitu 0,394 poin dari target 0,38 poin - 0,35 poin (meningkat sebesar 0,035 poin dari capaian tahun 2021). Gini ratio Kabupaten Sumedang mengalami sedikit kenaikan tetapi masih dalam level rendah dan berada di bawah Provinsi Jawa Barat (0,417).

Gambar 2.20
Tren Gini Ratio Kabupaten Sumedang



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) (2023)

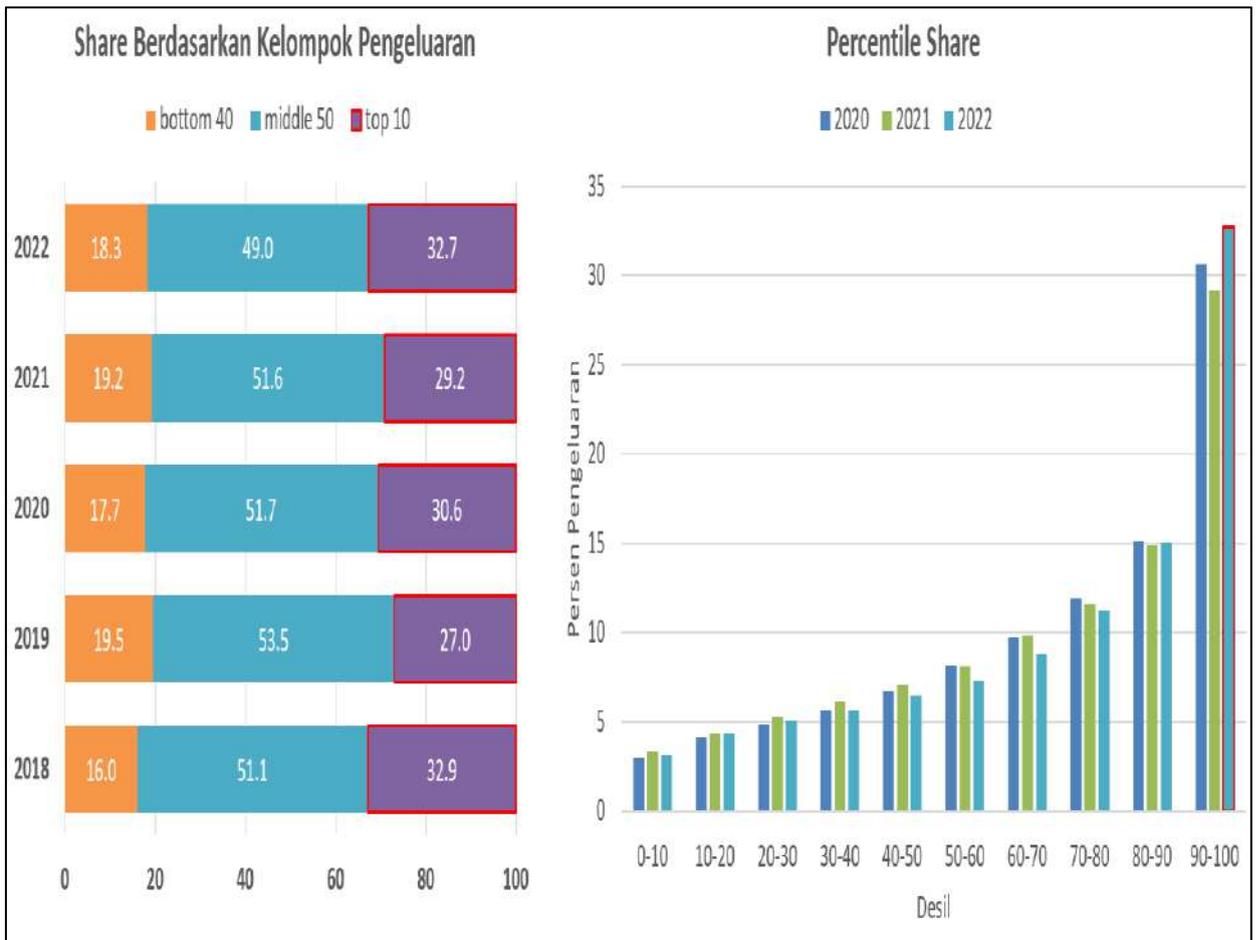
Gambar 2.21
Komparasi Gini Ratio Kabupaten Kota di Jawa Barat



Sumber: BPS 2023 (diolah)

Meningkatnya gini ratio Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 disebabkan peningkatan proporsi pada kelompok pendapatan tertinggi (desil 10) dari 29,2% menjadi 32,7%, sementara kelompok berpendapatan menengah dan 40% terbawah mengalami penurunan proporsi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi di 2022 lebih banyak dinikmati dan memperoleh manfaat yang lebih besar pada kelas ekonomi paling atas (paling kaya) sehingga ketimpangan distribusi pendapatan menjadi lebih lebar.

Gambar 2.22
Perbandingan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Sumedang



Sumber: Susenas 2018-2022 (diolah)

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, penduduk dengan kategori masuk dalam kemiskinan ekstrem berjumlah 401.758 orang atau 33,83%. Sesuai arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, kemiskinan ekstrem harus 0% pada Tahun 2024, sehingga diperlukan upaya percepatan penanganan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk dan Data Kemiskinan Ekstrem
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

Kecamatan	Penduduk Sumedang		Kemiskinan Ekstrem		Persentase Kemiskinan Ekstrem	
	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu
Pamulihan	22.918	64.182	9.495	32.898	41,43	51,26
Tanjungsari	29.853	86.931	8.835	32.716	29,60	37,63
Cimanggung	30.181	90.551	8.589	33.115	28,46	36,57
Sumedang Selatan	29.336	82.123	7.229	26.473	24,64	32,24
Sumedang Utara	34.880	101.269	7.114	26.696	20,40	26,66
Wado	15.904	44.983	5.768	21.384	36,27	47,54
Jatinunggal	17.362	46.486	5.514	19.245	31,76	41,40
Cimalaka	22.892	63.397	5.208	19.237	22,75	30,34
Rancakalong	15.734	41.924	5.058	17.708	32,15	42,24
Jatinangor	30.591	92.738	4.540	18.321	14,84	19,76
Situraja	15.975	43.135	4.394	16.041	27,51	37,19
Sukasari	12.493	34.381	4.223	14.359	33,80	41,76
Tanjungmedar	10.131	26.956	3.589	12.608	35,43	46,77
Cisitu	11.468	31.090	3.582	13.076	31,23	42,06
Paseh	14.151	38.731	3.240	12.192	22,90	31,48
Darmaraja	13.631	37.597	3.087	12.085	22,65	32,14
Tanjungkerta	13.232	35.285	2.689	9.568	20,32	27,12
Cibugel	8.800	25.174	2.683	10.573	30,49	42,00
Ganeas	9.210	26.352	2.472	9.303	26,84	35,30
Buahdua	13.389	33.477	2.362	8.027	17,64	23,98
Ujungjaya	12.480	31.780	2.160	7.377	17,31	23,21
Conggeang	12.004	29.409	1.922	6.818	16,01	23,18
Jatigede	9.065	22.688	1.914	6.402	21,11	28,22

Kecamatan	Penduduk Sumedang		Kemiskinan Ekstrem		Persentase Kemiskinan Ekstrem	
	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu
Cisarua	7.676	21.349	1.634	6.230	21,29	29,18
Tomo	8.979	23.349	1.554	5.426	17,31	22,97
Surian	4.788	12.009	1.031	3.580	21,53	29,81
Jumlah	427.123	1.187.620	109.886	401.758	25,73	33,83

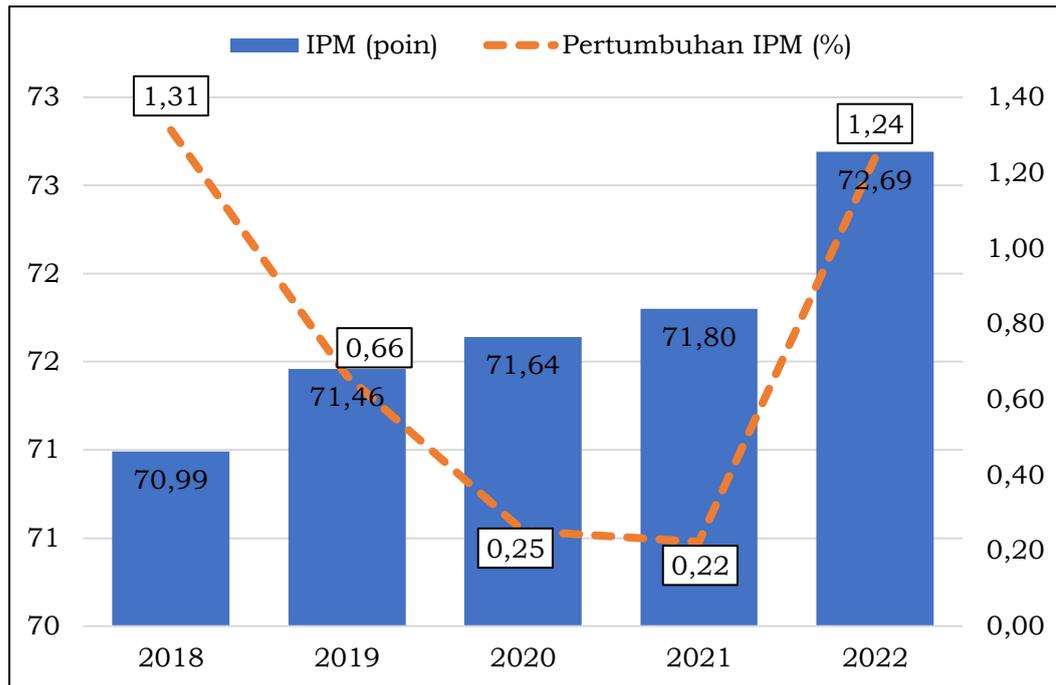
Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (diolah) (2023)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana masyarakat/penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Dengan pengukuran IPM terdapat 3 (tiga) manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan 3) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

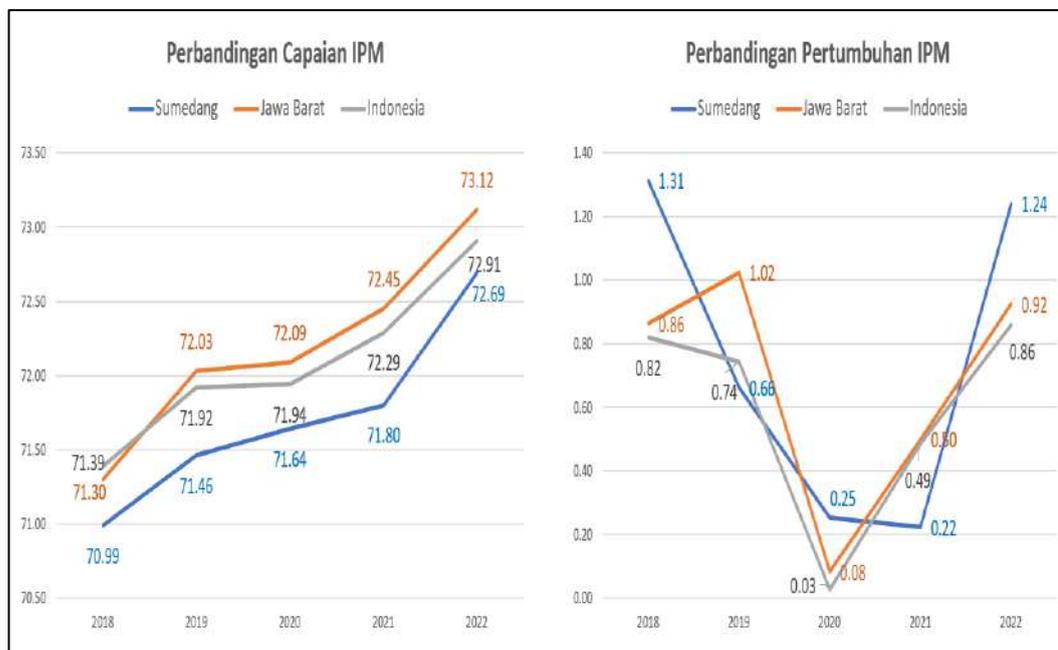
Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sumedang meningkat pada tahun 2022 mencapai 72,69 poin dari target 71,9 - 72,4 poin, atau meningkat 0,89 poin dari capaian tahun 2021. Posisi IPM Kabupaten Sumedang menempati posisi 11 (sebelas) dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dan menjadi ke-5 tercepat dilihat dari pertumbuhannya.

Gambar 2.23
IPM Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS 2023 (diolah)

Gambar 2.24
Komparasi IPM Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022



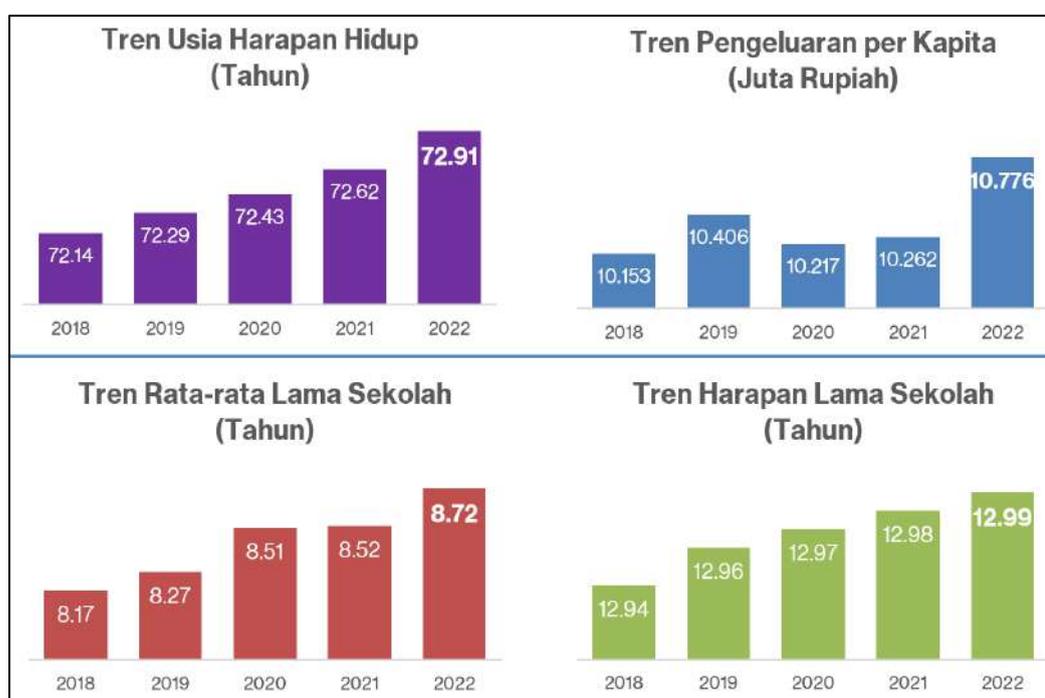
Sumber: BPS 2023 (diolah)

Capaian IPM Kabupaten Sumedang semakin mendekati nasional dan Jabar karena tumbuh lebih cepat di 2022. Peningkatan IPM Kabupaten Sumedang didorong oleh peningkatan komponen pembentuknya, terutama pengeluaran per kapita yang meningkat cukup tinggi dari 10,26 juta rupiah menjadi 10,78 juta rupiah atau tumbuh sekitar 5%. Peningkatan pengeluaran per

kapita mengindikasikan terjadinya pemulihan daya beli masyarakat setelah sebelumnya terdampak pandemi *Covid-19*.

Komponen lainnya juga mengalami peningkatan namun tumbuh lebih lambat, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan harapan lama sekolah masing-masing tumbuh 2,4%, 0,4%, dan 0,1%. Untuk meningkatkan IPM lebih cepat perlu akselerasi khususnya dari komponen yang tumbuh sangat lambat, yaitu harapan lama sekolah yang sejak 2014 hanya meningkat sekitar 0,01-0,02 per tahun sehingga di 2022 hanya mencapai 12,99 tahun.

Gambar 2.25
Tren Capaian Komponen IPM Kabupaten Sumedang



Sumber: BPS 2023

Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, sehingga AHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya serta meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Tinggi rendahnya AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 1) kondisi lingkungan; 2) ketersediaan pangan; 3) Pendidikan; dan 4) perekonomian masyarakat.

Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin baiknya status kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. Perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Sumedang mengalami tren positif setiap tahunnya walaupun peningkatannya tidak terlalu besar. Pada Tahun 2022, AHH Kabupaten Sumedang mencapai 72,91 tahun, artinya rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh penduduk yang lahir menjelang Tahun 2022 lebih lama 0,29 tahun dari tahun sebelumnya. Kenaikan AHH di Kabupaten Sumedang tidak lepas dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS Kabupaten Sumedang Tahun 2022 naik 0,01 Tahun dari tahun sebelumnya sehingga diperkirakan pada Tahun 2021 rata-rata anak yang berusia 7 (tujuh) tahun dan sudah masuk jenjang Pendidikan formal dapat memiliki harapan untuk menikmati Pendidikan selama 12,99 tahun atau setara dengan diploma.

Komponen lain dari IPM yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mempunyai pengertian jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas Pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Tahun 2022 RLS Kabupaten Sumedang sebesar 8,72 tahun, yang berarti rata-rata penduduk Sumedang yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 8,72 tahun atau lebih lama 0,20 tahun dari Tahun 2021. Asumsinya kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang telah mengalami perbaikan.

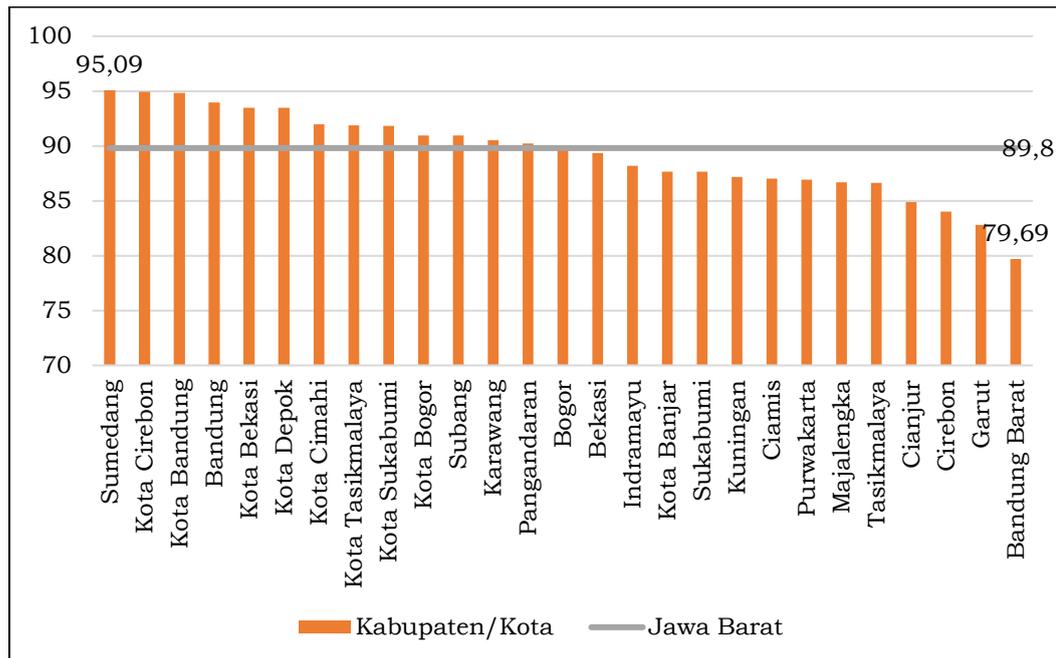
Komponen terakhir IPM adalah meningkatnya standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk

konsumsi anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita dapat dihitung dengan keseimbangan kemampuan belanja masyarakat. Tahun 2022 pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 10.776.000,00 (*sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*). Artinya rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Sumedang selama setahun sebesar ± Rp. 10 juta-an dan mengalami peningkatan sebesar Rp. 514 ribu dari tahun sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia bisa dilihat secara lebih spesifik dari perbedaan gender. Diskriminasi gender dalam berbagai hal di kehidupan bermasyarakat menimbulkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indikator utama untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender. Data IPD dan IDG sangat membantu pemerintah daerah untuk dapat mengurangi kesenjangan dalam suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Indikator IPG terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan. IPG Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 sebesar 95,09 poin, menurun 0,09 poin. Meskipun demikian, poin IPG mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan telah setara atau lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain bahkan dengan Provinsi Jawa Barat sendiri.

Gambar 2.26
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Barat Tahun 2022

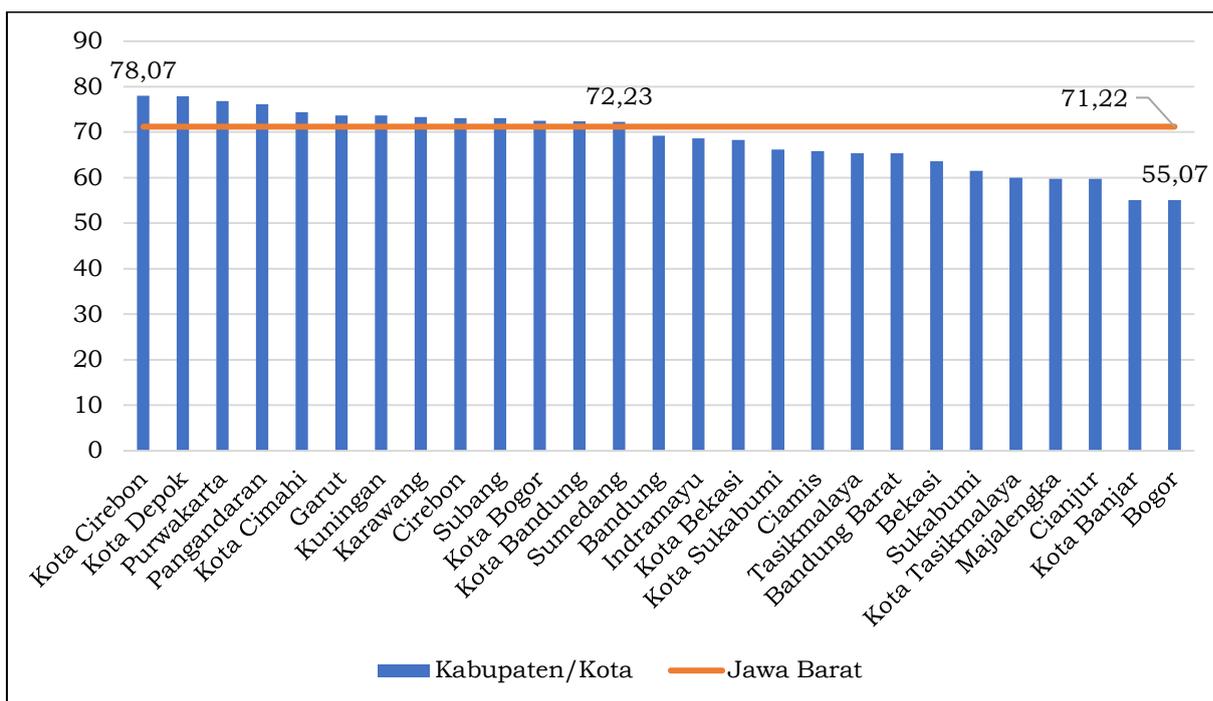


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2023) (diolah)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

IDG Kabupaten Sumedang sebesar 72,23 poin atau di atas Provinsi Jawa Barat dengan 71,22 poin. Pada Tahun 2021, IDG Kabupaten Sumedang sebesar 70,13 poin atau naik 2,1 poin dari tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang perempuan berperan lebih aktif dalam bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan disbanding tahun sebelumnya.

Gambar 2.27
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2023) (diolah)

Selain IDG dan IPG, keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan juga oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan, serta kesehatan yang akan berdampak pada layanan atau kerja professional yang dihasilkan. Salah satu indikator Kesehatan yang menunjang terhadap penentuan kualitas sumber daya manusia dijelaskan melalui Prevalensi Stunting, Jumlah/Angka Kematian Bayi, dan Jumlah/Angka Kematian Ibu per 100.000 ibu melahirkan sebagaimana tertera pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Indikator Kesehatan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Prevalensi Stunting (SSGI)	32,2	24,43	-	22	27,6
2	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	32,2	24,43	17,5	10,99	8,12
3	Jumlah Kematian Bayi (jiwa)	155	134	137	161	212
4	Jumlah Kematian Ibu (jiwa)	16	13	21	36	17

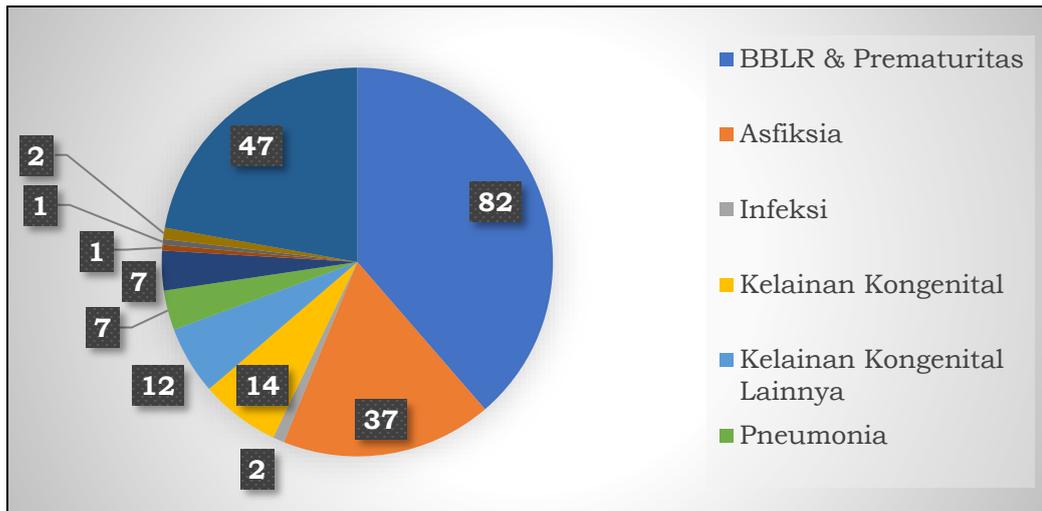
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023)

Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur dibandingkan dengan menggunakan standar WHO. Prevalensi stunting merupakan indikator untuk mengukur persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk.

Berdasarkan data pada Tabel di atas, terkait dengan data prevalensi stunting terdapat 2 (dua) data yang dihasilkan, 1) data berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI); 2) data berdasarkan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM). Melalui kedua cara perhitungan data tersebut didapatkan perbedaan data prevalensi stunting yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode pengumpulan data. Data yang dihasilkan berdasarkan SSGI dilakukan dengan metode survei dengan mengambil sampel beberapa wilayah saja, sedangkan data yang dihasilkan berdasarkan EPPGBM dilakukan melalui pengisian aplikasi oleh kader posyandu di seluruh wilayah setiap bulan penimbangan.

Data jumlah kematian bayi dari Tahun 2018-2022 sangat fluktuatif. Namun pada Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 212 jiwa dari 161 jiwa pada Tahun 2021 yang merupakan angka kematian bayi tertinggi di Kabupaten Sumedang. Penyebab kematian bayi digambarkan pada Gambar 2.28.

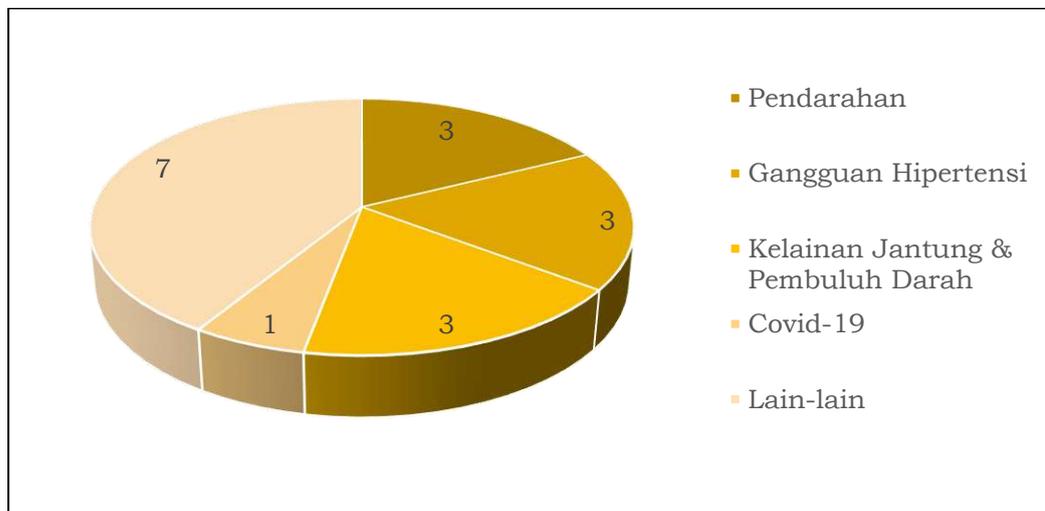
Gambar 2.28
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023)

Sedangkan untuk data Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan kualitas pelayanan Kesehatan selama hamil, penanganan persalinan dan masa nifas. Jumlah AKI di Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2019-2021 mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2022 turun pada angka 17 orang. Penyebab kematian ibu digambarkan pada Gambar 2.29 berikut.

Gambar 2.29
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2022

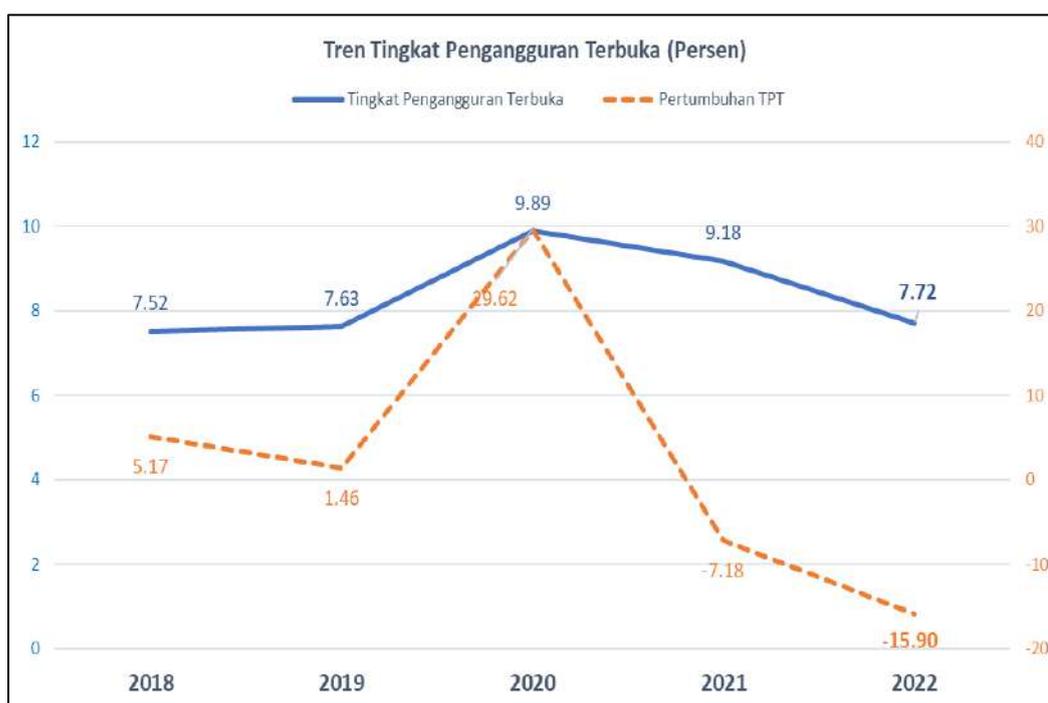


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023)

Aspek lain yang menggambarkan fokus kesejahteraan sosial adalah ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang dapat dijelaskan melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT digunakan

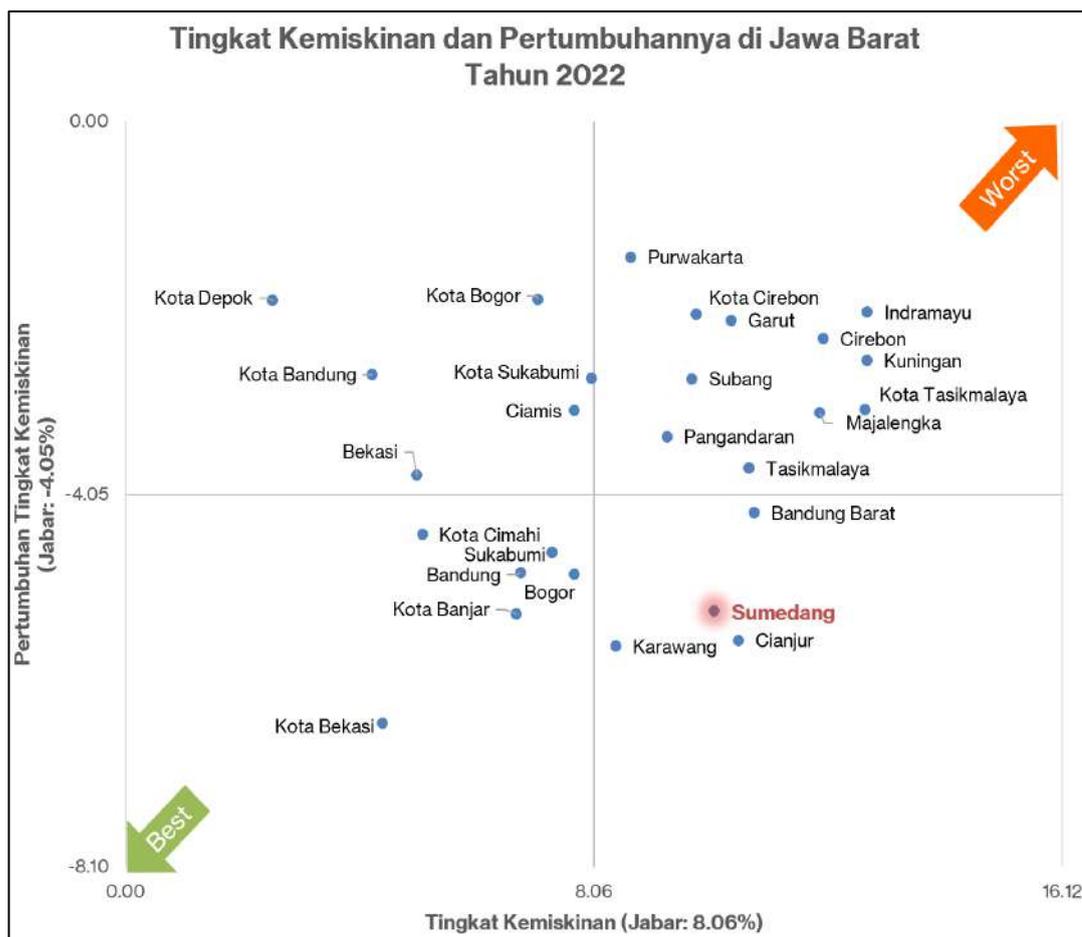
untuk mengetahui besarnya persentase Angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Diharapkan dengan mengetahui angka TPT dapat menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap *supply* tenaga kerja yang ada. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Sumedang yakni 7,72% dari target 8,78 - 7,99%. Capaian ini mampu melampaui target dengan persentase penurunan tpt mencapai 15,9% atau menurun 1,46 persen poin dibandingkan tahun 2021, capaian ini juga mampu menurun lebih cepat dari Jawa Barat.

Gambar 2.30
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2023)

Gambar 2.31
Komparasi TPT Kabupaten Kota di Jawa Barat



Sumber: BPS 2023 (diolah)

Menurunnya TPT lebih cepat juga menjadi implikasi dari keberhasilan pemulihan ekonomi pasca Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sumedang. Peningkatan serapan tenaga kerja berdasarkan data Sakernas Agustus 2022 terjadi di sektor utama seperti sektor pertanian (23,65%), sektor perdagangan (21,75%) dan sektor industri pengolahan (19,20%). Tiga lapangan usaha dominan ini mampu menyerap sekitar 65% tenaga kerja di Kabupaten Sumedang. Meskipun terjadi peralihan lapangan usaha dengan kontribusi PDRB tertinggi dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan, namun peran sektor pertanian sebagai penyedia lapangan kerja dan mata pencaharian utama penduduk Sumedang masih belum tergantikan. Bahkan, sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sangat tinggi di awal pandemi (2020) dengan beralihnya sebagian pekerja terdampak pandemi dari sektor non pertanian.

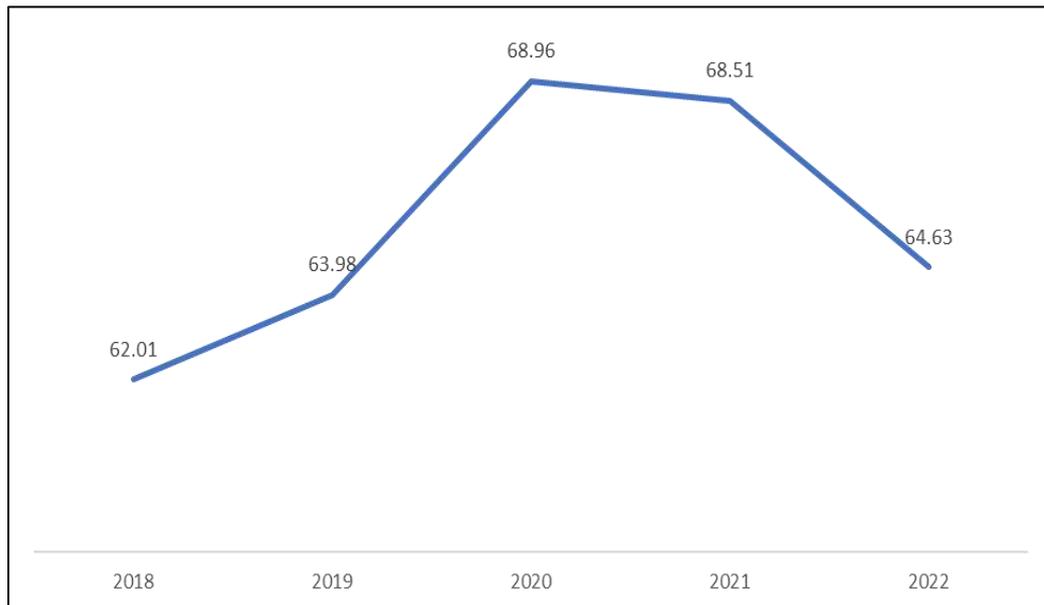
Tabel 2.8
Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Persentase				Rank 2022	Tren
	2019	2020	2021	2022		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.18	25.87	22.55	23.65	1	
Pertambangan dan Penggalian	0.99	0.96	0.90	0.77	12	
Industri Pengolahan	19.34	16.37	17.97	19.20	3	
Pengadaan Listrik dan Gas	0.29	0.46	0.36	0.35	15	
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.71	0.08	0.46	0.09	16	
Konstruksi	11.26	8.91	10.24	9.22	4	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.19	20.70	20.85	21.75	2	
Transportasi dan Pergudangan	3.75	4.12	3.46	2.89	8	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.77	6.80	6.36	8.68	5	
Informasi dan Komunikasi	0.54	0.78	0.93	0.55	14	
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.73	0.69	1.02	0.85	10	
Real Estate	0.63	0.22	0.10	0.00	17	
Jasa Perusahaan	0.71	0.38	0.77	0.75	13	
Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.07	3.26	3.09	2.38	9	
Jasa Pendidikan	6.68	6.97	7.30	5.07	6	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.64	0.85	0.89	0.79	11	
Jasa Lainnya	3.52	2.56	2.75	3.04	7	

Sumber: Sakernas, Agustus 2022 (diolah)

Namun, kantong pengangguran di Kabupaten Sumedang masih berada pada angkatan kerja usia muda (generasi Z) dimana sekitar separuh dari TPT merupakan anak muda berusia 15-24 tahun. TPT akan lebih cepat diturunkan jika angkatan kerja usia muda, khususnya pada usia 18 tahun atau mereka yang baru lulus SMA/SMK dapat diintervensi dengan program penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri.

Gambar 2.32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2023)

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan proporsi penduduk usia kerja di suatu daerah yang bergerak aktif di pasar tenaga kerja dan menjadi faktor penting dalam menggerakkan pembangunan. Biasanya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumedang mengalami tren positif setiap tahunnya, yang berarti pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan namun di tahun 2022 kembali menurun. Pembangunan di suatu wilayah tidak bisa terlepas dari peran perempuan. Diasumsikan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumedang ada hubungannya dengan penurunan IDG Kabupaten Sumedang karena adanya penurunan partisipasi perempuan terutama dalam kegiatan ekonomi.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni dan budaya merupakan produk dari kreativitas manusia yang digunakan sebagai alat ekspresi keinginan, pemikiran dan pemahaman terhadap alam dan lingkungan dengan memasukan unsur keindahan dan kebenaran subjektif maupun universal dan

diterapkan dalam masyarakat. Kebudayaan menjadi penting artinya bagi pembentukan karakter yang berkebangsaan Indonesia sekaligus membangkitkan identitas kebudayaan yang berciri *kasumedangan*. Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan kehidupan sosio-ekonomi dan politik pendukung kebudayaannya.

Implementasi aspek seni dan budaya sebagai bukti keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dituangkan dalam Perda Kabupaten Sumedang tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (SPBS). SPBS yang bersifat lokal dapat dijadikan sebagai pedoman bertindak sekaligus mengarahkan kehidupan bersama dalam tataran sosial yang selaras dan seimbang serta dapat digunakan juga sebagai rencana mencapai tujuan bersama dalam kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Salah satu bentuk implementasi SPBS di Kabupaten Sumedang ialah “mempopulerkan” kembali berbagai kesenian tradisional melalui berbagai acara pemerintahan skala lokal maupun nasional serta mengenalkan cagar budaya yang dilestarikan kepada masyarakat Sumedang.

Kabupaten Sumedang mempunyai beberapa tempat yang merupakan warisan budaya. Berikut adalah Objek Cagar Budaya di Kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan.

Tabel 2.9
Objek Cagar Budaya di Kabupaten Sumedang yang Telah Ditetapkan

No	Nama Cagar Budaya
1	Monumen Lingga
2	Gedung Bumi Kaler
3	Benteng Gunung Gadung
4	Benteng Gunung Kunci
5	Benteng Gunung Palasari
6	Gedung Disparbudpora
7	Struktur Jembatan Cincin Cikuda
8	Struktur Jembatan Cincin Kuta Mandiri
9	Makam Cut Nyak Dien
10	Makuta Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun
11	Meriam Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun
12	Bunker Jatisari

No	Nama Cagar Budaya
13	Pendopo Kecamatan Sumedang Utara
14	Prasasti Pembangunan Jalan raya Pos (Postweg) di Cadas Pangeran
15	Rumah Cut Nyak Dien
16	Siger Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun
17	Gedung Srimanganti
18	Struktur Bendungan Ragadiem
19	Wisma Gending
20	Monumen Loji
21	Situs Gunung Lingga
22	Situs Dayeuhluhur
23	Situs Jaya Perkasa
24	Situs Cigobang
25	Struktur Panday
26	Situs Pasarean Gede
27	Situs Gunung Puyuh
28	Situs Buyut Lengka
29	Situs Marongge/Gunung Hade
30	Situs Astana Gede Cipaku
31	Situs Pasir Cengkok
32	Situs Pasir Putrapada
33	Situs Pranantaka
34	Situs Aria Wiraradja I
35	Situs Pasir Ipis
36	Situs Cikadu
37	Situs Mekarmulya
38	Situs Nanggan
39	Situs Citembong Girang

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Namun, terdapat pula beberapa objek cagar budaya yang statusnya belum ditetapkan dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Dibawah ini adalah sebaran Objek yang Diduga Cagar Budaya.

Tabel 2.10
Objek Diduga Cagar Budaya

No	Nama Kecamatan	Objek Diduga Cagar Budaya			
		Situs	Struktur	Bangunan	Benda
1	Kecamatan Wado	17	-	-	-
2	Kecamatan Jatinunggal	8	1		
3	Kecamatan Sumedang Selatan	31	1	6	
4	Kecamatan Darmaraja	12	1		
5	Kecamatan Ganeas	3			
6	Kecamatan Cisit	7			
7	Kecamatan Pamulihan	3			
8	Kecamatan Buahdua	9			
9	Kecamatan Tomo	1			
10	Kecamatan Sumedang Utara	11			
11	Kecamatan Jatigede	8			
12	Kecamatan Conggeang	8			
13	Kecamatan Situraja	8			
14	Kecamatan Cibugel	7			
15	Kecamatan Tanjungmedar	1			
16	Kecamatan Ujungjaya	72			
17	Kecamatan Cisarua	7			
18	Kecamatan Cimalaka	8			
19	Kecamatan Tanjungkerta	5			
20	Kecamatan Paseh	2			
21	Kecamatan Tanjungsari	1			
22	Kecamatan Rancakalong	17			
23	Kecamatan Cimanggung	2			

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Selain Cagar Budaya, terdapat pula jenis seni budaya yang dilestarikan di Kabupaten Sumedang meliputi:

- 1) Seni tradisional/seni pertunjukan, diantaranya Kuda Renggong, Tarawangsa, Celempungan, Calung, Kiliningan dan Jaipongan;

- 2) Seni Musik
- 3) Seni tari, diantaranya Tari Jayengrana, Tari Topeng Kasumedangan, Tari Gandamanah, Tari Tayuban, dll.; dan
- 4) Seni kemas, diantaranya Prosesi penyambutan tamu, pembukaan dan penutupan festival.

Adapun jumlah pelaku seni per kecamatan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11
Jenis Pelaku Seni per Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Seni									
		Kuda Renggong	Kacapi	Tanji	Jaipong	Tarawangsa	Seni Tari	Wayang Golek	Calung	Karawitan	Aneka Seni/Lain-lain
1	Buahdua	5	-	11	4	-	1	1	1	1	12
2	Cibugel	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
3	Cimalaka	-	2	-	3	-	1	2	-	-	10
4	Cimanggung	5	-	-	1	-	1	-	3	-	7
5	Cisarua	1	-	3	5	-	1	-	1	-	9
6	Cisitu	4	-	-	1	-	-	-	-	-	6
7	Congeang	31	1	-	4	-	6	-	-	2	11
8	Darmaraja	3	-	-	1	-	1	-	-	-	8
9	Ganeas	5	-	-	1	-	-	-	-	-	2
10	Jatigede	2	-	-	3	-	-	-	1	-	2
11	Jatinangor	9	3	-	1	-	-	1	-	-	10
12	Jatinunggal	4	-	-	3	-	-	-	1	-	5
13	Pamulihan	6	3	-	4	1	-	4	2	1	13

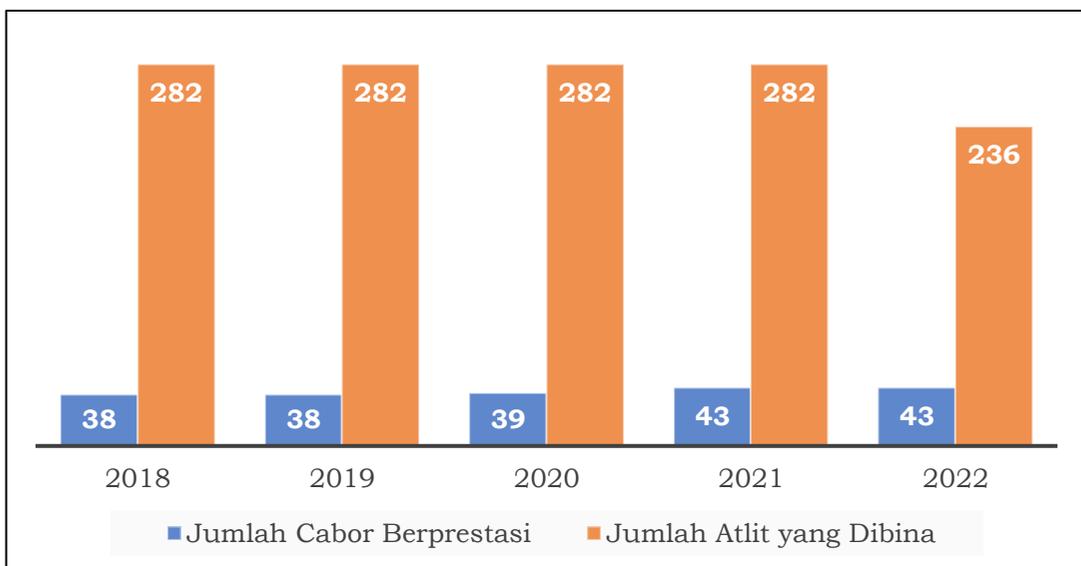
No	Kecamatan	Jenis Seni									
		Kuda Renggong	Kacapi	Tanji	Jaipong	Tarawangsa	Seni Tari	Wayang Golek	Calung	Karawitan	Aneka Seni/Lain-lain
14	Paseh	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3
15	Rancakalong	10	1	2	3	4	3	1	-	2	25
16	Situraja	4	-	-	3	-	1	-	-	2	10
17	Sukasari	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
18	Sumedang Selatan	1	3	-	1	-	2	-	-	2	16
19	Sumedang Utara	1	1	-	4	-	5	1	-	1	16
20	Surian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Tanjungkerta	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	Tanjungmedar	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
23	Tanjungsari	18	-	-	1	-	2	-	-	-	8
24	Tomo	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25	Ujungjaya	5	1	-	2	-	-	-	-	-	2
26	Wado	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3
SUMEDANG		126	15	17	49	5	25	10	9	12	185

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Selanjutnya, urusan olahraga dititikberatkan kepada upaya peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berkolaborasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Sumedang dalam peningkatan keolahragaan.

Kabupaten Sumedang memiliki lebih dari 30 jenis cabang olahraga, dan hanya beberapa cabang olah raga saja telah menorehkan prestasi. Dengan berkolaborasi dengan KONI Kabupaten Sumedang, setiap cabang olahraga mendapatkan pembinaan dan dilakukan penyeleksian jenis cabang olahraga yang siap untuk dipertandingkan. Berikut adalah Cabang Olahraga Berprestasi di Kabupaten Sumedang

Gambar 2.33
Cabang Olahraga Berprestasi dan Atlit Dibina di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022



Sumber : KONI Kabupaten Sumedang, 2023

Dari data diatas (Gambar 2.33) dapat dilihat bahwa jumlah cabang olahraga menunjukkan tren positif. Sampai Tahun 2022 jumlah cabang olahraga yang berprestasi berjumlah 43 cabor yang sebelumnya berjumlah 39 cabor di Tahun 2020. Jenis cabang olahraga baru yang terseleksi untuk ikut dipertandingkan dalam setiap event olahraga antara lain : Cabang olahraga tenis meja, tinju, wushu dan Perwosi. Lain halnya dengan jumlah atlet yang dibina yang mengalami penurunan pada Tahun 2022. Penurunan ini terjadi

karena penyeleksian yang ketat terhadap atlet yang akan diikutsertakan dalam Porprov XIV.

2.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam pasal 2 ayat (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu (1) Urusan Pendidikan, (2) Urusan Kesehatan, (3) Urusan Pekerjaan Umum, (4) Urusan Perumahan Rakyat, (5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan (6) Urusan Sosial. Sedangkan muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar.

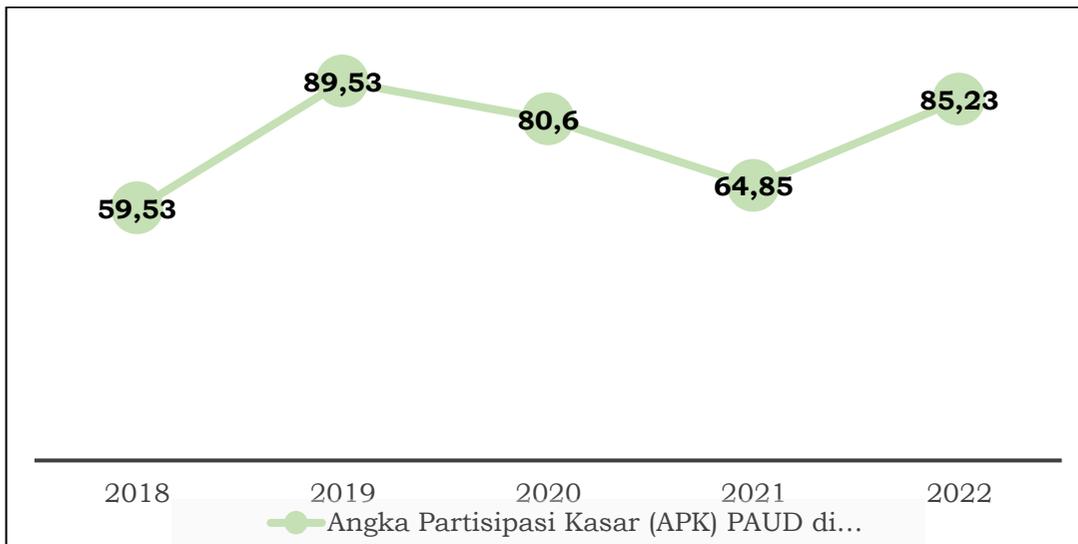
2.3.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Jenis SPM urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan terdiri atas:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan yang diberikan sebelum anak masuk ke jenjang pendidikan dasar. Pendidikan PAUD ini diupayakan untuk membina anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Berikut adalah tren Partisipasi Pendidikan Usia Dini di Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.34
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%)



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2023)

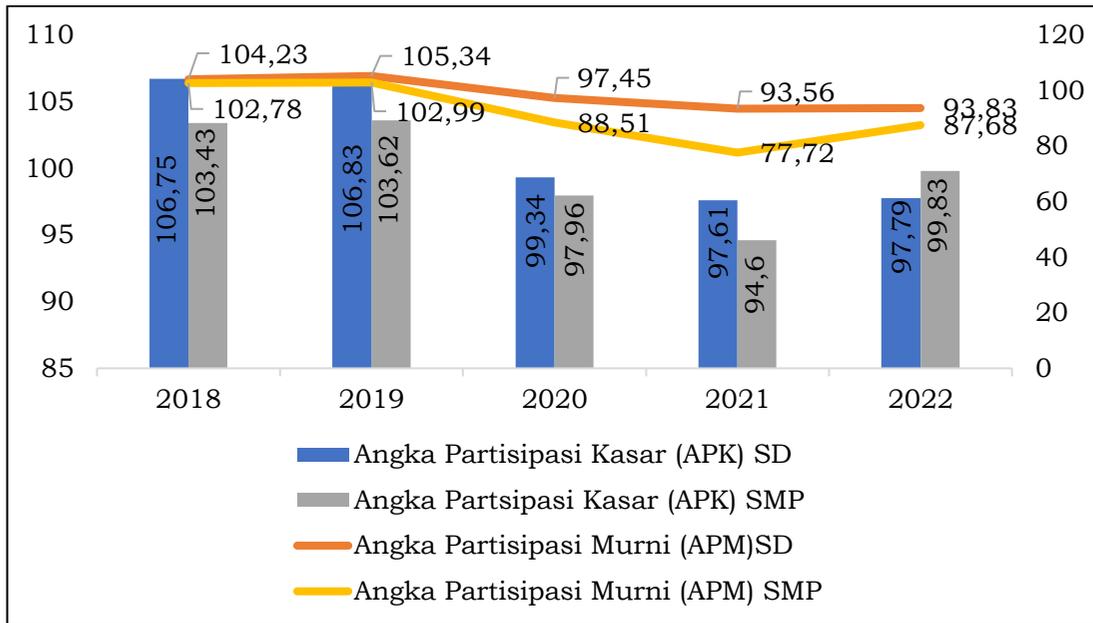
Berdasarkan data diatas bahwa tren angka partisipasi pendidikan PAUD sangat fluktuatif. Realisasi tertinggi pada Tahun 2019 sebesar 89,53% dan terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2021 realisasi partisipasi PAUD hanya 64,85%. Diperkirakan menurunnya angka partisipasi PAUD di Kabupaten Sumedang sebagai salah satu dampak dari *Covid-19* yang mengakibatkan pembelajaran di setiap jenjang pendidikan dilaksanakan secara daring atau *online*, sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mengikutsertakan anak yang berusia 5-6 Tahun dalam pendidikan PAUD serta pendataan yang belum optimal. Akan tetapi dengan semakin membaiknya kondisi pandemi *covid-19* di Kabupaten Sumedang berpengaruh juga terhadap tren angka partisipasi PAUD pada tahun 2022 yang menunjukkan adanya peningkatan menjadi 85,23% atau naik 20,38% dari tahun sebelumnya. Peningkatan partisipasi PAUD diasumsikan terjadi karena Kabupaten Sumedang memberlakukan pembelajaran secara tatap muka atau luring di seluruh satuan pendidikan dengan sejumlah ketentuan.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut, sehingga peningkatan mutu pendidikan dan jumlah masyarakat yang bersekolah harus terus diupayakan. Untuk mengetahui banyaknya penduduk usia sekolah yang memanfaatkan

fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Indikator Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumedang tersaji pada Gambar 2.35.

Gambar 2.35
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2023)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK digunakan untuk menunjukkan berapa besar tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan serta untuk menunjukkan besaran kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Kegunaan APM salah satunya untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu atau seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur sesuai dengan ketentuan kelompok usia di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Pada Tahun 2021, baik APK maupun APM dari jenjang Pendidikan SD dan SMP mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk APK SD turun sebanyak 1,73 persen sedangkan untuk APK SMP sebanyak 3,36 persen dari tahun sebelumnya.

Adapun untuk APM jenjang SD turun sebesar 3,89 persen dan APM jenjang SMP sebesar 10,79 persen. Diperkirakan penyebab penurunan APK dan APM untuk jenjang Pendidikan SD dan SMP ini dikarenakan adanya penurunan keterlibatan penduduk kelompok usia 7-12 tahun dan kelompok usia 13-15 tahun dalam bidang pendidikan, selain itu juga faktor pandemi *covid-19* pun ikut mempengaruhi terhadap penurunan APK dan APM di tiap jenjang Pendidikan dimana pembelajaran dilakukan secara daring sehingga ada kendala terkait dengan keterbatasan akses jaringan internet di beberapa wilayah. Namun pada Tahun 2022 ada tren peningkatan pada APK maupun APM.

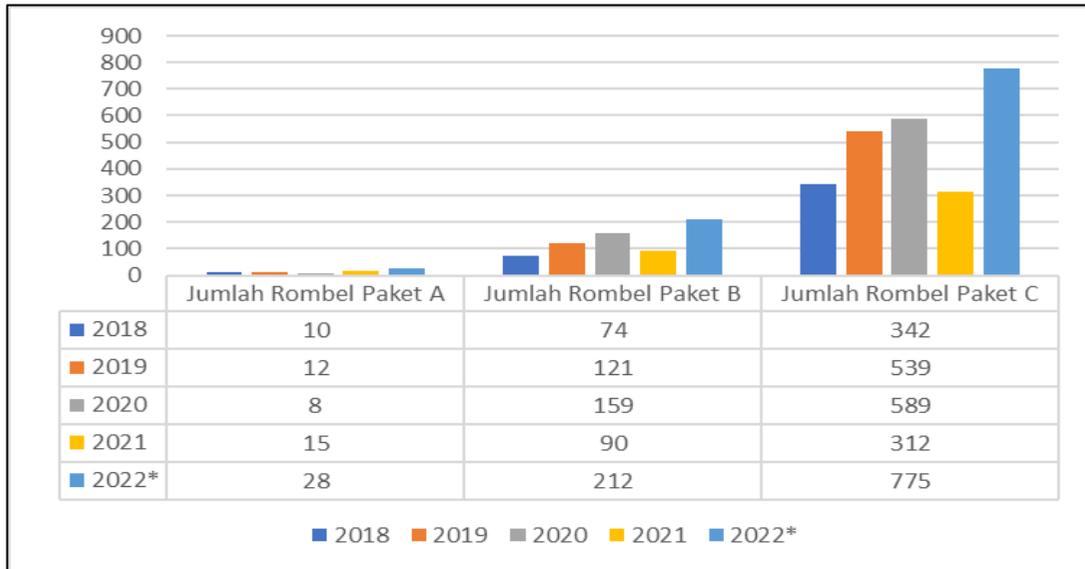
APK SD dan SMP mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan dengan masing-masing kenaikan 0,18 persen untuk APK SD sehingga menjadi 97,79 persen dan 5,23 persen untuk APK SMP sehingga menjadi 99,83 persen. Begitu juga dengan APM SD dan APM SMP yang masing-masing capaiannya 93,83 persen untuk APM SD dan 87,68 persen untuk APM SMP. Kenaikan ini diindikasikan sebagai salah satu dampak dari diluncurkannya berbagai bantuan oleh Pemerintah seperti bantuan Kartu Indonesia Pintar.

c. Pendidikan kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan pengganti pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan non-formal. Pendidikan kesetaraan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan kesetaraan ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan bagi warga yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal.

Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas. Berikut Rombongan Belajar untuk Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.

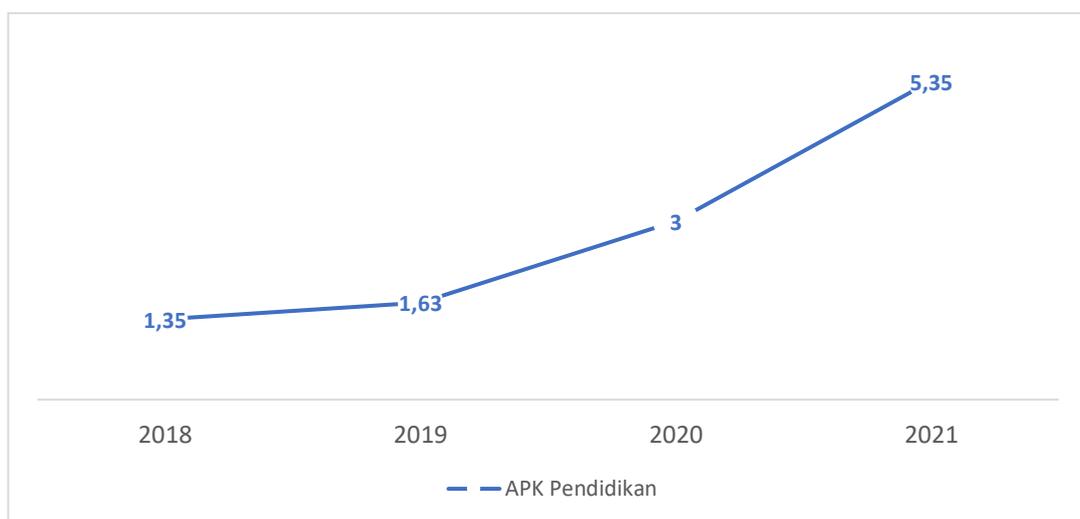
Gambar 2.36
Rombongan Belajar Paket A, Paket B dan Paket C di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%)



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2023)

Adapun angka partisipasi Pendidikan kesetaraan tren nya terus meningkat pada setiap tahunnya. Angka partisipasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,35 persen. Peningkatan ini sebagai dampak dari optimalisasi Lembaga Pendidikan non formal/kesetaraan yang ada di Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.37
Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%)



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2023)

Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang
Tahun 2021-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini					Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Paud	100%	44,41	100%	92%	
2.	Pendidikan Dasar					
	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	100%	89,31	100%	89,55%	
3.	Pendidikan Kesetaraan					
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasai Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	43,42	100%	58,47 %	

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2022

2.3.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar SPM Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas:

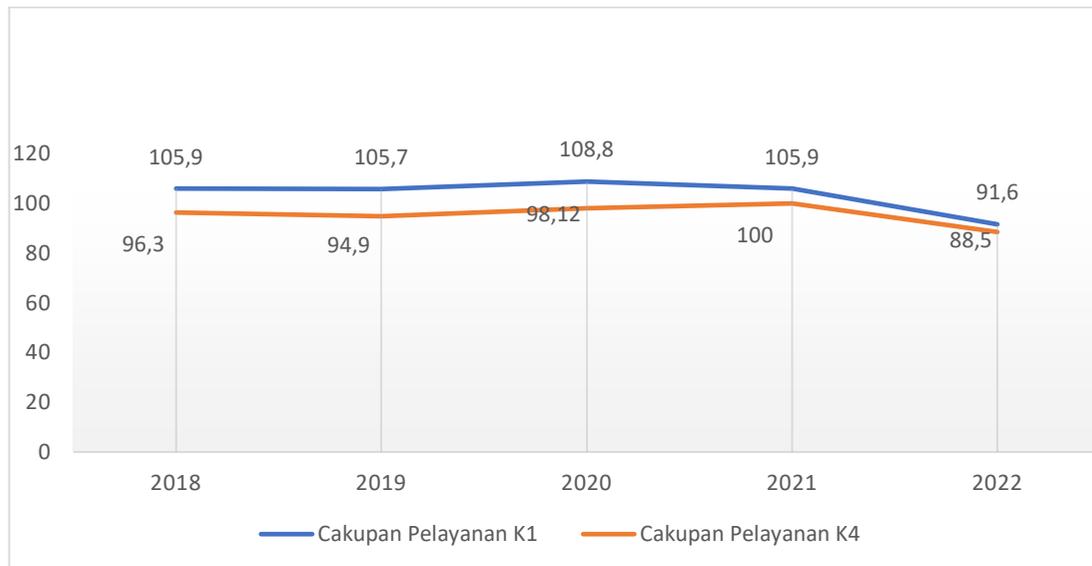
a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Kesehatan ibu hamil merupakan masalah kesehatan yang harus mendapat prioritas utama dalam pembangunan, karena menentukan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. Salah satu metode peningkatan kesehatan ibu hamil ialah dengan peningkatan pelayanan antenatal. Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada Ibu selama masa kehamilannya secara berkala. Tujuannya untuk pengawasan tumbuh kembang janin dalam rahim serta untuk menjaga keselamatan ibu dan janin.

Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui cakupan pelayanan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sedangkan cakupan K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, yakni paling sedikit 4 (empat) kali sesuai jadwal yang dianjurkan tiap trimester dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan kunjungan ibu hamil meningkat menjadi 6 (enam) kali kunjungan. Pada tahun 2022 terjadi 14.700 kunjungan dari 17.877 ibu hamil atau 82,2%.

Tren pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang cenderung fluktuatif. Untuk cakupan pelayanan K1 selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami penurunan, kecuali pada Tahun 2020 naik menjadi 108,8% dari 105,7% pada Tahun 2019. Akan tetapi Tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 91,6%. Cakupan pelayanan K4 pun mengalami penurunan. Pada tahun 2021 cakupan pelayanan K4 sebesar 100% menjadi 85,5% di Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pengetahuan dan lingkungan ibu hamil masih rendah. Karena itu diperlukan upaya peningkatan peran bidan, meningkatkan peran dan dukungan suami serta keluarga agar ibu hamil dapat melaksanakan kunjungan antenatal *care* secara lengkap. Cakupan pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.38 berikut:

Gambar 2.38
Cakupan Pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang
Tahun 2012 – 2022



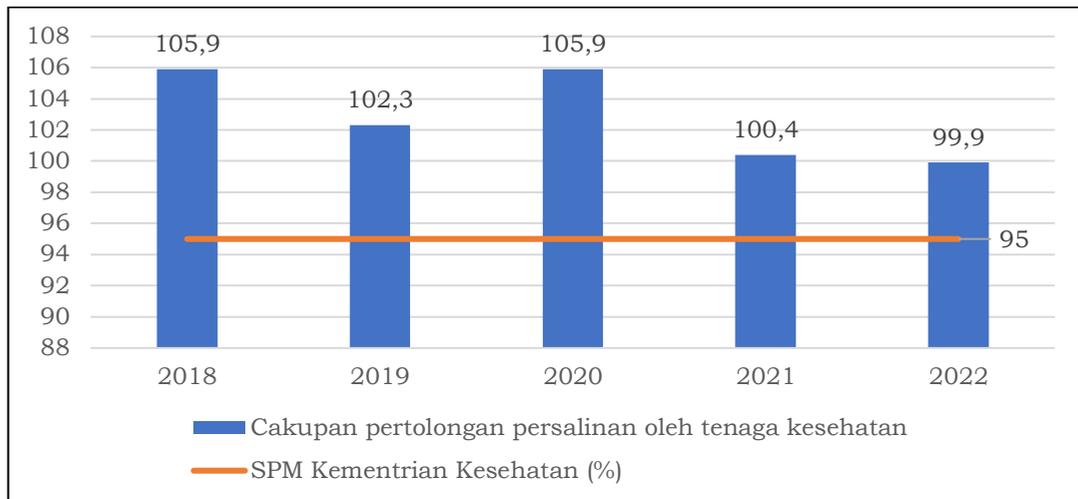
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan. Pelayanan kesehatan ibu bersalin merupakan salah satu cara untuk menurunkan kematian ibu dan bayi, yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan ibu bersalin ialah dengan melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun sangat fluktuatif. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan telah mencapai 100% yang artinya bahwa seluruh proses persalinan sudah seluruhnya ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Data tertinggi terjadi pada Tahun 2018 dan Tahun 2020 yaitu 105,9%. Untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada Tahun 2022 menurun 0,5% dari tahun sebelumnya menjadi 99,9%.

Gambar 2.39
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

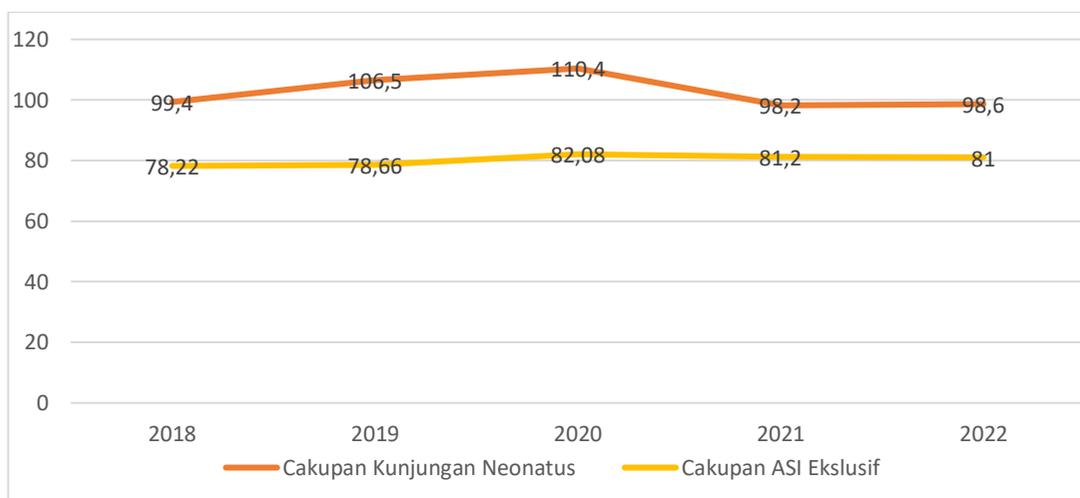
Salah satu bentuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir berupa kunjungan neonatal (KN) yakni kontak neonatal dengan tenaga kesehatan minimal 3 (tiga) kali untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan neonatal, baik di dalam maupun di luar fasilitas kesehatan seperti di bidan, polindes dan kunjungan ke rumah. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, sehingga dapat mengetahui sedini mungkin apabila terdapat kelainan atau masalah pada neonatus. Dengan demikian dapat diketahui efektivitas dan pelayanan kesehatan neonatal. Tren cakupan Kunjungan *Neonatus* di Kabupaten Sumedang setiap tahunnya sebagian besar mengalami penurunan. Penurunan terendah terjadi pada Tahun 2021 sebesar 12,3% dari tahun 2020 menjadi 98,2%. Penurunan ini sebagai salah satu akibat dari adanya pandemi covid-19 yang membatasi jumlah kunjungan tenaga kesehatan terhadap neonatus untuk meminimalisir sebaran *covid-19*.

Pelayanan lainnya ialah Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif. IMD merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Asi eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 (enam) bulan pertama tanpa minuman atau makanan tambahan lain. ASI menyediakan semua nutrisi yang penting untuk tumbuh kembang bayi dan mengandung antibodi yang berfungsi melawan penyakit serta membantu menyempurnakan sistem kekebalan tubuh bayi. Proses

untuk keberhasilan ASI eksklusif bayi 6 (enam) bulan dilaksanakan selama rentang usia bayi 0 sampai 5 bulan.

Keberhasilan ASI eksklusif di Kabupaten Sumedang tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 82,08%, dan menunjukkan tren menurun dengan persentase 81,26% di Tahun 2021 dan kembali menurun dengan persentase 81% pada Tahun 2022. Penurunan ini terjadi karena banyak faktor, diantaranya jumlah bayi ASI Eksklusif yang gugur sebelum usia 6 bulan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran ibu akan pentingnya ASI bagi pertumbuhan anak serta rendahnya implementasi regulasi pemberian ASI, sehingga terlihat regulasi tersebut agak teracuhkan. Dengan demikian keberhasilan cakupan pemberian ASI eksklusif sangat dipengaruhi oleh kerja sama dari semua pihak.

Gambar 2.40
Cakupan Kunjungan Neonatus dan Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023) (diolah)

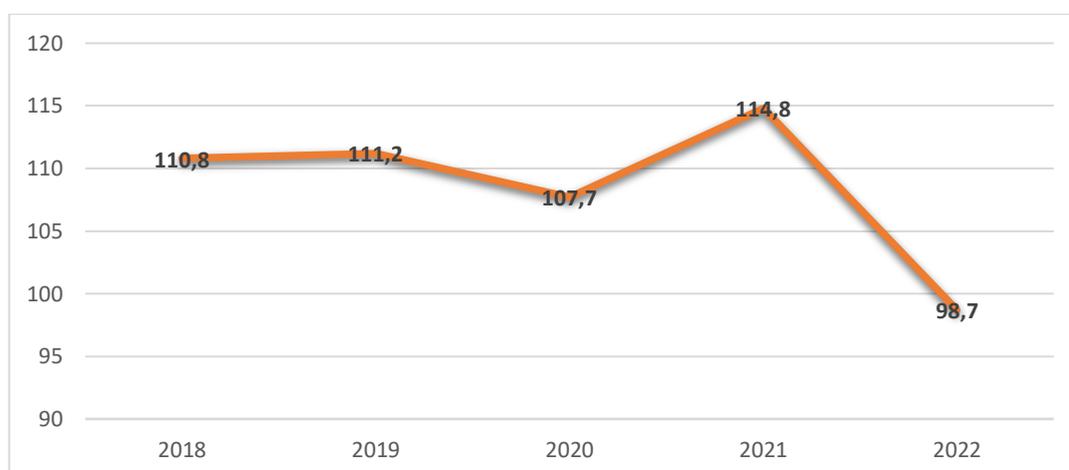
d. Pelayanan Kesehatan Balita

Balita diartikan sebagai salah satu periode usia dengan rentang usia mulai 12-59 bulan. Masa balita merupakan masa keemasan atau disebut juga *golden period* yaitu masa ketika terbentuknya dasar-dasar kemampuan keindraan, berfikir, berbicara serta pertumbuhan mental intelektual yang intensif dan awal pertumbuhan moral. Pelayanan kesehatan balita meliputi pemantauan pertumbuhan, perkembangan, pemberian imunisasi dasar dan lanjutan serta tata laksana balita sakit.

Upaya deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada balita menjadi sangat penting agar dapat dikoreksi sedini mungkin sehingga mencegah gangguan ke arah yang lebih berat. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan balita adalah cakupan kunjungan anak balita yang diartikan sebagai cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 (empat) kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Sumedang pada Gambar di bawah ini dan tren berfluktuasi. Pada Tahun 2022 persentasenya hanya mencapai 98,7% atau 15.777 bayi telah mendapatkan pelayanan paripurna.

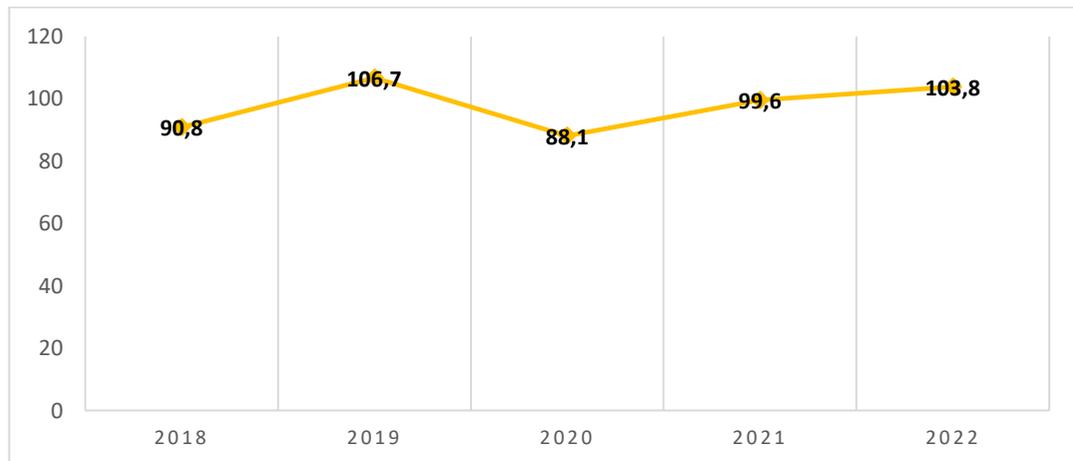
Gambar 2.41
Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 – 2022 (%)



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

Berdasarkan Gambar 2.42 dapat dilihat bahwa pencapaian cakupan kunjungan balita Tahun 2022 mencapai target diatas 100% yaitu 103,8%.

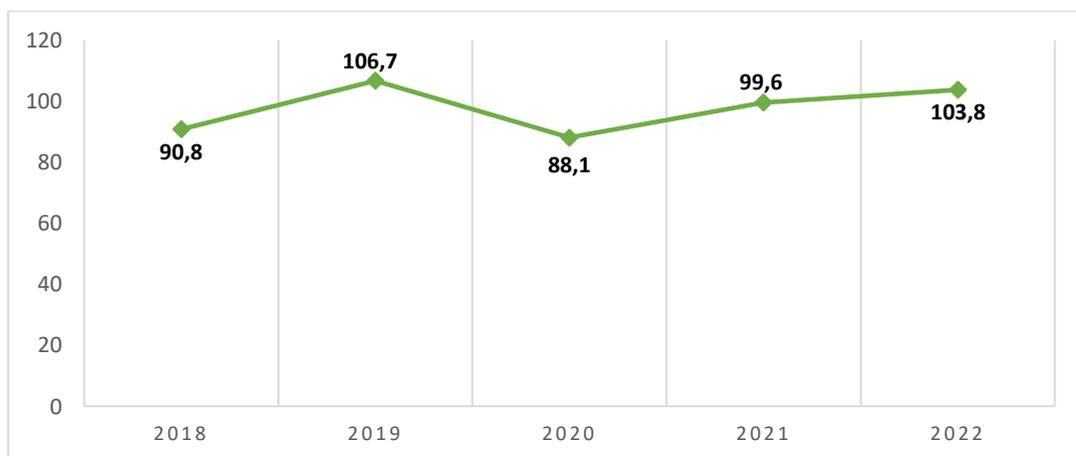
Gambar 2.42
Cakupan Kunjungan Balita di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

Berdasarkan Gambar 2.43 dapat dilihat bahwa pencapaian cakupan kunjungan balita Tahun 2022 mencapai target diatas 100% yaitu 103,8%.

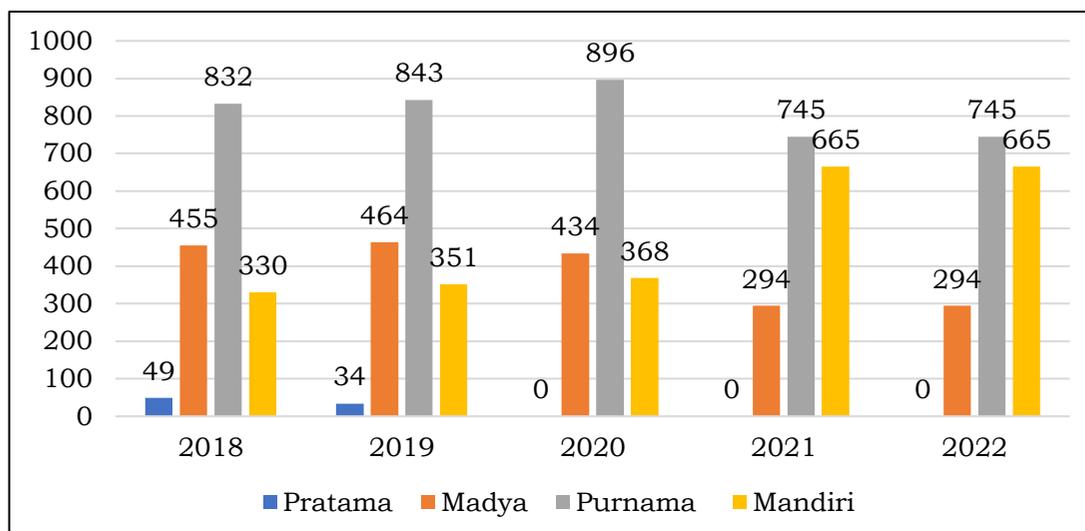
Gambar 2.43
Cakupan Kunjungan Balita di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

Posyandu berdasarkan strata terdiri dari 4 (empat) tingkatan terdiri dari Pratama, Madya, Purnama dan mandiri. Jumlah Posyandu strata Pratama menjadi nol sejak tahun 2020. Hal tersebut menandakan adanya peningkatan status strata posyandu. Pada Tahun 2022 terdapat 1.704 Posyandu dan Posyandu dengan strata mandiri sebanyak 39 % atau 665 Posyandu.

Gambar 2.44
Posyandu Menurut Strata Tahun 2018 – 2022

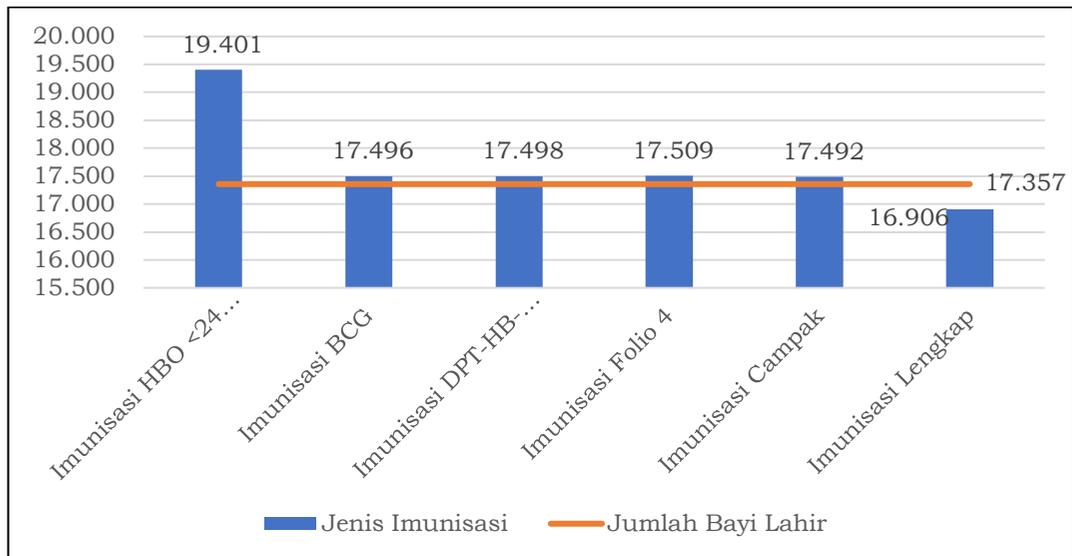


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

Posyandu merupakan kegiatan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar terutama bagi ibu, bayi dan anak balita. Posyandu memiliki 5 (lima) program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, serta pencegahan dan penanggulangan diare.

Imunisasi yang diberikan pada bayi berupa imunisasi Hepatitis-B0 dengan 2 (dua) kategori pemberian imunisasi yaitu untuk bayi baru lahir kurang dari 24 jam dan bayi berumur 1-7 hari. Namun Imunisasi HBO biasanya segera dilakukan setelah bayi lahir, sehingga tidak ada bayi yang diimunisasi pada umur 1-7 hari. Imunisasi lainnya yang diberikan adalah BCG, DPT -HB-HiB 3, Polio 4 dan Campak Rubela. Dari 17.357 bayi lahir hidup, terdapat 16.906 bayi dengan imunisasi dasar lengkap atau sebanyak 97,3%.

Gambar 2.45
Jumlah Bayi Lahir Hidup dan Jenis Imunisasi yang Diperoleh
Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

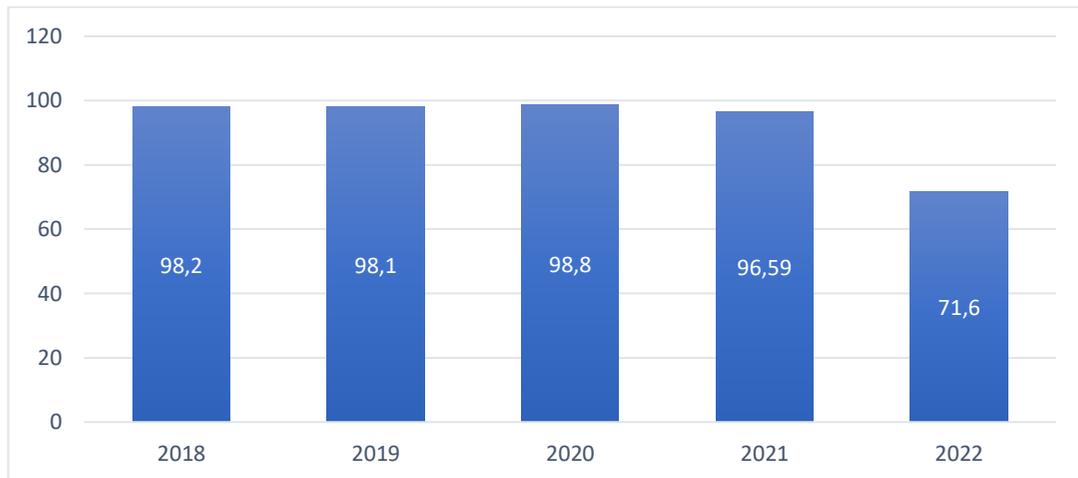
e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Usia Pendidikan Dasar berkisar antara 6-15 Tahun. Pada usia tersebut pengetahuan anak akan bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia serta keterampilan yang dikuasai pun semakin beragam. Pelayanan kesehatan anak usia sekolah merupakan salah satu indikator SPM urusan kesehatan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Sasaran pelayanan kesehatan adalah anak usia sekolah yang berada dalam kuasa asuh dari orang tua/wali, maka informasi penjangkaran kesehatan/ pemeriksaan berkala perlu diberikan untuk orangtua/wali. Pelayanan kesehatan merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya agar terhindar dari keadaan yang lebih buruk, selain itu juga dengan adanya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dapat diperoleh data dan informasi mengenai perkembangan anak.

Adapun jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan antara lain penilaian riwayat kesehatan, penilaian status imunisasi, riwayat kesehatan keluarga, penilaian perilaku berisiko, penilaian kesehatan reproduksi, kesehatan mental, kesehatan intelegensia, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan status gizi, pemeriksaan kebersihan diri, pemeriksaan kesehatan indera penglihatan, pemeriksaan kesehatan indera pendengaran, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan

kebugaran jasmani yang dilakukan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali di sekolah. Hasil dari pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.46 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 (%)



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

Berdasarkan Gambar di atas cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang belum memenuhi target yang diharapkan yaitu 100%. Pada Tahun 2022 cakupan pelayanan dari 152.296 siswa, terlayani sebanyak 109.007 siswa atau terlayani sebanyak 71,6%. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi mengenai jadwal pemeriksaan yang disampaikan oleh petugas/guru kepada komite sekolah sehingga pada saat pelayanan kesehatan ada siswa yang tidak hadir, selain itu belum optimalnya *sweeping* yang dilakukan oleh petugas dan peran dari Tim TP UKS di tiap tingkatan serta kegiatan masih dianggap hanya bertumpu pada sektor kesehatan yakni Dinas Kesehatan.

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Usia produktif berkisar antara 15-59 Tahun dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi (termasuk keluarga berencana) dan skrining kesehatan di wilayahnya dalam kurun waktu satu tahun. Skrining usia produktif merupakan salah satu indikator SPM bidang kesehatan, sehingga Pemerintah Daerah wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja

sama dengan Pemerintah Daerah. Skrining kesehatan dilakukan untuk mengamati faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Berikut adalah Kesehatan Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

Tabel 2.13
Usia Produktif Mendapat Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2022

Jenis Kelamin	Pelayanan Kesehatan	Beresiko
Laki-laki	52.024	83
Perempuan	62.586	318
Total	114.610	401

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2023)

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut diberikan kepada setiap warga yang telah berusia 60 tahun ke atas. Bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular sesuai standar paling sedikit 1 (satu) kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Tujuan dari pelayanan kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pada lansia untuk memelihara kesehatan sendiri, meningkatkan kemampuan serta peran serta keluarga dan masyarakat dalam mengatasi kesehatan lansia, meningkatkan jenis dan jangkauan pelayanan lansia serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia.

Pelayanan kesehatan penduduk usia lansia di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 berupa skrining yang dilakukan di 26 Kecamatan pada 35 puskesmas dengan jumlah penduduk usia lanjut sebanyak 159.665 jiwa. Adapun penduduk yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar berjumlah 134.571 jiwa atau 84,3%. Ini berarti belum seluruh penduduk usia lanjut mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut adalah Data Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.14
Data Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022

Jenis Kelamin	Pelayanan Kesehatan	Persentase
Tahun 2021		
Laki-laki	60.976	66,1
Perempuan	86.559	89,1
Total	147.535	77,9
Tahun 2022		
Laki-laki	54.575	69,4
Perempuan	79.996	98,8
Total	134.571	84,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023)

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang paling umum dan paling banyak disandang masyarakat. Hipertensi disebut sebagai *the silent killer* karena sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Hipertensi merupakan penyakit yang berada pada 10 (sepuluh) besar penyakit di Kabupaten Sumedang. Tabel di bawah ini adalah Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.15
Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang
Tahun 2021-2022

Jenis Kelamin	Penderita Dilayani	Persentase
Tahun 2021		
Laki-laki	100.673	100,8
Perempuan	144.236	108,9
Total	244.911	98,7
Tahun 2022		
Laki-laki	94.170	76,2
Perempuan	111.707	104,4
Total	227.972	98,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023)

Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Sumedang sebanyak 230.490 jiwa. Adapun penderita yang mendapat pelayanan kesehatan telah mencapai 227.972 jiwa atau 98,9% hampir mendekati target yang telah ditentukan.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Melitus*

Diabetes Melitus (DM) atau Kencing Manis merupakan penyakit saat kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula didalam darah tidak dapat dimetabolisme. *Diabetes Melitus* disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Berikut adalah Data Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Melitus* (DM) di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022.

Tabel 2.16
Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Melitus* (DM) di
Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022

Uraian	2021	2022
Jumlah Penderita DM	64.920	62.100
Penderita DM Dilayani	62.409	61.143
Persentase Terlayani	96,1	98,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023)

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa berat (psikotik akut dan *skizofrenia*) sebagai upaya pencegahan sekunder, meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi. Berdasarkan pencatatan dan pelaporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap ODGJ telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya deteksi dini faktor resiko kepada Dinas Instansi, Tatanan Pendidikan serta kepada komunitas masyarakat. Berikut adalah Data Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ).

Tabel 2.17
Data Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022

Uraian	2021	2022
Jumlah Sasaran ODGJ	1.665	1.614
Penderita ODGJ Dilayani	1.331	1.585
Persentase Terlayani	80,4	98,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023)

Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini (Tabel 2.17).

Tabel 2.18
Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Dinas Kesehatan
	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan	100%	100%	100%	100%	

No	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Target	Capaian	
	Layanan Kesehatan					
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapat Layanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita					
	Jumlah Balita Yang Mendapat Layanan Kesehatan	100%	100%	100%	99,73%	
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					
	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar	100%	96.59%	100%	72,23%	

No	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Target	Capaian	
	Yang Mendapat Layanan Kesehatan					
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					
	Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapat Layanan Kesehatan	100%	96.32%	100%	97%	
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					
	Jumlah Warga Negara Pada Usia Lanjut Yang Mendapat Layanan Kesehatan	100%	77.88%	100%	84,72%	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Yang Mendapat Layanan Kesehatan	100%	98.69%	100%	98,58%	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita					

No	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Target	Capaian	
	Diabetes Melitus					
	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapat Layanan Kesehatan	100%	97.40%	100%	98.65%	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat					
	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Berat (ODGJ) Yang Terlayani Kesehatan	100%	80.52%	100%	95,66%	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis Yang Mendapat Layanan Kesehatan	100%%	25.62%	100%%	80,78%	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan					

No	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Target	Capaian	
	Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)					
	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) Yang Mendapat Layanan Kesehatan	100%	66.92%	100%	98,33%	

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2022

2.3.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

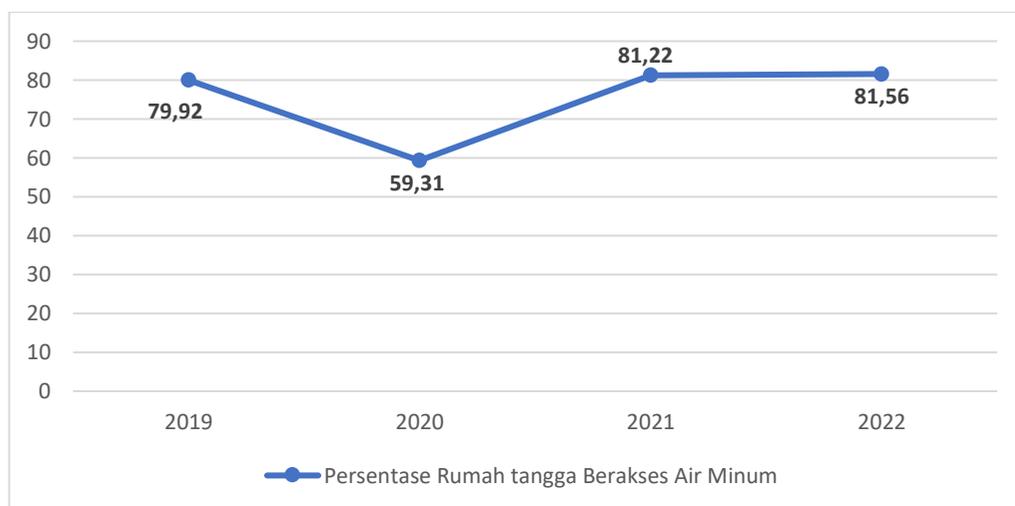
Jenis Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk maka kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat juga meningkat jumlahnya. Untuk menjamin semua masyarakat mempunyai akses terhadap air minum yang layak dan aman, Kementerian Kesehatan menargetkan 100% akses air minum layak dan 15% air minum aman di Tahun 2022.

Air minum yang ideal adalah yang aman dikonsumsi, jernih, tidak berbau, tidak berasa aneh, bersuhu wajar, bersih dari bakteri serta mengandung sejumlah mineral. Menurut data dari Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang bahwa capaian rumah tangga berakses air minum mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2022 rumah tangga berakses air minum mencapai 81,56 persen atau 244.688 RT. Kenaikan ini sudah melebihi target awal yang ditentukan yaitu sebesar 79,02 persen atau 237.060 RT. Hal ini dikarenakan adanya percepatan akses pasokan air, sanitasi dan kebersihan yang dikelola dengan naman oleh Pemerintah Daerah, selain itu juga sosialisasi perilaku hidup bersih kepada masyarakat sekitar terus digalakkan. Tren Rumah Tangga Berakses Air Bersih dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.47
Tren Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%)
di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2022



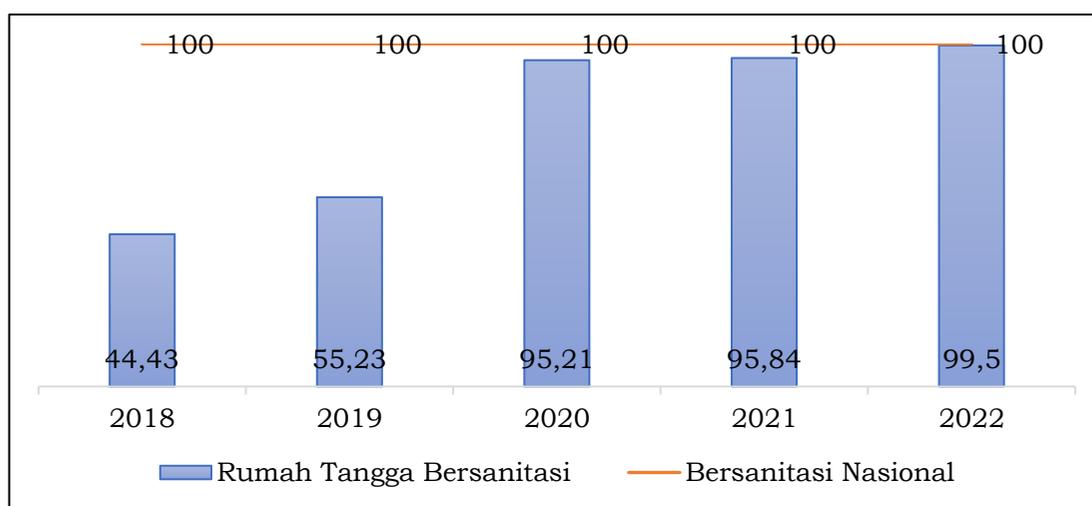
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (2023)

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Air limbah rumah tangga seperti air sisa deterjen, air sabun dan air tinja merupakan satu diantaranya. Limbah rumah tangga berpotensi dapat merusak ekosistem air, mencemari tanah, serta berpengaruh terhadap sumber air minum masyarakat. Rumah tangga bersanitasi salah satu kriterianya adalah mempunyai WC dan akses sanitasi yang layak. Target capaian untuk rumah tangga bersanitasi nasional adalah 100%.

Di Kabupaten Sumedang, peningkatan persentase rumah tangga bersanitasi melesat di Tahun 2020. Dari 55,23 persen pada tahun 2019 menjadi 95,21 persen di tahun berikutnya. Sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Tahun 2022, persentase rumah tangga bersanitasi mencapai 99,5 persen dan hampir mendekati standar pelayanan nasional. Jumlah rumah tangga yang telah bersanitasi atau telah melakukan perilaku “Stop BABS” di Tahun 2022 mencapai 396.836 keluarga dari total keluarga sasaran sebanyak 398.779 keluarga. Melalui program Kabupaten Sehat, Pemerintah Daerah membangun tempat pengolahan limbah domestik rumah tangga, terutama untuk limbah kakus dengan pembangunan septi tank komunal di beberapa wilayah yang masyarakatnya masih masih membuang limbah kakus ke sungai. Capaian Rumah Tangga ber-sanitasi dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 2.48
Capaian Rumah Tangga ber-Sanitasi (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2023)

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penanataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022 bisa dilihat pada Tabel 2.18 dibawah ini.

Tabel 2.19
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari					Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	100%	95,55%	100%	52,10%	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	100%	79,23%	100%	90,14%	

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2022

2.3.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di permukiman rawan bencana untuk menata kembali kehidupannya di tempat yang baru. Berikut adalah data penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.20
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana di
Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun (KK)	
		2021	2022
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	30	0

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2023)

Pada tahun 2021 terjadi bencana alam berupa tanah longsor di Kecamatan Cimanggung, jumlah keluarga yang terdampak bencana tersebut berjumlah 135 kepala keluarga. Pasca bencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang menindaklanjuti program Pemerintah Pusat, baru merelokasi sekitar 30 kepala keluarga yang termasuk ke dalam daftar warga terdampak bencana prioritas I, melalui penyediaan rumah khusus yang diperuntukan bagi warga terdampak bencana. Adapun untuk Tahun 2022, Pemerintah Daerah belum melakukan relokasi sisa warga yang terdampak bencana dikarenakan belum tersedianya lokasi pembangunan pemukiman di daerah sekitar yang jauh dari zona merah bencana.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, belum pernah terjadi di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2022. Dikarenakan program-program Pemerintah Daerah lebih dititikberatkan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti program dalam upaya penurunan kemiskinan, pengangguran dan stunting serta memperbaiki fasilitas umum dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022 secara umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
	1. Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana 2. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	100%	98,91%	100%	98,91%	
2.	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	1. Subsidi Uang Sewa 2. Penyediaan Rumah Layak Huni	100%	99,52%.	100%	100%	

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2022

2.3.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

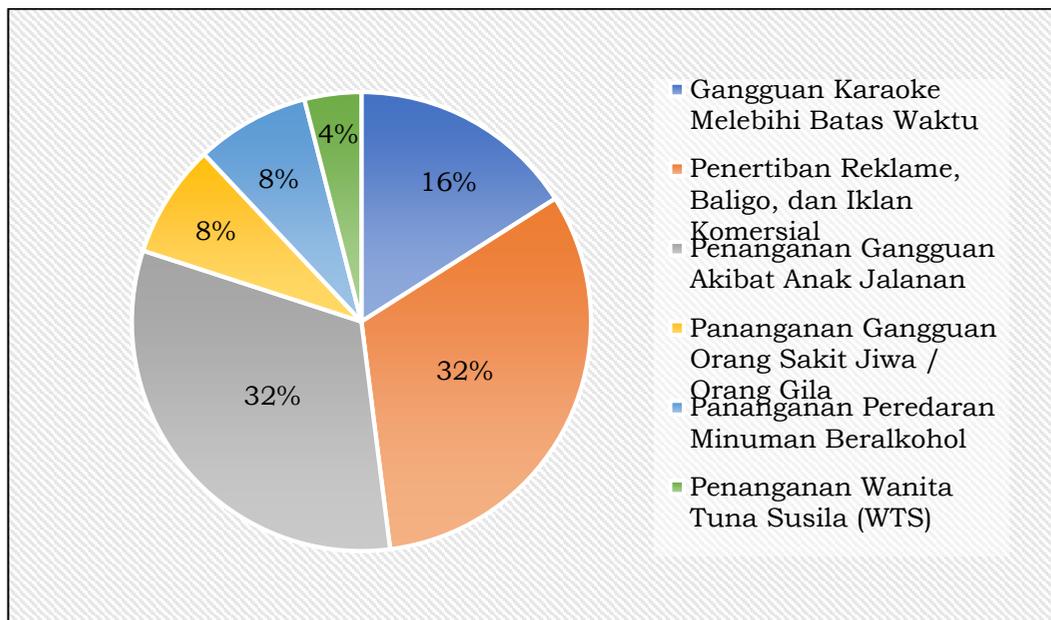
Jenis Pelayanan Dasar SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas:

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. Pemerintah

memberikan pelayanan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban umum. Tingkat gangguan tibumtranmas di Kabupaten Sumedang meliputi kejadian kebakaran, konflik sosial, penyakit masyarakat dan dukungan bencana lainnya yang masih relative tinggi. Beberapa jenis gangguan yang sering ditemukan di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.49
Jenis Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2022



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja (2023)

Jumlah gangguan yang terjadi sepanjang Tahun 2022 didominasi oleh gangguan akibat anak jalanan dan penertiban reklame, baligo dan iklan komersial sebesar 32 persen. Anak jalanan menjadi permasalahan sosial terutama di kota besar yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Keberadaan anak jalanan salah satunya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan penyimpangan kepribadian. Dampak dari keberadaan anak jalanan juga berpengaruh negative, diantaranya merusak pemandangan dan keindahan kota, masalah kebersihan dan mengganggu stabilitas keamanan serta kenyamanan masyarakat.

b. Pelayanan informasi rawan bencana

Pelayanan informasi rawan bencana merupakan pelayanan informasi tentang bagian wilayah yang rawan bencana secara terperinci berbasis kajian resiko bencana serta wilayah yang

berpotensi terpapar bencana. Jenis informasi rawan bencana dapat berupa sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana. Berikut adalah data pelayanan informasi rawan bencana di Kabupaten Sumedang selama Tahun 2021-2022.

Tabel 2.22
Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten Sumedang

No	Jenis Pelayanan	Tahun	
		2021	2022
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (orang)	691.534	715.525

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang (2023)

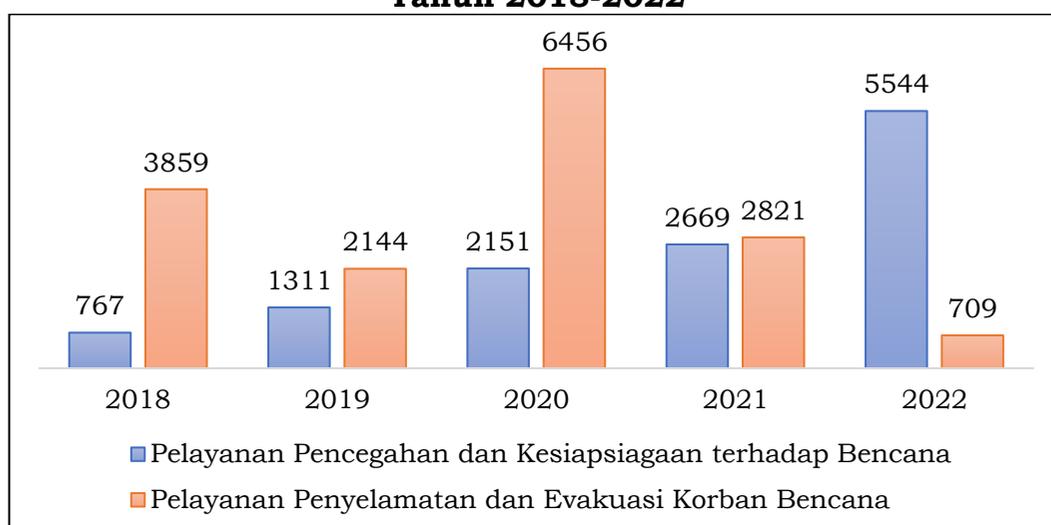
Pada tahun 2021 di Kabupaten Sumedang sudah terbentuk layanan informasi rawan bencana. Layanan tersebut berupa informasi terkait perubahan iklim, titik lokasi rawan bencana dan layanan pengaduan dan laporan ke tingkat kabupaten. Diawal tahun pembentukan informasi rawan bencana sudah tersampaikan kepada 691.634 orang, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 23.991 orang menjadi 715.525 orang yang dilakukan sosialisasi dan media sosial. Kenaikan ini dikarenakan pada tahun 2022, terjadi 140 kejadian bencana di Kabupaten Sumedang seperti longsor dan pergerakan tanah, banjir dan banjir bandang, pohon tumbang, angin puting beliung dan kebakaran hutan, sehingga untuk mengantisipasi kecajian bencana dilakukan sosialisasi informasi rawan bencana terutama di daerah-daerah yang berpotensi bencana, sehingga juga informasi kebencanaan dilakukan melalui media sosial sehingga dapat menjangkau semua jenis usia terutama usia produktif yang aktif menggunakan media sosial.

c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapan Terhadap Bencana merupakan kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim sedangkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana merupakan tindakan setelah adanya kejadian bencana. Pada Tahun 2021, Pelayanan pencegahan dan kesiapan terhadap bencana mencapai 2.661 orang, sedangkan Tahun 2022 naik menjadi 5.544

orang. Pelayanan tersebut dilakukan dengan memberikan edukasi kebencanaan, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah rawan dan potensi bencana dapat memitigasi kejadian bencana lebih awal terlebih pada tahun 2022 banyak kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Lain halnya dengan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang mengalami penurunan menjadi 709 orang pada Tahun 2022. Hal tersebut berkesinambungan dengan pelayanan pencegahan dan kesiapan terhadap bencana yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pembenahan fisik di daerah-daerah rawan dan berpotensi bencana, maka tindakan evakuasi korban bencana pun dapat diminimalisir, seperti yang tergambar pada gambar berikut.

Gambar 2.50
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (orang)
Tahun 2018-2022

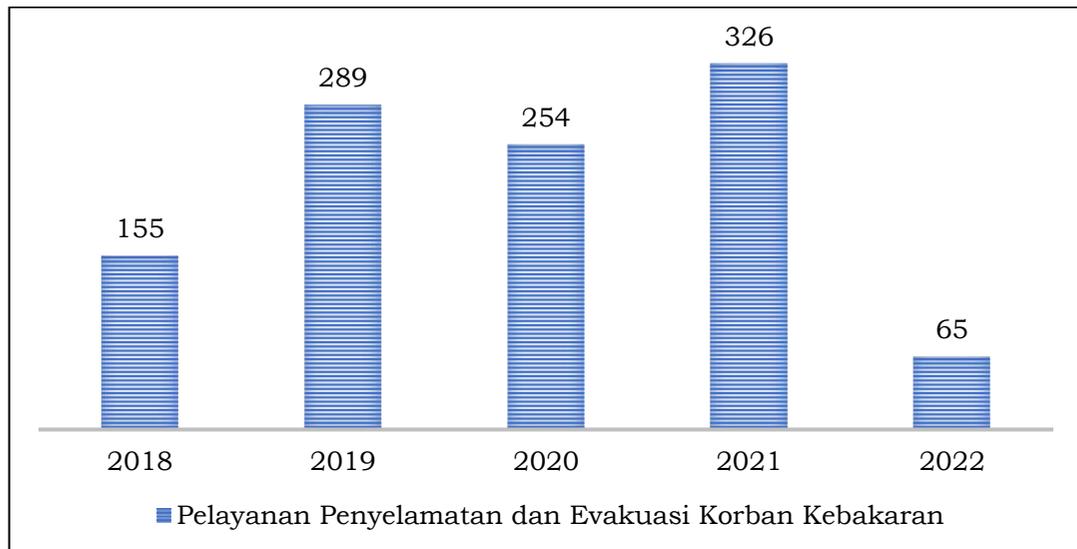


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (2023)

d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan salah satu jenis SPM yang termasuk ke dalam bidang tantribumlinmas. Berkembangnya Kawasan permukiman di Kabupaten Sumedang saat ini belum sepenuhnya patuh dan taat terhadap implementasi aturan yang berlaku terutama terkait dengan pencegahan penanggulangan kebakaran. Adapun pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.51
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Tahun 2018-2022



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja (2023)

Berdasarkan gambar diatas, jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran sebanyak 65 layanan dari total jumlah kejadian kebakaran yang terjadi di Kabupaten Sumedang sebanyak 88 kejadian, atau sekitar 73,86% kejadian kebakaran yang dapat ditangani. Ketimpangan antara jumlah kejadian kebakaran dengan jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban dikarenakan terbatasnya jumlah mobil pemadam kebakaran. Bahkan tidak semua wilayah/kecamatan yang difasilitasi atau disediakan mobil pemadam, sehingga jarak jangkauan tim pemadam pun akan berdampak terhadap jumlah kejadian kebakaran yang tertangani.

Adapun capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang Tahun 2021–2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang
Tahun 2021-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1.	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	90%	Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah Yang Harus Dilayani	100%	100%	100%	96%	
3.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	
4.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana					
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	
5.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran					Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Target	Capaian	
	Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan Dan Evakuasi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	84,16%	100%	84,16%	
	Jumlah Layanan Pemadaman Yang Dilakukan Oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar, Dan Atau Kebakaran Dan Penyelamatan / Perangkat Daerah	100%	6,63%	100%	6,63%	

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2022

2.3.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial berdasarkan permendagri Nomor 69 Tahun 2012 terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Realisasi Jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial dapat dilihat pada Tabel 2.24 di bawah ini:

Tabel 2.24
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial (Orang)
Tahun 2018-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penanganan penyandang disabilitas terlantar	962	1053	993	442	782
2	Penanganan anak terlantar	376	83	83	407	317
3	Penanganan lanjut usia terlantar	530	3.729	3.729	874	736
4	Penanganan gelandang dan pengemis	-	-	13	7	8
5	Penanganan Korban Bencana Kewenangan Daerah Kab/Kota	977	2.253	2.253	1.053	5.283

Sumber : Dinas Sosial (2023)

Sedangkan capaian SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada Tabel 2.24 di bawah ini:

Tabel 2.25
Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Sumedang
Tahun 2021-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	100%	18.30 %	100%	95,53%	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti					

No	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Perangkat Daerah
		Target	Capaian	Target	Capaian	
	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	51.65%	100%	98,04%	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti					
	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	9.6%	100%	97,81%	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti					
	Persentase Tuna Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	83.33%	100%	100%	
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota					
	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	100%	100%	

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2023

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pada tahun 2021 terjadi Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Hal tersebut mempengaruhi fokus urusan-urusan Pemerintahan Daerah.

2.4.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

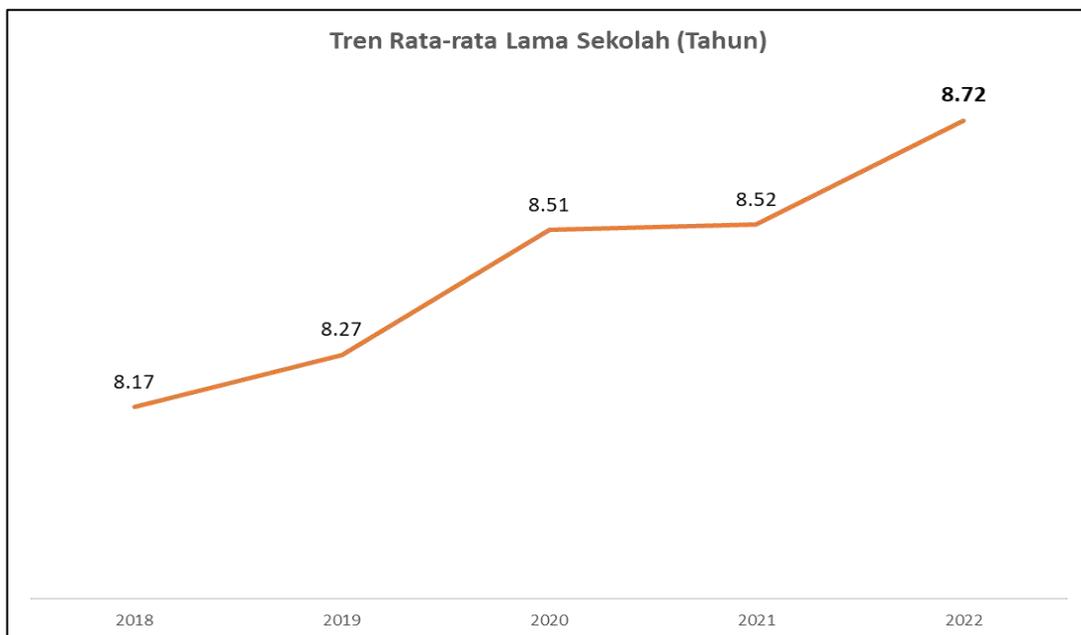
2.4.1.1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan memiliki beberapa aspek yang merupakan fokus urusan wajib pelayanan dasar Kabupaten. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan salah satunya adalah menangani pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan. Berikut adalah beberapa indikator penentu dalam urusan pendidikan.

1) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sumedang mempunyai tren positif setiap tahunnya. Meski sempat melambat capaian di 2021, namun dapat kembali tumbuh lebih cepat pada tahun 2022 seperti disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.52
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – Tahun 2022



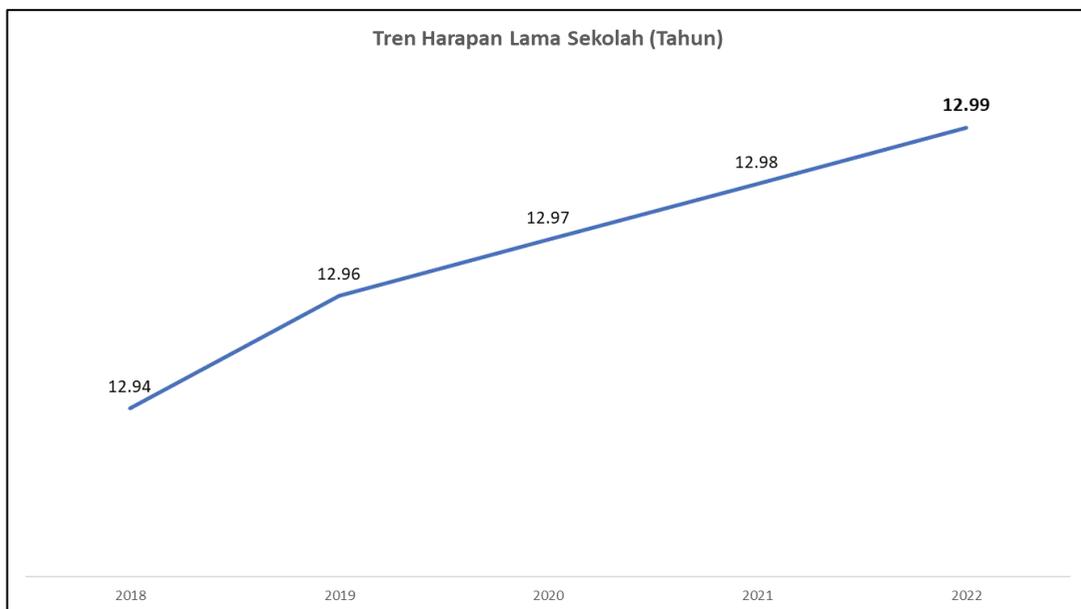
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2023)

Faktor pendukung naiknya angka rata-rata lama sekolah antara lain tenaga pendidik yang adaptif terhadap perubahan metode pembelajaran, penyediaan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan, penyediaan wifi gratis, dan tingginya partisipasi orangtua dalam pendampingan proses pembelajaran.

2) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sumedang juga mengalami peningkatan namun tumbuh sangat lambat, hanya meningkat 0,01 tahun setiap tahun sejak 2019. Berikut adalah Gambar HLS Kabupaten Sumedang, Tahun 2018-2022.

Gambar 2.53
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2023)

Faktor pendukung naiknya angka harapan lama sekolah antara lain meningkatnya akses pemerataan dan mutu layanan pendidikan walaupun belum signifikan.

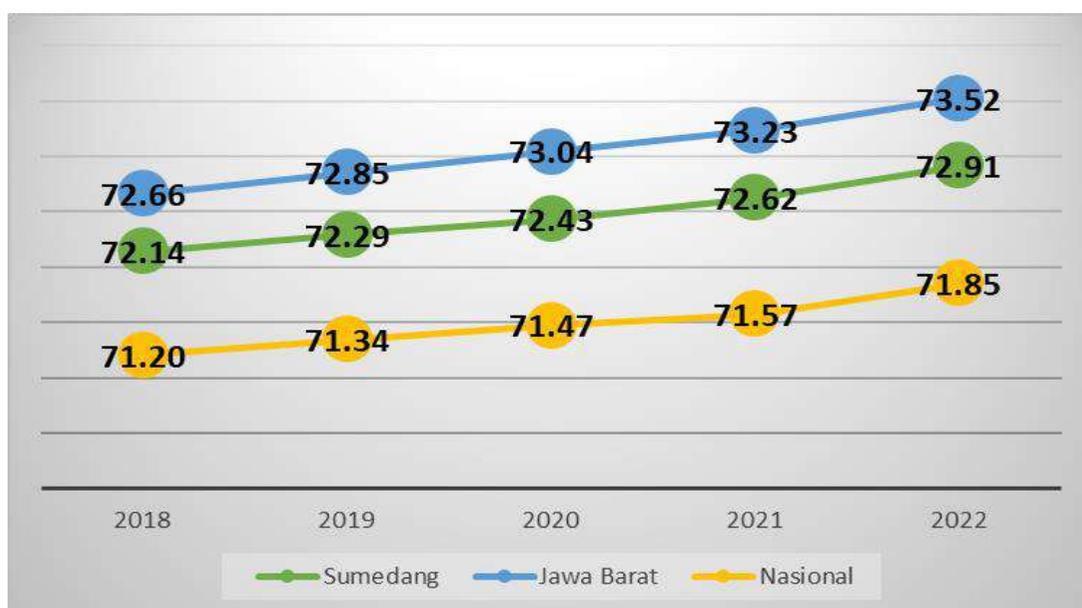
2.4.1.2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan dalam pemerintahan. Beberapa indikator yang menunjang sasaran Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, adalah sebagai berikut:

1) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah. AHH Kabupaten Sumedang terus mengalami kenaikan seperti yang tersaji pada Gambar dibawah ini.

Gambar 2.54
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Indonesia (2023) (diolah)

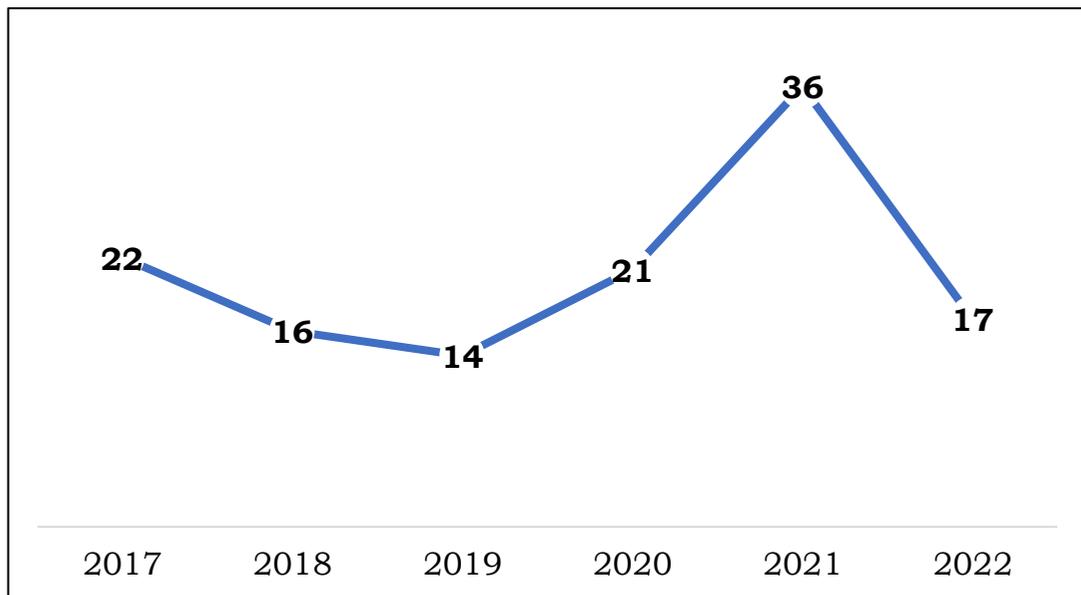
Berdasarkan Gambar di atas dapat diketahui bahwa AHH Kabupaten Sumedang menunjukkan tren positif. Bahkan Tahun 2022 AHH Kabupaten Sumedang mencapai 72,91 tahun dengan capaian lebih tinggi dari AHH Nasional yaitu 71,85 tahun meskipun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH Jawa Barat sebesar 73,52 tahun. Kenaikan AHH ini dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik. Dengan semakin tingginya AHH di Kabupaten Sumedang menandakan adanya keberhasilan dari beberapa program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Sumedang.

2) Jumlah Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI masih merupakan masalah tertinggi kesehatan di Indonesia dan tingginya AKI

mencerminkan kualitas akan pelayanan kesehatan. Pendataan mengenai AKI sangat bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas resiko tinggi.

Gambar 2.55
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Sumedang
Tahun 2017-2022



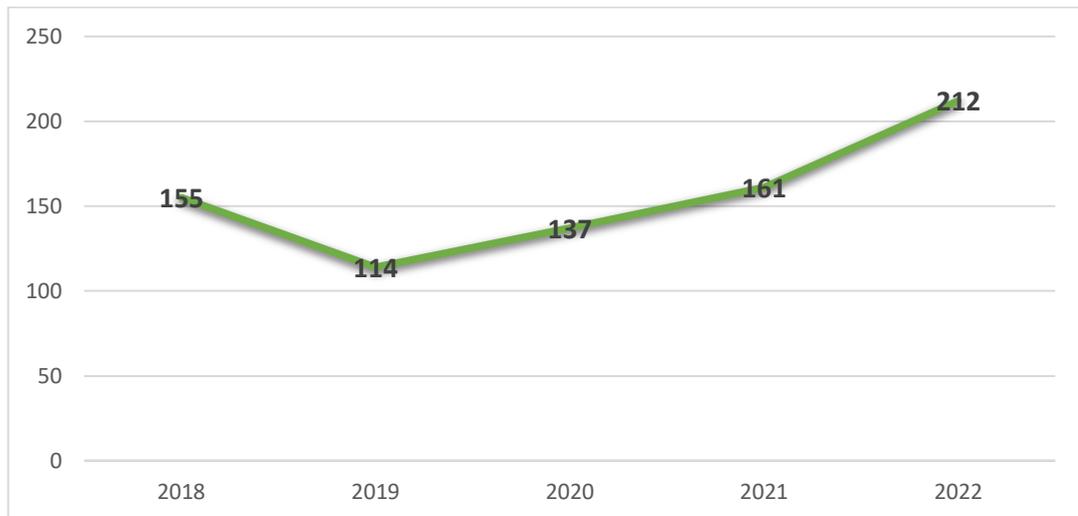
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023) (diolah)

Berdasarkan Gambar di atas, trend kematian ibu di Kabupaten Sumedang pada mulanya mengalami penurunan. Namun sejak terjadi pandemic Covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2021 terjadi peningkatan jumlah Kematian Ibu yang cukup tinggi. Namun menurun pada angka 17 pada Tahun 2022.

3. Jumlah Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tren rasio kematian bayi sangat fluktuatif. Tahun 2022 merupakan realisasi tertinggi jumlah kematian bayi di Kabupaten Sumedang yaitu sebanyak 212 jiwa. Tren Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 disajikan dalam Gambar berikut.

Gambar 2.56
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2023) (diolah)

4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Sesuai Standar

Fasilitas Kesehatan (Faskes) merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Faskes terbagi menjadi tingkat 1, 2 dan 3 dapat diartikan sebagai jenis tingkatan pelayanan kesehatan yang dihadirkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat. Fungsi Faskes yaitu sebagai tempat perawatan kesehatan membuat fasilitas publik yang satu ini sangat penting keberadaannya di setiap wilayah.

Faskes tingkat pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. FKTP meliputi puskesmas atau yang setara, praktek dokter, praktek dokter gigi, klinik pratama atau yang setara, dan Rumah Sakit kelas D atau yang setara. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu serta merata dan non diskriminatif. Sehingga setiap pasien dapat memperoleh pelayanan kesehatan efektif serta lebih mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya. Berikut adalah Fasilitas Kesehatan.

Tabel 2.26
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit Umum	3
Puskesmas Rawat Inap	17
Puskesmas Non Rawat Inap	18
Puskesmas Pembantu	66
Klinik Pratama	74
Klinik Utama	9
Tempat Praktik Mandiri Dokter	91
Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi	27

Sumber : Dinas Kesehatan (2023)

Jumlah puskesmas di Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2016-2021 berjumlah 35 puskesmas. Hal ini menggambarkan bahwa dari 26 kecamatan seluruhnya telah memiliki fasilitas puskesmas. Adapun kecamatan yang memiliki puskesmas lebih dari satu yakni Kecamatan Jatinangor (2 puskesmas), Cimanggung (2 puskesmas), Pamulihan (2 puskesmas), Tanjungsari (2 puskesmas), Sumedang Selatan (2 puskesmas), Sumedang Utara (3 puskesmas), Tanjungkerta (2 puskesmas), dan Buahdua (2 puskesmas). Berdasarkan SPM Kemenkes rasio puskesmas adalah 1:10.000 atau dengan kata lain satu puskesmas diperuntukan melayani 10.000 penduduk. Melihat hal tersebut maka jumlah puskesmas di Kabupaten Sumedang masih sangat kurang. Untuk membantu pelayanan kesehatan Kabupaten Sumedang memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu).

Pustu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas, selain itu juga Pustu merupakan bagian integral Puskesmas yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas, dan bertujuan untuk meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Meskipun demikian, untuk optimalisasi kualitas pelayanan perlu ada peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan atau pembangunan Puskesmas/Pustu atau meningkatkan status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas.

5. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan Memenuhi Standar

Tenaga kesehatan adalah orang-orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan. Tenaga Kesehatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan meliputi: 1) Tenaga Medis; 2) Psikologi klinis; 3) Keperawatan; 4) Kebidanan (Bidan); 5) Kefarmasian (Apoteker, tenaga teknis kefarmasian); 6) Tenaga Kesehatan Masyarakat; 7) Kesehatan Lingkungan; 8) Gizi (Nutrisionis dan Dietisien); 8) Keterampilan Fisik (Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapi Wicara, Akupuntur); 9) Keteknisan Medis; 10) Biomedika (Radiografer, Elektromedis, Radioterapis, Ortitik Prostetik, ahli laboratorium Medik, dan Fisikawan Medik. Sedangkan Asisten Tenaga Kesehatan meliputi 1) Asisten Perawat; 2) Asisten Tenaga Kefarmasian; 3) Asisten Dental; 4) Asisten teknisi Laboratorium Medik; dan 5) Asisten Teknisi Pelayanan Darah.

Tenaga kesehatan merupakan pokok dari subsistem SDM kesehatan, yaitu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan, serta pendayagunaan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain itu juga banyaknya tenaga kesehatan yang pensiun dan terbatasnya kuota pengangkatan PNS dan PPPK Bidang kesehatan. Berikut adalah Data Tenaga Kesehatan yang ada di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.27
Tenaga Kesehatan Tahun 2022

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1.	Dokter	136
2.	Dokter Spesialis	85
3.	Dokter Gigi	221
4.	Tenaga Keperawatan	940
5.	Tenaga Kebidanan	758

Sumber : Dinas Kesehatan (2023)

6. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Faskes Tingkat 2 (dua) atau Faskes Tingkat Lanjutan (FKRTL) merupakan Faskes yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik/subspesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Pelaksanaan sistem rujukan di Indonesia telah diatur dengan bentuk bertingkat atau berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga, yang dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-sendiri namun berada di suatu sistem dan saling berhubungan.

Rujukan merupakan proses yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan terutama untuk daerah dengan keterbatasan fasilitas. Dengan proses rujukan yang baik pasien bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas serta komprehensif. Di Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan mewakili 35 Puskesmas membuat perjanjian kerja sama untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan program rujuk balik dengan Rumah Sakit. Jumlah Rumah Sakit Umum di Kabupaten Sumedang berjumlah 3 (tiga), yaitu RSUD Sumedang, RSU Pakuwon dan RSU Harapan Keluarga.

Menurut WHO idealnya suatu negara memiliki 1 (satu) tempat tidur Rumah Sakit untuk setiap 1.000 penduduk atau dengan kata lain memiliki *ed to population ratio* 1:1.000. Dengan demikian indikator dari terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tersebut. Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Kabupaten Sumedang Tahun 2022 disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.28
Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Kabupaten Sumedang
Tahun 2022

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah Tempat Tidur
(1)	(2)	(3)
1	RSUD Sumedang	352
2	RSU Pakuwon	117
3	RSU Harapan Keluarga	50

Sumber : Dinas Kesehatan (2023)

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa total dari jumlah tempat tidur dari ketiga RSUD adalah 519 buah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sumedang saat ini maka kebutuhan tempat tidur di RSUD sekitar 646 tempat tidur.

2.4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap

Total panjang jalan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 sepanjang 774,606 km. Namun dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1350-Rek/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor 2 (JKP-2), Jalan Kolektor 3 (JKP-3), Jalan Kolektor 4 (JKP-4), Jalan Lokal (JLP), Jalan Lingkungan (JLingP) dan Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAS), Jalan Kolektor (JKS), Jalan Lokal (JLS) dan Jalan Lingkungan (JLingS), maka ada penurunan status fungsi menjadi jalan lingkungan sebanyak 10 ruas jalan sepanjang 7,238 km yaitu:

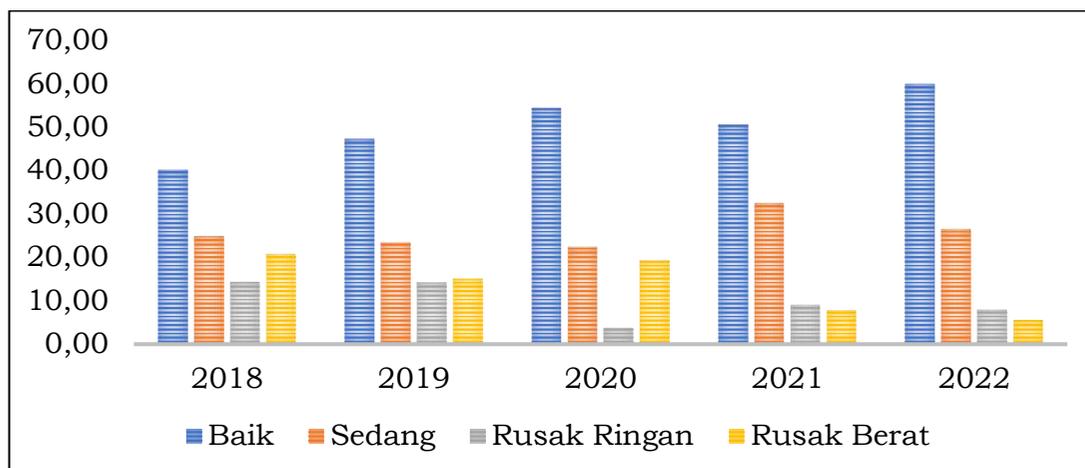
1. Ruas jalan Mesjid 0,100 km;
2. Ruas jalan Pendopo 0,123 km;
3. Ruas jalan Terminal Ketib 0,157 km;
4. Ruas jalan Talun Pojok 0,458 m;
5. Ruas jalan Mekarsari 0,750 m;
6. Ruas jalan Komplek Persekolahan Licin 1,100 Km;
7. Ruas jalan Komplek Workshop 0,700 m;
8. Ruas jalan Komplek Prabu Kian Santang 1,500 Km;
9. Ruas jalan Joglo-Paseh 1,500 Km; dan
10. Ruas jalan Komp Puskopad 0,850 Km.

Akan tetapi dengan adanya Keputusan Gubernur tersebut terdapat penambahan ruas jalan sepanjang 7,000 Km dengan lokasi sebagai berikut:

1. Ruas Jalan Citengah - Cigumentang/Sindangwangi (Batas Kabupaten Bandung), 5,000 km;
2. Ruas Jalan Wado - Cikareo 0,500 km; dan
3. Ruas Jalan Jalan Cikawung - Darmaraja 1,500 km.

Sehingga panjang jalan kabupaten semula 774,606 km menjadi 774,368 km. Berdasarkan kondisinya dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi berat. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Gambar 2.57
Kondisi Jalan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022

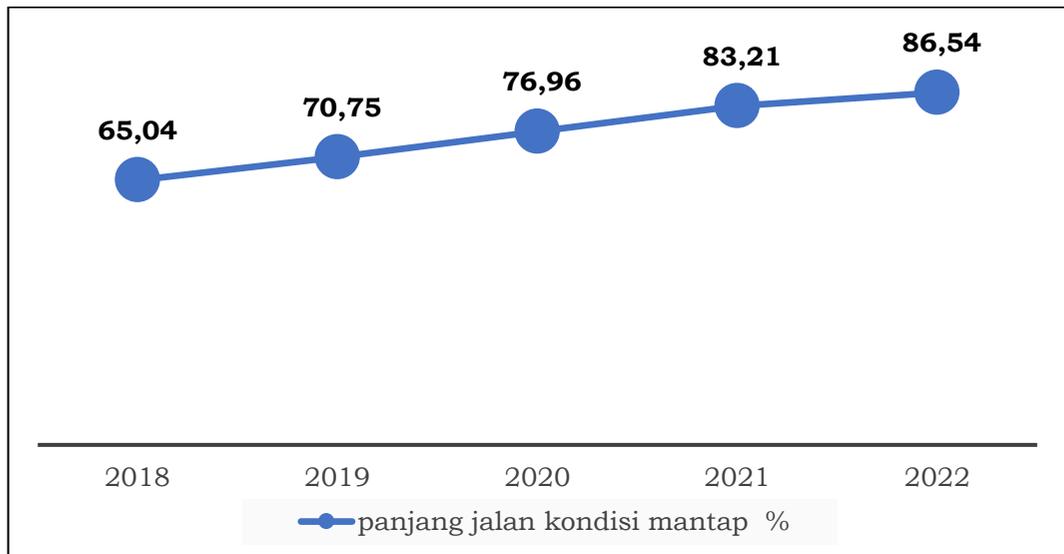


Sumber : Dinas PUPR Kab Sumedang (2023)

Kondisi jalan mantap dapat diartikan sebagai kondisi ruas jalan dengan kualitas fisik dan layanan jalan yang dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan, dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Tentunya walaupun kondisi sedang masuk pada kriteria teknis yang memenuhi syarat untuk dikatakan jaringan jalan dalam kondisi mantap karena masih bisa dilalui dengan kecepatan >40 Km/Jam.

Jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan pada setiap tahun dan pada tahun 2022 mencapai 86,54% atau 670.138 km. Upaya perbaikan infrastruktur jalan ini sebagai salah satu bentuk peningkatan penunjang perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumedang serta dapat dilihat pada Gambar 2.58 di bawah ini:

Gambar 2.58
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap di
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas PUPR Kab Sumedang (2023)

2) Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi dan Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik.

Pemerintah Kabupaten Sumedang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan infrastruktur irigasi. Tiga pilar pengelolaan sumber daya air meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Komponen utama jaringan irigasi meliputi bangunan, saluran pembawa, saluran pembuang serta petak yang diairi. Dengan adanya system irigasi dapat mempermudah petani dalam penggunaan air serta meningkatkan produktivitas hasil produksi padi, dikarenakan salah satu tujuan dari irigasi adalah untuk menambah air di lahan pertanian dan mencukupi kebutuhan air saat tidak turun hujan, selain itu juga fungsi lain dari irigasi adalah sebagai penunjang usaha pertanian, pengatur suhu tanah dan meningkatkan kualitas air.

Kondisi cakupan irigasi di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam
Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	41,15	43,08	44,10	45,2	46,6
a	Luas Irigasi Kondisi Baik (Ha)	23.452	24.552,6	19.692,17	20,122,17	20.633,4
b	Luas Irigasi Kabupaten (Ha)	56.993	56.993	56.993	30.069	30.069
2	Rasio Jaringan Irigasi (Rasio)	4,33	4,53	30,81	31,98	n/a
a	Panjang Saluran Irigasi yang Baik (m)	135.941,96	142.321,61	926.569,33	961.589,67	991.373,43
b	Luas Lahan Budidaya Pertanian (ha)	31.417	31.417	31.417	30.069	30.069

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2023)

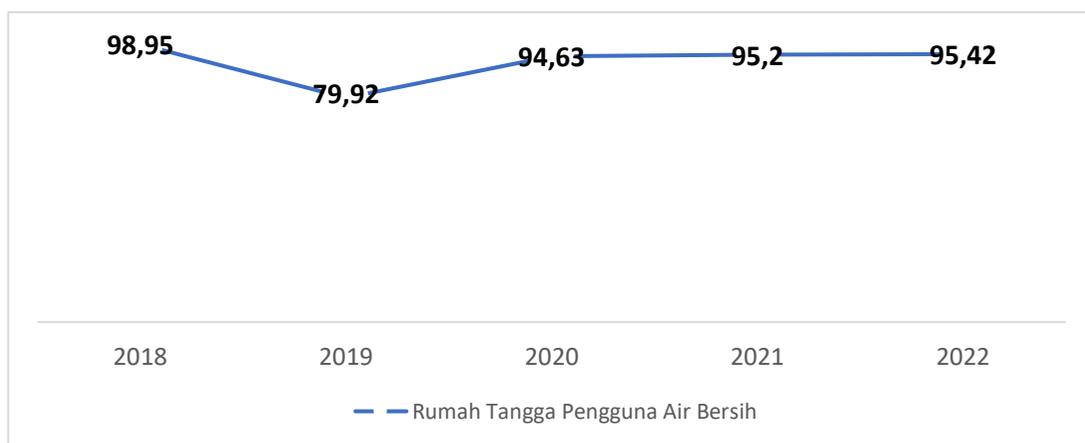
Persentase irigasi dalam kondisi baik menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 tercatat 41,15%, kemudian selama lima tahun meningkat menjadi 46,6% di Tahun 2022. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas dan kuantitas irigasi di Kabupaten Sumedang semakin membaik. Meskipun secara tren meningkat namun angka realisasi masih dibawah 50%, sehingga perlu terus diupayakan agar persentase irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dalam upaya menunjang produktivitas pertanian

3) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam mencapai kriteria hidup sehat. Hidup sehat sangat terkait dengan pola hidup yang bersih, baik bersih lingkungan maupun bersih sumber air. Ketersediaan sumber air bersih di Kabupaten Sumedang telah sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Berdasarkan gambar di bawah, jumlah rumah tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Dan pada Tahun 2022 jumlah rumah tangga yang mempunyai akses air bersih mencapai 95,42 persen, meskipun masih berada di bawah target nasional yakni 100 persen.

Peningkatan persentase rumah tangga yang mempunyai akses air bersih dilakukan melalui pembangunan infrastruktur air minum (Pamsimas, Dana APBD, Banprov dan DAK) serta pembangunan infrastruktur sanitasi dalam upaya meminimalisir air limbah domestik masyarakat dikarenakan masih ada masyarakat yang menggunakan air tanah sebagai sumber air bersihnya dengan tingkat resiko cemaran yang tinggi sampai amat tinggi, selain itu juga penggalakan penerapan PHBS di masyarakat terus dilakukan.

Gambar 2.59
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas PUPR Kab Sumedang (2023)

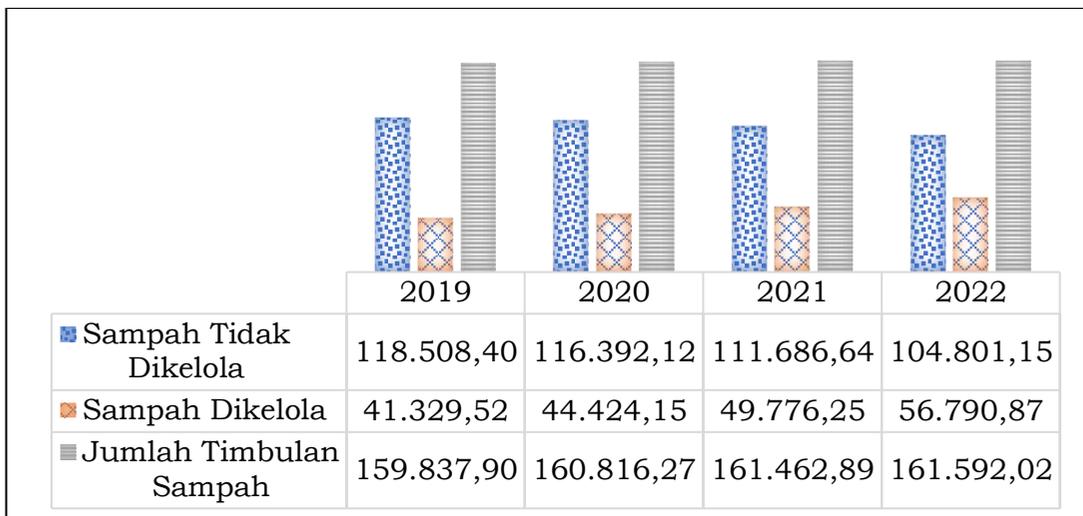
4) Persampahan

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah dapat digolongkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Untuk mengurangi timbulan sampah di

masyarakat maka diperlukan usaha untuk pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah yang ditujukan untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau estetika.

Metode pengelolaan sampah yang banyak digunakan di Indonesia melalui metode open dumping dan landfill, namun ada juga metode lain seperti pembuatan kompos, pembakaran, pemilahan dan daur ulang meskipun tidak banyak digunakan. Berikut adalah data Jumlah Timbulan Sampah, Sampah Dikelola dan Sampah Tidak Terkelola di Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.60
Jumlah Timbulan Sampah, Sampah Dikelola dan Sampah Tidak Terkelola Tahun 2019-2022 (Ton)



Sumber : Dinas DLHK Kab Sumedang (2023)

Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. Factor yang mempengaruhi timbulan sampah adalah jumlah penduduk, system pengumpulan/pembuangan sampah, jenis sampah dan kebiasaan masyarakat. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di II-101amper seluruh wilayah Sumedang, yang jika tidak dikelola akan berdampak negative bagi masyarakatnya, salah satunya ialah menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air dan udara.

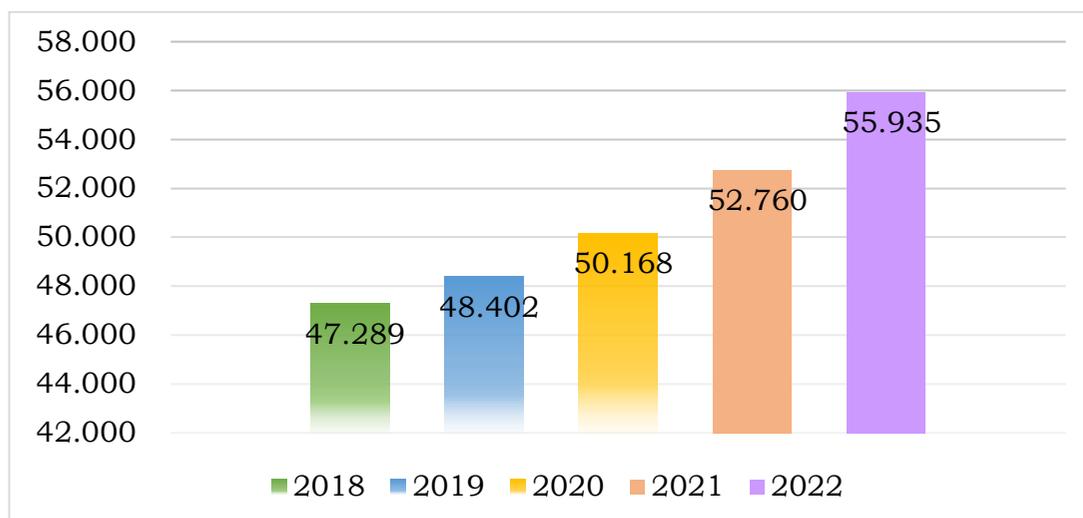
Namun, Pemerintah Kabupaten Sumedang terus melakukan pengelolaan sampah, sehingga jumlah sampah yang dikelola menunjukkan tren positif. Pada tahun 2022 jumlah sampah yang dikelola mencapai 56.790,87 ton atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7.014,62 ton. Pengelolaan sampah ini dilakukan melalui metode pengurangan sampah (pendaur ulangan sampah) dan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir. Meskipun demikian Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang masih belum terlaksana secara optimal, karena jumlah sampah yang tidak dikelola masih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang terkelola.

2.4.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni yang telah diperbaiki sampai dengan Tahun 2022 mencapai 55.935 unit atau 93,22% dari target sebanyak 60.000 unit, secara capaian target cukup baik namun masih perlu penanganan lebih lanjut karena data untuk rumah tidak layak huni secara keseluruhan masih perlu pendataan lebih lanjut. Untuk Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dapat dilihat pada Gambar 2.61 di bawah ini.

Gambar 2.61
Rumah Tidak Layak Huni Diperbaiki di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2023)

2) **Backlog Rumah**

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masih menjadi salah satu masalah di Indonesia. Hal ini pun diperparah dengan semakin tingginya harga properti akibat lahan yang sempit di daerah perkotaan yang masih menjadi tempat utama masyarakat mencari nafkah. Selain itu juga tingginya tingkat urbanisasi menjadi ancaman ekonomi bisa tetap tumbuh secara berkelanjutan, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.

Backlog rumah merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik Nasional maupun Daerah yang terkait bidang perumahan. Tujuannya adalah untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia masih menghadapi permasalahan kesenjangan antara ketersediaan rumah dengan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat. Perhitungan *backlog* rumah diperoleh dari jumlah keluarga eksisting dikurangi dengan jumlah rumah eksisting. Apabila ada selisih, maka keluarga tersebut belum memperoleh rumah dan masuk kedalam kategori *backlog*. Begitu pula di Kabupaten Sumedang, pendataan *backlog* rumah dilakukan pada Tahun 2020 dengan hasil analisis sebagai berikut.

Tabel 2.30
Jumlah Backlog Rumah Kabupaten Sumedang Tahun 2020

Kabupaten	Jumlah Rumah Tangga (unit)	Jumlah Backlog (unit)
Sumedang	292.088	51.580

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Sumedang, 2020

Analisis *backlog* rumah di Kabupaten Sumedang dilakukan melalui survei dalam kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang terakhir dilakukan pada Tahun 2020 dan akan dilaksanakan Kembali pada Tahun 2023.

3) **Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Adapun jenis PSU yang harus tersedia sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Prasarana perumahan dan permukiman meliputi : jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan pembuangan air hujan (drainase) dan tempat pembuangan sampah.
- b. Sarana perumahan dan permukiman meliputi ; sarana perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana Pendidikan, Kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau serta sarana parkir
- c. Utilitas perumahan dan permukiman meliputi : jaringan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran dan sarana penerangan jasa umum.

Pada Tahun 2023, total pengajuan perumahan dan perumahan baru di Kabupaten Sumedang berjumlah 320 perumahan akan tetapi yang baru diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah berjumlah 39 perumahan, dengan demikian oleh Pemerintah Daerah hanya memberikan PSU kepada perumahan yang telah diserahterimakan.

4) Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia. Permukiman kumuh pada umumnya mencakup 3 (tiga) segi yaitu kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi kesehatan dan sumber pencemaran. Kawasan permukiman kumuh merupakan penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman.

Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan

pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Permukiman kumuh di Kabupaten Sumedang semula tersebar hanya di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Cimanggung. Tahun 2017 luas total permukiman kumuh hanya 57,04 Ha (Keputusan Bupati No. 660/Kep.196-CIPTARUM/2016) dan di Tahun 2022 bertambah menjadi 164,69 Ha (Keputusan Bupati Nomor 122 Tahun 20). Penambahan luasan wilayah terjadi karena adanya penambahan lokus permukiman kumuh di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sumedang Selatan dan Kecamatan Sumedang Utara. Data luas permukiman kumuh Tahun 2018 dan 2019 masih null karena pada tahun tersebut sedang melakukan kajian mengenai permukiman kumuh dan kajian baru selesai pada awal Tahun 2020 dan tidak ada penambahan luasan sampai dengan tahun 2021. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 31
Luas Kawasan Kumuh (Ha) Tahun 2018-2022

Variabel Data	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Kawasan Kumuh	Masih dalam pendataan				169,64

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2023)

Tabel 2.32
Daftar Kawasan Kumuh Di Kabupaten Sumedang Berdasarkan SK
Kumuh Kabupaten Sumedang Nomor 122 Tahun 2022

NO.	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	LUAS SPOT KUMUH	LUAS TOTAL KUMUH	Kobarasi Penanganan
1	Kawasan Karasak	JATINANGOR	CISEMPUR	RW 04	2,44		
2	Kawasan Cisempur-Cibungur-Cipajaran	JATINANGOR	CISEMPUR	RW 09 & 05	5,00	18,70	Pemerintah Pusat
		JATINANGOR	CINTAMULYA	RW 05, 06, 07 & 08	13,70		
3	Kawasan Mandalangu	JATINANGOR	CIPACING	RW 07 & 08	8,55	8,55	Pemerintah Daerah
4	Kawasan Dangdeur-Sirmagalih	JATINANGOR	MEKARGALIH	RW 08,09,10,11, 12 & 13	16,40	16,40	Pemerintah Pusat
5	Kawasan Sayang	JATINANGOR	SAYANG	RW 01	2,52	2,52	Pemerintah Kabupaten
6	Kawasan Depok	TANJUNGSARI	JATISARI	RW 01,02 & 03	7,70	7,70	Pemerintah Kabupaten
7	Kawasan Pamagersari - Mariuk	TANJUNGSARI	JATISARI	RW 07 & 08	9,30	15,65	Pemerintah Pusat
		TANJUNGSARI	MARGALLUJI	RW 02 & 04	6,35		
8	Kawasan Lebak Biru-Pasigaran-Talun	TANJUNGSARI	PASIGARAN	RW 03 & 04	4,53	13,23	Pemerintah Provinsi
				RW 02	8,70		
9	Kawasan Pagaden	TANJUNGSARI	MARGAJAYA	RW 01 & 02	6,85	6,85	Pemerintah Kabupaten
10	Kawasan Citulampa	TANJUNGSARI	MARGAJAYA	RW 16 & 19	5,87	5,87	Pemerintah Kabupaten
11	Kawasan Gordah	TANJUNGSARI	MARGAJAYA	RW 17	2,78	2,78	Pemerintah Kabupaten
12	Kawasan Lembang	TANJUNGSARI	GUNUNGMANIK	RW 11	6,30	6,30	Pemerintah Kabupaten
13	Kawasan Panday	SUMEDANG SELATAN	REGOL WETAN	RW 01	4,14	4,14	Pemerintah Kabupaten
14	Kawasan Singaparna	SUMEDANG SELATAN	REGOL WETAN	RW 011	3,21	3,21	Pemerintah Kabupaten
15	Kawasan Ciraja	SUMEDANG SELATAN	MEKARRAHAYU	RW 05 & 06	4,24	4,24	Pemerintah Kabupaten
16	Kawasan Ciranggon	SUMEDANG SELATAN	MEKARRAHAYU	RW 07	5,87	5,87	Pemerintah Kabupaten
17	Kawasan Nalegong	SUMEDANG SELATAN	KOTAKULON	RW 10	6,34	6,34	Pemerintah Kabupaten
18	Kawasan Burujul	SUMEDANG SELATAN	KOTAKULON	RW 16	2,81	2,81	Pemerintah Kabupaten
19	Kawasan Genteng Pacing-Cibunut	SUMEDANG SELATAN	CIPAMEUNGPEUK	RW 10	7,70	7,70	Pemerintah Kabupaten
20	Kawasan Leles-Kebon Seureuh	SUMEDANG SELATAN	CIPAMEUNGPEUK	RW 11	2,83	2,83	Pemerintah Kabupaten
21	Kawasan Warung Cina II	CIMANGGUNG	MANGUNGARGA	RW 01 & 02	4,35	4,35	Pemerintah Kabupaten
22	Kawasan Legok Cabe	CIMANGGUNG	CIHANJUANG	RW 09	3,54	3,54	Pemerintah Kabupaten
23	Kawasan Talun	SUMEDANG UTARA	TALUN	RW 06	7,59	7,59	Pemerintah Kabupaten
24	Kawasan Situ	SUMEDANG UTARA	SITU	RW 09	5,08	5,08	Pemerintah Kabupaten
		JUMLAH			164,69	164,69	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

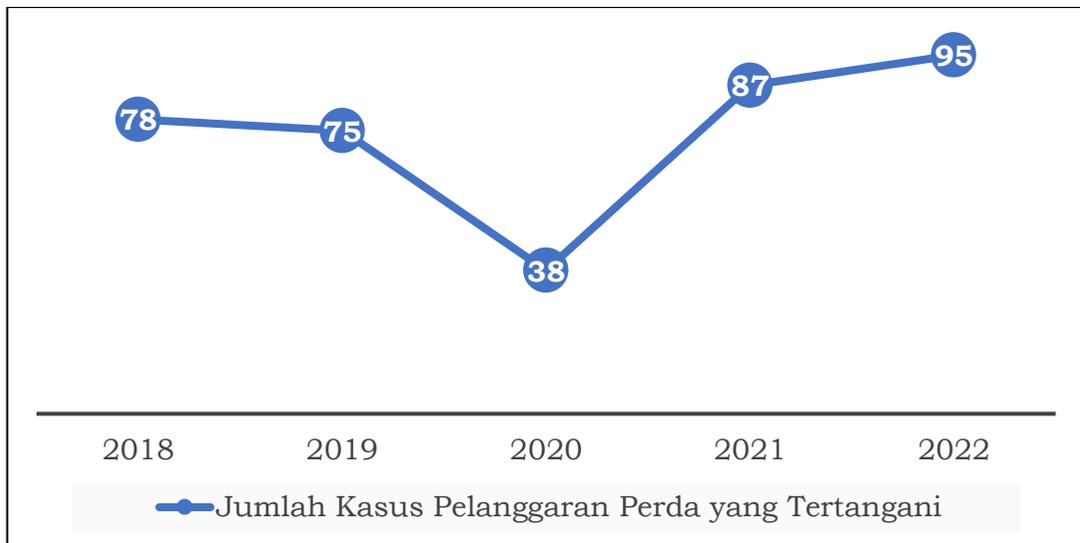
1) Penegakan Perda

Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Jumlah kasus pelanggaran Perda yang tertangani tren nya menunjukkan ada kenaikan setiap tahunnya terutama sejak tahun 2021 sebanyak 87 kasus yang tertangani lalu Tahun 2022 naik menjadi 95 kasus yang tertangani dan merupakan penanganan kasus terbanyak selama 5 (lima) tahun terakhir. Sosialisasi Perda yang kurang efektif mengakibatkan dangkalnya pemahaman masyarakat akan suatu Perda, yang pada akhirnya berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat.

Jenis pelanggaran Perda yang banyak terjadi di Kabupaten Sumedang meliputi : 1) Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan Pembangunan bangunan dan Gedung yang belum memiliki izin; 2)

Pengendalian dan pengawasan monitoring pajak; 3) Pelanggaran Perda/Perkada terkait peredaran minuman beralkohol dan WTS; 4) Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang harus dilengkapi SPPL (pertambangan, disposal, dll); dan 5) pelanggaran Perda/perkada terkait adanya keramba jarring apung di Kawasan Waduk Jatigede. Jenis pelanggaran yang tertangani terbanyak pada Tahun 2022 ialah Pelanggaran Perda/Perkada terkait peredaran minuman beralkohol dan WTS sebanyak 31 kasus. Jumlah pelanggaran Perda yang tertangani yang digambarkan pada Gambar dibawah ini.

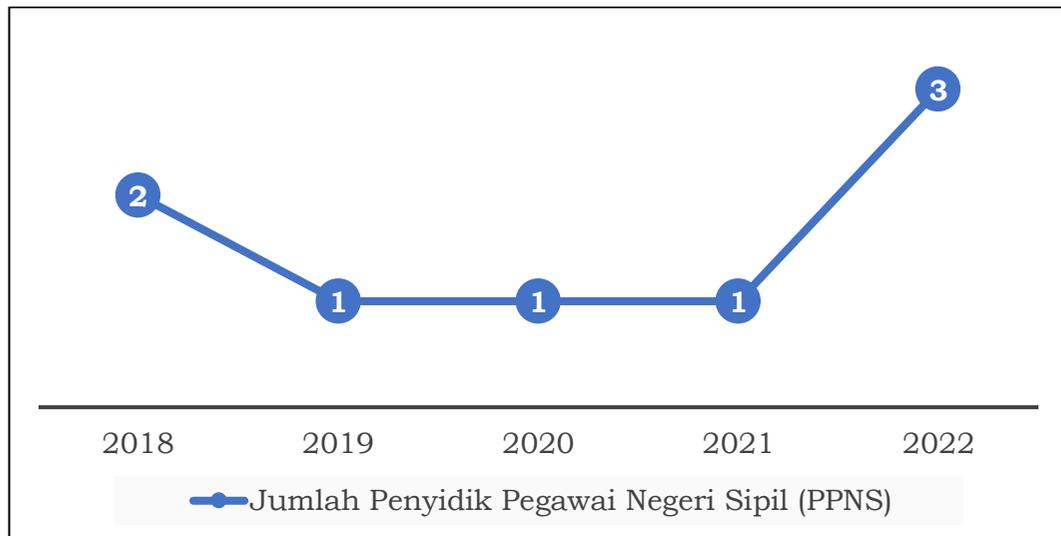
Gambar 2.62
Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang Tertangani di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2023)

Dengan tingginya kasus pelanggaran Perda, maka perlu didukung oleh kualitas sumber daya optimal serta sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sumber daya manusia yang maksimal belum dapat dipenuhi dalam sistem perekrutan aparat. Salah satunya ialah minimnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Kabupaten Sumedang yang tergambar pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.63
Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2023)

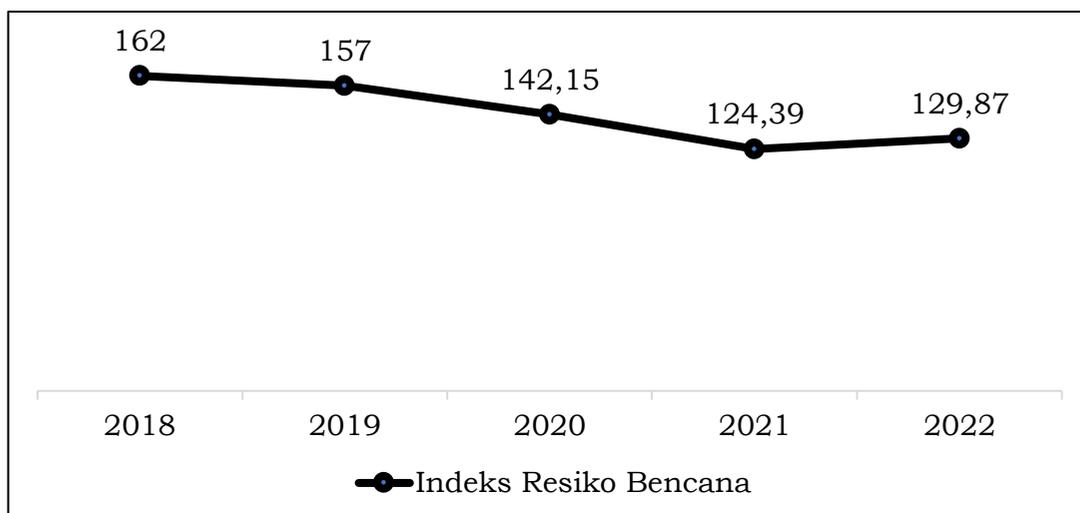
Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan. Tahun 2022 jumlah PPNS di Kabupaten Sumedang mengalami penambahan jumlah menjadi 3 (tiga) orang, dikarenakan adanya anggota Satpol PP Kabupaten Sumedang yang telah memiliki kualifikasi sebagai PPNS.

2) Indeks Resiko Bencana

Indeks risiko bencana merupakan perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan Riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Indeks risiko bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan faktor *Hazard*, *Vulnerability*, dan *Capacity*. Dengan demikian, indeks risiko bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada.

Dari tahun ke tahun Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Sumedang mengalami tren penurunan sehingga pada Tahun 2021 mencapai 124,39 poin, namun pada Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 129,87 poin, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

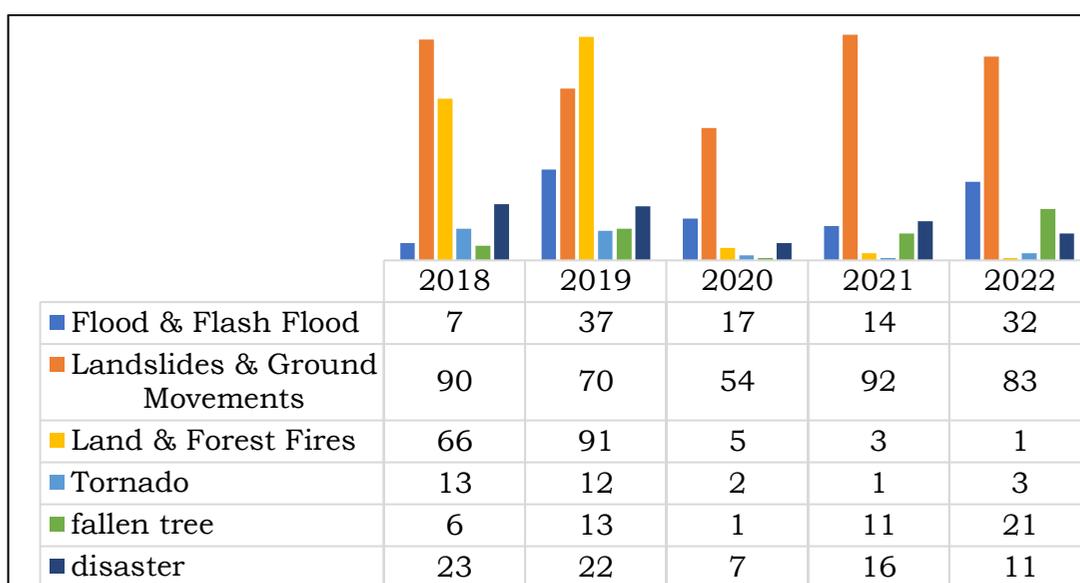
Gambar 2.64
Indeks Risiko Bencana Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang (2023)

Kenaikan ini terjadi dikarenakan banyaknya kejadian bencana di beberapa wilayah Kabupaten Sumedang, yang ditimbulkan oleh faktor alam seperti longsor dan pergerakan tanah, puting beliung, pohon tumbang, banjir dan banjir bandang, kebakaran lahan dan hutan serta musibah. Rekap kejadian bencana di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Gambar 2.65 berikut.

Gambar 2.65
Intensitas Kejadian Bencana di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.1.6. Urusan Sosial

1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Target tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan:

1. Mengurangi beban pengeluaran keluarga melalui bantuan sosial
2. meningkatkan produktivitas
3. Penyediaan infrastruktur dasar

Menurut BPS Jawa Barat, rasio ketergantungan pada kelompok penduduk miskin adalah 71,61, di mana 100 orang miskin usia produktif harus menanggung beban 71-72 orang yang non produktif.

Selain itu, per bulan Oktober Tahun 2022 terdapat 735.313 orang yang masuk data DTKS. Data tersebut akan menjadi rujukan sasaran penerima program-program pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang. Sehingga program-program tersebut tepat sasaran.

Tabel 2.33
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Oktober 2022

No	Kecamatan	Keluarga	Anggota Rumah Tangga	Jumlah
1	Buahdua	9.555	14.106	23.661
2	Cibugel	5.651	9.712	15.363
3	Cimalaka	12.460	18.557	31.017
4	Cimanggung	21.636	38.446	60.082
5	Cisarua	5.438	8.971	14.409
6	Cisitu	8.520	14.452	22.972
7	Conggeang	7.087	9.447	16.534
8	Darmaraja	9.861	17.140	27.001
9	Ganeas	5.756	9.627	15.383
10	Jatigede	4.920	5.844	10.764
11	Jatinangor	20.957	37.723	58.680
12	Jatinunggal	13.340	21.844	35.184
13	Pamulihan	16.119	37.723	42.747

No	Kecamatan	Keluarga	Anggota Rumah Tangga	Jumlah
14	Paseh	8.917	14.600	23.517
15	Rancakalong	10.843	15.981	26.824
16	Situraja	11.299	18.341	29.640
17	Sukasari	8.650	13.842	22.492
18	Sumedang Selatan	18.801	31.435	50.236
19	Sumedang Utara	20.848	35.722	56.570
20	Surian	2.710	3.576	6.286
21	Tanjungkerta	7.960	11.449	19.409
22	Tanjungmedar	6.967	10.877	17.844
23	Tanjungsari	17.215	29.489	46.704
24	Tomo	6.276	9.269	15.545
25	Ujungjaya	7.173	8.612	15.785
26	Wado	11.156	19.508	30.664
Jumlah		280.115	455.198	735.313

Sumber : Dinas Sosial (2023)

2) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS digunakan sebagai database bagi pemerintah daerah guna menangani PPKS.

PPKS yang direhabilitasi tetapi untuk penanganannya dikembalikan ke keluarga PPKS (reunifikasi). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi

sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk data PPKS dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2.34
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Orang)
Tahun 2018-2022

PPKS	2018	2019	2020	2021	2022
Anak Bayi terlantar	5	6	6	6	1
Anak terlantar	376	83	83	407	317
Anak yang berhadapan dengan hukum	66	15	40	40	16
Anak jalanan	52	52	0	0	0
Anak dengan kedisabilitas (ADK)	27	0	0	57	70
Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	91	15	15	15	1
Anak yang memerlukan perlindungan khusus	73	0	0	0	19
Lanjut usia terlantar	530	3.729	3.729	874	736
Penyandang disabilitas	962	1.053	993	442	
Tuna susila	180	0	0	0	17
Gelandangan	0	0	0	5	5
Pengemis	0	0	13	2	3
Pemulung	0	10	0	8	0
Kelompok minoritas	0	0	0	0	0

PPKS	2018	2019	2020	2021	2022
Bekas warga binaan lembaga pemasayarakatan	111	0	0	0	0
Korban penyalahgunaan NAPZA	70	0	91	14	1
Korban trafficking	4	0	1	0	1
Korban tindak kekerasan	148	0	56	6	52
Pekerja migran bermasalah sosial	67	0	0	0	0
Korban Bencana Alam	977	2.253	2.253	1.053	5.283
Fakir miskin	68.992	59.100	33.411	44.744	58.863
Keluarga bermasalah sosial psikologis	22	0	0	0	0

Sumber : Dinas Sosial (2023)

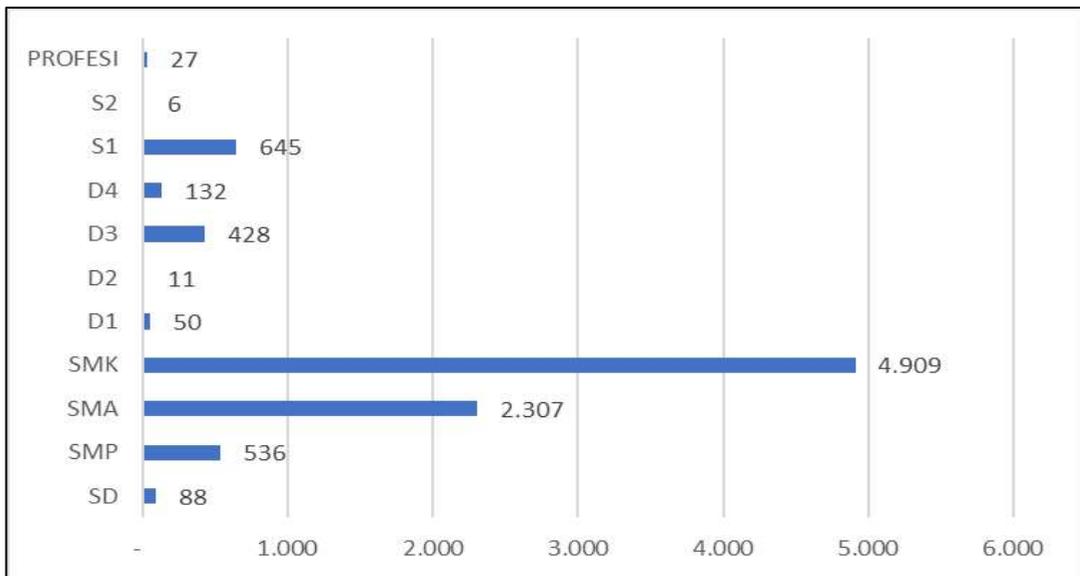
2.4.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.4.2.1. Urusan Tenaga Kerja

1) Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja

Pencari kerja di Kabupaten Sumedang berdasarkan data lulusan pendidikan pada Tahun 2022 didominasi oleh lulusan SMK sebanyak 4.909 orang. Dikarenakan SMK merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan menengah dengan tujuan mempersiapkan lulusannya bisa langsung bekerja. Daftar Pencari Kerja Berdasarkan lulusan dapat dilihat pada Gambar 2.66 dibawah ini.

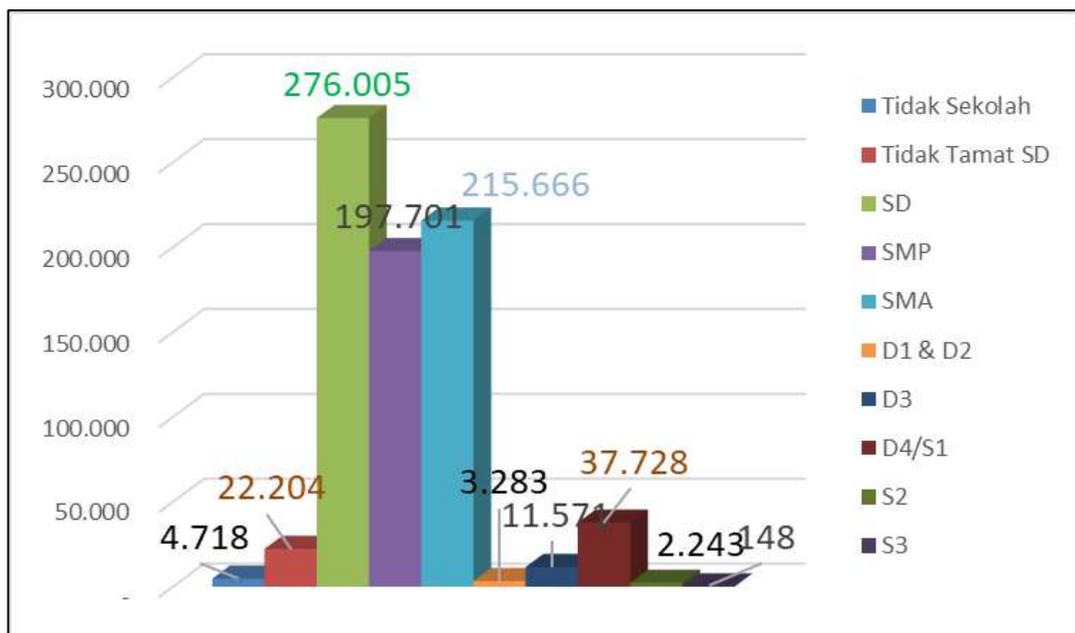
Gambar 2.66
Pencari Kerja Berdasarkan Lulusan Pendidikan Tahun 2022



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2023)

Adapun berdasarkan data kependudukan di Kabupaten Sumedang bahwa angkatan kerja lebih di dominasi oleh pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 276.005 orang, sedangkan yang paling rendah yaitu pendidikan Strata 3 (S3) sebanyak 148 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 2.67
Angkatan Kerja (15 -64 Tahun) Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2022



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2023)

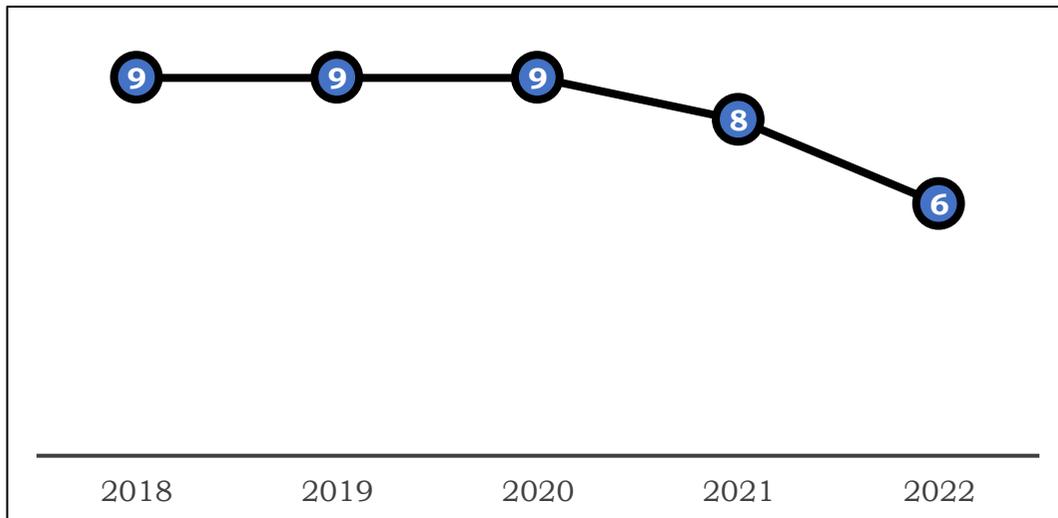
Ketimpangan pertumbuhan lapangan kerja dari waktu ke waktu tidak sebanding dengan penambahan jumlah lulusan pendidikan yang mencari atau membutuhkan pekerjaan. Selain itu juga akses informasi lapangan kerja yang sulit serta keterampilan kerja yang rendah menjadikan kualitas tenaga kerja diragukan. Hal ini menjadi masalah yang mendasar dan memicu peningkatan pengangguran.

Pencari kerja dengan lulusan pendidikan kejuruan atau pendidikan umum yang tidak memperoleh bekal keterampilan kejuruan menjadi suatu permasalahan dalam pemberantasan pengangguran, melihat tingginya jumlah pencari kerja dengan lulusan kedua jenjang pendidikan tersebut. Dalam upaya meningkatkan kualitas para pencari kerja terutama para Angkatan muda yang baru lulus SMK/SMA, UPTD Balai Pelatihan Kerja (BLK) yang merupakan lembaga pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang membuka 12 Kejuruan, yaitu

1. Kejuruan Otomotif (service sepeda motor, Operator Forklift)
2. Kejuruan Garment (operator menjahit pakaian)
3. Kejuruan Teknik Listrik (Pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana, Listrik Industri)
4. Pariwisata (Barista, Pembuatan roti dan Patiserie)
5. Pertanian (Pembudidayaan Jamur)
6. Peternakan (Pembudidayaan Domba, ternak Ayam dan Itik)
7. Perikanan (Pembudidaya ikan hias, Budi daya lele terpal)
8. Processing (Pembuatan Roti dan kue, Pengolahan Ikan, Pengolahan hasil pertanian, Operator Packing Makanan)
9. Bangunan (Meubelair, Finishing kayu)
10. Teknik Las (Pengelasan SMAW)
11. TIK (*Practical Office*, Teknisi Komputer, Internet Marketing)
12. Teknik Elektronika (Servis HP, Perawatan AC Split)

Diharapkan melalui pelatihan tersebut kompetensi atau keahlian para pencari kerja dapat meningkat. Dari jumlah kejuruan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah instruktur. Jumlah instruktur terus mengalami penurunan jumlah setiap tahunnya. Berikut adalah Jumlah Instruktur BLK Tahun 2018-2022.

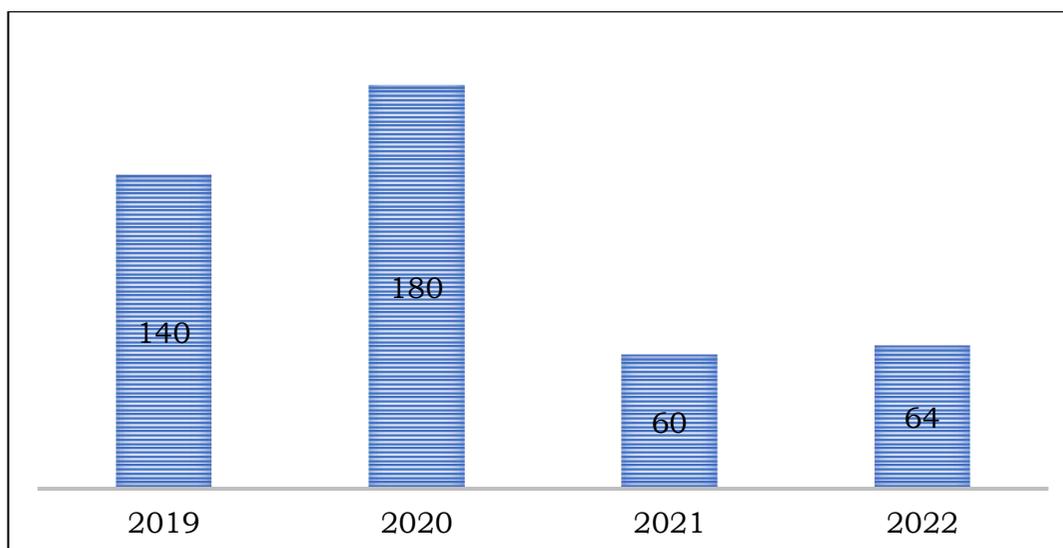
Gambar 2.68
Instruktur BLK Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2023)

Penurunan jumlah instruktur BLK ini disebabkan banyaknya instruktur yang telah berakhir masa tugasnya atau purnabakti. Selain membuka pelatihan berbasis kompetensi, UPTD BLK Kabupaten Sumedang juga membuka pelatihan penumbuhan wirausahawan yang diharapkan untuk mendorong terciptanya wirausahawan baru.

Gambar 2.69
Pelatihan Penumbuhan Wirausahawan Baru (Orang)
Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2023)

Berdasarkan Gambar diatas, diketahui bahwa pelatihan penumbuhan wirausahawan baru sangat fluktuatif. Jumlah peserta pelatihan terbanyak tercatat pada Tahun 2020 sebanyak 180 orang,

sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan jumlah peserta yang signifikan dikarenakan adanya pandemi sehingga jumlah peserta dikurangi dan pembatasan jenis pelatihan.

Pelatihan yang dikembangkan oleh UPTD BLK juga membantu para lulusannya dalam penempatan pada perusahaan sesuai dengan kejuruan yang ada pada UPTD BLK. Berikut adalah tren peserta pelatihan yang ditempatkan.

Gambar 2.70
Peserta Pelatihan Ditempatkan (Orang) Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2023)

Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan jumlah peserta pelatihan yang ditempatkan menjadi 120 orang dari 19 orang pada tahun sebelumnya. Adanya sebuah Sistem Informasi Pelatihan Berbasis Database Online (SIPEDO) yang dibangun oleh Disnakertrans Kabupaten Sumedang berhasil mendongkrak jumlah peserta pelatihan serta jumlah peserta pelatihan yang ditempatkan, karena melalui aplikasi SIPEDO masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai jenis pelatihan disertai dengan jadwal pelaksanaan pelatihan dan dapat mengetahui Lembaga atau perusahaan yang bekerja sama dengan BLK.

2) Hubungan Industri

Perselisihan Hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,

perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Berdasarkan Gambar 2.69, Tahun 2018 merupakan tahun dengan kasus konflik tertinggi sebanyak 22 kasus konflik yang telah diselesaikan, dan pada tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 10 (sepuluh) kasus. Tahun 2022 konflik antara pekerja dan pengusaha kembali mengalami peningkatan menjadi 12 kasus. Hal ini sebagai salah satu dampak dari pasca pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan kondisi industri di Kabupaten Sumedang belum stabil, selain itu juga kondisi ekonomi, perang Rusia-Ukraina serta isu resesi ekonomi menjadi pemicu konflik terutama bagi perusahaan dengan *export oriented*.

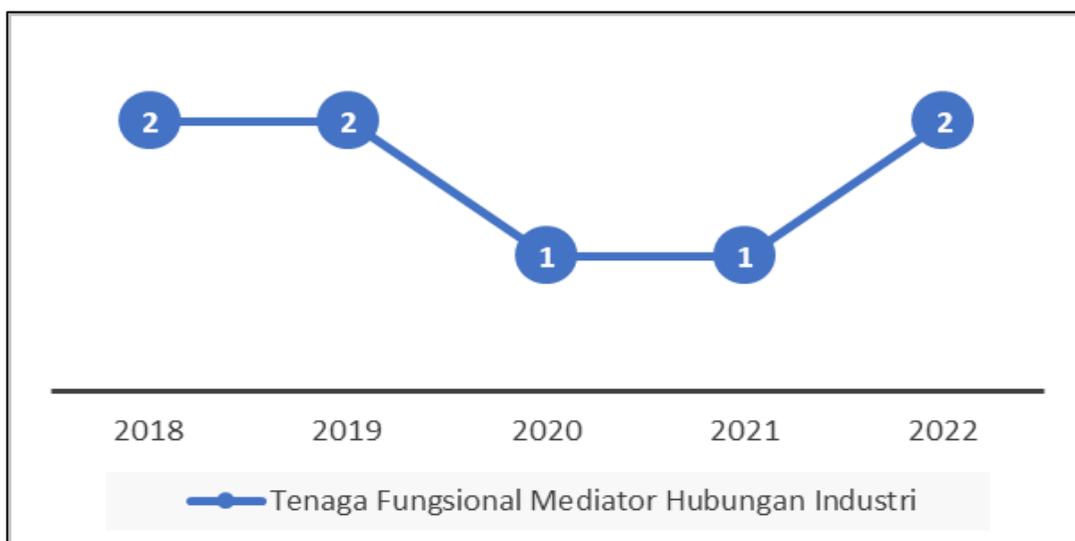
Gambar 2.71
Kasus Konflik antara Pekerja dengan Pengusaha
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2022)

Penyelesaian kasus-kasus perselisihan antara pekerja dengan pengusaha tidak lepas dari peran atau dukungan Sumber Daya Manusia dalam hal ini fungsional Mediator Hubungan Industri yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang seperti yang tergambar pada Gambar berikut.

Gambar 2.72
Tenaga Fungsional Mediator Hubungan Industri (Orang)
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2022)

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Sumedang hanya mempunyai 2 (dua) orang fungsional Mediator Hubungan Industri walaupun demikian jumlahnya bertambah dari tahun sebelumnya.

2.4.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Indeks Ketimpangan Gender

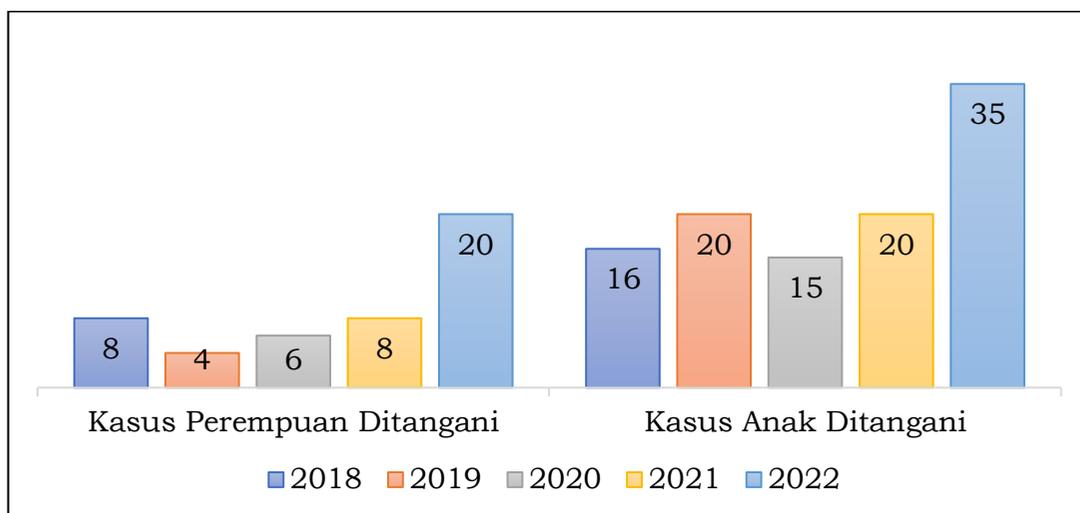
Kesetaraan Gender menjadi target pembangunan di banyak negara terutama yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi. Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian atau kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Semakin rendah nilai IKG menunjukkan keadaan yang lebih baik.

2) Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Kasus Kekerasan kepada Perempuan dan anak di Kabupaten Sumedang terlihat fluktuatif, hal tersebut dengan adanya peran P2TP2A dalam penanganan korban kekerasan dan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mau melaporkan jika terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan dapat dengan cepat ditangani dan pelaku tindak kekerasan dapat segera diproses untuk menimbulkan efek jera. Penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut data tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani.

Gambar 2.73
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Ditangani
Tahun 2018-2021



Sumber : DPPKBP3A (2022)

Berdasarkan data dari Gambar diatas, Tahun 2022 merupakan penanganan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Korban kekerasan merupakan perempuan dengan usia 18 Tahun keatas. Jumlah kasus perempuan yang ditangani pada tahun 2022 naik 12 kasus dari tahun sebelumnya menjadi 20 kasus. Adapun jenis kasus yang ditangani oleh DPPKBP3A Kabupaten Sumedang sebanyak 10 (sepuluh) jenis kasus yang terdiri dari : 1) Kasus Pemisahan istri dari suaminya; 2) Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 3) Kasus pengasuhan anak; 4) Kasus permasalahan rumah tangga; 5) Kasus pelecehan seksual; 6) Kasus penyekapan di Batam; 7) Kasus kekerasan berbasis gender online; 8) Kasus kekerasan dalam bekerja; 9) Kasus kekerasan;

10) Kasus kekerasan dalam pacaran. Dan penanganan kasus tertinggi ialah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 8 (delapan) kasus. Sedangkan untuk penanganan kasus kekerasan pada anak dengan usia dibawah 18 tahun, pada Tahun 2022 meningkat menjadi 35 kasus dari 20 kasus di Tahun 2021. Jenis kasus yang ditangani diantaranya : 1) Kasus penyekapan; 2) Kasus kekerasan; 3) Kasus *bullying*; 4) Kasus pelecehan; 5) Kasus trauma anak; dll. Kasus kekerasan pada anak tertinggi adalah kasus pelecehan anak yang tersebar di hampir semua kecamatan dengan jumlah kasus sebanyak 20 kasus yang terjadi pada anak perempuan maupun laki-laki.

2.4.2.3. Urusan Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk.

1) Skor Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Faktor yang berpengaruh terhadap pola pangan harapan terdiri dari jumlah pengeluaran rumah tangga, besaran anggota keluarga serta tingkat pendidikan.

Gambar 2.74
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (2023)

Berdasarkan Gambar 2.74 menunjukkan bahwa skor pola pangan harapan di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif dan belum mencapai skor ideal yaitu 100, hal ini disebabkan hampir semua kelompok pangan belum mencapai konsumsi energi yang cukup. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk Kabupaten Sumedang perlu ditingkatkan keberagamannya melalui gerakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga pemenuhan asupan gizi lebih seimbang.

2) Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok

Berdasarkan Gambar dapat diketahui ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif. Ketersediaan pangan utama tertinggi pada Tahun 2018 yang mencapai 486kg/jiwa/tahun, sedangkan ketersediaan pangan utama terendah pada Tahun 2019 yaitu sebesar 200 kg/jiwa/tahun. Penurunan tersebut dikarenakan perbedaan cara perhitungan di tahun sebelumnya menggunakan perhitungan Gabah Kering Giling sedangkan untuk Tahun 2019 perhitungannya menggunakan standar beras hasil giling dengan perbedaan 62% dari gabah kering giling. Namun walaupun terjadi penurunan masih dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk Sumedang karena didukung juga oleh adanya regulasi ketahanan pangan, sehingga pasokan pangan aman. Ketersediaan pangan pokok mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 295,3 Kg/Kapita/Tahun akan tetapi menurun kembali pada

Tahun 2022 menjadi 259,6 Kg/Kapita/Tahun atau selisih 35,7 Kg/Kapita/Tahun dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.75
Ketersediaan Pangan Pokok (Kg/Kapita/Tahun)
Tahun 2018-2022



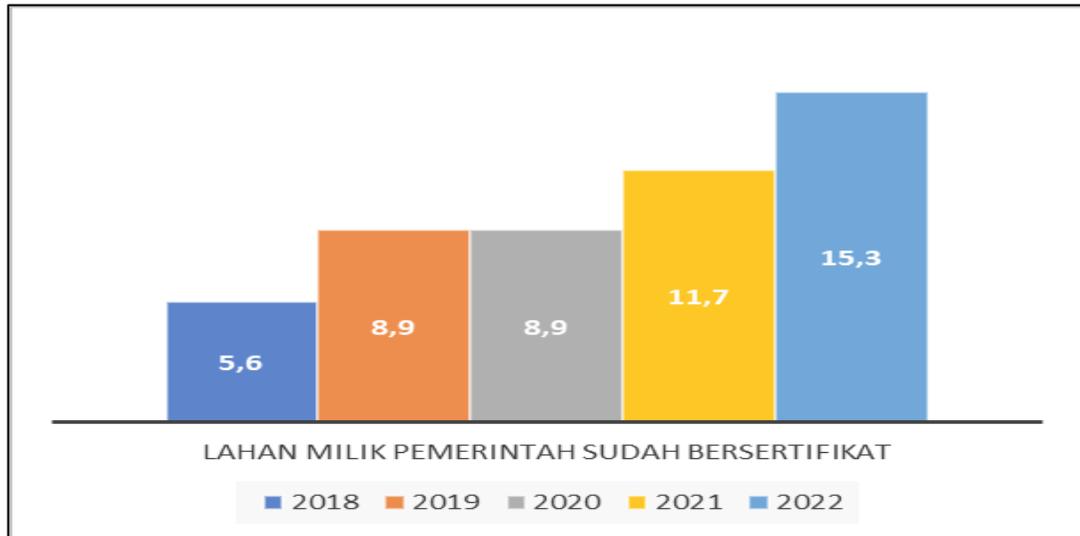
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.2.4. Urusan Pertanahan

1) Persentase Lahan Milik Pemerintah Yang Sudah Bersertifikat

Hasil Verifikasi Administrasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2021 berjumlah 2.031 Bidang Tanah, dan yang telah bersertifikat sebanyak 239 sertifikat atau sekitar 11,7%. Tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 3,6% atau meningkat menjadi 15,3%. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. Jumlah Aset Pemerintah Daerah kemungkinan bertambah dengan adanya Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Pemerintah Daerah.

Gambar 2.76
Lahan Milik Pemerintah Sudah Bersertifikat (%)
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (*Water Quality Index / WQI*) merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pencemaran perairan yang cukup efektif dengan informasi yang komprehensif, mudah dipahami dan dapat digunakan oleh masyarakat (Bardolo et al, 2006; Alam & Pathak, 2010). Kategori IKA dikembangkan menjadi lima kategori sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu:

Tabel 2.35
Kategori Indeks Kualitas Air

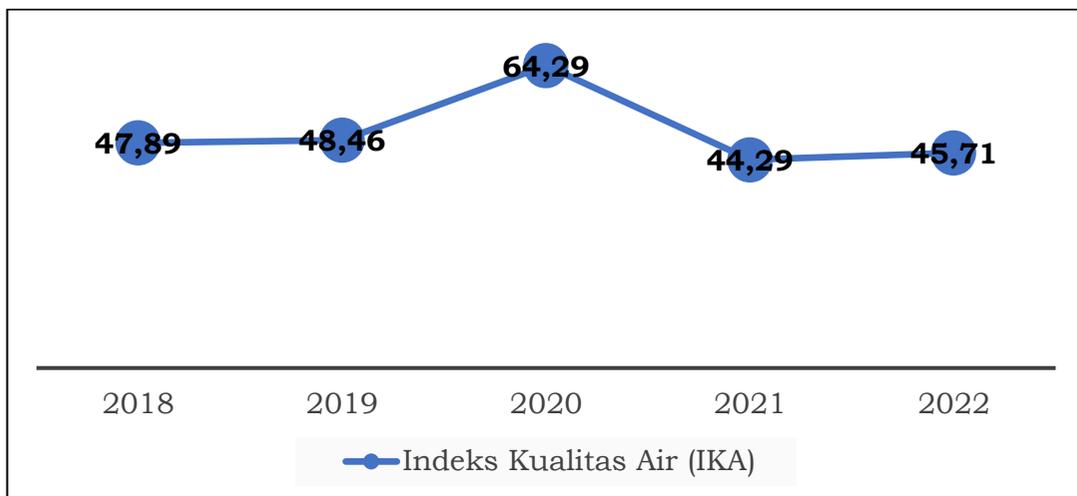
Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Memperhatikan Gambar di bawah, bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif. Pada tahun 2022 indeks kualitas air meningkat menjadi 45,71 poin dari 44,29 poin di

tahun 2021. Jika melihat rentang angka kategori indeks, maka kualitas air di Kabupaten Sumedang termasuk ke dalam kategori “Kurang” karena masih dibawah 50 poin.

Penurunan kualitas air ini dapat diakibatkan oleh eksploitasi air yang dilakukan olah manusia, limbah rumah tangga serta kegiatan industri, yang mengakibatkan semakin banyaknya pemanfaatan air tanah atau air permukaan untuk memenuhi kebutuhan. Di Kabupaten Sumedang sendiri, perbaikan sanitasi sudah melampaui target, hanya saja untuk mencapai sanitasi yang aman dalam artian pengelolaan limbah rumah tangga yang baik masih belum optimal. Hal ini berdampak pula pada kualitas air yang dihasilkan. Selain itu perindustrian yang mulai Kembali menggeliat juga berdampak terhadap peningkatan jumlah limbah industry yang dihasilkan.

Gambar 2.77
Indeks Kualitas Air (poin) Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2023)

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah.

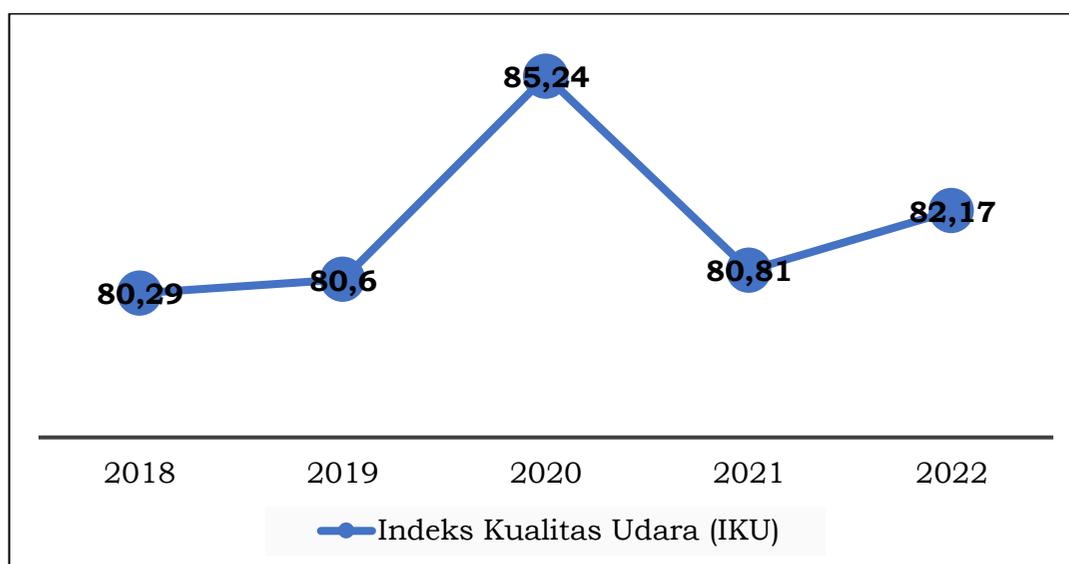
Untuk pengukuran kategori indeks kualitas udara (IKU) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.36
Kategori Indeks Kualitas Udara

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Memperhatikan Gambar di bawah bahwa Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 mencapai 80,81 atau kategori baik, namun lebih rendah dari tahun 2020 yaitu 85,24 hal tersebut disebabkan pada Tahun 2020 adanya kondisi Pandemi *Covid 19* dan pembatasan aktivitas serta mobilitas masyarakat maka kegiatan dan aktivitas industri tidak tinggi sehingga pencemaran udara berasal dari industri jumlahnya berkurang dan kurangnya mobilitas penduduk dalam menggunakan kendaraan bermotor. Diefektifkannya kembali beberapa roda perindustrian dan perekonomian berdampak pada kualitas udara di Kabupaten Sumedang sehingga penurunan indeks kualitas udara tampak di Tahun 2021 dan Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2020.

Gambar 2.78
Indeks Kualitas Udara (poin) Tahun 2018-2022



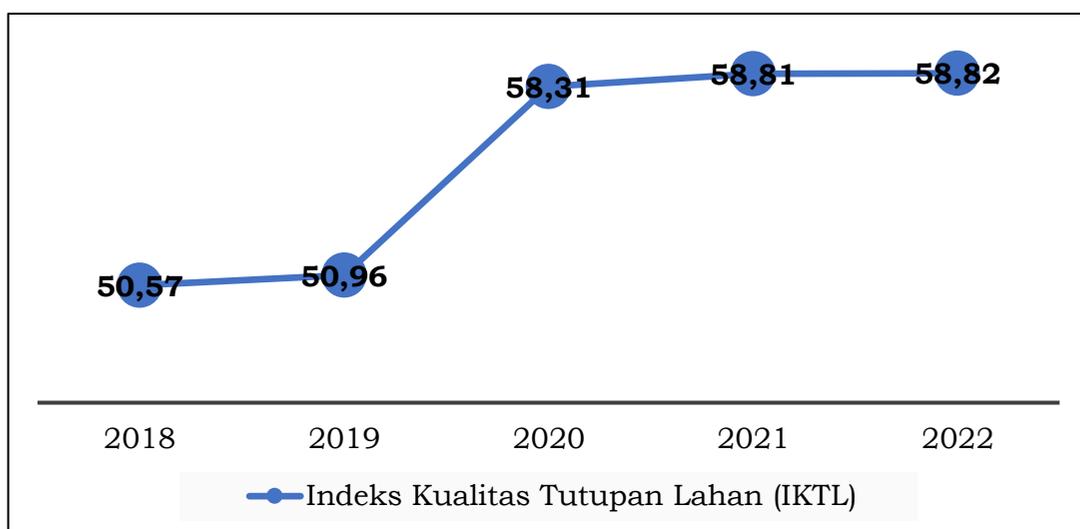
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2023)

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKTL sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, IKTL Kabupaten Sumedang seperti yang tergambar pada Gambar dibawah.

Gambar 2.79
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (poin) Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2023)

4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

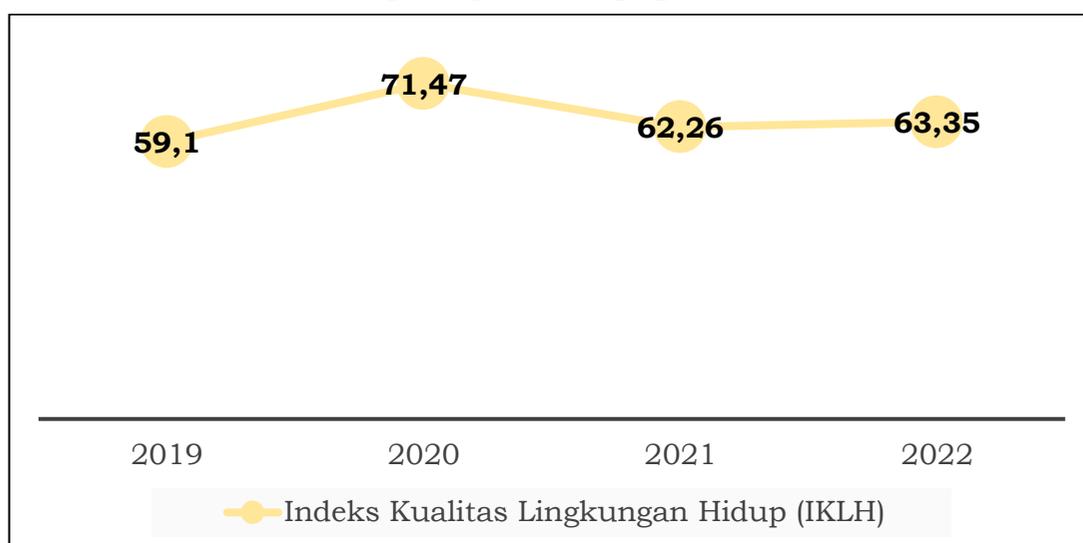
Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH pada Tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2021, tentunya dalam berbading lurus dengan capaian IKA, IKU dan IKLH. Capaian IKLH dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.80
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin) Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2022)

2.4.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

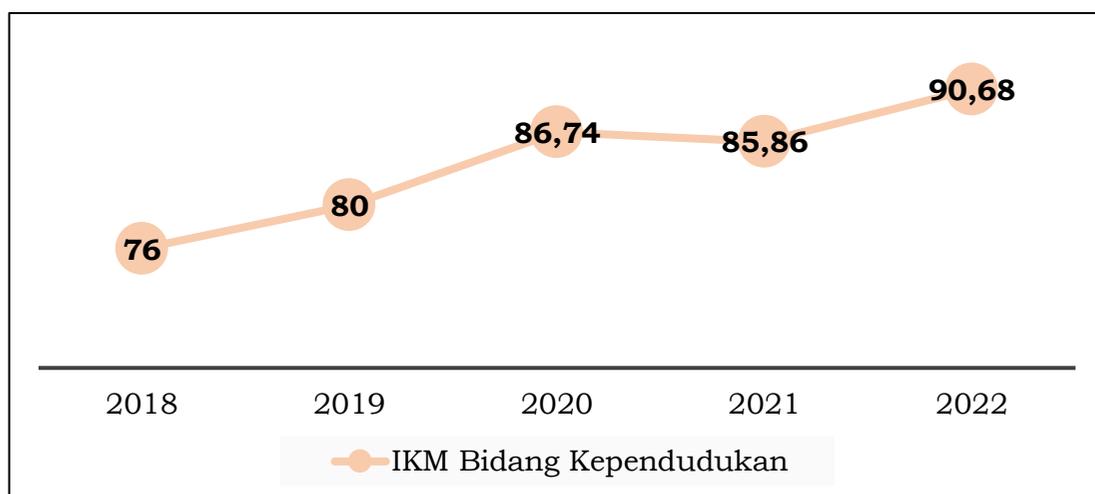
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kependudukan

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebagai salah satu cara untuk mengukur apakah pelayanan yang diberikan oleh para aparatur daerah sudah baik atau harus ada yang dibenahi kembali. Selama ini, Pemerintah sebenarnya juga selalu mengumandangkan bahwa aparatur pemerintah adalah merupakan abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat, sudah jelas bahwa tugas utama dari aparatur pemerintah yaitu memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari

para aparatur pemerintah. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara. Dalam kaitan inilah maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh semua para aparatur pemerintah.

Saat ini data kependudukan sudah dianggap penting karena masyarakat akan sangat membutuhkan data kependudukan untuk berbagai kepentingan dalam melakukan segala bentuk kegiatan baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Karena sangat pentingnya dokumen kependudukan ini maka sudah pasti masyarakat akan membuat data kependudukannya karena tanpa adanya data kependudukan maka masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan dengan leluasa, sebagai contoh untuk masuk sekolah maka seorang anak akan membutuhkan akta kelahiran, sedangkan untuk mendapatkan pelayanan yang baik di rumah sakit maka sudah pasti masyarakat akan diminta KTP (Kartu Tanda Penduduk). Untuk proses pelayanan kependudukan tentunya diharapkan dapat tepat dan cepat. Peningkatan pelayanan bidang kependudukan akan berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, seperti yang tergambar pada gambar berikut.

Gambar 2.81
IKM Bidang Kependudukan Tahun 2018-2022



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2022)

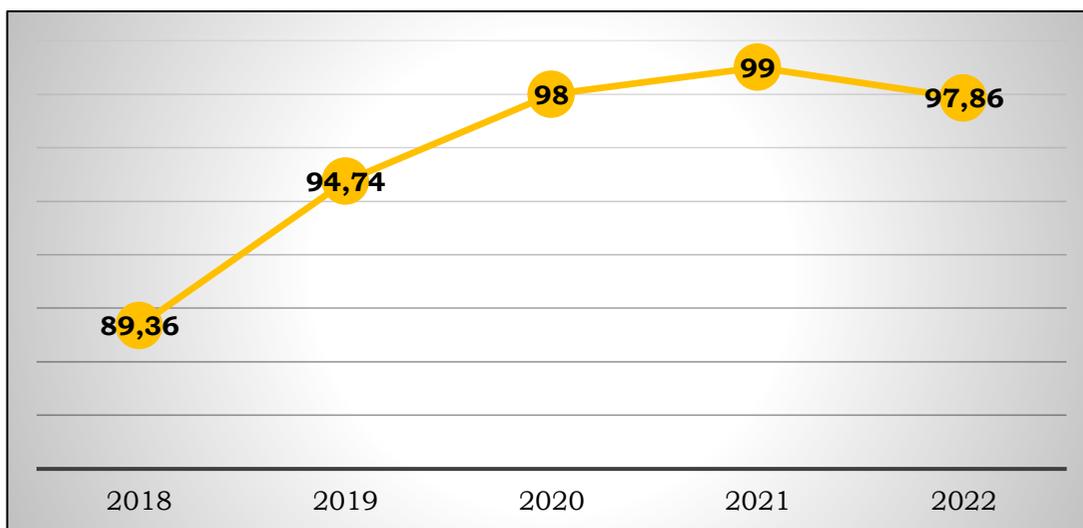
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap bidang kependudukan terus mengalami peningkatan. Bahkan pada Tahun 2022 IKM bidang kependudukan telah mencapai 90,68 persen dan dikategorikan “Sangat Baik”. Hal ini dikarenakan berbagai inovasi pelayanan kependudukan yang dikembangkan di Kabupaten Sumedang, seperti pembangunan sistem/aplikasi Silasidakep dan Jampe Harapat dalam upaya percepatan pelayanan serta mempermudah masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

2. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Tren rasio penduduk ber-KTP mengalami penurunan dan secara umum target per tahunnya tidak tercapai.

Pada Tahun 2022, rasio penduduk ber-KTP mencapai 0,98. artinya dari 896.320 penduduk wajib KTP, yang telah memiliki KTP sebanyak 877.104 penduduk.

Gambar 2.82
Rasio Penduduk ber-KTP Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2022

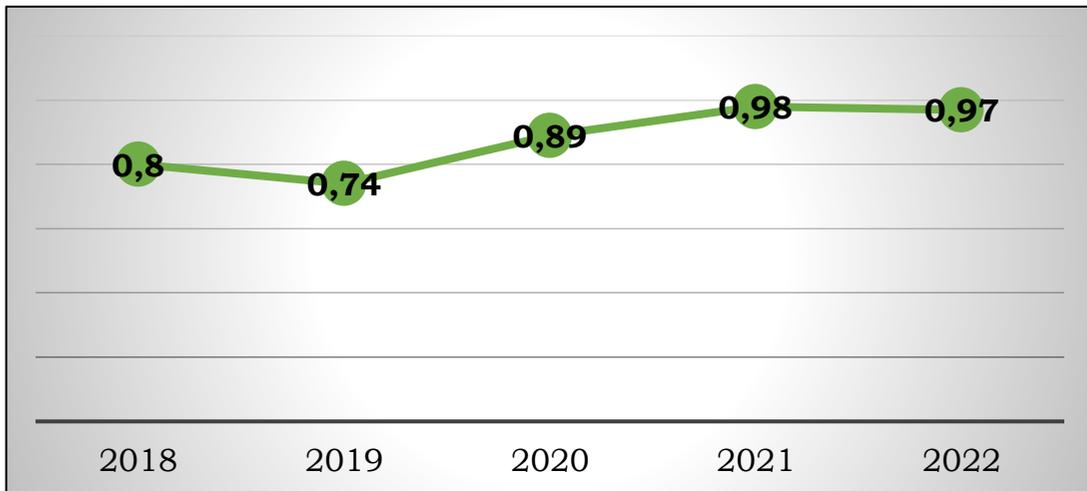


Sumber : *Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2023)*

3. Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Rasio bayi ber-akte kelahiran (rentang usia 0-18 tahun) secara tren berfluktuasi. Tahun 2021 terdapat bayi lahir yang memiliki akte kelahiran sebanyak 98%, namun pada Tahun 2022 turun menjadi 97,5% atau 308.212 akta kelahiran dari 314.651 penduduk.

Gambar 2.83
Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2018-2022



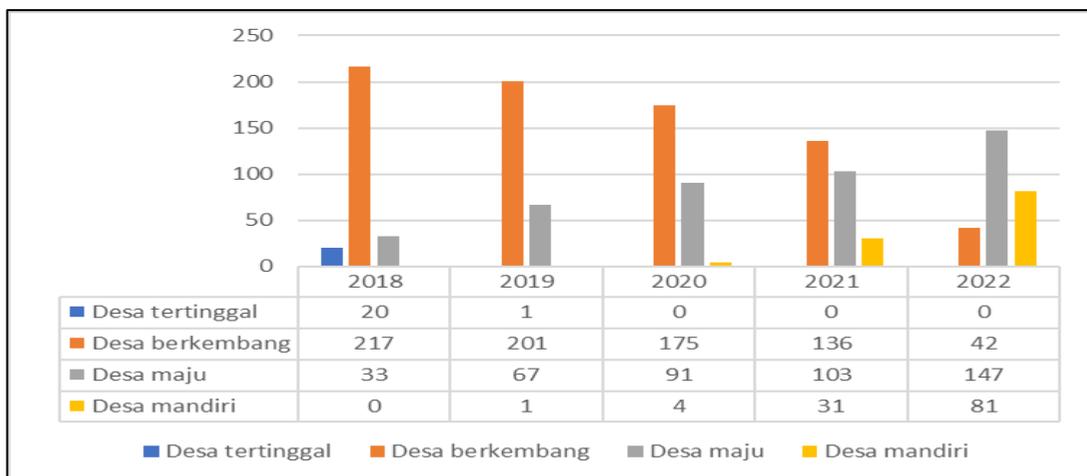
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Status Desa

Status Desa dibagi menjadi 4 (empat) kriteria yaitu Desa tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Berkembang. Status desa di Kabupaten terus meningkat, tergambar dengan tren positif terkait status desa tertinggal yang dari tahun 2020 sudah tidak ada status Desa tertinggal. Dengan adanya intervensi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan SDM dan pembinaan dari mulai perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan. Ditambah adanya program SAKIP Desa sehingga pelayanan yang dilakukan Pemerintah Desa menjadi tepat sasaran. Peningkatan status desa dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.84
Status Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022

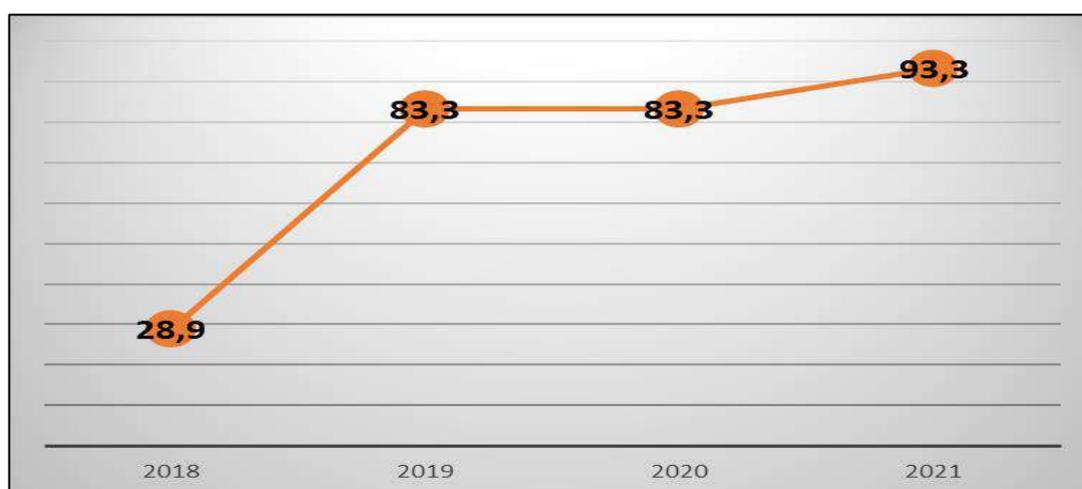


Sumber : DPMD Kabupaten Sumedang (2023)

2) Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa masyarakat yang dikelola secara baik dan profesional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes). Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa. Dengan adanya regulasi dari Pemerintah Pusat maupun daerah yang menunjang untuk intervensi permodalan bagi Bumdes sehingga mampu mendorong pemberdayaan masyarakat melalui BUMDES. Capaian Persentase BUMDes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dapat lihat pada Gambar dibawah ini dimana trendnya cukup positif pada Tahun 2021 mencapai 93,3%.

Gambar 2. 85
Persentase peran BUMDes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa (%) Tahun 2018-2021



Sumber : DPMD Kabupaten Sumedang (2022)

2.4.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

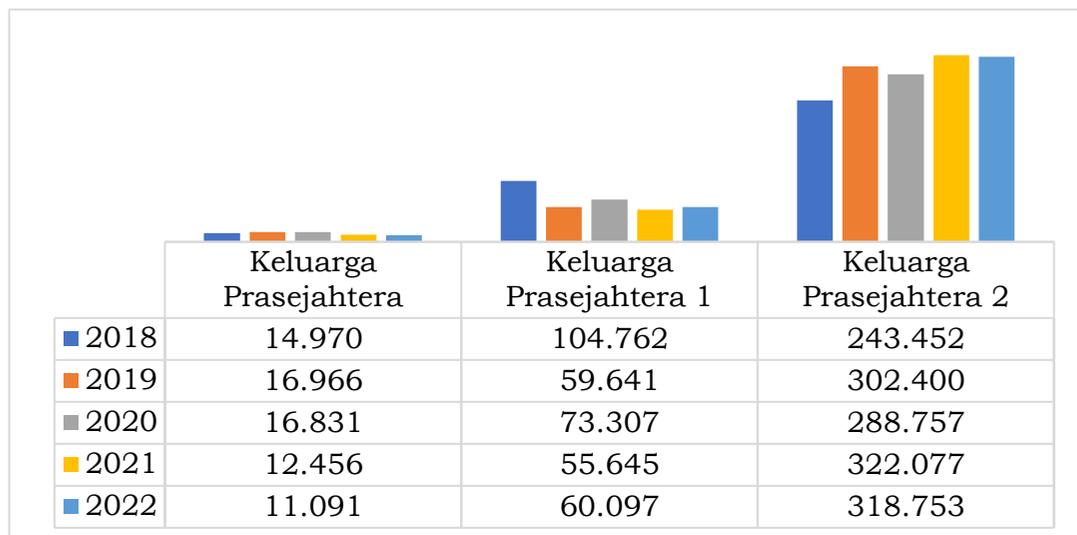
1) Kesejahteraan Keluarga

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Tren jumlah keluarga pra sejahtera dari tahun ke tahun sangat fluktuatif. Namun, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 11.091 KK dari yang sebelumnya sebanyak 12.456 KK di tahun 2021. Bantuan yang diberikan oleh

Pemerintah baik berupa kebutuhan pokok ataupun uang menjadi salah satu faktor pendorong penurunan jumlah penduduk keluarga prasejahtera di Kabupaten Sumedang.

Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis keluarga. Jumlah Keluarga Sejahtera I tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 4.452 KK. Hal ini bisa diakibatkan adanya perpindahan status keluarga, dari keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera I karena diperkirakan sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Lain halnya dengan jumlah keluarga prasejahtera 2 yang menurun sebanyak 3.324 KK dari tahun sebelumnya. Diindikasikan penurunan ini dikarenakan adanya peningkatan status beberapa kepala keluarga, yang tersaji pada Gambar berikut.

Gambar 2.86
Klasifikasi Keluarga Berdasarkan Kesejahteraan (Keluarga)
Tahun 2018-2022



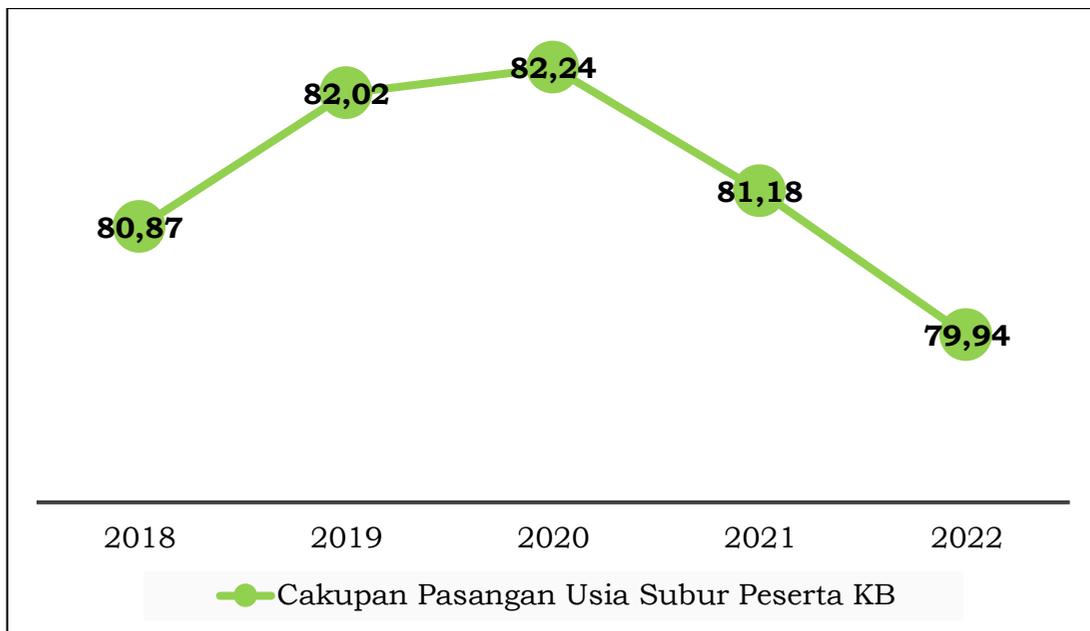
Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Sumedang (2023)

2) Peserta KB

Pasangan Usia Subur (PUS) memakai kontrasepsi/CPR bagi yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmeetneed*) merupakan kondisi yang mengisyaratkan PUS terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga diambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmeetneed*) mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Berdasarkan Gambar di bawah dapat diketahui bahwa cakupan pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi terus mengalami penurunan, dan pada Tahun 2022 cakupannya mencapai 79,94 persen. Tingginya angka *unmetneed* KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang akan berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadinya ledakan penduduk.

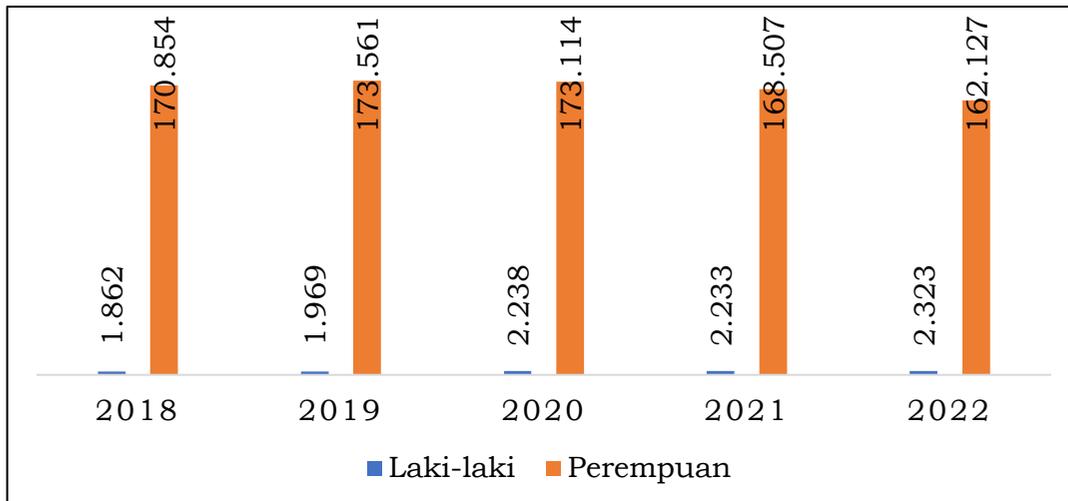
Gambar 2.87
Cakupan Pasangan Usia Subur Menggunakan Alat Kontrasepsi (%)
Tahun 2018-2022



Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Sumedang (2023)

Adapun berdasarkan jenis kelamin masih didominasi oleh kaum perempuan. Namun demikian jumlah peserta KB terus mengalami penurunan, seperti yang disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.88
Peserta KB per Jenis Kelamin Tahun 2018-2022

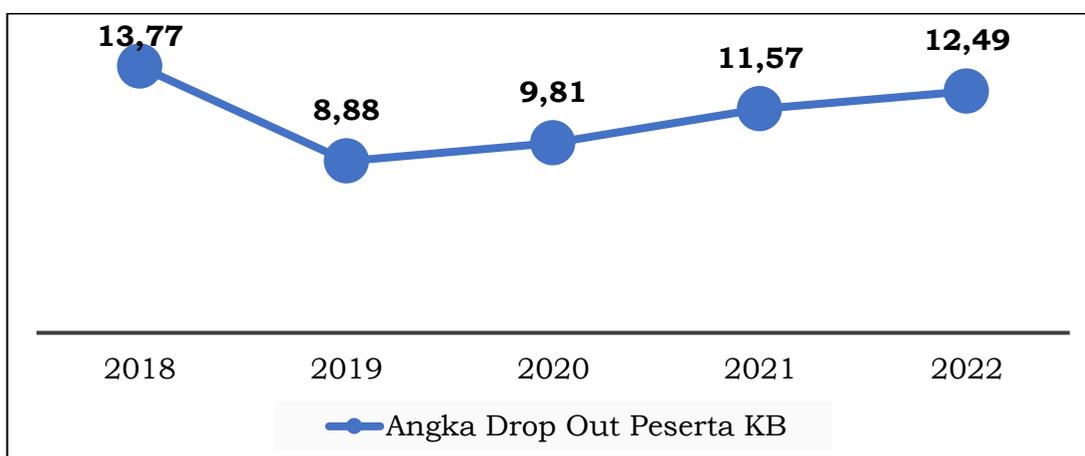


Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Sumedang (2023)

Hal ini berdampak pula pada angka *drop out* peserta KB, artinya akseptor atau pengguna KB menghentikan kontrasepsi lebih dari 3 (tiga) bulan. Angka *drop out* peserta KB tahun 2022 merupakan angka tertinggi kedua setelah tahun 2018 dengan persentase 12,49 persen.

Adapun beberapa indikasi masyarakat keluar dari kepesertaan KB disebabkan beberapa hal diantaranya : 1) kegagalan KB; 2) komplikasi; 3) ingin mempunyai keturunan/hamil; 4) adanya efek samping yang timbul akibat penggunaan alat KB; 5) biaya serta aksesibilitas; 6) frekuensi hubungan seksual yang jarang; 7) akseptor bercerai; dan 8) menopause. Berikut adalah Angka Drop Out Peserta KB di Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.89
Angka Drop Out Peserta KB (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022



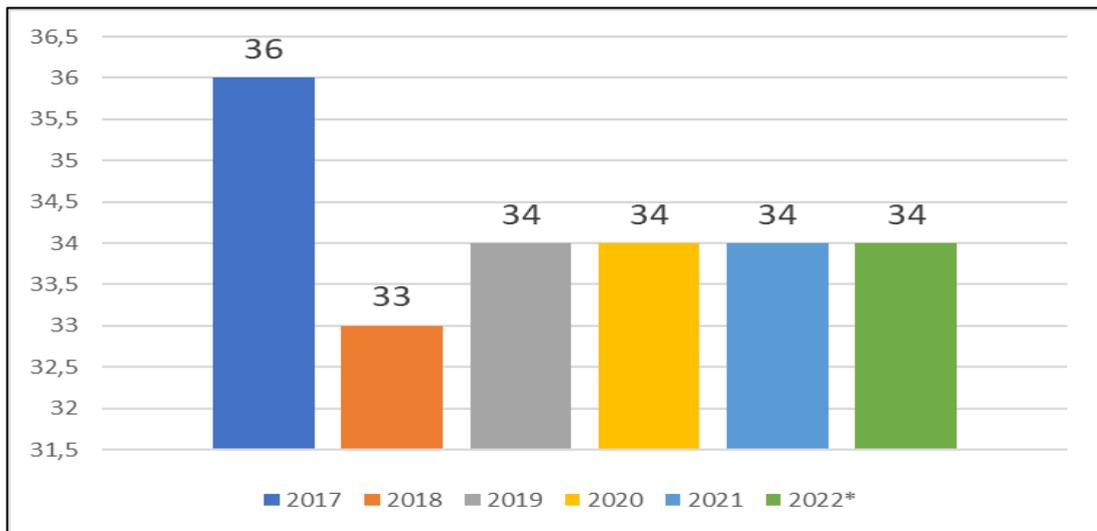
Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Sumedang (2023)

3) Kader KB per Desa

Kader Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kader adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat untuk membantu menyelenggarakan program kependudukan dan Keluarga Berencana di masyarakat. Kader setempat di bawah pembinaan penyuluh KB dan/atau petugas lapangan KB melakukan pendataan keluarga.

Pendataan dimaksud wajib dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota secara serentak setiap lima tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Jumlah Kader KB per Desa sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 di rata-ratakan sejumlah 34 orang/desa. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 2.90
Kader KB per Desa Tahun 2018-2022



Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.2.9. Urusan Perhubungan

1) Trayek Angkutan

Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang baik di perkotaan, antar kota dalam

provinsi ataupun antar kota antar provinsi. Sesuai kewenangan Kabupaten/Kota untuk izin trayek terdiri dari Angkutan Kota dan Pedesaan, jalur trayek dapat dilihat pada Tabel 2.36 dan 2.37 di bawah ini.

Tabel 2.37
Jalur Trayek Angkutan Kota

No	Jalur Trayek	Jarak (Km)
1.	Terminal Ciakar-Padasuka	19
2.	Terminal Ciakar - Perum Jatihurip	14
3.	Terminal Ciakar - Paseh	14
4.	Terminal Ciakar - Tolengas	34
5.	Terminal Ciakar - Tanjungsari	17
6.	Terminal Ciakar - Situraja - Corenda	24
7.	Terminal Ciakar - Rancakalong - Tanjungsari	42
8.	Terminal Ciakar - Buahdua - Hariang	40
9.	Terminal Ciakar - Tanjungkerta - Hariang	30
10.	Terminal Ciakar - Buahdua	28
11.	Terminal Ciakar - Darmaraja - Wado	31
12.	Conggeang - Ujungjaya	15
13.	Terminal Ciakar - Wado - Kirisik	43

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2022)

Tabel 2.38
Jalur Trayek Angkutan Pedesaan

No	Jalur Trayek	Jarak (Km)
1.	Tanjungkerta - Jingsang - Surian	26
2.	Sub Term. Situraja - Cijeler	4
3.	Sub Term. Situraja - Cikadu - Bangbayang	14
4.	Ganeas - Dayeuhluhur	9

No	Jalur Trayek	Jarak (Km)
5.	Sub Term. Cipameungpeuk - Semir - Cigobang	6
6.	Terminal Ciakar - Kandang - Pamarisen	9
7.	Sub. Term. Situraja - Cicarimanah-Warung Peti	13
8.	Sub Term. Situraja - Cilopang - Pamulihan	5
9.	Sub Term. Situraja - Pajagan - Jatigede	18
10.	Terminal Ciakar - Bojong - Burujul	6
11.	Terminal Ciakar - Bojong - Sukamantri	12
12.	Terminal Ciakar - Sukamantri - Cikaramas	27
13.	Terminal Ciakar - Cimalaka - Naluk	8
14.	Terminal Ciakar - Citimun - Cipadung	15
15.	Terminal Ciakar - Selaawi	12
16.	Sub Term. Cipameungpeuk - Citengah	8
17.	Terminal Tanjungsari - Genteng	12
18.	Terminal Tanjungsari - Cijambu	12
19.	Tolengas - Kulinyar	14
20.	Tolengas - Cibuluh	26
21.	Terminal Ciakar - Garis	12
22.	Terminal Wado - Cibugel	20
23.	Darmaraja - Cibugel	15
24.	Sub Term. Situraja - Darmaraja - Wado - Cilengkrang	27
25.	Terminal Wado - Kirisik - Cipeundeuy	14
26.	Tanjungsari - Sindulang	27
27.	Terminal Ciakar - Padasuka - Gelewing - Cimanglid	16
28.	Buahdua - Ciawitali	12

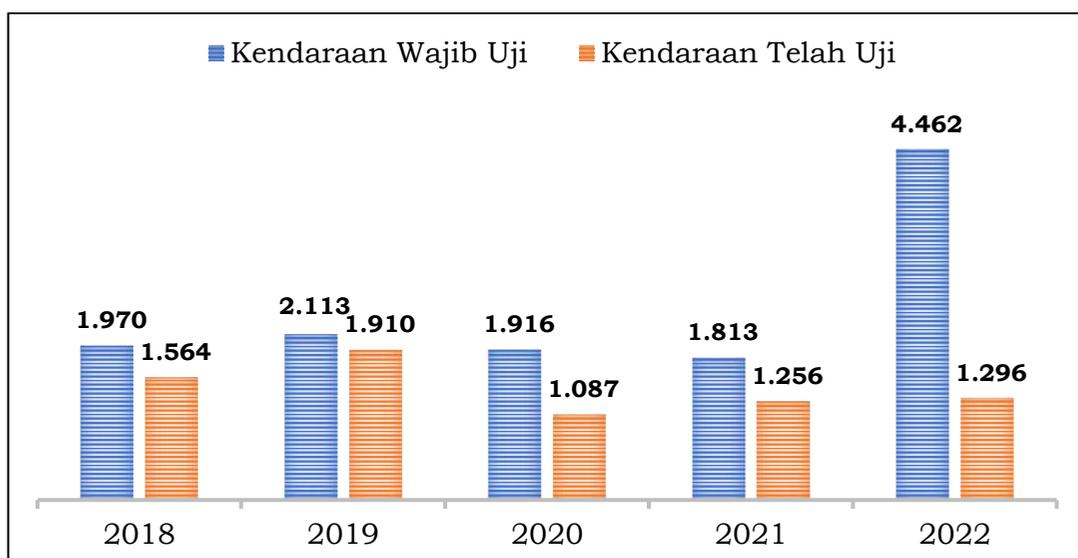
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2022)

2) Pengujian Kendaraan

Kelaikan jalan kendaraan umum merupakan salah satu faktor pendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Laik Jalan kendaraan diuji dari mulai uji rem, suspensi, sorot lampu, emisi gas buang dan kondisi sasis kendaraan. Karena salah satu faktor tingginya kecelakaan lalu lintas bersumber dari kesadaran para pemilik kendaraan wajib uji dalam melaksanakan Uji Kelaikan Kendaraan Umum. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini dimaksudkan untuk mengecek kondisi kendaraan bermotor yang akan dioperasikan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atau tidak. Dan pengujian tersebut dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Kendaraan mobil penumpang merupakan kendaraan umum angkutan penumpang berupa Angkutan Perkotaan, Perdesaan dan angkutan khusus (mini bus) dengan kapasitas maksimal 14 *seat*. Dari Gambar di bawah dapat terlihat perbandingan Kendaraan Wajib Uji mobil penumpang dan kendaraan telah melaksanakan Uji kelaikan.

Gambar 2.91
Pengujian Mobil Penumpang (Unit)
Tahun 2018-2022



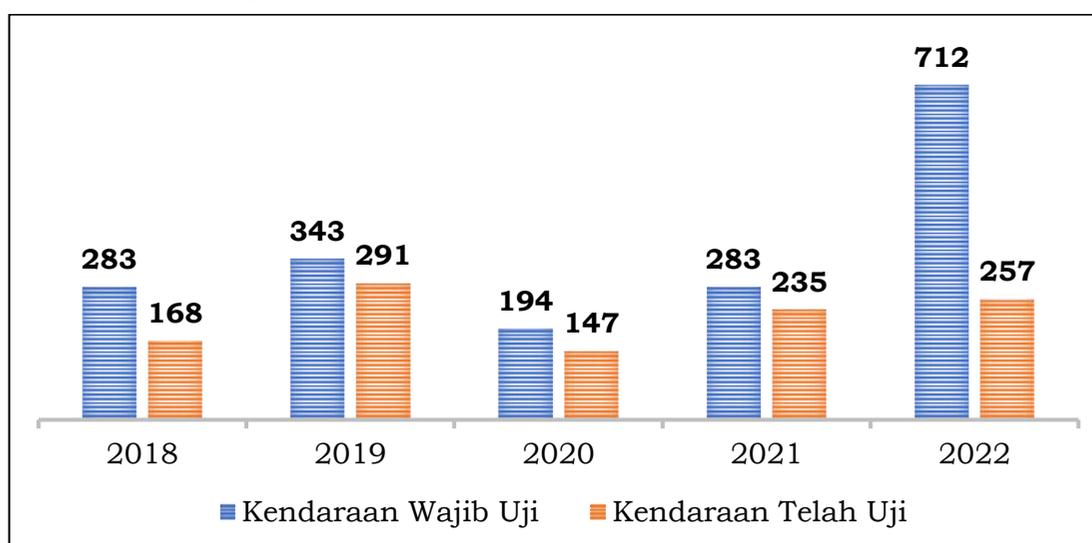
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2022)

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kendaraan wajib uji jumlahnya fluktuatif setiap tahunnya. Begitu pula dengan kendaraan yang telah diuji. Pada tahun 2022 dari jenis kendaraan umum penumpang (angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan) jumlah

kendaraan yang telah diuji mencapai 96 persen dari total kendaraan yang wajib uji.

Kendaraan Bus merupakan kendaraan umum penumpang yang dapat mengangkut penumpang dengan kapasitas mulai dari 24 *seat* sampai dengan 59 *seat*. Pengujian kendaraan ini ditujukan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas akibat dari ketidaklaikan kendaraan bermotor, terutama kendaraan bus karena bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang serta pengguna jalan lainnya. Berikut adalah data Pengujian Kendaraan Bus di Kabupaten Sumedang.

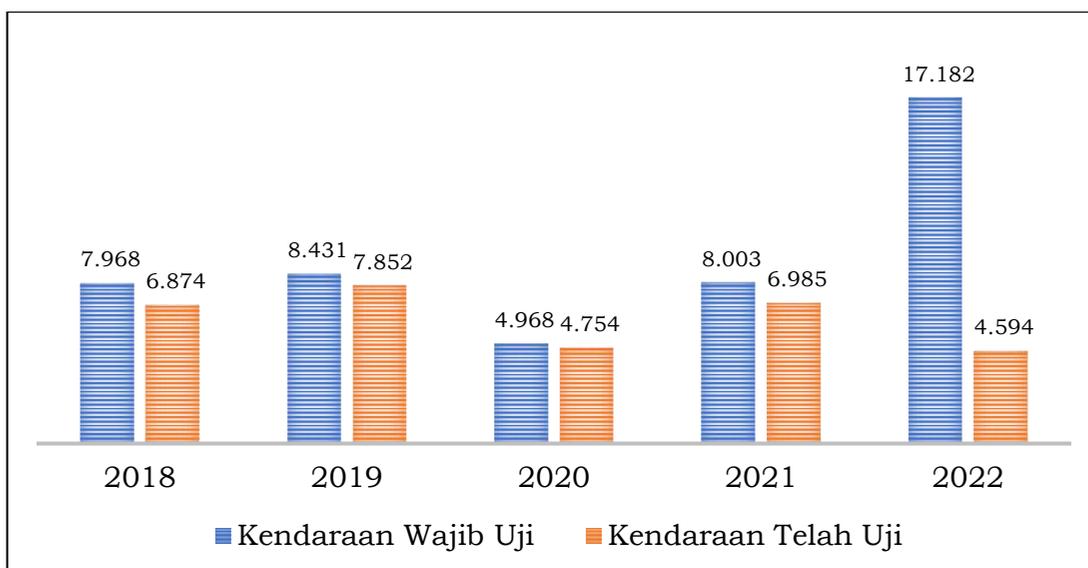
Gambar 2.92
Pengujian Mobil Bus (Unit) Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2022)

Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Tentunya dalam mobilitasnya kendaraan angkutan barang harus laik jalan, karena untuk menunjang keselamatan lalu lintas harus teruji sesuai kapasitas kendaraan angkutan barang. Pengujian mobil barang disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.93
Pengujian Mobil Barang (Unit)
Tahun 2018-2022



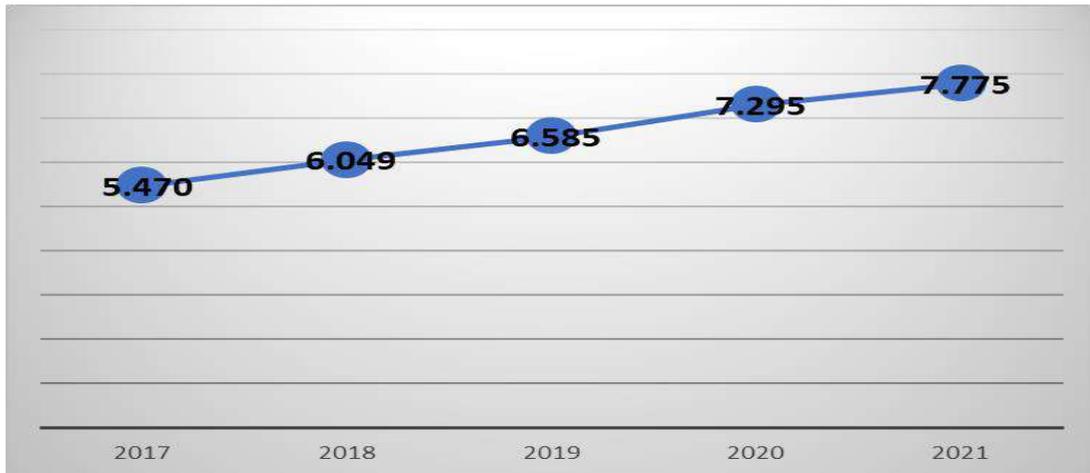
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2023)

Memperhatikan ketiga gambar diatas, perbandingan jumlah kendaraan yang telah melaksanakan uji laik jalan dengan kendaraan wajib uji mulai dari kendaraan angkutan penumpang, bus dan angkutan barang masih rendah, dikarenakan belum optimalnya pelayanan, ketersediaan alat uji yang ada, serta kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengujian kendaraan bermotor. Selain itu juga karena luasnya wilayah Kabupaten Sumedang tentunya perlu adanya alat Uji keliling yang dapat menjangkau seluruh wilayah. Kondisi eksisting saat ini untuk pelayanan uji laik jalan hanya bersifat statis, sehingga hal tersebut menjadi permasalahan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

3) Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Salah satu peningkatan angka keselamatan di jalan raya adalah dengan pemasangan rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas di beberapa jalan yang rawan kecelakaan, rawan bencana serta Kawasan pendidikan. Pemasangan rambu-rambu dan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif setiap tahunnya. Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas terdiri dari jumlah rambu-rambu, dan jumlah Penerangan Jalan Umum. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.94
Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas (Unit)
Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2022)

4) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Berbasis Teknologi.

Sarana dan Prasarana Perhubungan berbasis teknologi berupa Kamera pengawas di setiap persimpangan ruas jalan perkotaan yang terintegrasi dengan *Command Center* (ruang pengawasan). Teknologi tersebut atau dinamakan ATCS (*Area Traffic Control System*) yang merupakan suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimal dan koordinasi lampu lalu lintas di setiap persimpangan jalan.

Pemasangan ATCS di Kabupaten Sumedang dimulai pada Tahun 2021 dan baru terdapat 64 titik kamera pengawas di wilayah perkotaan, namun terdapat kekurangan sebanyak 113 titik kamera pada 14 ruas jalan guna terjaminnya keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan, dan pada tahun 2022 tidak ada pemasangan tambahan untuk ATCS di Kabupaten Sumedang.

Kondisi eksisting ATCS pada saat ini belum optimal tentunya dapat perlu dukungan yang maksimal dari Pemerintah Daerah agar menjamin keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2.39
Lokasi CCTV Terkoordinasi dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tahun 2022

No	Lokasi
1.	Simpang Binokasih
2.	Simpang RSUD
3.	Simpang Pajaji
4.	Simpang Taman Endog
5.	Simpang Ojolali
6.	Simpang Angkrek
7.	Simpang Alamsari

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2022)

Tabel 2.40
Lokasi Perangkat Traffic Counting Terpasang Tahun 2022

No	Lokasi
1.	Cisero
2.	Cimayor
3.	Padasuka
4.	Samoja

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2022)

Tabel 2.41
Lokasi CCTV Berdasarkan Jenis Kamera Terpasang Tahun 2022

Kamera PTZ	Jumlah	Kamera PIX	Jumlah
Dishub	1	Dishub	1
Griya	1	Griya	2
Ojolali	1	Ojolali	1
BTN	1	BTN	1
Angkrek	1	Angkrek	2

Kamera PTZ	Jumlah	Kamera PIX	Jumlah
Taman Endog	2	Taman Endog	5
PKB	1	PKB	1
Alun-alun Utara	1	Alun-alun Utara	2
Alun-alun Sumedang	4	Alun-alun Sumedang	3
BNI	2	BNI	3
RSUD	1	RSUD	2
BJB	1	BJB	1
Bundaran Binokasih	1	Bundaran Binokasih	6
Pajaji	1	Pajaji	1
Cimayor	1	Cimayor	1
Patung Kuda	1	Patung Kuda	1
Bundaran Alam Sari	1	Bundaran Alam Sari	5
UPI	1	UPI	1
-	-	Cisero	1
-	-	Padasuka	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

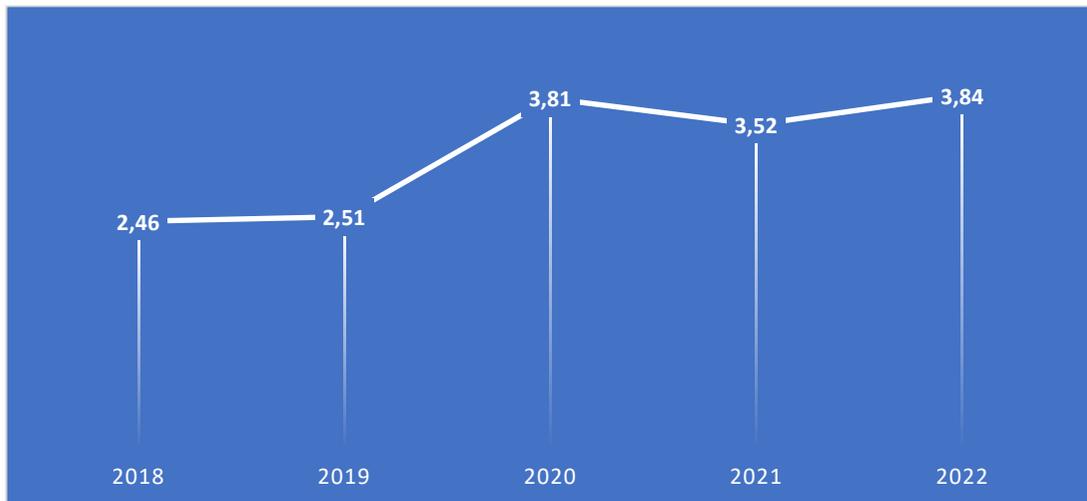
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (*realtime*). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemerintah Kabupaten Sumedang bergerak cepat dalam masalah digitalisasi, capaian indeks SPBE kabupaten Sumedang masuk pada kategori baik terutama pada tahun 2020 mencapai 3,81 poin,

walaupun sempat turun pada tahun 2021 menjadi 3,52 poin, namun pada Tahun 2022 kembali naik menjadi 3,84 poin. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.95
Indeks SPBE (poin) Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2023)

Penurunan capaian Indeks SPBE disebabkan oleh perubahan formulasi penilaian. Dari perbedaan penilaian tersebut maka banyaknya faktor-faktor pendukung yang harus dilengkapi. Pada Tahun 2020 penilaian SPBE terdiri hanya 3 (tiga) domain namun pada Tahun 2021 menjadi 12 domain. Meskipun mengalami kenaikan capaian indeks SPBE pada tahun 2022 akan tetapi terdapat beberapa domain yang mengalami penurunan nilai sehingga diperlukan reuiu dan /atau tindaklanjut terhadap domain yang mengalami penurunan. Dikarenakan setiap domain diampu oleh beberapa SKPD maka untuk mencapai nilai yang sempurna diperlukan kontribusi dari beberapa SKPD terkait. Tabel dibawah ini adalah Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.42
Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2022

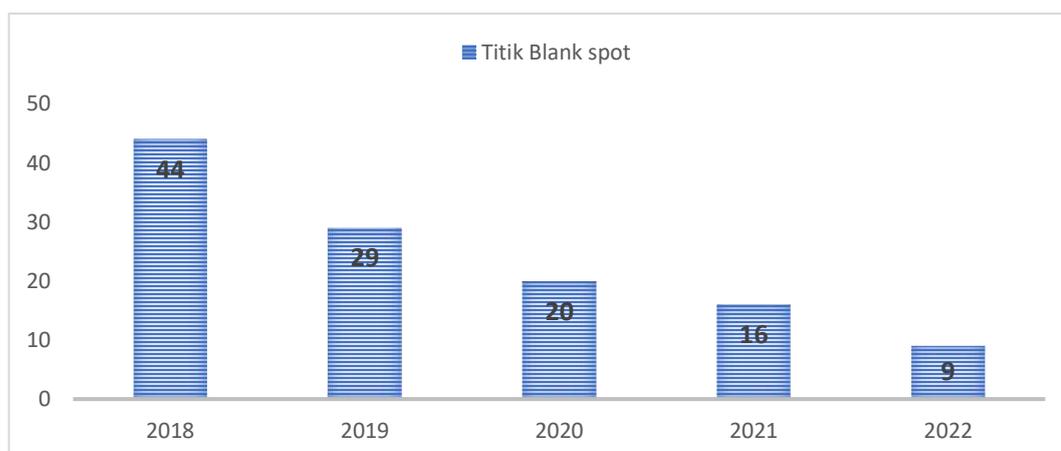
2020		2021		2022	
Domain	Nilai	Domain	Nilai	Domain	Nilai
Kebijakan SPBE	3,88	Kebijakan SPBE	3,2	Kebijakan SPBE	4,70
Tata Kelola	3,57	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,2	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	4,70
Layanan	3,91	Tata Kelola SPBE	3,6	Tata Kelola SPBE	2,60
		Perencanaan Strategis SPBE	3,25	Perencanaan Strategis SPBE	2,75
		Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,75	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75
		Penyelenggara SPBE	4	Penyelenggara SPBE	2
		Manajemen SPBE	2,45	Manajemen SPBE	3,55
		Penerapan Manajemen SPBE	2,13	Penerapan Manajemen SPBE	3,75
		Audit TIK	2,33	Audit TIK	3
		Layanan SPBE	3,95	Layanan SPBE	4,38
		Administrasi Pemerintahan Berbasis	3,7	Administrasi Pemerintahan Berbasis	4,20

2020		2021		2022	
Domain	Nilai	Domain	Nilai	Domain	Nilai
		Elektronik		Elektronik	
		Layanan Publik Berbasis Elektronik		Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,67

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2023)

Seiring dengan tingginya penggunaan internet di Kabupaten Sumedang, namun masih terdapat titik-titik *blank spot* di beberapa wilayah yang tersebar di beberapa kecamatan. Blank spot merupakan suatu kondisi dimana suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon ataupun komunikasi digital seperti jaringan internet. Beberapa penyebab timbulnya blank spot di beberapa wilayah dipengaruhi oleh kondisi geografis dan faktor cuaca. Berikut adalah data titik *blank spot* di Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.96
Titik Blank Spot di Kabupaten Sumedang (Desa)
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2022)

Blank spot menjadi salah satu permasalahan pada era digitalisasi saat ini, karena sistem informasi sangatlah penting dan utama. Berdasarkan gambar di atas, jumlah titik blank spot di wilayah Kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2022 tinggal 9 (sembilan) tempat yang belum memiliki akses jaringan internet. Beberapa langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah titik blank spot salah satunya dengan memperkuat sinyal di wilayah yang menjadi titik blank spot. Adapun data layanan jaringan internet di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut. Penggunaan Internet

Tingginya penggunaan internet ini mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat melek informasi. Kondisi saat ini penggunaan internet tidak memandang kalangan, baik kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas

maupun kalangan atas, tentunya internet menjadi salah satu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu pengguna internet juga mulai dari usia 10 (sepuluh) Tahun sudah menggunakan internet. Seperti dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Tabel 2.43
Layanan Jaringan Internet Blank Spot di Kabupaten Sumedang Tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Kantor Desa		Alamat	Layanan Internet yang tersedia				Ket.
					Fiber Optik Telkomsel	GSM	Satelit	Blank Spot	
1	Wado	1	Cimungkal			√			Sinyal GSM kurang Bagus
		2	Ganjarresik			√			Sinyal GSM kurang Bagus
		3	Cilengkrang			√			Sinyal GSM kurang Bagus
		4	Cikareo Selatan			√			
		5	Cikareo Utara			√			
		6	Wado			√			
		7	Mulyajaya			√			
		8	Sukajadi			√			Sinyal GSM kurang Bagus
		9	Cisurat			√			
		10	Sukapura			√			
2	Jatinunggal	1	Sirnasari			√			
		2	Tarikolot			√			
		3	Sarimekar			√			
		4	Banjarsari	Banjarsari, Jatinunggal, Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45376		√	√		
		5	Sukamanah			√			
		6	Cipeundeuy			√			
		7	Cimanintin			√	√	√	
		8	Pawenang			√			
		9	Kirisik			√			
3	Darmaraja	1	Darmaraja			√			

No	Nama Kecamatan	Kantor Desa	Alamat	Layanan Internet yang tersedia				Ket.	
				Fiber Optik Telkomsel	GSM	Satelit	Blank Spot		
		2	Darmajaya		√				
		3	Sukamenak		√			Sinyal GSM kurang Bagus	
		4	Sukaratu			√			
		5	Cikeusi			√			
		6	Cipeuteuy			√		Sinyal GSM kurang Bagus	
		7	Cieunteung	Cieunteung, Darmaraja, Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45372	√	√			Sinyal GSM kurang Bagus
		8	Karangpakuan			√			
		9	Pakualam			√		Sinyal GSM kurang Bagus	
		10	Neglasari			√			
		11	Tarunajaya			√		Sinyal GSM kurang Bagus	
		12	Ranggon			√		Sinyal GSM kurang Bagus	
		4	Cibugel	1.	Jayamekar		√		
2.	Buanamekar				√			Sinyal GSM kurang Bagus	
3.	Cibugel					√			
4	Cipasang					√		Sinyal GSM kurang Bagus	
5	Tamansari					√		Sinyal GSM kurang Bagus	
6	Suka raja					√		Sinyal GSM kurang Bagus	
7	Jayamandiri					√		Sinyal GSM kurang Bagus	
5	Cisitu	1.	Cisitu		√				
		2	Situmekar	Situmekar, Cisitu Situmekar Sumedang Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45363	√	√			
		3	Pajagan			√			
		4.	Cigintung			√			

No	Nama Kecamatan	Kantor Desa	Alamat	Layanan Internet yang tersedia				Ket.
				Fiber Optik Telkomsel	GSM	Satelit	Blank Spot	
		5.	Sundamekar		√			
		6.	Linggajaya	Kucing, Linggajaya, Cisitu Linggajaya Sumedang Jawa Barat 45363	√	√		
		7.	Ranjeng			√		
		8.	Cilopang			√		
		9.	Cimarga			√		
		10.	Cinangsi			√		
6	Situraja	1.	Situraja Utara			√		
		2.	Situraja			√		
		3.	Mekarmulya	Jl.Cigodeg Mekarmulya Situraja KabupatenSumedang Jawa Barat 45371	√	√		
		4.	Cikadu	Cikadu Situraja, KabupatenSumedang Jawa Barat 45371	√	√		
		5.	Kaduwulung			√		
		6.	Karangheuleut			√		
		7.	Cijeler			√		
		8.	Ambit			√		
		9.	Malaka	Jl. Samoja No.2 Malaka Situraja KabupatenSumedang Jawa Barat 45371	√	√		
		10.	Sukatali	Jl. Raya Sukatali No.55 Sukatali Kec. Situraja KabupatenSumedang Jawa Barat 45371	√	√		
		11.	Pamulihan			√		√
		12.	Jatimekar			√		
		13.	Bangbayang			√		√

No	Nama Kecamatan	Kantor Desa	Alamat	Layanan Internet yang tersedia				Ket.
				Fiber Optik Telkomsel	GSM	Satelit	Blank Spot	
		14.	Cijati	Cijati Situraja Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45371	√	√		
		15.	Cicarimanah			√		√
7	Conggeang	1.	Conggeang Kulon			√		
		2.	Conggeang Wetan	Jl.Legok-Conggeang No.325 Conggeang Wetan KabupatenSumedang Jawa Barat 45391	√	√		
		3.	Cipamekar	Jl. Sirah Cipelang Cipamekar Conggeang KabupatenSumedang Jawa Barat 45391	√	√		
		4.	Cibeureuyeh	Cibeureuyeh, Kec. Conggeang KabupatenSumedang Jawa barat 45391	√	√		
		5.	Jambu	Jl. Raya Legok Conggeang NO.69 Cipamker Conggeang KabupatenSumedang Jawa Barat 45391	√	√		
		6.	Babakan Asem			√		
		7.	Padaasih			√	√	
		8.	Ungkal			√	√	
		9.	Karanglayung	Jl. Ujungjaya Conggeang Babakan Asem Conggeang KabupatenSumedang Jawa Barat 45391	√	√		
		10.	Cacaban	Cacaban Conggeang KabupatenSumedang Jawa Barat 45391	√	√		
		11.	Narimbang			√		
		12.	Cibubuan			√		
8	Paseh	1.	Paseh Kidul	Jl. Siliwangi No.253 Paseh Kidul Kec. Paseh KabupatenSumedang Jawa Barat 45381	√	√		
		2.	Paseh Kaler			√		
		3.	Legok Kidul			√		Sinyal GSM kurang Bagus

No	Nama Kecamatan	Kantor Desa	Alamat	Layanan Internet yang tersedia				Ket.
				Fiber Optik Telkomsel	GSM	Satelit	Blank Spot	
		4.	Legok Kaler	Jl. Padjajaran Legok Kaler Kec.Paseh KabupatenSumedang Jawa Barat	√	√		
		5.	Bongkok			√		
		6.	Padanaan			√		
		7.	Pasireungit			√	√	
		8.	Cijambe	Cijambe Paseh KabupatenSumedang Jawa Barat 45381	√	√	√	
		9	Haur Kuning	Jl. Desa Haur Kuning no.12 Paseh Haurkuning Kec. Paseh KabupatenSumedang Jawa Barat 45381	√	√		
		10	Citepok			√		
9	Surian	1	Wanasari			√		
		2	Wanjaya			√		
		3	Pamekarsari			√		
		4	Tanjung			√		√
		5	Surian			√		
		6	Suriamukti			√		
		7	Suriamedal			√		
		8	Ranggasari			√		
		9	Nanjungwangi			√		√
10	Buahdua	1.	Buahdua	Jl.Raya Buahdua No.1 Kec. Buahdua KabupatenSumedang Jawa Barat 45354	√	√		
		2.	Hariang	Jl.Buahdua Hariang KabupatenSumedang Jawa Barat 45354	√	√		
		3.	Karangbungur			√	√	

No	Nama Kecamatan	Kantor Desa	Alamat	Layanan Internet yang tersedia				Ket.
				Fiber Optik Telkomsel	GSM	Satelit	Blank Spot	
		4.	Mekarmukti		√			Sinyal GSM kurang Bagus
		5.	Citaleus		√			
		6.	Nagrak	Ngarak Buahdua KabupatenSumedang Jawa Barat 45354	√	√		
		7.	Cibitung			√		
		8.	Sekarwangi	Conggeang Buahdua Sekarwangi kec.Buahdua KabupatenSumedang Jawa Barat 45354	√	√		
		9.	Gendereh			√		
		10	Panyindangan			√		
		11	Cilangkap	Jl.Raya Buahdua kec.Buahdua KabupatenSumedang Jawa Barat 45354	√	√		Sinyal GSM kurang Bagus
		12	Bojongloa			√		Sinyal GSM kurang Bagus
		13.	Cikurubuk			√		
		14.	Ciawitali			√		Sinyal GSM kurang Bagus
11	Tanjungsari	1.	Gudang	Jl.Raya Tanjungsari No.365 Gudang Kec.Tanjungsari KabupatenSumedang Jawa Barat 45362	√	√		
		2.	Tanjungsari			√		
		3.	Jatisari			√		
		4.	Margaluyu			√		
		5.	Kutamandiri			√		
		6.	Margajaya	Jl.Pamagersari Marga Jaya Kec.Tanjungsari KabupatenSumedang Jawa Barat 45362	√	√		
		7.	Raharja			√		
		8.	Cijambu			√		
		9.	Pasigaran			√		

No	Nama Kecamatan	Kantor Desa	Alamat	Layanan Internet yang tersedia				Ket.
				Fiber Optik Telkomsel	GSM	Satelit	Blank Spot	
		10.	Gunungmanik	Jl.Gunungmanik Kec.Tanjungsari KabupatenSumedang Jawa Barat 45362	√	√		
		11	Kadakajaya			√		
		12	Cinanjung			√		
12	Sukasari	1.	Sukasari			√		
		2.	Genteng			√		
		3.	Banyuresmi			√		
		4.	Nanggerang			√		
		5.	Mekarsari			√		
		6.	Sindangsari			√		
		7.	Sukarapih	Sukarapi Sukasari KabupatenSumedang Jawa Barat 45366	√	√		
13	Pamulihan	1.	Cigendel			√		
		2.	Cijeruk			√		
		3.	Pamulihan			√		
		4.	Haurgombong	Jl. Simoang Parakanmuncang Haurngombong Kec. Pamulihan KabupatenSumedang Jawa Barat 45362	√	√		
		5.	Cilembu	Jl. Raya Cilembu Desa Cilembu Kec. Pamulihan KabupatenSumedang Jawa Barat 45365	√	√		
		6.	Cimarias			√		
		7.	Cinanggerang			√		Sinyal GSM kurang Bagus
		8.	Mekarbakti	Jl. Desa Mekarbakti Desa mekarbakti kec. Pamulihan KabupatenSumedang Jawa Barat 45365	√	√		
		9.	Sukawangi			√		

No	Nama Kecamatan	Kantor Desa	Alamat	Layanan Internet yang tersedia				Ket.
				Fiber Optik Telkomsel	GSM	Satelit	Blank Spot	
		10. Ciptasari	Jl. Tanjungsari-Rancakalong No. 480a Ciptasarai Kec. Pamulihan KabupatenSumedang Jawa Barat 45362	√	√			
		11. Citali			√			Sinyal GSM kurang Bagus
14	Cimanggung	1. Cimanggung	Cimanggung KabupatenSumedang Jawa Barat 45364	√	√			
		2. Sindangpakuon	Jl. Parakanmuncang No.199 Sindangpakuon Kec.Cimanggung KabupatenSumedang Jawa Barat 45364	√	√			
		3. Tegalmanggung			√	√		
		4. Sindulang				√		
		5. Sindanggalih				√		
		6. Sawahdadap	Jl. Sawah Dadap Mangunarga Kec.Cimanggung KabupatenSumedang 45364	√	√			
		7. Cikahuripan				√		
		8. Sukadana	Jl. Bunter No.13 Sukadana Kec.Cimanggung KabupatenSumedang Jawa Barat 45364	√	√			
		9. Mangunarga	Jl.Sawah Dadap No.16 Mangunarga Kec. Cimanggung Sumedang Jawa Barat 45364	√	√			
		10. Cihanjuang	Cihanjuang Kec.Cimanggung KabupatenSumedang Jawa Barat 45364	√	√			
		11. Pasirnanjung				√		
15	Jatinangor	1. Cikeruh	Jl.Kolonel Ahmad Syam No.192 Cikeruh Jatinangor Ka.Sumedang Jawa Barat 45363	√	√			
		2. Hegarmanah	Jl.Raya Jatinangor KabupatenSumedang Jawa Barat 45363	√	√			

No	Nama Kecamatan	Kantor Desa	Alamat	Layanan Internet yang tersedia				Ket.
				Fiber Optik Telkomsel	GSM	Satelit	Blank Spot	
		3. Cibeusi	Jl.KH.Hasan Mustofa Cibeusi Kec.Jatinangor KabupatenSumedang Jawa Barat 45363	√	√			
		4. Cipacing	Cipacing Jatinangor KabupatenSumedang Jawa Barat 45363	√	√			
		5. Sayang	Jl.Kolonel Ahmad Syam no.226 Sayang Kec. Jatinangor KabupatenSumedang Jawa Barat 45363	√	√			
		6. Mekargalih	Mekargalih Jatinangor KabupatenSumedang Jawa Barat 45363	√	√			
		7. Cintamulya	Cibungur No.76 Cinta Mulya Kec.Jatinangir Kabupaten,Sumedang Jawa Barat 45363	√	√			
		8. Jatimukti			√			
		9. Cisempur	Cisempur Jatinangor KabupatenSumedang Jawa Barat 45363	√	√			
		10. Jatiroke	Jl.Letda Lukito No.90 Jatiroke.Kec Jatinangor KabupatenSumedang Jawa Barat 45363	√	√			
		11. Cileles	Jl.Cikuda No.18 kec. Jatinangor KabupatenSumedang Jawa Barat 45363	√	√			
		12. Cilayung			√			
16	Rancakalong	1. Nagarawangi	Nagarawangi Rancakalong KabupatenSumedang Jawa Barat 45361	√	√			
		2. Cibunar			√			
		3. Pangadegan			√			
		4. Sukahayu	Sukahayu Rancakalong KabupatenSumedang Jawa Barat 45361	√	√			
		5. Sukamaju			√			
		6. Pamekaran			√			

No	Nama Kecamatan	Kantor Desa	Alamat	Layanan Internet yang tersedia				Ket.
				Fiber Optik Telkomsel	GSM	Satelit	Blank Spot	
		7.	Rancakalong	Rancakalong KabupatenSumedang Jawa Barat 45361	√	√		
		8.	Sukasirnarasa			√		
		9.	Cibungur			√		
		10.	Pasirbiru	Pasir Biru rancakalong KabupatenSumedang Jawa Barat 45361	√	√		
17	Sumedang Selatan	1	Sukagalih	Sukagalih, Kec. Sumedang Selatan KabupatenSumedang Jawa Barat 45311	√	√		
		2	Baginda	Baginda Sumedang Selatan KabupatenSumedang Jawa Barat 45311	√	√		
		3	Cipancar	Cipancar Sumedang Selatan KabupatenSumedang Jawa Barat 45311	√	√		
		4	Citengah	Jl.Pager betis Kec.Sumedang Selatan KabupatenSumedang Jawa Barat 45311	√	√		
		5	Gunasari	Jl.Suradinata Sembir Gunasari Kec.Sumedang Selatan KabupatenSumedang Jawa Barat 45311	√	√		
		6	Sukajaya	Sukajaya Sumedang Selatan Jawa Barat 45311	√	√		
		7	Margamekar			√		
		8	Ciherang	Ciherang Sumedang Selatan Kabupatensumedang Jawa Barat 45311	√	√		
		9	Margalaksana			√		
		10	Mekar Rahayu			√		
		11	Kel. Regol Wetan	Jl.Cut Nyak Dien No.29 Regol Wetan Kec.Sumedang Utara Jawa Barat 45311	√	√		
		12	Kel. Pasanggrahan Baru	KJl.Pangeran Kornel pasanggrah Baru Kec.Sumedang Selatan KabupatenSumedang Jawa Barat 45311	√	√		

No	Nama Kecamatan	Kantor Desa	Alamat	Layanan Internet yang tersedia				Ket.	
				Fiber Optik Telkomsel	GSM	Satelit	Blank Spot		
		13	Kel. Kota Kulon	Jl.Pangeran Santri No.73 Kotajulon Kec.Sumedang Selatan KabupatenSumedang Jawa Barat 45311	√	√			
		14	Kel. Cipameunpeuk	Jl.Pager Betis No.42 Kel.Cipameungpeuk KabupatenSumedang Selatana Jawa Barat 45311	√	√			
18	Sumedang Utara	1	Padasuka	Padasaujka. Sumedang Utara KabupatenSumedang Jawa Barat 45621	√	√			
		2	Mulyasari			√			
		3	Girimukti				√		
		4	Mekarjaya	Margamukti Kec. Suedang Utara KabupatenSumedang Jawa Barata 45621			√		
		5	Margamukti		√	√			
		6	Sirnamulya			√			
		7	Kebonjati	Kebonjati Kec.Sumedang Utara KabupatenSumedang Jawa Barat 45621	√	√			
		8	Jatihurip			√			
		9	Jatimulya			√			
		10	Rancamulya			√			
		11	Kel.Situ	Jl;.Karapyak No.12 Situ.Kec.Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45621	√	√			
		12	Kel.Talun	Jl. Talun Kec Sumedang Utara KabupatenSumedang Jawa Barat 45621	√	√			
		13	Kel.Kota Kaler	Jl.Mayor Abdurahman No.214 Kota Kaler Kec.Sumedang Utara KabupatenSumedang Jawa Barat 45621	√	√			
19	Ganeas	1.	Ganeas	Ganeas Kec. Ganeas KabupatenSumedang Jawa Barat 45365	√	√			

No	Nama Kecamatan	Kantor Desa	Alamat	Layanan Internet yang tersedia				Ket.
				Fiber Optik Telkomsel	GSM	Satelit	Blank Spot	
		2.	Dayeuhluhur		√			
		3.	Cikoneng		√			
		4.	Sukaluyu		√			
		5.	Sukawening		√			
		6.	Tanjunghurip		√			
		7.	Cikondang		√			
		8.	Cikoneng Kulon		√			
		20	Tanjungker ta	1.	Sukamantri	Sukamantri Tanjungkerta KabupatenSumedang Jawa Barat 45354	√	√
2.	Cipanas			Cipanas Tanjungkerta KabupatenSumedang Jawa Barat 45354	√	√		
3.	Gunturmekar			Desa Guntur Mekar Kec.Tanjungjer KabupatenSumedang Jawa Barat 45354	√	√	√	
4.	Mulyamekar					√		
5.	Banyuasih			Banyuasih Tanjungkerta KabupatenSumedang Jawa Barat 45354	√	√		
6.	Kertamekar					√		
7.	Kertaharja					√		
8.	Cigentur					√		
9.	Tanjungmekar			Tanjungmekar, Kec.Tanjungkerta KabupatenSumedang Jawa Barat 45354	√	√		
10.	Tanjungmulya					√		
11.	Boros					√		
12.	Awilega			Tanjungmulya Tanjungkerta KabupatenSumedang Jawa Barat 45354	√	√		

No	Nama Kecamatan	Kantor Desa	Alamat	Layanan Internet yang tersedia				Ket.	
				Fiber Optik Telkomsel	GSM	Satelit	Blank Spot		
21	Tanjungmedar	1.	Cikaramas	Cikaramas Tanjungmedar KabupatenSumedang Jawa Barat 45353	√	√			
		2.	Wargaluyu			√			Sinyal GSM kurang Bagus
		3.	Jingkang				√		
		4.	Kamal				√		
		5.	Kertamukti				√		
		6.	Tanjungwangi				√		
		7.	Sukamukti				√		
		8.	Sukatani				√		
		9.	Tanjungmedar				√		
22	Cimalaka	1.	Cimalaka	Jl. Raya Cimalaka Kec. Cimalak KabupatenSumedang Jawa Barat 45353	√	√			
		2.	Galudra	Galudra Cimalaka KabupatenSumedang Jawa Barat 45353	√	√			
		3.	Cibeureum Kulon				√		
		4.	Naluk	Naluk Cimalak KabupatenSumedang Jawa Barat 45353	√	√			
		5.	Nyalindung				√		
		6.	Trunamanggala				√		
		7.	Cikole				√		
		8.	Cibeureum Wetan	Jl.Raya Sumedang-Cirebo Desa Cibeureum Wetan KabupatenSumedang Jawa Barat 45353	√	√			
		9.	Mandalaherang	Manadalaherang Cimalak KabupatenSumedang Jawa Barat 45353	√	√			

No	Nama Kecamatan	Kantor Desa	Alamat	Layanan Internet yang tersedia				Ket.
				Fiber Optik Telkomsel	GSM	Satelit	Blank Spot	
		10. Licin	Jl.Margamukti No.72 RT.04 RW.05 Licin Cimalak KabupatenSumedang Jawa Barat 45353	√	√	√		
		11. Citimun	Citimun Cimalaka KabupatenSumedang Jawa Barat 45353	√	√			
		12. Serang			√			
		13. Padasari			√	√		
		14. Cimuja			√			
23	Cisarua	1. Cisarua	Cisarua, Kec. Cisarua KabupatenSumedang Jawa Barat	√	√			
		2. Ciuyah			√			
		3. Cimara				√		
		4. Bantarmara				√		
		5. Cipandanwangi				√		
		6. Cisalak				√		
		7. Kebon Kalapa	Kebon Kalapa Cisarua KabupatenSumedang Jawa Barat 4535	√	√			
24	Tomo	1. Tomo	Jl. Nasional 5 No.1945 Kec. Tomo KabupatenSumedang Jawa Barat 45382	√	√			
		2. Tolengas	Jl. Tolengas Kec. Tomo KabupatenSumedang Jawa Barat 45382	√	√			
		3. Darmawangsi	Darmawangsi Kec. Tomo KabupatenSumedang Jawa Barat 45382	√	√			
		4. Marongge			√			Sinyal GSM kurang Bagus
		5. Jembarwangi			√			Sinyal GSM kurang Bagus

No	Nama Kecamatan	Kantor Desa	Alamat	Layanan Internet yang tersedia				Ket.	
				Fiber Optik Telkomsel	GSM	Satelit	Blank Spot		
		6. Bugel	Bugel Kec.Tomo KabupatenSumedang Jawa Barat 45382	√	√				
		7. Cipeles	Jl.Desa Cipeles Kec.Tomo KabupatenSumedang Jawa Barat 45382	√	√				
		8. Karyamukti	Jl. Karyamukti Kec. Tomo Ka.Sumedang Jawa Barat 45382	√	√				
		9. Mekarwangi	Darmawangsi Kec. Tomo KabupatenSumedang Jawa Barat 45382	√	√			Sinyal GSM kurang Bagus	
25	Ujungjaya	1. Ujungjaya	Jl. Ujungjaya No.42 Kec.Ujungjaya KabupatenSumedang jawa Barat 45383	√	√				
		2. Palabuan	Palabuan Kec. Ujungjaya KabupatenSumedang Jawa Barat 45383	√	√				
		3. Palasari	Palasari, Kec. Ujungjaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45383	√	√				
		4. Keboncau	Jl. Kebon Cau Ujung Jaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45383	√	√				
		5. Sakurjaya	Jl. Ujungjaya Kec.Ujungjaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45383	√	√				
		6. Kudangwangi	Kudangwangi kec. Ujungjaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45383	√	√				
		7. Sukamulya	Sukamulya, Ujungjaya KabupatenSumedang Jawa Barat 45383	√	√				
		8. Cipelang			√				
		9. Cibuluh			√				
26	Jatigede	1. Cijeungjing	Cijeungjing Jatigede Kec. Jatigede KabupatenSumedang Jawa Barat 45377	√	√				

No	Nama Kecamatan	Kantor Desa	Alamat	Layanan Internet yang tersedia				Ket.
				Fiber Optik Telkomsel	GSM	Satelit	Blank Spot	
		2	Kadujaya	Kadujaya Jatigede KabupatenSumedang Jawa Barat 45377	√	√		
		3	Lebaksiuh			√	√	
		4	Cintajaya			√	√	Sinyal GSM kurang Bagus
		5.	Cipicung	Cipicung Jatigede KabupatenSumedang Jawa Barat 45377	√	√		
		6.	Mekarasih			√		
		7	Ciranggem			√		
		8	Cisampih			√	√	
		9	Jemah			√		
		10	Karedok			√		
		11	Kadu			√	√	

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2022)

2.4.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal.

1) Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Berdasarkan statusnya koperasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu koperasi aktif dan koperasi tidak aktif. Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan rapat anggota minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota, sedangkan koperasi tidak aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha. Selain dari status keaktifan koperasi pun terbagi menjadi koperasi sehat dan tidak sehat. Indikator suatu koperasi dinyatakan sehat dinilai dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi. Berikut adalah Jumlah Koperasi Status Aktif dan Sehat di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022.

Gambar 2.97
Jumlah Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat (unit)
Tahun 2018-2022



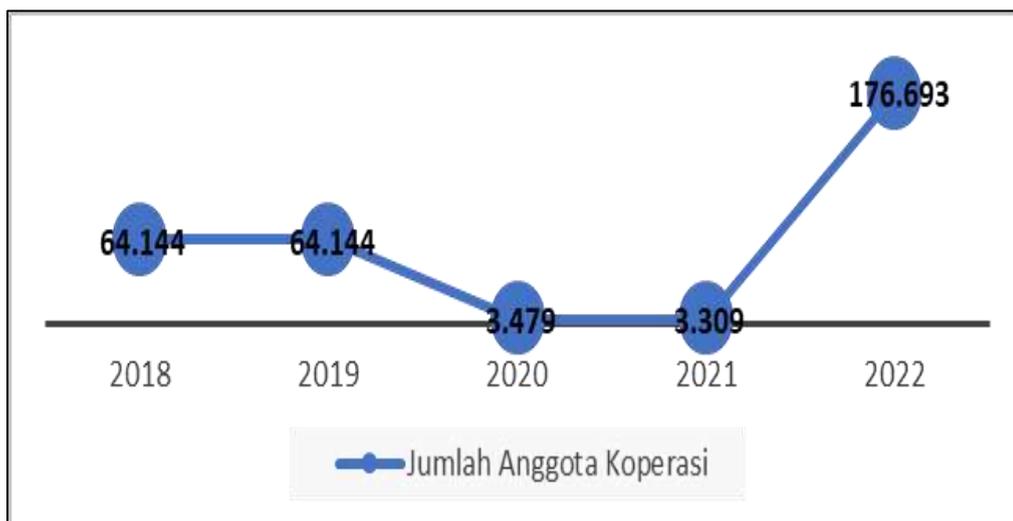
Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2023)

Jumlah koperasi aktif dan koperasi sehat di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan jumlah dari tahun sebelumnya menjadi 355 koperasi, ini terjadi karena pendataan koperasi dilakukan secara *Online Data System* (ODS) sehingga pendataan koperasi menjadi lebih akurat. Lain halnya dengan jumlah koperasi sehat yang mengalami penurunan jumlah pada Tahun 2022 menjadi 60 koperasi atau turun 156 koperasi dari tahun sebelumnya. Data koperasi sehat pada tahun 2021 ditentukan dengan jumlah koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan, sedangkan penentuan jumlah koperasi sehat pada tahun 2022 berdasarkan beberapa indikator koperasi sehat yang ditentukan oleh tim penilai.

Peningkatan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Sumedang juga berdampak terhadap peningkatan jumlah anggota koperasi yang cukup signifikan. Tercatat bahwa pada Tahun 2022 jumlah anggota koperasi mencapai 176.693 orang. Peningkatan ini sebagai dampak dari penerapan *Online Data System* (ODS) dari Kementerian Koperasi sehingga data koperasi menjadi lebih akurat selain itu juga meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa koperasi dapat menjadi wadah ekonomi yang sehat dan menguntungkan. Data

jumlah anggota koperasi di Kabupaten Sumedang disajikan pada Gambar dibawah ini.

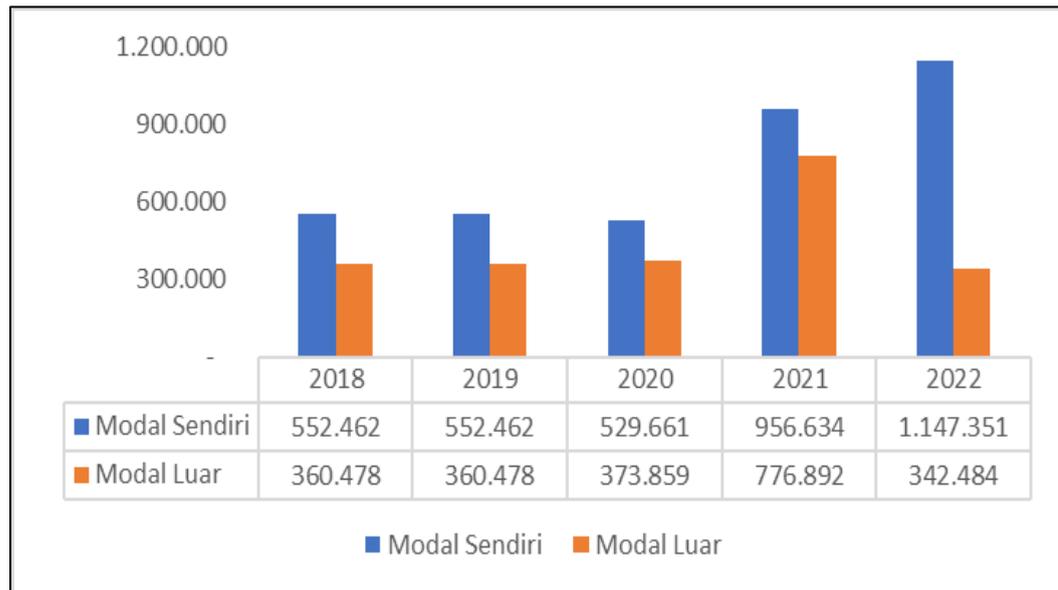
Gambar 2.98
Jumlah Anggota Koperasi (orang) Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2023)

Banyaknya jumlah anggota koperasi juga berdampak pada sumber permodalan koperasi yang ada di Kabupaten Sumedang. Sumber permodalan koperasi berasal dari modal sendiri dan modal luar/pinjaman. Modal sendiri atau disebut juga modal ekuiti yaitu modal yang berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal luar/pinjaman merupakan modal yang dipinjam koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank/lembaga keuangan, penerbitan obligasi/surat berharga dan sumber lainnya. Sumber permodalan sangat mempengaruhi terhadap rentabilitas usaha koperasi. Sumber permodalan koperasi disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.99
Sumber Permodalan Koperasi (Juta Rupiah)
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2023)

Berdasarkan data Gambar diatas bahwa permodalan koperasi yang bersumber dari modal sendiri terus mengalami peningkatan, seiring dengan terus bertambahnya jumlah keanggotaan, terutama pada Tahun 2022 yang mencapai Rp. 1,147 T. Tingginya modal sendiri akan berpengaruh signifikan terhadap pelayanan dan sisa hasil usaha anggota.

Permodalan luar/pinjaman koperasi pun menunjukkan perkembangan positif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan jumlah modal luar dari Rp. 776.892 jt pada tahun 2021 menjadi Rp. 342.484 jt pada tahun 2022. Dengan semakin turunnya permodalan luar/pinjaman mengindikasikan kemandirian permodalan koperasi semakin baik.

2) Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil dan menengah atau UKM merupakan jenis usaha yang meliputi industri dan perdagangan. UKM memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan dan jumlah UKM di Kabupaten Sumedang ini juga cukup besar. Gambar 2.100 Berikut adalah jumlah UKM yang terdapat di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022.

Gambar 2.100
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2023)

Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2018-2022 mengalami tren positif. Lonjakan tertinggi di Tahun 2021 tercatat terdapat 61.567 UKM. Adanya regulasi yang mendukung percepatan perizinan UKM di Kabupaten Sumedang tercipta UKM-UKM baru dan jumlahnya terus meningkat menjadi 63.225 UKM pada tahun 2022.

Dalam upaya meningkatkan produktivitas, kualitas usaha, serta pengelolaan modal usaha, Pemerintah Daerah mengadakan pelatihan yang diikuti oleh UKM. Adapun jumlah UKM yang telah mendapatkan pelatihan disajikan pada Gambar 2.101 berikut.

Gambar 2.101
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah yang Mendapatkan Pelatihan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2023)

Jumlah UKM yang telah mendapatkan pelatihan tertinggi pada tahun 2020 mencapai 1.670 UKM, dan terus menurun hingga pada tahun 2022 hanya 580 UKM yang dilatih. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya pembatasan jumlah UKM serta beberapa persyaratan yang harus ditempuh oleh UKM calon peserta pelatihan, sehingga tidak semua UKM mendapatkan pelatihan.

Bentuk lain dukungan Pemerintah Daerah terhadap UKM di Kabupaten Sumedang, salah satunya ialah dengan mempermudah akses permodalan. Pemerintah Daerah membentuk suatu regulasi dan kebijakan dalam bentuk bantuan permodalan. Bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan bantuan permodalan dengan beban cicilan yang ringan. Dengan adanya bantuan tersebut terjadi peningkatan pinjaman kepada Bank umum bagi UMKM trend nya sangat positif. pada Tahun 2021 totalnya mencapai kurang lebih Rp.4.733.759.000,-. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.44
Pinjaman Bank Umum Kepada UMKM Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Skala Usaha (Ribuan Rupiah) Tahun 2018-2022

Skala	2018	2019	2020	2021	2022
Mikro	1.505.615	1.736.725	1.419.153	2.583.275	3.158.217
Kecil	920.990	1.075.272	1.279.222	1.557.103	1.375.118
Menengah	580.465	556.910	931.254	593.382	382.976
Jumlah	3/007.069	3.368.907	3.629.629	4.733.759	4.916.311

Sumber : Bank Indonesia (2023)

Dari Tabel 2.43, dapat dijabarkan pinjaman Bank dan BPR kepada UMKM berdasarkan lapangan usaha. Untuk lebih detail dapat dilihat pada Tabel 2.44 berikut.

Tabel 2.45
Pinjaman Bank Umum dan BPR Kepada UMKM Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	79.300	133.654	219.700	346.983	530.718
Pertambangan dan Penggalian	39.925	33.716	21.270	19.712	15.912
Industri Pengolahan	275.372	288.804	359.627	558.572	597.292
Pengadaan Listrik dan Gas	1.670	6.785	6.535	5.754	4.211
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.534	3.422	3.994	4.529	4.077
Konstruksi	241.272	259.484	222.090	286.641	161.002
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	1.815.662	1.978.810	2.163.931	2.850.347	3.031.906
Transportasi dan Pergudangan	138.446	217.833	153.106	47.112	69.072
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38.139	46.759	77.458	136.885	152.681
Informasi dan Komunikasi	1.625	1.695	3.318	2.633	3.767

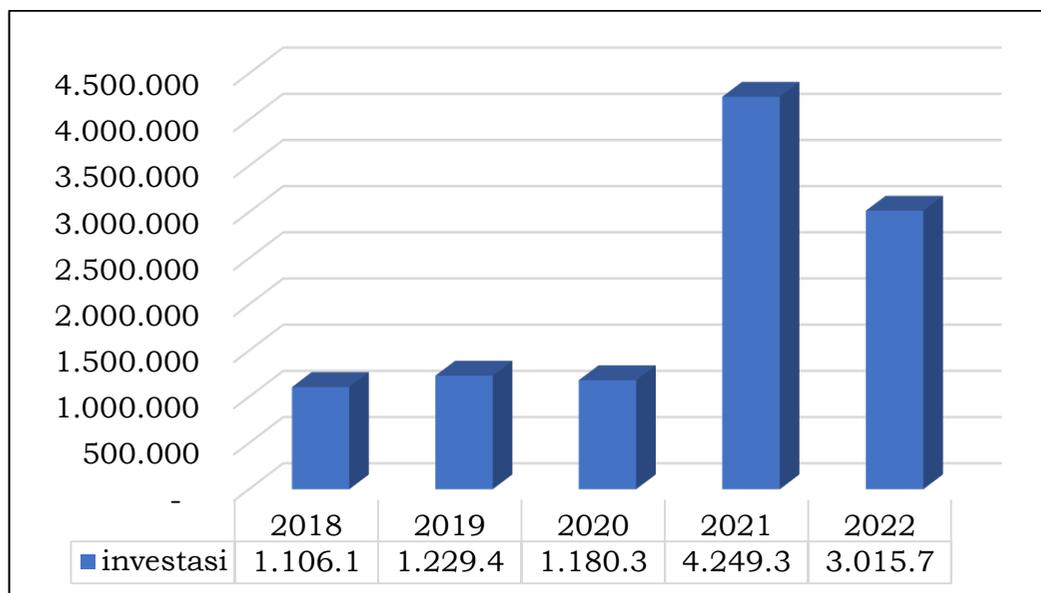
LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jasa Keuangan Dan Asuransi	51.706	44.768	48.374	94.438	61.987
Real Estate	158.365	155.842	153.249	156.651	19.516
Jasa Perusahaan	38.461	34.738	27.161	26.784	31.699
Admministrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	0	153	114	78	39
Jasa Pendidikan	5.745	15.324	17.046	7.991	10.385
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan lainnya	25.411	28.826	22.400	32.364	42.997
Jasa Lainnya	94.437	118.256	130.256	156.285	179.052
Total	3.007.069	3.368.907	3.629.629	4.733.759	4.916.311

Sumber : Bank Indonesia (2022) (Diolah)

2.4.2.12. Urusan Penanaman Modal

Investasi atau penanaman modal merupakan bentuk kegiatan yang sangat berpengaruh besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten dimana tentunya membuka lapangan pekerjaan dan menggali potensi-potensi ekonomi berbasis kemasyarakatan. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan investasi disebabkan oleh pembangunan Jalan Tol Cisumdawu sudah selesai, sehingga investasi pada Tahun 2022 hanya mencapai Rp. 3.015.702.714.481,-. untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.102 di bawah ini.

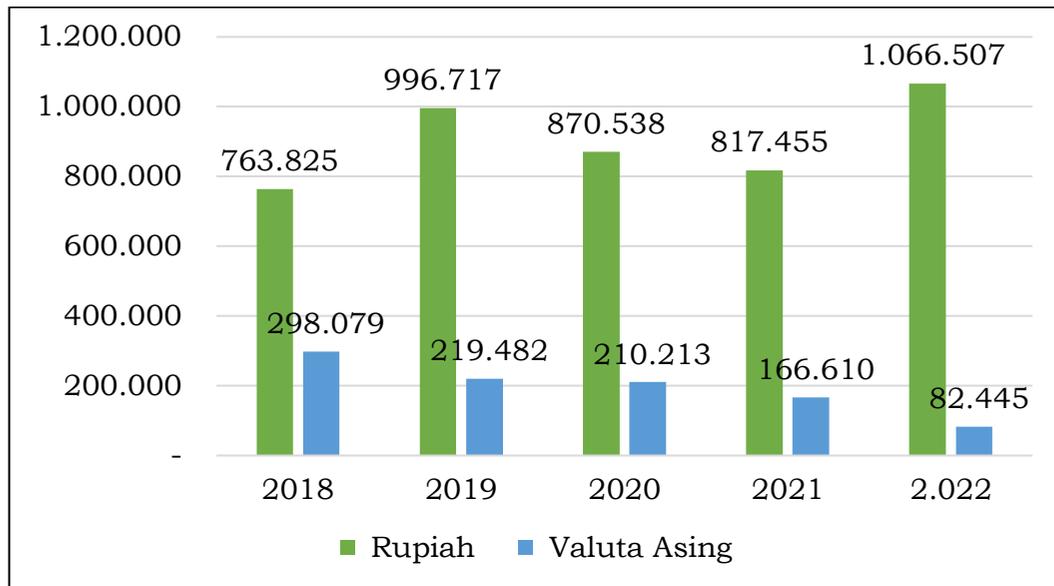
Gambar 2.102
Investasi di Kabupaten Sumedang (Juta Rupiah)
Tahun 2018-2022



Sumber : DPMPTSP (2023)

Investasi dapat berupa pinjaman investasi yang merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru dan atau kebutuhan khusus terkait investasi. Pinjaman Investasi selain dalam bentuk rupiah ada pula dalam bentuk valuta asing. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan pinjaman investasi dalam bentuk valuta asing. Untuk lebih detil dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

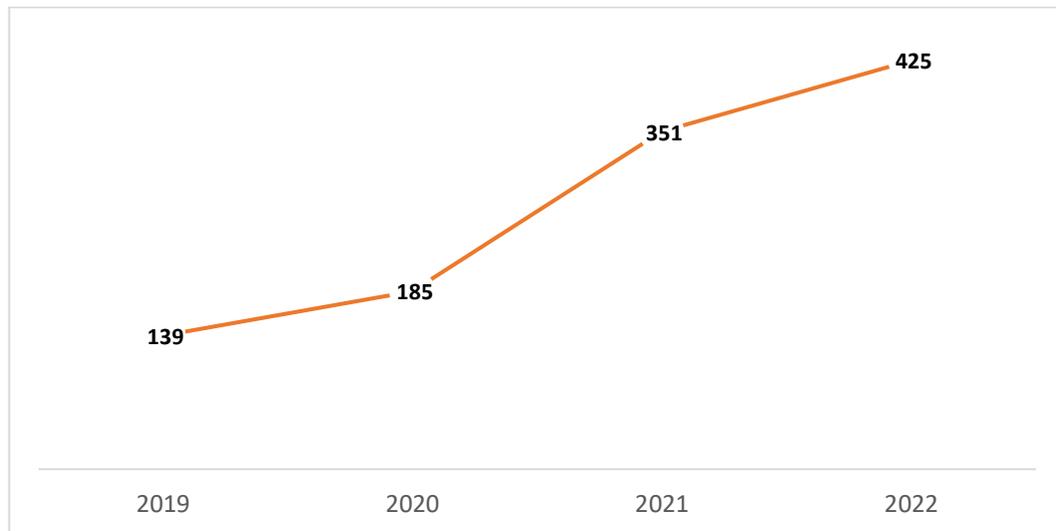
Gambar 2.103
Pinjaman Investasi dari Bank Umum dan BPR Berdasarkan Jenis Mata Uang (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022



Sumber : Bank Indonesia (2022) (diolah)

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. LKPM yang rutin dilaporkan oleh pelaku usaha, pemerintah bisa mendapatkan data yang valid untuk merumuskan kebijakan yang efektif guna memperbaiki iklim investasi dan kemudahan berusaha. Peningkatan pelaporan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 meningkat secara Fluktuatif mencapai 351 pelaku usaha yang melaporkan. Peningkatan tersebut dampak dari kemudahan dalam menyampaikan laporan secara online. Secara detail dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 2.104
Perusahaan yang Menyampaikan LKPM
Tahun 2019-2022



Sumber : DPMPTSP (2022)

2.4.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan generasi produktif yang harus dipersiapkan dalam menghadapi era global yang semakin pesat berkembang. Disini peran Pemerintah sangat kuat dalam mempersiapkan generasi muda yang tangguh dan mampu menjadi *Agent of Change* serta dituntut dapat memberikan dampak yang positif di lingkungannya. Di Kabupaten Sumedang sendiri terdapat 96 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang dibina oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sumedang. KNPI sendiri berfungsi sebagai wadah perjuangan pemuda dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, selain itu juga sebagai forum komunikasi dan penyalur aspirasi OKP dalam meningkatkan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan social. Berikut adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.46
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)
di Kabupaten Sumedang Tahun 2022

No	Nama OKP
1	Angkatan Muda Demokrat Indonesia
2	Angkatan Muda Kabah Kabupaten Sumedang
3	Angkatan Muda Partai Golkar Kabupaten Sumedang

No	Nama OKP
4	Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Kabupaten Sumedang
5	Banteng Muda Indonesia Kabupaten Sumedang
6	Barisan Muda Kosgoro 1957 Kabupaten Sumedang
7	BKPRMI Kabupaten Sumedang
8	Baladika Karya Kabupaten Sumedang
9	BM PAN Kabupaten Sumedang
10	Bamusi Kabupaten Sumedang
11	Brigade Hizbullah
12	Brigez Indonesia Kabupaten Sumedang
13	Fatayat Nu Kabupaten Sumedang
14	FKPPK Kabupaten Sumedang
15	Fokusmaker Kabupaten Sumedang
16	GAMKI Kabupaten Sumedang
17	Garda Bangsa Kabupaten Sumedang
18	Gema Keadilan
19	Gema Kosgoro Kabupaten Sumedang
20	Gema Mkgr Kabupaten Sumedang
21	Gema Ormas Mkgr Kabupaten Sumedang
22	Gempa Bbc Kabupaten Sumedang
23	Generasi Muda Ams Kabupaten Sumedang
24	Generasi Muda Bbc
25	Generasi Muda Kosgoro Kabupaten Sumedang
26	Gerakan Pemuda Islam Kabupaten Sumedang
27	Gerakan Pemuda Ka'bah Kabupaten Sumedang
28	Gerakan Pemuda Perjuangan Kabupaten Sumedang
29	Gerakan Pemuda Sehat
30	Gerakan Siswa Nasionalis Indonesia
31	Gibas Resort Kabupaten Sumedang
32	GKPI Kabupaten Sumedang
33	GM FKPPI Kabupaten Sumedang

No	Nama OKP
34	GMII Kabupaten Sumedang
35	GMKI Kabupaten Sumedang
36	GMNI Kabupaten Sumedang
37	GMPI Kabupaten Sumedang
38	GP Anshor Kabupaten Sumedang
39	GPM Gibas Kabupaten Sumedang
40	Hima Kosgoro '57 Kabupaten Sumedang
41	Himpunan Wanita Karya
42	Hipmi Kabupaten Sumedang
43	Hmi Kabupaten Sumedang
44	Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia Kabupaten Sumedang
45	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sumedang
46	Ikatan Pemuda Karya Kabupaten Sumedang
47	Ikatan Remaja Muhammadiyah Kabupaten Sumedang
48	Ima AMS Kabupaten Sumedang
49	Ikatan Pelajar Muhamadiyah
50	IPNU Kabupaten Sumedang
51	IPPNU Kabupaten Sumedang
52	IPPWI Kabupaten Sumedang
53	IPTI Kabupaten Sumedang
54	Ismakes Kabupaten Sumedang
55	Keluarga Besar Putra Putri Polri Kabupaten Sumedang
56	KIM-PG
57	KMNU Kabupaten Sumedang
58	Kohati Kabupaten Sumedang
59	Koti Mahatidana Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang
60	Mapancas Kabupaten Sumedang
61	Nasyiatul Aisyah Kabupaten Sumedang
62	Pemuda Bulan Bintang Kabupaten Sumedang
63	Pemuda Demokrat Kabupaten Sumedang

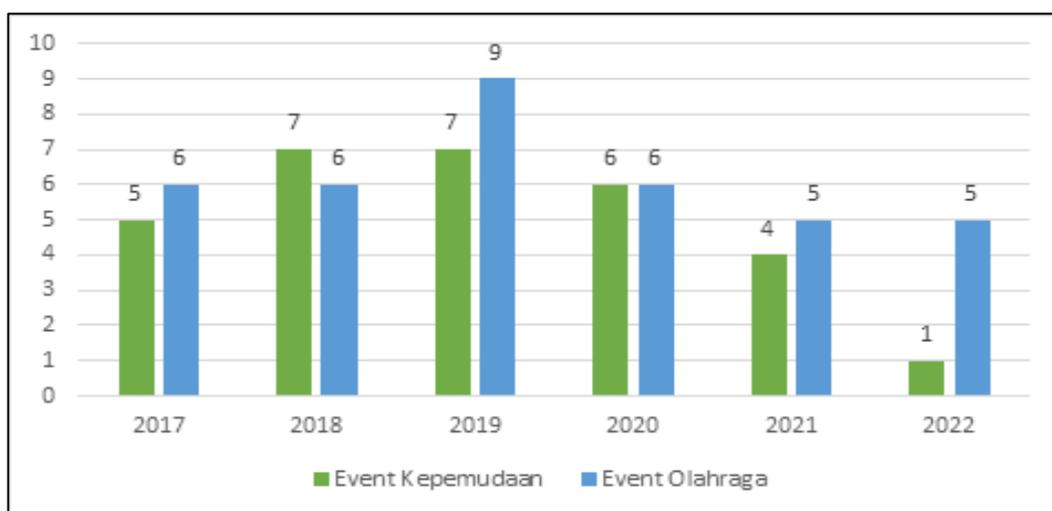
No	Nama OKP
64	Pemuda Justisia Kabupaten Sumedang
65	Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumedang
66	Pemuda Muslimin Kabupaten Sumedang
67	Pemuda Panca Marga Kabupaten Sumedang
68	Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang
69	Pemuda Peduli Bangsa Kabupaten Sumedang
70	Pemuda Persis Kabupaten Sumedang
71	Pemuda Pui Kabupaten Sumedang
72	Pemudi Persis Kabupaten Sumedang
73	Pitaloka Siliwangi Kabupaten Sumedang
74	PMII Kabupaten Sumedang
75	PMKRI Kabupaten Sumedang
76	Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Sumedang
77	Refdem Kabupaten Sumedang
78	Sapma Pemuda Pancasila Kabupaten Sumedang
79	Srikandi Demokrasi Kabupaten Sumedang
80	Senkom Polri
81	Srikandi Pancasila Kabupaten Sumedang
82	Taruna Merah Putih Kabupaten Sumedang
83	Wanita Swadiri Kabupaten Sumedang
84	Wira Karya Indonesia Kabupaten Sumedang
85	Tunas Indonesia Raya
86	Satria Gerindra
87	Perempuan Indonesia Raya
88	Gema Nasdem
89	Gerakan Mahasiswa Kebangkitan Bangsa (Gemasaba)
90	Perempuan Bangsa
91	Barak Bangsa
92	Damas
93	Generasi Muda Demokrat

No	Nama OKP
94	Barisan Massa Demokrat
95	Gatara
96	Wanita Persatuan Pembangunan

Sumber : KNPI Kabupaten Sumedang, 2022

Agar dapat terarah secara positif dalam mengembangkan potensi diri tentunya harus didukung oleh penyelenggaraan event kepemudaan dan olahraga. Namun kondisi saat ini pada Tahun 2022 hanya ada 1 (satu) *event* kepemudaan dan 5 (lima) *event* olahraga, kondisi tersebut dinilai masih belum optimal dalam pengembangan dan menyalurkan potensi serta bakat. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan baik berupa anggaran maupun kebijakan lainnya dalam penyelenggaraan *event-event* tersebut. Selanjutnya untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.105
Event Kepemudaan dan Event Olahraga
Tahun 2019-2022

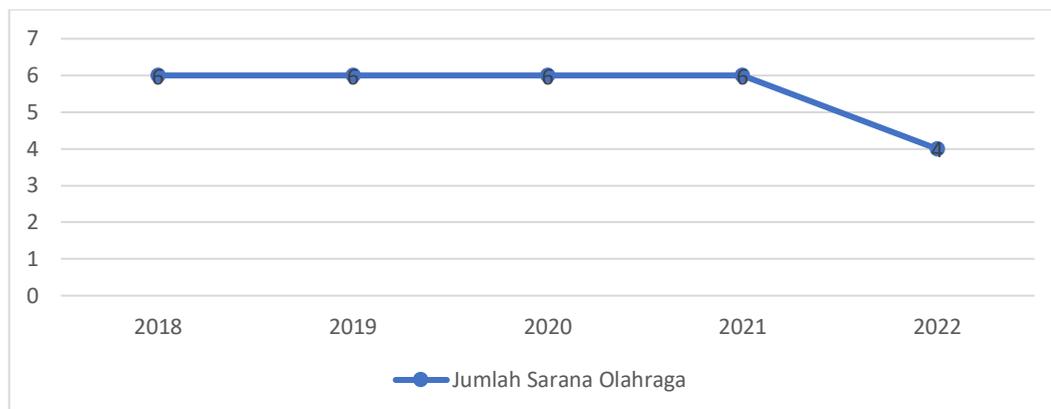


Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Selain pelaksanaan event olahraga tentunya harus didukung sarana olahraga yang memadai. Sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 belum ada penambahan sarana olahraga yang dikelola Pemerintah Daerah. Walaupun sampai saat ini Pemerintah Daerah berusaha melakukan peningkatan fasilitas olahraga namun dari

jumlah yang ada belum optimal dalam mendukung pengembangan potensi-potensi yang ada. Jumlah sarana olahraga dapat dilihat pada Gambar 2.106 berikut.

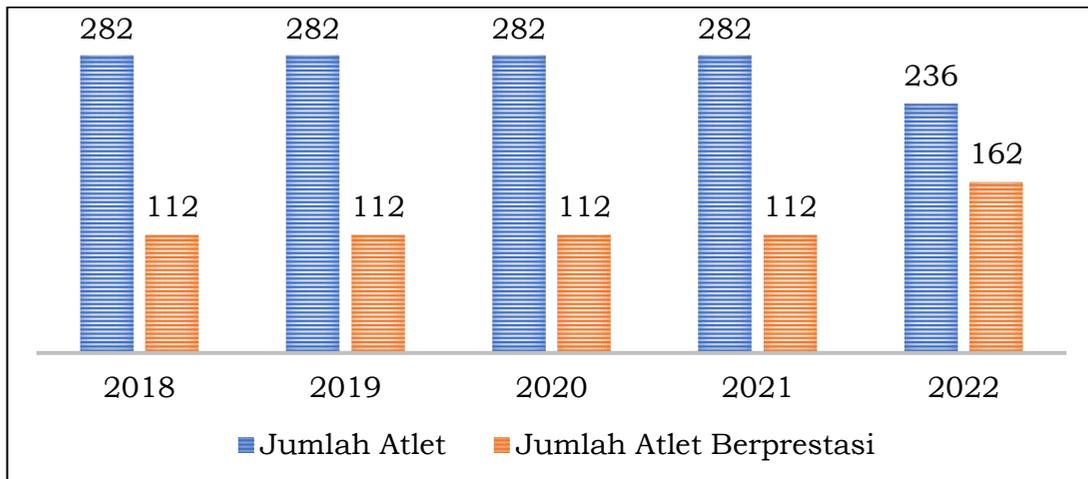
Gambar 2.106
Jumlah Sarana Olahraga Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Dengan kondisi sarana olahraga yang masih belum optimal tentunya berpengaruh terhadap capaian prestasi para atlet di Kabupaten Sumedang. Pada Tahun 2022, KONI Kabupaten Sumedang melakukan pembinaan terhadap 236 orang yang tersebar pada 43 cabang olah raga. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 282 atlet yang dibina. Penurunan ini dikarenakan ketatnya seleksi yang dilaksanakan oleh KONI Sumedang dalam menjaring atlet yang akan diperlombakan di berbagai kejuaraan. Namun demikian, meskipun jumlah atlet yang dibina menurun namun jumlah atlet yang berprestasi atau menyumbangkan medali dalam kejuaraan mengalami peningkatan menjadi 162 atlet dari sebelumnya hanya 112 orang. Jumlah Atlet dan Atlet Berprestasi di Kabupaten Sumedang disajikan pada Gambar 2.107 berikut.

Gambar 2.107
Jumlah Atlet dan Atlet Berprestasi
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022

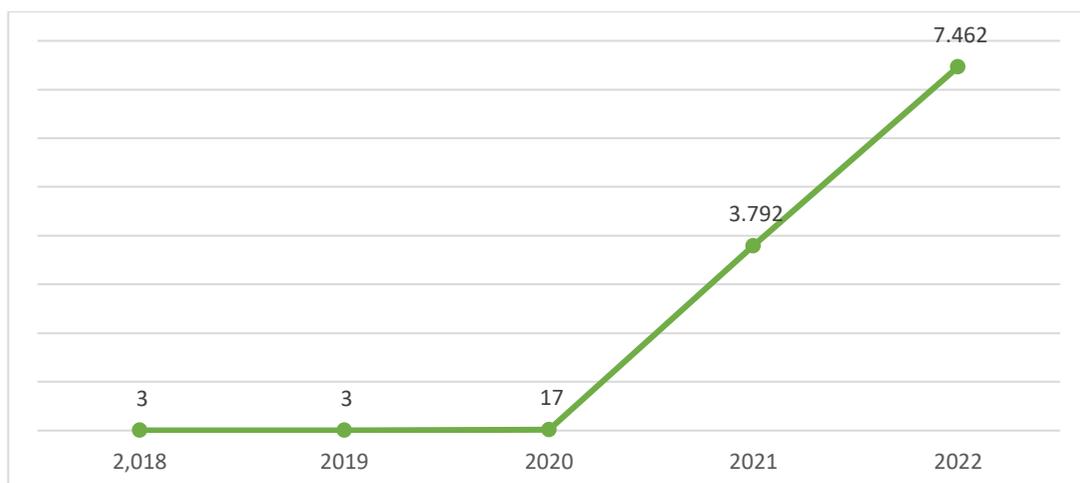


Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.2.14. Urusan Statistik

Ketersediaan data pada tahun 2018- 2022 dihitung berdasarkan dokumen data yang dihasilkan dan ditampilkan pada opendata.sumedangkab.go.id. Berikut ketersediaan data ditampilkan pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 2.108
Ketersediaan Data Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.2.15. Urusan Persandian

Urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan atau melindungi informasi. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Modernisasi pemerintahan akan sangat

bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgeting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Jenis layanan publik yang diselenggarakan di Kabupaten Sumedang terbagi dalam layanan infrastruktur seperti server, jaringan dan NOC, serta aplikasi sistem informasi seperti *e-office* ASN, *e-office* Desa dan sistem kepegawaian.

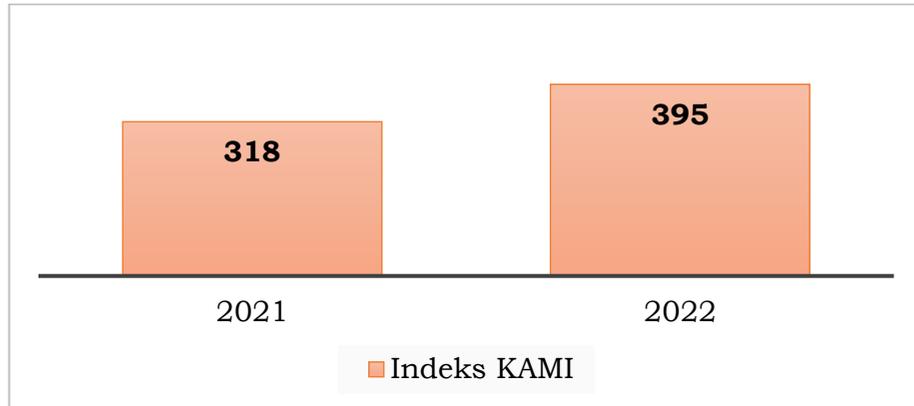
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disruptif pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan mitigasi keamanan baru agar proses bisnis pemerintahan dapat terus berjalan dengan baik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah. Indeks KAMI bukan ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Dalam pengukurannya terdapat beberapa indikator yang diukur antara lain :

- a. Kategori Sistem Elektronik yang digunakan;
- b. Tata Kelola Keamanan Informasi;
- c. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi;
- d. Kerangka Kerja Keamanan Informasi;
- e. Pengelolaan Aset Informasi;
- f. Teknologi dan Keamanan Informasi;
- g. Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (*Cloud Service*) dan Perlindungan Data Pribadi.

Pengukuran Indeks KAMI di Kabupaten Sumedang dimulai pada tahun 2021, dan berikut adalah hasil Assesment Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022.

Gambar 2.109
Hasil Assesment Indeks KAMI Pemerintah
Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2022



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.2.16. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan menurut para ahli dapat diartikan sebagai hal kompleks yang mencakup beberapa hal di dalamnya seperti kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat serta kemampuan yang dapat diperoleh manusia sebagai bagian dari kelompok masyarakat tersebut. Kebudayaan dapat dikenali melalui cirinya seperti memiliki sifat yang dinamis serta selektif. Berikut adalah data pembangunan bidang seni dan budaya Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

Tabel 2.47
Data Seni dan Budaya Tahun 2018-2022

No	Variabel Seni dan Budaya	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Objek Cagar Budaya	21	21	21	32	39
2	Pelaku Seni Budaya Dibina	650	225	150	650	1141
3	Pelaku Seni Budaya	779	985	1021	1314	1500
4	Promosi Event Kebudayaan	6	4	4	4	32
5	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kebudayaan	4	6	6	6	13

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

a. Objek Cagar Budaya

Cagar budaya diartikan sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Jumlah objek cagar budaya di Kabupaten Sumedang mengalami penambahan sejak tahun 2021, dari 21 jenis objek cagar budaya menjadi 32 jenis objek cagar budaya. Dan pada Tahun 2022 jumlah objek cagar budaya bertambah 7 (tujuh) jenis objek sehingga jumlahnya menjadi 39 jenis objek cagar budaya yang terdiri dari situs, struktur, benda dan bangunan. Penambahan jumlah objek cagar budaya ini dikarenakan adanya penetapan situs dan/atau bangunan dan/atau struktur yang semula diduga sebagai objek cagar budaya menjadi objek cagar budaya.

b. Seni Budaya

Jenis seni budaya meliputi seni rupa, seni musik, seni tari, seni drama/teater dan seni kriya. Seni memiliki 2 (dua) fungsi yaitu : 1) sebagai fungsi praktis yang artinya fungsi karya seni yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam segi fungsional/benda pakai, serta 2) sebagai fungsi estetis yaitu karya seni yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dari segi hiasan. Jenis seni budaya yang dibina oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang meliputi seni tari, seni musik, seni tradisional/seni pertunjukan dan seni kemasan. Beberapa jenis seni budaya yang terdapat di Kabupaten Sumedang seperti Seni pertunjukan Tarawangsa dan Kuda renggong serta Seni Tari Jayengrana saat ini sedang dalam proses penetapan Warisan Budaya Indonesia.

Adapun jumlah pelaku seni budaya di Kabupaten Sumedang yang tercatat sampai dengan Tahun 2022 sekitar 1.500 orang, namun yang baru dibina baru 1.141 orang. Pembinaan pelaku seni dilakukan melalui pembinaan beberapa sanggar seni, sehingga diperkirakan masih terdapat pelaku seni yang terdaftar akan tetapi tidak tergabung dalam sanggar ataupun sanggar tidak/belum aktif.

c. Event Kebudayaan

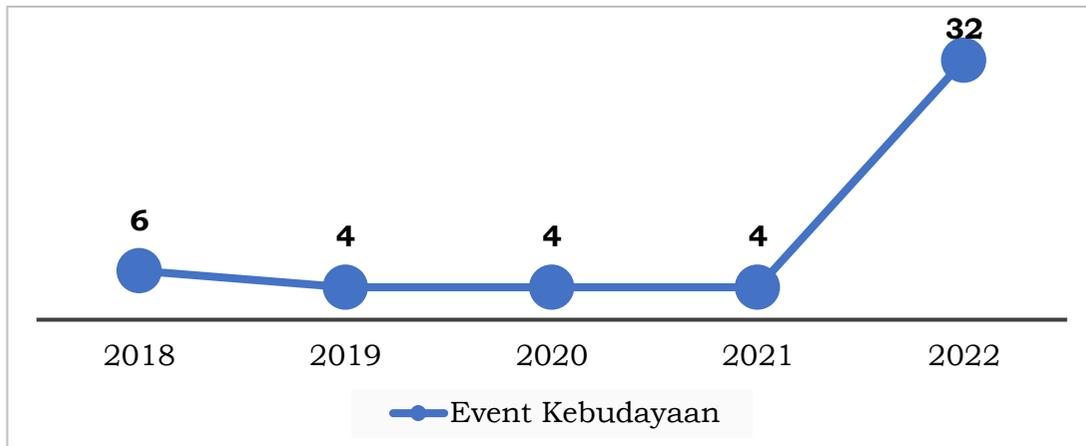
Penyelenggaraan event kebudayaan merupakan salah satu cara untuk mempromosikan, memperkenalkan serta melestarikan kebudayaan kasumedangan. Tahun 2021 pelaksanaan event kebudayaan hanya 4 (empat) kali dalam setahun dikarenakan adanya pandemi maka penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak orang ditiadakan. Akan tetapi pada tahun 2022, event kebudayaan sampai diselenggarakan 32 event, dan merupakan penyelenggaraan event terbanyak selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dilakukan dalam upaya melestarikan serta memperkenalkan kebudayaan Sumedang kepada generasi muda yang mulai tergerus arus modernisasi.

d. Sarana dan Prasarana pendukung Kebudayaan

Sarana dan prasarana pendukung kebudayaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan pada tahun 2022 jumlah sarana kebudayaan telah berjumlah 13 unit, yang meliputi Gedung kesenian, kendaraan, alat kesenian berupa gamelan, metal detector serta GPS.

Dalam upaya melestarikan kebudayaan serta menjaga nilai-nilai luhur budaya Pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya ialah melalui promosi dan mengenalkan budaya ke luar daerah baik nasional maupun internasional. Untuk melaksanakan hal tersebut diadakan event-event kebudayaan sebagai wadah promosi, menjaga dan melestarikan budaya serta kearifan lokal. Kegiatan event kebudayaan pada tahun 2022 hanya melaksanakan 32 kali dalam 1 (satu) tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.110 dibawah ini.

Gambar 2.110
Promosi Event Kebudayaan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2022)

Jumlah event yang terjadi pada Tahun 2022 merupakan jumlah penyelenggaraan terbanyak selama 5 (lima) tahun terakhir. Dicabutnya larangan penyelenggaraan acara yang melibatkan banyak orang mengakibatkan mulai meningkatnya penyelenggaraan event-event kebudayaan.

2.4.2.17. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting bagi semua lapisan masyarakat. Secara harfiah perpustakaan dapat diartikan sebagai suatu tempat yang berisi buku atau bahan lainnya yang diorganisasikan dan dipelihara untuk keperluan membaca atau dengan cara khusus memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui berbagai cara interaksi pengetahuan. Terdapat beberapa jenis perpustakaan yang ada di Indonesia antara lain : 1) Perpustakaan Sekolah; 2) Perpustakaan Perguruan Tinggi; 3) Perpustakaan Umum/Masyarakat; 4) Perpustakaan Khusus; dan 5) Perpustakaan Daerah. Dalam upaya meningkatkan minat literasi masyarakatnya, Kabupaten Sumedang membangun beberapa sarana literasi tidak hanya perpustakaan namun juga terdapat perpustakaan keliling dan pojok baca. Berikut adalah Jenis dan Jumlah Perpustakaan yang terdapat di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.48
Jenis Perpustakaan Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2022

Jenis Perpustakaan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Perpustakaan Sekolah	881	881	881	881	954
Perpustakaan Perguruan Tinggi	10	10	10	10	9
Perpustakaan Khusus	85	85	85	85	55
Perpustakaan Desa	50	50	50	50	50
Perpustakaan Masyarakat	50	50	50	52	59
Pojok Baca	n/a	5	6	7	14
Perpustakaan Keliling	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2023)

Pada Tahun 2022 dilakukan pendataan perpustakaan berbasis wilayah oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang, sehingga dapat terlihat kenaikan data yang cukup besar pada jumlah perpustakaan sekolah dari yang semula berjumlah 881 perpustakaan menjadi 954 perpustakaan atau mengalami kenaikan sebanyak 73 perpustakaan dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan perpustakaan perguruan tinggi yang setelah dilakukan pendataan per wilayah mengalami pengurangan jumlah.

Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga baik pemerintah maupun swasta dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam hal pengelolaan maupun pelayanan. Perpustakaan khusus di Kabupaten Sumedang meliputi perpustakaan SKPD, Kecamatan dan BUMD/BUMN. Tahun 2022 jumlah perpustakaan khusus menurun jumlahnya menjadi 55

perpustakaan dari jumlah 85 perpustakaan pada tahun 2021. Ini terjadi karena pendataan dilakukan pada SKPD/Kecamatan/BUMN/BUMD yang telah mengaplikasikan perpustakaan digital. Dengan demikian penggunaan perpustakaan digital belum dipergunakan secara maksimal.

Lain halnya dengan perpustakaan masyarakat dan pojok baca yang terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 perpustakaan masyarakat berjumlah 59 perpustakaan atau bertambah 7 perpustakaan dari tahun sebelumnya, begitu dengan pojok baca dari semula berjumlah 7 tempat pada tahun 2021 menjadi 14 tempat pada tahun 2022. Selain itu juga Dinas Arsip dan Perpustakaan Sumedang pun menyediakan pelayanan perpustakaan keliling. Sampai dengan Tahun 2022 armada/kendaraan perpustakaan keliling yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang masih berjumlah 3 (tiga) mobil. Pembangunan perpustakaan dan pojok baca serta pelayanan perpustakaan keliling ini ditujukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat Sumedang sehingga berdampak pada peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat.

Kenaikan jumlah perpustakaan serta berakhirnya masa pandemi di Kabupaten Sumedang berdampak langsung pada jumlah kunjungan perpustakaan. Tahun 2021 merupakan capaian terendah kunjungan perpustakaan selama 5 (lima) tahun dengan jumlah pengunjung 3.778 orang. Jumlah kunjungan meningkat pada tahun 2022 menjadi 10.407 pengunjung. Peningkatan ini terjadi karena mulai dibuka kembali perpustakaan untuk dikunjungi. Berikut adalah data kunjungan perpustakaan di Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.111
Jumlah Kunjungan Perpustakaan
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2023)

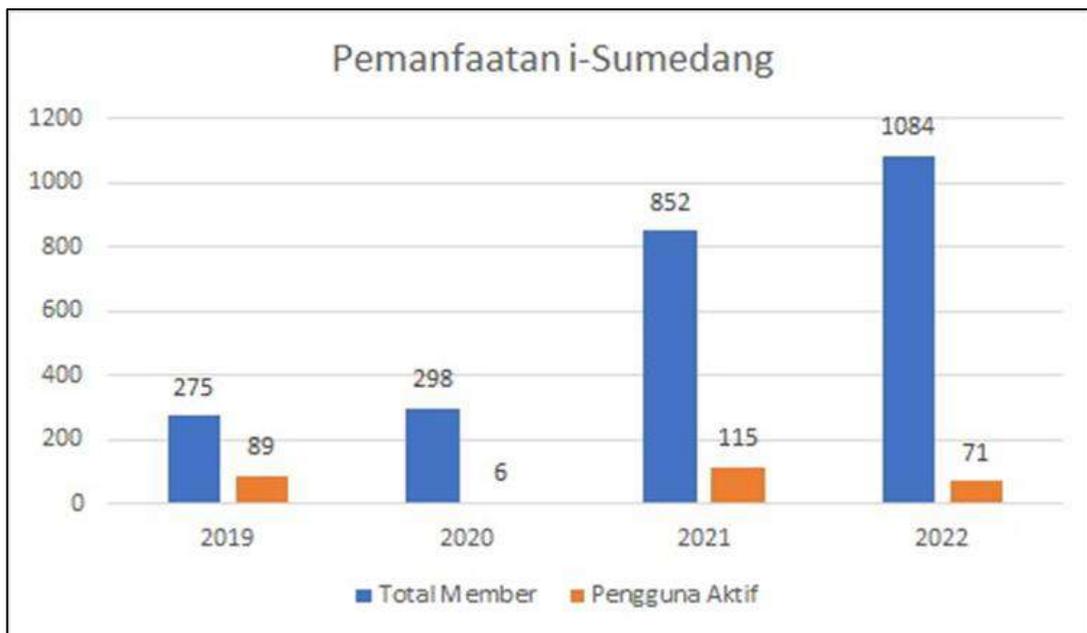
Memperhatikan jumlah perpustakaan dan pojok baca yang terdapat di Kabupaten Sumedang, tidak sebanding dengan jumlah pengelola Perpustakaan binaan Dinas dan Pustakawan yang tersedia. Tercatat jumlah pengelola perpustakaan binaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2022 berjumlah 86 orang sedangkan pustakawan berjumlah 3 (tiga) orang. Namun demikian keterbatasan jumlah pengelola perpustakaan serta pustakawan tidak menurunkan optimalisasi pelayanan perpustakaan.

Selain itu juga, sejak tahun 2019 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang telah mengembangkan ruang baca digital atau *Digital i-Sumedang* dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan perpustakaan. Tercatat jumlah pemanfaatan *Digital i-Sumedang* terus mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2022 jumlah pengguna *Digital i-Sumedang* mencapai 1084 anggota. Berbanding terbalik dengan jumlah pengguna aktifnya. Pengguna aktif ruang baca digital sangat fluktuatif. Pada tahun 2021, kenaikan signifikan terlihat dari total pengguna *Digital i-Sumedang* yang mencapai 115 pengguna aktif.

Dampak pandemi *covid-19* yang menyebabkan ditutupnya akses perpustakaan-perpustakaan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang mengakibatkan akses *Digital i-Sumedang* mengalami peningkatan. Akan tetapi pada Tahun 2022 pemanfaatan *Digital i-Sumedang* mengalami penurunan jumlah pengguna aktif sebanyak 34 orang,

diasumsikan penurunan tersebut dikarenakan mulai dibukanya layanan perpustakaan serta kurangnya pembaharuan jenis buku digital yang disajikan pada layanan *Digital i-Sumedang*. Berikut adalah data pemanfaatan *Digital i-Sumedang* Tahun 2019-2022.

Gambar 2.112
Pemanfaatan Bacaan *Digital i-Sumedang*
Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.2.18. Urusan Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi massa, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan fungsi dan kegunaannya arsip dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Arsip Statis dan Arsip Dinamis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Jenis arsip dinamis terbagi menjadi arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah

menurun, sedangkan arsip aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. Berikut adalah data jumlah arsip aktif, arsip inaktif dan arsip statis di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.49
Jumlah Arsip Aktif, Arsip Inaktif dan Arsip Statis
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022

Jenis Arsip	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Arsip Aktif	n/a	n/a	1.452	671	425.938
Arsip Inaktif	2.588	3000	6.464	15.656	16.350
Arsip Statis	n/a	n/a	n/a	1.018	1.074

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2023)

Berdasarkan Tabel 2.48 dapat dilihat bahwa semua jenis arsip mengalami penambahan jumlah. Data kenaikan yang signifikan terlihat pada jumlah arsip aktif yang mencapai 425.938 arsip. Pelaksanaan pembinaan serta penataan arsip yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Sumedang mengakibatkan terdata dan tertatanya arsip baik itu arsip aktif, arsip inaktif serta arsip pasif yang ada di Kabupaten Sumedang. Berikut adalah kondisi tempat penyimpanan arsip di setiap Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.50
Tempat Penyimpanan Arsip di Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Jenis Tempat Penyimpanan Arsip	Kondisi
1	Sekretariat Daerah	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip,	Cukup Memadai

No	Perangkat Daerah	Jenis Tempat Penyimpanan Arsip	Kondisi
	dan Pengembangan Daerah	Filling Kabinet, Sekat, Folder	
3	Badan Pendapatan Daerah	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Kurang Memadai
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Kurang Memadai
5	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Cukup Memadai
6	Inspektorat	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Cukup Memadai
7	Sekretariat DPRD	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
9	Dinas Perhubungan	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Tidak Memadai
10	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
11	Dinas Sosial	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
12	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Sangat Memadai
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai

No	Perangkat Daerah	Jenis Tempat Penyimpanan Arsip	Kondisi
14	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Tidak Memadai
15	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
16	Dinas Pendidikan	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Cukup Memadai
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Tidak Memadai
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Tidak Memadai
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Tidak Memadai
21	DPPKB & P3A	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Tidak Memadai
22	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Kurang Memadai
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Kurang Memadai
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Kurang Memadai

No	Perangkat Daerah	Jenis Tempat Penyimpanan Arsip	Kondisi
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Tidak Memadai
26	Dinas Kesehatan	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
27	Rumah Sakit Umum	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Tidak Memadai
28	Satuan Polisi Pamong Praja	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Cukup Memadai
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
30	Kecamatan Jatinangor	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Cukup Memadai
31	Kecamatan Cimanggung	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Tidak Memadai
32	Kecamatan Tanjungsari	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
33	Kecamatan Sukasari	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Tidak Memadai
34	Kecamatan Pamulihan	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Tidak Memadai
35	Kecamatan Sumedang Selatan	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
36	Kecamatan Sumedang Utara	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip,	Memadai

No	Perangkat Daerah	Jenis Tempat Penyimpanan Arsip	Kondisi
		Filling Kabinet, Sekat, Folder	
37	Kecamatan Ganeas	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
38	Kecamatan Cisarua	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Tidak Memadai
39	Kecamatan Cimalaka	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
40	Kecamatan Rancakalong	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
41	Kecamatan Situraja	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
42	Kecamatan Darmaraja	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Kurang Memadai
43	Kecamatan Wado	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Kurang Memadai
44	Kecamatan Cibugel	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Kurang Memadai
45	Kecamatan Jatinunggal	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
46	Kecamatan Jatigede	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
47	Kecamatan Paseh	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Kurang Memadai

No	Perangkat Daerah	Jenis Tempat Penyimpanan Arsip	Kondisi
48	Kecamatan Conggeang	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
49	Kecamatan Buahdua	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Cukup Memadai
50	Kecamatan Tanjungkerta	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
51	Kecamatan Tanjungmedar	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Kurang Memadai
52	Kecamatan Surian	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Cukup Memadai
53	Kecamatan Tomo	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Memadai
54	Kecamatan Ujungjaya	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Kurang Memadai
55	Kecamatan Cisitu	Records Centre, Rak Besi, Boks Arsip, Filling Kabinet, Sekat, Folder	Kurang Memadai

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (diolah) (2023)

Berdasarkan Tabel 2.49 dapat diketahui bahwa kondisi penyimpanan arsip di seluruh Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Sumedang masih banyak yang kurang memadai, sehingga diperlukan rekondisi tempat penyimpanan agar arsip yang telah diinventarisir dapat tertata dan terdokumentasikan dengan baik. Selain pendokumentasian, pemahaman akan pentingnya arsip sangat diperlukan. Tabel berikut adalah jumlah Sosialisasi Arsip terhadap

Perangkat Daerah dan BUMD yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Tabel 2.51
Sosialisasi Pemahaman Arsip terhadap Perangkat Daerah dan BUMD Tahun 2022

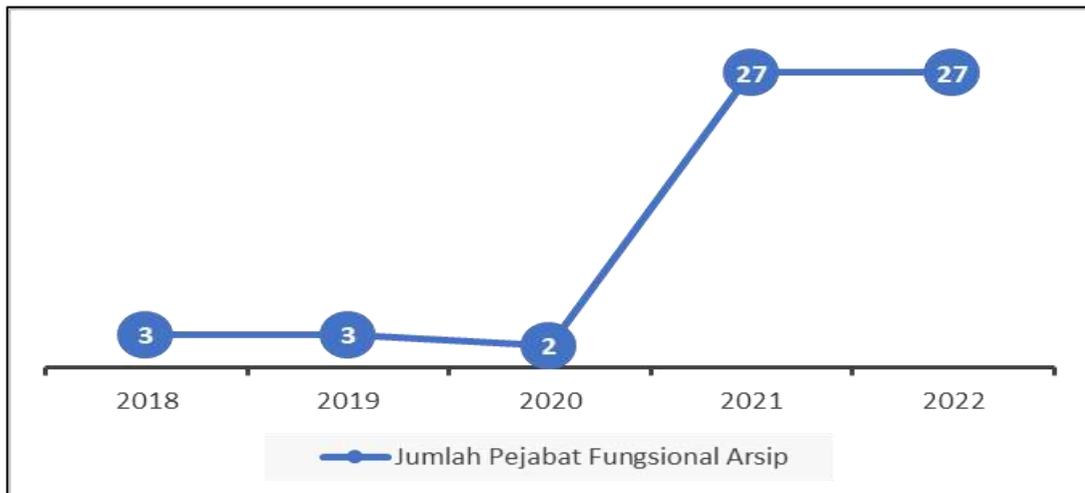
NO	LEMBAGA	TAHUN	
		2021	2022
1	Dinas/Badan	357	349
2	Kecamatan	312	312
3	BUMD	-	2
Jumlah		669	663

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (diolah) (2023)

Sosialisasi pemahaman arsip pada Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan sebanyak 669 kali, dan dilakukan setiap bulan secara online. Sedangkan sosialisasi pada BUMD baru dilakukan pada Tahun 2022. Namun demikian pada tahun ini juga sosialisasi mengalami penurunan menjadi 663 kali, karena penyelenggaraan sosialisasi tidak dilakukan secara rutin setiap bulan.

Keberhasilan dalam pengelolaan arsip di Kabupaten Sumedang sangat ditunjang oleh sumber daya manusia yang memadai yang dalam hal ini memiliki keahlian dalam pengelolaan arsip. Adapun sumber daya manusia dalam pengelolaan arsip atau dikenal dengan pejabat fungsional arsip (arsiparis) sampai dengan tahun 2022 berjumlah 27 orang. Penambahan jumlah arsiparis di Kabupaten Sumedang tersebut dikarenakan banyaknya ASN yang lulus dalam uji kompetensi sebagai arsiparis. Jumlah pejabat fungsional arsip di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 disajikan dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 2.113
Jumlah Pejabat Fungsional Arsip di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2022



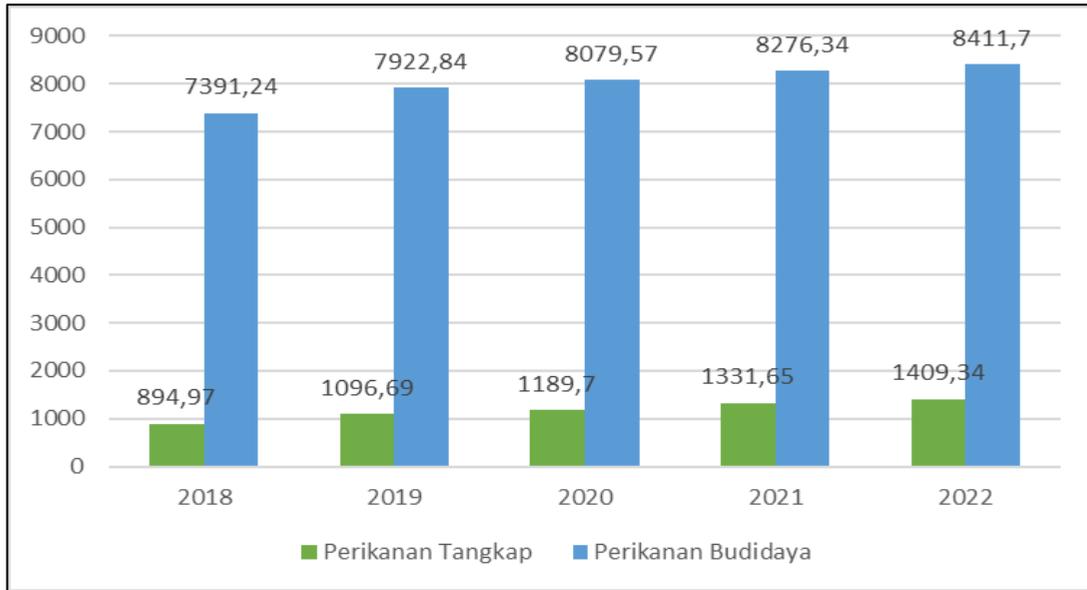
Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.3. Fokus Urusan Pilihan

2.4.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan di Kabupaten Sumedang merupakan salah satu komoditi unggulan yang menunjang perekonomian masyarakat. Dengan adanya Waduk Jatigede dan wilayah Kabupaten Sumedang banyak dilalui aliran sungai sangat mendorong mata pencaharian masyarakat melalui produksi Perikanan Tangkap. Selain itu kondisi geografis Kabupaten Sumedang sangat mendukung pula untuk Produksi Perikanan Budidaya. Pada Tahun 2022 Produksi Perikanan Tangkap mencapai sebesar 1.409,34 ton dan Produksi Perikanan Budidaya sebanyak 8.411,70 Ton. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.114
Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
Kabupaten Sumedang (Ton)
Tahun 2018 - 2022



Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023)

Memperhatikan Gambar diatas dapat dirinci jenis ikan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Sumedang sebagaimana Tabel 2.51 dan Tabel 2.52 di bawah ini.

Tabel 2.52
Jenis Ikan pada Produksi Perikanan Tangkap
Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Ikan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Patin	140,09	186,43	228,09	54,36	198,52
2	Nila	376,60	351,14	283,74	593,27	622,65
3	Mas	275,95	234,50	276,00	386,69	189,36
4	Lalawak	32,87	40,28	19,27	50,16	49,18
5	Lele	22,38	98,94	58,79	34,81	59,69
6	Berod	0,90	12,46	7,78	-	7,29
7	Hampal	18,02	5,90	49,95	121,08	74,16
8	Tawes	10,25	131,61	107,56	36,00	109,82
9	Nilem	12,10	29,87	32,98	37,17	37,05

No	Jenis Ikan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Udang Galah	-	0,10	0,32	0,50	0,50
11	Udang Tawar	0,11	0,17	0,14	1,19	0,82
12	Gabus	0,01	0,10	0,04	0,45	-
13	Bandeng	-	0,32	0,50	0,82	0,82
14	Ikan Lainnya (Sepat, Toman, Siput, Gabus, Beunteur, Ikan Sapu, Ikan Seribu)	5,70	4,87	24,54	15,17	5,30

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023)

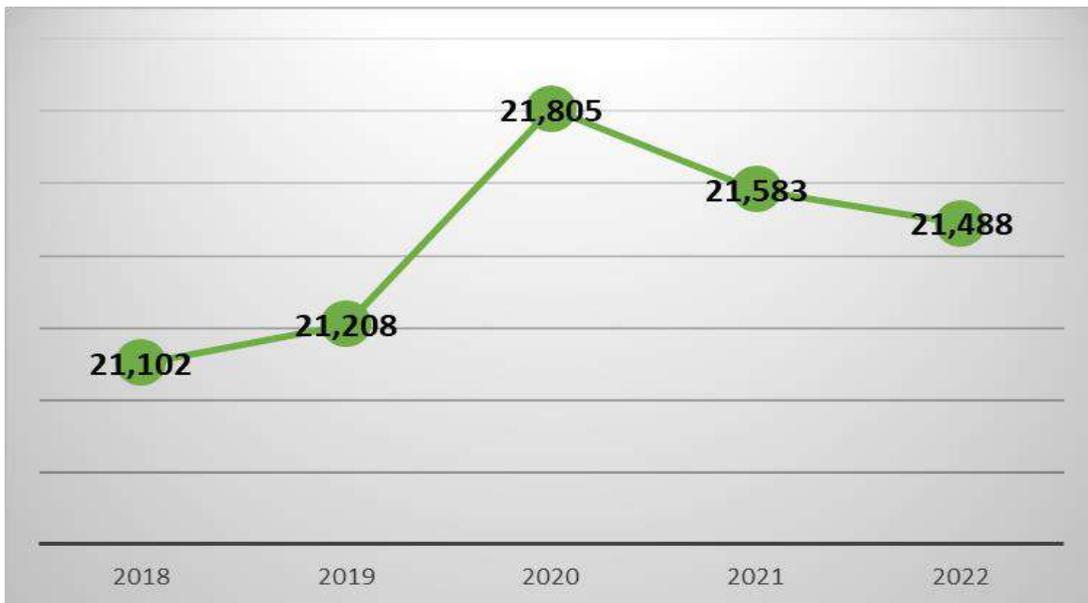
Tabel 2.53
Jenis Ikan pada Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Ikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nila	3.291,76	3.657,43	3.681,71	3.916,24	3.931,36
2	Mas	3.762,95	3.973,50	4.095,82	4.139,68	3.693,36
3	Lele	150,60	150,85	160,15	164,80	158,39
4	Gurame	0,44	0,98	1,28	2,27	2,26
5	Lainnya (Mujaer, Nilem, Tawes, Tarbakan, Sepat, Patin)	185,49	140,07	140,62	53,36	51,8

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023)

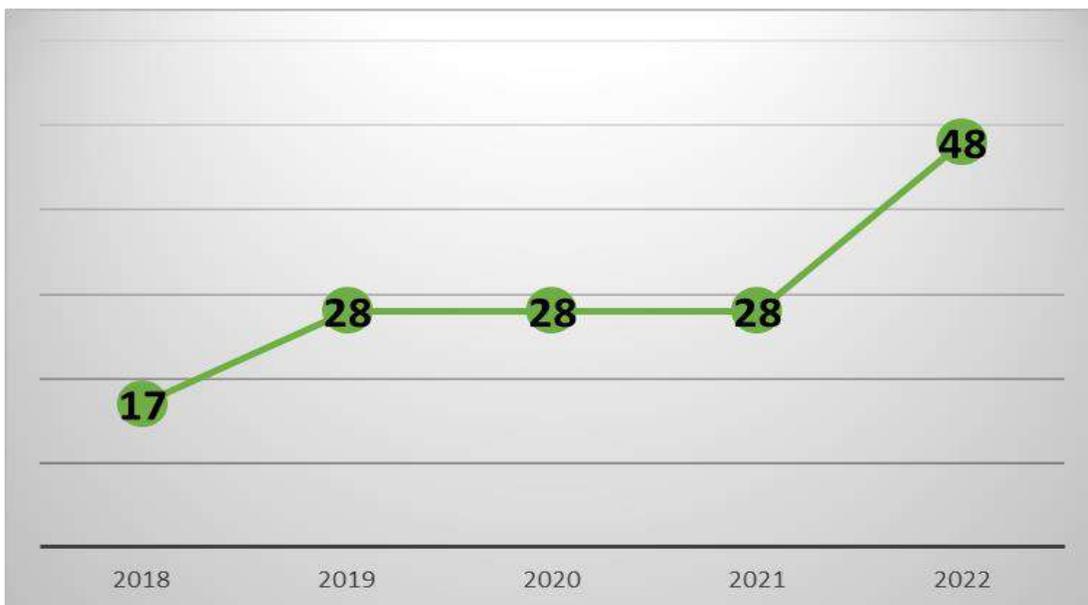
Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan dari mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 terdiri dari 28 Kelompok. Untuk pengolahan hasil perikanan rata-rata dilakukan oleh perorangan. Sehingga perlu peran pemerintah daerah dalam memberikan dukungan baik secara regulasi maupun bantuan permodalan untuk memancing terbentuknya kelompok pengolahan hasil perikanan. Hal tersebut dapat memberikan dampak secara ekonomi dalam pengolahan hasil perikanan sebagai nilai tambah penghasilan. Dari Gambar di bawah dapat dilihat dari jumlah Rumah Tangga Perikanan dan jumlah kelompok pengolahan hasil perikanan.

Gambar 2.115
Jumlah Rumah Tangga Perikanan
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022



Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023)

Gambar 2.116
Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022

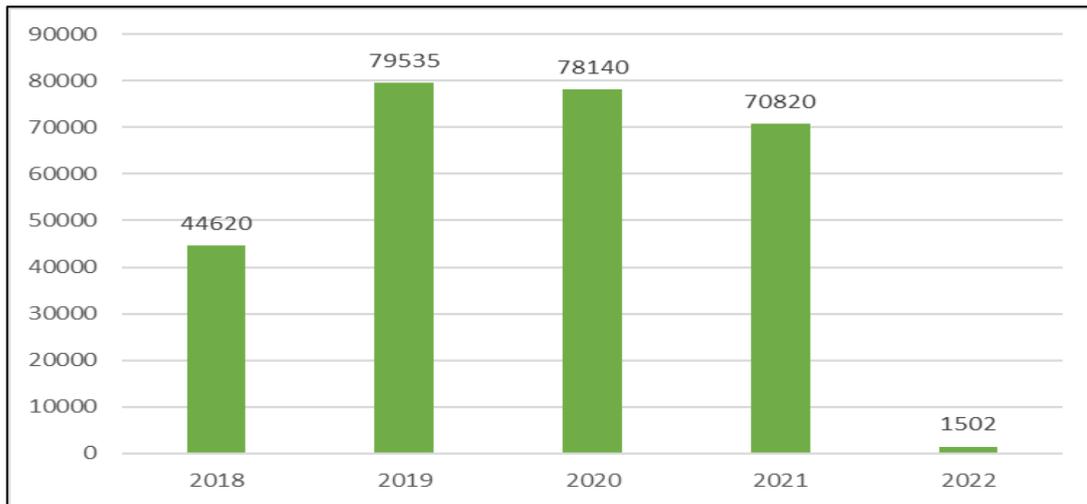


Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023)

Dari Gambar 2.116 menunjukkan kesinambungan terhadap kebutuhan bahan baku Pengolahan hasil perikanan, jumlah bahan baku ikan tertinggi pada Tahun 2019 sebanyak 79.535 ton, trendnya terus menurun sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1.502 ton. Hal ini berakibat dari produksi hasil pengolahan perikanan yang

terdampak dari pandemi covid. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

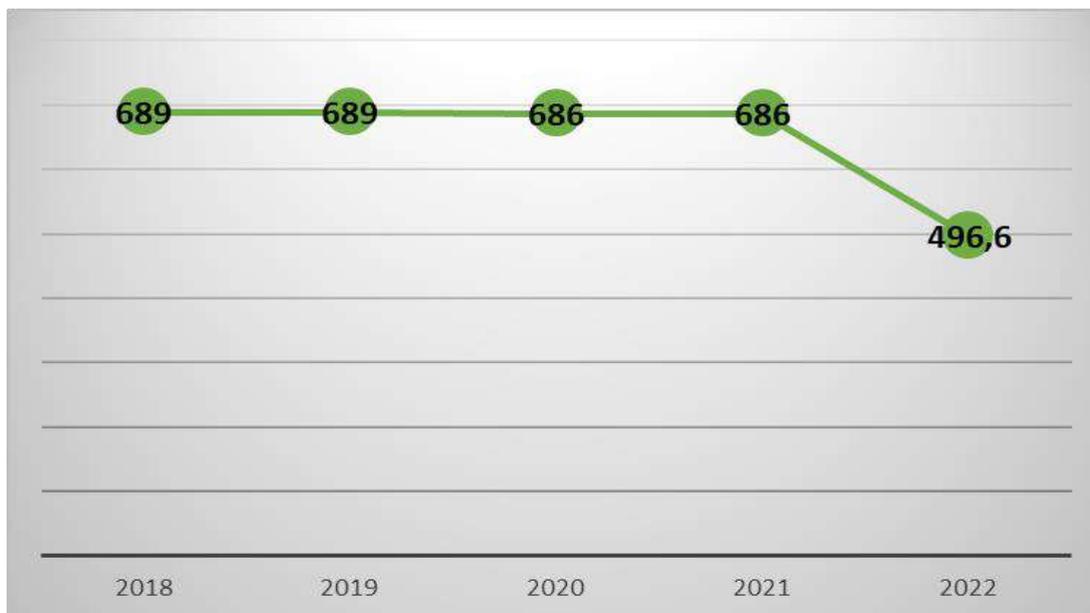
Gambar 2.117
Jumlah Kebutuhan Baku Ikan Untuk Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2018 - 2022



Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023)

Luas kolam air tenang jumlahnya semakin menurun, hal tersebut diakibatkan adanya alih fungsi lahan terutama yang menjadi lokasi pembangunan oleh Pemerintah Pusat, terutama kawasan yang tergenang oleh proyek Waduk Jatigede, Sadawarna, Cipanas, Rengrang dan pembangunan Jalan Tol cisumdawu. Dari seluas 689 ha pada Tahun 2019 turun menjadi 686 Ha mulai Tahun 2020 sampai Tahun 2021. Selanjutnya untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 2.118
Luas Kolam Air Tenang (Ha)
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022



Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023)

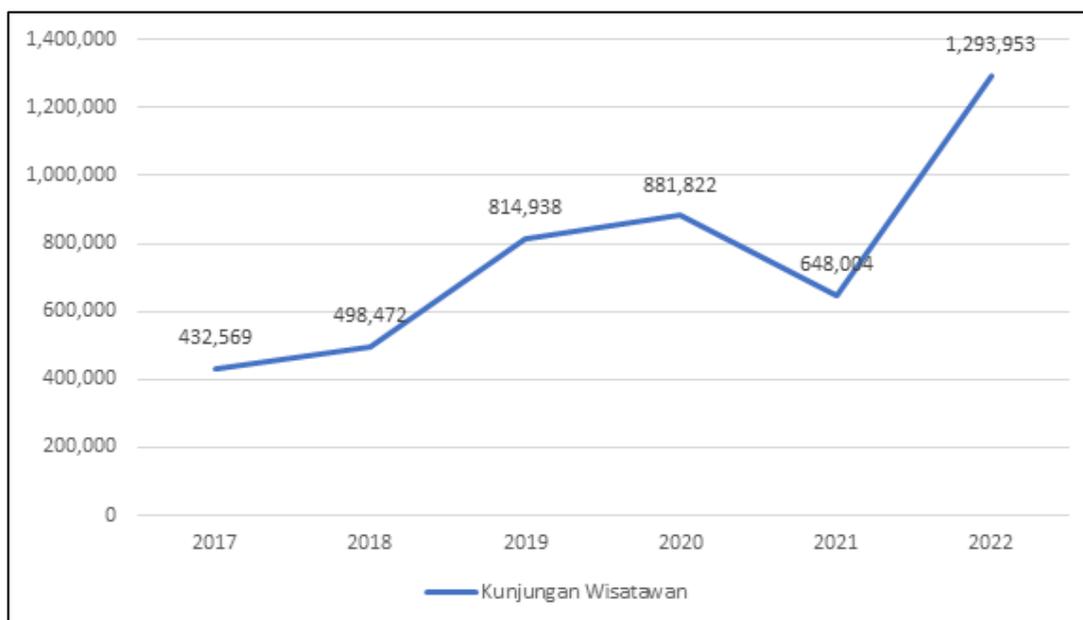
2.4.3.2. Urusan Pariwisata

1) Jumlah Kunjungan Wisatawan

Tujuan pariwisata adalah meningkatkan pendapatan devisa serta pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya. Karena itulah sektor pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang berfungsi sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang didominasi oleh objek wisata alam dan memiliki daya tarik yang hampir mirip antara satu destinasi dengan destinasi yang lainnya.

Objek wisata di Kabupaten Sumedang terus dilakukan pengembangan baik objek wisata alam, Cagar Budaya dan Objek Wisata religi. Sampai Tahun 2021 terdapat 71 Objek dengan Jumlah Kunjungan wisatawan sebanyak 640.004 orang adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 881.882 orang pengunjung ke berbagai objek wisata walaupun pada masa pandemi *Covid 19* tidak mengurangi kunjungan wisata.

Gambar 2.119
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)
Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Dari Gambar di atas dapat dilihat jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2022 mencapai 1.293.953 orang. Memperhatikan jumlah kunjungan tersebut terbagi ke kunjungan beberapa obyek wisata, terdiri dari Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Ziarah dan Wisata Buatan. Jumlah kunjungan lebih terperinci per objeknya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54
Jenis Wisata dan Jumlah Wisatawan Tahun 2022

No	Jenis Wisata	Jumlah Wisatawan
Wisata Alam		
1	Cipanas - Cileungsing	76.889
2	Cipacet Sukasari	3.863
3	Cipanteneun	0
4	Gunung Geulis	0
5	Gunung Lingga	2.304
6	Mata Air Cigirang	42.173
7	Cigumentong	757

No	Jenis Wisata	Jumlah Wisatawan
8	Cikandung	22.815
9	Cipadayungan	8.065
10	Ciputrawangi Narimbang	2.816
11	Curug Pasir Wangi	0
12	Curug Cihonje Cisitu	4.011
13	Curug Gorobog	3.584
14	Curug Sabuk	0
15	Curug Sindulang	2.773
16	Gunung Buleud	318
17	Gunung Gadung	520
18	Sirah Cipelang	3.821
19	Situ Sari	0
20	Gunung Golempang	0
21	Pangjujungan	23.844
22	Pesona Cakra	0
23	Arung Jeram Pangcalikan	0
24	Taman Batu Ciagung	0
25	Gunung Kerenceng	5.132
26	Basisir Muda Demang	29
27	Kawasan Cisoka	63.506
28	Cigirang	42.173
29	Leuweung Tiis/Trumanggala	1.766
30	Bukit Pareugreug	1.082
Wisata Budaya		
1	Keraton Sumedang Larang/Museum Prabu Geusan Ulun	10.636
2	Sumur Kajayaan	0

No	Jenis Wisata	Jumlah Wisatawan
3	Panenjoan	84.396
4	Rumah Tinggal Cut Nyak Dhien	2.681
5	Tahura Gunung Kunci	19.804
6	Tahura Gunung Palasari	6.623
Wisata Ziarah		
1	Dayeuh Luhur	19.375
2	Marongge	8.257
3	Sagara Munjul	1.981
4	Cipeueut Astana Gede	79
5	Eyang Sanca Nagara (Mbah Mogana)	0
6	Gunung Puyuh/Makam Cut Nyak Dhien	21.750
7	Pasarean Gede	0
8	Dewi Candrawulan	6.752
Wisata Buatan		
1	BGG Golf & Resort	29.996
2	Taman Cecenet	10.273
3	Kawasan Wisata Batudua	221
4	Agrowisata Sawah Menak	0
5	Bukit Galau Sindulang	2.677
6	Kawasan Buricak Burinong	35.006
7	Wisata Cari Pacar	1.313
8	Cibingbin	1968
9	Wisata Air Dewa Siwa	19.375
10	Dewilipa	3.583
11	Wisata Gendeng	1.901
12	Kampung Ciherang	29.678

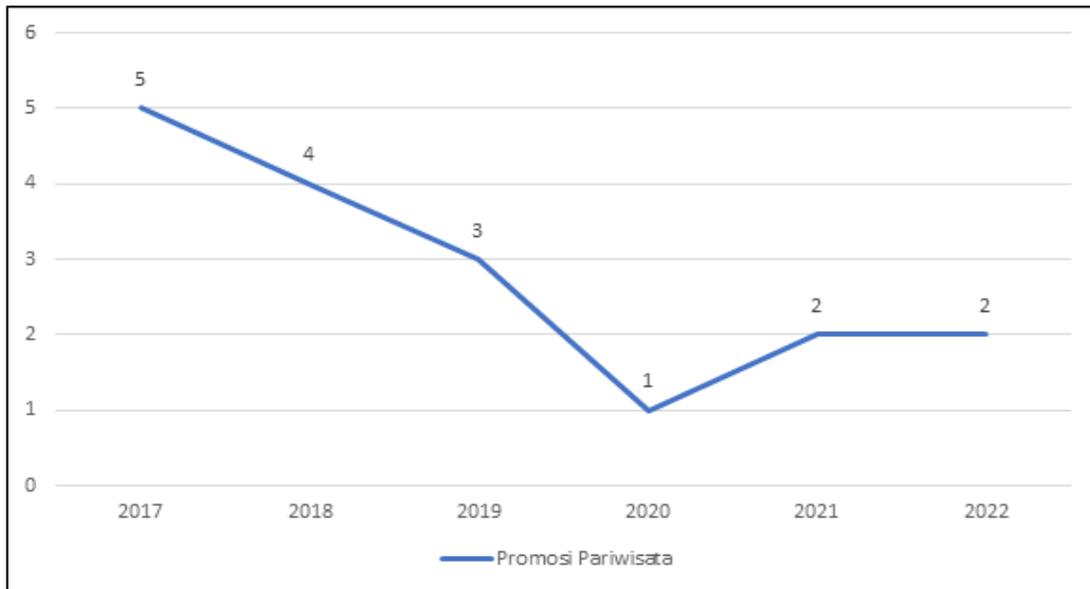
No	Jenis Wisata	Jumlah Wisatawan
13	Kampung Karuhun	23.891
14	Nabawadataala	6.751
15	Nangorak Camp/Kawasan Agroteknobis Sumedang	1.094
16	Pesona Jatigede	44
17	Puncak Permata	116.493
18	Samalengoh	2.229
19	Sapatapaan	0
20	Taman Empang Sindulang	1.039
21	Pesona Taman Puspa	6.598
22	Janspark	23.984
23	Panineungan Hegar	5.190
24	Tanjung Duriat	130.344
25	Tegaljarong	53.731
26	Puncak Damar	0
27	Waterboom Gajah Depa	29.069
28	Balong Geulis	16.223
29	Kampung Jarami	9.708
30	Kolam Renang Wijaya Kusuma	4.798
31	Desa Wisata Pasirnanjung Cimanggung	243.326
32	95 Farm	39.777
33	Karedok	1.814
34	Teras Kahuripan	2.470

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Selain peningkatan dan pengembangan objek wisata, tentunya perlu didukung dengan adanya agenda promosi Pariwisata, guna lebih memperkenalkan objek wisata dan budaya. Pada Tahun 2022 hanya

melaksanakan 2 (dua) event, seperti dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

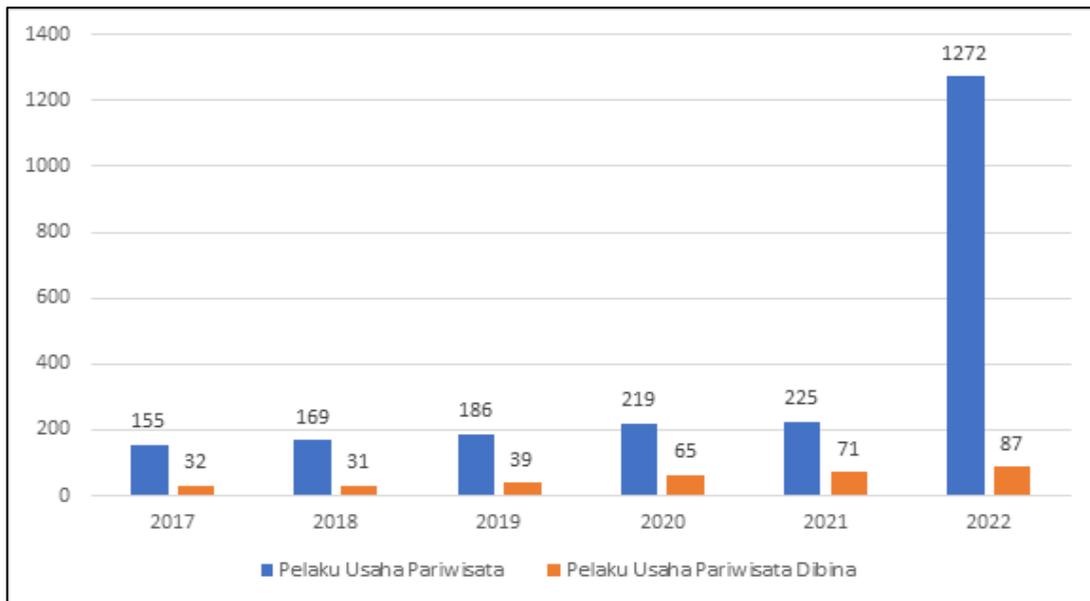
Gambar 2.120
Jumlah Promosi Pariwisata (Event)
Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Dari jumlah pelaku pariwisata yang ada belum sebanding dengan jumlah pelaku usaha pariwisata yang bina. Pada Tahun 2022 dari jumlah 1.272 pelaku usaha pariwisata hanya 87 pelaku yang mendapat pembinaan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

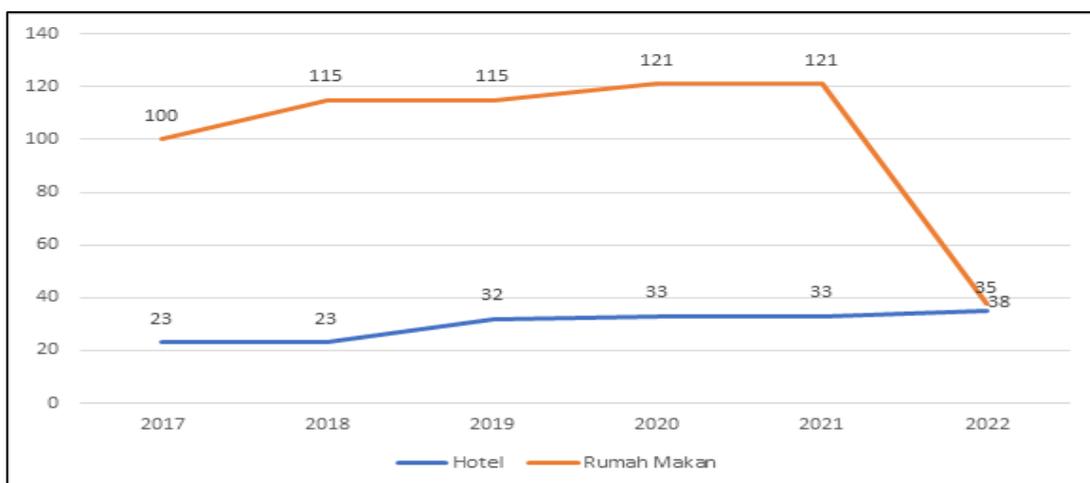
Gambar 2.121
Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata dan Jumlah Pelaku Usaha
Pariwisata Dibina (Orang)
Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

Hingga saat ini daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang belum seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas utama penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, biro wisata dan toko cenderamata. Tahun 2022 tercatat di Kabupaten Sumedang baru mempunyai 35 hotel saja dan klasifikasi hotel masih belum merupakan hotel berbintang. Untuk restoran dan cafetaria masing-masing berjumlah 38 restoran.

Gambar 2.122
Jumlah Hotel dan Rumah Makan
Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022



Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

2) Ekonomi Kreatif

Dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang berkembang sangat pesat sehingga sektor ekonomi kreatif dapat dikembangkan secara digital dan mudah diakses secara nasional maupun internasional, pada Tahun 2018 teridentifikasi 99 usaha dari 6 (enam) jenis usaha ekonomi kreatif berkembang menjadi 481 usaha dari 17 jenis usaha ekonomi kreatif.

Tabel 2.55
Jumlah Pengusaha pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif
Kabupaten Sumedang (Orang) Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kuliner	-	15	30	41	43
2	Fashion	-	8	15	24	28
3	Kriya	41	61	97	124	124
4	Arsitektur	-	2	2	2	3
5	Desain Produk	9	9	17	17	17
6	Desain Interior	5	5	5	5	6
7	Musik	-	25	87	112	119
8	Seni Rupa	-	20	29	29	34
9	Periklanan	-	-	-	2	4
10	Penerbitan	-	-	1	1	3
11	Film Animasi dan Video	4	10	10	10	14
12	Fotografi	13	25	33	39	42
13	Desain Komunikasi Visual	-	4	4	4	6
14	Aplikasi	-	-	2	2	4
15	Pengembang Permainan	-	1	1	1	3
16	TV dan Radio	-	1	1	1	33
17	Seni Pertunjukan	27	45	58	67	74
Jumlah		99	231	392	481	557

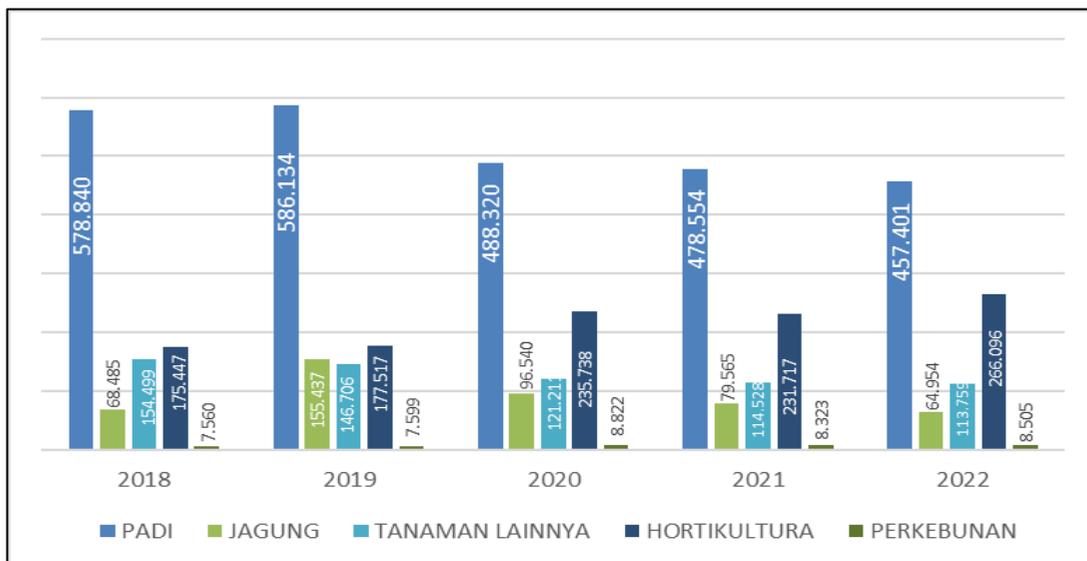
Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.3.3. Urusan Pertanian

Pertanian merupakan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian terdiri dari 5 (lima) sub sektor yaitu tanaman pangan, kehutanan, peternakan, perkebunan dan perikanan. Adapun peran sektor pertanian dalam perkembangan ekonomi salah satunya sebagai sektor penghasil bahan pangan, sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi lain, dan sebagai salah satu penghasil sumber devisa. Sebagian besar hasil pertanian adalah bahan makanan dan seluruh hasil perkebunan adalah diekspor.

Berdasarkan sub sektornya, berikut adalah jumlah produksi pertanian sub sektor tanaman pangan dan perkebunan yang terdapat di Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.123
Jumlah Komoditas Pertanian
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang (2023)

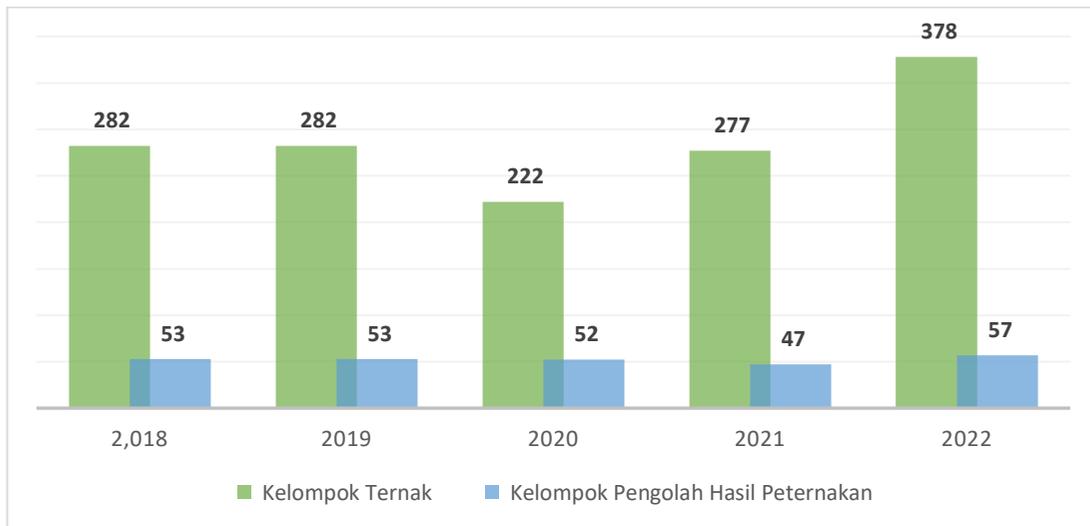
Dari Gambar 2.123 dapat diketahui bahwa sebagian besar hasil pertanian merupakan bahan makanan. Secara keseluruhan jumlah komoditas pertanian hampir mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya penurunan penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang baik lahan pertanian untuk persawahan maupun lahan pertanian bukan untuk persawahan. Jumlah produksi tanaman pangan padi masih mendominasi secara keseluruhan hasil produksi

pertanian di Kabupaten Sumedang, walaupun pada tahun 2022 produksi tanaman padi mengalami penurunan sebanyak 21.153 ton dari tahun sebelumnya menjadi 457.401 ton. Hasil produksi terendah tahun 2022 juga dari komoditas jagung yang hanya menghasilkan 64954 ton hal ini disebabkan adanya ketergantungan para petani jagung terhadap bantuan benih dari pemerintah karena tinggi harga benih jagung di pasaran. Begitu pula dengan hasil produksi untuk tanaman pangan lainnya yang mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 113.759 ton. Penurunan produktivitas sebagai dampak dari tingginya curah hujan serta minat petani dalam usaha budidaya pertanian terutama ubi kayu yang harga jualnya terus menurun.

Produksi Komoditas Pertanian pada tahun 2018-2022 meskipun mengalami penurunan, namun di komoditas Perkebunan masih stabil pada 8.505 ton pada tahun 2022 dan komoditas Hortikultura yang mengalami peningkatan produksi setiap Tahun bahkan pada Tahun 2022 mencapai titik produksi tertinggi 266.096 ton. Berbagai upaya untuk meningkatkan minat petani pembudidaya perkebunan dan hortikultura diantara pendampingan dan bantuan sarana produksi serta gerakan memasifkan gerakan tanaman di pekarangan membuat komoditas ini produksinya terus meningkat.

Sub sektor lainnya dari pertanian adalah sub sektor peternakan. Sub sektor peternakan di Kabupaten Sumedang tersebar di 26 Kecamatan yang terbagi menjadi beberapa kelompok ternak ataupun perorangan serta kelompok/perorangan pengolahan produksi peternakan. Berikut adalah jumlah kelompok ternak dengan jenis ternak sapi potong, sapi perah, domba, ayam ras petelur, ayam buras, itik dan puyuh serta kelompok pengolahan produksi peternakan.

Gambar 2.124
Jumlah Kelompok Ternak
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023)

Berdasarkan data di atas terdapat penurunan jumlah kelompok ternak pada Tahun 2020 menjadi 222 kelompok, turun sebanyak 60 kelompok dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena banyaknya peternak ayam ras pedaging yang berhenti akibat dari tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan terutama dari sisi penyediaan pakan ternak. Namun kenaikan kembali terjadi pada Tahun 2021 sebanyak 55 kelompok menjadi 277 kelompok. Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi kenaikan lagi jumlah kelompok peternakan untuk berbagai komoditas (sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam ras petelur, itik, dan puyuh) menjadi sebanyak 378 kelompok. Kenaikan jumlah kelompok yang signifikan ini adanya animo masyarakat untuk beternak melalui kelompok serta adanya bantuan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Barat maupun APBN Kementerian Pertanian.

Adapun untuk kelompok pengolahan produksi peternakan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tertinggi terjadi pada Tahun 2021 sehingga jumlah kelompok menjadi 47 kelompok/perorangan dari 52 kelompok/perorangan pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan modal dan akses pemasaran hasil produksi sebagai salah satu dampak dari pandemi *Covid-19*. Namun pada tahun 2022, terjadi kenaikan kembali jumlah kelompok/perorangan untuk pengolahan peternakan menjadi **57** kelompok / perorangan.

Selain memperhatikan jumlah kelompok ternak dan pengolahan produksi ternak. Cakupan pengendalian kesehatan hewan ternak pun perlu mendapatkan perhatian. Beberapa jenis penyakit menular yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Sumedang, diantaranya:

- a. *Brucellosis*/Keluron merupakan penyakit yang menginfeksi ternak sapi, kambing, kerbau, dan domba;
- b. *Avian Influenza*/Flu Burung merupakan penyakit yang menginfeksi burung/unggas/ayam; dan
- c. PMK (Penyakit Kuku dan Mulut) merupakan penyakit yang menyerang semua hewan yang berkuku belah/genap, seperti sapi, kerbau, kambing dan domba.

Jumlah kasus infeksi/penyakit yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Sumedang disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.56
Jumlah Kasus Hewan Ternak yang Terinfeksi Penyakit Menular di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022

Jumlah Kasus Hewan Ternak Terinfeksi Penyakit Menular	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
	n/a	n/a	33	2	3.115

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2022)

Berdasarkan Tabel 2.55 menunjukkan bahwa ada lonjakan tertinggi kasus hewan ternak yang terinfeksi penyakit menular di Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 dengan jenis kasus PMK yang menyerang ternak sapi, kerbau, kambing dan domba yang mencapai 3.115 kasus. Kasus PMK yang terjadi pada tahun 2022 juga merupakan salah satu dari dampak wabah PKM nasional. Namun demikian dari jumlah kasus tersebut 98 persen hewan ternak yang terinfeksi PMK dapat disembuhkan melalui program vaksinasi, pengobatan dan penyemprotan disinfektan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah untuk menekan penularan PMK di Kabupaten Sumedang.

Dari sisi pemanfaatan limbah organik ternak, sejak Tahun 2018 telah dibentuk kelompok pengolah sampah organik dan biogas yang

berjumlah 23 kelompok, dan kelompok ini tidak mengalami penambahan sampai dengan Tahun 2022..

2.4.3.4. Urusan Kehutanan

Hutan Kabupaten merupakan salah satu dari ruang terbuka hijau yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang, salah satu fungsi hutan dalam kelompok vegetasi adalah untuk tujuan proteksi, rekreasi, estetika dan kegunaan fungsi lainnya bagi kepentingan masyarakat. Selain itu juga hutan merupakan bagian dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga dan memiliki peranan yang sangat penting sebagai daerah tangkapan dan resapan air hujan, menekan polusi udara dan penghasil O₂, serta sebagai tempat studi dan penelitian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kabupaten bahwa pada Pasal 8 ayat 3 dinyatakan bahwa persentase luas lahan Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari luas wilayah.

Hutan di wilayah Kabupaten Sumedang tersusun dari komponen hutan kota dan kelompok vegetasi lainnya, seperti taman, jalur hijau serta kebun dan pekarangan. Berikut adalah luas hutan berdasarkan fungsi dan status di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.57
Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status
di Kabupaten Sumedang Tahun 2022

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1	Hutan Produksi	27.145, 59
2	Hutan Lindung	9.401, 80
3	Taman Wisata Alam	1.074,84
4	Taman Buru	8.654, 01
5	Cagar Alam	133,64
6	Taman Hutan Raya	34,89
B. Berdasarkan Status Hutan		
1	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	31.121, 00

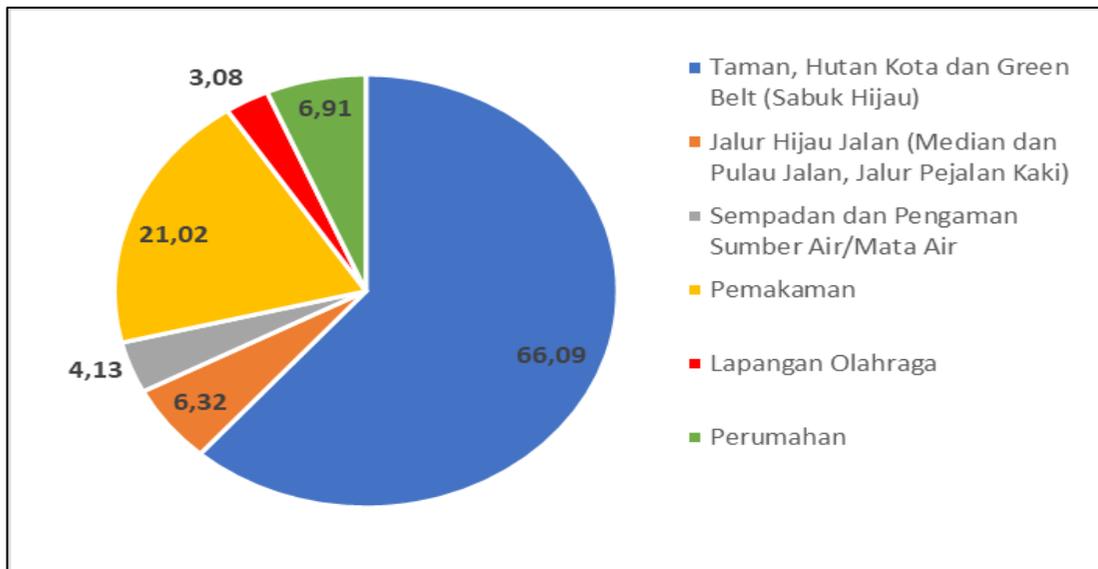
No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
2	Hutan Hak/Hutan Rakyat	55,249,32
3	Taman Hutan Raya	34,89
4	Taman Keanekaragaman Hayati	25,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2023)

Dalam perspektif tata ruang kota, untuk meminimalkan timbulnya fenomena perubahan iklim, maka keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Luas RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis minimal 30% dari total luas wilayah kota yang terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%.

Secara kondisi geografis wilayah perkotaan di Kabupaten Sumedang masih didominasi kawasan perkebunan dan pertanian yang dikelola masyarakat dan adanya alih fungsi lahan hijau akibat pembangunan Tol Cisumdawu yang melintasi Kabupaten Sumedang di kawasan perkotaan, tentunya mengurangi Luasan RTH di kawasan Perkotaan. Meskipun demikian, luas RTH di Kabupaten Sumedang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 Luas Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang terkelola oleh Pemerintah Daerah berupa taman, hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, daerah pengamanan sumber air baku, pemakaman, Lapangan olahraga serta perumahan mencapai 107,55 Ha atau bertambah 0,46 Ha dari tahun sebelumnya. Berikut adalah Ruang Terbuka Hijau yang Terkelola di Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.125
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Ha) Tahun 2022

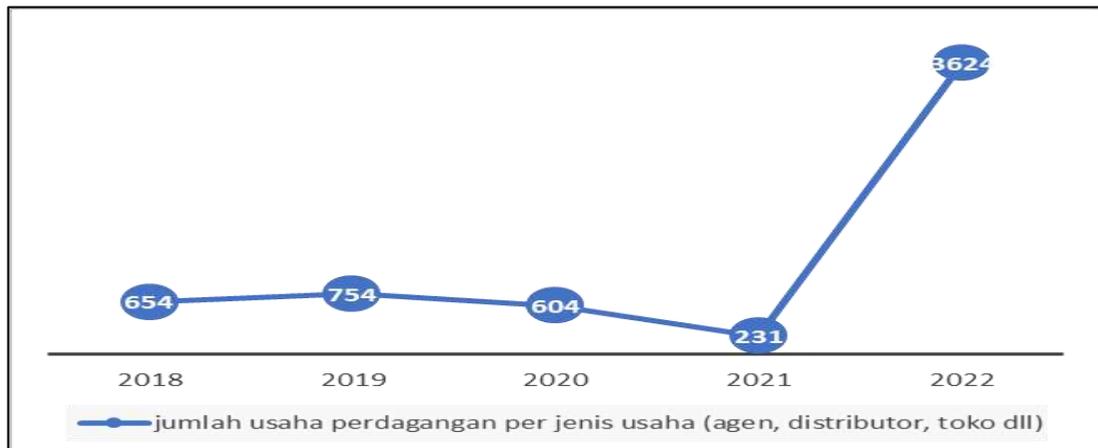


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2023)

2.4.3.5. Urusan Perdagangan

Perdagangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa. Percepatan sektor perdagangan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi serta memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Berikut adalah Jumlah Usaha Perdagangan di Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.126
Jumlah Usaha Perdagangan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2023)

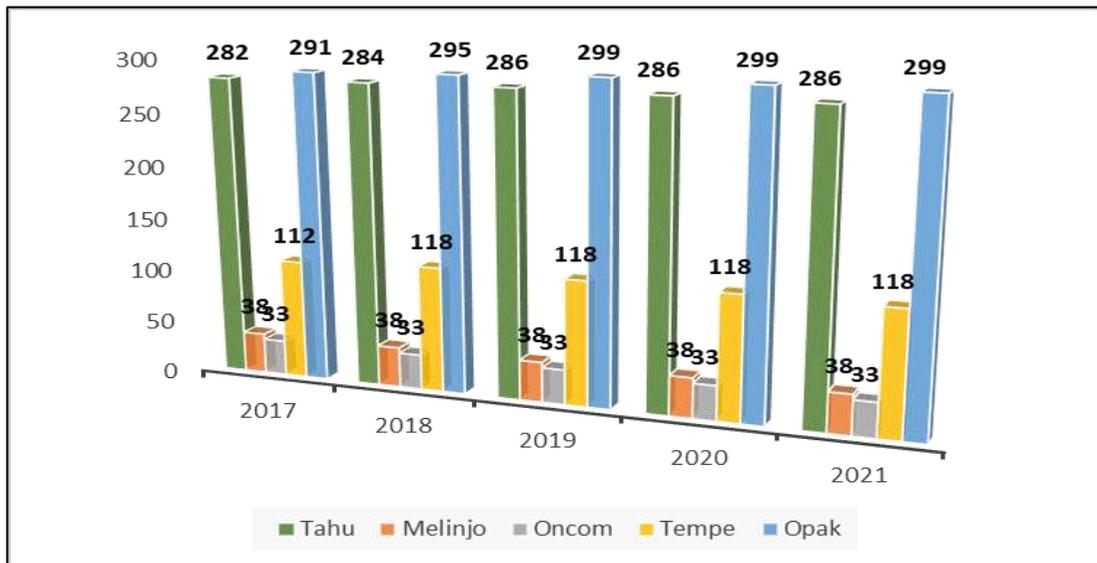
Berdasarkan Gambar 2.126 tergambar jelas bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terkait dengan jumlah usaha perdagangan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 yang mencapai 3624 jenis usaha. Hal ini sebagai dampak dari adanya kerjasama yang dilakukan oleh DiskopUMKMdagin dengan DMPTSP terkait dengan program perizinan yang mempermudah pengeluaran Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi masyarakat Sumedang.

2.4.3.6. Urusan Perindustrian

Industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, baik secara mekanis, kimiawi dengan mesin ataupun dengan tangan (BPS, 2021). Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor dengan kontribusi cukup besar dalam perekonomian. Salah satu jenis sektor industri pengolahan yang banyak dikembangkan adalah industri rumahan (mikro) dan industri kecil.

Di Kabupaten Sumedang jenis industri pengolahan terdiri jenis industri kecil tahu, melinjo, oncom, tempe dan opak. Berikut adalah Jenis Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022.

Gambar 2.127
Jenis Usaha Industri Pengolahan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2021



Sumber. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2023)

Berdasarkan Gambar diatas, jenis usaha yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Sumedang ialah IKM Opak sebanyak 299 IKM, yang diikuti dengan IKM Tahu sebanyak 286 IKM. Sedangkan IKM Oncom merupakan jenis IKM yang paling sedikit di Kabupaten Sumedang hanya 33 IKM. Dampak pandemi menjadi salah satu penyebab tidak meningkatnya jumlah jenis IKM di Kabupaten Sumedang.

Untuk menerapkan standar mutu suatu produk pangan dalam industri pengolahan dibutuhkan sertifikasi produk. Sertifikasi produk pangan meliputi Sertifikat PIRT, Sertifikasi Halal LPPOM MUI, dll. Adapun untuk standar mutu suatu produk atau jasa atas ide dan karya dalam pembuatan karya cipta dengan nilai ekonomis atau komersil yang tercakup di dalamnya seperti desain industri diperlukan Sertifikat HAKI. Jumlah usaha industri pengolahan yang sudah bersertifikat jumlah sangat fluktuatif. Pada Tahun 2022 jumlah usaha industri pengolahan yang sudah bersertifikat baik itu sertifikat HAKI, PIRT ataupun halal mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi dikarenakan adanya program PIRT dan sertifikat halal gratis melalui program “*Self Declair*” yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk sertifikasi halal dan Pemerintah Daerah untuk PIRT. Sedangkan sertifikat HAKI untuk

produk UMKM, Diskopumkmdagin mengeluarkan suatu rekomendasi sehingga para pengusaha UMKM mendapatkan pengurangan biaya. Dengan adanya kemudahan dalam perolehan sertifikasi produk menyebabkan meningkatnya jumlah usaha industri di Kabupaten Sumedang seperti yang tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.58
Jumlah Usaha Industri Pengolahan yang Sudah Tersertifikasi Tahun 2018 - 2022

Jenis Sertifikasi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PIRT	20 IKM	13 IKM	12 IKM	-	317 IKM
Halal	20 IKM	13 IKM	16 IKM	5 IKM	144 IKM
HAKI	-	-	8 IKM	-	36 IKM

Sumber. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2022)

Adapun pengaruh sektor industri terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.128
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022



Sumber. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang (2022)

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan terus mengalami kenaikan sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2019. Dan sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2021 para pelaku di sektor industri pengolahan tidak

melakukan penambahan jumlah tenaga kerja, sehingga jumlah tenaga kerja tetap sebanyak 1040 orang. diindikasikan hal ini sebagai dampak dari pandemi yang mengakibatkan menurunnya produksi dan permintaan produk industri pengolahan.

2.4.3.7. Urusan Transmigrasi

Transmigrasi merupakan suatu program yang dibuat oleh Pemerintah untuk pemerataan penduduk dari daerah-daerah yang padat ke daerah dengan penduduk yang jarang di dalam wilayah Indonesia. Program ini ditujukan untuk pemerataan dan kesatuan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan tujuan lainnya diharapkan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pelaksanaan transmigrasi saat ini dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta difasilitasi oleh pemerintah pusat ditujukan bagi kemanfaatan daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (*rowing*) dan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*, dimana pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerja sama dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Selama periode Tahun 2018-2022, Kabupaten Sumedang telah memberangkatkan transmigran sebanyak 25 KK, dengan jumlah pemberangkatan transmigran terbanyak terjadi pada Tahun 2021 sebanyak 14 KK yang disebar ke 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas Provinsi

Kalimantan Tengah dan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Sedangkan Tahun 2018, 2020 dan Tahun 2022 tidak ada penempatan transmigran dikarenakan Kabupaten Sumedang tidak mendapatkan kuota. Adapun rinciannya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.59
Penempatan Transmigran Asal Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2022

Uraian/ Indikator	2018	2019	2020	2021			2022
	Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Lokasi	Jumlah KK
Jumlah Peserta Transmigran Umum	Tidak Ada Penempatan Dikarenakan tidak ada kuota	6 KK	Tidak Ada Penempatan Dikarenakan tidak ada kuota	6 KK	17 Jiwa	Kec. Dadahup Kabupaten Kapuas Prov. Kalimantan Tengah	Tidak Ada Penempatan Dikarenakan tidak ada kuota
				8 KK	33 Jiwa	Kabupaten Simeulue Prov. Aceh	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang (2023)

2.5. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dilakukan oleh Badan Riset dan Invoasi Nasional (BRIN), bahwa Kabupaten Sumedang masuk pada kategori Daya Saing Tinggi dengan nilai 3,28:

- 1) Inovasi Daerah: Inovasi SIMPATI Dalam Upaya Penurunan Stunting Di Kabupaten Sumedang;
- 2) Pengeluaran per Kapita Kabupaten Sumedang;
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan;
- 4) Layanan pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang;
- 5) Rasio Ketergantungan; dan
- 6) Rasio Pencari Kerja Lulusan S1/S2/S3.

Latar belakang kegiatan Inovasi SIMPATI dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Sumedang ini adalah keperluan akan sumber daya manusia dalam pembangunan. Pembangunan memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, baik secara fisik dan mental, sehingga mampu bersaing di era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) saat ini. Hal ini juga merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi COVID-19. Terlebih dalam waktu dekat, Indonesia akan menghadapi Bonus Demografi 2030, yakni jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia non-produktif (lebih dari 64 tahun). Ini berarti, stunting menjadi ancaman nyata terhadap kualitas manusia. Pasalnya, balita stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, melainkan juga perkembangan otaknya. Karenanya, pencegahan stunting penting untuk mencapai SDM yang berkualitas.

Tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang menjadi ancaman terhadap ketersediaan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Stunting akan menyebabkan anak gagal tumbuh, juga terganggunya perkembangan kognitif, motorik serta metabolik mereka pada usia dewasa. Banyaknya balita yang terkategori stunting merupakan ancaman bagi masa depan daerah dan nasional,

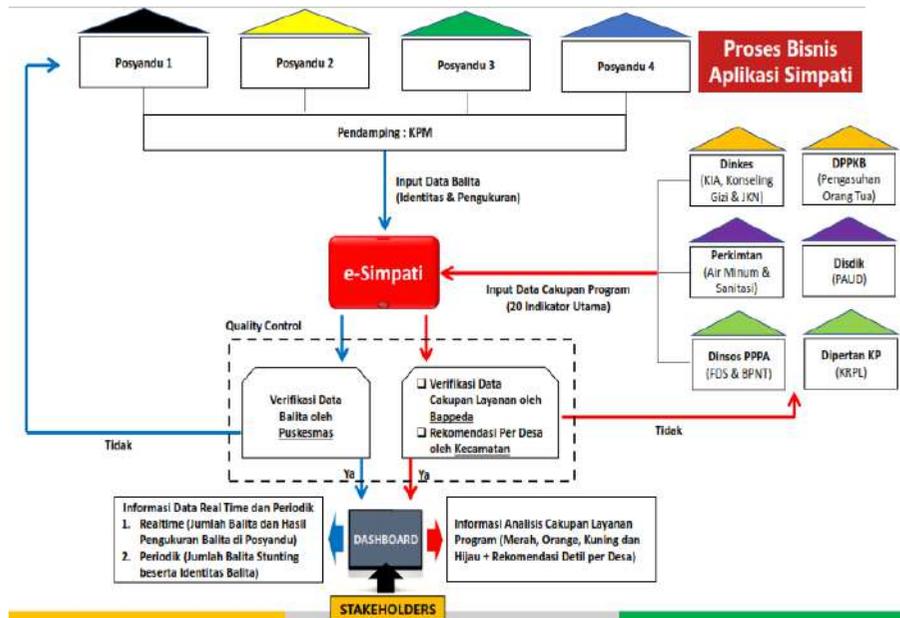
karena potensi individu menjadi terbatas perkembangannya, yang dapat menghambat pembangunan baik di level individu itu sendiri maupun masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan upaya dalam menurunkan dan mencegah stunting melalui intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik. Namun, upaya yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil yang optimal. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan program intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik tidak tepat sasaran, dikarenakan ketidakakuratan data sebagai bahan pengambilan kebijakan intervensi.

Pada tahun 2019, Bappeda Kabupaten Sumedang selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penurunan Stunting Terintegrasi membuat inovasi yaitu Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi (SIMPATI), yaitu aplikasi yang mampu menyediakan data balita dan data cakupan intervensi percepatan penurunan stunting yang cepat, dinamis dan akurat. Sehingga, pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dapat mengambil kebijakan yang tepat dan efektif dalam menangani wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi stunting cukup tinggi. Empat tahun berjalan, aplikasi SIMPATI telah memberikan dampak dalam meningkatkan efektivitas program intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik. Hal ini dapat dilihat dari dampak pelaksanaan program yang mampu menurunkan angka prevalensi stunting dari 32,3 persen pada tahun 2018, menjadi 8,27 persen pada tahun 2022.

Adapun ringkasan kerangka kerja logis inovasi yaitu melalui Alur kerja implementasi Aplikasi SIMPATI dalam rangka menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

Gambar 2.129
Proses Bisnis Aplikasi Simpati Kabupaten Sumedang



a. Tahapan Inovasi

Tahapan-tahapan yang dilaksanakan untuk memperoleh dampak inovasi yang diharapkan:

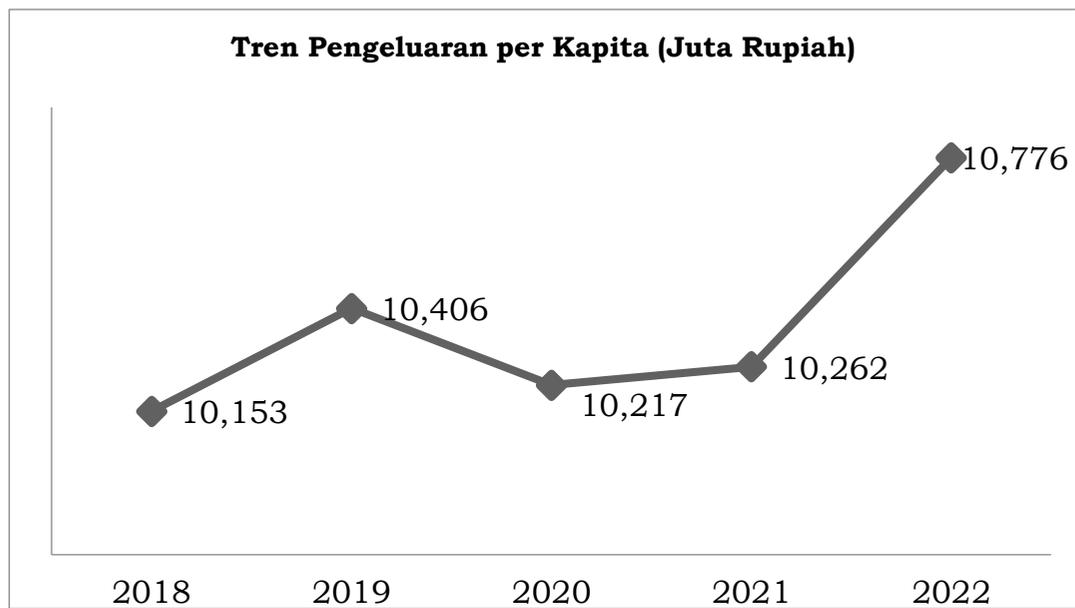
1. Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi dan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi .
2. Memberikan informasi tentang sebaran stunting dan cakupan intervensi percepatan penurunan stunting per desa sehingga stakeholders di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten akan memiliki informasi yang factual dan akurat tentang stunting sehingga memicu munculnya kepedulian terhadap kondisi stunting di wilayahnya yang pada akhirnya seluruh stakeholders akan berperan dalam menurunkan dan mencegah stunting sesuai kemampuannya masing-masing.
3. Bimbingan teknis dan pendampingan kepada kader posyandu dan pegawai perangkat daerah tentang pengoperasian aplikasi simpati. Dan untuk pemanfaat data akan diberikan sosialisasi tata cara pemanfaatan data pada aplikasi simpati. Untuk mempermudah updating data dan memanfaatkan data, dibuatkan video tutorial bagi produsen data dan pemanfaat data.

4. Suporting anggaran dari pemerintah Kabupaten dan Desa serta Telkomsel untuk keberlanjutan Aplikasi Simpati.

Tren pengeluaran per kapita masyarakat Sumedang secara umum mengalami kenaikan, seperti halnya Tahun 2020, mencapai Rp10,217 juta mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp10,262 juta, dan mengalami peningkatan kembali di Tahun 2022 sebesar Rp 10.776 juta. Hal tersebut tidak terlepas dari akibat pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 yang menyebabkan mulai meningkatnya daya beli masyarakat dan disebabkan sector usaha sudah mulai bangkit.

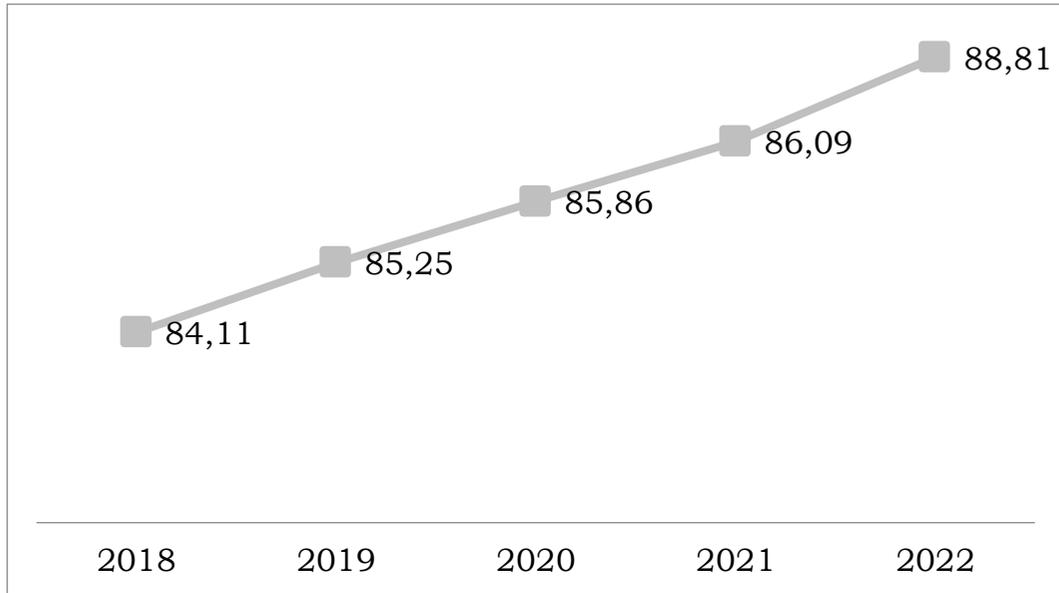
Kondisi terus diperkuat dengan peningkatan indeks kepuasan masyarakat dalam bidang perizinan (Tahun 2018-2021). Sehingga mencapai diatas 80% yaitu sebesar 88,81% di tahun 2022. Sementara itu, di tahun 2021 sebesar 86,09%. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,72% (Tabel 2.120).

Gambar 2.130
Pengeluaran per Kapita
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang dan Bappppeda Kabupaten Sumedang (2022)

Gambar 2.131
Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin) Bidang Perizinan
Tahun 2018-2022



Sumber : DPMPTSP (2023)

Tabel 2.60
Jenis Layanan pada MPP Kabupaten Sumedang

Loket	Perangkat Daerah /Instansi Vertikal	Jenis Layanan	Petugas
A	Badan Pendapatan Daerah	BPHTB, PBB, Pajak Lainnya, Reklame, Layanan Informasi/Customer Service	5
B	KPP Pratama	Informasi Umum Perpajakan, Pembuatan NPWP dan Cetak Ulang, Pembuatan dan Aktivasi E-FIN, dan Pembuatan ID Billing	2
C	SAMSAT	Pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Pengesahan STNK Tahunan, Cetak Pembayaran PKB Online	2
D	PT. TASPEN	Pengajuan SPP Klaim, Pengajuan Mutasi Pensiun, Pengajuan KPT, Pengajuan Mutasi Keluarga, Pengajuan usul/ralat SK/Pensiun janda/duda/YP, Pengajuan JKK/JKM, Informasi Ketaspenan, Enrollment/Perekaman Data Biometrik	2
E	DPMPTSP Kabupaten Sumedang	Pelayanan Perizinan (87 Layanan Perizinan) dan Informasi Investasi	22

Loket	Perangkat Daerah /Instansi Vertikal	Jenis Layanan	Petugas
F	DPMPTSP Provinsi Jawa Barat	Pelayanan Perizinan (197 Layanan Perizinan dan Non Izin), pelayanan informasi LKPM dan Informasi Investasi	1
G	Polres Sumedang	Perpanjangan SIM, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Briva Tilang, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Pelayanan Sidik Jari dan Izin Keramaian	10
H	Kejaksaan Negeri Sumedang	Informasi hukum, Layanan Tilang dan Layanan konsultasi hukum	2
I	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan KTP Elektronik, Perekaman KTP Elektronik, Penerbitan KK, Pelayanan Data Kependudukan (Data Online), Akta Kelahiran, Akta Kematian, SKPWNI, Kartu Identitas Anak, Akta Nikah non Muslim, dan Legalisir	19
J	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja/AK 1, Pelayanan Registrasi Calon Pekerja Migran Indonesia, dan Pelayanan Validasi TKA	3
K	BAZNAS	Layanan Penghimpunan Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Layanan Bantuan dan Layanan Informasi	1
L	PT. PLN	Informasi Pelayanan	1
M	PT. POS	Penjualan materai dan perangko/benda pos, Penerimaan kiriman surat, dokumen dan paket, Pos Pay (pembayaran berbagai jenis angsuran seperti kendaraan, PLN, PDAM, pajak billing dll), dan Pengiriman uang dan penarikan/wesel/ WU dan transfer antar Bank (C2A)	1
N	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan	2
O	Kemenag Sumedang	Pembuatan Surat Rekomendasi Passport UMROH, Pelayanan	4

Loket	Perangkat Daerah /Instansi Vertikal	Jenis Layanan	Petugas
		informasi Haji dan UMROH, Pelayanan informasi zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqaf, Pendaftaran perkawinan, dan Pelayanan perkawinan	
P	PDAM Tirta Medal	Loket pembayaran, dan Pelayanan informasi dan pengaduan	1
Q	BPJS Ketenagakerjaan	Pendaftaran pemberi kerja/Badan Usaha baru, Pelayanan informasi, Pelayanan pengajuan klaim melalui antrian online, dan Pendaftaran peserta Bukan Penerima Upah (BPU)	1
R	BPJS Kesehatan	Pendaftaran Baru, Perubahan Data, dan Layanan informasi dan pengaduan	2
S	Bank BRI	Layanan e-Tilang dan Layanan Perbankan	2
T	Bank BJB	Layanan Perbankan, Modul Penerimaan negara, Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah, Pembayaran Kendaraan Bermotor dan Penerimaan Pembayaran Universitas	4
U	Bank Sumedang	Layanan Perbankan	2
V	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Penyediaan buku dan fasilitas ruang baca	1
W	Dinas Sosial	Pelayanan tempat permainan anak, Pelayanan tempat ibu menyusui dan Rekomendasi Jamkesda	

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator yang menggambarkan Aspek daya saing daerah dalam konteks fokus iklim berinvestasi antara lain adalah : (1) lama proses perizinan; (2) jumlah macam pajak dan retribusi daerah; dan (3) jumlah Perda yang mendukung iklim usaha. Kelengkapan data dan informasi indikator

tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi yang dimiliki masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait. Penjelasan lebih lanjut dideskripsikan pada paragraf selanjutnya dengan mengacu pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.61
Indikator Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi
Tahun 2016-2022

Indikator	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lama Proses Perizinan	14 HK	14 HK	Max. 5 HK	Max. 5 HK	Max. 5 HK	Max. 5 HK	Max. 5 HK
Jumlah dan macam pajak retribusi daerah	Retribusi IMB, Ho dan Trayek	Retribusi PBG dan Trayek					
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu						

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sumedang (2023)

Indikator Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2017 lama perizinan mencapai 14 hari kerja Dengan adanya aplikasi SI ICE MANDIRI dengan sistem *Online Single Submission*, lamanya pengurusan perizinan bisa diperpendek hingga 5 (lima) hari kerja, dengan ketentuan semua persyaratan perizinan terpenuhi.

Pajak dan retribusi yang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Sumedang selama Tahun 2016-2021 antara lain adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak restoran Retribusi IMB, Ho, Trayek angkutan dan untuk kedepannya dengan adanya retribusi yang bersumber dari Parkir Berlangganan dengan harapan dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha selama kurun waktu

Tahun 2016-2021 adalah Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator yang menggambarkan daya saing daerah dalam konteks fokus sumber daya manusia di suatu daerah antara lain adalah (1) Rasio ketergantungan; (2) jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan; (3) jumlah PNS menurut pendidikan yang ditamatkan. Kelengkapan data dan informasi indikator tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi yang dimiliki masing-masing organisasi perangkat daerah terkait. Penjelasan lebih lanjut dideskripsikan pada paragraf di bawah ini.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh pekerja. Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong sebagai negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Tahun 2021 angka ketergantungan Kabupaten Sumedang mencapai 51,058%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Walaupun kenaikan penduduk terbesar di Kabupaten Sumedang berkisar di usia < 15 tahun yang merupakan usia non produktif, namun secara total jumlah penduduk usia produktif berkisar antara 15-64 tahun tetap tertinggi, sehingga berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Tabel 2.62
Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2022

Uraian	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	256.140	259.870	267.175	265.798	275.312	305.610	253.365
Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	100.345	95.447	100.574	109.319	101.934	88.178	128.615
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (Usia <15 Tahun + usia >64 Tahun)	356.485	355.317	367,749	375.117	377.246	393.788	381.980
Penduduk Usia 15-64	759.569	775.974	784.247	780.449	779.341	771.259	805.640
Rasio ketergantungan (%)	46,25	45,94	48,87	47,12	48,13	51,058	47,41

Sumber : Bapppeda dan Disdukcapil Kab. Sumedang (diolah) (2023)

Rasio pencari kerja lulusan S-1/S-2/S-3 dan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan dapat menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu wilayah, sehingga dapat menjadi landasan pembuatan strategi peningkatan kualitas SDM dan strategi peningkatan lapangan kerja.

Berdasarkan Tabel dibawah diketahui bahwa pada Tahun 2022 pencari kerja yang terdaftar dengan tingkat pendidikan S1 mencapai 928 orang. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 di mana pencari kerja yang terdaftar berjumlah 182 orang, maka terjadi penurunan. Hal ini diduga kemungkinan karena tingkat kesadaran pendidikan dan bersekolah ke jenjang perguruan tinggi di masyarakat meningkat.

Tabel 2.63
Rasio Pencari Kerja Lulusan S-1/S-2/S-3
di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2022 (%)

Uraian	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pencari kerja yang terdaftar lulusan S-1	108	143	1.576	511	390	182	928
Pencari kerja yang terdaftar lulusan S-2	5	7	12	2	0	0	7
Pencari kerja yang terdaftar lulusan S-3	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Lulusan S-1/S-2/S-3	113	150	1.588	513	390	825	935
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.142.097	1.146.435	1,148,198	1.154.458	1.159.454	1.165.047	1.187.620
Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3	1,0	1,31	13,83	0,04	0,03	0,07	7,87

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2023)

Jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Sumedang mayoritas berpendidikan terakhir S-1. Hal ini bermakna pegawai di Pemerintah Kabupaten Sumedang secara umum telah memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berpikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (*Benjamin S. Bloom, 1956*).

Namun demikian dalam perspektif ke depan perlu terus ditingkatkan kualitas pendidikan pegawai di Pemerintah Kabupaten Sumedang pada jenjang S2 dan S-3 untuk menghasilkan pegawai-pegawai yang ahli dalam penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan yang terus berkembang dan bersifat multidimensi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.64
Jumlah PNS yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan

Uraian	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PNS di Pemda Sumedang	11.656	11.344	10.614	10.006	9.945	9.252	8.695
PNS Lulusan D3 ke Bawah	2.054	-	1.858	3.413	2.986	2.675	2.415
PNS Lulusan S1	6.450	6.305	6.337	6.038	6.416	6.643	5759
PNS Lulusan S2	574	552	538	548	539	529	517
PNS Lulusan S3	10	9	6	5	4	5	4

Sumber : Bapppeda Kabupaten Sumedang dan BKPSDM Kab. Sumedang (2023)

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa PNS di wilayah PEMDA mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Hal ini salah satunya diduga karena adanya pensiunan dan tingkat pengangkatan CPNS terbaru berjumlah sedikit. Adapun tingkat pendidikan PNS didominasi oleh lulusan S1, dan yang terkecil dari lulusan S3. Hal ini diduga karena aksesibilitas pendidikan yang kurang mudah dan kesadaran PNS lulusan S1 dan dibawahnya masih rendah. Sehingga diperlukan langkah solutif untuk mengatasi hal tersebut.

2.6. Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2022

2.6.1. Capaian Kinerja Sasaran

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah memuat prioritas pembangunan daerah yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat urgensi dan sebagai daya ungkit kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan Tahun 2022 dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada Tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumedang didasarkan pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Pada bagian ini dirumuskan Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

1. Korelasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
2. Korelasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD, didalamnya terdapat arahan pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah serta isu strategis daerah;
3. Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana;
4. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, Perangkat Daerah pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas;
5. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut.

2.6.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023

Sementara itu, terkait indikator sasaran daerah, di dalam dokumen perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan 19 (sembilan belas) indikator sasaran daerah. 19 (sembilan belas) indikator sasaran daerah tersebut diampu oleh Badan/Dinas/Kantor Satuan terkait untuk mendukung kinerja Kepala Daerah. Adapun capaian indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65
Capaian Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2021 (Sebelum Perubahan)

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021 (SEBELUM PERUBAHAN)	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN						
				KONDISI AWAL 2018	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021
	MISI 1 :Memenuhi kehidupan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau									
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72.14	72.26	72.29	72.44	72.43	72.51-72.70	72.62
2.	Terwujudnya sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.17	8.29	8.27	8.48	8.51	8.50-8.57	8.52
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.94	13.22	12.96	13.44	12.97	12.91-12.98	12.98
3.	Terwujudnya Penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9.76	8.96	9.05	8.16	10.26	10,75-9,71	10.71
		Indeks Pembangunan Gender	Poin	94.88	94.87	95.01	95.34	95.34	95,81	95.18
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	70.57	69.23	70.57	69.77	70.78	70,80	70.13
	MISI 2 :Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan									
4.	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	80.74	72.5	82.27	83	83	73,5	74
	MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal									

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021 (SEBELUM PERUBAHAN)	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN						
				KONDISI AWAL 2018	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021
5.	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.83	6.74	6.32	7.01	-1.12	5.38	3.17
6.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	62.8	66.8	70.75	70.80	76.96	71,65	74.80
		Rasio Jaringan Irigasi	Persen	60	62	62.02	64	64.46	66	66
7.	Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58.68	58.92	59.01	59.18	59.18	63,85	62.26
		Indeks Resioko Bencana	Poin	162	155	157	150	150	0,47	145
		MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat								
8.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Sakip Kabupaten	Kategori	B	B	B	B	BB	A	A
		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56.06	65	97.34	70	66.74	75	66.74
9.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80.74	81	82.27	83	83	86	83.08
		MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang								
10.	Terwujudnya perekonomian	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	Poin	10.153	10.060	10.406	10.380	10.380	10.700	10.262

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021 (SEBELUM PERUBAHAN)	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN						
				KONDISI AWAL 2018	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021
	Sumedang yang kreatif dan berdaya saing									
		Jumlah UMKM	UMKM	15.467	16.467	2.800	17.467	1.557	18.467	18.467
11.	Menciptakan wirausaha dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7.52	6.55	7.63	7.9-7.87	9.89	8.51-9.35	9.18

Tabel 2.66
Capaian Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2022 (Sesudah Perubahan)

NO	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
					2022	2022
MISI 1 : MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT SECARA MUDAH DAN TERJANGKAU						
1	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71.93-72.48	72.69
			Persentase Penduduk Miskin	Persen	10.41-9,54	10.14
	1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72.65-72.82	72.91
	1.2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.58-8.80	8.72
			Angka Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	12.99-13.04	12.99
	1.3	Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10.41-9.54	10.14
	1.4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	96.28	95.09
Indeks Pemberdayaan Gender			Poin	70.84	72.23	
MISI 2 : MENGUATKAN NORMA AGAMA DALAM TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN						
2	Terwujudnya Kehidupan Yang Agamis Di Kabupaten Sumedang		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	74	75.32
	1.1	Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	74	75.32

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
				2022	2022
MISI 3 : MENGEMBANGKAN WILAYAH EKONOMI DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, SERTA PENGUATAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL					
3	Terwujudnya Percepatan Pengembangan Wilayah Ekonomi Agribisnis, Industri, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,70 - 5,70	5.03
		Indeks Resiko Bencana	Poin	140	119,39
3.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	persen	2,20 - 4,15	6,85
3.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	3,45-5,28	4,18
3.3	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	4,50-6,01	8,15
3.4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	74,65	79,89
3.5	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,49	0,49
3.6	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	persen	89,4	87,1
3.7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	64,26	63,35
3.8	Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen	20	-29,03

NO	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
					2022	2022
MISI 4 : MENATA BIROKRASI PEMERINTAH YANG RESPONSIF DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PROFESIONAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT						
4	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80	71,03
4.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A	BB (76)
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP
4.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	89	88,19
4.3	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	4,1	3,84
MISI 5 : MENGEMBANGKAN SARANA PRASARANA DAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG Mendukung KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT KABUPATEN SUMEDANG						
5	Terwujudnya Perekonomian Sumedang Yang Kreatif Dan Berdaya Saing		PDRB per Kapita	Rp (juta)	32.09-33.84	34.46
5.1	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,78 – 7.99	7,72

Dari Tabel 2.66 diatas, diketahui bahwa beberapa indikator sasaran daerah telah mencapai bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang berada dibawah target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor diasumsikan menjadi penyebab ketidaktercapaian indikator-indikator sasaran tersebut, misalnya:

- a. Telah rampungnya beberapa ruas jalan tol Cisumdawu sehingga mengakibatkan turunnya nilai investasi di Kabupaten Sumedang;
- b. Tingginya angka UMR Kabupaten Sumedang yang mengakibatkan para insvestor menarik diri untuk berinvestasi di Sumedang;
- c. Menurunnya iklim berinvestasi di Kabupaten Sumedang mengakibatkan turunnya nilai investasi;
- d. Belum tercapainya beberapa indikator yang menjadi penilaian baik SAKIP, IKM ataupun SPBE mengakibatkan turunnya nilai ketiga indeks tersebut; dan
- e. Belum terpenuhinya ketersediaan pangan dan keragaman pangan di Kabupaten Sumedang menyebabkan skor pola pangan harapan pun belum mencapai target.

2.6.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2021 (Sebelum Perubahan)

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	URUSAN WAJIB									
1.1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.1.1	PENDIDIKAN									
1.1.1.1	Angka partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	106,75	106,83	106,93	107,03	104,46	99,34	107.03	Dinas Pendidikan
1.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	103,42	103,64	103,72	103,82	103,80	97,96	103.82	Dinas Pendidikan
1.1.1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	105,23	105,34	105,44	105,55	104,06	97,45	105.55	Dinas Pendidikan
1.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	102,78	102,99	103,19	103,40	103,74	88,51	103.40	Dinas Pendidikan
1.1.1.5	Persentase Guru uang Bersertifikasi	Persen	65,03	66,09	73,77	82,52	63,26	90,23	82.52	Dinas Pendidikan
1.1.1.6	Sekolah Pendidikan Dasar kondisi bangunan baik	Persen	13,45	21,51	2950	37,49	21,51	37,92	37.49	Dinas Pendidikan
1.1.1.7	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SD)	Rasio	1:27	1:27	1:27	1:27	1:27	1:17	1:27	Dinas Pendidikan

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.1.1.8	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SMP)	Rasio	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:15	1:32	Dinas Pendidikan
1.1.1.9	APK PAUD	Persen	88,44	89,53	89,62	89,71	89,53	80,6011	89.71	Dinas Pendidikan
1.1.1.10	Persentase PAUD yang terakreditasi	Persen	31,08	52,89	74,7	96,51	74,7	45,32	96.51	Dinas Pendidikan
1.1.1.11	Angka partisipasi kasar kesetaraan	Persen	1,35	1,63	1,9	2,1	1,63	3	2.1	Dinas Pendidikan
1.1.1.12	Persentase siswa bersertifikat Dlniyah	Persen	n/a	0	100	100	0	100	100	
1.1.2	Kesehatan									
1.1.2.1	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	16	13	10	14	14	21	36	Dinas Kesehatan
1.1.2.2	Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	155	140	120	114	114	137	161	Dinas Kesehatan
1.1.2.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Poin	78,73	85	87	82,5	82,5	100	86.89	Dinas Kesehatan
1.1.2.4	Persentase Balita Stunting	Persen	32,2	29	26	24,4	24,4	17,5	10.99	Dinas Kesehatan
1.1.2.5	Prevalensi HIV /AIDS	Persen	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0.4	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.1.2.6	Angka Kesakitan Penyakit Menular	Angka	113/100.000	111/100.000	109/100.000	<107/100.000	56/100.000	0	<107/100.000	Dinas Kesehatan
1.1.2.7	Universal Health Coverage	Persen	73,17	96	97	98	76,46	77,06	78.79	Dinas Kesehatan
1.1.2.8	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,12	0,2	0,3	0,40	0,13	0,13	0.1	Dinas Kesehatan
1.1.2.9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai Kewenangan Kelas B	Persen	98	98	98	100	98,92	96,12	98.69	Rumah Sakit Umum Daerah
1.1.2.10	IKM Rumah Sakit	Poin	83,7	90	91	92	83,79	83,92	90	Rumah Sakit Umum Daerah
1.1.2.11	Persentase Pencapaian Indikator Mutu Pelayanan di Rumah Sakit	Persen	88,25	90	91	92	91,03	90	86.35	Rumah Sakit Umum Daerah
1.1.3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang									
1.1.3.1	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	62,8	66,8	70,8	74,80	70,75	76,96	74.80	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.1.3.2	Rasio jaringan irigasi	Persen	60	62	64	60	62,02	64,46	66	Dinas Pekerjaan Umum Dan

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Penataan Ruang
1.1.3.3	Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang	Persen	100	100	100	100	70,22	75,11	80	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.1.3.4	Usaha jasa konstruksi yang terstandarisasi	Persen	n/a	20	40	60	23	40,06	40	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.1.3.5	Persentase bangunan pemerintahan yang tertata	Persen	20	28,75	48,75	58,75	35	58,75	58.75	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.1.3.6	Persentase penanganan sampah	Persen	n/a	80	75	70	99,975	99,9733	70	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
1.1.3.7	Persentase pengurangan sampah	Persen	n/a	20	25	30	99,9	99,92	29.66	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
1.1.3.8	Persentase RTH Terkelola	Persen	11,04	11,04	11,07	11,11	11,04	11,07	32.33	Dinas Lingkungan

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Hidup Dan Kehutanan
1.1.4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman									
1.1.4.1	Rasio rumah layak huni	Persen	80	80,67	81,33	82	80,13	80,34	58.18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.1.4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0,31	0,3	0,27	0,15	0,3	0,3	0.02	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.1.4.3	Persentase rumah tangga berakses air minum	Persen	79,02	80	83	85	79,92	80,45	80	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.1.4.4	Persentase rumah tangga bersanitasi	Persen	55	60	65	70	55,23	55,29	60	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.1.5	Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat									
1.1.5.1	Rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten sumedang (1 orang setiap RT)	Persen	60,55	65	70	75	60,55	81,42	65	Satuan Pamong Praja
1.1.5.2	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Pamong Praja
1.1.5.3	Cakupan penegakan peraturan daerah yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Pamong Praja
1.1.5.4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	32,04	60	70	80	32,04	93,17	70	Satuan Pamong Praja
1.1.5.5	Tingkat waktu tanggap (Response timerate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Persen	87,5	87,5	90	90	75,1	94,32	80	Satuan Pamong Praja
1.1.5.6	Indeks resiko bencana	Poin	162	155	150	145	157	150	145	Badan Penanggulangan

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										gan Bencana Daerah
1.1.6	Sosial									
1.1.6.1	Persentase penyandangan masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persen	10,05	9,25	8,45	7,65	9,11	8,1	7.23	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan
1.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
1.2.1	Tenaga Kerja									
1.2.1.1	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	7,04	6,55	6,35	6,15	7,63	9,89	9.18	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1.2.1.2	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persen	100	100	100	100	100	100	98.16	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1.2.2	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
1.2.2.1	Persentase perlindungan perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.2.2.2	Kabupaten layak anak	Skor	501	601	650	701	549,7	549	549	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.2.2.3	Persentase perempuan kepala keluarga yang meningkat ekonomi keluarganya	Persen	0,7	1,7	2,7	3,70	0,7	9,7	3.7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.2.3	Pangan									
1.2.3.1	Skor pola pangan harapan (PPH)	Persen	85	87,3	88,5	89,60	87,7	89,10	86.10	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
1.2.4	Pertanahan									
1.2.4.1	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	79,82	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.2.4.2	Persentase (Jumlah bidang) pengadaan	Persen	100	100	100	100	96,37	99,19	95.82	Dinas Perumahan,

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi									Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.2.5	Lingkungan Hidup									
1.2.5.1	Indeks kualitas air (IKA)	Poin	47,89	48,09	48,29	48,49	48,15	64,29	44.29	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
1.2.5.2	Indeks kualitas udara (IKU)	Poin	80,29	80,49	80,69	80,89	80,60	85,24	80.81	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
1.2.5.3	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Poin	50,57	50,86	51,22	51,63	50,96	58,31	58.81	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
1.2.7	Administrasi Kependudukan									
1.2.7.1	Indeks kepuasan masyarakat bidang kependudukan	Poin	76	80	83	85	80	83	85	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1.2.7.2	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk wajib KTP	Persen	89	97	97	98	97	97	98	Dinas Kependudukan Dan

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Pencatatan Sipil
1.2.7.3	Persentase bayi ber Akte kelahiran	Persen	81	91	91	93	91,2	93	93	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1.2.7.4	Persentase data ganda dan anomaly	Persen	17	9	3	3	9	3	3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1.2.8	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa									
1.2.8.1	Persentase desa berkembang dan cepat berkembang	Persen	56,3	74,8	92,6	100	94	95,50	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1.2.8.2	Persentase klasifikasi BUMDES maju dan berkembang	Persen	24,8	50	81,5	100	29,37	82,22	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1.2.8.3	Persentase penerapan siskudes kategori optimal	Persen	32,2	100	100	100	100	80,47	100	Dinas Pemberdayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Masyarakat Dan Desa
1.2.8	Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana									
1.2.8.1	Total fertility rate (TFR)	Angka	2,09	2,07	2,05	2,03	2,07	2,12	2.1	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.2.8.2	Persentase keluarga pra sejahtera	Persen	4,12	3,71	3,3	2,88	4,01	4,51	3.23	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.2.8.3	Presentase keluarga sejahtera I	Persen	67,03	58,22	49,42	40,61	17,28	18,26	14.41	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.2.9	Perhubungan									
1.2.9.1	Cakupan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen	25,31	31,27	42,12	51,83	98,47	79,04	50.48	Dinas Perhubungan

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.2.9.2	Cakupan trayek angkutan umum	Persen	58,45	59,85	61,24	62,64	88,32	5074	45.11	Dinas Perhubungan
1.2.9.3	Peningkatan penumpang angkutan umum	Orang/hari	10044	10284	10524	10764	10284	10428	10.305	Dinas Perhubungan
1.2.9.4	Persentase kendaraan laik jalan	Persen	83,4	86,7	90	93,30	91,92	62,59	78.93	Dinas Perhubungan
1.2.9.5	Jumlah pelanggaran lalu lintas	Jumlah pelanggaran	1787	1490	1133	984	30	135,48	211	Dinas Perhubungan
1.2.9.6	Cakupan satuan ruas parkir (SRP)	Persen	50	60	70	80	60	100	80	Dinas Perhubungan
1.2.10	Komunikasi Dan Informasi									
1.2.10.1	Cakupan layanan komunikasi dan informasi	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistic
1.2.10.2	Nilai SPBE	Poin	2,46	3	3,3	3,60	2,51	3,81	3.6	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistic
1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah									

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.2.11.1	Cakupan koperasi aktif	Persen	72,93	75	78	81	77,41	38,39	40.41	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
1.2.11.2	Jumlah UMKM	UMKM	15467	16467	17467	18467	2800	1557	61.587	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
1.2.12	Penanaman Modal									
1.2.12.1	Jumlah nilai investasi di sumedang	Rupiah	1.106.170.000	1.216.787.000.00	1.338.465.700.000	1.606.158.840.000	915.825.600.000	1.338.465.700.000	4.249.320.950.689	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.2.12.2	Indeks kepuasan masyarakat bidang perizinan	Poin	84,11	84,95	86,25	87,23	85,25	86,25	87.23	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.2.13	Kepemudaan Dan Olahraga									
1.2.13.1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	n/a	80	90	100	80	100	100	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga
1.2.13.2	Jumlah atlet yang berprestasi tingkat nasional	Atlet	14	20	20	20	13	20	20	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga
1.2.14	Statistik									
1.2.14.1	Presentase ketersediaan data yang akurat dan berkualitas	Persen	45,5	70	85	95	67,8	100	95	Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik
1.2.15	Persandian									
1.2.15.1	Cakupan pengamanan informasi daerah	Persen	n/a	33,33	50	66,67	27,59 (8 OPD)	207,14 (29 OPD)	66.67	Dinas Komunikasi, Informatika Persandian Dan Statistik
1.2.16	Kebudayaan									

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Cakupan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga
1.2.17	Perpustakaan									
1.2.17.1	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	70235	73511	75716	77988	73671	12304	37.558	Dinas Arsip Dan Perpustakaan
1.2.17.2	Cakupan lokasi yang terlayani melalui pusling	Persen	22,22	31	48	64	31	82,27	50	Dinas Arsip Dan Perpustakaan
1.2.17.3	Tingkat kepuasan pengunjung	Persen	74,4	76	80	84	88,05	0,34	84	Dinas Arsip Dan Perpustakaan
1.2.18	Kearsipan									
1.2.18.1	Persentase perangkat daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar	Persen	3,64	21,82	40	58.18	21,82	40	58.18	Dinas Arsip Dan Perpustakaan
2	Urusan Pilihan									

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1	Kelautan Dan Perikanan									
2.1.1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	Persen	3,15	4	4,6	5,20	2,34	3,48	4,82	Dinas Perikanan Dan Peternakan
2.2	Pariwisata									
2.2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	498472	598166	717800	861360	81494	717800	861.860	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga
2.2.2	Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional	Persen	44	63	75	100	63	100	100	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga
2.3	Pertanian									
2.3.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian:									
	Tanaman pangan	Persen	10,04	10,14	10,24	10,34	19,14	3.81	2.18	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tanaman hortikultura	Persen	3,2	4	4,7	5,40	4	2.13	1.38	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Perkebunan	Persen	4,12	4,2	4,8	5,50	18,79	5.65	6.52	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2.3.2	Laju pertumbuhan subsector peternakan	Persen	3,68	4,3	4,9	5,50	4,18	5,78	-0,37	Dinas Perikanan Dan Peternakan
2.4	Kehutanan									
2.4.1	Presentase pengelolaan kawasan konservasi	Persen	60	63	64	66	n/a	n/a	n/a	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.4.2		Nilai	83	83	83	83	n/a	n/a	n/a	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.5	Perdagangan									
2.5.1	Laju pertumbuhan sub sektor	Persen	4,59	4,89	5,19	5,49	4,89	5,19	6.35	Dinas Koperasi Usaha Kecil

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	perdagangan besar dan eceran									Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
2.6	Perindustrian									
2.6.1	Laju pertumbuhan sub sektor industri pengolahan	Persen	5,29	5,32	5,35	5,38	5,32	5,35	11.78	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
2.7	Transmigrasi									
2.7.1	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	51	56	61	66	6	56	65	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3	Urusan Penunjang Dan Pendukung									
3.1	Inspektorat									
3.1.1	Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah	Persen	20	80	80	90	80	80	90	Inspektorat
3.1.2	Persentase perangkat daerah yang nilai	Persen	36	80	80	90	80	80	90	Inspektorat

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	SAKIP berkategori "BAIK"									
3.1.3	Tingkat kapabilitas APIP/IACM	Kategori	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Inspektorat
3.1.4	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	Persen	n/a	20	100	100	20	100	100	Inspektorat
3.1.5	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi	Persen	75	80	90	90	82	85	84.41	Inspektorat
3.1.6	Persentase temuan penyimpangan terhadap APBD	Persen	8,79	8	7	6	8	7	6	Inspektorat
3.2	Perencanaan									
3.2.1	Tingkat kesesuaian renstra terhadap RPJMD	Persen	85	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.2.2	Tingkat kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	Persen	85	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan
3.2.3	Tingkat kesesuaian Renja terhadap RKPD	Persen	85	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan
3.2.4	Tingkat ketercapaian target pembangunan daerah yang berkategori baik	Persen	85	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan
3.3	Keuangan									
3.3.1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset
3.3.2	APBD tepat waktu	Status	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Keuangan Dan Asset
3.3.3	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	16,47	17,03	17,77	17,03	17.13	17.87	17.33	Badan Pengelolaan Pendapatan
3.3.4	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pajak daerah	Poin	77,34	85	87	90	85	87	90	Badan Pengelolaan Pendapatan
3.4	Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan									
3.4.1	Indeks profesionalisme ASN	Poin	59	65	70	75	59,45	65,03	74.87	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.4.2	Indeks sistem merit ASN	Poin	48,9	60	66,25	72,50	60,88	74,47	96.61	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.5	Penelitian Dan Pengembangan									
3.5.1	Persentase hasil penelitian dan	Persen	80	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	pengembangan yang diimplementasikan									Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
3.6	Sekretariat Daerah									
3.6.1	Persentase perangkat daerah yang capaian target tahunannya berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
3.6.2	Persentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
3.6.3	Persentase perangkat daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
3.6.4	Persentase perangkat daerah bidang pembangunan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.6.5	Persentase perangkat daerah bidang administrasi umum yang capaian target kinerja tahunannya berkategori “baik”	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
3.6.6	Nilai LPPD kabupaten	Angka	3,092	3,15	3,3	3,45	3,15	3.51	3.64	Sekretariat Daerah
3.6.7	Indeks reformasi birokrasi	Poin	56,06	65	70	75	22,38	66.74	66.74	Sekretariat Daerah
3.6.8	Nilai SAKIP kabupaten	Kategori	B	B	BB	A	B	BB	BB	Sekretariat Daerah
3.6.9	Cakupan layanan pembentukan produk hukum daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
3.6.10	Persentase dokumen yang ditindak lanjuti ke dalam perjanjian Kerjasama	Persen	46,67	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
3.6.11	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan administrative kinerja pembangunannya triwulanannya berkategori “baik”	Persen	60	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.6.12	Tingkat kematangan UKPBJ	Kategori	Level 1	Level 3	Level 3	Level 4	Level 2	Level 2	Level 2	Sekretariat Daerah
3.6.13	Cakupan fasilitasi dan dukungan pelayanan kepada pimpinan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	99,85	Sekretariat Daerah
3.6.14	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program sumedang simpati	Persen	30	65	70	75	89	82	99,32	Sekretariat Daerah
3.6.15	Cakupan tertib administrative keuangan	Persen	90	100	100	100	98	97,07	100	Sekretariat Daerah
3.6.16	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	Persen	80	100	100	100	96	83,98	100	Sekretariat Daerah
3.7	Sekretariat Dprd									
3.8.1	Persentase fasilitasi dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya DPRD	Persen	93,4	100	100	100	92,75	93,68	97.14	Sekretariat DPRD
4	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik									
4.1	Kesatuan Bangsa Dan Politik									
4.1.1	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	72,2	72,5	73	100	74	74	74	Kantor Kesatuan

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan (Sebelum Perubahan)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target			Realisasi			Perangkat Daerah
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Bangsa Dan Politik
4.1.2	Tingkat cipta kondisi kondusif	Persen	100	100	100	80,65	100	100	100	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
4.1.3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	80,60	80,65	80,65	100	83,5	79	80	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
4.1.4	Persentase ormas yang dibina kategori aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Data diolah oleh BAPPPEDA

*) n/a belum ada data dari Perangkat Daerah

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2022 (Sesudah Perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah dalam menunjang Kinerja Pemerintah Daerah dalam menciptakan Kerukunan beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang	hasil survei terhadap variabel persepsi, sikap dan kerjasama umat beragama	Poin	74	75.32
2.	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah dalam menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Realisasi kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat / Persentase Target kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat x 100 %	persen	100	99.49
3.		Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi	Persentase Realisasi kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi / Persentase Target kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang	persen	100	93.75

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET TAHUN 2022
			pembangunan dan ekonomi x 100%			
4.		Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi bidang administrasi umum	Persentase Realisasi kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang administrasi umum /Persentase Target perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang administrasi umum x 100 %	persen	100	95.54
5.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Perangkat Daerah	Skor penilaian dari inspektorat	poin	29.04	34.16
6.	Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skor penilaian dari inspektorat	Kategori	A	A (81.922)

Sumber : Analisis Bapppeda 2023

Capaian Sekretariat Daerah dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 98.80 Persen. Adapun Indikator yang belum mencapai target, diantaranya:

A. Indikator Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, ketidaktercapaian indikator ini karena Adanya salah satu indikator program lingkup asisten pemerintahan dan kesra yaitu "Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama serta rencana aksi yang jelas dan terukur" tidak tercapai (target 100%, realisasi 95.92%). Rendahnya respon Perangkat Daerah terkait potensi kerjasama daerah yang bisa ditindaklanjuti serta rendahnya kompetensi SDM yang terdapat di lingkup bidang

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat menjadi penyebab ketidaktercapaian indikator ini.

- B. Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi, ketidak tercapaian indikator ini karena Adanya salah satu indikator program lingkup asisten perekonomian dan pembangunan yaitu "tingkat kematangan UKPBJ" tidak tercapai (target level 4, realisasi level 2). Kurangnya SDM dalam bidang barang/jasa menjadi salah satu penghambat pencapaian kinerja indikator tersebut.;
- C. Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi bidang administrasi umum, ketidaktercapaian indikator ini karena adanya salah satu indikator program lingkup asisten administrasi umum yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi" tidak tercapai (target 80.00 poin, realisasi 71.82 poin) dikarenakan data yang tersedia kurang memadai, dll.

Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Dukungan Dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rumus*** Penjelasan : Mengukur pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	100
2.		Tingkat Kepuasan DPRD Atas Dukungan Dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		Persen	80	80

Sumber : Analisis Bappppeda 2023

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD sudah mencapai 100 (seratus) Persen sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut antara lain : 1) Komitmen pimpinan dalam rangka memfasilitasi pencapaian IKU Sekretariat DPRD; 2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang

memadai; 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM; 4) Terjalinnnya kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan unsur Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tabel 2.70
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET TAHUN 2022
1.	Optimalnya Fungsi Inspektorat Daerah sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin Kualitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase tindak lanjut pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	Rumus** untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah temuan. Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.	Persen	92	73
2.		Maturitas SPIP	Rumus*** Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase implementasi SPIP di setiap OPD yang berjumlah 55 OPD, dalam rangka penilaian level maturitas SPIP di setiap OPD tersebut dilihat dari hasil penilaian Self assessment (SA) yang terbagi dalam 5 unsur (1. lingkungan pengendalian, 2.	Persen	Level 3+	Level 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET TAHUN 2022
			Penilaian resiko, 3. kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan pengendalian intern). Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Indikator Opini BPK			
3.		Persentase penurunan temuan penyimpangan terhadap APBD	Rumus*** untuk mengukur persentase penurunan temuan dari penyimpangan keuangan APBD yang material hasil pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan APIP. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	5	5
4.		Persentase pemenuhan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP	IACM bertujuan untuk memperkuat atau meningkatkan audit internal melalui langkah evolusi kecil yang disusun menjadi lima level kapabilitas progresif, yaitu : Level 1 : Initial, Level 2 : Infrastructure, Level 3 : Integrated, Level 4 : Managed Level 5 : Optimizing Setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit internal yang bersangkutan. Semakin meningkatnya ukuran, kompleksitas maupun risiko organisasi. Pada masing-masing level kapabilitas	Persen	67,08	67,08

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET TAHUN 2022
			tersebut,terdapat enam elemen audit internal,yaitu : Peran dan layanan audit intern;Manajemen SDM;Praktik profesional;Manajemen kinerja dan akuntabilitas;Hubungan dan budaya organisasi; Struktur tata kelola.Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.			
5.		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Rumus*** Zona integritas merupakan upaya percepatan pelaksanaan Reformasi birokrasi, dengan menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja. Pembangunan zona integritas dimulai dari penancangan unit kerja percontohan sebagai Zona Integritas, pembangunan zona integritas, evaluasi internal oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah (Inspektorat jenderal/inspektorat kementerian/Lembaga, inspektorat daerah). Tim penilai internal penilaian mandiri (self assessment) lembar Kerja Evaluasi (ZI) menuju WBK/WBBM terhadap OPD yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK, sesuai dengan	Level	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET TAHUN 2022
			Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indeks Reformasi Birokrasi			

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat sudah mencapai 100 Persen sesuai target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor pendorong ketercapaian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perbaikan perencanaan dengan melakukan *cascade down* agar program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
- b. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan; dan
- c. Adanya pelaksanaan program peningkatan SPIP ke setiap Perangkat Daerah.

Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET TAHUN 2022
1.	Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	S Peserta Memenuhi Nilai Literasi x 100% S Peserta Didik	Persen	46.84	61.50

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET TAHUN 2022
2.		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	S Peserta Memenuhi Nilai Numerasi x 100% S Peserta Didik	Persen	26.77	41.69

Sumber : Analisis Bapppeda 2023

Literasi dan numerasi merupakan kompetensi yang sifatnya mendasar dan general. Kompetensi literasi merupakan budaya yang harus dimiliki oleh siswa dan diharapkan siswa dapat memahami, menggunakan serta mengevaluasi berbagai jenis teks dalam tulisan, kemampuan dalam berhitung, menghafal dan mendalami sebuah korteks dan cakupan yang luas. Sedangkan kompetensi numerasi merupakan kemampuan guru untuk mendampingi peserta didik dalam mengakses, menggunakan, menafsirkan dan mengkomunikasikan informasi dan ide matematika untuk mengelola berbagai situasi. Berdasarkan data diatas bahwa capaian seluruh indikator kinerja utama Dinas Pendidikan telah melebihi target yang ditetapkan. Ketercapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi para pengajar/guru;
- b. Antusiasme dan semangat para pengajar/guru dan peserta didik dalam pengaplikasian kompetensi literasi dan kompetensi numerasi di tempat belajar dan mengajar;
- c. Pendampingan dan bimbingan teknis terhadap pengajar/guru dalam penerapan kompetensi numerasi dan mengembangkan kompetensi literasi kepada peserta didik; dan
- d. Adanya modul standar kompetensi bagi pengajar/guru Pendidikan Dasar yang digunakan sebagai acuan bagi Lembaga penyelenggaraan Pendidikan dalam merancang dan melaksanakan program pelatihan dan pendampingan pengajar/guru terkait kompetensi numerasi.

Tabel 2.72
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET TAHUN 2022
1.	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Ratio Kematian Ibu	Jumlah Kematian Ibu x 100.000 (Konstanta Kelahiran hidup pada kematian ibu) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu 1 tahun	Kelahiran Hidup	100/100.000 KH	107/100.000 KH
2.		Ratio Kematian Bayi	Jumlah Kematian Bayi usia 0 – 1 Tahun dikali 1000 (konstanta kelahiran hidup pada kematian bayi) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu 1 tahun	Kelahiran Hidup	18/1.000 KH	14/1.000 KH
3.		Prevalensi stunting	Jumlah Balita Usia 0 – 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z – score kurang dari -2 SD dibagi jumlah anak usia 0 – 59 bulan yang diukur PB/TB pada periode tertentu x 100 %	Persen	12	8.27

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET TAHUN 2022
4.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Kesehatan	Data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya dengan kenyataan yang didapatkan	Persen	91	88.44
5.		Angka kematian karena DBD (CFR DBD)	Jumlah Kematian akibat Penyakit DBD x 100% Jumlah Penderita DBD pada Periode tertentu	Persen	<1	0.688
6.		PHBS Tatanan Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Jumlah Rumah Tangga yang Sehat	Persen	60	59.12
7.		IKM Rumah Sakit	Nilai Indeks X Nilai Dasar	Poin	93	85.31
8.		Akreditasi Rumah Sakit sesuai Standar Nasional	X 100 %	Nilai	84	82

Sumber : Analisis Bappppeda 2023

Secara umum Capaian Dinas Kesehatan dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 97.32 Persen. Indikator yang belum mencapai target, diantaranya:

- a. Indikator Ratio Kematian Ibu. Ketidaktercapaian indikator ini karena sebagian besar kematian ibu disebabkan adanya beberapa faktor resiko, yaitu usia ibu > 35 tahun, jumlah kehamilan > 3, Ibu dengan penyakit penyerta (Hypertensi, HIV, DBD, Covid-19);

- b. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Kesehatan. Kurangnya sosialisasi terkait dengan survei yang dilakukan secara digital terhadap kepuasan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien berdampak pula terhadap rendahnya nilai indeks kepuasan yang didapatkan.
- c. Indikator PHBS Tatanan Rumah Tangga terdiri dari 10 indikator. Belum tercapainya indikator ini disebabkan karena adanya beberapa indikator yang belum terpenuhi, diantaranya masih tingginya rumah tangga dengan kategori tidak sehat berdasarkan indikator merokok di dalam ruangan;
- d. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator IKM Rumah Sakit, yaitu terdapat beberapa unit pelayanan yang belum memenuhi target unsur pelayanan dikarenakan pandemi *covid 19*. Hal ini disebabkan adanya beberapa peraturan mengenai pembatasan jumlah pasien rawat jalan, pembatasan waktu dan jumlah kunjungan pada pasien rawat inap serta penutupan sementara pelayanan baik IGD maupun instalasi lainnya.

Tabel 2.73
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	(Panjang Jalan Kondisi Baik dan Sedang)/(Total Panjang Jalan Kabupaten)x 100%	Persen	81.3	86.54
2.	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi	Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi	Jumlah Cakupan Areal Irigasi Yang terairi	ha	20.633,40	20.633,40
3.	Meningkatnya Keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Ketaatan terhadap RTR	(Realisasi RTRW)/(Rencana Peruntukan)x 100%	Persen	65	68.64

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
4.	Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	(Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria)/ (Total Jumlah Penyedia Jasa KONstruksi di Kabupaten Sumedang))x 100%	Persen	80	81.94
5.	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	Persentase cakupan pelayanan akses air minum layak	(Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Minum)/(JUmlah Penduduk Kabupaten Sumedang))x 100%	Persen	73.6	81.56
6.	Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang Tertata terhadap Jumlah Bangunan dan Lingkungan	Persen	68.75	66.25

Sumber : Analisis Bappppeda 2023

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah melampaui target yang ditentukan, namun masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum memenuhi target, yaitu indikator Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata. Faktor penghambat pencapaian indikator tersebut diantaranya adalah 1) kurangnya sosialisasi informasi terkait dengan peta terbaru dalam penataan ruang; dan 2) masih rendahnya pendataan, pengendalian dan pengawasan bangunan Gedung pemerintah.

Tabel 2.74
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Mewujudkan Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas dan Berkelanjutan	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Seluruh Rumah	Persen	82.67	81.51
2.		Persentase Luas Kawasan Kumuh	Jumlah Luas Permukiman Kumuh terhadap Jumlah Luas Permukiman dan Perumahan	Persen	44.99	71.96
3		Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi Layak	Jumlah Penduduk terlayani Akses air Limbah Layak x 100 % Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang	Persen	1.57	1.01
4	Mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Persentase Sengketa Pertanahan yang difasilitasi	Jumlah Kasus yang ditangani x 100 % Jumlah Kasus	Persen	100	100
5		Persentase (Jumlah Bidang) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang difasilitasi	Jumlah Luasan Bidang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persen	85.63	96.46

Sumber : Analisis Bapppeda 2023

Beberapa indikator utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan capaiannya belum memenuhi target yang ditentukan, salah satu indikator yang belum tercapai ialah Persentase Luas Kawasan Kumuh. Faktor penghambat pencapaian indikator tersebut erat kaitannya dengan ketidaktercapaian indikator

Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi Layak, dikarenakan salah satu kriteria permukiman kumuh adalah peningkatan dalam penyediaan akses sanitasi layak di masyarakat dan dalam hal ini cakupan pelayanan akses sanitasi layak di Kabupaten Sumedang masih belum optimal sehingga berdampak pada aspek lingkungan dan kualitas hidup, selain itu juga factor social budaya, penyediaan sarana dan prasarana, tingkat urbanisasi, dan penyempitan lahan di perkotaan menjadi penyebab lainnya.

Tabel 2.75
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar dibagi Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial kebutuhan dasar x 100 %	Persen	65	86.33

Sumber : Analisis Bappppeda 2023

Capaian Dinas Sosial dari Seluruh Indikator Kinerja Utama Melebihi 100.00 Persen dengan Capaian 86,33% dari Target 65% pada Tahun 2022. Data ini menunjukkan tidak ada kendala dalam pelaksanaan.

Tabel 2.76
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Jumlah Tenaga	Persentase Pencari kerja		Persen	20	40

	Kerja yang ditempatkan	yang terdaftar dan ditempatkan				
2.	Meningkatnya Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial		Persen	100	100
3.	Meningkatnya Penempatan Transmigran	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan		KK	5	0

Capaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 66.67 Persen, adapun Indikator yang belum mencapai target yaitu Indikator Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan capaiannya yaitu 0 persen. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2022 tidak ada penempatan transmigrasi di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.77
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Optimalnya Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah		Persen	73	100
2.		Persentase pengurangan sampah		Persen	26	20,04
3.	Menurunnya Tingkat Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Dampak Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IKA = 100 - \left(\frac{\sum \text{Sample IPA} > 1}{\sum \text{Sampel}} \times 100 \right)$ Merupakan Status mutu air yaitu tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan	Poin	48,69	93,88

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
			membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan			
4.		Indeks Kualitas Udara (IKU)		Poin	81,09	100
5.		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		Poin	59,86	98,26

Capaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 82,44 Persen, walaupun masih terdapat indikator yang belum mencapai target yaitu Persentase Pengurangan Sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan Kembali sampah menjadi salah satu penghambat pencapaian indikator ini.

Tabel 2.78
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Terwujudnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Skor/Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Poin	91	90,68
2.		Persentase Kependudukan Dokumen Kependudukan	Jumlah Kartu Keluarga yang <u>diterbitkan</u> x 100% Jumlah Pemohon Kartu keluarga Jumlah KTP yang <u>diterbitkan</u> x 100% Jumlah Pemohon KTP Jumlah KIA yang <u>diterbitkan</u> x 100%	Persen	97	99,98

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
			Jumlah Pemohon KIA			
3.		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah Akte Kelahiran 0- 18 Tahun yang <u>diterbitkan</u> x 100% Jumlah Pemohon Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun Jumlah Akte Kematian yang <u>diterbitkan</u> x 100% Jumlah Pemohon Akta Kematian Jumlah Akta Perkawinan non Muslim yang <u>diterbitkan</u> x 100% Jumlah Pemohon Pasangan Nikah Non Muslim	Persen	92	98,33

Capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 99,88 Persen, adapun Indikator yang belum mencapai target yaitu Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan dengan capaian kinerja 90,68 persen, indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan karena adanya keluhan masyarakat terhadap jumlah antrian pelayanan Adminduk di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang yang terbatas serta kurangnya sosialisasi terkait dengan berbagai aplikasi pelayanan Adminduk secara online.

Tabel 2.79
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	Persentase status Desa Mandiri	umlah Desa (Berkembang+Cepat Berkembang) x 100% Jumlah Desa (270 Desa)	Persen	30,74	30
2.		Persentase Status Desa Maju	Jumlah BUMDes (Maju+Berkembang) x 100% Jumlah BUMDes (270 Desa)	Persen	52,22	54,81
3.		Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan	Jumlah Bobot Seluruh Desa (*Jumlah Desa (270 Desa)) Keterangan* 1. Penetapan APBDES Tepat Waktu (20%) 2. Perencanaan telah menggunakan Siskeudes (15%) 3. Penganggaran telah menggunakan Siskeudes (15%) 4. Penatausahaan telah menggunakan siskeudes (15%) 5. Pelaporan telah menggunakan siskeudes (15%) Operator telah terlatih menggunakan siskeudes (20%)	Persen	20	20

Capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 99.20 Persen. Adapun faktor yang mendorong pencapaian tersebut adalah peran pemerintah desa yang signifikan terhadap pembangunan desanya melalui peningkatan infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Tabel 2.80
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Optimalisasi Pengendalian Penduduk Melalui KB	Total Fertility Rate (TFR)		Kelahiran	2.07	2.08
2.	Meningkatnya Kemandirian Keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera		Persen	3,97	2.84
3.		Persentase Keluarga Sejahtera 1		Persen	17,09	15.41
4.	Meningkatnya Perlindungan Serta Pemberdayaan Perempuan dan Anak Secara Optimal	Persentase Perempuan Yang Mampu Memenuhi Kehidupan Keluarga		Persen	22,65	1.91
5.		Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan		Persen	0,003	0.003
6.		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak		Persen	0,005	0.018
7.		Kabupaten Layak Anak	Skor KLA yang diperoleh		Persen	750

Capaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 75.10 Persen, adapun indikator yang belum mencapai target, antara lain :

- a. Indikator Persentase Perempuan yang Mampu Memenuhi Kehidupan Keluarga, indikator ini tidak dapat mencapai target diasumsikan karena masih rendahnya latar belakang Pendidikan, masih rendahnya pemberdayaan perempuan dalam sector formal

ataupun informal terutama dalam hal peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta kewirausahaan.

- b. Indikator Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak, indikator ini tidak dapat mencapai target karena 1) masih rendahnya bimbingan dan pembinaan terhadap keluarga dalam mendidik anak dan membina keluarga; dan 2) belum tersedianya legalitas atau kebijakan perlindungan anak (pencegahan pelecehan seksual dan perundungan) di lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat.
- c. Indikator Kabupaten Layak Anak, indikator ini tidak dapat mencapai target karena masih terdapat kekurangan yang harus dipenuhi dalam syarat penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
- d. Indikator Total Fertility Rate (TFR), indikator ini tidak mencapai target yang telah ditentukan karena 1) masih tingginya angka drop out akseptor; 2) masih rendahnya angka kesertaan KB; dan 3) masih tingginya angka kelahiran menurut umur.

Tabel 2.81
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Fasilitas Penunjang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Cakupan Kelancaran , Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Pemasangan Pemasangan Jalan/Target Kebutuhan Perlengkapan Jalan x 100 % Jumlah Kendaraan yang diuji /registrasi per tahun x 100 % Jumlah Kendaraan Wajib Uji / Registrasi per Tahun Jumlah Jaringan Manajemen Rekayasa yg direalisasikan /Jumlah Jaringan Manajemen Rekayasa Lalu	Persen	64,96	85,22

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
			Lintas Ruas Jalan x100 %			

Capaian Dinas Perhubungan dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

Tabel 2.82
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat dalam memahami program - program unggulan bupati dan wakil bupati Sumedang	Jumlah koresponden yg memahami Jumlah koresponden yg ada X100% (Sesuai kesepakatan dengan pihak BAPPPPEDA Kab. Sumedang)	Persen	50	74,29
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	Penjumlahan dari Setiap Nilai Indikator yang dihitung X nilai tingkat kematangan dan bobot indicator (Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2018 KEMENPAN RB)	Poin	4,1	3,84
3.	Tingkat Kemanaan Informasi Pemerintah Daerah	Score Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Penjumlahan dari Setiap Nilai Indikator yang dihitung X nilai tingkat kematangan dan bobot indicator	Skor	350	395

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
			Penilaian dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN-RI)			
4.	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Ketersediaan data sesuai dengan standar	Jumlah Dataset yg masuk/ada Jumlah Dataset yg harus ada X 100%	Persen	100	100

Capaian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dari Seluruh Indikator Kinerja Utama mencapai 98.41 persen, adapun indikator yang belum mencapai target yaitu indikator Nilai SPBE, karena berdasarkan hasil reuiu yang dilakukan oleh Kemenpan RB masih terdapat beberapa indikator yang harus diperbaiki ataupun dilengkapi kekurangannya sehingga sesuai dengan penilaian per kategorinya.

Tabel 2.83
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Terwujudnya Koperasi Modern di Kabupaten Sumedang	Jumlah Koperasi Yang Modern	Jumlah Koperasi Modern Thn (n)	Koperasi	2	2
2.	Meningkatnya Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omset	Jumlah Usaha Mikro Thn (n)	UMKM	1000	1000
3.	Peningkatan Volume Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil	Jumlah Kontribusi PDRB dari: <u>Sektor Perdagangan</u> Jumlah Total PDRB x 100%	Persen	1,55 – 2,77	2,78

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
		dan Sepedah Motor				
4.	Peningkatan Unit Usaha Industri Baru	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengelolaan	$\frac{\text{PDRB Industri t-1}}{\text{PDRB Industri t-1}} \times 100 \%$	Persen	2,20 – 4,15	3,12

Capaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 93.80 Persen, adapun Indikator yang belum mencapai target yaitu indikator Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengelolaan.

Tabel 2.84
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang	Rupiah (Juta)	1.927.391	3.015.703
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Poin	88,31	88,61

Capaian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

Tabel 2.85
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Peran Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang ada dibagi Jumlah Organisasi yang dibina	Persen	100	100
2.	Meningkatnya Capaian Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi dan Memperoleh Medali dan Penghargaan Atlet	Jumlah Perolehan Medali yang mendapatkan medali/penghargaan pada penyelenggaraan	Orang	20	15
3.	Meningkatnya Ketahanan Budaya Daerah	Cakupan Perlindungan/ Pengembangan/ Pemanfaatan / Pembinaan Kebudayaan	Jumlah OPK dibagi Jumlah OPK yang dilindungi/dilestarikan/dikembangkan dan dimanfaatkan	Persen	100	100
4.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Data Jumlah Wisatawan yang berkunjung	Orang	700.000	1.293.953
5.	Mengembangkan SubSektor Ekonomi Kreatif	Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Jumlah Sub Sektor dibagi Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina/dikembangkan	Persen	100	100

Capaian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 90,10 Persen, adapun indikator yang belum mencapai target, diantaranya:

- a. Indikator Persentase organisasi kepemudaan yang aktif, ketidaktercapaian pada indikator ini karena 1) belum optimalnya sistem manajemen data bidang kepemudaan serta tata kelola induk organisasi kepemudaan; 2) Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan; 3) Rendahnya partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan.

- b. Indikator Jumlah Atlet berprestasi dan Memperoleh Medali dan Penghargaan Atlet, pada indikator ini belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena 1) Belum optimalnya penyelenggaraan event-event keolahragaan yang dilaksanakan; 2) Semakin ketatnya penyeleksian atlet cabor yang dilakukan oleh KONI.

Tabel 2.86
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal	Jumlah seluruh nilai pengawasan internal perangkat daerah dibagi dengan jumlah perangkat daerah	Kategori	BB	B
2.	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi dengan Jumlah Penduduk kemudian dikalikan 100% Keterangan : UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan berSNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan	Poin	11,08	12,16

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
3.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk + Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat + Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk + Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Poin	50,50	48.71

Capaian Dinas Arsip dan Perpustakaan dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 98.81 Persen, adapun Indikator yang belum mencapai target, diantaranya:

- a. Indikator Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat, faktor penghambat dalam pencapaian kinerja pada target yang telah ditetapkan yaitu 1) Pelaksanaan kegiatan tingkat kegemaran membaca menggunakan sistem survei sehingga masyarakat tidak seluruhnya mengisi kuesioner yang disebarakan sehingga kami mengambil sampel sebanyak 400 responden, 2) belum adanya sosialisasi tentang budaya baca melalui perpustakaan digital yang telah diperkenalkan sejak tahun 2021 dalam Upaya pelayanan bidang perpustakaan selama pandemi berlangsung; 3) masih rendahnya minat baca masyarakat.
- b. Indikator Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal, ketidaktercapaian pada indikator ini karena 1) Jumlah fungsional arsiparis di Kabupaten Sumedang masih sedikit sehingga di setiap Perangkat Daerah belum tersedia arsiparis; 2) Tidak tersedianya sarana prasarana kearsipan sesuai standar nasional, 3) Masih rendahnya perhatian pimpinan Perangkat daerah terhadap kearsipan.

Tabel 2.87
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Jumlah Produksi Komoditas pertanian :		Ton	903.027	
2.		A. Tanaman Pangan:	Menjumlahkan produksi padi dan tanaman pangan lainnya dari tiap kecamatan	Ton	647.544	636.114
3.		- Padi	Menjumlahkan produksi padi (sawah dan ladang) dari tiap kecamatan	Ton	414.398	457.401
4.		- Jagung	Menjumlahkan produksi jagung (sawah dan ladang) dari tiap kecamatan	Ton	117.816	64.954
5.		- Tanaman Pangan Lainnya	Menjumlahkan produksi kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan talas dari tiap kecamatan	Ton	115.330	113.759
6.		B. Hortikultura	Menjumlahkan produksi sayuran, buah-buahan, tanaman obat dan tanaman hias dari tiap kecamatan	Ton	247.937	266.096
7.		C. Perkebunan	Menjumlahkan produksi tanaman tahunan (kopi, kelapa, kakao, cengkeh, teh, aren) dan tanaman semusim (tembakau, lada, vanili) dari tiap kecamatan	Ton	7.547	8.505
8.	Menjamin Ketersediaan Pangan Pokok	Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok	Ketersediaan pangan pokok =	Kg/ Kapita/ tahun	216	259,6

Capaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 94.00 Persen, adapun Indikator yang belum mencapai target, diantaranya:

- a. Indikator Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Jagung belum mencapai sesuai target yang telah ditetapkan karena tingginya harga benih jagung yang mengakibatkan timbulnya ketergantungan petani terhadap bantuan benih jagung dari pemerintah, hal ini mengakibatkan berkurangnya luas tanam jagung.
- b. Indikator Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Lainnya belum mencapai target yang sudah ditetapkan disebabkan oleh penurunan produktivitas dari komoditas tanaman pangan karena curah hujan yang tinggi, serta menurunnya minat petani dalam usaha budidaya komoditas tanaman pangan selain padi dikarenakan harga jual yang rendah.

Tabel 2.88
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Terwujudnya Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdayasaing	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Tercatat	Ton	1.400,54	1.409,36
2.		Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang Tercatat	Ton	8.241,16	8.411,71
3.	Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan	$((\text{Populasi Ternak \& Produksi Peternakan Tahun } n - \text{Populasi Ternak \& Produksi Peternakan Tahun } n-1) / \text{Populasi Ternak \& Produksi Peternakan Tahun } n-1) \times 100 \%$	Persen	5,18	5,86
4.	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada	Persentase Wilayah yang Terkendali dari	$(\text{Jumlah Kecamatan yang terkendali dari PHMS} / \text{Jumlah})$	Persen	80,8	84,62

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
	Tanaman Serta Penyakit pada Hewan	Penyakit Hewan Menular Strategis	Kecamatan Keseluruhan) X 100 %			

Capaian Dinas Perikanan dan Peternakan dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

Tabel 2.89
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{(X1 + X2 + X3)}{3} \times 100\%$ <p>X1 = <u>Jumlah Sasaran Renstra Tahun Berkenaan</u> x 100% Jumlah Sasaran RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan</p> <p>X2 = <u>Jumlah Sasaran RKPD Tahun Berkenaan</u> x 100% Jumlah Sasaran RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan</p> <p>X3 = <u>Jumlah Sasaran Renja Tahun Berkenaan</u> x 100% Jumlah Sasaran RKPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan</p>	Persen	100	100
2.		Tingkat Ketercapaian	<u>Realisasi Pembangunan</u>	Persen	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
		Target Pembangunan Daerah yang Berkategori "Baik"	<u>Daerah Tahun Berkenaan</u> Target Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan			
3.	Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan	Jumlah Penelitian dan pengembangan yang <u>diimplementasikan</u> (n) x 100% Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan (n-1)	Persen	100	100

Capaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

Tabel 2.90
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, Disiplin ASN dan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Sistem Merit	Penilaian Secara Online melalui Situs SIPINTER (https://sipinter.kasn.go.id)	Poin	315	328,5
2.		Indeks Profesionalitas ASN	Penilaian Secara Online melalui Situs DJASN (https://ip-jasn.bkn.go.id)	Poin	74	63,78

Capaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu 93.09 Persen, adapun Indikator yang belum mencapai target yaitu Indikator Indeks

Profesionalitas ASN ketidaktercapaian pada indikator ini karena Masih dalam proses penilaian.

Tabel 2.91
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Hasil Opini BPK (Opini yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya)	Kategori	WTP	WTP
2.		Penetapan APBD	Tepat waktu atau tidak tepat Waktu (penetapan APBD tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Pedoman penyusunan APBD Yang dikeluarkan oleh Kemendagri	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Capaian Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

Tabel 2.92
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Realisasi Pendapatan	Persen	17,77	18,22

Capaian Badan Pendapatan Daerah dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

Tabel 2.93
Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Terciptanya Kondisi Wilayah yang aman, nyaman, tertib, teratur, dan tentram	Cakupan Penanganan Penyelenggaraan K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban)	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3}}{\text{Jumlah Penyelesaian}} \times 100 \%$	Persen	100	100
2.	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran}}{\text{Jumlah Penanganan Kebakaran}}$	Persen	90	72,73

Capaian Satuan Polisi Pamong Praja dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

Tabel 2.94
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Negara Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	Penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana Formulasi : Tool IKD BPBD Provinsi Jawa Barat	Poin	0,49	0,49
2.		Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	$100 \% - \frac{\text{kejadian (kejadian konflik) / Potensi Konflik}}{100\%}$	Persen	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
3.	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengurus atau Anggota Partai Politik dalam Kehidupan Berdemokrasi	Tingkat Bina Demokratisasi	Jumlah Parpol yang mengikuti Pembinaan / Jumlah Total Anggota Parpol x 100%	Persen	100	100

Capaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

Tabel 2.95
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 (SESUDAH PERUBAHAN)	CARA PENGUKURAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Negara Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Bermasyarakat	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100 % - kejadian (kejadian konflik) / Potensi Konflik) x 100%	Persen	100	100
2.	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengurus atau Anggota Partai Politik dalam Kehidupan Berdemokrasi	Tingkat Bina Demokratisasi	Jumlah Parpol yang mengikuti Pembinaan / Jumlah Total Anggota Parpol x 100%	Persen	100	100

Capaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari Seluruh Indikator Kinerja Utama yaitu sudah mencapai 100 Persen.

Tabel 2.96
Rekapitulasi Capaian indikator Program dan Kegiatan
RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA Triwulan IV TAHUN 2022	
						K	Rp (%)
1	DINAS PENDIDIKAN	951.076.053.059	921.338.161.139	2	11	97.10	96.87
2	DINAS KESEHATAN	202.182.354.205	194.943.617.811	6	14	97.32	96.42
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	231.679.963.244	231.679.963.244	2	2	100	100.00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	119.569.214.792	118.849.713.052	9	19	99.39	99.39
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	33.694.911.521	33.494.816.470	9	18	95.80	91.41
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18.804.492.196	17.548.362.049	3	10	100	93.32
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.470.429.973	5.404.732.827	2	10	100	98.80

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA Triwulan IV TAHUN 2022	
						K	Rp (%)
7	DINAS SOSIAL	20.319.198.693	19.742.433.245	6	14	100	97.16
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11.929.425.312	11.399.752.486	6	17	96.67	95.56
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	28.456.886.374	26.619.548.956	9	14	92.44	91.54
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.846.994.528	9.374.882.887	4	13	99.88	95.21
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.002.583.337	13.352.118.087	4	9	99.20	95.35
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	28.513.095.043	27.591.037.678	8	19	95.10	94.77

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA Triwulan IV TAHUN 2022	
						K	Rp (%)
13	DINAS PERHUBUNGAN	25.596.576.075	24.023.544.067	2	16	100	93.85
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	15.803.246.259	14.998.542.704	5	12	98.41	94.91
15	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	16.154.849.476	15.421.965.847	9	19	93.80	92.46
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.889.657.948	9.304.073.425	6	13	100	94.08
17	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	9.139.862.732	8.591.449.272	4	14	98.80	94.00
18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	18.370.432.156	17.450.996.656	9	17	100	95.00
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,	15.930.722.026	15.250.238.766	11	26	90.14	90.04

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA Triwulan IV TAHUN 2022	
						K	Rp (%)
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	50.861.473.969	49.496.900.709	8	19	94.00	93.32
21	INSPEKTORAT	21.316.452.663	19.908.537.825	3	11	100	93.37
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	17.374.936.484	16.286.671.090	4	18	100	93.74
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	18.743.177.477	17.520.822.646	2	9	100	93.48
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	551.592.509.550	549.968.918.734	3	13	100	99.71
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.601.778.932	13.943.915.105	2	11	93.09	92.49
26	SEKRETARIAT DAERAH	69.181.900.648	65.752.897.668	3	19	98.80	95.04
27	SEKRETARIAT DPRD	67.781.537.600	62.862.166.446	2	16	100	92.74

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA Triwulan IV TAHUN 2022	
						K	Rp (%)
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.495.278.080	11.974.733.775	6	12	100	95.83
29	KECAMATAN BUAHDUA	3.151.546.497	2.963.526.309	6	13	100	94.03
30	KECAMATAN CIBUGEL	3.109.998.601	2.902.540.427	6	13	100	93.33
31	KECAMATAN CIMALAKA	3.521.009.468	3.276.553.238	6	13	100	93.06
32	KECAMATAN CIMANGGUNG	3.693.584.808	3.440.064.753	6	13	100	93.14
33	KECAMATAN CISARUA	3.622.291.776	3.376.490.029	6	13	100	93.21
34	KECAMATAN CISITU	3.248.044.716	3.021.205.199	6	13	100	93.02
35	KECAMATAN CONGGEANG	3.395.261.280	3.162.124.970	6	16	100	93.13
36	KECAMATAN DARMARAJA	4.029.654.453	3.828.196.242	6	14	100	95.00
37	KECAMATAN GANEAS	2.875.543.844	2.679.829.831	6	13	100	93.19
38	KECAMATAN JATIGEDE	3.852.835.208	3.565.747.845	6	14	100	92.55

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA Triwulan IV TAHUN 2022	
						K	Rp (%)
39	KECAMATAN JATINANGOR	4.377.566.608	4.106.020.771	6	15	100	93.80
40	KECAMATAN JATINUNGGAL	2.964.691.672	2.819.080.670	6	14	100	95.08
41	KECAMATAN PAMULIHAN	3.820.037.912	3.588.329.647	6	15	100	93.93
42	KECAMATAN PASEH	3.462.279.373	3.296.842.041	6	13	100	95.22
43	KECAMATAN RANCAKALONG	3.481.861.400	3.313.714.495	6	15	100	95.17
44	KECAMATAN SITURAJA	3.785.545.728	3.531.037.321	6	15	100	93.28
45	KECAMATAN SUKASARI	3.336.333.972	3.103.686.346	6	14	100	93.03
46	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	10.966.886.080	10.542.078.642	6	15	100	96.13
47	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	9.469.009.156	8.885.004.842	6	14	100	93.83
48	KECAMATAN SURIAN	3.068.590.196	2.856.177.137	6	14	100	93.08
49	KECAMATAN TANJUNGPURA	3.207.373.052	2.988.702.541	6	14	100	93.12

NO	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA Triwulan IV TAHUN 2022	
						K	Rp (%)
50	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	3.030.926.388	2.882.795.077	6	14	100	95.11
51	KECAMATAN TANJUNGSARI	3.967.488.288	3.695.758.201	6	14	100	93.15
52	KECAMATAN TOMO	2.778.081.392	2.587.622.632	6	14	100	93.14
53	KECAMATAN UJUNGJAYA	3.727.583.656	3.366.428.800	6	14	100	90.31
54	KECAMATAN WADO	3.055.173.393	2.914.476.465	6	13	100	95.39
JUMLAH		2.795.322.749.856	2.722.728.104.724			98.92	97.40

1. Dinas Pendidikan

Pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan melaksanakan 2 program dan 11 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.951.076.053.059,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pendidikan mencapai 96.87% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 97.10% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Pengelolaan Pendidikan terdapat sub kegiatan yang belum mampu mencapai target hal tersebut dikarekan hasil evaluasi Dinas Pendidikan ada sebanyak 8 SD dan 4 SMP dinyatakan Jauh di bawah kompetensi minimum dan sebanyak 24 SD dan 4 SMP Jauh di bawah kompetensi minimum, dan tindak lanjut Dinas Pendidikan dalam perbaikan pencapaian kinerja pada kegiatan tersebut yaitu melakukan pembinaan dan pendampingan.

2. Pada Tahun 2022 Dinas Kesehatan melaksanakan 6 program dan 14 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.202.182.354.205,00 (Dua Ratus Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Kesehatan mencapai 96.42% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 97.32% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdapat kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, hal tersebut tidak mencapai target karena Sebagian besar kematian ibu disebabkan karena adanya faktor resiko, yaitu usia ibu > 35 tahun, jumlah kehamilan > 3, Ibu dengan penyakit penyerta (Hypertensi, HIV, DBD, Covid-19), pada sub kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan pada sub kegiatan tersebut belum mencapai target dikarenakan Belum semua pelanggan /pasien yang mengakses survei kepuasan masyarakat melalui barcode paham cara penggunaannya dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Ada beberapa unit pelayanan yang belum memenuhi target unsur pelayanan dikarenakan pandemic covid 19, ada beberapa peraturan yang yang memang perlu ditekankan seperti pembatasan jumlah pasien rawat jalan, pembatasan waktu dan jumlah kunjungan pada pasien rawat inap serta penutupan sementara pelayanan baik IGD maupun instalasi lainnya, dan pada Program Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan yaitu pada kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan pada sub Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, ketidak tercapaian indikator kinerja program tersbut dikarenakan Masih tingginya rumah tangga dengan katagori tidak sehat berdasarkan indikator merokok di dalam ruangan.

3. Pada Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan 9 program dan 19 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.119.569.214.792,00 (Seratus Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mencapai 99.39% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 99.39% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan

pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

4. Pada Tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 9 program dan 18 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.33.694.911.521,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencapai 91.41% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 95.80% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum tercapainya target pada program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota hal tersebut disebabkan karena berbenturan dengan masyarakat dengan sumber daya manusia tidak menggunakan pekerja setempat dalam pelaksanaan pengerjaan rumah tidak layak huni.
5. Pada Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 3 program dan 10 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.18.804.492.196,00 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Juta Empat ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja mencapai 93.32% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 pada realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Pada Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 program dan 10 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.5.470.429.973,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan

Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencapai 98.80% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

7. Pada Tahun 2022 Dinas Sosial melaksanakan 6 program dan 14 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.20.319.198.693,00 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Sosial mencapai 97.16% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 pada realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial.
8. Pada Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 6 program dan 17 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.11.929.425.312,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencapai 95.56% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 96.67% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum tercapainya target pada program Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk sub kegiatan Pindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

hal ini disebabkan karena Pada Tahun 2022 tidak ada Penempatan Transmigrasi.

9. Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan 9 program dan 14 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.28.456.886.374,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai 91.54% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 92.44% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Pada Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 4 program dan 13 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.9.846.994.528,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 95.21% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 99.88% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. Pada Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 4 program dan 9 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.14.002.583.337,00 (Empat Belas Miliar Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai 95.35% atau

masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 99.20% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

12. Pada Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 8 program dan 19 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.28.513.095.043,00(Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai 94.77% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 95.10% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) pada kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal belum mencapai target hal tersebut disebabkan karena masih tingginya angka Pasangan Usia Subur muda dan masih cukup tinggi angka kelahiran, pada program Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota program tersebut belum memenuhi target karena Masih rendahnya perempuan yang mandiri, pada program Program Perlindungan Perempuan pada kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota pada program ini belum mencapai target karena Tingginya kasus

kekerasan terhadap anak sehingga dapat melebihi angka semula yang telah di targetkan.

13. Pada Tahun 2022 Dinas Perhubungan melaksanakan 2 program dan 16 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.25.596.576.075,00 (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Perhubungan mencapai 93.85% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
14. Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.15.803.246.259,00 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mencapai 94.91% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 98.41% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
15. Pada Tahun 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan 9 program dan 19 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.16.154.849.476,00 (Enam Belas Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

mencapai 92.46% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 93.80% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri belum mencapai target yang dipengaruhi oleh sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri hal tersebut disebabkan karena peningkatan unit usaha baru dalam sub kegiatan ini data yang ada masih perlu di perbaharui.

16. Pada Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.9.889.657.948,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencapai 94.08% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
17. Pada Tahun 2022 Dinas Arsip dan Perpustakaan melaksanakan 4 program dan 14 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.9.139.862.732,00 (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan mencapai 94.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 98.80% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum

mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Pembinaan Perpustakaan belum mencapai target hal tersebut dipengaruhi oleh sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan kegiatan tingkat kegemaran membaca menggunakan sistem survei sehingga masyarakat tidak seluruhnya mengisi kuisioner yang disebarluaskan sehingga kami mengambil sampel sebanyak 400 responden, belum adanya sosialisasi tentang budaya baca melalui media digital, pada tahun 2021-2022 masih terkendala dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga perpustakaan daerah belum melayani masyarakat secara optimal, dan pada Program Pengelolaan Arsip belum mencapai target yang telah ditetapkan hal tersebut dipengaruhi oleh sub kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis hal tersebut disebabkan karena Belum tersebarnya arsiparis di OPD, Tidak Tersedianya sarana prasarana kearsipan sesuai standar nasional Masih Rendahnya perhatian pimpinan SKPD terhadap kearsipan.

18. Pada Tahun 2022 Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan 9 program dan 17 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.18.370.432.156,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan mencapai 95.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan.
19. Pada Tahun 2022 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan 11 program dan 26 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.15.930.722.026,00 (Lima Belas Milyar

Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Puluh Enam Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mencapai 90.04% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 90.14% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan belum mncapai target yang telah ditentukan hal tersebut dipengaruhi oleh sub kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota hal ini disebabkan karena Belum Optimalnya Sistem manajemen data dan informasi bidang kepemudaan, Belum Optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan; dan Belum optimalnya tata kelola induk organisasi kepemudaan, dan ketidak tercapaian pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dipengaruhi oleh sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota hal ini disebabkan karena Belum optimalnya penyelenggaraan event-event keolahragaan yang dilaksanakan.

20. Pada Tahun 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan 8 program dan 19 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.50.861.473.969,00 (Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencapai 93.32% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 94.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian belum mencapai target yang telah ditetpkan hal ini dipengaruhi oleh kegiatan Pengembangan

Prasarana Pertanian dan Pembangunan Prasarana Pertanian hal ini disebabkan karena Penurunan luas tanam jagung dikarenakan ketergantungan petani terhadap bantuan benih jagung dari pemerintah, ketergantungan ini disebabkan oleh harga benih jagung yang tinggi, dan Penurunan produktivitas dari komoditas tanaman pangan lainnya karena curah hujan yang tinggi serta menurunnya minat petani dalam usaha budidaya ubi kayu dikarenakan harga jual rendah, sehingga program tersebut belum dapat mencapai target.

21. Pada Tahun 2022 Inspektorat melaksanakan 3 program dan 11 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.21.316.452.663,00 (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Inspektorat mencapai 93.37% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sumedang.
22. Pada Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 4 program dan 18 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.17.374.936.484,00 (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mencapai 93.74% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

23. Pada Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.18.743.177.477,00 (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sempat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah mencapai 93.48% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
24. Pada Tahun 2022 Badan Keuangan Dan Aset Daerah melaksanakan 3 program dan 13 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.551.592.509.550,00 (Lima Ratus Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah mencapai 99.71% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
25. Pada Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 2 program dan 11 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.14.601.778.932,00 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mencapai 92.49% atau

masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 93.09% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Kepegawaian Daerah capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan hal tersebut juga dipengaruhi oleh kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN pada kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditentukan karena dalam kegiatan tersebut ada aktifitas penilaian peningkatan kompetensi yang telah diinput dalam Situs DJASN BKN dan peningkatan kompetensi tersebut masih dalam proses penilaian, sehingga mengakibatkan dalam kegiatan ini belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

26. Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program dan 19 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.69.181.900.648,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Sekretariat Daerah mencapai 95.04% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 98.80% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang belum mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada program tersebut belum dapat mencapai target dan dipengaruhi oleh salah satu kegiatan Fasilitasi Kerjasama pada kegiatan ini belum dapat mencapai target dikarenakan Masih rendahnya respon Perangkat Daerah terkait potensi Kerjasama daerah yang bisa ditindaklanjuti, kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memenuhi kompetensi, dll. Program Perekonomian dan Pembangunan belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 hal tersebut dipengaruhi salah satunya oleh kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ketidak tercapaian dalam kegiatan ini disebabkan karena tingkat kematangan UKPBJ" tidak tercapai

(target level 4, realisasi level 2) dikarenakan kurangnya SDM bidang Barang/Jasa, dll, dan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ketidak tercaoaian program ini dipengaruhi oleh kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi ketidak tercapaian kegiatan tersebut dikarenakan "indeks reformasi birokrasi" tidak tercapai (target 80.00 poin, realisasi 71.82 poin) dikarenakan data yang tersedia kurang memadai, dll sehingga pada program tersebut belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

27. Pada Tahun 2022 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program dan 16 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.67.781.537.600,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Sekretariat DPRD mencapai 92.74% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD.
28. Pada Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 program dan 12 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.12.495.278.080,00 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai 95.83% atau masuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (output) mencapai 100.00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ketercapaian yang sudah mencapai 100.00% pada capaian Tahun 2022 baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena sudah optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi setiap tahun yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang disusun berdasarkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda yang disusun berdasarkan Nota Kesepakatan KUA serta PPA dan berpedoman Kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan, dan aspek belanja, dan aspek pembiayaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Aspek Pendapatan terdiri dari:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Dana Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.
2. Aspek Belanja Terdiri dari:
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Subsidi;
 - c. Belanja Hibah;
 - d. Belanja Bantuan Sosial;
 - e. Belanja Modal;
 - f. Belanja Tidak Terduga; dan
 - g. Belanja Transfer.
3. Aspek Pembiayaan Terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Perencanaan pembangunan daerah perlu mempertimbangkan keuangan daerah dengan menganalisis pengelolaan keuangan daerah yang ada pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang tahun 2024-2026 ini dilakukan analisis terhadap kinerja APBD dan neraca keuangan daerah tahun 2018-2023.

Pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada Tahun 2020 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana secara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mendapatkan reuiu dari BPK RI dengan hasil Opini BPK berupa “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi keuangan Pemda Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan merupakan salah satu bukti kualitas pengelolaan keuangan Pemda Kabupaten Sumedang yang baik. Secara umum, komponen APBD Kabupaten Sumedang terdiri atas:

1. Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
2. Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Subsidi, Belanja Modal, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer; dan
3. Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kinerja pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan negara di daerah diantaranya ditunjukkan dengan ;

1. Kepatuhan Terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ditunjukkan dengan Penetapan APBD Tepat waktu Pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.
2. Pencapaian Indikator Opini BPK. Selama periode 2015- 2021, Pemda Kabupaten Sumedang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Kinerja Keuangan Lima Tahun kebelakang terdapat perbedaan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, namun Tahun 2021 dan Tahun 2022 telah dikonversikan kedalam struktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan

lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun anggaran 2022 dapat dilihat Bahwa:

1. Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Sumedang (1,27)% hal ini akibatnya adanya dampak covid pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 yang mengakibatkan terkontraskimya perekonomian nasional dan daerah, hal ini menyebabkan roda perekonomian melambat yang secara langsung berdampak terhadap penerimaan daerah baik pada sektor pendapatan asli daerah maupun kemampuan dana transfer pemerintah pusat.
2. Pada sektor Belanja terdapat pertumbuhan yang sangat signifikan pada belanja sosial dan belanja tidak terduga, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang secara berkelanjutan melakukan intervensi terhadap dampak penyebaran covid -19, adapun Pertumbuhan Pada Belanja tidak terduga sangat besar hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian serta Fleksibilitas dalam penanganan dampak covid 19 serta mengakomodir kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam pemulihan ekonomi atas dampak dari penyebaran covid -19.

Adapun Kinerja keuangan Tahun Anggarn 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2017 Sampai dengan Tahun 2022

NO	Uraian	REALIASI						PERTUMBUHAN
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 * unaudit	%
1	Pendapatan Asli Daerah	553.257.332.797,18	432.181.933.419,04	463.528.449.322,47	444.430.247.449,44	470.281.819.936,29	518.977.017.762,84	(1,27)
1.1	Pajak Daerah	157.256.500.230,00	188.935.600.771,00	205.521.153.763,00	180.222.612.157,00	198.326.131.839,00	221.379.897.839,00	7,08
1.2	Retribusi Daerah	11.985.080.540,00	11.186.704.824,00	10.263.528.592,00	8.300.206.720,00	6.731.513.966,00	9.276.102.181,00	(5,00)
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	7.846.040.130,00	8.659.141.530,00	9.727.083.922,00	10.929.327.383,00	11.164.520.965,00	12.643.497.231,00	10,01
1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	376.169.711.897,18	223.400.486.294,04	238.016.683.045,47	244.978.101.189,44	254.059.653.166,29	275.677.520.511,84	(6,03)
Kontribusi pad terhadap Pendapatan		20,81	15,72	15,10	15,30	16,58	17,97	
2	Pendapatan Transfer	2.071.212.093.959,00	2.197.209.580.315,00	2.477.441.508.850,00	2.318.347.156.451,00	2.233.686.395.115,00	2.365.573.220.560,00	2,69
2.1	Pendapatan Transfer Pusat	1.811.817.714.778,00	1.856.138.700.762,00	2.010.347.393.385,00	1.934.732.545.970,00	1.892.016.917.253,00	2.039.555.091.538,00	2,40
2.1.1	Dana Bagi Hasil	95.607.165.916,00	103.162.614.015,00	86.594.143.619,00	97.420.477.270,00	131.182.200.770,00	103.446.216.613,00	1,59
2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.119.198.604.000,00	1.125.798.410.000,00	1.180.828.452.000,00	1.065.253.951.000,00	1.058.905.256.000,00	1.052.231.192.000,00	(1,23)
2.1.3	Dana Alokasi Khusus	379.742.961.862,00	409.715.609.147,00	474.761.839.166,00	465.666.387.700,00	429.547.869.483,00	609.455.496.125,00	9,92
2.1.5	Dana Insentif Daerah	-	25.000.000.000,00	49.222.417.000,00	84.002.531.000,00	45.061.971.000,00	37.001.635.000,00	10,30
2.1.6	Dana Desa	217.268.983.000,00	192.462.067.600,00	218.940.541.600,00	222.389.199.000,00	227.319.620.000,00	237.420.551.800,00	1,79
2.2	Pendapatan Transfer antar Daerah	259.394.379.181,00	341.070.879.553,00	467.094.115.465,00	383.614.610.481,00	341.669.477.862,00	326.018.129.022,00	4,68
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	122.309.363.299,00	138.154.127.057,00	136.437.021.093,00	134.266.775.232,00	138.496.690.338,00	164.239.295.900,00	6,07

NO	Uraian	REALIASI						PERTUMBUHAN
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 * unaudit	%
2.2.2	Bantuan Keuangan	137.085.015.882,00	202.916.752.496,00	330.657.094.372,00	249.347.835.249,00	203.172.787.524,00	161.778.833.122,00	3,37
Kontribusi dana transfer terhadap pendapatan		77,90	79,90	80,71	79,82	78,77	81,91	
3	Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	34.473.960.000,00	120.505.200.000,00	128.579.320.000,00	141.612.082.721,00	131.896.910.224,00	3.411.071.029,00	(37,04)
3.1	Pendapatan Hibah	34.473.960.000,00	120.505.200.000,00	128.579.320.000,00	141.612.082.721,00	131.896.910.224,00	3.411.071.029,00	(37,04)
Kontribusi lain lain terhadap pendapatan		1,30	4,38	4,19	4,88	4,65	0,12	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.658.943.386.756,18	2.749.896.713.734,04	3.069.549.278.172,47	2.904.389.486.621,44	2.835.865.125.275,29	2.887.961.309.351,84	
5	Belanja Daerah							
5.1	Belanja Operasi	1.763.442.461.556,00	1.939.209.336.796,20	2.033.478.659.494,69	1.949.881.150.929,00	1.955.814.792.559,00	1.967.401.426.401,00	2,21
5.1.1	Belanja Pegawai	1.120.921.326.924,00	1.207.726.369.047,00	1.237.660.161.762,00	1.176.209.206.916,00	1.182.261.056.674,00	1.169.624.519.375,00	0,85
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	605.780.947.732,00	667.454.118.674,20	756.858.884.832,69	738.886.933.513,00	709.093.186.272,00	733.747.913.310,00	3,91
5.1.3	Belanja Subsidi	-	0,00	0,00	0,00	0,00	95.782.500,00	
5.1.4	Belanja Bunga	-	0,00	0,00	0,00	500.587.500,00	0,00	
5.1.5	Belanja Hibah	35.249.088.900,00	61.460.999.575,00	35.591.700.000,00	33.562.360.500,00	59.369.641.613,00	57.220.254.016,00	10,17
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.491.098.000,00	2.567.849.500,00	3.367.912.900,00	1.222.650.000,00	4.590.320.500,00	6.712.957.200,00	35,11
Kontribusi Belanja Operasi Terhadap Belanja		67,24	72,09	67,28	67,98	72,11	69,50	
5.2	Belanja Modal	498.572.941.044,00	410.348.713.390,02	605.698.351.012,28	498.497.676.052,00	353.171.282.580,00	470.908.866.968,00	(1,14)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	9.542.001.250,00	1.495.850.000,00	18.722.717.888,00	33.328.265.935,00	734.126.000,00	27.007.255.100,00	23,13

NO	Uraian	REALIASI						PERTUMBUHAN
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 * unaudit	%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.607.831.115,00	153.458.978.889,00	241.517.168.061,00	198.148.478.293,00	114.178.507.498,00	183.985.337.475,00	11,32
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.933.672.273,00	68.450.328.843,00	135.342.553.756,28	142.070.482.407,00	137.937.639.826,00	129.991.095.312,00	11,95
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	269.965.794.218,00	125.051.716.488,00	145.563.152.918,00	68.315.142.935,00	87.697.349.012,00	116.106.286.763,00	(15,53)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.931.946.500,00	8.917.460.300,00	14.605.384.629,00	7.089.359.075,00	12.623.660.244,00	13.275.041.363,00	3,96
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	26.591.695.688,00	52.974.378.870,02	49.947.373.760,00	49.545.947.407,00	0,00	543.850.955,00	(54,06)
Kontribusi Belanja Modal Terhadap Belanja		19,01	15,25	20,04	17,38	13,02	16,64	
5.3	Belanja Tidak Terduga	0,00	71.844.600,00	12.699.900,00	46.401.777.454,00	23.812.747.069,00	2.786.124.220,00	149,55
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	0,00	71.844.600,00	12.699.900,00	46.401.777.454,00	23.812.747.069,00	2.786.124.220,00	149,55
Kontribusi BTT Terhadap Belanja		-	127,65	168,64	141,04	99,24	132,54	
5.4	Belanja Transfer	360.477.725.200,00	340.456.714.540,00	383.432.110.751,00	373.484.680.048,00	379.331.582.631,00	389.605.052.943,00	1,57
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak	12.400.670.000,00	16.954.494.800,00	22.205.040.000,00	19.380.406.816,00	21.817.918.102,00	27.321.453.500,00	17,11
5.4.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi	1.828.815.500,00	1.364.464.000,00	1.133.614.000,00	663.701.000,00	1.623.351.820,00	2.164.870.000,00	3,43
5.4.3	Bantuan Keuangan ke Desa	345.342.361.300,00	321.452.739.940,00	359.171.585.751,00	353.440.572.232,00	355.890.312.709,00	355.289.549.126,00	0,57
5.4.4	Bantuan Keuangan Lainnya	905.878.400,00	685.015.800,00	921.871.000,00	0,00	0,00	4.829.180.317,00	39,75
Kontribusi Belanja Transfer Terhadap Belanja		13,75	12,66	12,69	13,02	13,99	13,76	
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.622.493.127.800,00	2.690.086.609.326,22	3.022.621.821.157,97	2.868.265.284.483,00	2.712.130.404.839,00	2.830.701.470.532,00	1,54

NO	Uraian	REALIASI						PERTUMBUHAN
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 * unaudit	%
SURPLUS /DEFISIT		36.450.258.956,18	59.810.104.407,82	46.927.457.014,50	36.124.202.138,44	123.734.720.436,29	57.259.838.819,84	9,45
6	Pembiayaan Daerah							
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah							
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22.521.812.431,85	47.929.367.789,03	107.166.975.872,67	112.930.843.943,17	117.474.646.639,61	232.339.367.075,90	59,48
6.1.2	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	21.000.000.000,00	124.443.530.800,00	51.000.000.000,00	0,00	0,00	55,84
6.1.3	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00	0,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		22.521.812.431,85	68.929.367.789,03	231.610.506.672,67	163.930.843.943,17	124.474.646.639,61	232.339.367.075,90	59,48
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN							
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan						15.000.000.000,00	
6.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	1.600.000.000,00	11.730.815.171,00	158.688.567.480,00	71.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	44,63
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	2.180.399.442,00	0,00	0,00	
6.2.4	Penyertaan Modal Daerah	7.623.306.332,00	7.649.367.436,00	6.918.552.264,00	9.400.000.000,00	8.870.000.000,00	12.329.670.795,00	10,09
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		9.223.306.332,00	19.380.182.607,00	165.607.119.744,00	82.580.399.442,00	15.870.000.000,00	27.329.670.795,00	24,27
PEMBIYAAAN NETTO		13.298.506.099,85	49.549.185.182,03	66.003.386.928,67	81.350.444.501,17	108.604.646.639,61	205.009.696.280,90	72,82

NO	Uraian	REALIASI					PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 * unaudit	%
	SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	49.748.765.056,03	109.359.289.589,85	112.930.843.943,17	117.474.646.639,61	232.339.367.075,90	262.269.535.100,74	39,44

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menyajikan informasi posisi keuangan (suatu entitas pelaporan) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Persentase kenaikan/(penurunan) Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selama tiga tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2
Necara Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020 (Rp)	31 DESEMBER 2021 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (%)	31 DESEMBER 2022 (ESTIMASI) (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (%)
1.	ASET					
1.1	ASET LANCAR	197.856.046.636,21	325.915.892.336,96	64,72	239.231.629.474,82	(26,60)
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	108.755.751.125,34	138.049.272.383,73	26,94	146.036.922.359,35	5,79
1.3	ASET TETAP	2.999.729.426.716,04	3.060.050.155.275,52	2,01	3.666.236.359.199,89	19,81
1.4	DANA CADANGAN	-	-	-	15.000.000.000,00	-
1.5	ASET LAINNYA	45.381.383.891,37	3.795.589.724,56	(91,64)	4.499.547.773,32	18,55
	JUMLAH ASET	3.351.722.608.368,96	3.527.810.909.720,77	5,25	4.071.004.458.807,38	15,40
2.	KEWAJIBAN					
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	39.212.641.743,00	45.767.985.652,15	16,72	90.894.611.842,93	98,60
	JUMLAH KEWAJIBAN	39.212.641.743,00	45.767.985.652,15	16,72	90.894.611.842,93	98,60
3.	EKUITAS					
3.1	EKUITAS	3.312.509.966.625,96	3.482.042.924.068,62	5,12	3.980.109.846.964,45	14,30
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.351.722.608.368,96	3.527.810.909.720,77	5,25	4.071.004.458.807,38	15,40

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari tahun 2020 ke tahun 2021 secara umum mengalami kenaikan sebesar 5,25%, hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan terdapat penurunan pada aset lainnya. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 secara keseluruhan menunjukkan kenaikan kembali dengan total persentase 15,40%, yang dipengaruhi oleh kenaikan investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, serta penurunan pada aset lainnya.

Kewajiban dari tahun 2020 ke tahun 2021 menunjukkan kenaikan sebesar 16,72%, kemudian dari tahun 2021 ke tahun 2022

mengalami kenaikan kembali sebesar 98,60%. Ekuitas dari tahun 2020 ke tahun 2021 menunjukkan kenaikan sebesar 5,12%, dan dari tahun 2021 ke tahun 2022 kenaikannya sebesar 14,30%.

Rata-rata persentase kenaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana selama tiga tahun terakhir sebesar 10,33%, masing-masing secara berturut-turut mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 5,25%, kemudian dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 15,40%.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan Pengelolaan Keuangan telah di atur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang mekanisme Penyusunan Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 kebijakan Pengelolaan Keuangan bersifat dinamis sehingga sangat mempengaruhi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal ini banyaknya regulasi – regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat setelah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ditetapkan. Pemerintah daerah dalam pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggarana 2020 telah melaksanakan *refocusing* dan realokasi berdasarkan arahan dari Pemerintah Pusat dalam Penanganan Dampak Ekonomi atas penyebaran wabah covid-19.

Bedasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa kebijakan terkait dengan proporsi penggunaan belanja pegawai tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paing rendah atau tidak boleh kurang dari 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa serta Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai dan Infrastruktur Pelayanan Publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung

sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan atau paling lama pada Tahun Anggaran 2026.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan Realisasi Anggaran Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023, Proporsi Alokasi Anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.3
Proporsi Realiasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022

NO	Uraian	REALIASI					RENCANA
		2018	2019	2020	2021	2022 * unaudit	2023
5	Belanja Daerah						
5.1	Belanja Operasi	1.939.209.336.796,20	2.033.478.659.494,69	1.949.881.150.929,00	1.955.814.792.559,00	1.967.401.426.401,00	2.134.972.336.184,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.207.726.369.047,00	1.237.660.161.762,00	1.176.209.206.916,00	1.182.261.056.674,00	1.169.624.519.375,00	1.255.084.934.591,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	667.454.118.674,20	756.858.884.832,69	738.886.933.513,00	709.093.186.272,00	733.747.913.310,00	673.184.501.593,00
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	95.782.500,00	350.000.000,00
5.1.4	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	500.587.500,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	61.460.999.575,00	35.591.700.000,00	33.562.360.500,00	59.369.641.613,00	57.220.254.016,00	193.362.870.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.567.849.500,00	3.367.912.900,00	1.222.650.000,00	4.590.320.500,00	6.712.957.200,00	12.990.030.000,00
	Kontribusi Belanja Operasi Terhadap Belanja	72,09	67,28	67,98	72,11	69,50	76,38
5.2	Belanja Modal	410.348.713.390,02	605.698.351.012,28	498.497.676.052,00	353.171.282.580,00	470.908.866.968,00	217.570.638.977,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.495.850.000,00	18.722.717.888,00	33.328.265.935,00	734.126.000,00	27.007.255.100,00	1.202.500.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.458.978.889,00	241.517.168.061,00	198.148.478.293,00	114.178.507.498,00	183.985.337.475,00	54.799.095.687,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.450.328.843,00	135.342.553.756,28	142.070.482.407,00	137.937.639.826,00	129.991.095.312,00	75.150.624.290,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.051.716.488,00	145.563.152.918,00	68.315.142.935,00	87.697.349.012,00	116.106.286.763,00	82.864.099.000,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.917.460.300,00	14.605.384.629,00	7.089.359.075,00	12.623.660.244,00	13.275.041.363,00	516.900.000,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	52.974.378.870,02	49.947.373.760,00	49.545.947.407,00	0,00	543.850.955,00	3.037.420.000,00
	Kontribusi Belanja Modal Terhadap Belanja	15,25	20,04	17,38	13,02	16,64	7,78
5.3	Belanja Tidak Terduga	71.844.600,00	12.699.900,00	46.401.777.454,00	23.812.747.069,00	2.786.124.220,00	13.155.296.795,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	71.844.600,00	12.699.900,00	46.401.777.454,00	23.812.747.069,00	2.786.124.220,00	13.155.296.795,00

NO	Uraian	REALIASI					RENCANA
		2018	2019	2020	2021	2022 * unaudit	2023
Kontribusi BTT Terhadap Belanja		0,003	0,00	1,62	0,88	0,10	0,47
5.4	Belanja Transfer	340.456.714.540,00	383.432.110.751,00	373.484.680.048,00	379.331.582.631,00	389.605.052.943,00	429.624.477.900,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak	16.954.494.800,00	22.205.040.000,00	19.380.406.816,00	21.817.918.102,00	27.321.453.500,00	28.867.662.500,00
5.4.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi	1.364.464.000,00	1.133.614.000,00	663.701.000,00	1.623.351.820,00	2.164.870.000,00	1.683.386.400,00
5.4.3	Bantuan Keuangan ke Desa	321.452.739.940,00	359.171.585.751,00	353.440.572.232,00	355.890.312.709,00	355.289.549.126,00	399.073.429.000,00
5.4.4	Bantuan Keuangan Lainnya	685.015.800,00	921.871.000,00	0,00		4.829.180.317,00	10.000.000.000,00
Kontribusi Belanja Transfer Terhadap Belanja		12,66	12,69	13,02	13,99	13,76	15,37
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.690.086.609.326,22	3.022.621.821.157,97	2.868.265.284.483,00	2.712.130.404.839,00	2.830.701.470.532,00	2.795.322.749.856,00

**2018s.d 2019 LRA (audit bpk), 2022 (Unaudit) dan 2023 (APBD)*

Berdasarkan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat bahwa proposi penggunaan Anggaran paling tinggi untuk Belanja Operasi Rata – Rata sebesar 69,79% yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negera dan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sedangkan Proporsi Anggaran untuk Belanja Modal dikabupaten Sumedang rata- rata sebesar 16,47%, dan apabila dilihat kedalaman penggunaan pada belanja pegawai dan belanja modal yang memiliki proposi penggunaan yang tinggi selama tahun 2018 s.d 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kontirubusi Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah
Tahun 2018 -2023

NO	Uraian	REALISASI					RENCANA
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	Belanja Daerah						
5.1	Belanja Operasi	72,09	67,28	67,98	72,11	69,50	76,38
5.1.1	Belanja Pegawai	44,90	40,95	41,01	43,59	41,32	44,90
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24,81	25,04	25,76	26,15	25,92	24,08
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
5.1.4	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-
5.1.5	Belanja Hibah	2,28	1,18	1,17	2,19	2,02	6,92
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,10	0,11	0,04	0,17	0,24	0,46

**2018 s.d 2019 LRA (Audit BPK), 2022 (Unaudit) dan 2023 (APBD)*

Tabel 3.5
Kontribusi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah
Tahun 2018 – 2023

NO	Uraian	REALIASI					RENCANA
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.2	Belanja Modal	15,25	20,04	17,38	13,02	16,64	7,78
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,06	0,62	1,16	0,03	0,95	0,04
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,70	7,99	6,91	4,21	6,50	1,96

NO	Uraian	REALIASI					RENCANA
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,54	4,48	4,95	5,09	4,59	2,69
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4,65	4,82	2,38	3,23	4,10	2,96
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,33	0,48	0,25	0,47	0,47	0,02
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1,97	1,65	1,73	0,00	0,02	0,11

*2018 s.d 2019 LRA (Audit BPK), 2022 (Unaudit) dan 2023 (APBD)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.6
Defisit Rill Kabupaten Sumedang

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Realisasi Pendapatan	2.904.389.486.621,44	2.835.865.125.275,29	2.887.961.309.351,84
2	Dikurangi Realisasi			
3	Belanja Daerah	2.868.265.284.483,00	2.712.130.404.839,00	2.830.701.470.532,00
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	82.580.399.442,00	15.870.000.000,00	27.329.670.795,00
	Defisit riil	(46.456.197.303,56)	107.864.720.436,29	29.930.168.024,84

* Tahun 2022 Unaudit

Tabel 3.7
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sumedang

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	(243,09)	108,91	93,53
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	(109,78)	-	-
5	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	-	6,49	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

* Tahun 2022 Unaudit

Tabel 3.8
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sumedang

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	2022
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	112.930.843.943,17	117.474.646.639,61	232.339.367.075,90
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	51.000.000.000,00	-	-
5	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	-	7.000.000.000,00	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	Defisit riil	163.930.843.943,17	124.474.646.639,61	232.339.367.075,90

* Tahun 2022 Unaudit

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah. ^[11] Pendanaan Pembangunan Daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah yang dapat dilihat dari ruang fiskal/pendapatan dalam mewujudkan pembangunan

daerah yang di susun secara bertahap dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Dalam Penyusunan Pembangunan maka harus terlebih dahulu susun perencanaan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Adapun Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

I. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan komponen sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah;
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

B. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.

C. Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat;
- 3) Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa

yang akan datang. Pada tahun 2019, Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tercatat sebesar 3,07 Triliun dan sehubungan dampak pandemi Covid-19, pendapatan daerah dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 memiliki rata-rata penurunan sebesar minus 1,97 persen. Komponen Pendapatan Asli Daerah, memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,02 persen dengan persentase pertumbuhan tertinggi didapat dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Komponen Pendapatan Transfer memiliki rata-rata penurunan sebesar minus 1,39 persen. Selain itu, untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah juga menunjukkan penurunan sebesar minus 31,38 persen.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional, serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang diperkirakan tumbuh membaik. Beberapa asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi APBD tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Asumsi proyeksi fiskal mempertimbangkan pada perlambatan ekonomi di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 serta mulai membaik di tahun 2022 pasca pandemi;
 2. Melakukan restrukturisasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, ekstensifikasi basis pajak, dan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi;
 3. Melakukan penyesuaian untuk komponen rincian dampak pembangunan jalan tol dan kawasan industri BUTOMGEDE (Buahdua-Ujungjaya-Tomo-Jatigede);
 4. Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian

Dengan melihat performa Pendapatan Daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Pendapatan Daerah pada masa

yang akan datang diharapkan dapat lebih meningkat dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan menegakan regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
4. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi).
5. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD.
6. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
7. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
8. Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan pendapatan asli daerah dengan instansi terkait.
9. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
10. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
11. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
12. Meningkatkan pertumbuhan capaian realisasi potensi Pendapatan Daerah
13. Mengembangkan inovasi transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah
14. Kebijakan akan mengalami penyesuaian Apabila dalam penyusun Perencanaan Tahunan terdapat Kebijakan – Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

II. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan instrument Pening dalam menstimulus Pembangunan Daerah dan sangat di pengaruhi oleh kondisi Penerimaan daerah. Hal yang paling utama dari belanja adalah untuk menjaga kualitas belanja daerah agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan hal yang sangat penting bagaimana menjaga integritas belanja agar mampu menjawab secara bertahap permasalahan – permasalahan yang di hadapi oleh Masyarakat.

Mempertahikan Kinerja komponen Belanja pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 bahwa kontribusi terbesar masih pada belanja pegawai, maka pada tahun anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 secara bertahap harus menyesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan Prioritas Belanja Daerah Pada Tahun 2024 Sampai dengan Tahun 2026 diarahkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pendanaan untuk Belanja Wajib dan Mengikat;
2. Pemenuhan Pendanaan untuk Belanja Standar Pelayanan Minimal;
3. Pemenuhan Prosentase Belanja pegawai dan Belanja infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Pemenuhan pendanaan Prioritas Daerah.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Pada Proyeksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun anggaran 2026 memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Komponen Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
2. Arahan dari Pemerintah Pusat terlebih dengan ditetapkannya Undang – Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Pemenuhan Mandatory Spending

4. Skala Prioritas Pendaan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target indikator

Namun dalam proyeksi Pendapatan, Belanja dan pembiayaan dapat terjadi penyesuaian-penyesuaian pada penyusunan Dokumen perencanaan dan Keuangan tahunan baik pada sektor pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dipengaruhi oleh Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kinerja Keuangan pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut proyeksi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 -2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2024 sampai dengan 2026 Kabupaten Sumedang

NO	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
1	Pendapatan Asli Daerah	704.184.540.664,00	848.487.223.743,00	1.061.347.890.499,00
1.1	Pajak Daerah	314.226.737.136,00	383.094.330.086,00	508.389.997.142,00
1.2	Retribusi Daerah	362.741.536.155,00	435.304.924.720,00	520.908.259.777,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	15.201.592.379,00	16.721.751.617,00	17.539.764.214,00
1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	12.014.674.994,00	13.366.217.320,00	14.509.869.366,00
Kontribusi pad terhadap Pendapatan		22,69	25,95	30,45
2	Pendapatan Transfer	2.398.847.598.388,00	2.421.186.175.456,00	2.424.698.514.594,00
2.1	Pendapatan Transfer Pusat	2.107.106.838.918,00	2.126.001.946.244,00	2.126.001.946.244,00
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	291.740.759.470,00	295.184.229.212,00	298.696.568.350,00
Kontribusi dana transfer terhadap pendapatan		77,31	74,05	69,55
3	Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-
3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Kontribusi lain lain terhadap pendapatan		-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.103.032.139.052,00	3.269.673.399.199,00	3.486.046.405.093,00
5	Belanja Daerah			
5.1	Belanja Operasi	1.961.323.996.881,00	1.943.407.057.362,00	1.989.367.678.727,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.255.084.934.591,00	1.255.084.934.591,00	1.255.084.934.591,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	588.238.062.290,00	617.822.122.771,00	656.682.744.136,01

NO	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
5.1.3	Belanja Subsidi	450.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00
5.1.4	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	100.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	17.551.000.000,00	20.000.000.000,00	27.000.000.000,00
Kontribusi Belanja Operasi Terhadap Belanja		62,38	59,54	57,16
5.2	Belanja Modal	691.871.541.700,00	807.234.791.024,00	1.460.678.724.340,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	33.254.033.200,0	41.005.548.300,00	50.490.131.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.812.477.000,0	205.733.249.300,00	275.674.489.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.866.705.500,0	251.785.990.424,00	431.874.415.340,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	246.137.593.000,0	294.362.761.000,00	687.724.297.000,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.800.733.000,0	14.347.242.000,00	14.915.392.000,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Kontribusi Belanja Modal Terhadap Belanja		22,01	24,73	41,97
5.3	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
Kontribusi BTT Terhadap Belanja		162,59	183,03	323,84
5.4	Belanja Transfer	460.836.600.471,00	483.622.369.378,00	508.397.234.678,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	35.304.107.100,00	42.578.052.500,00	57.352.917.800,00
5.4.2	Belanja bantuan Keuangan	425.532.493.371,00	441.044.316.878,00	451.044.316.878,00
Kontribusi Belanja Transfer Terhadap Belanja		14,66	14,82	14,61
JUMLAH BELANJA DAERAH		3.144.032.139.052,00	3.264.264.217.764,00	3.480.046.405.093,00

NO	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
SURPLUS / DEFISIT		(41.000.000.000,00)	5.409.181.435,00	6.000.000.000,00
6	Pembiayaan Daerah			
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		55.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
6.2.4	Penyertaan Modal Daerah	14.000.000.000,00	15.409.181.435,00	11.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		14.000.000.000,00	15.409.181.435,00	11.000.000.000,00
PEMBIYAAAN NETTO		41.000.000.000,00	(5.409.181.435,00)	(6.000.000.000,00)
SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN		0,00	0,00	0,00

* Tahun 2023 Pada Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

* Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 Proyeksi

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No	Uraian	Proyeksi		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pendapatan	3.103.032.139.052,00	3.269.673.399.199,00	3.486.046.405.093,00
2	Pencairan dana cadangan	40.000.000.000,00		
3	Sisa lebih Riil Penghitungan Anggaran	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Total Penerimaan	3.158.032.139.052,00	3.279.673.399.199,00	3.491.046.405.093,00
	Dikurangi:			
4	Belanja Pegawai	1.183.602.184.881,00	1.086.659.864.662,00	1.045.770.251.625,00
5	Belanja Dana Cadangan	40.000.000.000,00		
6	Pengeluaran Pembiayaan	14.000.000.000,00	15.409.181.435,00	11.000.000.000,00
7	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.960.429.954.171,00	2.177.604.353.102,00	2.434.276.153.468,00

Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Ril Keuangan Daerah

Uraian	Proyeksi		
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.888.947.204.461,00	2.009.179.283.173,00	2.224.961.470.502,00
Prioritas I	1.171.634.161.448,00	1.249.366.834.996,00	1.355.916.348.405,00
<i>Belanja Langsung wajib dan Mengikat</i>	<i>1.171.634.161.448,00</i>	<i>1.249.366.834.996,00</i>	<i>1.355.916.348.405,00</i>
Prioritas II	444.348.737.349,66	515.367.688.160,70	600.484.739.889,42
<i>Belanja Prioritas Pembangunan Daerah</i>	<i>444.348.737.349,66</i>	<i>515.367.688.160,70</i>	<i>600.484.739.889,42</i>
Prioritas III	272.964.305.663,34	244.444.760.016,30	424.369.116.778,50
<i>Belanja Urusan Pemerintahan Lainnya (Urusan Pilihan, unsur Pendukung, unsur Penunjang, unsur pengawasan dan unsur kewilayahan)</i>	<i>272.964.305.663,34</i>	<i>244.444.760.016,30</i>	<i>424.369.116.778,50</i>
Jumlah Prioritas	1.888.947.204.461,00	2.009.179.283.173,00	2.224.961.470.502,00

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu strategis menjadi bagian terpenting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Analisis permasalahan yang dilakukan secara tepat akan meningkatkan upaya intervensi melalui kebijakan dalam mengatasi permasalahan. Demikian juga dengan pemilihan isu strategis yang sesuai dan relevan akan berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan pembangunan yang akan ditempuh oleh para pengambil kebijakan. Isu Strategis merupakan kondisi eksternal yang berpengaruh positif maupun negatif yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dan sangat menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Permasalahan pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan daerah akan dibagi menjadi dua bagian yaitu permasalahan pembangunan lingkup makro yang terdiri dari masalah pokok, masalah dan akar masalah dan yang kedua adalah permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan. Sedangkan isu strategis yang disusun dikelompokkan berdasarkan isu global, nasional, dan isu regional di Jawa Barat. Identifikasi dan perumusan permasalahan dan isu strategis tersebut merupakan dasar dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan periodisasi Rencana Pembangunan Daerah tersebut.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Kinerja Pembangunan pada Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan itu dibuat. Tantangan dan permasalahan pembangunan kedepan dari seluruh aspek akan semakin besar,

sehingga kita perlu meningkatkan kinerja pembangunan dan memanfaatkan berbagai potensi dan peluang yang ada. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Sumedang akan menjadi fokus dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026 mendatang. Berikut ini berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumedang yang terbagi atas dua bagian, antara lain Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (level makro daerah) dan permasalahan pembangunan daerah pada level mikro sektoral / penyelenggaraan urusan pemerintahan.

4.1.1. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Level Makro

a. Kemiskinan, Ketimpangan dan Pengangguran

Angka kemiskinan 10,26 Persen pada Tahun 2020 dan meningkat pada Tahun 2021 sebesar 10,71 persen, kemudian turun 10,14 persen pada Tahun 2022, angka kemiskinan tersebut masih sangat tinggi. Namun demikian, walaupun Kabupaten Sumedang memiliki tingkat kemiskinan yang menurun, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Tentunya diperlukan pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengurangan jumlah penduduk miskin agar tingkat kemiskinan dapat diturunkan sesuai dengan target akhir RPD tahun 2026.

Permasalahan lain yang sering timbul dalam pembangunan suatu wilayah adalah rendahnya daya saing tenaga kerja sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. Rendahnya daya saing juga diiringi dengan belum optimalnya keterampilan sumberdaya manusia, dalam mennghadapi tantangan kerja kedepan. Rendahnya daya saing tenaga kerja inilah yang akan memberi dampak beruntun pada permasalahan pembangunan berikutnya seperti pendapatan rendah, kemiskinan, hingga pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka masih fluktuasi (7,15 persen pada Tahun 2019 meningkat menjadi 9,89 persen pada Tahun 2020, dan menurun kembali pada Tahun 2022 sebesar 7,72 persen). Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam menyongsong Industri 4.0

menjadi permasalahan pembangunan bidang sumber daya manusia yang perlu diperhatikan.

b. Kualitas Infrastruktur Dasar

Ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan produktif, sehingga meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi. Kondisi Infrastruktur di Kabupaten Sumedang masih belum merata terutama infrastruktur konektivitas antar wilayah, Irigasi, Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Air Limbah Domestik serta Peningkatan Rumah Tidak Layak huni. Total Panjang jalan Kabupaten sepanjang 774,338 Km untuk kondisi jalan mantap di Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 mencapai 86,54% atau 670,138 km, terdapat 13,46% kondisi jalan yang masih dalam kondisi rusak (Rusak ringan 7,92%/61,33 Km dan Rusak berat 5,54%/42,90 Km) dan sampai saat ini masih terdapat lebar jalan kabupaten yang belum sesuai dengan standar. Kemudian untuk infrastruktur Irigasi masih belum optimal dengan memperhatikan capaian area irigasi 30.069 Ha baru terealisasi sebanyak 20. 747,61 Ha atau 69% pada Tahun 2022. Selain itu untuk Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kondisi saat ini untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari hanya mencapai 52% dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic mencapai 90,14% pada tahun 2022. Kemudian untuk kebutuhan Peningkatan Rumah Tidak layak huni dari target 60.000 unit hanya mencapai 56.011 unit pada pada Tahun 2022. Yang menjadi pekerjaan yang tidak mudah salah satunya yaitu pengurangan luasan Kawasan kumuh, sampai saat ini intervensi dalam penanganan Kawasan kumuh masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari Luasan Kawasan kumuh seluas 164,69 Ha. Untuk memenuhi capaian target tersebut, perlu adanya penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, apalagi yang terkait dengan pelayanan dasar. Untuk itu bukan hanya kuantitasnya tapi juga kualitas infrastruktur juga menjadi perhatian.

c. Kualitas Sumberdaya Manusia.

Dalam mengkaji permasalahan pokok sumber daya manusia maka dilakukan analisis data dan informasi untuk mempertajam penelaahan atas permasalahan agar perumusan kebijakan pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Capaian IPM Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 sebesar 72,69 masih di bawah IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Salah satu permasalahan pembangunan SDM di Kabupaten Sumedang yaitu belum optimalnya kualitas pendidikan. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh jenjang pendidikan yang dimiliki baik pendidikan formal maupun informal. Dalam penelaahan permasalahan pendidikan akan menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai tolak ukur rata-rata jenjang pendidikan yang diduduki oleh masyarakat Kabupaten Sumedang dimana pada tahun 2022 hanya mencapai 8,72 tahun yang berarti rata-rata penduduk Kabupaten Sumedang hanya mengenyam pendidikan sampai bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 8. Angka Rata-rata Lama Sekolah juga menjadi indikator yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga ARLS perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan nilai IPM.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan perekonomian daerah juga didukung oleh sektor-sektor di bidang perekonomian seperti pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan, yang sampai saat ini masih memiliki potensi dan berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Sumedang. Sektor pertanian dan industri pengolahan tersebut cukup memiliki kontribusi dominan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Sumedang. Diharapkan, prospek sektor pertanian dan industri pengolahan akan memberikan *multiplayer effect* terhadap sektor dominan lainnya seperti perdagangan dan transportasi. Dalam mendongkrak perekonomian tentunya diperlukan pemanfaatan adopsi teknologi digital dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian khususnya di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif dan lain-lain.

e. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam perwujudan *good government* di setiap lingkungan

pemerintahan. terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka sudah dapat dipastikan bahwa pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional. Kabupaten Sumedang dalam menjalankan roda pemerintahannya berusaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi setiap penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, terlihat peningkatan yang cukup signifikan dalam empat tahun terakhir terkait evaluasi terhadap pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Beberapa catatan perbaikan antara lain penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkatan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah, peningkatan penerapan E-Government, mengoptimalkan pengelolaan system manajemen SDM, penguatan pelaksanaan pengendalian internal, optimalisasi implementasi pelayanan public dan pembangunan zona integritas pada seluruh unit kerja yang strategis.

4.2. Isu Strategis

4.2.1. Telaahan Kebijakan/Isu Strategis Internasional

A. Kebijakan Menghadapi Tantangan Ekonomi

Perekonomian global mengalami berbagai guncangan dan tantangan. Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dan persisten, kondisi keuangan yang semakin ketat, perang Rusia melawan Ukraina, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, dan ketidaksesuaian penawaran-permintaan semakin memperlambat prospek ekonomi global. Meningkatnya kekhawatiran tentang harga pangan dan energi mengakibatkan tekanan biaya hidup di banyak negara, yang ikut serta menambah tekanan inflasi. Selain itu, cuaca ekstrem akibat perubahan iklim menimbulkan risiko penurunan terhadap prospek ekonomi global, dan kenaikan harga energi juga menghambat jalan menuju transisi hijau. Tantangan global yang berkepanjangan telah menyebabkan meningkatnya kerentanan utang dan menghambat jalan menuju pemulihan, yang selanjutnya

berdampak pada kelompok rentan, terutama negara-negara berpenghasilan rendah dan berkembang. Dalam situasi ekonomi ini, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral telah berkumpul kembali untuk keempat kalinya tahun ini di Washington D.C., untuk mengambil tindakan nyata guna mengatasi tantangan ekonomi global.

Sejalan dengan tantangan ekonomi global saat ini, anggota G20 menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kebijakan yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pemulihan berkelanjutan dan untuk mengurangi efek laka pandemi untuk mendukung pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Seiring dengan tantangan yang semakin meningkat, G20 menekankan pentingnya menjaga respon kebijakan fiskal yang mampu bergerak cepat dan fleksibel, serta langkah-langkah pengendalian yang bersifat sementara dan tepat sasaran untuk menghindari tekanan inflasi yang tinggi. Dalam hal ini, G20 menegaskan kembali pentingnya kerja sama kebijakan makro untuk menjaga stabilitas keuangan, dan kebijakan fiskal jangka panjang yang berkelanjutan, serta melindungi risiko penurunan dan dampak negative efek spillover. G20 juga menegaskan kembali pentingnya kebijakan makroprudensial, kemajuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan, dan transisi berkelanjutan. Untuk mencapai stabilitas harga dan menghindari *spillover*, G20 juga berkomitmen untuk mengkalibrasi laju pengetatan kebijakan moneter secara tepat.

Sehubungan dengan meningkatnya risiko kerawanan pangan dan energi, G20 berkomitmen untuk mempertimbangkan semua alat yang diperlukan untuk mengatasi kerawanan pangan dan energi serta tekanan biaya hidup yang dialami di banyak negara. G20 menyoroti pentingnya kerja sama untuk memastikan respons global yang terkoordinasi untuk mengatasi kerawanan pangan. G20 akan terus mencatatkan kemajuannya melalui koordinasi strategis dengan Presidensi G20 India tahun depan.

Untuk mendukung dunia dalam menghadapi pandemi saat ini dan potensi pandemi di masa depan, G20 merevitalisasi arsitektur kesehatan global untuk meningkatkan tindakan kolektif dan terkoordinasi untuk mendukung pencegahan, kesiapsiagaan, dan

respon pandemi (PPR). Tahun ini, G20 mengukirsejarah melalui pengumpulan *Financial Intermediary Fund* (FIF) yang diselenggarakan oleh Bank Dunia untuk memastikan kecukupan dan keberlanjutan pembiayaan untuk pencegahan dan respon pandemi di masa depan. Total komitmen FIF dari donor penggagas adalah sebesar USD 1,4 miliar, dan anggota mendorong tambahan komitmen secara sukarela. G20 juga menyambut baik keanggotaan dan perwakilan inklusif PPR FIF dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor, di mana WHO memegang peran sentral.

Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya, G20 terus menyoroti pentingnya memperkuat arsitektur keuangan internasional. Terkait komitmen G20 untuk meningkatkan ketahanan keuangan global jangka panjang, G20 akan terus memantau risiko peningkatan volatilitas arus modal, *spill over* negatif, dan kondisi pasar tidak merata dengan adanya revisi *Institutional View* (IV) IMF mengenai *Liberalization and Capital Flow Management* dan *BIS Macro-Financial Stability Framework*, yang menuntut kemajuan lebih lanjut dalam operasional *Integrated Policy Framework* dari IMF dan mempertahankan Jaring Pengaman Keuangan Global (GFSN) yang kuat. G20 terus mendukung alokasi penyaluran *Special Drawing Right* (SDR) untuk membantu golongan yang paling rentan serta meningkatkan kapasitas sumber daya *Multilateral Development Banks* melalui tinjauan Kerangka Kecukupan Modal, dan di saat yang sama memastikan penerapan *Common Framework* pada *Debt Treatment* di luar DSSI.

Selama pandemi, Lembaga keuangan telah menerapkan berbagai kebijakan luar biasa untuk meningkatkan fungsinya sebagai intermediasi dalam mendukung perekonomian. Di saat dukungan kebijakan diperlukan untuk memitigasi dampak negatif dari pandemi, penerapan dukungan kebijakan yang terlalu lama dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan. Saat pemulihan pandemi sedang berlangsung, G20 menantikan laporan akhir exit strategies dan mitigasi *scarring effect* pada sector keuangan, serta upaya untuk mengatasi kerentanan di Lembaga Keuangan Non-Bank (NBFI). Selain itu, G20 terus memperkuat sektor keuangan global melalui

peningkatan pemantauan risiko dan melalui optimalisasi manfaat teknologi dan digitalisasi. Dalam konteks ini, G20 menyambut baik penilaian FSB mengenai pengawasan dan regulasi “*stablecoin*” global, serta aktivitas pasar asset kripto dan menerima panduan akhir oleh BIS CPMI dan IOSCO yang menegaskan bahwa Prinsip untuk Infrastruktur Pasar Keuangan berlaku dalam pentingnya pengaturan *stablecoin* yang sistematis.

G20 juga berkomitmen untuk terus mengeksplor implikasi keuangan makro dari Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) karena hal ini dapat dirancang untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas sambil menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan internasional. G20 juga menyambut baik keberhasilan penyelesaian *Techsprint G20 2022*, inisiatif Bersama antara Presidensi G20 Indonesia dengan *BIS Innovation Hub*, yang telah berkontribusi pada diskusi tentang solusi praktis dan layak untuk menerapkan CBDC. G20 telah mengumumkan pemenang untuk 3 (tiga) kategori dan menghadiahkan Rp770.000.000 bagi setiap pemenang pada G20 *Techsprint 2022 Award Ceremony* dan *Third CBDC Seminar* yang diadakan secara *back-to-back* dengan acara *2022 Annual Meetings of the International Monetary Fund dan World Bank Group*.

G20 terus berkomitmen untuk memajukan impletasi Peta Jalan G20 pada Pembayaran Lintas Batas Negara (CBP) untuk mencapai pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif karena hal ini akan memberikan manfaat yang luas bagi ekonomi di seluruh dunia. Dalam hal ini, G20 menyabut eksplorasi lanjutan tentang bagaimana CBDC berpotensi dirancang untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas dan di saat yang sama menjaga stabilitas dan integritas sistem moneter dan keuangan internasional. Dalam konteks ini, G20 menyambut baik diskusi lanjutan tentang sistem pembayaran yang saling terkait dan opsi akses dan interoperabilitas CBDC untuk pembayaran lintas batas. Sebagai wujud implementasi regional dai Peta Jalan G20 pada Pembayaran Lintas Batas Negara, bank sentral pada ASEAN-5 akan menandatangani Perjanjian Umum pada Konektivitas Pembayaran di antara Bank Sentral ASEAN-5 di sela-sela KTT Leaders’ Summit pada November 2022 mendatang.

Guna mendukung proses pemulihan ekonomi dunia yang kuat dan berkelanjutan, negara-negara G20 telah berdiskusi untuk pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses dan infrastruktur yang terjangkau. Para anggota mendukung secara sukarela dan tidak terikat G20/*Global Infrastructure* (GI) Hub Framework tentang cara terbaik dalam menjangkau partisipasi pihak swasta guna meningkatkan investasi infrastruktur yang berkelanjutan, yang mana akan mempertimbangkan situasi negara, serta akan menambahkan investasi dari sumber lain, termasuk investasi publik dan keuangan yang disediakan oleh *Multilateral Development Banks* (MDBs). Selibuhnya, dalam mendukung infrastruktur G20 menyokong kebijakan perangkat G20-OECD dalam memobilisasi pendanaan dan keuangan untuk investasi infrastruktur yang inklusif dan berkualitas di berbagai daerah dan kota. Untuk mendukung infrastruktur yang transformatif, G20 juga mendukung *InfraTracker 2.0* dan Ringkasan Studi Kasus G20 dalam Infrastruktur Keuangan Digital: Masalah, Praktik dan Inovasi. Anggota G20 juga mendorong kualitas investasi infrastruktur dengan mendiskusikan pembangunan *Quality Infrastructure Investment* (QII) Indicators. Sebagai tambahan, G20 juga mendiskusikan penataan masa depan infrastruktur global.

G20 menekankan pentingnya untuk kemajuan yang lebih lagi dalam agenda keuangan yang berkelanjutan dan mendukung transisi ekonomi hijau guna mencapai target bebas karbon. Dalam hal ini, G20 menitikberatkan peran penting dalam pencapaian agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dan target Penjanjian Paris. Sebuah kemajuan dari peta jalan G20 untuk keuangan berkelanjutan yang dibangun di 2021, pada tahun ini Presidensi G20 Indonesia mendukung Laporan Ekonomi Berkelanjutan G20 yang mana mewujudkan 3 (tiga) agenda utama: (i) pembangunan kerangka transisi keuangan yang menyadari aktivitas transisi iklim, termasuk transisi energi, dan meningkatkan kredibilitas komitmen institusi keuangan, (ii) memperbesar keuangan berkelanjutan dengan berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan, dan (iii) mendiskusikan pengungkit kebijakan yang menginsentifkan keuangan dan investasi serta mendukung transisi.

Negara-negara G20 mendukung hasil kerja yang dibawa Presidensi dan Kerjasama Global untuk Keuangan Inklusif dalam memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak muda. Dalam topik keuangan berkelanjutan, negara-negara G20 berdiskusi akan implementasi dari FSB Roadmap yang menunjukkan resiko keuangan dari perubahan iklim yang mana menambah Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20, dan menyambut implementasi atas peta jalan sejauh ini. Sebagai tambahan, negaranegara G20 mendukung inisiatif dalam mempersempit perbedaan data dan mendukung program kerja atas *New Data Gap Initiatives* guna memastikan ketersediaan akan data yang penting untuk mendukung pembuatan keputusan yang berdasarkan data. G20 meminta IMF, FSB dan IAG untuk mulai bekerja serta mendata perbedaan data dan laporan di baliknya yang berjalan selama setengah tahun berjalan di 2023, dengan catatan target yang ambisius dan penyampaian yang akan membutuhkan penghitungan kapasitas nasional secara terhitung, utama, dan situasi negara yang baik guna menghindari tumpang tindih dan duplikasi di tingkat internasional.

Melanjutkan komitmen untuk mendukung semua negara rentan untuk pulih bersama, pulih lebih kuat, G20 menyambut penyaluran sukarela *Special Drawing Rights* (SDR) sebesar USD 80,6 milyar dan menyambut kontribusi sukarela kepada IMF *Resilience and Sustainability Trust* (RST). Fasilitas RST diciptakan sebagai pilihan bagi anggota untuk secara sukarela mengalokasi bagian mereka dalam *Special Drawing Rights* (SDR) yang telah dibagikan untuk mendukung negara rentan dalam mengatasi permasalahan struktural jangka panjang yang memiliki risiko ekonomi makro, termasuk yang berasal dari pandemi dan perubahan iklim. Selanjutnya, G20 sepakat untuk memperkuat *Global Financial Safety Net* dan mendorong Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks/MDB) untuk memperkuat pembiayaan pembangunan guna mendukung pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, G20 menyambut pembahasan awal dan mendorong MBD untuk melanjutkan pembahasan terkait opsi untuk menerapkan rekomendasi Kajian Independen tentang

Kerangka Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Framework/CAF*) dari MDB dalam kerangka tata kelola mereka, dan menantikan laporan perkembangan di Musim Semi 2023. Untuk mengatasi kerentanan utang, khususnya pada negara berpendapatan rendah, G20 mendorong perkembangan lebih lanjut dari implementasi *Common Framework for Debt Treatment* di luar DSSI dalam cara yang terprediksi, tepat waktu, teratur, dan terkoordinasi, dan menyambut kemajuan yang tercapai, termasuk penyediaan penjaminan pembiayaan untuk Zambia serta menyambut perkembangan dari komite kreditur sejauh ini dan mendorong penyelesaian yang tepat waktu untuk penanganan utang bagi Chad dan Ethiopia.

Para anggota berkomitmen untuk mengimplementasi kesepakatan bersejarah terkait paket pajak internasional 2 (dua) pilar G20/OECD. Para anggota mendukung pekerjaan yang tengah berlangsung pada Pilar Satu dan menyambut penyelesaian dari *Global Anti-Base Erosion (GloBE) Model Rules* pada Pilar Dua, yang membuka jalan bagi implementasi yang konsisten pada level dunia sebagai pendekatan umum, dan menantikan penyelesaian Kerangka Implementasi GloBE. Para anggota menyerukan OECD/G20 *Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* untuk merampungkan Pilar Satu, dan dengan menandatangani Konvensi Multilateral pada paruh pertama 2023, dan untuk menyelesaikan negosiasi Aturan Subjek Pajak (Subject to Tax Rule/STTR) dalam Pilar Dua yang akan memungkinkan pembangunan Instrumen Multilateral untuk implementasinya. Para anggota juga menegaskan tujuan G20 untuk memperkuat agenda pajak dan pembangunan sehubungan dengan G20 Ministerial Symposium on Tax and Development pada Juli 2022, dan memperhatikan G20/OECD Roadmap on Developing Countries and International Tax. Para anggota mendukung perkembangan yang dicapai dalam mengimplementasikan standar transparansi pajak yang disetujui secara internasional, termasuk upaya regional dan menyambut penandatanganan Deklarasi Bali terkait Asia Initiative.

B. Ketahanan Pangan

Presidensi G20 Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2022 telah menegaskan kembali komitmennya untuk menggunakan semua

perangkat kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk risiko kerawanan pangan. G20 siap untuk mengambil tindakan kolektif yang cepat tentang ketahanan pangan dan gizi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lain. Beberapa inisiatif global telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan, seperti the *UN Global Crisis Response Group (GCRG)*, the *G7 Global Alliance for Food Security (GAFS)*, the *Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP)*, *International Finance Institutions Action Plan*, dan *Global Development Initiative*. Selain itu, Bank Dunia telah berkomitmen untuk menyediakan 30 juta USD dalam pendanaan baru atau yang sudah ada untuk proyek terkait ketahanan pangan dan nutrisi untuk beberapa tahun ke depan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pun turut menyediakan perkembangan kondisi pasar pangan, termasuk melalui *G20 Agricultural Market Information System*.

Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk memanfaatkan semua perangkat kebijakan (*policy tools*) dalam mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk ketahanan pangan. Forum G20 akan terus mengambil langkah bersama secara cepat dalam menghadapi permasalahan ketahanan pangan dan nutrisi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lainnya. Presidensi G20 Indonesia menerapkan strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi guna menstabilkan harga pangan, menekan inflasi, menurunkan impor dan meningkatkan ekspor pangan. Strategi ini diterapkan pada beberapa komoditas pangan strategis dengan kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam sistem agribisnis pangan, agar tercapai efisiensi dan peningkatan daya saing.

C. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari MDGs (Millennium Development Goals), yang telah berakhir pada tahun 2015 yang lalu. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara

berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup. *Sustainable Development Goals* dimulai dari kesepakatan dari pertemuan dunia pada saat September 2015 melalui agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*) yang merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *SDGs* dilakukan dengan prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*".

SDGs terdiri dari 169 target dan 17 Tujuan antara lain : Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*); Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*); Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being*); Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*); Kesetaraan Gender (*Gender Equality*); Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*); Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*); Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*); Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*); Berkurangnya Kesenjangan (*Reduce Inequalities*); Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*); Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*); Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*); Ekosistem Lautan (*Life Below Water*); Ekosistem Daratan (*Life on Land*); Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace Justice and Strong Institution*); Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*).

Implementasi dan capaian *SDGs* tentunya sangat diharapkan dan dapat diwujudkan melalui pengembangan kemitraan yang baik antara para pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah, juga diperlukan pengembangan sumberdaya dan kapasitas dalam pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam perencanaan yang ada, baik jangka panjang, jangka menengah

maupun jangka pendek, disamping alokasi anggaran dari pemerintah maupun swasta untuk mendukung setiap tujuan pembangunan yang akan dicapai.

D. Perubahan Iklim (*Global Warming/Climate Change*)

Kondisi ketahanan lingkungan pada era globalisasi pembangunan saat ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan, hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir ditengah tantangan pembangunan yang diharapkan akan semakin meningkat. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim.

Pemanasan global dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi, lokasi yang tinggi, serta ekosistem-ekosistem pantai. Pemanasan global terjadi sebagai akibat meningkatnya jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Naiknya intensitas efek rumah kaca yang terjadi karena adanya gas dalam atmosfer yang menyerap sinar panas yaitu sinar infra merah yang dipancarkan oleh bumi menjadikan perubahan iklim global. Jika tidak ada upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan perbaikan kondisi lingkungan lokal dan global mulai dari sekarang, maka dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan iklim ke depan

akan semakin besar dan lebih lanjut akan berdampak pada sulitnya mencapai sistem pembangunan yang berkelanjutan. Upaya Penanganan masa perubahan iklim dalam konteks pembangunan membutuhkan manajemen perubahan iklim secara efektif, dan pada saat bersamaan mengantisipasi dampak perubahan iklim global jangka panjang secara komprehensif. Disamping itu membutuhkan pendekatan lintas sektor baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal melalui upaya adaptasi dan mitigasi.

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi isu perubahan iklim adalah dengan membuat rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) tingkat nasional dan daerah yang merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Olehnya itu, implementasi dari rencana aksi tersebut diharapkan dapat berjalan dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun di daerah.

E. Pengarusutamaan Gender

Isu gender akan selalu menjadi permasalahan, sepanjang kaum perempuan belum merasakan hak-haknya dan tidak ada lagi pembangunan yang bias gender. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan jika tidak tertangani akan membawa permasalahan yang akan menghambat pembangunan. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, mulai tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan kesetaraan dalam aspirasi, pengalaman, kebutuhan dan permasalahan.

Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, baik terhadap peran dalam pembangunan maupun peran dalam ekonomi dan politik dapat dihitung melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang

merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yang memperhatikan ketimpangan Gender. Indikator kedua adalah Indeks Pemberdayaan Gender yang merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam berbagai aktivitas kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumberdaya ekonomi.

F. Revolusi Industri 4.0

Dunia industri global sedang memasuki era baru yang dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0 atau yang juga dikenal sebagai era digital. Industri 4.0 merupakan fase baru di revolusi industri yang fokus pada interkoneksi, otomatisasi, machine learning, dan real time data. Meskipun begitu, dampak dari revolusi industri tidak hanya pada pekerja industri saja namun saat ini semua orang menjadi bagian dari era digital 4.0. Indonesia telah secara aktif memasuki era baru yang ditandai dengan bergeraknya berbagai sektor kehidupan ke arah digital serba otomatis. Fenomena ini bisa kita lihat dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan berbasis digital. Perusahaan tersebut ini menawarkan cara berbisnis baru yang tidak kita temukan puluhan tahun lalu. Sebagai contoh adalah bagaimana peran digitalisasi pada masa pandemi covid-19 yang menunjang segala aktivitas kita disaat adanya pembatasan sosial.

Ciri utama pada era industri 4.0 adalah bagaimana data menjadi sesuatu yang penting yang terhubung ke internet yang bisa dimaksimalkan untuk membantu bisnis termasuk membaca tren permintaan konsumen, mencari target pasar yang tepat hingga mengoptimalkan harga yang sangat penting dalam peningkatan industrialisasi di daerah. Peluang pengembangan industri 4.0 harus segera diwujudkan oleh Kabupaten Sumedang, dimulai dari penyediaan infrastruktur teknologi informasi di seluruh daerah di Kabupaten Sumedang, selanjutnya adalah upaya digitalisasi sektor industri dan UMKM sehingga dapat menunjang seluruh aktivitas dan pemasaran produk di seluruh Kabupaten. Peluang dalam pengembangan industri 4.0 juga berada pada Generasi milenial sebagai generasi yang tumbuh besar di tengah teknologi digital, upaya

menciptakan wirausaha baru berbasis digitalisasi sangat penting untuk mendukung perkembangan revolusi industri 4.0.

4.2.2. Telaahan Kebijakan/Isu Strategis Nasional

A. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Salah satu misi Presiden Republik Indonesia yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Kualitas manusia menjadi salah satu fokus yang harus segera ditangani, hal ini juga sesuai dengan arahan presiden untuk melakukan percepatan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia yang tertuang dalam salah satu agenda pembangunan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing Sumberdaya Manusia dalam RPJMN 2020-2024 meliputi manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.

B. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Kebijakan Nasional pada misi ke-3 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 adalah pembangunan yang merata dan berkeadilan, hal ini kemudian dijabarkan ke dalam 7 agenda pembangunan dimana agenda yang ke-2 adalah Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pembangunan kewilayahan menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa - luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii)

meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Isu strategis utama pembangunan kewilayahan dalam RPJMN 2020- 2024 adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan: (a) Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia sebesar 18,0 persen, Kawasan Barat Indonesia sebesar 10,3 persen, dan kemiskinan perdesaan yang tinggi (12,9 persen), hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,7 persen), (b) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa, terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan, dan (e) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

C. Pengentasan Kemiskinan

Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Hal ini terjadi antara lain karena sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sektor keuangan dan jasa bukan merupakan sektor andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan. Dalam hal kemandirian ekonomi, kelompok miskin dan rentan masih sulit bersaing dalam usaha produktif karena daya saing yang rendah, akses terhadap pasar dari produk yang dihasilkan serta kolaborasi usaha yang rendah dan kolaborasi keperantaraan usaha belum optimal.

Saat ini terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan

dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan social yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

D. Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19

Proses pemulihan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 dipengaruhi oleh perkembangan pandemi COVID-19. Penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia pada tahun 2021 mengalami akselerasi dengan puncaknya mencapai lebih dari 50 ribu kasus per hari pada pertengahan Juli 2021 yang disebabkan oleh merebaknya varian Delta yang jauh lebih menular. Lonjakan kasus akibat varian Delta pada bulan Juli 2021 mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan penguatan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang diikuti dengan PPKM berdasarkan level keketatan yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Selain melalui pembatasan kegiatan masyarakat, Pemerintah juga mengimplementasikan program vaksinasi COVID-19 yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2021 dengan target cakupan 208 juta penduduk. Pertambahan kasus COVID-19 terkendali seiring implementasi kebijakan penanggulangan pandemi. Memasuki bulan Agustus, pertambahan kasus baru terus menunjukkan tren penurunan yang berlanjut yang diiringi dengan penurunan *positivity rate* dan *bed occupancy ratio*. Perkembangan positif tersebut memungkinkan Pemerintah untuk mengurangi intensitas kebijakan restriksi mobilitas sehingga aktivitas masyarakat kembali meningkat.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan mengadopsi kebijakan ekonomi untuk menahan dampaknya. Secara garis besar, terdapat 2 (dua) dimensi utama di dalam stimulus

penanganan COVID-19, yang pertama adalah untuk penanganan kesehatan dan pengendalian wabah sebagai sumber utama penyebab krisis. Dimensi kedua adalah penanganan krisis ekonomi sebagai efek domino dari krisis kesehatan, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi Indonesia diperkirakan membaik dan akan tumbuh lebih tinggi lagi pada 2022, disertai dengan nilai tukar yang stabil dan inflasi yang terkendali. Perbaikan kondisi ekonomi tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sehubungan dengan semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 dan adanya akselerasi vaksinasi. Pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan tetap kuatnya kinerja ekspor juga menunjang prakiraan tersebut. Untuk itu, sinergi dan inovasi kebijakan ekonomi nasional perlu terus diperkuat untuk mendukung berlanjutnya proses pemulihan ekonomi ke depan.

E. Bonus Demografi

Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi merupakan fenomena langka karena hanya akan terjadi satu kali ketika proporsi penduduk usia produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk keseluruhan, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70% berada pada usia produktif antara 15-64 tahun, sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif yaitu berada pada usia dibawah 14 tahun dan di atas 65 tahun pada periode tahun 2020-2045. Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi pada tahun 2020-2035, dan puncaknya di tahun 2028-2030.

F. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur

Salah satu isu strategis dalam RPJMN 2020-2024 adalah pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

4.2.3. Telaahan Kebijakan Provinsi Jawa Barat

A. Telaahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

Penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 salah satunya dengan mempedomani RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 7 Tahun 2019. Pembangunan tahun 2024 sampai dengan 2026 disusun dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahap V (2023-2025). Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahap V disusun dengan mempertimbangkan isu strategis dan merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.

1) **Isu Strategis**

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

- a) Kuantitas dan kualitas penduduk serta persebarannya;
- b) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan Kesehatan;
- c) Pengangguran dan ketenagakerjaan;
- d) Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial;
- e) Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- f) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur;
- g) Kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat; dan
- h) Kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah.

2) **Visi dan Misi**

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 adalah: **“DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA”**.

Pernyataan visi pembangunan Provinsi Jawa Barat diatas, memiliki makna:

1. **Iman dan Takwa** sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama. Pengamalan ajaran secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan situasi yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah.
2. **Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia** dimaksudkan sebagai provinsi yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Keunggulan tersebut yaitu dalam 7 (tujuh) bidang yang sekaligus penciri Jawa Barat termaju di Indonesia Tahun 2025. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu (beyond the

expectation), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan; kedua, masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi; ketiga, pengelolaan pertanian dan kelautan; keempat, energi baru dan terbarukan; kelima, industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif; keenam, infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan serta ketujuh, pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Misi sebagai penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang memiliki makna yang penting. Setiap pernyataan misi dimaksudkan untuk mewujudkan visi sampai Tahun 2025.

1. Misi Satu: **Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing** adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
2. Misi Dua: **Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah**; adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada segenap potensi yang ada di daerah, untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3. Misi Tiga: **Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari**; adalah mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
4. Misi Empat: **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**; adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat; membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislatif dan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.
5. Misi Lima: **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan**; adalah mengurangi kesenjangan social secara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana prasarana dasar, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

3) **Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan Daerah tahap kelima RPJPD (2023-2025) memberi arahan untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai dengan 2025. Tahap kelima RPJPD yang merupakan tahap terakhir dari pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk mencapai keunggulan Jawa Barat di segala bidang sehingga kesejahteraan masyarakat memiliki sifat keberlanjutan dengan kecenderungan yang semakin lama semakin meningkat. Secara lebih spesifik, keunggulan tersebut diindikasikan oleh 7 (tujuh) bidang yang sekaligus menjadi penciri Jawa Barat termaju di Indonesia Tahun 2025. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu (*beyond the expectation*), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan; kedua, masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi; ketiga, pengelolaan pertanian dan kelautan; keempat,

energi baru dan terbarukan; kelima, industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif; keenam, infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan; serta ketujuh, pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia. Pencapaian keunggulan tersebut memiliki makna bahwa masyarakat Jawa Barat memiliki daya saing dan keberhasilan pembangunan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Selain itu, kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional juga relatif lebih tinggi daripada daerah lain.

Keberhasilan pencapaian pembangunan tahap kelima ditandai dengan indikator kinerja sebagai berikut: (a). Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,23–76,01 (dengan metode baru); (b). Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,67%–6,09%; (c). Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,12%; (d). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 50,01-

52,00; (e). Indeks Refomasi Birokrasi kategori A; (f). Persentase Penduduk Miskin sebesar 6,80%–6,27%; (g). Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,45%–7,26%; dan (h). Indeks Gini sebesar 0,35-0,30.

Pencapaian target kinerja pembangunan untuk tahap akhir periode RPJPD Jawa Barat diatas dilakukan melalui berbagai prioritas pembangunan sebagai berikut:

Bidang Pendidikan. Prioritas Pembangunan pendidikan pada periode 2018-2023 adalah Tuntas Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana, yang didukung dengan pola dan kultur belajar siswa yang dikembangkan ke arah pembentukan budaya kualitas melalui proses pembelajaran yang demokratis dan menyenangkan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya.

Upaya-upaya yang terus dilakukan dalam rangka penuntasan akselerasi tersebut yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar 15 (lima belas) tahun dan upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Adapun pengembangan pendidikan

menengah kejuruan dan pendidikan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum internasional.

Pada periode juga ditempuh upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya. Mulai diarahkan untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan melalui penerapan keterampilan dan penguasaan multimedia yang telah diperoleh.

Sedangkan upaya pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan pendidikan tinggi, diprioritaskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas implementasi hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Bidang Kesehatan. Prioritas pembangunan bidang kesehatan diupayakan melalui peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan perbaikan dan pemenuhan kualitas gizi, pengembangan dan penguatan sistem kesehatan, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi), serta terwujudnya pemberian penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkualitas dengan memperhatikan pemerataan pelayanan kesehatan dan tetap membuka peluang bagi peran serta swasta khususnya dalam pengembangan pelayanan medik.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Prioritas pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan pada pemerataan pembangunan antarwilayah di Jawa Barat, sehingga tidak terdapat lagi daerah tertinggal di seluruh wilayah Jawa Barat. Seluruh masyarakat Jawa Barat telah menikmati sarana dan prasarana baik dasar maupun yang bersifat pelayanan

wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan. Hal ini ditempuh dengan upaya-upaya penataan ruang telah dilaksanakan melalui koordinasi yang mantap dan sistematis baik dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, di semua tingkat pemerintahan (didukung dengan infrastruktur data spasial yang mutakhir).

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Prioritas pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di arahkan pada Percepatan pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan.

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Prioritas pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diarahkan pada Memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari serta penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia.

Bidang Sosial. Prioritas pembangunan bidang sosial diarahkan pada pemantapan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat, penguatan peran dan fungsi PSKS dalam penanganan PMKS; dan peningkatan keberdayaan PMKS dengan mengefektifkan sistem perlindungan dan jaminan sosial; serta peningkatan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Bidang Tenaga kerja. Prioritas pembangunan bidang tenaga kerja diarahkan pada Peningkatan kompetensi dan daya saing, melalui upaya-upaya peningkatan sarana, prasarana dan penerapan kurikulum yang terkait dengan dunia kerja dan kewirausahaan pada pendidikan formal; Pembudayaan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

Prioritas pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan

kesehatan; pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat aktif di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat; dan peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Bidang Pangan. Prioritas pembangunan pangan diarahkan pada: peningkatan kualitas, keragaman dan keamanan pangan, melalui upaya-upaya peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat.

Bidang Pertanahan. Prioritas pembangunan bidang pertanahan diarahkan pada terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

Bidang Lingkungan Hidup. Prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup diarahkan pada kemantapan daya dukung lingkungan Jawa Barat harus tetap terjaga secara konsisten bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan agar lebih asri dan lestari tetap dilanjutkan, dilakukan melalui upaya-upaya perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, memelihara fungsi dan kualitas infrastruktur alam, infrastruktur buatan, sarana dan prasarana lingkungan yang terbangun.

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Prioritas pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan pada: peningkatan pengelolaan kependudukan di Jawa Barat melalui upaya Pengendalian kependudukan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Prioritas pembangunan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dan modernisasi BUMDes menjadi sumber utama pendapatan desa.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Prioritas pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan pada Mewujudkan keluarga kecil dan berkualitas, peningkatan penggunaan data penduduk sebagai dasar

acuan pembangunan dan memantapkan persebaran penduduk yang mandiri dan berkualitas.

Bidang Perhubungan. Prioritas pembangunan bidang perhubungan diarahkan pada pemantapan infrastruktur wilayah yang telah terbangun, untuk mendukung pencapaian tujuan RPJPD berikutnya, dengan tetap memperhatikan kualitas kerjasama pemerintah dengan swasta dan masyarakat, sebagai stakeholder pembangunan. Pada tahap ini akan ditandai dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, berkembangnya sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport), mantapnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan, mantapnya pengendalian banjir dan kekeringan, tersedianya jaringan irigasi yang berkelanjutan, mantapnya pelayanan telekomunikasi, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Tersedianya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi dilakukan melalui penyelesaian pembangunan jalan tol yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya termasuk pada ruas Cileunyi- Nagreg-Ciamis sebagai jalan tol antar kota, peningkatan kualitas dan kemantapan jaringan jalan, serta pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi laut dan jalan kereta api yang telah terbangun pada tahap sebelumnya. Sedangkan pada pengembangan infrastruktur transportasi udara, dilakukan penyelesaian pembangunan Bandar Udara Pusat Penyebaran Primer Kertajati di Majalengka, penyelesaian pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier Kalijati di Subang, Bandar Udara Cibeureum di Tasikmalaya, serta Bandar Udara Atang Sanjaya di Bogor, serta pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi udara yang telah terbangun sebelumnya.

Bidang Komunikasi dan Informatika. Prioritas pembangunan komunikasi dan informatika diarahkan pada peningkatan inovasi kualitas pelayanan informasi, melalui upaya-upaya peningkatan inovasi teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dan peningkatan inovasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Prioritas pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah diarahkan pada pemantapan koperasi dan usaha kecil dengan peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil, pengembangan struktur ekonomi koperasi dan usaha kecil serta penyerapan tenaga kerja dan investasi.

Bidang Penanaman Modal. Prioritas pembangunan bidang penanaman modal diarahkan pada Penciptaan Jawa Barat sebagai daerah tujuan utama investasi skala nasional dan internasional.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Prioritas pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga diarahkan pada mempertahankan kemandirian pemuda dan mendorong daya saing pemuda Jawa Barat di skala internasional baik di bidang politik, ekonomi, budaya serta IPTEK. Sedangkan pembangunan olahraga Jawa Barat diarahkan untuk tetap mempertahankan keunggulan olahraga Jawa Barat di tingkat nasional dan internasional, serta menjadikan olahraga sebagai budaya masyarakat Jawa Barat.

Bidang Statistik. Prioritas pembangunan statistik diarahkan pada peningkatan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah melalui upaya-upaya peningkatan akurasi, kecepatan pemenuhan Data Pembangunan.

Bidang Persandian. Prioritas pembangunan bidang persandian diarahkan pada pengamanan informasi, melalui upaya peningkatan kualitas keamanan informasi.

Bidang Kebudayaan. Prioritas pembangunan bidang kebudayaan diarahkan pada pemantapan ketahanan budaya Jawa Barat dalam kehidupan global, mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan menjadikan budaya Jawa Barat, termasuk nilai-nilai luhur yang dikandungnya, sebagai bagian dari interaksi sosial masyarakat Jawa Barat dalam pergaulan masyarakat berskala regional, nasional maupun internasional.

Bidang Perpustakaan. Prioritas pembangunan bidang perpustakaan diarahkan pada peningkatan kualitas perpustakaan di Jawa Barat melalui upaya peningkatan peran perpustakaan guna menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis dan produktif.

Bidang Kearsipan. Prioritas pembangunan bidang kearsipan diarahkan pada peningkatan kualitas kinerja kearsipan daerah melalui upaya peningkatan kualitas sistem kearsipan.

Bidang Kelautan dan Perikanan. Prioritas pembangunan bidang kelautan dan perikanan diarahkan pada Pengembangan perikanan komersial di Pantai Selatan dan Pantai Utara, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha penunjang rekreasi, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha informasi kelautan, pengembangan budaya kelautan (*marine culture*), pengembangan kota-kota pantai (*coastal cities*), pengembangan wisata kelautan dan pengembangan usaha eko-konservasi.

Bidang Pariwisata. Prioritas pembangunan bidang pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan baik sumber daya wisata dan sumber daya pendukung pariwisata Jawa Barat. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pariwisata yang terintegrasi dengan lingkungan, alam, budaya, dan manusia. Pengembangan pariwisata harus mendukung upaya konservasi/preservasi, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan dukungan spesifik daerah.

Bidang Pertanian. Prioritas pembangunan bidang pertanian diarahkan pada pemenangan persaingan, baik nasional maupun global melalui upaya-upaya penguatan keunggulan kompetitif; terpenuhinya konsumsi Provinsi Jawa Barat dan domestik; tingginya daya terima pasar internasional; dan nilai tambah ekspor yang tinggi. Kegiatan pertanian pada tahap ini dicirikan dengan komitmen yang tinggi terhadap tujuan memenangkan keunggulan kompetitif di pasaran ciri bisnis yang berorientasi pada efisiensi, kualitas, keamanan dan keberlanjutan.

Bidang Kehutanan. Prioritas Pembangunan bidang kehutanan diarahkan pada peningkatan kualitas fungsi hutan melalui upaya peningkatan manfaat ekonomi hutan berwawasan lingkungan.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Prioritas pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral diarahkan

pada peningkatan kemantapan sektor energi yang sudah tercapai terus terjaga dan ditingkatkan sehingga pada tahapan ini adalah masa pemeliharaan pasokan energi, mantapnya desa mandiri energi, mantapnya kemampuan masyarakat dalam pembangunan energi.

Bidang Perdagangan. Prioritas pembangunan bidang perdagangan diarahkan pada penguatan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, pemberdayaan produk dalam negeri dan penguatan sistem dan jaringan distribusi barang.

Bidang Perindustrian. Prioritas pembangunan bidang perindustrian diarahkan pada penguatan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan memanfaatkan bahan baku terbarukan, penanganan industri ramah lingkungan, dan penguatan jaringan antar industri, didukung oleh pengembangan SDM industri yang berdaya saing.

Bidang Transmigrasi. Prioritas Pembangunan bidang Transmigrasi diarahkan pada: Penataan persebaran penduduk baik didalam maupun keluar wilayah provinsi melalui upaya-upaya kerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi, peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran, masyarakat Kawasan transmigrasi Lokal (*Resettlement*) dan warga sekitar.

Bidang Perencanaan. Prioritas Pembangunan bidang Perencanaan Pembangunan diarahkan pada: Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui upaya-upaya Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, kualitas kebijakan perencanaan pembangunan berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan, serta kualitas proses perencanaan pembangunan dengan kerjasama multipihak.

Bidang Keuangan. Prioritas pembangunan bidang keuangan diarahkan pada Penguatan kapasitas aparatur, sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan. Prioritas pembangunan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan

kualitas sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan serta pengembangan budaya organisasi yang solid.

Bidang Penelitian dan Pengembangan. Prioritas pembangunan bidang penelitian dan pengembangan diarahkan pada mempertahankan dan terus mengembangkan inovasi IPTEK serta pemantapan provinsi berbasis teknologi informasi sebagai rujukan nasional.

Fungsi lain. Prioritas pembangunan fungsi lain untuk bidang Keagamaan di Jawa Barat diarahkan pada peningkatan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama melalui upaya-upaya pengimplementasian dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penyelesaian berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama, serta pengimplementasian dan pengaktualisasian pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.

Prioritas pembangunan Bidang Politik diarahkan pada membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi, penataan daerah otonom di Jawa Barat serta penguatan kerjasama antar institusi.

Prioritas Pembangunan bidang Hukum dan HAM diarahkan pada pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan hukum guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hak asasi; Peningkatan kualitas lembaga legislatif melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD.

4) **Sasaran Pokok**

Pada umumnya, sasaran pokok pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat merupakan proses kontinum yang harus selalu diwujudkan dari keseluruhan tahap, yaitu berupa indikator kinerja yang makin membaik dari tahap ke tahap sehingga target kinerja akhir periode tahun ke-20 dapat dicapai. Dalam mewujudkan misi

pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat, maka ditetapkan sasaran pokok setiap tahapan pembangunan, yaitu:

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Terpadu dan Dilaksanakan Secara Adil, Merata, dan Terjangkau.

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi pertama, Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahap pertama sebesar 71,12 dan tahap kedua sebesar 73,58 dengan menggunakan perhitungan metode lama. Adapun target Indeks Pembangunan Manusia antara 71,04 sampai dengan 71,54 pada tahap ketiga, lalu pada tahap keempat antara 74,10 sampai dengan 74,68 dan tahap kelima antara 75,23 sampai dengan 76,01.

2. Meningkatnya Perekonomian Daerah

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi kedua, Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Daerah. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja yaitu Laju pertumbuhan ekonomi. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahap pertama sebesar 6,21 persen dan tahap kedua sebesar 6,33 persen. Adapun target Laju Pertumbuhan Ekonomi antara 5,76 persen sampai dengan 5,81 persen pada tahap ketiga, lalu pada tahap keempat antara 5,67 persen sampai dengan 5,89 persen, dan tahap kelima antara 5,67 sampai dengan 6,09 persen.

3. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Secara Alamiah Maupun Penduduk Migrasi

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi ketiga, Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Asri dan Lestari. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk. Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahap pertama sebesar 1,71 persen dan tahap kedua sebesar 1,78 persen.

Adapun target Laju Pertumbuhan Penduduk antara 1,78 persen sampai dengan 1,34 persen pada tahap ketiga, lalu tahap keempat antara 1,34 persen sampai dengan 1,12 persen, dan tahap kelima sebesar 1,12 persen.

4. **Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup**
Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi ketiga, Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Asri dan Lestari. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahap kedua sebesar 47,61 persen. Adapun target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 47,80 persen pada tahap ketiga, lalu pada tahap keempat antara 48,00 persen sampai dengan 50,00 persen, dan tahap kelima antara 50,01 persen sampai dengan 52,00 persen.
5. **Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik**
Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Perolehan Indeks Reformasi Birokrasi pada tahap ketiga kategori BB. Adapun target perolehan Indeks Reformasi Birokrasi kategori A pada tahap keempat dan kelima.
6. **Menurunnya Tingkat Kemiskinan**
Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi kelima, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin. Capaian Persentase Penduduk Miskin pada tahap pertama sebesar 12,74 persen dan tahap kedua sebesar 9,61 persen. Adapun target Persentase Penduduk Miskin pada tahap ketiga sebesar 7,17 persen, lalu pada tahap keempat antara 7,17 persen sampai dengan 6,80 persen, dan tahap kelima antara 6,80 persen sampai dengan 6,27 persen.
7. **Menurunnya Tingkat Pengangguran**

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahap pertama sebesar 12,08 persen dan tahap kedua sebesar 9,16 persen. Adapun target Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahap ketiga sebesar 8,0 persen, lalu pada tahap keempat antara 8,0 persen sampai dengan 7,45 persen, dan tahap kelima antara 7,45 sampai dengan 7,26 persen.

8. Menurunnya Tingkat Ketimpangan

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi kelima, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja Indeks Gini. Capaian Indeks gini pada tahap pertama sebesar 0,36 dan tahap kedua sebesar 0,41. Adapun target Indeks gini pada tahap ketiga sebesar 0,38, lalu pada tahap keempat antara 0,38 sampai dengan 0,35 dan tahap kelima antara 0,35 sampai dengan 0,30.

B. Telaahan RTRW Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 menjadi salah satu dokumen yang harus dipedomani dalam penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Mepedomani RTRW bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana tata ruang.

Penataan Ruang Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Tercapainya ruang berfungsi lindung seluas 45 persen dari Wilayah Daerah Provinsi dengan target pencapaian pada tahun 2042;
2. Tersedianya ruang untuk Ketahanan Pangan;

3. Terwujudnya Ruang Investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
4. Terwujudnya ruang untuk Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dalam sistem Wilayah yang terintegrasi; dan
5. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam Penataan Ruang.

Strategi Penataan Ruang meliputi:

1. Strategi untuk kebijakan pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya, meliputi:
 - a) Menetapkan WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur-Pangandaran dengan fungsi dan arah pengembangan tertentu sesuai potensi dan kendala agar terjadi sinergitas pembangunan;
 - b) Meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa; dan
 - c) Meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.
2. Strategi untuk kebijakan pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi, meliputi:
 - a) Meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap Kawasan;

- b) Mewujudkan Kawasan Perkotaan baru yang terpadu di wilayah PKN Cirebon dengan mengintegrasikan PKW, PKL dan Kawasan Permukiman baru di Kawasan tersebut;
 - c) Meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya;
 - d) Meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
 - e) Menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah utara dan tengah untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; dan
 - f) Pengendalian perkembangan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.
3. Strategi untuk kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi, meliputi:
- a) Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana Wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor Kawasan Perkotaan Bodebek-Kawasan Perkotaan Bandung Raya-Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, dan koridor penghubung PKN-PKW, antar PKW, serta peningkatan konektivitas menuju PKL;
 - b) Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;
 - c) Mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Bodebek, Karawang dan

- Purwakarta, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Kawasan Perkotaan Cirebon Raya untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
- d) Mengembangkan dan membangun pelabuhan laut di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat, serta bandar udara untuk pengembangan Wilayah di Jawa Barat;
 - e) Mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;
 - f) Mengembangkan system telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan perdesaan;
 - g) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian;
 - h) Mewujudkan sistem sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan baru di Wilayah timur Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang;
 - i) Mengembangkan sistem tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;
 - j) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP; dan
 - k) Meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.
4. Strategi untuk kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung, meliputi:
- a) Meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi;

- b) Membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghin dari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;
 - c) Meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budi Daya yang merupakan kawasan resapan air dan Kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan khusus;
 - d) Mempertahankan lokasi Kawasan ekosistem esensial;
 - e) Mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f) Meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam;
 - g) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;
 - h) Mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis;
 - i) Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
 - j) Meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS;
 - k) Mempertahankan dan meningkatkan Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
 - l) Mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.
5. Strategi untuk kebijakan pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional, meliputi:
- a) Mengukuhkan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai KP2B yang tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatan budi daya lainnya;

- b) Mengamankan keberadaan KP2B di Kawasan pesisir pantai utara Daerah Provinsi agar tetap berfungsi sebagai salah satu lumbung padi nasional;
 - c) Melakukan sinergi antara pengembangan jaringan irigasi dengan pengembangan lahan sawah;
 - d) Merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;
 - e) Memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
 - f) Meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan budi daya pertanian sebagai kegiatan ekonomi Wilayah; dan
 - g) Pengembangan lahan sawah yang dilindungi untuk periode 20 tahun ke depan yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan sawah dilakukan melalui mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif dengan peningkatan pembangunan DI baru serta sarana prasarana lainnya yang mendukung penyediaan pangan di Daerah Provinsi.
6. Strategi untuk kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir, laut dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan Ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan, meliputi:
- a) Merehabilitasi Kawasan pelestarian ekologi pesisir, laut dan Pulau Kecil serta Kawasan perlindungan bencana pesisir;
 - b) Mengembangkan kegiatan ekonomi Wilayah melalui peningkatan produktivitas perikanan dan sumber daya laut lainnya;
 - c) Pemanfaatan hutan bakau secara lestari dan terpadu;
 - d) Mengendalikan pencemaran di Kawasan Pesisir, laut dan Pulau Kecil; dan

- e) Mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada tanah timbul melalui pengaturan Pola Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Strategi untuk kebijakan optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a) Meningkatkan ekonomi Wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
 - b) Menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah;
 - c) Mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan menengah agar terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur regional melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tetap menjaga Kawasan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan serta mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan
 - d) Mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan di koridor Bodebek- Cikampek-Bandung serta pada koridor rencana pengembangan KPI di Jawa Barat bagian Utara.
8. Strategi untuk kebijakan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a) Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan agar fungsi Kawasan terjaga; dan
 - b) Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang

- memisahkan Kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan
- c) Strategi pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.4. Telaahan RPJMD dan RPD Kabupaten Berbatasan Kabupaten Sumedang

Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 juga memperhatikan dokumen RPJMD dan RPD daerah lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.1
Telaahan RPJMD/RPD Kabupaten Berbatasan Kabupaten Sumedang

No	Daerah Lain	Periode RPJMD/RPD	Visi/Misi RPJMD/Tujuan RPD	Keterangan
1.	Kabupaten Garut	RPJMD Tahun 2019-2024	<p>VISI :</p> <p>”GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya. 2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. 3. Mewujudkan pemerataan 	Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

No	Daerah Lain	Periode RPJMD/RPD	Visi/Misi RPJMD/Tujuan RPD	Keterangan
			<p>pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang.</p> <p>4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.</p>	
2.	Kabupaten Subang	RPD Tahun 2024 - 2026	<p>Tujuan RPD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 2. Mewujudkan Kesejahteran Masyarakat 3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan 4. Mewujudkan pemanfaatan ruang dalam upayapemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana 5. Mewujudkan Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel 	Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 - 2026
3.	Kabupaten Indramayu	RPJMD Tahun 2021 - 2026	<p>VISI :</p> <p>“TERWUJUDNYA INDRAMYU BERMARTABAT : BERSIH, RELIGIUS, MAJU, ADIL, MAKMUR DAN HEBAT”</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas tata Kelola pemerintahan yang bersih, melayani, melindungi, transparan, akuntabel, 	Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2026

No	Daerah Lain	Periode RPJMD/RPD	Visi/Misi RPJMD/Tujuan RPD	Keterangan
			<p>profesional serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan kata kunci PERWUJUDAN REFORMASI BIROKRASI;</p> <p>2. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan serta pemajuan kebudayaan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Dengan kata kunci FASILITASI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERMASYARAKAT;</p> <p>3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan merata. Dengan kata kunci PENINGKATAN KESEJAHTERAAN;</p> <p>4. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan sumber daya, sehingga mampu berdikari. Dengan kata kunci PENANGGULANGAN KEMISKINAN;</p> <p>5. Meningkatkan pelayanan Pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan kata kunci PENINGKATAN DAYA SAING SDM;</p> <p>6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan efektivitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup. Dengan kata kunci PENINGKATAN</p>	

No	Daerah Lain	Periode RPJMD/RPD	Visi/Misi RPJMD/Tujuan RPD	Keterangan
			INFRASTRUKTUR; dan 7. Meningkatkan ekonomi dan daya saing melalui pengelolaan potensi unggulan daerah. Dengan kata kunci PENINGKATAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH.	
4.	Kabupaten Majalengka	RPD Tahun 2024 - 2026	Tujuan RPD : 1. Meningkatnya Pembangunan Manusia 2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan 3. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026
5.	Kabupaten Tasikmalaya	RPJMD Tahun 2021 – 2026	VISI : “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA” MISI : 1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah 2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional; 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan 4. Mewujudkan iklim investasi yang	Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No	Daerah Lain	Periode RPJMD/RPD	Visi/Misi RPJMD/Tujuan RPD	Keterangan
			<p>kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.</p>	
6.	Kabupaten Bandung	RPJMD Tahun 2021 - 2026	<p>VISI: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG YANG BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS, DAN SEJAHTERA”</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangkitkan Daya Saing Daerah 2. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata 3. Mengoptimalkan pembangunan daeberbasis partisipasi masyarakat yamenjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkakearifan lokal dan berwawasan lingkungan 4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah 	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026

4.2.5. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

Berdasarkan penelaahan faktor internal berupa permasalahan pembangunan dan kebijakan Provinsi Jawa Barat, serta penelaahan faktor eksternal yang meliputi penelaahan isu internasional, isu/kebijakan nasional, dan telaahan RPD daerah sekitar, maka dapat dirumuskan isu strategis daerah. Isu strategis merupakan hal-hal yang berdaya ungkit, bersifat penting untuk pembangunan jangka menengah, dan gambaran permasalahan atau tantangan yang akan ditangani atau dijawab, serta potensi dan peluang yang akan diambil atau dioptimalkan.

Adapun isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai dengan 2026 meliputi:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

- a. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.
- b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat.
- c. Penerapan zero new stunting dan penanganan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria.
- d. Peningkatan standar hidup layak masyarakat.
- e. Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, pembangunan pemuda, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana.
- f. Pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk.

2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan

- a. Penerapan link and match industri kecil-industri besar.
- b. Penerapan UMKM dan industri hijau.
- c. Percepatan digitalisasi ekonomi.
- d. Penerapan pertanian ekologis.
- e. Pembentukan sentra pertanian, perikanan, dan UMKM.
- f. Pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian dan perikanan.
- g. Peningkatan nilai investasi dan kualitas usaha.
- h. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- i. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan.
- j. Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan.

- k. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
 - l. Mitigasi, adaptasi, dan penanggulangan bencana.
 - m. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
 - n. Penerapan circular ekonomi.
- 3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan**
- a. Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir.
 - b. Konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat.
 - c. Pengembangan dan pembangunan kawasan industri Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekkarpur, dan Kawasan Cekungan Bandung.
 - d. Penyediaan transportasi massal perkotaan.
 - e. Penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang terjangkau seluruh wilayah.
 - f. Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah.
 - g. Penyediaan hunian layak huni.
 - h. Pelayanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestik.
 - i. Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah**
- a. Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional.
 - b. Deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum.
 - c. Penataan dan penguatan organisasi.
 - d. Penataan tata laksana proses bisnis, dan SOP serta keterbukaan informasi.
 - e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur.
 - f. Penguatan akuntabilitas.
 - g. Penguatan pengawasan.
 - h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

- i. Penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

4.2.6. Isu Strategis Kabupaten Sumedang

Berdasarkan hasil telaahan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penetapan isu-isu strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dirumuskan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola. Hasil perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2024 sampai dengan 2026 meliputi:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
 - a. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.
 - b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan serta peningkatan gerakan hidup sehat.
 - c. Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular serta penerapan zero new stunting.
 - d. Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pembangunan pemuda dan ketahanan keluarga.
 - e. Peningkatan kompetensi angkatan kerja yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
 - f. Peningkatan efektivitas pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Pertumbuhan ekonomi
 - a. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan peternakan.
 - b. Peningkatan ketahanan pangan daerah.
 - c. Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
 - d. Optimalisasi pemanfaatan kebudayaan daerah dalam menunjang pariwisata.

- e. Pengembangan dan pembangunan kawasan industri kecil dan menengah.
 - f. Percepatan penggunaan teknologi informasi pada setiap sektor ekonomi.
 - g. Peningkatan nilai investasi daerah.
 - h. Penerapan ekonomi sirkular.
3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan
- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan transportasi untuk aksesibilitas dan konektivitas wilayah.
 - b. Mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim.
 - c. Peningkatan dan pemertaan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak).
 - d. Peningkatan prasarana sarana dan utilitas lingkungan serta hunian layak huni.
 - e. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
 - f. Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
 - g. Penataan ruang yang mendukung pengembangan kawasan segitiga Rebana, Cekungan Bandung serta penanggulangan kawasan rawan bencana.
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
- a. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berbasis digital.
 - b. Penguatan penegakan regulasi daerah.
 - c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur.
 - d. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
 - e. Peningkatan dan pemertaan kualitas pelayanan public.
 - f. Peningkatan profesionalisme ASN.
 - g. Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam pembangunan daerah.

Tabel 4.2
Keselarasan Isu Strategis Nasional dengan Isu Strategis Kabupaten Sumedang

ISU STRATEGIS							
NASIONAL	KABUPATEN SUMEDANG	NASIONAL	KABUPATEN SUMEDANG	NASIONAL	KABUPATEN SUMEDANG	NASIONAL	KABUPATEN SUMEDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUASAAN IPTEK	ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN	PERTUMBUHAN EKONOMI	PEMERATAAN PEMBANGUNAN	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN	REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata	Pemerataan pelayanan pendidikan khusus, formal dan non formal didukung sarana prasarana pendidikan yang memadai	Peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri	Peningkatan nilai inverstasi daerah	Percepatan pengentasan kemiskinan		Demokrasi substantif	
Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan			Pengembangan sektor perdagangan melalui teknologi informasi	Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan		Reformasi kelembagaan dan birokrasi	Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berbasis digital (SPBE)
Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan			Optimalisasi pengembangan dan pertumbuhan UMKM	Pemerataan pembangunan wilayah	Mitigasi dan penanggulangan bencana serta Adaptasi Perubahan Iklim		Peningkatan profesionalisme ASN

ISU STRATEGIS							
NASIONAL	KABUPATEN SUMEDANG	NASIONAL	KABUPATEN SUMEDANG	NASIONAL	KABUPATEN SUMEDANG	NASIONAL	KABUPATEN SUMEDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUASAAN IPTEK	ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN	PERTUMBUHAN EKONOMI	PEMERATAAN PEMBANGUNAN	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN	REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat	Optimalisasi peningkatan pelayanan PPKS	Percepatan industri dan pariwisata	Pengembangan dan pembangunan kawasan industri		Optimalisasi Penataan Ruang untuk mendukung pengembangan kawasan segitiga Rebana, Cekungan Bandung serta Penanggulangan kawasan Rawan Bencana		Optimalisasi kualitas pelayanan publik
	Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan ketahanan keluarga		Pengembangan pariwisata melalui optimalisasi kebudayaan daerah	Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah		Akselerasi efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur
	Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan	Pembangunan ekonomi maritim			Penyediaan Infrastruktur dasar yang merata dan terjangkau (Air bersih dan Sanitasi layak)		Penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi

ISU STRATEGIS							
NASIONAL	KABUPATEN SUMEDANG	NASIONAL	KABUPATEN SUMEDANG	NASIONAL	KABUPATEN SUMEDANG	NASIONAL	KABUPATEN SUMEDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUASAAN IPTEK	ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN	PERTUMBUHAN EKONOMI	PEMERATAAN PEMBANGUNAN	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN	REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Optimalisasi prevelensi stunting menuju zero stunting	Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani	Optimalisasi peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan peternakan		Pemenuhan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Politik luar negeri bebas aktif	
Reformasi ketenagakerjaan	Peningkatan kompetensi angkatan kerja yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja		Stabilisasi ketahanan pangan		Peningkatan Pengelolaan Persampahan melalui pemberdayaan masyarakat	Penguatan ketahanan dan keamanan	Penguatan penegakan regulasi daerah
		Pemantapan ketahanan energi dan air					
		Komitmen terhadap lingkungan hidup					

Tabel 4.3
Keselarasan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dengan Isu Strategis Kabupaten Sumedang

ISU STRATEGIS							
PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG	PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG	PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG	PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG
KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING	PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN	PERTUMBUHAN EKONOMI	PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR DASAR	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN	REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI DAERAH	ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	Pemerataan pelayanan pendidikan khusus, formal dan non formal didukung sarana prasarana pendidikan yang memadai	Penerapan pertanian ekologis		Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir		Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang professional	Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berbasis digital (SPBE)
Peningkatan kualitas dan aksesibilitas utara dan selatan Jawa Barat	Peningkatan kompetensi angkatan kerja yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja	Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan	Stabilisasi ketahanan pangan	Konektivitas dan aksesibilitas di wilayah utara dan selatan Jawa Barat	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah		Peningkatan profesionalisme ASN

ISU STRATEGIS							
PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG	PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG	PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG	PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG
KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING	PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN	PERTUMBUHAN EKONOMI	PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR DASAR	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN	REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI DAERAH	ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penerapan zero new stunting dan penanganan AIDS Tuberkulosis dan Malaria	Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan	Pembentukan sentra pertanian, perikanan dan UMKM		Pengembangan dan pembangunan Kawasan industry Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekkarpur, dan Kawasan Cekungan Bandung	Optimalisasi Penataan Ruang untuk mendukung pengembangan kawasan segitiga Rebana, Cekungan Bandung serta Penanggulangan kawasan Rawan Bencana	Deregulasi peraturan perundangundangan , peraturan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum	Penguatan penegakan regulasi daerah
	Optimalisasi prevelensi stunting menuju zero stunting	Penerapan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim		Penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang terjangkau seluruh wilayah	Penyediaan Infrastruktur dasar yang merata dan terjangkau (Air bersih dan Sanitasi layak)	Penataan dan penguatan organisasi	Akselerasi efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur
Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Optimalisasi peningkatan pelayanan PPKS	Penerapan UMKM dan industri hijau		Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah		Penataan tata laksana proses bisnis dan SOP serta keterbukaan informasi	

ISU STRATEGIS							
PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG	PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG	PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG	PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG
KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING	PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN	PERTUMBUHAN EKONOMI	PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR DASAR	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN	REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI DAERAH	ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana	Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan ketahanan keluarga	Percepatan digitalisasi ekonomi	Pengembangan sektor perdagangan melalui teknologi informasi	Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pemenuhan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Penataan sistem manajemen SDM aparatur	
		Penerapan circular ekonomi		Pelayanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestic	Peningkatan Pengelolaan Persampahan melalui pemberdayaan masyarakat	Penguatan akuntabilitas	
		Pengembangan ekonomi local pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian dan perikanan	Optimalisasi peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan peternakan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Mitigasi dan penanggulangan bencana serta Adaptasi Perubahan Iklim	Penguatan pengawasan	Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah

ISU STRATEGIS							
PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG	PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG	PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG	PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG
KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING	PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN	PERTUMBUHAN EKONOMI	PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR DASAR	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN	REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI DAERAH	ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Optimalisasi pengembangan dan pertumbuhan UMKM	Penyediaan transportasi massal perkotaan		Kualitas pelayanan public	Optimalisi kualitas pelayanan publik
			Pengembangan pariwisata melalui optimalisasi kebudayaan daerah			Penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	Penerapan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam pembangunan daerah
		Penerapan link and match industri kecil industri besar	Pengembangan dan pembangunan kawasan industri				
			Peningkatan nilai inverstasi daerah				

ISU STRATEGIS							
PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG	PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG	PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG	PROVINSI	KABUPATEN SUMEDANG
KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING	PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN	PERTUMBUHAN EKONOMI	PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR DASAR	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN	REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI DAERAH	ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mitigasi, adaptasi, dan penanggulangan bencana					

4.2.7. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan disusun berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan urusan, evaluasi hasil RPJMD periode 2018-2023 dan didukung informasi dari perangkat daerah. Penyajian permasalahan pembangunan pada subbab ini meliputi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah Pokok menggambarkan masalah utama dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab yang dimuat pada kolom Masalah, dan selanjutnya Akar Masalah merupakan penyebab lebih rinci dari munculnya Masalah. Penyajian permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 4.4
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Pendidikan		
Belum meratanya pelayanan pendidikan yang memadai	Pelayanan Pendidikan belum Optimal yang didukung sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia yg memadai	Literasi peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum pada jenjang SD sebesar 57,12% dan jenjang SMP 62,81% di Kabupaten Sumedang sehingga masih perlu peningkatan (Capaian Literasi)
		Masih rendahnya Numerasi peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum pada jenjang SD sebesar 24,50% dan jenjang SMP 29,75% di Kabupaten Sumedang (Capaian Numerasi)
		Karakter peserta didik pada jenjang SD sebesar 89,74% dan jenjang SMP 47,93% di Kabupaten Sumedang sehingga masih perlu dikembangkan (Capaian Surver Karakter)
		Persentase Sebaran Guru Sekolah Dasar (Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru PAI, dan Guru PJOK) masih rendah yaitu 50,30% (Jumlah Guru Ideal jenjang Sekolah Dasar sebanyak 6.313 orang, Keadaan Guru saat ini sebanyak 4.269

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		<p>orang, sehingga kebutuhan guru saat ini sebanyak 2.044 orang)</p> <p>Persentase Sebaran Guru Sekolah Menengah Pertama (Kepala Sekolah, Guru PAI, Guru PKn, Guru B.Indo, Guru Math, Guru IPA, Guru IPS, Guru Ing, Guru SenBud/Muatan Lokal, Guru Prakarya, Guru BK, dan Guru PJOK) masih rendah yaitu 45,58% (Jumlah Guru Ideal jenjang Sekolah Dasar sebanyak 2.145 orang, Keadaan Guru saat ini sebanyak 1.484 orang, sehingga kebutuhan guru saat ini sebanyak 661 orang)</p> <p>Masih rendahnya Jumlah pendidik yang memiliki ijazah S1/D4, S2, dan S3 pada jenjang PAUD yaitu 37,16% dari total pendidik di seluruh satuan PAUD formal maupun nonformal (Proporsi Pendidik Berijazah Minimal S1/D4)</p> <p>Masih rendahnya Rasio Penilik PAUD DIKMAS yang saat ini 1:27 lembaga sedangkan rasio ideal adalah 1:10 lembaga</p> <p>Masih rendahnya Rasio Pengawas TK yang saat ini 1:20 satuan pendidikan sedangkan rasio ideal adalah 1:15 satuan Pendidikan</p> <p>Masih rendahnya Rasio Pengawas SD yang saat ini 1:14 satuan pendidikan sedangkan rasio ideal adalah 1:10 satuan Pendidikan</p> <p>Masih rendahnya Rasio Pengawas SMP yang saat ini 1:11 satuan pendidikan sedangkan rasio ideal adalah 1:7 satuan Pendidikan</p> <p>Rendahnya Persentase peserta didik yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti PAUD, yaitu 49,22% dari seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD (Angka Kesiapan Sekolah)</p> <p>Masih terdapat sekolah yang kekurangan RKB terutama di wilayah padat penduduk</p> <p>Masih terdapat bangunan sekolah yang rusak dan membahayakan siswa dan membahayakan warga sekolah</p>

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		Masih banyak sekolah sekolah yang kekurangan TIK dalam mendukung proses belajar mengajar contohnya dlam melaksanakan AKM. Serta msih terdapat sekolah sekolah yang tidak terjangkau oleh jringan internet
Kesehatan		
Pelayanan kesehatan yang belum merata di setiap wilayah	Pelayanan kesehatan belum optimal	Tingginya angka kematian Ibu dan angka kematian Balita (AKI/AKB)
		Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan
		Masih terdapat kesulitan akses ke pelayanan Kesehatan
		Jumlah tempat tidur di RSUD masih belum ideal
		Belum optimalnya UHC (Universal Health Coverage)
	Prevelensi Stunting yang masih perlu diturunkan menuju zero stunting	Masih terdapatnya kasus stunting
Pengendalian penyakit menular dan tidak menular belum optimal	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) dan Tidak Menular	
Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal	Pola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Belum meratanya Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah	Kondisi Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis Masih kurang Memadai	Lebar Jalan Kabupaten dan jalan strategis rata- rata kurang memenuhi standar Jalan Kabupaten
		Akses Jalan menuju akses ke Pariwisata kondisi nya rusak sedang
		Akses Jalan menuju akses ke Pusat Kegiatan Perkotaan BUTOM GEDE kondisinya rusak sedang
		Kondisi Jalan dan Saluran Drainase Jalan Kabupaten yang terlintasi oleh akses jalur tol kondisinya rusak berat
		Jalan Kabupaten yang berada di perbatasan wilayah kondisinya masih rusak berat.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Rendahnya Sumber daya air	Cakupan Area Irigasi masih Rendah	Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air yang belum optimal
		Jaringan irigasi masih banyak mengalami kerusakan
		Banyak sungai dan sumber daya air lainnya yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor
		Banyaknya lokasi jaringan irigasi yang terdampak oleh bencana banjir/longsor
		Perubahan fungsi ruang pertanian menjadi perumahan/pemukiman dan infrastruktur lainnya
	Ketersediaan Air Minum belum mencukupi secara merata	Penurunan Kapasitas sumber air baku karena alih fungsi lahan
		Berkurangnya kapasitas sumber air baku pada saat musim kemarau
		Kondisi WTP yang sudah tidak optimal
		Tingkat kebocoran air pada jalur transmisi dan distribusi yang masih cukup tinggi
		Bangunan SPAM perdesaan terbangun ada yang terbengkalai
		Pembinaan terhadap keberlanjutan kelompok masyarakat pengelola SPAM kurang optimal
	Rumah Tangga Bersanitasi	Perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat dalam hidup sehat
		Masyarakat masih ada yang belum memiliki Sarana dan prasarana sanitasi (basis data Podes)
		Penyediaan tanah/lahan untuk membangun sanitasi komunal sangat sulit sehingga saat ini limbah domestik masih dibuang ke sungai
	Masih Rendah kondisi bangunan yang sesuai standar	Gedung pemerintahan belum memiliki PBG dan SLF
Kurangnya pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Umum		

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum Optimalnya Penataan Ruang untuk mendukung Proyek Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten	Dokumen Tata Ruang belum sesuai dengan perubahan regulasi dan perkembangan pembangunan	Perlu dilaksanakan reviu Rencana Tata Ruang Wilayah dikarenakan banyaknya dinamika regulasi
		Investasi belum berjalan secara optimal dikarenakan baru ada 1 (satu) RDTR yang sudah terkoneksi dengan OSS
Perkembangan alih fungsi lahan sehingga perlu adanya pemutakhiran data		
Perlu dilaksanakan pemutakhiran dokumen Rencana Detail Tata Ruang karena adanya peraturan perundangan terbaru mengenai penataan ruang		
Perlu disusunnya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang, serta kebijakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang		
	Masih Rendahnya Ketaatan Penata Ruangan	Terdapat pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak masyarakat dan dunia usaha belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam rencana tata ruang, khususnya terkait dengan arahan pemanfaatan ruang sehingga perlu dilaksanakan pengendalian terhadap rencana tapak yang sudah disahkan
Masih rendahnya Pelayanan Jasa Kontruksi	Belum tertibnya pelayanan Jasa Konstruksi	Tenaga kerja Konstruksi belum bersertifikat
		Layanan Data dan Informasi Jasa Konstruksi pada SIMJAKON belum Optimal (Profil Tenaga Kerja Konstruksi dan BUJK, Pasar Jasa Konstruksi, Materal dan Peralatan Jasa Konstruksi, Pelatihan Jasa Konstruksi, Profil Kecelakaan Kerja proyek Jasa Konstruksi, Peraturan Jasa Konstruksi, Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan
		Penyedia Jasa Konstruksi belum mempunyai SBU
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi belum Optimal.
Perumahan dan Kawasan Permukiman		

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum merata dan terjangkau ketersediaan infrastruktur dasar, Perumahan dan pemukiman	Penanganan Infrastruktur Perumahan dan pemukiman belum optimal	Belum optimalnya penanganan limbah domestic, tidak berfungsinya IPLT, belum adanya operator khusus yang mengelola Air Limbah domestik, kesadaran masyarakat terhadap sanitasi masih rendah
		Belum Optimalnya Penanganan Kawasan Kumuh
		Belum adanya database Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan dan Permukiman yang tidak memenuhi standar
		Belum tersusunnya Dokumen RP3KP selaku dokumen perencanaan sektoral bidang perumahan permukiman serta legalisasinya (Perda/Perbup)
		Backlog Rumah di Kabupaten Sumedang Masih Tinggi
		Rasio Rumah Tidak Layak Huni masih rendah
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
Belum Optimalnya Penguatan Penegakan regulasi Daerah	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum belum optimal	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan daerah
		Belum efektifnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
		Terdapatnya Regulasi yang tumpang tindih
		Daya Dukung pembinaan dan pemberdayaan anggota Satlinmas kurang optimal. Banyak anggota Linmas yang telah berusia lanjut sehingga berpengaruh kepada kualitas SDM Satlinmas
		Kurang minatnya warga masyarakat pemuda/pemudi yang ingin menjadi anggota linmas
Sebagian besar wilayah yang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim	Penanggulangan dan Penanganan Bencana belum optimal	Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		<p>Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana</p> <p>Belum memadainya Pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana</p> <p>Kurangnya Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana</p>
Sosial		
Pelayanan PPKS yang masih perlu ditingkatkan efektivitasnya	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih belum Optimal	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum akurat (Valid)
		Peran Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal
		Belum terintegrasinya pelayanan kesejahteraan sosial tingkat desa
		Sarana dan prasarana pelayanan sosial belum memadai.
Tenaga kerja		
Masih terdapatnya mismatch dan miseducation antara kompetensi angkatan kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja	Kompetensi Pencari Kerja masih rendah	Program pelatihan yang disediakan oleh LPK swasta masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas lulusan BLK/LPK di dalam pasar kerja
	Tidak sebandingnya antara jumlah pencari kerja dengan ketersediaan kesempatan Kerja	Kurang efektivitasnya informasi pasar kerja
		Belum optimalnya Keppres 04 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas komunikasi antara pekerja dengan pengusaha
		Masih adanya permasalahan hubungan antara pekerja dengan pengusaha
	Belum memadainya SDM Pndukung Ketenaga kerjaan	Kurangnya tenaga fungsional mediator hubungan industrial
		Belum tersedianya SDM fungsional pengantar kerja

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		Masih kurangnya tenaga SDM instruktur BLK yang berkompeten
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Responsif Gender	Rendahnya kualitas hidup perempuan	Masih rendahnya kualitas hidup, perlindungan dan kesejahteraan terhadap perempuan
		Belum tersedianya data terbaru mengenai organisasi wanita yang aktif
		Partisipasi perempuan di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum masih rendah
		Masih rendahnya tingkat kesejahteraan anak
	Masih Adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perempuan dan anak masih menjadi sasaran utama tindak kekerasan
		Kurangnya sosialisasi mengenai Lembaga-lembaga perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak
Pangan		
Ketahanan pangan yang rentan terhadap disrupsi ekonomi	Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat	Belum meratanya ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah.
		Tingginya potensi penduduk yang terkena rawan pangan; dan
		Lemahnya akses data dan informasi harga pasokan dan akses pangan.
		Intervensi/penanganan desa rawan pangan tidak tepat berada di lokasi desa yang termasuk kategori miskin tinggi.
		Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang.
		Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal.
		Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan dimasyarakat sebagai sumber pangan bergizi dan pendapatan keluarga.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		<p>Belum optimalnya sosialisasi keamanan PSAT kepada masyarakat, produsen, dan pelaku usaha.</p> <p>Kesadaran pelaku usaha untuk registrasi PSAT-PDUK masih rendah, karena kesadaran dan pemahaman keamanan PSAT masih rendah.</p> <p>Terbatasnya sarana dan prasarana untuk uji lab keamanan PSAT.</p>
	Rendahnya diversifikasi pangan	<p>Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras.</p> <p>Masih rendahnya konsumsi penganekaragaman pangan masyarakat.</p> <p>Belum optimalnya kesadaran konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, masih ada daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (stunting).</p> <p>Kurangnya Promosi Pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) di tingkat masyarakat.</p> <p>Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang.</p>
Pertanahan		
Belum optimalnya kinerja bidang Pertanahan	Proses Pengadaan lahan untuk kepentingan umum, penanganan sengketa tanah dan pemanfaatan Tanah belum optimal	<p>Terkendalanya pembebasan lahan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan sarana pelayanan umum lainnya</p> <p>Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Tol CISUMDAWU, Bendungan Jatigede, dan Bendungan Sadawarna oleh Pemerintah Daerah Kabupaten</p> <p>Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Eks HGU serta Sengketa Penguasaan Hutan, dan permasalahan LC Kelurahan Situ</p>

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Lingkungan Hidup		
Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Degradasi kualitas lingkungan hidup
		Peningkatan timbulan sampah
		Penyelenggaraan prasarana sarana persampahan belum optimal
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
Belum meratanya Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal	Belum Optimalnya proses pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk
		Jangkauan pelayanan yang sangat luas
		Ketersediaan blangko KTP dari Pusat terbatas alokasinya untuk daerah
		Belum optimalnya proses pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil.
		Belum Optimalnya pencatatan peristiwa penting lainnya (kelahiran, kematian, perkawinan dll)
		Pemanfaatan data penduduk yang masih belum maksimal penggunaannya
		Akses ke Data Center sangat terbatas sehingga menghambat pelayanan Data Kependudukan
		Belum Optimalnya Penggunaan Layanan Daring
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Masih rendahnya jumlah Desa Mandiri	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mendorong Pertumbuhan Perekonomian belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan BUMDes
		Belum optimalnya penyediaan kebutuhan dan data untuk Desa Wisata dan Inovasi Desa
		Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna di desa
		Masih rendahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan desa
		Belum optimalnya fasilitasi Perencanaan Pembangunan di desa

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		dari mulai penyusunan RPJMDes, RKPdes, RAPBDes dan APBDes
		Kualitas Pengelolaan Desa Dalam Siskeudes, Pemanfaatan Potensi Desa dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) sesuai Standar belum optimal
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
Masih Tingginya Angka TFR	Belum optimalnya pengendalian penduduk melalui KB	Tingginya angka Pasangan Usia Subur Muda
		Struktur penduduk usia muda tinggi
		Masih cukup tinggi angka kelahiran
		Masih tingginya cakupan yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi (unmet need)
		Tingginya pernikahan dibawah usia 20 tahun
		Rendahnya kesertaan KB Pria
		Masih rendahnya capaian KB MKJ
Kemandirian keluarga peserta KB belum optimal	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I masih tinggi	Rendahnya motivasi keluarga pra sejahtera dalam berwirausaha
		Belum optimalnya penyuluhan tentang pemberdayaan ekonomi terhadap keluarga Pra sejahtera
		Bantuan modal untuk usaha masih terkendala
Perhubungan		
Masih rendahnya kenyamanan, Keselamatan dan Ketertiban Pengguna Jalan.	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	Belum berhasilnya penanganan masalah kemacetan di simpul titik kemacetan Kabupaten Sumedang, yaitu simpangan pusat aktifitas di ibukota, Pasar dan Alun-alun Tanjungsari, pertigaan Cimalaka, dan Jatinangor
		Belum optimalnya pengelolaan parkir termasuk pengendalian parkir liar
		Belum optimalnya pelayanan terminal tipe C yang sudah ada dan Belum Adanya Terminal Barang sesuai kewenangan kabupaten

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		<p>Belum memadainya koordinasi terkait pembatasan angkutan barang yang melalui jalan arteri di Kabupaten Sumedang, sehingga berakibat pada kemacetan, polusi, rawan kecelakaan, dan lain-lain</p> <p>Belum memadainya Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan dalam mendukung Program Prioritas daerah</p> <p>Belum memadainya trayek angkutan penumpang antar kecamatan</p> <p>Minimnya sarana dan prasarana uji kendaraan</p> <p>Belum adanya pengawasan dan pengendalian keselamatan transportasi air Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) dan dampak aktifitas Pariwisata di sekitar Waduk</p> <p>Belum adanya Dokumen Perencanaan Tataan Transportasi Lokal sesuai perkembangan Tata ruang dan perubahan regulasi.</p> <p>Belum optimalnya sosialisasi keselamatan berlalu lintas</p> <p>Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan kualifikasi teknis dalam bidang Perhubungan</p>
Komunikasi Dan Informatika		
Literasi Digital masih belum optimal	Layanan komunikasi dan informasi masih perlu peningkatan	<p>Sistem pengendalian dan pengawasan komunikasi belum optimal;</p> <p>Kurangnya kewenangan dalam penanganan permasalahan komunikasi;</p> <p>Peran dan fungsi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat lainnya dalam diseminasi informasi belum optimal;</p> <p>Belum optimalnya peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Perangkat Daerah dalam</p>

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		<p>pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);</p> <p>Partisipasi masyarakat dalam pengaduan pelayanan publik masih rendah</p> <p>Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi publik;</p> <p>Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi public</p> <p>Kurangnya kapasitas Back Up listrik untuk NOC (Network Operation Control);</p> <p>Kurangnya Infrastruktur pendukung NOC (Network Operation Control);</p> <p>Kurangnya Kapasitas Bandwidth Internet untuk mengcover kebutuhan Internet setiap OPD Kabupaten Sumedang;</p> <p>Kurangnya Pengembangan Keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersertifikasi di bidang Informatika.</p>
Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah		
Lambatnya pertumbuhan nilai ekonomi Koperasi dan UMKM	Melemahnya peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	Kurangnya pengetahuan sumber daya aparatur dalam pemanfaatan IT
		Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi
		Tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya
		Terbatasnya permodalan dalam pengembangan koperasi
		Lemahnya manajemen koperasi
		Rendahnya tingkat kewirausahaan koperasi
	Peningkatan UMKM belum optimal	Rendahnya pemanfaatan IT oleh pelaku usaha
		Database UMKM belum tersedia secara akurat
		Kualitas produk usaha mikro belum bisa bersaing

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		Terbatasnya pelaku usaha yang dapat mengakses permodalan
Penanaman Modal		
Belum Optimalnya Iklim Investasi Daerah	Jumlah penanaman modal di Kabupaten Sumedang belum sebanding dengan potensi investasi	Belum adanya peta data potensi investasi unggulan daerah yang lengkap sesuai dengan kondisi daerah
		Belum adanya data potensi investasi yang sudah diolah dan dikembangkan menjadi peluang investasi melalui analisis
		Belum adanya data peluang investasi unggulan daerah (sudah dilakukan analisis) sebagai bahan promosi
		Belum adanya dokumen strategi promosi investasi sebagai bahan atau acuan pelaksanaan kegiatan promosi
Kepemudaan Dan Olahraga		
Masih Rendahnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Masih rendahnya peran dan partisipasi pemuda dalam mendorong percepatan pembangunan	Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan
		Belum maksimalnya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan kepemudaan
		Belum maksimalnya sarana dan prasarana kepemudaan
		Rendahnya daya kreasi generasi muda
		Masih tingginya kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat terlarang
		Rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi pemuda maupun kelompok kepemudaan berprestasi
	Masih minimnya jumlah atlet berprestasi	Belum maksimalnya prestasi keolahragaan di event-event Kejuaraan regional Jawa Barat maupun Nasional
		Rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga
		Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan
		belum maksimalnya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan keolahragaan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		<p>Pembinaan maupun pembibitan belum terencana dengan baik</p> <p>Kurangnya penyelenggaraan kegiatan kejuaraan</p> <p>Rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi atlet maupun tenaga keolahragaan berprestasi</p>
Masih rendahnya prestasi olahraga	Masih minimnya jumlah atlet berprestasi	<p>Belum maksimalnya prestasi keolahragaan di event-event Kejuaraan regional Jawa Barat maupun Nasional</p> <p>Rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga</p> <p>Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan</p> <p>belum maksimalnya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan keolahragaan</p> <p>Belum optimalnya Pembinaan maupun pembibitan para atlet;</p> <p>Kurangnya penyelenggaraan kegiatan kejuaraan</p> <p>Rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi atlet maupun tenaga keolahragaan berprestasi</p> <p>Masih kurangnya dukungan fasilitas sarana dan prasarana olahraga</p>
Statistik		
Ketersediaan data yang akurat dan berkualitas	Masih rendahnya kualitas Data dan realtime	<p>Masih kurangnya pemahaman terhadap Pengelolaan Data dari setiap produsen data</p> <p>Masih banyak data yang belum disampaikan oleh Produsendata kepada walidata</p> <p>Beberapa data yang dikumpulkan masih belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan dimensi kualitas data</p> <p>Masih adanya perbedaan konsep dan defisini data antara produsen data</p> <p>Masih terdapat kesalahan dalam Proses input data dari produsen data</p>

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		Masih banyak Perangkat Daerah selaku produsen data yang belum melakukan Updating data secara periodik sesuai dengan waktu rilis data
		Masih kurangnya SDM dalam pengelolaan data
Persandian		
Pengamanan Informasi daerah	Masih Rendahnya Pengamanan Skor Informasi daerah	Pemahaman pengguna aplikasi dalam aspek keamanan informasi masih rendah
		Belum optimalnya penggunaan tahapan dalam pembangunan sistem elektronik yang ada
		Sarana prasarana masih belum memadai, seperti : laptop, pc, lisensi aplikasi pentest, lisensi windows, lisensi antivirus.
		Kurangnya alat pendukung dalam menjalankan monitoring keamanan informasi
Kebudayaan		
Belum optimalnya pemanfaatan kebudayaan daerah dalam menunjang pariwisata	Masih rendahnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan	Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung kebudayaan
		Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya
		Pelaksanaan event seni budaya/promosi budaya masih terbatas
		Pelestarian situs cagar budaya belum optimal (masih banyak yang tidak terpelihara)
		Belum optimalnya sosialisasi dan implementasi Sumedang Puseur Budaya Sunda;
Perpustakaan		
Masih Rendahnya Indeks Literasi	Sarana dan prasarana perpustakaan belum memadai	Koleksi bahan pustaka sangat terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
		Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai
		Layanan perpustakaan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemustaka

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		<p>Masyarakat Kabupaten Sumedang banyak tersebar di desa-desa, sehingga akses terhadap pelayanan perpustakaan daerah sangat terbatas, sementara perpustakaan desa kurang berkembang</p> <p>Jangkauan perpustakaan keliling sangat terbatas</p> <p>Minat baca masyarakat masih rendah</p>
Kearsipan		
Rendahnya Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Belum adanya kesamaan persepsi di setiap PD terhadap kearsipan	Masih rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap kearsipan
		Belum adanya peraturan yang mengatur tentang jadwal retensi arsip
		Belum adanya fitur pada aplikasi Super e-Office untuk penyusutan arsip
		Masih rendahnya pemeliharaan kearsipan
Kelautan Dan Perikanan		
Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk budidaya perikanan
		Penggunaan pakan yang tidak tepat
		Masih rendahnya Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan Sumber Daya Manusia Perikanan terutama untuk Kelompok Perikanan
		Belum adanya pusat atau sentra produksi perikanan dan pengolahan, dan belum terpetakannya potensi antar wilayah
		Perubahan iklim dan cuaca
		Belum optimalnya penerapan teknologi perikanan
		Belum optimalnya pemanfaatan Potensi Perairan Umum Daratan (PUD)
		Belum adanya orientasi bisnis dalam usaha budidaya, penangkapan dan pengolahan perikanan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi perikanan
		Belum optimalnya kelembagaan perikanan
		Rendahnya kualitas benih ikan
	Konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah	Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat, sebagai akibat terdapatnya beberapa masyarakat yang tidak menyukai konsumsi utuh ikan, sehingga diperlukan upaya diversifikasi olahan perikanan dan Optimalisasi Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN)
	Pasar yang tidak efisien	Kurangnya akses ke pasar
Harga yang tidak stabil		
Pariwisata		
Rendahnya kunjungan wisata	Sarana prasarana pariwisata masih kurang memadai	Akses menuju destinasi wisata kurang memadai
		Terbatasnya promosi pariwisata seni dan budaya
		Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan
		Masih rendahnya atraksi pariwisata
		Belum tersedianya amenities dilokasi wisata
		Masih rendahnya kualitas SDM bidang kepariwisataan
	Sub sektor ekonomi kreatif belum berkembang	Pengetahuan masyarakat dan ASN mengenai ekonomi kreatif masih kurang
		Kurangnya kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI)
		Masih kurangnya infrastruktur serta sarana dan prasarana ekonomi kreatif
		Belum terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif
		Peran komunitas pelaku ekonomi kreatif belum maksimal
		Kualitas SDM ekonomi kreatif masih kurang

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		Masih kurangnya event-event untuk apresiasi dan promosi ekonomi kreatif
		Masih kurangnya konsumsi dan pemanfaatan produk ekonomi kreatif
		Belum terciptanya sistem distribusi produk ekonomi kreatif yang efektif
		Forum komunitas pelaku ekonomi kreatif belum terbentuk sampai tingkat kecamatan
Pertanian		
Masih Rendahnya Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;	Pasar yang tidak efisien	Kurangnya akses ke pasar
		Ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dirantai pasokan atau monopoli
	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan usaha pertanian	Rendahnya kualitas SDM petani
		Rendahnya regenerasi petani.
		Rendahnya kapasitas petani milenial
		Terbatasnya jumlah SDM penyuluh pertanian; dan
		Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh.
	Produksi komoditas pertanian yang rendah	Ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida non organik
		Sulitnya akses terhadap pupuk
		Biaya produksi yang tinggi
		Terbatasnya penyebaran dan penyediaan benih unggul bersertifikat
		Belum optimalnya penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
		Rendahnya dukungan sarana prasarana dalam rangka penerapan budidaya pertanian yang ramah lingkungan.
		Rendahnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dalam budidaya pertanian yang baik, Good Handling Practices (GHP) dalam penanganan pascapanen yang baik,

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		dan Good Manufacturing Practices (GMP) dalam sistem yang memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan diawasi sesuai dengan standar kualitas.
		Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan (Pemetaan Cluster Pertanian).
		Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP), Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) serta percepatan tanam baik kuantitas maupun kualitas.
		Teknologi bidang pertanian dan Digitalisasi Pertanian masih rendah
		Alih Fungsi Lahan Pertanian.
		Minimnya Akses terhadap permodalan.
		Perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim
	Persaingan dengan produk impor	Rendahnya kualitas produk pertanian
	Rendahnya nilai tambah produk pertanian	Terbatasnya Pengolahan Hasil Pertanian dan promosi produk pertanian
		Kurangnya investasi dalam teknologi bidang pertanian
Masih Rendahnya Nilai Tukar Petani Peternak	Pasar yang tidak efisien	Kurangnya negosiasi harga
		Kurangnya akses ke pasar
		Tidak adanya jaminan kualitas
	Persaingan yang tidak sehat	Struktur pasar yang tidak sehat
		Belum optimalnya kelembagaan peternakan.
	Kurangnya akses teknologi modern	Rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM peternak terhadap teknologi dan inovasi.
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi usaha peternakan.
	Rendahnya produksi peternakan	Semakin berkurangnya lahan untuk budidaya peternakan dan sumber pakan sebagai akibat pembangunan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		<p>proyek strategis nasional, pemukiman, dan pembangunan lainnya</p> <p>Usaha budidaya peternakan sebagian besar masih merupakan usaha sambilan / belum berorientasi bisnis</p> <p>Masih kurangnya sarana pendukung usaha peternakan seperti Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Sumber Air Peternakan, Puskesmas / Klinik Hewan, Pusat Promosi, Instalasi Pembibitan, Kawasan Peternakan dan sebagainya.</p> <p>Harga pakan dan bahan baku pakan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh, dimana pakan merupakan komponen terbesar biaya produksi peternakan.</p> <p>Masih adanya serangan wabah penyakit ternak</p> <p>Masih terbatasnya akses sarana dan prasarana produksi peternakan.</p>
	Rendahnya nilai tambah produk peternakan	<p>Rendahnya kualitas pakan ternak</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>Kurangnya manajemen peternakan yang baik</p> <p>Biaya produktifitas yang tinggi.</p>
	Pasar yang tidak efisien	<p>Kurangnya akses ke pasar</p> <p>Harga yang tidak stabil</p>
Kehutanan		
Belum Optimalnya Perekonomian masyarakat sekitar Taman Hutan Rakyat	Kreativitas ekonomi masyarakat sekitar penyangga Tahura belum optimal	Kurang efisiensinya pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura);
		Hutan Kota belum dikembangkan
Perdagangan		
Usaha Perdagangan yang kurang berkembang	Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan	Belum adanya kesepakatan kerjasama antara distributor, koperasi dan pelaku usaha perdagangan untuk melakukan sistem jaringan usaha

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		Kurang fahamnya masyarakat untuk melakukan perdagangan secara online
	Revitalisasi Pasar Rakyat	Belum terwujudnya kesepakatan antara warga pasar dengan Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan pasar
		Masih terdapatnya lahan-lahan belum bersertifikat yang akan diperuntukan pembangunan pasar
		Belum adanya data valid mengenai perdagangan besar dan eceran yang tersebar di Kabupaten Sumedang
	Akses permodalan	Kurangnya informasi permodalan bagi pelaku usaha
	Kurangnya infrastruktur yang memadai	Rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan
Perindustrian		
Laju Pertumbuhan Industri pengolahan masih rendah	Kurangnya tingkat investasi	Kurangnya akses terhadap permodalan
		Kondisi ekonomi yang kurang stabil
		Biaya produksi yang tinggi
		Kurangnya dukungan infrastruktur
		Sertifikasi hasil industri belum menyeluruh
		Masih kurangnya promosi peluang investasi
	Kurangnya penerapan teknologi dan inovasi	Kurangnya SDM yang terampil
		Resistensi dari pekerja
	Kurangnya pemasaran	Masih kurangnya promosi produk IKM
		Belum optimalnya pemasaran produk IKM
Transmigrasi		
Belum optimalnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Keterbatasan kuota penempatan transmigrasi	Keterbatasan kuota penempatan transmigrasi
		Belum tersedianya lahan untuk transmigrasi

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		Masih rendahnya kuantitas SDM bidang transmigrasi
		Belum tersedianya SDM fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Perencanaan		
Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Terdapat Beberapa Program pada Perencanaan yang tidak terdanai pada Penganggaran	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan
		Belum semua Perangkat Daerah memiliki tingkat capaian pembangunan yang berkategori baik
		Perencanaan belum optimal sesuai dengan hasil evaluasi pembangunan
		Kurangnya pemahaman akan kedudukan perencanaan pembangunan
Keuangan		
Belum sebandingnya antara pendapatan dan kebutuhan	Kebutuhan Belanja tidak sebanding dengan pendapatan	Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah
		Masih rendahnya kualitas dokumen keuangan daerah
Pendapatan Daerah		
Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung Pembangunan Daerah	Pengelelolaan Potensi PAD dan Pajak Daerah belum optimal	Belum optimalnya pelayanan pajak
		Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah
		Belum adanya dukungan sistem yang terintegrasi
		Kualitas layanan pendataan masih rendah
		Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur
		Masih lemahnya analisis pendataan dan penilaian
		Belum Optimalnya pemutakhiran data potensi pajak daerah
		Belum memiliki data potensi pendapatan daerah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		<p>Kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak masih rendah</p> <p>Belum dilakukan penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar</p> <p>Ketersediaan data piutang yang tidak valid</p> <p>Belum adanya sistem terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi</p> <p>Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah secara elektronik</p> <p>Pembayaran pajak belum tepat waktu;</p> <p>Belum optimalnya penanganan piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan</p> <p>Belum optimalnya jangkauan pelayanan Pajak Daerah bagi masyarakat di pelosok Kabupaten Sumedang</p>
Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan		
Belum Optimalnya Indeks Profesionalitas ASN	Kualitas dan Kompetensi ASN belum Merata	<p>Belum optimal dan terpetakannya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan, kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan organisasi secara riil</p> <p>Tambahan Penghasilan Pegawai masih berdasarkan indikator kinerja yang disusun berdasarkan perilaku dan kehadiran kerja tanpa target kinerja</p> <p>Masih kurangnya aparatur yang memiliki kualifikasi teknik serta distribusi PNS yang belum merata secara kualitas dan kuantitas</p> <p>Belum optimalnya pengevaluasian kinerja dan disiplin pegawai yang terintegrasi</p> <p>Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan yang baik, bersih dan melayani</p> <p>Beberapa pelayanan administrasi kepegawaian di BKPSDM belum seluruhnya berbasis teknologi informasi</p>

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		Belum optimalnya dan terintegrasinya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian
Penelitian dan Pengembangan		
Hasil penelitian belum seluruhnya diimplementasikan	Dokumen Kajian belum optimal menjadi dasar pelaksanaan kegiatan	Terbatasnya fungsional peneliti
		Belum optimalnya penyebaran informasi arah rencana penelitian dan pengembangan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Sekretariat Daerah		
Belum Optimalnya Perumusan Kebijakan pada Sekretariat Daerah	Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
		Belum optimalnya pembinaan terhadap kecamatan dan kelurahan
		Belum adanya penegasan tentang batas wilayah kecamatan, kelurahan dan desa
		Masih rendahnya respon OPD dalam penyusunan LKPJ dan LPPD
		Bagian Hukum
		Belum tercapainya target program pembentukan Perda sesuai dengan yang ditetapkan
		Belum tersedianya pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum dan pustakawan
		Bagian Organisasi
		Masih adanya OPD yang belum menyusun dan menerapkan SOP dan standar pelayanan
		Belum adanya evaluasi kelembagaan, analisa jabatan dan analisa Beban kerja sesuai dengan SOTK yang baru
Masih rendahnya respon dan pemahaman OPD terhadap dukungan data penyusunan LAKIP		
Belum tersedianya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan analis dan penyusun		

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		Bagian Kerjasama
		Belum adanya regulasi daerah yang mengatur kerjasama daerah
		Belum adanya SOP yang mengatur administrasi kerjasama OPD
		Rendahnya respon OPD terkait potensi kerjasama daerah yang bisa ditindaklanjuti
		Kurangnya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai tupoksi
		Belum tersedianya data potensi kerjasama
		Bagian Perekonomian
		Masih rendahnya dukungan data terkait dengan evaluasi kinerja BUMD dan perekonomian daerah
		Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi analisis ekonomi daerah
		Tingkat responsif pelayanan informasi analisa ekonomi daerah yang belum optimal
		Belum adanya SOP yang mengatur sistem informasi ekonomi daerah
		Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Belum optimalnya koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat
		Belum adanya OPD teknis yang melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan
		Tingkat responsif OPD yang masih rendah
		Masih adanya kegiatan-kegiatan teknis
		Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi
		Bagian Pengendalian Pembangunan
		Masih rendahnya dukungan data pelaksanaan pembangunan dari OPD terkait

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		<p>Belum optimalnya pelayanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan OPD</p> <p>Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ)</p> <p>Belum tersedianya pejabat fungsional PPBJ</p> <p>Tingkat responsif pelayanan yang masih belum optimal</p> <p>Belum terpenuhinya standar minimal sarana dan prasarana PBJ</p> <p>Belum optimalnya layanan informasi pengadaan barang dan jasa</p> <p>Bagian Umum</p> <p>Belum tersedianya SOP pelayanan kerumah tanggaan Setda dan pimpinan daerah</p> <p>Tingkat responsif dan kualitas pelayanan yang masih belum optimal</p> <p>Belum adanya pemisahan tugas antara pelayanan rumah tangga pimpinan daerah dan di lingkungan Sekretariat Daerah</p> <p>Belum tersedianya pejabat pejabat fungsional arsiparis</p> <p>Bagian Humas dan Protokol</p> <p>Tingkat pelayanan publikasi pimpinan daerah yang masih belum optimal</p> <p>Masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan protokoler daerah</p> <p>Masih rendahnya tingkat responsivitas OPD terkait pengaduan masyarakat</p> <p>Bagian Keuangan</p> <p>Masih adanya keterlambatan pelaporan keuangan Setda</p> <p>Masih rendahnya kualitas kompetensi pengelola keuangan di lingkungan Setda</p>

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi perencana Belum tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan
Sekretariat DPRD		
Belum optimalnya fasilitasi dan dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum Optimalnya kinerja Sekretariat DPRD	Kurang optimalnya kajian produk hukum terkait permasalahan daerah sebagai bahan Raperda Inisiatif DPRD
		Kurangnya tenaga fungsional analisis produk hukum daerah
		Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah masih bersifat administrasi belum sampai ke tingkat teknis operasional dilapangan
		Kurangnya SDM pengolah data dan informasi berbasis teknologi
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Inspektorat Daerah		
Belum optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan pemerintah di Kabupaten Sumedang	Belum Meratanya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	Tingkat maturitas SPIP masih berada pada level 3;
		Penerapan Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah masih rendah
		Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah belum optimal
		Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan dengan rekomendasi belum optimal
		Temuan penyimpangan terhadap APBD masih terjadi
		Masih terdapat kesenjangan (GAP) kapasitas APIP, khususnya dalam sertifikasi perjenjangan dan DIKLAT substansif pengawasan akibat minimnya sumber daya anggaran
		Masih terdapat kesenjangan (GAP) infrastruktur penunjang pengawasan, khususnya alat uji dan teknisnya
		Masih belum optimalnya manajemen pengawasan, khususnya penegakan kode etik bagi APIP, sehingga masih

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		<p>terindikasikan terdapat oknum yang menerima gratifikasi dan suap</p> <p>Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas</p> <p>Pemberian konsultasi pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa belum optimal</p>
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Kesatuan Bangsa Dan Politik		
Belum optimalnya tingkat cipta kondisi kondusif	Masih adanya potensi konflik dan unjuk rasa	<p>Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi</p> <p>Gangguan PEKAT masih tinggi</p> <p>Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing</p> <p>Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada</p> <p>Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik social</p> <p>Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi</p> <p>Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik social</p> <p>Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM</p> <p>Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.)</p> <p>Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi</p> <p>Pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah)</p>

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		Peran ormas di masyarakat belum optimal
		Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas
		Belum terbentuknya sistem informasi ormas
		Sinergitas antar lembaga masih kurang terutama forum-forum strategis masyarakat (contoh FKUB, FKDM, FPK, Forkopinda)
	Masih rendahnya partisipasi dalam mendukung proses demokrasi	Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, pilkada dan parpol
		Belum optimalnya pendidikan politik
		Belum optimalnya Tim Pemantauan Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Sumedang

BAB V

TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Tujuan dan Sasaran

Perencanaan Tahun 2024-2026 merupakan periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2024-2026 bukan merupakan rencana atau janji kepala daerah terpilih. Hal ini disebabkan telah berakhirnya RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024, sesuai amanat Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang belum mempunyai dokumen RPJMD yang baru. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten, serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten dengan pembangunan provinsi dan nasional. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai dokumen perencanaan strategis daerah selama periode tahun 2024- 2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Mengingat RPJP Daerah merupakan pedoman bagi rencana pembangunan terkait lainnya, maka penentuan tujuan dan sasaran, arah umum pembangunan jangka panjang, dan pentahapan pembangunan untuk periode lima tahunan merupakan bagian penting dalam RPJPD Kabupaten Sumedang. Arah umum pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumedang tahun 2005–2025 secara umum diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah, yaitu **“KABUPATEN**

SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005–2025, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri;
3. Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
5. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia.

Dengan visi di atas, menjadikan corak masyarakat dan daerah Kabupaten Sumedang yang ingin diwujudkan pada tahun 2025 mendatang adalah daerah yang dihuni oleh masyarakat yang makin sejahtera, yang senantiasa bersikap arif dan berkemampuan produktif dan mempertimbangkan kesinambungan lingkungan hidup daerahnya, serta makin mengindahkan prasyarat terbangunannya tatanan masyarakat berkesadaran hukum tinggi guna mewujudkan sistem sosial dan politik yang demokratis. Untuk memperkuat kondisi sejahtera dan demokratis tersebut, maka diperlukan pula kelangsungan kehidupan agama yang akan menyeimbangkan kebutuhan ragawi dan ukhrowi, yang dibangun oleh penghormatan yang makin baik terhadap kesalehan sosial dan keragaman dalam keyakinan beragama dalam satu kesatuan sistem keagamaan nasional yang dilindungi Undang Undang Dasar 1945. Sebagai ukuran dalam mewujudkan Kabupaten Sumedang yang sejahtera, agamis dan demokratis untuk 20 tahun mendatang diarahkan untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat, ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Meningkatnya tingkat pendidikan formal masyarakat, yang dilihat dari tercapainya target pendidikan dasar dan memasuki tahapan pendidikan menengah.
 - b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan di daerah yang berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat yang makin mendorong kesamaan gender dan pemberdayaan kaum perempuan.
 - c. Meningkatnya penguasaan keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu mengimplementasikan dalam perikehidupan masyarakat daerah yang makin produktif.
 - d. Terwujudnya pendidikan yang berdayaguna dengan kebutuhan kecakapan hidup sepanjang hayat.
 - e. Terciptanya kondisi lingkungan sehat sesuai standar kesehatan kehidupan individu, keluarga dan masyarakat dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan sosial.
 - f. Terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, dengan tidak membedakan kawasan perdesaan dan perkotaan, yang ditandai dengan penurunan kematian bayi, kematian ibu melahirkan dan kelahiran yang tidak diinginkan, peningkatan kesehatan kaum ibu dan remaja perempuan serta penurunan kasus penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit endemik lainnya.
 - g. Terwujudnya sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang berkeadilan dan berdaya saing.
 - h. Terwujudnya sistem kehidupan sosial dengan kondisi yang stabil sehingga dapat mendukung terciptanya perikehidupan masyarakat yang dilandasi kearifan budaya daerah.
 - i. Terwujudnya kesalehan sosial yang menjadi perekat dalam lingkungan kehidupan masyarakat daerah yang semakin tercermin dalam perilaku silih asah, silih asih dan silih asuh.
 - j. Terwujudnya keluarga sebagai basis persemaian nilai-nilai budaya, pendidikan dan kesehatan.
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing serta keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah baik di kawasan perdesan maupun perkotaan.
- b. Meningkatnya kekokohan perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional, nasional dan internasional, dengan berbasis pada upaya mengembangkan keunggulan komparatif, kompetitif, dan kooperatif dalam mendayagunakan potensi agribisnis, pariwisata dan industri.
- c. Meningkatnya akses yang lebih berkeadilan terhadap sumberdaya ekonomi bagi seluruh masyarakat.
- d. Terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan tingkat harga yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- e. Meningkatnya perlindungan regulasi pemerintahan terhadap pelaku sosio ekonomi daerah dalam mendukung iklim investasi yang kondusif.
- f. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat yang ditopang oleh makin produktifnya pendayagunaan potensi agribisnis, pariwisata dan industri.
- g. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto, yang berdampak terhadap penurunan kemiskinan.
- h. Meningkatnya pendayagunaan pemanfaatan potensi agribisnis, pariwisata dan industri yang selaras dengan kearifan lokal dan sosial masyarakat.
- i. Meningkatnya ketersediaan dan kontribusi infrastruktur perekonomian daerah yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan skala regional, nasional dan internasional.
- j. Meningkatnya kerjasama antar domain pemerintahan dalam penyediaan infrastruktur yang memadai.
- k. Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi, komunikasi, energi termasuk di dalamnya energi alternatif, dan sumberdaya air yang andal dan terintegrasi, efisien, efektif dan modern serta berkualitas yang sejalan

dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- l. Terwujudnya penataan ruang yang serasi, seimbang dan berkelanjutan.
 - m. Terwujudnya pengembangan wilayah perbatasan dengan kabupaten tetangga, kawasan strategis dan desa pusat pertumbuhan.
 - n. Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdayasaing secara berkesinambungan, berbasis pada keunggulan potensi daerah guna mendukung pembangunan.
3. Terwujudnya masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila, ditandai oleh hal-hal berikut:
- a. Meningkatkan jatidiri dan karakter masyarakat yang makin beriman dan bertakwa dalam keragaman keyakinan beragama dan beribadat yang dijamin kelangsungannya oleh pemerintah.
 - b. Menguatnya kemitraan dan tanggungjawab dalam pembangunan pendidikan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan di daerah.
 - c. Meningkatnya silaturahmi antar umat beragama dan intern umat beragama dalam mewujudkan kesalehan sosial.
 - d. Menguatnya kesalehan sosial masyarakat dan aparaturn pemerintah serta memperkokoh silaturahmi antar dan inter umat beragama untuk menguatkan pengamalan agama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan yang proporsional.
 - b. Meningkatnya aksesibilitas, transparansi pengawasan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.

- c. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang makin efisien dan efektif serta peningkatan pelayanan prima pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah daerah.
 - d. Meningkatnya profesionalisme aparatur dan efisiensi birokrasi dalam kerangka reformasi birokrasi yang makin mantap.
 - e. Terwujudnya kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif.
 - f. Terselenggaranya otonomi desa yang makin efektif.
 - g. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat yang makin meningkat.
5. Terwujudnya masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia, ditandai oleh hal-hal berikut:
- a. Terwujudnya penyelenggaraan kelembagaan demokrasi daerah, baik pada suprastruktur maupun infrastruktur politik serta meningkatnya budaya hukum dan HAM.
 - b. Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan.
 - c. Terwujudnya kemitraan dengan media dalam menyampaikan kepentingan masyarakat daerah.
 - d. Meningkatnya penegakan hukum secara adil, dalam kesetaraan gender dan menghormati hak asasi manusia.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD periode tahun 2018-2023 serta memperhatikan RPJMN tahun 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Sumedang menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023.

Dalam rangka perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, visi, dan misi RPJPD tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menpan PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penjabaran ke dalam tujuan dimaksudkan untuk

merumuskan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, sedangkan penjabaran ke dalam sasaran dimaksudkan untuk mengindikasikan hasil yang lebih nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran akan lebih memudahkan pengukuran kinerja.

Penyelenggaraan pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya telah membuahkan hasil yang diharapkan, meskipun masih terdapat target-target yang belum tercapai, untuk itu diperlukan perencanaan yang lebih baik lagi agar kinerja pembangunan dapat lebih optimal. Dalam Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2025 serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2023, maka perlu adanya kerangka yang jelas menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasara akan memberi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan yang dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan diuraikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun			Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,69	72,40-73,37	73,11-73,99	73,74-74,59	74,40-75,30	74,40-75,30
1.1	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,72	8,81-9,00	8,89-9,05	9,00-9,10	9,06-9,20	9,06-9,20
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,99	13,05-13,12	13,06-13,16	13,07-13,17	13,08-13,18	13,08-13,18
1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,91	72,70-73,20	73,00-73,32	73,24-73,63	73,33-73,69	73,33-73,69
1.3	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	95,09	95,26-95,44	95,19-95,62	95,29-95,16	95,38-95,69	95,38-95,69
		Indesk Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	72,23	70,25-71,15	70,95-72,18	71,77-73,43	73,00-75,05	73,00-75,05
1.4	Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan, dan demokrasi masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	75,32	74,5	75	75,5	76	76
1.5	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	44	45	46	47	48	48
2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,03	5,20-6,20	5,30-6,50	5,50-6,82	5,65-7,00	5,65-7,00

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun			Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
2.1	Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	6,85	5,00-5,85	7,56-8,45	8,04-9,23	8,23-10,61	8,23-10,61
		Laju pertumbuhan sektor perdagangan besar, Eceran, reparasi mobil dan sepeda Motor	Persen	4,71	4,84-5,60	5,59-7,50	6,37-8,28	7,18-9,09	7,18-9,09
		Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	4,18	2,44-3,59	3,28-4,94	3,48-5,15	3,69-5,35	3,69-5,35
		Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	8,15	3,25-3,81	8,01-9,75	9,44-10,13	9,82-10,86	4,96-5,53
2.2	Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	77,64	80,43	81,40	83,17	84,62	84,62
2.3	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen	-29,03	10,00	10,00	12,00	13,00	13,00
3	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,14	9,70-7,56	9,50-7,26	9,43-7,40	9,28-7,25	9,28-7,25
		Gini Ratio	Ratio	0,39	0,37-0,34	0,36-0,33	0,35-0,32	0,34-0,31	0,34-0,31
3.1	Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Nilai komposit FSVA	Persen	59,71	62,21	64,71	67,21	69,71	69,71
3.2	Meningkatnya kesejahteraan sosial	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta (Rp)	34,46	33,85-34,70	36,20-38,32	38,18-40,24	40,15-42,72	40,15-42,72

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun			Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
3.3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompentensi dan berdayasaing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,72	8,18-6,95	7,00-6,47	6,75-5,94	6,22-5,15	6,22-5,15
3.4	Meningkatnya Perekonomian Perdesaan	Indeks Desa Membangun	Poin	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,81
4	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan Tangguh	Indeks Resiko Bencana	Poin	119,39	114,39	109,39	104,39	99,39	99,39
4.1	Meningkatnya Ketahan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,49	0,52	0,53	0,54	0,55	0,55
4.2	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,35	63,83	65,55	66,96	70,53	70,53
5	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	71,03	74,52	78,02	81,51	85	85
5.1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	63,78	65	68	71	74	74
5.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Kabupaten	Kategori / Skor	BB (76)	A (80)	A (82)	A (82)	A (86)	A (86)
		Nilai LPPD Kabupaten	Skor	3,40	3,65	3,76	3,78	3,80	3,80
5.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,66	4,70	4,71	4,72	4,75	4,75

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun			Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
5.4	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,52	4,20	4,30	4,35	4,40	4,40

Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang dengan Isu Strategis Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN RPD TAHUN 2024-2026		TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2024-2026
1	ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING	
1.1	Pelayanan kesehatan yang belum merata di setiap wilayah;	Tujuan 1 : Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
1.2	Prevelensi Stunting yang masih perlu diturunkan menuju zero stunting;	
1.3	Belum meratanya pelayanan pendidikan yang memadai;	Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berdayasaing yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.4	Pelayanan PPKS yang masih perlu ditingkatkan efektivitasnya;	Tujuan 3 : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Sasaran 2 : Meningkatnya kesejahteraan sosial
1.5	Daya saing pemberdayaan perempuan yang masih belum optimal;	Tujuan 1 : Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter Sasaran 3 : Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender
1.6	Masih terdapatnya <i>mismatch</i> dan <i>miseducation</i> antara kompetensi angkatan kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja	Tujuan 3 : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing
2	ISU PERTUMBUHAN EKONOMI	
2.1	Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang masih rendah;	Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif Sasaran 1 : Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan

ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN RPD TAHUN 2024-2026		TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2024-2026
2.2	Ketahanan pangan yang rentan terhadap disrupsi ekonomi;	Tujuan 3 : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Sasaran 1 : Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan
2.3	Lambatnya pertumbuhan nilai ekonomi UMKM;	Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif Sasaran 1 : Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan
2.4	Belum optimalnya pemanfaatan kebudayaan daerah dalam menunjang pariwisata;	Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif Sasaran 1 : Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan Tujuan 1 : Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan, dan demokrasi masyarakat
2.5	Belum optimalnya Pengembangan dan pembangunan kawasan industri;	Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif Sasaran 1 : Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan
2.6	Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan;	Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif Sasaran 1 : Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan
2.7	Belum optimalnya peningkatan nilai Investasi Daerah	Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif Sasaran 3 : Meningkatnya Iklim Investasi Daerah
3	ISU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN	
3.1	Belum meratanya Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah;	Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif Sasaran 2 : Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah

ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN RPD TAHUN 2024-2026		TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2024-2026
3.2	Sebagian besar wilayah yang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim;.	Tujuan 4 : Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan Tangguh Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Daerah
3.3	Belum merata dan terjangkau ketersediaan infrastruktur dasar (Air bersih dan Sanitasi layak)	Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif Sasaran 2 : Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah
3.4	Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;	Tujuan 4 : Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan Tangguh Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
3.5	Masih tingginya jumlah timbulan sampah yang belum terkelola dengan baik;	Tujuan 4 : Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan Tangguh Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
3.6	Belum Optimalnya Penataan Ruang untuk mendukung pengembangan kawasan segitiga Rebana, Cekungan Bandung serta Penanggulangan kawasan Rawan Bencana.	Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif Sasaran 2 : Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah Tujuan 4 : Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan Tangguh Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Daerah
4	ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	
4.1	Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE);	Tujuan 5 : Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan berbasis pemanfaatan teknologi digital
4.2	Belum optimalnya penguatan penegakan regulasi daerah;	Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme ASN
4.3	Masih rendahnya efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah

ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN RPD TAHUN 2024-2026		TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2024-2026
4.4	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik
4.5	Masih rendahnya profesionalisme ASN	Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme ASN
4.6	Belum optimalnya Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam pembangunan daerah	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun 2024-2026, dapat dijabarkan sebagai berikut.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penentuan arah kebijakan pembangunan Tahun 2024-2026 bukan hanya mengacu pada RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 semata. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2024-2026 akan tetap melanjutkan semangat (spirit) dari Visi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Tahun 2018-2023 yaitu "**Terwujudnya Masyarakat Sumedang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (Simpati) pada Tahun 2023**". Visi Sumedang Simpati ini

telah menghasilkan berbagai pencapaian kinerja yang sangat baik dan berbagai prestasi pada tingkat provinsi dan nasional. Maka pada RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 sipirit dari Sumedang Simpati akan dilanjutkan menjadi fokus kebijakan pada dengan spirit baru yaitu ”**BEYOND SIMPATT**”.

Fokus Kebijakan dengan istilah *Beyond* Simpati pada tahun 2024-2026 diarahkan pada pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, dimana peran Pemerintah harus dapat menggali potensi-potensi daerah dari berbagai sektor sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya melalui pengembangan wirausaha-wirausaha baru serta terciptanya lapangan kerja, maka fokus kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

I. *Factors Condition*, menjelaskan bahwa setiap fokus kebijakan tentunya dapat memanfaatkan dan mengembangkan kondisi dan potensi serta sumberdaya yang ada yang terdiri atas:

1. *Human Resources* atau dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kekuatan pertama dari SDM di Kabupaten Sumedang adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki potensi, kompetensi dan berkinerja baik dalam mendukung kebijakan. Pada Tahun 2022 capaian Indeks Profesional ASN di Kabupaten mencapai nilai 63,78 point. Kekuatan kedua SDM di Kabupaten Sumedang adalah generasi muda. Hal ini tercermin dari bonus demografi Kabupaten Sumedang yang di dominasi generasi Z dan Generasi milenial, hal ini menjadi faktor penting untuk menghasilkan SDM dan angkatan kerja yang kompetitif.

2. *Physical Resources*

Secara geografi Kabupaten Sumedang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Cekungan Bandung dan Kawasan Industri Rebana. Selain itu, terdapat beberapa bendungan di Kabupaten Sumedang sebagai salah satu potensi pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian daerah

3. *Infrastructure*

Terbangunnya Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang menyebabkan aksesibilitas untuk menjangkau Kawasan-

kawasan pariwisata dan rencana Kawasan Industri akan semakin mudah, sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten Sumedang.

4. *Technology Innovation*

Dukungan teknologi dan inovasi yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang akan lebih dioptimalkan, sehingga pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan akan lebih efisien dan efektif.

II. *Government Policy/Regulation*, menjelaskan bahwa fokus kebijakan pemerintah daerah harus berdasarkan kajian-kajian ilmiah dan harus menyentuh langsung kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat serta fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus kebijakan *government policy/regulation* meliputi:

- 1. *Visionary***, yaitu kebijakan pemerintah harus mendorong pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan solusi strategis dan jangka Panjang. Kebijakan tersebut juga bersifat taktis dimasa kini, tidak bersifat sektoral dan tidak hanya memberi implikasi terbatas;
- 2. *Digital Base***, yaitu setiap data dan implementasi kegiatan harus berbasis digital agar dapat transparansi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan;
- 3. *Reach Out***, yaitu setiap keputusan harus menjangkau dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat
- 4. *Fiscal dan Monitoring***, yaitu proses dalam pengambilan kebijakan harus memperhatikan kondisi fiskal (anggaran) dengan pengawasan yang ketat agar anggaran tersebut tepat sasaran, sesuai dengan prinsip efisien, efektifitas dan ekonomis;
- 5. *Real Sector***, yaitu setiap kebijakan harus realistis sesuai dengan kebutuhan yang prioritas yang telah di tetapkan dalam perencanaan.

III. *Leading Industries* yang menjelaskan bahwa fokus pembangunan harus adanya menentukan sektor industri yang menjadi penggerak industri lainnya. Selaras dengan itu pertumbuhan industri yang eksisiting harus terus berkembang.

Tentunya setiap daerah memiliki industri unggulan (*leading industries*) sesuai potensi dan karakteristik wilayah. Adapun berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah, *leading industries* Kabupaten Sumedang terdiri atas:

1. **Manufacturing**, yaitu Kabupaten Sumedang telah memiliki sejumlah pabrik tekstil sebagai industri skala besar yang dapat menyerap tenaga kerja di wilayah Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor. Selain itu terdapat industri manufaktur skala kecil lainnya yang terus berkembang seperti industri Batik dan *Cloathing brand* lokal.
2. **Hi-Tech/IT**, yaitu fokus pengembangan Teknologi dan Informasi sebagai salah satu potensi yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri di Kabupaten Sumedang;
3. **Green Industries**, potensi lainnya di Kabupaten Sumedang adalah pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi ciri khas. Beberapa potensi yang perlu terus di kembangkan terkait industri ini antara lain pengolahan makanan, industri kerajinan tangan, industri mebel serta terdapat potensi industri kreatif yang terus berkembang.

IV. Supporting Industries, merupakan bagian penting lainnya dalam fokus pembangunan tahun 2024-2026, karena memberikan dukungan pada industri utama dan membantu meningkatkan efisiensi produksi:

1. **Institutions**, merupakan organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan industri. Institusi ini terdiri dari pemerintah, perguruan tinggi, lembaga dan organisasi industri lainnya seperti KADIN dan APINDO;
2. **Enterprises**, atau perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung industri, baik sebagai industri utama maupun sebagai industri pendukung. Beberapa peran enterprises dalam mendukung industri adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi dan kualitas melalui pengemasan yang menarik serta produk tersebut dapat

tersertifikasi secara legal, promosi produk secara offline maupun online;

3. *Linkages/Network*, tentunya dengan adanya jaringan antar Lembaga/organisasi dan pemerintahan akan sangat membantu dalam peningkatan produksi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah.

V. *Demand Condition/Buyers*, sebagai rangkaian akhir dari sebuah siklus industri yang perlu diperhatikan dalam fokus pembangunan. Tentunya penciptaan produk-produk unggulan harus memperhatikan kualitas sehingga menarik para buyer untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa. Sasaran pemasaran untuk buyer tentunya bukan hanya lokal tapi perlu merambah pemasaran regional dan Global atau Luar negeri.

Spirit fokus kebijakan *Beyond Simpati* kedepannya akan mewujudkan *Governement Competitive* yaitu Pemerintah Kabupaten Sumedang mampu bersaing dengan dunia usaha dengan memanfaatkan potensi dari berbagai sektor dengan di dukung Inovasi dan teknologi. Pemerintah Kabupaten Sumedang juga akan fokus pada perubahan mindset dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Perubahan mindset ini berlandaskan Agama, Budaya dan dukungan teknologi. Muara fokus kebijakan *Beyond Simpati* ini akan mengarah pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang pada 3 (tiga) tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

No	VISI KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025				
	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat	Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berdayasaing yang didukung Teknologi Informasi Digital	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan pendidikan
					Meningkatkan minat baca
					Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
			Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pembangunan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan kesehatan
					Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kesehatan
					Peningkatan promosi dan prevensi kesehatan
					Peningkatan pelayanan, advokasi dan KIE Keluarga Berencana
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan	Meningkan peran, pemberdayaan dan	Penguatan kelembagaan dan jejaring perempuan, anak dan lansia	

No	VISI KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025				
	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	perlindungan perempuan, anak dan lansia	Perlindungan perempuan anak dan lansia
			Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan, dan demokrasi masyarakat	Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat	Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama
				Rerekonstruksi nilai-nilai budaya, obyek kebudayaan, pranata kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, sarana, dan prasarana kebudayaan. Pengelolaan nilai-nilai budaya, obyek kebudayaan, pranata kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, sarana, dan prasarana kebudayaan untuk ketertataan nilai budaya yang patut untuk di revitalisasi. Penerapan nilai-nilai budaya, obyek kebudayaan, pranata kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, sarana, dan prasarana kebudayaan untuk ketertataan nilai budaya	Meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan

No	VISI KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025				
	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				yang patut untuk di reaktualisasi.	
			Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional	Meningkatkan prestasi Pemuda dan olahraga melalui peningkatan kualitas pembinaannya	Peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga penyelenggaraan pertandingan olahraga Pengembangan fasilitasi dan pendampingan usaha pemuda
2	Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan perikanan. Pengembangan korporasi petani, pengembangan prasarana pertanian
				Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah	Pengelolaan industri kecil melalui pendataan, pembinaan dan pelatihan digitalisasi promosi dan pemasaran produk UMKM
				Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Meningkatkan sarana dan prasarana, promosi, keamanan perdagangan dan perlindungan konsumen

No	VISI KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025					
	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				Mengembangkan pariwisata unggulan daerah	Pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, prasarana penunjang kegiatan pariwisata	
		Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah		Pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas wilayah	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan.	
						Peningkatan pelayanan air baku/air bersih dan sanitasi layak
						Peningkatan kualitas jaringan irigasi, peningkatan sistem pengendalian banjir, peningkatan sistem prasarana lainnya
					Pengembangan sarana prasarana sistem transportasi darat dan air	Peningkatan penyediaan terminal, moda transportasi dan perlengkapan jalan
					Pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Penataan, pengendalian pembangunan perumahan dan penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman
				Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Perluasan jaringan investasi	Menjalin kerjasama investasi antar daerah dan investor, serta

No	VISI KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025				
	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					meningkatkan kemudahan berinvestasi
		Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan	Mengendalikan sistem stok bahan pangan, menyediakan sarpras pendukungnya & memperbaiki pola konsumsi diversifikasi pangan
			Meningkatnya kesejahteraan sosial		Peningkatan kualitas masyarakat golongan miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Penguatan penyaluran bantuan social dan perlindungan sosial			
		Peningkatan pemberdayaan sosial			
		Optimalisasi rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial			
				Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan Koperasi dan UKM	Melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompentensi dan berdayasaing		Pelayanan bagi pencari kerja	Peningkatan kualitas dan produktivitas serta peningkatan kesempatan kerja
				Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja	Meningkatkan kualitas hubungan tripartit dan bipartit,

No	VISI KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025					
	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
					meningkatkan kualitas kapasitas penerapan sistem perlindungan tenaga kerja di perusahaan	
			Meningkatnya Perekonomian Perdesaan	Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kerangka otonomi desa	Penataan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa	
				Pembentukan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi di desa	
		Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan Tangguh	Meningkatnya Ketahanan Daerah		Peningkatan upaya penanggulangan bencana	Peningkatan pelayanan informasi, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana
					Meningkatkan penataan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkelanjutan dan berdaya saing	Peningkatan kinerja penataan ruang.
			Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Peningkatan upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup	
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme ASN	Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi)	

No	VISI KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025				
	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		inovatif dan kolaboratif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta capaian Kinerja Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan Daerah.	Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah
				Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah
				Meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan berbasis pemanfaatan teknologi digital	Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (<i>e-Government</i>)	Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

6.2. Program Pembangunan

Penjabaran lebih detail dari tujuan dan sasaran tertuang dalam arah kebijakan yang terimplementasi dalam program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai tiga tahun ke depan dalam RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

6.2.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD tahun 2020-2025, pada tahap/periode akhir RPJPD Tahun 2025, Kabupaten Sumedang diharapkan telah mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki kehidupan masyarakat modern.

Adapun prioritas RPD untuk tahun 2024-2026, dalam rangka mencapai sasaran pokok tersebut adalah :

- 1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;** peningkatan penerapan pendidikan berorientasi iptek dan dunia usaha, pemantapan kapasitas dan kerjasama lembaga pendidikan, Peningkatan akses masyarakat pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, serta perluasan pola perilaku hidup sehat, pelestarian norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, pelestarian peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan,
- 2. Peningkatan Daya Saing Perekonomian;** pembinaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan perikanan, optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal, sinergitas fungsional perekonomian perkotaan dan perdesaan (*rural urban linkage*),
- 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;** Mempertahankan kondisi pelayanan prasaran dan sarana dasar yang berkualitas, mantap, dan terjangkau, infrastruktur pendukung yang kondusif terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian, akuntabilitas yang didukung proses koleksi dan distribusi barang, jasa dan orang, pelayanan sumberdaya air.

- 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;** peningkatan kesejahteraan sosial, penyediaan pangan dan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meperluas lapangan kerja serta fasilitasi kewirausahaan;
- 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;** Penataan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan sistem pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana.
- 6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;** Pemanfaatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah, pementapan kapasitas organisasi masyarakat dan politik, pemeliharaan kesadaran, kepatuhan dan penegakan serta penataan produk hukum daerah.

Ekonomi daerah berkelanjutan (Sustainable Regional Economy) adalah sebuah pendekatan dalam pengembangan ekonomi yang berfokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif pada tingkat regional atau daerah. Pendekatan ini mengakui pentingnya keterkaitan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan utama dari ekonomi daerah berkelanjutan adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan lingkungan dan sosial yang ada di daerah tersebut. Hal ini melibatkan pengembangan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inovatif, dan perlindungan lingkungan untuk kepentingan generasi masa depan.

Beberapa strategi yang digunakan dalam pengembangan ekonomi daerah berkelanjutan antara lain: pengembangan energi terbarukan, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, pengembangan industri kreatif, dan pengembangan pertanian berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi daerah berkelanjutan membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi yang dilakukan dapat memberikan manfaat

jangka panjang bagi seluruh stakeholder yang terlibat serta dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

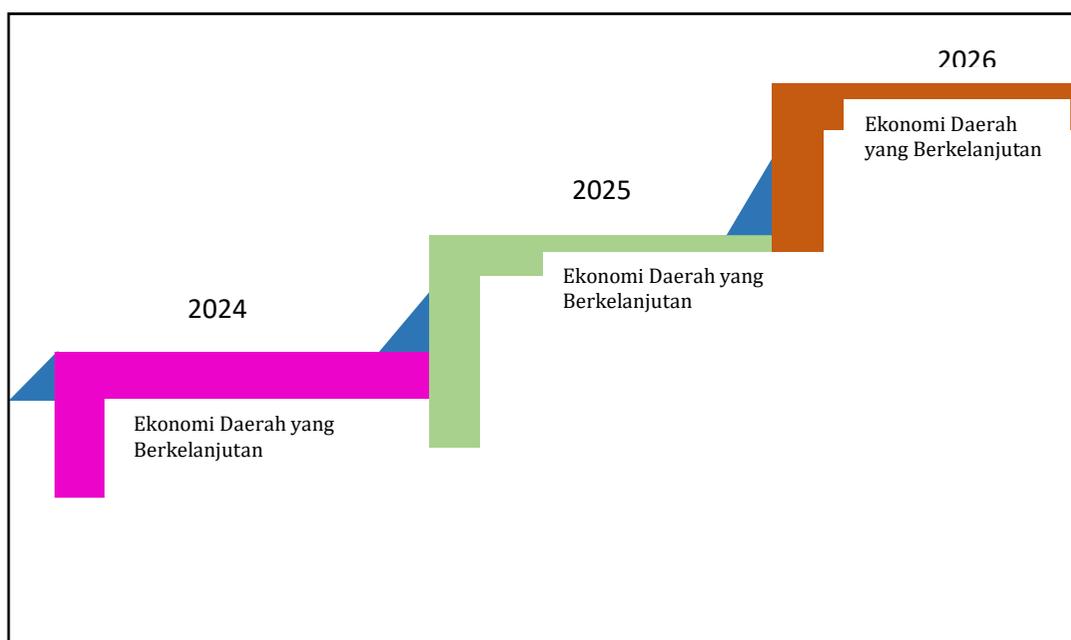
Ada beberapa komponen ekonomi daerah berkelanjutan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat regional atau daerah. Beberapa komponen tersebut antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan: Pengembangan ekonomi daerah berkelanjutan harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang berarti pertumbuhan yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.
2. Lingkungan hidup: Komponen lingkungan hidup harus diperhatikan dalam pengembangan ekonomi daerah berkelanjutan, termasuk pelestarian sumber daya alam, pengelolaan limbah, pengurangan emisi, dan perlindungan lingkungan.
3. Sosial: Aspek sosial dalam pengembangan ekonomi daerah berkelanjutan meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kesenjangan sosial.
4. Keterlibatan masyarakat: Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah berkelanjutan, termasuk dalam hal partisipasi dalam pengembangan infrastruktur, industri lokal, dan sektor pariwisata.
5. Inovasi dan teknologi: Pengembangan inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan harus menjadi bagian dari pengembangan ekonomi daerah berkelanjutan, termasuk dalam hal penggunaan energi terbarukan dan teknologi hijau.
6. Pemerintah daerah: Peran pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi daerah berkelanjutan sangat penting, termasuk dalam hal pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkan

VI-16 fokus pembangunan. Fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPD setiap tahun. Penetapan Fokus RPD Tahun 2024-2026 disajikan pada Gambar berikut ini.

Gambar 6.1
Fokus RPD Tahun 2024-2026



Sumber : BAPPPEDA, 2022

6.2.2. Program Perangkat Daerah

Sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran, program yang terdapat pada rencana strategis di masing-masing Perangkat Daerah (PD) diselaraskan dengan RPD Kabupaten Sumedang, yang juga mengacu pada program yang tertera pada Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menjalankan rencana pembangunan diperlukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk memudahkan dalam koordinasi dan memandu arah pelaksanaan program dilakukan pembagian kelompok program yang membidik tujuan dan sasaran serta pencapaian target kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, maka disusun Program Prioritas sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel 6.2
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2024-2026

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
					2024		2025		2026				
			2022	2023	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	72,69	72,40-73,37	73,11-73,99		73,74-74,59		74,40-75,30		74,40-75,30		
1.1	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berdayasaing yang didukung Teknologi Informasi Komunikasi	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8,72	8,81-9,00	8,89-9,05		9,00-9,10		9,06-9,20		9,06-9,20		
		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	12,99	13,05-13,12	13,06-13,16		13,07-13,17		13,08-13,18		13,08-13,18		
1.1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Dalam Pendidikan SD (Persen)	89,39	91,89	94,39	150.760	96,89	166.591	98,89	183.719	99	501.069	Dinas Pendidikan
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Dalam Pendidikan SMP (Persen)	90,27	92,27	94,27	77.324	96,27	85.056	98,27	93.561	98,27	255.941	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan (Persen)	53,47	63,47	73,47	23.833	83,47	26.216	93,47	28.838	93,47	78.887	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini (Persen)	92,04	93,74	95,44	21.475	97,14	22.723	98,84	24.995	98,84	69.194	
1.1.2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka (Persen)	21,61	40,3	68,34	1.650	94,33	1.850	100	1.850	100	5.350	
1.1.3	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Proporsi GTK Penggerak (Persen)	5	10	25	1.050	30	1.050	30	1.050	30	3.150	
1.1.4	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kegemaran Membaca (Persen)	48,71	50,6	60,60	927	65,60	1.019	70,60	1.121	70,60	3.067	Dinas Arsip dan Perpustakaan
1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	72,91	72,70-73,20	73,00-73,32		73,24-73,63		73,33-73,69		73,33-73,69		
1.2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk (Rasio)	0,17	0,19	0,22	64.563	0,23	84.801	0,25	111.705	0,25	261.069	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan	50	55	60	52.779	65	59.566	70	69.027	70	181.372	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kesehatan Dasar Masyarakat (Persen)											
		Presentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Persen)	28	33	40	750	50	875	60	1.180	60	2.805	
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi (Persen)	100	100	100	700	100	850	100	1.000	100	2.550	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Yang Sesuai (Persen) Standard	84	85	86	7.416	88	8.158	90	8.973	90	24.547	
1.2.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Standar Kompetensi (Persen)	86	87	88	1.800	89	2.800	90	3.300	90	7.900	
1.2.4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan Dan Minuman Sesuai Standar (Persen)	84	86	87	1.900	88	2.950	92	3.300	92	8.150	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Presentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri (Persen)	20	26	31	1.450	36	1.800	41	2.040	41	5.290	
1.2.6	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan (Dokumen)	5	5	10	206	10	227	10	249	10	682	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa (Persen)	100	85	40	512	60	563	100	620	100	1.695	
1.2.7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 (Persen)	75,37	75,67	75,97	3.230	76,27	3.553	76,57	3.908	76,57	10.690	
		Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed) (Persen)	9,05	9,04	9,01	6.433	8,98	7.076	8,95	7.783	8,95	21.292	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPD) (Poin)	95,09	95,26-95,44	95,19-95,62		95,29-95,16		95,38-95,69		95,38-95,69		
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)	72,23	70,25-71,15	70,95-72,18		71,77-73,43		73,00-75,05		73,00-75,05		
1.3.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD Responsip Gender (Persen)	45,16	61,29	65	1.117	75	1.229	100	1.351	100	3.697	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.3.2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Persen)	100	0,0035	0,0036	1.107	0,0042	1.217	0,0047	1.339	0,0047	3.663	
1.3.3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga Bagi Perempuan (Persen)	100	16,53	33,06	1.392	66,13	1.532	80	1.685	80	4.609	
1.3.4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Forum Anak, Termasuk Forum Anak Yang Ada Di Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan (Persen)	46,15	65,38	69,07	618	75,65	680	100	748	100	2.046	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.5	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pendampingan Khusus Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan (Persen)	100	0,02	0,023	1.442	0,026	1.587	0,028	1.745	0,028	100	
1.3.6	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Ketersediaan Data Gender Dan Anak (Persen)	100	33,3	42	309	71	340	100	374	100	1.023	
1.4	Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan, dan demokrasi masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	75,32	74,5	75		75,5		76		76		
1.4.1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (Persen)	73,33	40	94,17	176	95,83	594	100	662	100	1.432	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.4.2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (Orang)	0	100	250	4.130	100	4.143	100	4.397	450	12.670	2. Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Ormas Yang Di Bina Kategori Aktif (Persen)	19,38	19,38	38,76	110	100	121	100	285	100	516	
1.4.4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Orang Yang Dibina Dilingkup Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya (Orang)	0	150	180	357	210	393	260	432	260	1.182	
1.4.5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Potensi Konflik Sosial Yang Tertangani (Potensi Konflik)	15	15	14	4.179	13	4.597	12	5.056	12	13.832	
1.4.6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman Dan Keindahan) (Persen)	72	78	83	2.513	89	2.947	94	3.705	94	9.166	
		Persentase Pelanggaran Perda Dan Perbup Yang Ditangani (Persen)	91	92	92	789	93	1.013	96	1.274	96	3.076	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rasio Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT) (Rasio)	0,67	0,74	0,81	420	0,89	500	0,98	600	0,98	1.520	3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
1.4.7	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase OPK yang dikembangkan (Persen)	36,36	45,45	55	902	73	992	100	1.091	100	2.984	
1.4.8	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (Persen)	13,61	15,31	17	75	19	83	20	91	20	248	
1.5	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	44	45	46		47		48		48		
1.5.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Orang)	94.582	95.282	95.982	990	96.682	1.089	97.382	1.198	97.382	3.277	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
1.5.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	60	30	20	3.515	21	3.866	70	4.253	70	11.633	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5.3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan (Kwarcab) Yang Difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi (Organisasi)	1	1	1	500	1	550	1	605	1	1.655	
2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Persen)	5,03	5,20-6,20	5,30-6,50		5,50-6,82		5,65-7,00		5,65-7,00		
2.1	Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (Persen)	6,85	5,00-5,85	7,56-8,45		8,04-9,23		8,23-10,61		8,23-10,61		
2.1.1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Regulasi Perencanaan Dan Pembangunan Industry (Dokumen)	0	1	1	475	1	523	1	575	1	1.572	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2.1.2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Saran Teknis Terhadap Izin Yang Dikeluarkan (Persen)	75	83,33	87,5	100	90	110	91,67	121	91,67	331	
2.1.3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pelaku Industri Yang Mengakses Sistem Informasi Industri Nasional (Persen)	5,12	6,84	8,57	150	10,29	165	12,02	182	12,02	497	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro (Persen)	29,41	30,62	31,36	710	32,09	781	32,82	859	32,82	2.349	
2.1.5	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pengembangan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (Persen)	1,79	2,39	3,35	750	4,32	825	5,28	908	5,28	2.483	
2.1.6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dan Perlindungan (Persen)	9,96	30,28	60,16	150	80,08	165	100	182	100	497	
		Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor (Persen)	4,71	4,84-5,60	5,59-7,50		6,37-8,28		7,18-9,09		7,18-9,09		
2.1.17	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Fasilitasi Perizinan Pendaftaran Perusahaan (Persen)	100	100	100	440	100	484	100	532	100	1.456	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2.1.18	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Persen)	77,78	77,78	88,89	627	88,89	690	100	759	100	2.075	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.19	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persen)	94,74	100	100	425	100	468	100	514	100	1.407	
2.1.20	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha Yang Menjadi Ekspertir (Persen)	75	75	83,33	525	91,67	578	100	635	100	1.738	
2.1.21	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Metrologi Yang Sesuai Standard (Persen)	32,03	34,14	36,26	275	38,37	303	40,49	333	40,49	910	
2.1.22	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang (Persen)	55	63,33	71,67	275	80	303	88,33	333	88,33	910	
		Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan (Persen)	4,18	2,44-3,59	3,28-4,94		3,48-5,15		3,69-5,35		3,69-5,35		
2.1.23	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Poduksi Perikanan Tangkap (Ton)	1409,36	1519,58	1641,15	774	1780,65	808	1940,91	784	1940,91	2.366	Dinas Perikanan dan Peternakan
2.1.24	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	8411,71	8574,11	8745,59	2.788	8964,23	3.044	9233,16	3.194	9233,16	9.025	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.25	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	33,33	25	40	500	42,86	550	50	605	50	1.655	
2.1.26	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Wilayah Perairan Umum Darat Yang Diawasi Sumberdaya Perikanannya (Wilayah)	10	10	11	123	11	135	11	148	11	405	
2.1.27	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Jumlah Kasus Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Yang Dikendalikan (Persen)	96,76	96,85	96,92	965	97,44	1.040	100	1.243	100	3.248	
2.1.28	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Areal Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Persen)	13,77	14,05	14,33	1.385	14,62	1.524	14,91	1.676	14,91	4.584	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Wilayah Yang Terkendali Dari Bencana Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Wilayah)	22	26	26	100	26	110	26	121	26	331	Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.28	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian (Ton)	910.715	921.559	935.276	12.559	953.853	13.815	977.549	15.196	977.549	41.570	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Peningkatan Populasi Ternak (Persen)	5,85	5,5	6,47	3.418	7,5	3.760	8,34	4.136	8,34	11.314	Dinas Perikanan dan Peternakan
2.1.29	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) (Kali/Tahun)	2,38	2,43	2,47	19.662	2,52	23.769	2,57	30.301	2,57	73.731	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Infrastruktur Peternakan Yang Disediakan Dan Dikembangkan (Unit)	13	6	26	1.245	26	1.370	26	1.506	26	4.121	Dinas Perikanan dan Peternakan
2.1.30	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani (Persen)	26,86	33,58	40,29	1.089	47,01	1.198	53,72	1.318	53,72	3.605	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum (Persen)	8,15	3,25-3,81	8,01-9,75		9,44-10,13		9,82-10,86		9,82-10,86		
2.1.31	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Yang Dikembangkan (Persen)	35,71	37,5	44	347	50	382	55	420	55	1.150	Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.32	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Daerah Yang Dipromosikan (Lokasi)	1	1	2	670	3	737	3	811	3	2.218	
2.1.33	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Karya Ekonomi Kreatif Yang Memiliki HAKI (Karya)	8	10	12	385	14	424	16	466	16	1.274	
2.1.34	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan (Orang)	200	445	515	1.330	585	1.463	655	1.609	655	4.402	
2.2	Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasaran dalam pengembangan wilayah	Indeks Kualitas Infrastruktur (Poin)	77,64	80,43	81,4		83,17		84,62		84,62		
2.2.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas Lahan yang terairi (Ha)	20.633,4	21054,31	21.454,31	24.341	21.814,31	26.775	22.154,31	29.452	22.154,31	80.567	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota (Persen)	244.688	245.847	246.288	11.050	247.888	12.155	249.488	13.371	249.488	36.576	
2.2.3	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal Dan Rumah Deret Sederhana) Yang Laik Fungsi (Persen)	15,45	36,52	57,58	935	78,65	2.559	99,72	4.741	99,72	8.235	
2.2.4	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jumlah kumulatif Bangunan dan Lingkungannya yang tertata (Bangunan)	53	55	59	8.900	63	9.660	67	10.606	67	29.166	
2.2.5	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Persen)	60,04	61,49	62,13	117.929	64,07	127.960	65,36	141.164	65,36	387.053	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Persen)	95,84	95,91	96,12	3.313	96,36	5.196	96,61	5.203	96,61	13.712	
2.2.7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Pemukiman Yang Tertata (Persen)	10,49	26,57	51,05	5.140	75,52	3.968	100	3.968	100	13.075	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.2.8	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Terlayani (Unit)	30	55	80	3.450	105	3.795	130	4.175	130	11.420	
2.2.9	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani (Persen)	81,34	81,34	81,97	7.905	82,43	9.040	82,89	11.065	82,89	28.009	
2.2.10	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Dicegah (Hektar)	154835,3	154835,3	154835,3	2.108	154835,3	2.108	154835,3	2.108	154835,3	6.323	
2.2.11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU (Persen)	38,36	53,42	83,56	13.160	91,78	14.476	100	15.924	70,89	43.560	
2.2.12	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Konektivitas Kabupaten Kota (Persen)	45	53,03	64,94	1.000	69,97	1.100	75	1.210	75	3.310	Dinas Perhubungan

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Angkutan Jalan (LLAJ)	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Jalan (Persen)	46,39	46,59	47,26	15.907	47,93	17.151	48,59	18.901	48,59	51.959	
2.3	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Penanaman Modal Di Kabupaten Sumedang (Persen)	-29,03	10	10		12		13		13		
2.3.1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Minimal Pemberian Insentif Penanaman Modal (Persen)	45	47,37	52,63	303	57,89	333	63,16	366	60	1.001	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.3.2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Minat Investasi Di Sumedang (Persen)	n/a	20	20	292	30	321	50	353	50	965	
3	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (Persen)	10,14	9,70-7,56	9,50-7,26		9,43-7,40		9,28-7,25		9,28-7,25		
		Gini Ratio (Poin)	0,39	0,37-0,34	0,36-0,33		0,35-0,32		0,34-0,31		0,34-0,31		
3.1	Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Nilai Komposit FSVA (Persen)	59,71	62,21	64,71		67,21		69,71		69,71		
3.1.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Pokok (Kg/Kapita/Tahun)	233,36	245,03	257,28	2.294	270,15	2.523	283,66	2.776	283,66	7.593	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1.2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Non Terigu (Kg/Kapita/Tahun)	14,98	15,43	15,89	1.461	16,37	1.607	16,86	1.768	16,86	4.837	
3.1.3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Tertanganinya Daerah Kerawanan Pangan (Persen)	100	100	100	510	100	561	100	617	100	1.688	
3.1.4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (Nomor Register)	30	50	70	260	90	286	110	315	270	861	
3.2	Meningkatnya kesejahteraan sosial	PDRB Per Kapita (ADHB) (Juta Rp)	34,46	33,85-34,70	36,20-38,32		38,18-40,24		40,15-42,72		40,15-42,72		
3.2.1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Menerima Bantuan Sosial Melalui Pemberdayaan Social (Persen)	7,22	9,03	12,64	275	16,25	275	19,86	275	19,86	825	Dinas Sosial
		Persentase PSKS Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Social (Persen)	58,33	58,33	66,67	1.770	75	1.835	83,33	1.986	83,33	5.591	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2.2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar (Persen)	58,47	65,3	71,66	4.795	78,02	6.235	84,33	7.270	84,33	18.300	
3.2.3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat (DTKS) Yang Menerima Jaminan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Persen)	61,77	62,12	62,47	3.600	62,83	4.500	63,19	4.868	63,19	12.968	
3.2.4	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (Persen)	100	100	100	1.369	100	1.625	100	1.800	100	4.794	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2.5	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Cakupan Kelompok Ketahanan Yang Aktif (Persen)	18,3	20,87	50	1.063	60	1.170	70	1.287	70	3.519	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (Persen)	22,75	22,1	22,1	1.063	22,1	1.170	22,1	1.287	22,1	3.519	
3.3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	7,72	8,18-6,95	7,00-6,47		6,75-5,94		6,22-5,15		6,22-5,15		
3.3.1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (Persen)	15,24	17,77	20,31	1.615	21,33	1.673	25,39	1.836	25,39	5.124	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (Orang)	50	100	150	950	200	1.045	250	1.150	600	3.145	
3.3.2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan (Persen)	10,2	15,19	20,18	1.115	25,17	1.221	30,16	1.343	30,16	3.678	
3.3.3	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan	10	11,5	21	703	26	783	31	862	31	2.348	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH	
					2024		2025		2026					
			2022	2023	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) (Persen)												
3.3.4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembangunannya (KK)	71	76	81	760	86	836	91	920	258	2.516		
3.3.5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Pemukiman Yang Dibina (KK)	25	25	25	100	25	110	25	121	75	331		
3.4	Meningkatnya Perekonomian Perdesaan	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,77	0,78	0,79		0,8		0,81		0,81			
3.4.1	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Tertata (Persen)	22	25	26	200	30	220	37	363	37	783	Dinas Pemberdayaa	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.4.2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa Yang Terfasilitasi Kerjasama Antar Desa (Persen)	n/a	n/a	0,37	100	0,74	110	1,11	121	1,11	331	n Masyarakat dan Desa
3.4.3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentasi Desa Tertib Administrasi Sesuai Aturan (Persen)	30	50	61,11	7.213	68,52	8.009	81,48	8.737	81,48	23.959	
3.4.4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Yang Aktif (Persen)	89	60	80	1.310	80	1.661	100	1.925	100	4.896	
4	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan Tangguh	Indeks Resiko Bencana (Poin)	119,39	114,39	109,39		104,39		99,39		99,39		
4.1	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (Poin)	0,49	0,52	0,53		0,54		0,55		0,55		
4.1.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketersediaan RTR (Persen)	38	42,31	50,00	570	57,69	480	61,54	480	61,54	1.530	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase Pelayanan Pemanfaatan Ruang (Persen)	24,61	49,22	64,36	200	77,18	220	90,00	242	90,00	662	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.1.2	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Orang)	760.687	798.721	838.657	100	880.589	110	924.618	121	924.618	331	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Orang)	2.935	3.081	3.235	2.808	3.396	3.095	3.565	3.406	3.565	9.309	
		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	2.538	2.411	2.290	325	2.175	358	2.066	393	2.066	1.076	
4.2	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	63,35	63,83	65,55		66,96		70,53		70,53		
4.2.1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Kapasitas Pelayanan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Permukiman Terhadap Jumlah Rumah Tangga (Persen)	0	21,94	25,81	1.595	28,55	3.270	31,73	3.585	31,73	8.450	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.2.2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Dokumen)	0	0	8	1.950	3	825	2	600	13	3.375	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.2.3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Dokumen)	0	17	97	200	97	220	97	235	291	655	
4.2.4	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan (Unit)	2	2	4	525	8	580	15	661	15	1.766	
4.2.5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Tindakan Verifikasi Terhadap Permohonan Perizinan Berusaha Pengelolaan Limbah B3 (Persen)	100	100	100	125	100	200	100	300	100	625	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.2.6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Perizinan Berusaha Diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Persen)	100	100	100	195	100	215	100	236	100	645	
4.2.7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Kecamatan Yang Teridentifikasi Dan Memiliki MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Yang Diakui (Persen)	n/a	n/a	25	130	50	265	25	135	100	530	
4.2.8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup (Persen)	n/a	n/a	23	200	32	220	41	240	41	660	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.2.9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (Penghargaan)	n/a	n/a	30	100	30	110	30	115	90	325	
4.2.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti (Persen)	n/a	n/a	100	100	100	110	100	121	100	331	
4.2.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah (Persen)	35,14	43,58	51,66	4.824	59,77	5.070	65,89	6.174	65,89	16.068	
4.2.12	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Poin)	63	64	65	700	66	650	66	695	66	2.045	
5	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	71,03	74,52	78,02		81,51		85		85		
5.1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	63,78	65	68		71		74		74		
5.1.1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pengadaan ASN Sesuai Dengan Formasi Jabatan (Persen)	86	87	88	1.329	89	1.462	90	1.608	90	4.399	Badan Kepegawaian dan Pengembang

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Standar Kualifikasi Jabatan (Persen)	84	85	86	1.214	87	1.335	88	1.469	88	4.018	n Sumber Daya manusia
		Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Persen)	84	86	87	2.949	88	3.244	89	3.568	89	9.761	
		Persentase ASN Yang Berkinerja Baik (Persen)	95	96	97	361	98	397	99	437	99	1.196	
5.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Kabupaten (Kategori / Skor)	BB (76)	A (80)	A (82)		A (82)		A (86)		A (86)		
		Nilai LPPD Kabupaten (Skor)	3,65	3,7	3,76		3,78		3,8		3,8		
5.2.1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Program Pembangunan Daerah (Persen)	96,3	97,04	97,78	1.390	98,52	1.529	99,26	1.682	99,26	4.602	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2.2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia (Persen)	94,01	94,51	95	700	95,39	770	95,74	848	95,74	2.318	
		Persentase Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian Dan SDA (Persen)	84,23	84,65	85,06	821	85,49	903	85,84	993	85,84	2.716	
		Persentase Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan (Persen)	90,07	90,89	91,55	1.206	92,21	1.326	92,88	1.459	92,88	3.991	
5.2.3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Hasil Penelitian Dan Inovasi (Persen)	89,78	90	90,9	682	91,81	750	92,73	825	93,58	2.257	
5.2.4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Persen)	43,47	45,67	44,62	5.299	45,15	5.909	47,9	6.501	47,9	17.709	Badan Pendapatan Daerah

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2.5	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran (Waktu)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	3.080	Tepat waktu	3.672	Tepat waktu	4.377	Tepat waktu	11.129	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Terhadap Rencana Anggaran Kas (Persen)	95	97	97	488.265	98	529.395	99	573.974	99	1.591.634	
		Persentase Ketepatan Penyampaian LKPD (Persen)	95	96	98	2.519	100	3.004	100	3.581	100	9.104	
5.2.6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) (Persen)	90	91	91	2.300	93	2.530	95	2.783	95	7.613	
5.2.7	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti (Persen)	72	75	80	4.050	85	4.450	90	4.905	90	13.405	
5.2.8	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP (Persen)	68	75	80	2.650	84	2.915	88	3.207	88	8.772	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2.9	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD (Persen)	100	100	33,94	21.091	32,12	25.069	33,94	29.086	100	75.247	Sekretariat DPRD
		Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD (Persen)	100	100	32,52	4.396	33,33	4.836	34,15	5.320	100	14.552	
5.2.10	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraansosial Dan Kesejahteraanmasya rakat Yang Ditindaklanjuti	n/a	n/a	100	1.595	100	1.755	100	1.930	100	5.279	Sekretariat Daerah
		Presentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Kewilayahan	100	100	100	755	100	830	100	913	100	2.498	
		Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraansosial Dan Kesejahteraanmasya rakat Yang Ditindaklanjuti	n/a	n/a	100	11.222	100	12.344	100	13.578	100	37.143	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Presentase Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	100	100	100	740	100	814	100	895	100	2.449	
		Persentase Dokumen Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Ke Dalam Perjanjian Kerjasama	95,52	100	100	385	100	424	100	466	100	1.274	
5.2.11	Program Perekonomian dan Pembangunan	Presentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian Dan SDA Yang Ditindaklanjuti	n/a	n/a	100	1.252	100	1.412	100	1.571	100	4.235	
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Yang Diselenggarakan	n/a	n/a	90	380	95	417	100	459	100	1.256	
		Tingkat Kematangan Ukpbj (Level)	2	5	3	506	4	557	5	612	5	1.675	
5.2.12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	A	A	A	770.092	A	847.316	A	931.869	A	2.549.277	Dinas Pendidikan
			A	A	A	447.431	A	474.868	A	499.759	A	1.422.059	Dinas Kesehatan
			A	A	A	25.351	A	38.891	A	38.891	A	103.132	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			A	A	A	8.479	A	9.327	A	10.260	A	28.067	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			A	A	A	14.400	A	15.710	A	16.661	A	46.771	Satuan Polisi Pamong Praja
			BB	A	A	2.784	A	3.057	A	3.361	A	9.203	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			A	A	A	10.281	A	9.972	A	10.666	A	30.919	Dinas Sosial
			A	A	A	8.239	A	9.143	A	10.061	A	27.444	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			BB	BB	BB	25.059	BB	27.538	A	30.104	A	82.701	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			BB	A	A	9.267	A	10.047	A	10.978	A	30.292	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			BB	A	A	8.230	A	8.758	A	9.488	A	26.476	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
					2024		2025		2026				
			2022	2023	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			BB	BB	BB	13.352	BB	8.758	A	16.156	A	38.266	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			BB	BB	BB	20.613	A	23.022	A	25.288	A	68.924	Dinas Perhubungan
			A	A	A	8.134	A	8.252	A	8.445	A	24.831	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			n/a	n/a	A	12.427	A	13.670	A	15.037	A	41.134	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
			BB	A	A	9.613	A	10.574	A	11.631	A	31.818	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			BB	A	A	9.066	A	9.973	A	10.970	A	30.010	Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
					2024		2025		2026				
			2022	2023	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			A	A	A	15.754	A	17.439	A	19.293	A	52.485	Dinas Perikanan dan Peternakan
			A	A	A	8.615	A	9.477	A	10.425	A	28.517	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
			A	A	A	37.115	A	38.686	A	38.399	A	114.201	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			A	A	A	59.666	A	65.633	A	72.196	A	197.496	Sekretariat Daerah
			A	A	A	49.072	A	52.110	A	55.811	A	156.994	Sekretariat DPRD
			BB	A	A	13.664	A	15.031	A	16.534	A	45.228	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			BB	A	A	109.548	A	127.375	A	147.491	A	384.415	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			A	A	A	15.318	A	16.770	A	18.446	A	50.535	Badan Pendapatan Daerah
			A	A	A	10.209	A	11.230	A	12.353	A	33.791	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			A	A	A	16.748	A	18.428	A	20.261	A	55.437	Inspektorat Daerah
			A	A	A	3.048	A	3.160	A	3.283	A	9.491	Kecamatan Wado
			A	A	A	2.570	A	2.779	A	3.064	A	8.412	Kecamatan Jatinunggal
			A	A	A	3.555	A	3.844	A	4.065	A	11.465	Kecamatan Darmaraja
			A	A	A	2.633	A	2.788	A	2.972	A	8.394	Kecamatan Cibugel
			A	A	A	2.906	A	3.193	A	3.292	A	9.391	Kecamatan Cisitu
			A	A	A	3.403	A	3.733	A	4.015	A	11.151	Kecamatan Situraja
			A	A	A	3.153	A	3.468	A	3.815	A	10.437	Kecamatan Conggeang
			BB	A	A	3.131	A	3.452	A	3.753	A	10.335	Kecamatan Paseh
			A	A	A	2.527	A	2.786	A	2.941	A	8.254	Kecamatan Surian
			A	A	A	2.605	A	2.795	A	3.057	A	8.457	Kecamatan Buahdua
			A	A	A	3.338	A	3.635	A	3.964	A	10.937	Kecamatan Tanjungsari
			A	A	A	2.768	A	2.978	A	3.192	A	8.938	Kecamatan Sukasari
			A	A	A	3.395	A	3.715	A	4.106	A	11.215	Kecamatan Pamulihan
			A	A	A	3.175	A	3.266	A	3.593	A	10.034	Kecamatan Cimanggung
			A	A	A	3.476	A	3.845	A	4.230	A	11.551	Kecamatan Jatinangor

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			A	A	A	3.203	A	3.486	A	3.670	A	10.359	Kecamatan Rancakalong
			A	A	A	7.699	A	8.661	A	9.487	A	25.846	Kecamatan Sumedang Selatan
			A	A	A	7.128	A	7.681	A	8.222	A	23.030	Kecamatan Sumedang Utara
			A	A	A	2.471	A	2.736	A	3.010	A	8.217	Kecamatan Ganeas
			A	A	A	2.827	A	3.102	A	3.412	A	9.340	Kecamatan Tanjungkerta
			A	A	A	2.718	A	2.876	A	3.078	A	8.672	Kecamatan Tanjungmedar
			A	A	A	3.248	A	3.555	A	3.746	A	10.549	Kecamatan Cimalaka
			A	A	A	3.200	A	3.459	A	3.823	A	10.482	Kecamatan Cisarua
			A	A	A	2.295	A	2.452	A	2.687	A	7.434	Kecamatan Tomo
			A	A	A	3.210	A	3.528	A	3.881	A	10.618	Kecamatan Ujungjaya
			A	A	A	3.038	A	3.359	A	3.645	A	10.041	Kecamatan Jatigede
			BB	A	A	4.793	A	5.272	A	5.799	A	15.864	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	4,66	4,7	4,71		4,72		4,75		4,75		

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.1	Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik (Persen)	98	99	99	876	99	920	99	996	99	2.792	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIA (Persen)	33	43	47	548	50	575	53	623	53	1.745	
		Persentase Kepemilikan KK (Persen)	97	98	99	767	99	805	99	872	99	2.443	
5.3.2	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun (Persen)	98	99	99	550	99	750	99	900	99	2.200	
		Persentase Kepemilikan Akte Kematian (Persen)	15	20	30	125	40	200	50	250	50	575	
		Persentase Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim (Persen)	5	6	7	125	8	138	9	150	9	413	
5.3.3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Instansi Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (Instansi)	52	55	55	775	55	900	55	1.000	55	2.675	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Response Timerate Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit)	15	15	15	3.663	15	3.793	15	4.119	15	11.576	Satuan Polisi Pamong Praja
5.3.5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi Permohonan Penanaman Modal Yang Terfasilitasi (Persen)	80	93	93	563	93	619	95	681	80	1.864	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.3.6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Investor Terhadap Kebijakan Penanaman Modal Dan PTSP (Persen)	70	75	75	80	80	88	80	97	80	266	
5.3.7	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Tersedianya Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Kabupaten/Kota (Persen)	80	83,33	85	29	85	31	85	35	85	95	
5.3.8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	69	100	100	100	119	100	288	Kecamatan Cimalaka

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.9	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	71,43	80,36	84,82	425	89,29	468	100	608	100	1.501	
5.3.10	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	20	100	22	100	29	100	71	
5.3.11	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	35	100	38	100	50	100	123	
5.3.12	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	21,43	42,86	57,14	76	71,43	78	100	134	100	288	
5.3.13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	95	100	146	100	155	100	396	
5.3.14	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	83,33	88,1	92,86	510	97,62	610	100	660	100	1.780	Kecamatan Buahdua
5.3.15	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	45	100	50	100	75	100	170	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.16	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	66	100	48	100	50	100	164	Kecamatan Rancakalong
5.3.17	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	35,71	50	71,43	145	85,71	165	100	198	100	507	
5.3.18	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	50	100	55	100	105	100	210	
5.3.19	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	81,25	87,5	100	447	100	503	100	584	100	1.534	
5.3.20	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	20	100	30	100	62	100	112	
5.3.21	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	35	100	22	100	24	100	81	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.22	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	80	100	100	75	100	117	100	189	100	381	
5.3.23	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	280	100	308	100	391	100	979	Kecamatan Sumedang Selatan
5.3.24	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	83,33	89,29	95,24	3.745	97,62	3.999	100	4.387	100	12.131	
5.3.25	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	65	100	55	100	61	100	181	
5.3.26	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	80	100	33	100	36	100	149	
5.3.27	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA / Kelurahan Minimal Berkategori Baik (Persen)	50	64,29	78,57	195	92,86	215	100	236	100	645	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.28	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	265	100	291	100	321	100	877	Kecamatan Jatigede
5.3.29	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	50	62,5	75	628	87,5	674	100	741	100	2.042	
5.3.30	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	74	100	94	100	120	100	287	
5.3.31	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	48	100	36	100	40	100	124	
5.3.32	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	54,55	72,73	81,82	186	90,91	208	100	262	100	656	
5.3.33	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	143	100	159	100	175	100	477	
5.3.34	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	50	62,5	75	445	87,5	548	100	600	100	1.593	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.35	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	17	100	25	100	28	100	69	
5.3.36	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	58	100	52	100	57	100	167	
5.3.37	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	55,56	66,67	77,78	100	88,89	126	100	150	100	375	
5.3.38	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	290	100	319	100	351	100	959	Kecamatan Jatinangor
5.3.39	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	67,71	72,92	83,33	788	93,75	867	100	954	100	2.609	
5.3.40	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	55	100	60	100	66	100	181	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.41	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	51	100	34	100	38	100	123	
5.3.42	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	8,33	50	66,67	156	83,33	172	100	189	100	516	
5.3.43	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	117	100	129	100	183	100	428	Kecamatan Situraja
5.3.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	54,17	58,33	66,67	455	80	510	100	568	100	1.533	
5.3.45	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	30	100	33	100	44	100	107	
5.3.46	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	40	100	45	100	50	100	135	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.47	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	13,33	40	60	120	80	131	100	179	100	429	
5.3.48	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	159	100	175	100	192	100	525	Kecamatan Cimanggung
5.3.49	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	73,86	79,55	90,91	513	96,59	564	100	620	100	1.696	
5.3.50	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	22	100	24	100	27	100	73	
5.3.51	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	69	100	43	100	47	100	158	
5.3.52	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	9,09	54,55	72,73	126	90,91	3.978	100	438	100	4.542	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
					2024		2025		2026				
			2022	2023	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.53	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	183	100	251	100	298	100	732	Kecamatan Sukasari
5.3.54	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	59,52	71,43	83,33	510	95,24	584	100	698	100	1.792	
5.3.55	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	34	100	41	100	50	100	125	
5.3.56	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	59	100	32	100	35	100	126	
5.3.57	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	14,29	28,57	57,14	116	85,71	151	100	168	100	435	
5.3.58	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	246	100	270	100	297	100	813	
5.3.59	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	74,07	81,48	92,59	441	96,30	485	100	657	100	1.582	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.60	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	25	100	28	100	31	100	84	
5.3.61	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	56	100	56	100	61	100	173	
5.3.62	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	66,67	77,78	88,89	81	100	89	100	97	100	267	
5.3.63	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	181	100	222	100	273	100	676	Kecamatan Darmaraja
5.3.64	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	67,71	72,92	83,33	540	93,75	615	100	750	100	1.905	
5.3.65	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	20	100	30	100	40	100	90	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.66	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	46	100	30	100	50	100	126	
5.3.67	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	8,33	50	66,67	90	83,33	135	100	185	100	410	
5.3.68	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	141	100	175	100	221	100	537	Kecamatan Cisitu
5.3.69	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	75	81,25	87,5	416	93,75	457	100	553	100	1.426	
5.3.70	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	25	100	28	100	30	100	83	
5.3.71	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	45	100	50	100	54	100	149	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.72	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	10	40	60	40	80	28	100	173	100	240	
5.3.73	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	110	100	121	100	133	100	364	Kecamatan Conggeang
5.3.74	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	67,71	72,92	83,33	421	93,75	463	100	509	100	1.393	
5.3.75	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	7	100	8	100	8	100	23	
5.3.76	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	17	100	18	100	20	100	55	
5.3.77	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	8,33	50	66,67	28	83,33	30	100	33	100	91	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.78	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	75	100	83	100	90	100	248	Kecamatan Paseh
5.3.79	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	62,5	68,75	75	421	93,75	463	100	509	100	1.393	
5.3.80	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	35	100	39	100	42	100	116	
5.3.81	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	77	100	30	100	33	100	140	
5.3.82	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	10	50	70	70	80	124	100	180	100	374	
5.3.83	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	211	100	254	100	280	100	745	
5.3.84	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	100	100	100	493	100	544	100	599	100	1.637	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.85	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	116	100	127	100	154	100	397	
5.3.86	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	88	100	97	100	106	100	291	
5.3.87	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	100	100	100	119	100	143	100	178	100	439	
5.3.88	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	125	100	137	100	137	100	400	
5.3.89	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	83,33	87,88	92,42	514	95,45	565	100	616	100	1.695	Kecamatan Pamulihan
5.3.90	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	39	100	52	100	58	100	148	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.91	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	48	100	52	100	57	100	157	
5.3.92	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	54,55	63,64	72,73	82	90,91	100	100	110	100	293	
5.3.93	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	105	100	136	100	169	100	410	Kecamatan Cisarua
5.3.94	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	62,5	71,43	89,29	440	94,64	484	100	532	100	1.456	
5.3.95	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	70	100	77	100	85	100	232	
5.3.96	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	70	100	77	100	36	100	183	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.97	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	0	57,14	71,43	100	85,71	150	100	176	100	426	
5.3.98	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	183	100	201	100	221	100	605	Kecamatan Ganeas
5.3.99	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	50	62,5	75	377	87,5	414	100	456	100	1.247	
5.3.100	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	21	100	23	100	25	100	70	
5.3.101	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	41	100	29	100	32	100	101	
5.3.102	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	12,5	25	50	70	75	76	100	84	100	230	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
					2024		2025		2026				
			2022	2023	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.103	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	160	100	176	100	193	100	529	Kecamatan Ujungjaya
5.3.104	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	74,07	86,42	91,36	523	96,3	582	100	640	100	1.744	
5.3.105	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	42	100	46	100	51	100	139	
5.3.106	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	85	100	87	100	96	100	268	
5.3.107	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	8,33	50	66,67	81	83,33	92	100	101	100	274	
5.3.108	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	112	100	123	100	136	100	371	
5.3.109	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	67,71	72,92	83,33	469	93,75	516	100	568	100	1.554	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.110	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan	100	100	100	15	100	16	100	18	100	48	Kecamatan Sumedang Utara
5.3.111	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	38	100	42	100	46	100	126	
5.3.112	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	8,33	50	66,67	67	83,33	82	100	90	100	239	
5.3.113	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	290	100	340	100	397	100	1.026	
5.3.114	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	83,33	89,74	94,87	2.642	97,44	3.057	100	3.480	100	9.179	
5.3.115	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	64	100	105	100	140	100	309	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.116	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	121	100	30	100	45	100	196	
5.3.117	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA / Kelurahan Minimal Berkategori Baik (Persen)	80	100	100	171	100	245	100	320	100	736	
5.3.118	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	85	100	94	100	128	100	306	
5.3.119	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	81,25	87,5	93,75	177	100	388	100	526	100	1.092	Kecamatan Wado
5.3.120	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	6	100	7	100	13	100	26	
5.3.121	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	23	100	25	100	47	100	95	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.122	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	10	50	80	21	100	23	100	70	100	114	
5.3.123	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	93	100	119	100	141	100	352	Kecamatan Cibugel
5.3.124	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	28,57	42,86	71,43	529	85,71	625	100	754	100	1.907	
5.3.125	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	25	100	32	100	38	100	95	
5.3.126	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	26	100	30	100	35	100	91	
5.3.127	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	14	29	43	115	72	169	100	200	100	484	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.128	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	120	100	165	100	204	100	489	Kecamatan Tanjungmedar
5.3.129	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	80,25	86,42	92,59	368	96,3	417	100	492	100	1.277	
5.3.130	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	20	100	40	100	50	100	110	
5.3.131	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	38	100	30	100	35	100	103	
5.3.132	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	55,56	66,67	77,78	70	88,89	140	100	175	100	385	
5.3.133	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Yang Diberikan Layanan (Persen)	100	100	100	135	100	157	100	172	100	464	
5.3.134	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Persen)	50	62,5	75	435	87,5	509	100	557	100	1.501	

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3.135	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum Yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	17	100	25	100	28	100	69	
5.3.136	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik Sosial Yang Ditangani (Persen)	100	100	100	33	100	28	100	30	100	90	
5.3.137	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP DESA Minimal Berkategori Baik (Persen)	55,56	66,67	77,78	73	88,89	91	100	95	100	259	
5.4	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Poin)	3,52	4,2	4,3		4,35		4,4		4,4		
5.4.1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Daerah (Persen)	60	60	70	3.389	80	3.727	90	4.100	90	11.216	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian

No	Tujuan, Sasaran dan Prioritas Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.4.2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik (Persen)	100	100	100	4.788	100	5.963	100	7.192	100	17.944	
5.4.3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks Kami) (Persen)	54,26	62,02	69,77	768	73,64	845	77,52	929	77,52	2.543	
5.4.4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistic (Persen)	n/a	n/a	100	304	100	334	100	368	100	1.007	
5.4.5	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persen)	16,48	26,76	38,35	495	48,68	545	60,43	599	60,43	1.638	Dinas Arsip dan Perpustakaan
5.4.6	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan Arsip (Persen)	80	100	100	391	100	430	100	473	100	1.294	

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

6.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Tata Ruang

Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang mempedomani RTRW Kabupaten Sumedang melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah dalam RTRW pada periode berkenaan. RPD yang disusun diharapkan selaras dan mengadaptasi rencana yang dimuat dalam RTRW untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis penataan ruang.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) baik secara vertikal maupun horizontal. SPPR dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW, dengan menyelaraskan indikasi program utama sebagaimana dimaksud dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dalam kaitannya dengan penyelarasan Dokumen RPD dan RTRW, dokumen SPPR ini menjadi instrumen yang dapat dipergunakan dalam melakukan sinkronisasi antara program dalam dokumen RPD agar selaras dengan program pemanfaatan ruang yang termuat dalam RTRW. Dengan demikian, program-program pembangunan yang bersifat spasial dapat memiliki lokus yang jelas dan berbasis ruang.

Sesuai dengan pendekatan penyusunan perencanaan berdasarkan substansinya, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan pendekatan holistik, tematik integratif, dan spasial. Dalam sub bab ini, disajikan deskripsi pendekatan spasial yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038. Dalam konteks mewujudkan keselarasan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPD Tahun 2024-2026, maka strategi dan arah kebijakan kewilayahan ditujukan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.

Adapun tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 Pasal 4 yaitu “Mewujudkan Sumedang sebagai kabupaten agribisnis yang didukung oleh kepariwisataan dan perindustrian secara efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.3
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Aspek	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah	a. Pengembangan Kawasan Agribisnis Komoditas Unggulan Kabupaten Sumedang;	a. Mengembangkan informasi pasar komoditas unggulan; b. Mengembangkan kelembagaan agribisnis komoditas unggulan; c. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil komoditas unggulan; d. Meningkatkan nilai dan daya saing komoditas unggulan; e. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian; f. Meningkatkan produksi komoditas pertanian; g. Meningkatkan pengolahan hasil produksi pertanian; dan h. Meningkatkan pengolahan pasca panen dan pemasaran yang berorientasi ekspor.
	b. Pengembangan Kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten;	a. Mengembangkan sentra produksi unggulan di kecamatan sesuai dengan potensi masing-masing kecamatan; b. Mempertahankan dan mengendalikan fungsi lahan pertanian produktif berkelanjutan; c. Meningkatkan produktivitas, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi lahan pertanian; d. Meningkatkan dan mengembangkan penelitian agribisnis; dan

Aspek	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		<p>e. Mengembangkan industri pembenihan dan diversifikasi tanaman pangan.</p>
	<p>c. Pengembangan Kawasan perikanan dan peternakan di seluruh Wilayah Kabupaten;</p>	<p>a. Menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya;</p> <p>b. Mengendalikan melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan;</p> <p>c. Meningkatkan produksi dengan memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan;</p> <p>d. Meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan ladang penggembalaan;</p> <p>e. Mengembangkan Kawasan peternakan diarahkan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;</p> <p>f. Mengembangkan Kawasan peternakan yang memiliki komoditas ternak unggulan komparatif dan kompetitif;</p> <p>g. Mengendalikan budidaya ternak yang berpotensi dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya dijauhkan dari permukiman penduduk; dan</p> <p>h. Mengembangkan industri pengolahan hasil ternak untuk meningkatkan nilai ekonomi ternak.</p>
	<p>d. Penetapan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Daya Tarik Wisata yang berbasis Ekowisata;</p>	<p>a. Mengembangkan destinasi pariwisata unggulan;</p> <p>b. Mengembangkan obyek daya tarik wisata dan agrowisata komoditas unggulan;</p> <p>c. Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur penunjang pariwisata;</p> <p>d. Melakukan promosi pariwisata dan daya Tarik wisata;</p> <p>e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan</p>

Aspek	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		pariwisata; f. Mendatangkan investasi dari dunia usaha; g. Mengembangkan pariwisata alam, budaya, dan minat khusus yang berbasis budaya dengan berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal; h. Mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam; dan i. Melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
	e. Penetapan dan pengembangan Kawasan Industri, sentra industri kecil dan industri rumah tangga;	a. Mengembangkan Kawasan Industri manufaktur di Wilayah timur; b. Mengembangkan sentra kerajinan dan industri rumah tangga; c. Mengembangkan Kawasan Industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; dan d. Mempermudah proses perizinan untuk pendirian usaha.
	f. Peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;	a. Meningkatkan dan mengendalikan fungsi Hutan lindung; b. Meningkatkan dan mengendalikan fungsi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dan Kawasan perlindungan setempat; c. Meningkatkan nilai ekonomi Kawasan Lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pertanian, peternakan, pariwisata, dan industri yang ramah lingkungan; dan d. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan Lindung.

Aspek	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
	g. Peningkatan sistem pusat kegiatan secara berimbang;	<ul style="list-style-type: none"> a. Memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan sistem pusat kegiatan di Wilayah timur; b. Mengendalikan sistem pusat kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi yang belum berkembang optimal di Wilayah barat; c. Mengembangkan Kawasan Perkotaan; dan d. Mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan PPK dan PPL serta terintegrasi dengan PKL yang sudah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
	h. Peningkatan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi Wilayah;	<ul style="list-style-type: none"> a. Menata sistem transportasi untuk kemudahan keterhubungan antara transportasi lokal dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional; b. Mengembangkan sistem transportasi yang menjangkau tiap bagian Wilayah dan yang menghubungkan Kawasan Perdesaan-Perkotaan; c. Memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah tidak aktif; d. Melaksanakan pembangunan jalur kereta api beserta fasilitas penunjangnya; dan e. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk keperluan penyelenggaraan penyeberangan waduk.
	i. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan sistem penyediaan energi; b. Meningkatkan pelayanan telekomunikasi; c. Meningkatkan sistem pelayanan sumber daya air; d. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan;

Aspek	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
	sosial dan fasilitas umum;	<ul style="list-style-type: none"> e. Mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan; f. Mengembangkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan fungsi pusat kegiatan; dan g. Menetapkan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
	j. Penataan kawasan ibukota Perkotaan Sumedang;	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar; b. Mengembangkan permukiman perkotaan yang mendorong penggunaan tanah yang lebih Efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada Wilayah yang perkotaan cepat tumbuh; c. Mengembangkan permukiman yang diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal; d. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan efisiensi energi di Kawasan Permukiman perkotaan; e. Mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; f. Mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan Wilayah di sekitar daerah; g. Mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan h. Mengendalikan dan penataan pertumbuhan Kawasan Permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.

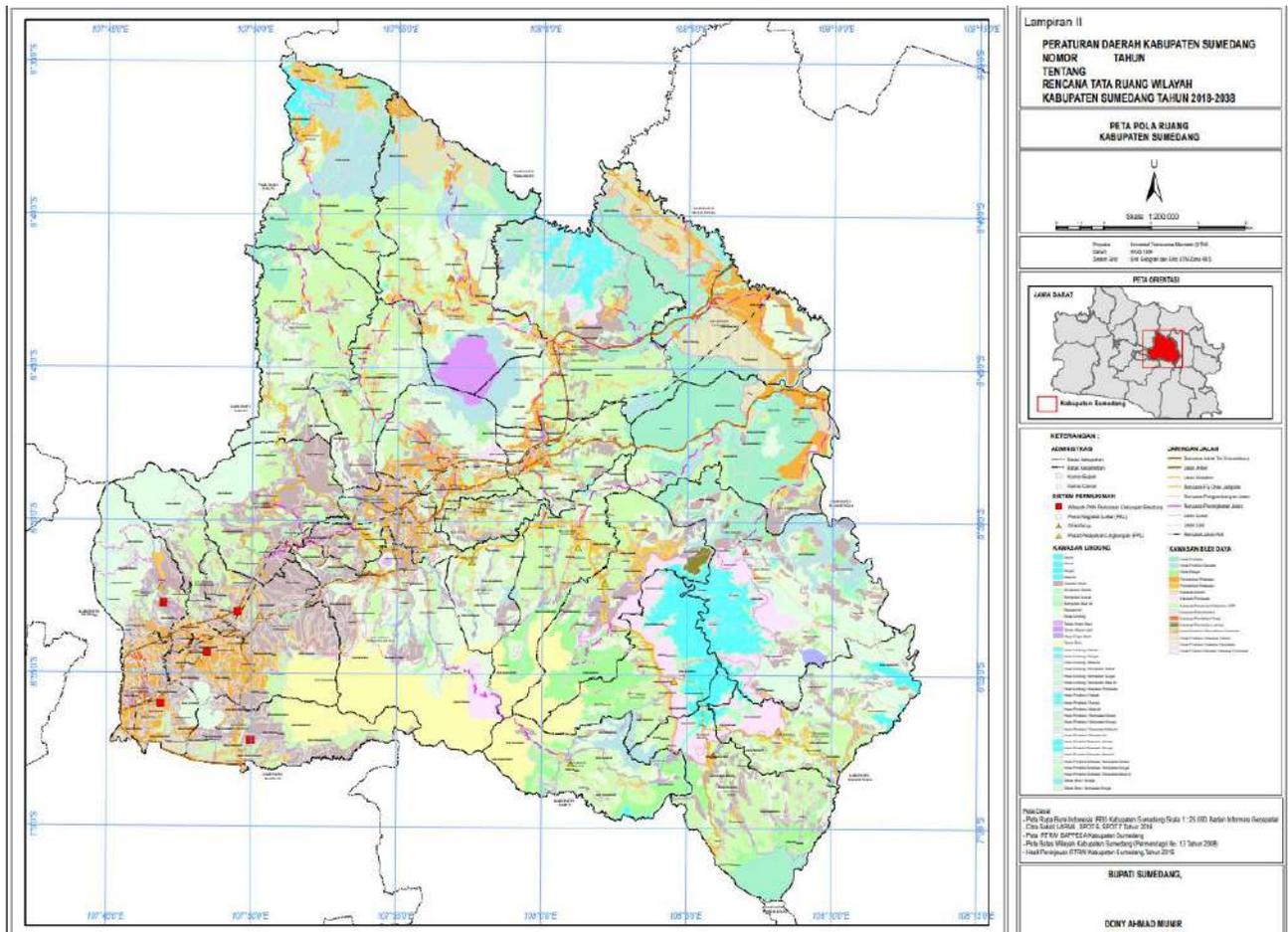
Aspek	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
	k. Pengembangan kawasan pendidikan di kabupaten;	<ul style="list-style-type: none"> a. Memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan pendidikan di Kawasan Jatinangor sesuai dengan KSP Pendidikan Jatinangor; dan b. Mengendalikan kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi pendidikan yang belum berkembang optimal di wilayah PKW.
	l. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede;	<ul style="list-style-type: none"> a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi; b. Membangun kerjasama dengan pihak pengelola Waduk Jatigede; c. Memberlakukan insentif dan disinsentif bagi pihak pengembang; d. Menggali potensi daerah sebagai pusat wisata unggulan; e. Menjadikan tujuan wisata skala nasional dan internasional; dan f. Mengendalikan dampak pengembangan.
	m. Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh; dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun konektivitas dan aksesibilitas Kawasan; b. Meningkatkan status dan kualitas Jalan kabupaten; c. Menyelaraskan pengembangan dengan Kawasan perbatasan; d. Mengembangkan potensi Daerah Kabupaten; e. Mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan Kawasan; f. Mendorong pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan basis-basis Kawasan penyangga sebagai basis rantai pasokan; dan g. Mengawal pertumbuhan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
	n. Pengamanan fungsi Kawasan untuk	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

Aspek	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
	pertahanan dan keamanan Negara.	<ul style="list-style-type: none"> b. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan khusus pertahanan dan keamanan; c. Mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan d. Turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan Tentara Nasional Indonesia.

Sumber : RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

Lebih lanjut untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan rencana struktur ruang yang memuat rencana pengembangan sistem pusat kegiatan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, kawasan strategis memperhatikan kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, adapun kawasan strategis kabupaten ditentukan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi dan ketahanan pangan. Arah pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan.

Gambar 6.3
Peta Rencana Pola Ruang



Sumber : RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) tersebut di atas sebagaimana penjelasan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.4
Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Sumedang

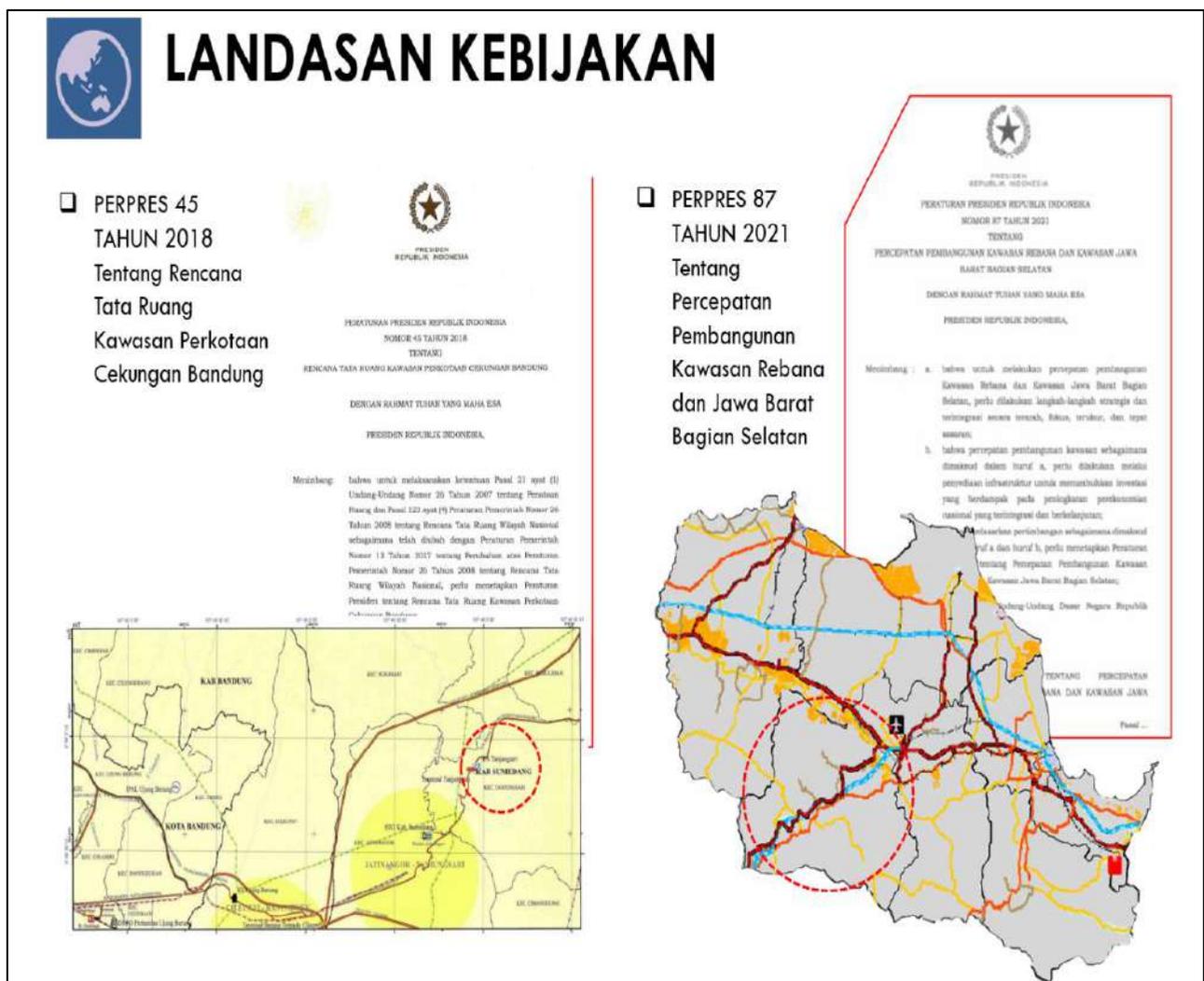
No	Sudut Kepentingan	Lokasi
1	Pertumbuhan Ekonomi	a. Kawasan Industri Ujungjaya; b. Kawasan Waduk Jatigede; c. Kawasan Industri Buahdua; dan d. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede.
2	Sosial Budaya	a. Kawasan Kampung Sunda di Kawasan Jatigede; dan b. Kawasan budaya tradisional di Kecamatan Rancakalong.
3	Pendayagunaan Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tinggi	Kawasan Gunung Tampomas dan sekitarnya.
4	Ketahanan Pangan	Tersebar di seluruh wilayah kabupaten

Sumber : RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

6.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan

Terdapat 2 (dua) Peraturan Presiden yang berlaku di Kabupaten Sumedang yang terkait dengan pembangunan berbasis kawasan yaitu Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Gambar 6.5
Kawasan Strategis Kabupaten



Sumedang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, dalam hal tata kelola kawasan perkotaan ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah menyusun Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

Kawasan Perkotaan Jatinangor, dalam peraturan daerah ini wilayah kecamatan yang masuk kedalam Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung disebut dengan Kawasan Perkotaan Jatinangor.

Memperhatikan ketentuan peraturan tentang perkotaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan bahwa Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RP2P adalah rencana pentahapan penyediaan layanan Perkotaan beserta strategi pendanaan indikatif yang merupakan bagian dari dokumen rencana pembangunan daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang, namun demikian peraturan tentang penyusunan RP2P saat ini belum tersusun sehingga dalam RPD ini perlu adanya indikasi program yang mengakomodir:

- a. rencana sistem Pelayanan Perkotaan merupakan bagian dari program pembangunan daerah; dan
- b. rencana pendanaan indikatif merupakan bagian dari kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah.

Operasionalisasi RP2P dalam RPD diintegrasikan ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana sistem Pelayanan Perkotaan, meliputi :

- a. rencana penyediaan layanan Perkotaan;
- b. rencana pengoperasian dan pemeliharaan layanan Perkotaan;
- c. rencana pembinaan sumber daya manusia dalam penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan Perkotaan; dan
- d. rencana pengembangan teknologi dan inovasi dalam penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan Perkotaan dengan pendekatan kota cerdas.

Rencana pendanaan indikatif merupakan perkiraan biaya pemenuhan rencana sistem Pelayanan Perkotaan. Pemetaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dalam rencana pembangunan sebagaimana pada table berikut ini :

Tabel 6.5
Pemetaan Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan

Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Kalsifikasi	Jenis/ Pendekatan	Sub Jenis	Perangkat Daerah/Stakeholders
Penyediaan Layanan Perkotaan	Penyediaan fasilitas Pelayanan Perkotaan	Pembangunan, Pengembangan, Revitalisasi, peremajaan, regenerasi, pemugaran, atau pembangunan kembali.	Fasum	Prasarana	Jaringan jalan dan perlengkapan keselamatan lalu lintas	DPUTR; Dishub
					Sistem penyediaan air minum	DPUTR; PDAM
					Jaringan drainase	DPUTR
					Sistem pengelolaan air limbah	DLHK; Perkimtan
					Sistem pengelolaan persampahan	DLHK
					Sistem proteksi kebakaran	Satpol PP
					Terminal atau stasiun	Dishub

Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Kalsifikasi	Jenis/ Pendekatan	Sub Jenis	Perangkat Daerah/Stakeholders
					Jalur pejalan kaki dan penyeberangan	DPUTR; Dishub
					Jalur sepeda dan kendaraan listrik	DPUTR; Dishub
					Jalur evakuasi bencana	DPUTR; BPBD
				Sarana	Sarana pemerintahan	DPUTR; PD lainnya
					Sarana pendidikan	DPUTR; Disdik
					Sarana kesehatan	DPUTR; Dinkes
					Sarana transportasi	Dishub
					Sarana peribadatan	Setda
					Sarana perdagangan	Diskopukmpp; DPUTR
					Sarana kebudayaan, rekreasi, gelanggang olahraga,	Disparbudpora; DPUTR: Swasta

Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Kalsifikasi	Jenis/ Pendekatan	Sub Jenis	Perangkat Daerah/Stakeholders
					gedung pertunjukan, dan apresiasi seni	
					Sarana keuangan dan perekonomian	BUMD; BUMN; Swasta
					Sarana ruang terbuka hijau	DLHK; Swasta
					Sarana penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	Bappppeda; Diskominfo
					Museum dan perpustakaan	Disparbudpora; Disarpus; DPUTR
					Tempat pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran	Pemda; BUMD; BUMN; Swasta
				Utilitas umum	Jaringan listrik	PLN; Pemerintah
					Jaringan teknologi	BUMN; Swasta

Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Kalsifikasi	Jenis/ Pendekatan	Sub Jenis	Perangkat Daerah/Stakeholders
					informasi dan komunikasi	
					Jaringan gas dan pengisian bahan bakar	BUMN; Swasta
			Fasos	Fasilitas komunitas adat, pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial, dan/atau konsultasi kesejahteraan keluarga		DLHK; Disparbudpora; Dinsos; Setda; Dinkes; DP3AKB
				Fasilitas penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dan korban kekerasan dalam rumah tangga		Dinsos; DP3AKB
				Fasilitas rehabilitasi bekas korban		Dinsos; Dinkes; DP3AKB

Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Kalsifikasi	Jenis/ Pendekatan	Sub Jenis	Perangkat Daerah/Stakeholders
				penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan masyarakat tidak mampu;		
				Fasilitas perlindungan jaminan sosial;		Dinsos
				Fasilitas siap tanggap darurat bencana, termasuk sistem deteksi dini kebencanaan		BPBD; Dinsos; DPUTR; Disperkimtan; PDAM; Stakeholders lainnya
				Fasilitas pencatatan informasi cuaca dan mitigasi bencana		BPBD; Stakeholders lainnya
				Fasilitas layanan informasi dan data		PD; Kecamatan; Desa

Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Kalsifikasi	Jenis/ Pendekatan	Sub Jenis	Perangkat Daerah/Stakeholders
				Fasilitas pemadam kebakaran		Satpolpp
				Fasilitas layanan untuk tenaga kerja		Disnaker
				Fasilitas pemakaman		DLHK
				Fasilitas perlindungan hukum;		Setda
				Fasilitas pembinaan usaha kecil dan menengah, serta pengembangan potensi lokal		Diskopukmpp
				Fasilitas sanggar seni		Disparbudpora
				Fasilitas pendukung ketenteraman dan ketertiban umum, serta		Satpolpp

Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Kalsifikasi	Jenis/ Pendekatan	Sub Jenis	Perangkat Daerah/Stakeholders
				perlindungan masyarakat.		
	Pembinaan sumber daya manusia dalam penyediaan fasilitas Pelayanan Perkotaan	Penempatan tenaga ahli dan terampil yang kompeten di bidangnya				BKPSDM; PD lainnya
		Pembinaan kompetensi oleh pemerintah atau Badan Hukum penyedia layanan				BKPSDM; Stakeholders lainnya
	Pengembangan teknologi dan inovasi dengan pendekatan kota cerdas dalam penyediaan fasilitas Pelayanan	Efisiensi dan efektivitas penyediaan fasilitas Pelayanan Perkotaan sesuai kemajuan teknologi yang sudah terstandardisasi;	Manajemen permintaan terhadap layanan	Tata kelola birokrasi	Perbaikan pelayanan publik	Semua PD yang melayani masyarakat secara langsung (DPMPTSP; Disduk; DPUTR, dll)
					Efisiensi birokrasi	Semua PD
					Efisiensi dan transparansi penyusunan kebijakan	Semua PD

Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Kalsifikasi	Jenis/ Pendekatan	Sub Jenis	Perangkat Daerah/Stakeholders
	Perkotaan (Inovasi, kolaborasi, dan/atau pemanfaatan teknologi digital sesuai dengan kebutuhan warga Perkotaan)	Penerapan keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku	Penerapan teknologi digital sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi	Ekonomi	Pengembangan ekosistem bisnis yang berdaya saing dan kemudahan berusaha	DPMPTSP; Diskopukmpp
					Pemasaran usaha masyarakat secara digital	Diskopukmpp; Diskominfo; Stakeholder lainnya
					Menyejahterakan masyarakat	Semua PD
					Transparansi transaksi keuangan	Badan Usaha
					Pemasaran perkotaan secara digital.	Badan Usaha
					Kehidupan berkota	Pelayanan Perkotaan yang terjangkau dan terintegrasi
	Lingkungan hunian yang	Disperkimtan				
	Penjaminan kualitas bangunan untuk penggunaan jangka panjang.					

Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Kalsifikasi	Jenis/ Pendekatan	Sub Jenis	Perangkat Daerah/Stakeholders
					aman dan nyaman bagi masyarakat	
					Lingkungan kerja dan kegiatan warga Perkotaan lainnya yang aman dan nyaman	DPUTR; Disperkintan; PDAM; Stakeholders lainnya
				Masyarakat (Pemberdayaan masyarakat)	Terbuka terhadap informasi, tidak diskriminatif, dan tidak intoleransi	Diskominfo; PD Lainnya
					Beradaptasi dengan kemajuan teknologi	Diskominfo; PD Lainnya
					Disiplin dan teratur dalam melakukan kegiatan di Perkotaan	Satpolpp

Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Kalsifikasi	Jenis/ Pendekatan	Sub Jenis	Perangkat Daerah/Stakeholders
					Menerapkan budaya saling menghormati dan berbudi pekerti	Pemerintah; Stakeholders lainnya
				Lingkungan	Tata kelola limbah, sampah, dan pencemaran udara	DLHK; Disperkimtan
					Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana	Pemerintah; masyarakat; badan usaha; stakeholders lainnya
					Berketahanan iklim dan bencana	Pemerintah; masyarakat; badan usaha; stakeholders lainnya
					Pengelolaan berwawasan lingkungan dan energi ramah lingkungan	Pemerintah; masyarakat; badan usaha; stakeholders lainnya
					Perbaikan wajah Perkotaan	Pemerintah; masyarakat; badan usaha; stakeholders lainnya

Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Kalsifikasi	Jenis/ Pendekatan	Sub Jenis	Perangkat Daerah/Stakeholders
				Mobilitas.	Efektivitas dan efisiensi pergerakan orang dan barang	Dishub
					Transportasi ramah lingkungan dan menyehatkan	Dishub
					Pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi	Dishub
Pengoperasian dan pemeliharaan layanan Perkotaan	Pengoperasian Layanan Perkotaan	Pembinaan kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasian fasilitas Pelayanan Perkotaan;				Pemerintah dan Badan Usaha yang melaksanakan pengoperasian fasilitas pelayanan perkotaan

Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Kalsifikasi	Jenis/ Pendekatan	Sub Jenis	Perangkat Daerah/Stakeholders
		Pengelolaan secara transparan dan akuntabel sesuai standar yang berlaku				
		Penerapan kemajuan teknologi digital dengan pendekatan kota cerdas				
		Integrasi antar-platform sistem pengoperasian				
	Pemeliharaan layanan Perkotaan	Pemeriksaan kualitas fasilitas Pelayanan Perkotaan secara berkala				Pemerintah dan Badan Usaha yang melaksanakan pengoperasian fasilitas pelayanan perkotaan
		Perawatan fasilitas Pelayanan Perkotaan				

Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas	Kalsifikasi	Jenis/ Pendekatan	Sub Jenis	Perangkat Daerah/Stakeholders
		Pembinaan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia dalam pemeliharaan fasilitas Pelayanan Perkotaan				

Sumber : Hasil Analisis, 2023

*Keterangan : Judul Kegiatan Menyesuaikan terhadap istilah dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan

Selanjutnya seluruh wilayah Kabupaten Sumedang adalah merupakan bagian dari Kawasan Rebana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Kawasan Rebana adalah pengembangan baru berbasis perkotaan yang meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan, dimana ke-tujuh kabupaten/kota tersebut memiliki keterkaitan fungsional dan berbasis aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan aglomerasi .

Rencana induk berfungsi sebagai pedoman bagi menteri, kepala lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing, serta menjadi pedoman bagi gubernur, dan bupati/wali kota untuk menyusun kebijakan percepatan pembangunan kawasan.

Terdapat 19 (Sembilan belas) proyek pembangunan yang berlokasi di Kabupaten Sumedang, baik kewenangan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi maupun lintas kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana dalam Tabel 6.6:

Tabel 6.6
Daftar Program/Proyek Perpres No. 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan Di Kabupaten Sumedang

No	Program	Kategori (P1/P2)	Perencanaan/Persiapan		Konstruksi		Penanggung Jawab (Perpres)	Indikasi Anggaran (Juta Rupiah) (Perpres)	Resume Sumber Dana
			Mulai	Selesai	Mulai	Selesai			
1	Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Seksi 3-6)	P1			2021	2023	Kementerian PUPR	5.580.000	BUMN/BU MD/SWAS TA/KPBU
16	Pelebaran Jalan Legok - Conggeang (Interchange Cisumdawu-Legok)	P1	2022	2022	2023	2024	Kementerian PUPR;	34.400	APBN - APBD
17	Pelebaran Jalan Conggeang – Buah dua	P2	2024	2024	2025	2026	Kementerian PUPR (DAK);	25.000	APBN - APBD

No	Program	Kategori (P1/P2)	Perencanaan/ Persiapan		Konstruksi		Penanggung Jawab (Perpres)	Indikasi Anggaran (Juta Rupiah) (Perpres)	Resume Sumber Dana
			Mulai	Selesai	Mulai	Selesai			
18	Pelebaran Jalan Cimalaka – Cipadung (Interchange Cisumdawu – Cimalaka)	P1	2022	2022	2023	2024	Kementerian PUPR;	36.600	APBN - APBD
19	Pelebaran Jalan Conggeang – Ujungjaya	P2	2024	2024	2025	2027	Kementerian PUPR (DAK);	91.000	APBN - APBD
24	Pelebaran Jalan Pangkalan Damri – Kiarapayung (Exit Ramp Cisumdawu – Jatinangor)	P1	2022	2022	2023	2024	Kementerian PUPR;	22.500	APBN - APBD
1	Reaktivasi Rel KA Rancaekek – Tanjungsari	P1	2021	2022	2023	2025	Kementerian Perhubungan	1.200.000	APBN
2	Pembangunan Kereta Cepat Bandung – Kertajati	P2*	2022	2023	2024	2030	Kementerian Perhubungan	20.000.000	BUMN/BU MD/SWAS TA/KPBU
7	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap I	P1	2021	2022	2023	2026	Kementerian PUPR;	2.100.000	APBN - APBD - BUMN/BU MD/SWAS TA/KPBU
8	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap II	P2*	2021	2022	2023	2025	Kementerian PUPR;	3.100.000	APBN - APBD - BUMN/BU MD/SWAS TA/KPBU
11	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Cipanas	P2	2022	2024	2025	2025	Kementerian PUPR;	200.000	APBN - APBD
1	Pembangunan Waduk/Bendungan Kadumalik	P2	2021	2023	2024	2027	Kementerian PUPR	1.300.000	APBN
6	Pembangunan Gedung Pusat Budaya	P1	2022	2022	2023	2024	Pemerintah Daerah	25.000	APBD
7	Penataan Kawasan Waduk Jatigede sebagai Destinasi Wisata	P1	2022	2023	2024	2030	Kemenko Perekonomian;	200.000	APBN - BUMN/BU MD/SWAS TA/KPBU
9	Pengembangan Kawasan Agribisnis Berbasis Korporasi Petani	P2	2022	2023	2024	2027	Kementerian Pertanian;	89.560	APBN - APBD
10	Pengembangan desa digital	P1	2022	2022	2023	2024	Kementerian Kominfo;	100.000	APBN - APBD
14	Pembangunan Pembangunan Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Tampomas	P2*	2022	2023	2024	2030	Kementerian ESDM	3.220.000	APBN - BUMN/BU MD/SWAS TA/KPBU

No	Program	Kategori (P1/P2)	Perencanaan/ Persiapan		Konstruksi		Penanggung Jawab (Perpres)	Indikasi Anggaran (Juta Rupiah) (Perpres)	Resume Sumber Dana
			Mulai	Selesai	Mulai	Selesai			
16	Pengembangan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jatigede	P2			2022	2024	Kementerian ESDM	668.370	APBN
17	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Wado	P2*	2022	2022	2023	2028	Kementerian ESDM	1.200.000	BUMN/BU MD/SWAS TA/KPBU

Sumber : Perpres No. 87/2021, Hasil Pendetailan Program, 2023

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan disyahkan pada tanggal 9 September 2021, setelah disyahkan segera diimplimentasikan sebagaimana target waktu yang ditetapkan, proses percepatan terus dilakukan sehingga perlu adanya sinkronisasi dengan perencanaan diberbagai tingkatan pemerintahan serta perlu adanya rencana aksi lebih lanjut agar mencapai outcome yang diharapkan dari proyek-proyek tersebut, atas dasar hal tersebut maka program-program ini perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan, disusun program-program pembangunan sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tanggungjawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan. Program-program yang telah disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang merupakan urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab OPD.

Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya hingga akhir periode RPD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (outcomes). Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh OPD.

Disamping itu, disajikan pula rancangan secara proyektif mengenai rencana atau target capaian setiap tahun perencanaan selama kurun waktu lima tahun, sehingga didapatkan gambarannya tentang prospek pencapaian target tersebut bagi masyarakat di satu sisi, serta menjadi acuan kinerja bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sejalan dengan itu, kebutuhan pendanaan yang dapat difasilitasi bagi setiap program prioritas tersebut juga digambarkan secara proyektif, berdasarkan evaluasi terhadap kerangka pendanaan yang dapat dicapai pada lima tahun anggaran terakhir.

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan
Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

No	Jenis Belanja	Kondisi Awal		Proyeksi		
		2022 *unaudit	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	BELANJA					
5.1	Belanja Operasi	1.967.401.426.401,00	2.134.972.336.184,00	1.961.323.996.881,00	1.943.407.057.362,00	1.989.367.678.727,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.169.624.519.375,00	1.255.084.934.591,00	1.255.084.934.591,00	1.255.084.934.591,00	1.255.084.934.591,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	733.747.913.310,00	673.184.501.593,00	588.238.062.290,00	617.822.122.771,00	656.682.744.136,01
5.1.3	Belanja Subsidi	95.782.500,00	350.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00
5.1.4	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	57.220.254.016,00	193.362.870.000,00	100.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.712.957.200,00	12.990.030.000,00	17.551.000.000,00	20.000.000.000,00	27.000.000.000,00
5.2	Belanja Modal	470.908.866.968,00	217.570.638.977,00	691.871.541.700,00	807.234.791.024,00	1.460.678.724.340,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	27.007.255.100,00	1.202.500.000,00	33.254.033.200,0	41.005.548.300,00	50.490.131.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183.985.337.475,00	54.799.095.687,00	184.812.477.000,0	205.733.249.300,00	275.674.489.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129.991.095.312,00	75.150.624.290,00	213.866.705.500,0	251.785.990.424,00	431.874.415.340,00

No	Jenis Belanja	Kondisi Awal		Proyeksi		
		2022 *unaudit	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.106.286.763,00	82.864.099.000,00	246.137.593.000,0	294.362.761.000,00	687.724.297.000,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.275.041.363,00	516.900.000,00	13.800.733.000,0	14.347.242.000,00	14.915.392.000,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	543.850.955,00	3.037.420.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Tak Terduga	2.786.124.220,00	13.155.296.795,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	389.605.052.943,00	429.624.477.900,00	460.836.600.471,00	483.622.369.378,00	508.397.234.678,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	29.486.323.500,00	30.551.048.900,00	35.304.107.100,00	42.578.052.500,00	57.352.917.800,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	360.118.729.443,00	399.073.429.000,00	425.532.493.371,00	441.044.316.878,00	451.044.316.878,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.830.701.470.532,00	2.795.322.749.856,00	3.144.032.139.052,00	3.264.264.217.764,00	3.480.046.405.093,00
SURPLUS/DEFISIT		57.259.838.819,84	1.500.000.000,00	(41.000.000.000,00)	5.409.181.435,00	6.000.000.000,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	Persen	89,39	91,89	94,39	150.760	96,89	166.591	98,89	183.719	99	501.069	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP	Persen	90,27	92,27	94,27	77.324	96,27	85.056	98,27	93.561	98,27	255.941	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	Persen	53,47	63,47	73,47	23.833	83,47	26.216	93,47	28.838	93,47	78.887	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	92,04	93,74	95,44	21.475	97,14	22.723	98,84	24.995	98,84	69.194	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka	Persen	21,61	40,30	68,34	1.650	94,33	1.850	100	1.850	100	5.350	
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Proporsi GTK penggerak	Persen	5	10	25	1.050	30	1.050	30	1.050	30	3.150	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,17	0,19	0,22	64.563	0,23	84.801	0,25	111.705	0,25	261.069	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	Persen	50	55	60	52.779	65	59.566	70	69.027	70	181.372	
		Presentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Persen	28	33	40	750	50	875	60	1.180	60	2.805	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	700	100	850	100	1.000	100	2.550	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang sesuai standar	Persen	84	85	86	7.416	88	8.158	90	8.973	90	24.547	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Tenaga Kesehatan yang memiliki standar kompetensi	Persen	86	87	88	1.800	89	2.800	90	3.300	90	7.900	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar	Persen	84	86	87	1.900	88	2.950	92	3.300	92	8.150	
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Presentase Desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri	Persen	20	26	31	1.450	36	1.800	41	2.040	41	5.290	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas Lahan yang terairi (Ha)	Hektar	20.633,4	21054,31	21.454,31	24.341	21.814,31	26.775	22.154,31	29.452	22.154,31	80.567	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	Rumah Tangga	244.688	245.847	246.288	11.050	247.888	12.155	249.488	13.371	249.488	36.576	
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase kapasitas pelayanan sarana prasarana pengelolaan sampah permukiman terhadap jumlah rumah tangga	Persen	0	21,94	25,81	1.595	28,55	3.270	31,73	3.585	31,73	8.450	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	95,84	95,91	96,12	3.313	96,36	5.196	96,61	5.203	96,61	13.712	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06	Program Pengembangan Permukiman	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	10,49	26,57	51,05	5.140	75,52	3.968	100	3.968	100	13.075	Dinas Perumahan, Kawasan

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Permukiman dan Pertanahan
1.03.07	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Persen	15,45	36,52	57,58	935	78,65	2.559	99,72	4.741	99,72	8.235	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jumlah kumulatif Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	Bangunan	53	55	59	8.900	63	9.660	67	10.606	67	29.166	
1.03.09	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	60,04	61,49	62,13	117.929	64,07	127.960	65,36	141.164	65,36	387.053	
1.03.10	Program Pengembangan Operator/Teknis/ Jasa Konstruksi	Persentase tenaga Operator/Teknis/ Analis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	71,76	64,21	72,77	605	81,34	637	89,90	701	89,90	1.943	
1.03.11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan RTR	Persen	38	42,31	50,00	570	57,69	480	61,54	480	61,54	1.530	
		Persentase pelayanan	Persen	24,61	49,22	64,36	200	77,18	220	90,00	242	90,00	662	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		pemanfaatan ruang												
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah layak huni yang terlayani	Unit	30	55	80	3.450	105	3.795	130	4.175	130	11.420	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Persen	81,34	81,34	81,97	7.905	82,43	9.040	82,89	11.065	82,89	28.009	
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Dicegah	Hektar	154835,31	154835,31	154835,3	2.108	154835,3	2.108	154835,3	2.108	154835,31	6.323	
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	38,36	53,42	83,56	13.160	91,78	14.476	100	15.924	100	43.560	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan,	Persen	72	78	83	2.513	89	2.947	94	3.705	94	9.166	Satuan Polisi

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan Ketertiban Umum	Ketertiban, dan Ketentraman)												Pamong Praja
		Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani	Persen	91	92	92	789	93	1.013	96	1.274	96	3.076	
		Rasio Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang setiap RT)	Rasio	0,67	0,74	0,81	420	0,89	500	0,98	600	0,98	1.520	
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	760.687	798.721	838.657	100	880.589	110	924.618	121	924.618	331	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	2.935	3.081	3.235	2.808	3.396	3.095	3.565	3.406	3.565	9.309	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	2.538	2.411	2.290	325	2.175	358	2.066	393	2.066	1.076	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	15	3.663	15	3.793	15	4.119	15	11.576	Satuan Polisi Pamong Praja
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima bantuan sosial melalui pemberdayaan sosial	Persen	7,22	9,03	12,64	275	16,25	275	19,86	275	19,86	825	Dinas Sosial
		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	58,33	58,33	66,67	1.770	75,00	1.835	83,33	1.986	83,33	5.591	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima bantuan sosial kebutuhan dasar	Persen	58,47	65,30	71,66	4.795	78,02	6.235	84,33	7.270	84,33	18.300	
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat (DTKS) yang menerima jaminan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	61,77	62,12	62,47	3.600	62,83	4.500	63,19	4.868	63,19	12.968	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	1.369	100	1.625	100	1.800	100	4.794	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan Makam Pahlawan	Persen	100	100	100	261	100	144	100	180	100	585	
II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	15,24	17,77	20,31	1.615	21,33	1.673	25,39	1.836	25,39	5.124	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Orang	50	100	150	950	200	1.045	250	1.150	600	3.145	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	10,2	15,19	20,18	1.115	25,17	1.221	30,16	1.343	30,16	3.678	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS)	Persen	10	11,5	21	703	26	783	31	862	31	2.348	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)												
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD Responsip Gender	Persen	45,16	61,29	65	1.117	75	1.229	100	1.351	100	3.697	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan	Persen	100	0,0035	0,0036	1.107	0,0042	1.217	0,0047	1.339	0,0047	3.663	
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan	Persen	100	16,53	33,06	1.392	66,13	1.532	80	1.685	80	4.609	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	Persen	100	33,3	42	309	71	340	100	374	100	1.023	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase forum anak, termasuk forum anak yang ada di kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persen	46,15	65,38	69,07	618	75,65	680	100	748	100	2.046	
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pendampingan Khusus terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan	Persen	100	0,02	0,023	1.442	0,026	1.587	0,028	1.745	0,028	4.774	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan Pokok	Kg/kapita/tahun	233,36	245,03	257,28	2.294	270,15	2.523	283,66	2.776	283,66	7.593	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Non Terigu	Kg/Kapita/Tahun	14,98	15,43	15,89	1.461	16,37	1.607	16,86	1.768	16,86	4.837	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Tertanganinya Daerah kerawanan pangan	Persen	100	100	100	510	100	561	100	617	100	1.688	
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Nomor Register	30	50	70	260	90	286	110	315	270	861	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Penanganan Sengketa Tanah yang di fasilitasi	Kasus	2	2	2	660	2	726	2	799	10	2.185	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah lokasi ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Lokasi	9	15	20	1.650	25	1.815	30	1.997	30	5.462	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen	0	0	8	1.950	3	825	2	600	13	3.375	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup	Dokumen	0	17	97	200	97	220	97	235	291	655	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan	Unit	2	2	4	525	8	580	15	661	15	1.766	
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase tindakan verifikasi terhadap permohonan perizinan berusaha pengelolaan Limbah B3	Persen	100	100	100	125	100	200	100	300	100	625	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Persen	100	100	100	195	100	215	100	236	100	645	
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase kecamatan yang teridentifikasi dan memiliki MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH yang diakui	Persen	n/a	n/a	25	130	50	265	25	135	100	530	
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga/keompok masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyukluhan lingkungan hidup	Persen	n/a	n/a	23,00	200	32	220	41	240	41	660	
2.11.09	Program Penghargaan	Jumlah penghargaan	Penghargaan	n/a	n/a	30	100	30	110	30	115	90	325	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	bidang lingkungan hidup												
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persen	n/a	n/a	100	100	100	110	100	121	100	331	
2.11.11	Program Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	35,14	43,58	51,66	4.824	59,77	5.070	65,89	6.174	65,89	16.068	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
2.12.01	Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik	Persen	98	99	99	876	99	920	99	996	99	2.792	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	33	43	47	548	50	575	53	623	53	1.745	
		Persentase Kepemilikan KK	Persen	97	98	99	767	99	805	99	872	99	2.443	
2.12.02	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte	Persen	98	99	99	400	99	544	99	650	99	1.594	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kelahiran 0-18 Tahun												
		Persentase Kepemilikan Akte Kematian	Persen	15	20	30	240	40	326	50	390	50	956	
		Persentase Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim	Persen	5	6	7	160	8	218	9	260	9	638	
2.12.03	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Instansi	52	55	55	775	55	900	55	1.000	55	2.675	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase desa yang tertata	Persen	22	25	26	200	30	220	37	363	37	783	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	Persen	n/a	n/a	0,37	100	0,74	110	1,11	121	1,11	331	
2.13.04	Program Administrasi	Persentasi Desa Tertib	Persen	30	50	61,11	7.213	68,52	8.009	81,48	8.737	81,48	23.959	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemerintahan Desa	Administrasi sesuai aturan												
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	Persen	89	60	80	1.310	80	1.661	100	1.925	100	4.896	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Dokumen	5	5	10	206	10	227	10	249	10	682	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	100	85	40	512	60	563	100	620	100	1.695	
2.14.03	Program Pembinaan	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan	Persen	75,37	75,67	75,97	3.230	76,27	3.553	76,57	3.908	76,57	10.690	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Keluarga Berencana (KB)	menikah usia 15-49												
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	Persen	9,05	9,04	9,01	6.433	8,98	7.076	8,95	7.783	8,95	21.292	
2.14.04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Cakupan kelompok ketahanan yang aktif	Persen	18,30	20,87	50	1.063	60	1.170	70	1.287	70	3.519	
		Rata-rata usia kawin Pertama	Tahun	22,75	22,1	22,1	1.063	22,1	1.170	22,1	1.287	22,1	3.519	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Kabupaten Kota	Persen	45	53,03	64,94	1.000	69,97	1.100	75	1.210	75	3.310	Dinas Perhubungan
		Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan	Persen	46,39	46,59	47,26	15.907	47,93	17.151	48,59	18.901	48,59	51.959	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	Persen	60	60	70	3.389	80	3.727	90	4.100	90	11.216	Dinas Komunikasi Dan Informatika , Persandian dan Statistik
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	4.788	100	5.963	100	7.192	100	17.944	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persen	4,38	6,37	7,97	100	9,96	110	11,95	121	11,95	331	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Persen	23,90	39,84	59,76	100	79,68	110	100	121	100	331	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Persen	23,90	39,84	59,76	125	79,68	138	100	151	100	414	
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian	Persen	29,88	39,84	49,80	117	59,76	128	69,72	141	69,72	386	
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	Persen	9,96	30,28	60,16	150	80,08	165	100	182	100	497	
2.17.07	Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pemberdayaan usaha mikro	Persen	29,41	30,62	31,36	710	32,09	781	32,82	859	32,82	2.349	
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	Persen	1,79	2,39	3,35	750	4,32	825	5,28	908	5,28	2.483	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
2:18:02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase minimal pemberian insentif penanaman modal	Persen	45	47,37	52,63	303	57,89	333	63,16	366	60	1.001	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2:18:03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investasi di Sumedang	Persen	n/a	20	20	292	30	321	50	353	50	965	
2:18:04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	Persen	80	93	93	563	93	619	95	681	80	1.864	
2:18:05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	Persen	70	75	75	80	80	88	80	97	80	266	
2:18:06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Persen	80	83,33	85	29	85	31	85	35	85	95	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakata	Orang	94.582	95.282	95.982	990	96.682	1.089	97.382	1.198	97.382	3.277	Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	60	30	20	3.515	21	3.866	70	4.253	70	11.633	
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan (kwardcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Organisasi	1	1	1	500	1	550	1	605	1	1.655	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik	Persen	n/a	n/a	100	304	100	334	100	368	100	1.007	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														dan Statistik
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Kematangan keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Persen	54,26	62,02	69,77	768	73,64	845	77,52	929	77,52	2.543	Dinas Komunikasi Dan Informatika , Persandian dan Statistik
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase OPK yang dikembangkan	Persen	36,36	45,45	55	902	73	992	100	1.091	100	2.984	Dinas Pariwisata, kebudayaan , Kepemudaan dan Olahraga
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Presentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	persen	25	30	40	30	50	33	60	36	60	99	
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Presentase sejarah lokal yang direvitalisasi dan	persen	13,51	15,2	17	110	19	121	20	133	20	364	
2.22.05	Program Pelestraian dan	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	13,61	15,31	17	75	19	83	20	91	20	248	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengelolaan Cagar Budaya													
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah pengunjung museum	orang	1.850	2.000	2.250	55	2.500	61	2.750	67	2.750	182	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kegemaran Membaca	Persen	48,71	50,6	60,60	927	65,60	1.019	70,60	1.121	70,60	3.067	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	16,48	26,76	38,35	495	48,68	545	60,43	599	60,43	1.638	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan Arsip	Persen	80	100	100	391	100	430	100	473	100	1.294	
III	UNSUR URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Poduksi Perikanan Tangkap	Ton	1409,36	1519,58	1641,15	774	1780,65	808	1940,91	784	1940,91	2.366	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	8411,71	8574,11	8745,59	2.788	8964,23	3.044	9233,16	3.194	9233,16	9.025	
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Wilayah Perairan Umum Darat yang Diawasi Sumberdaya Perikanannya	Wilayah	10	10	11	140	11	154	11	169	11	463	
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	33,33	25	40	220	42,86	242	50	266	50	728	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	Persen	35,71	37,5	44	347	50	382	55	420	55	1.150	Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Daerah	Lokasi	1	1	2	670	3	737	3	811	3	2.218	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		yang dipromosikan												
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Karya Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	Karya	8	10	12	385	14	424	16	466	16	1.274	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Orang	200	445	515	1.330	585	1.463	655	1.609	655	4.402	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian	Ton	910.715	921.559	935.276	12.559	953.853	13.815	977.549	15.196	977.549	41.570	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Peningkatan Populasi Ternak	Persen	5,85	5,5	6,47	3.418	7,5	3.760	8,34	4.136	8,34	11.314	Dinas Perikanan dan Peternakan

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	Kali/ Tahun	2,38	2,43	2,47	19.662	2,52	23.769	2,57	30.301	2,57	73.731	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Infrastruktur Peternakan yang Disediakan dan Dikembangkan	Unit	13	6	26	1.245	26	1.370	26	1.506	26	4.121	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Jumlah Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dikendalikan	Persen	96,76	96,85	96,92	915	97,44	985	100	1.133	100	3.032	
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	persen	13,77	14,05	14,33	1.385	14,62	1.524	14,91	1.676	14,91	4.584	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Wilayah yang Terkendali dari Bencana Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Wilayah	22	26	26	100	26	110	26	121	26	331	Dinas Perikanan dan Peternakan

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan	Rekomendasi	4	10	10	160	10	154	10	269	10	583	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	persen	26,86	33,58	40,29	1.089	47,01	1.198	53,72	1.318	53,72	3.605	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Poin	63	64	65	700	66	650	66	695	66	2.045	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitasi perizinan pendaftaran perusahaan	Persen	100	100	100	440	100	484	100	532	100	1.456	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persen	77,78	77,78	88,89	627	88,89	690	100	759	100	2.075	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	94,74	100	100	425	100	468	100	514	100	1.407	
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir	Persen	75	75	83,33	525	91,67	578	100	635	100	1.738	
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat metrologi yang sesuai standar	Persen	32,03	34,14	36,26	275	38,37	303	40,49	333	40,49	910	
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	Persen	55	63,33	71,67	275	80	303	88,33	333	88,33	910	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah dokumen regulasi perencanaan dan pembangunan industri	Dokumen	0	1	1	475	1	523	1	575	1	1.572	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3.31.03	Program Pengendalian	Persentase saran teknis terhadap	Persen	75	83,33	87,5	100	90	110	91,67	121	91,67	331	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	izin yang dikeluarkan												
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pelaku industri yang mengakses sistem informasi industri nasional	Persen	5,12	6,84	8,57	150	10,29	165	12,02	182	12,02	497	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	KK	71	76	81	450	86	495	91	545	258	1.490	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	KK	25	25	25	50	25	75	25	83	75	208	
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.02	Program Pemerintahan dan	Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan,	Persen	n/a	n/a	100	1.595	100	1.755	100	1.930	100	5.279	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kesejahteraan Rakyat	Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang ditindaklanjuti												
		Presentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewilayahan	Persen	100	100	100	755	100	830	100	913	100	2.498	
		Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	n/a	100	11.222	100	12.344	100	13.578	100	37.143	
		Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persen	100	100	100	740	100	814	100	895	100	2.449	
		Persentase dokumen kesepakatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	95,52	100	100	385	100	424	100	466	100	1.274	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		ke dalam perjanjian kerjasama												
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Presentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	n/a	100	1.252	100	1.412	100	1.571	100	4.235	
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang diselenggarakan	Persen	n/a	n/a	90	380	95	417	100	459	100	1.256	
		Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	2	5	3	506	4	557	5	612	5	1.675	
4.02	SEKRETARIAT DPRD													
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100	100	33,94	21.091	32,12	25.069	33,94	29.086	100	75.247	Sekretariat DPRD
		Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100	100	32,52	4.396	33,33	4.836	34,15	5.320	100	14.552	
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01	PERENCANAAN													
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Program pembangunan daerah	Persen	96,3	97,04	97,78	1.390	98,52	1.529	99,26	1.682	99,26	4.602	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	94,01	94,51	95	700	95,39	770	95,74	848	95,74	2.318	
		Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	84,23	84,65	85,06	821	85,49	903	85,84	993	85,84	2.716	
		Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang	Persen	90,07	90,89	91,55	1.206	92,21	1.326	92,88	1.459	92,88	3.991	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Infrastruktur dan Kewilayahan												
5.02	KEUANGAN													
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	3.080	Tepat waktu	3.672	Tepat waktu	4.377	Tepat waktu	11.129	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		persentase realisasi penyerapan anggaran belanja terhadap rencana anggaran kas	Persen	95	97	97	488.265	98	529.395	99	573.974	99	1.591.634	
		persentase Ketepatan Penyampaian LKPD	Persen	95	96	98	2.519	100	3.004	100	3.581	100	9.104	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	Persen	90	91	91	3.339	93	3.981	95	4.746	95	12.067	
5.02.04	Program Pengelolaan	Persentase Pajak Daerah terhadap	Persen	43,47	45,67	44,62	5.299	45,15	5.909	47,9	6.501	47,9	17.709	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)												
5.03	KEPEGAWAIAN													
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan	Persen	86	87	88	1.329	89	1.462	90	1.608	90	4.399	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia
		Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan	Persen	84	85	86	1.214	87	1.335	88	1.469	88	4.018	
		Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persen	84	86	87	2.949	88	3.244	89	3.568	89	9.761	
		Persentase ASN yang berkinerja baik	Persen	95	96	97	361	98	397	99	437	99	1.196	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Hasil Penelitian dan Inovasi	Persen	89,78	90	90,9	682	91,81	750	92,73	825	93,58	2.257	Badan Perencanaan Pembangunan

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	649	sangat inovatif	714	sangat inovatif	785	sangat inovatif	2.148	an, Penelitian dan Pengembangan Daerah
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6.01	INSPEKTORAT DAERAH													
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Persen	72	75	80	4.050	85	4.450	90	4.905	90	13.405	Inspektorat Daerah
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP	Persen	68	75	80	2.650	84	2.915	88	3.207	88	8.772	
VII	UNSUR KEWILAYAHAN													
1	KECAMATAN CIMALAKA													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	69	100	100	100	119	100	288	Kecamatan Cimalaka

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dan Pelayanan Publik													
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	71,43	80,36	84,82	425	89,29	468	100	608	100	1.501	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	20	100	22	100	29	100	71	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	35	100	38	100	50	100	123	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	21,43	42,86	57,14	76	71,43	78	100	134	100	288	
2	KECAMATAN BUAHDUA													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	95	100	146	100	155	100	396	Kecamatan Buahdua

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dan Pelayanan Publik													
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	83,33	88,10	92,86	510	97,62	610	100	660	100	1.780	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	45	100	50	100	75	100	170	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	66	100	48	100	50	100	164	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	35,71	50	71,43	145	85,71	165	100	198	100	507	
3	KECAMATAN RANCAKALONG													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	50	100	55	100	105	100	210	Kecamatan Rancakalong

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	81,25	87,5	100	447	100	503	100	584	100	1.534	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	20	100	30	100	62	100	112	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	35	100	22	100	24	100	81	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	80	100	100	75	100	117	100	189	100	381	
4	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	280	100	308	100	391	100	979	Kecamatan Sumedang Selatan

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	83,33	89,29	95,24	3.745	97,62	3.999	100	4.387	100	12.131	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	65	100	55	100	61	100	181	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	80	100	33	100	36	100	149	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA / Kelurahan minimal Berkategori Baik	Persen	50	64,29	78,57	195	92,86	215	100	236	100	645	
5	KECAMATAN JATIGEDE													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	265	100	291	100	321	100	877	Kecamatan Jatigede

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	50	62,5	75,00	628	87,50	674	100	741	100	2.042	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	74	100	94	100	120	100	287	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	48	100	36	100	40	100	124	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	54,55	72,73	81,82	186	90,91	208	100	262	100	656	
6	KECAMATAN TOMO													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	143	100	159	100	175	100	477	Kecamatan Tomo

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	50	62,5	75	445	87,5	548	100	600	100	1.593	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	17	100	25	100	28	100	69	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	58	100	52	100	57	100	167	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	55,56	66,67	77,78	100	88,89	126	100	150	100	375	
7	KECAMATAN JATINANGOR													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	290	100	319	100	351	100	959	Kecamatan Jatinangor

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	67,71	72,92	83,33	788	93,75	867	100	954	100	2.609	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	55	100	60	100	66	100	181	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	51	100	34	100	38	100	123	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	8,33	50	66,67	156	83,33	172	100	189	100	516	
8	KECAMATAN SITURAJA													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	117	100	129	100	183	100	428	Kecamatan Situraja

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	54,17	58,33	66,67	455	80	510	100	568	100	1.533	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	30	100	33	100	44	100	107	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	40	100	45	100	50	100	135	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	13,33	40	60	120	80	131	100	179	100	429	
9	KECAMATAN CIMANGGUNG													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Point	100	100	100	159	100	175	100	192	100	525	Kecamatan Cimanggung

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	73,86	79,55	90,91	513	96,59	564	100	620	100	1.696	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	22	100	24	100	27	100	73	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	69	100	43	100	47	100	158	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	9,09	54,55	72,73	126	90,91	398	100	438	100	961	
10	KECAMATAN SUKASARI													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	183	100	251	100	298	100	732	Kecamatan Sukasari

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	59,52	71,43	83,33	510	95,24	584	100	698	100	1.792	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	34	100	41	100	50	100	125	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	59	100	32	100	35	100	126	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	14,29	28,57	57,14	116	85,71	151	100	168	100	435	
11	KECAMATAN SURIAN													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	246	100	270	100	297	100	813	Kecamatan Surian

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	74,07	81,48	92,59	441	96,30	485	100	657	100	1.582	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	25	100	28	100	31	100	84	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	56	100	56	100	61	100	173	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	66,67	77,78	88,89	81	100	89	100	97	100	267	
12	KECAMATAN DARMARAJA													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	181	100	222	100	273	100	676	Kecamatan Darmaraja

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	67,71	72,92	83,33	540	93,75	615	100	750	100	1.905	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	20	100	30	100	40	100	90	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	46	100	30	100	50	100	126	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	8,33	50	66,67	90	83,33	135	100	185	100	410	
13	KECAMATAN CISITU													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	141	100	175	100	221	100	537	Kecamatan Cisitu

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	75	81,25	87,5	416	93,75	457	100	553	100	1.426	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	25	100	28	100	30	100	83	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	45	100	50	100	54	100	149	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	10	40	60	40	80	28	100	173	100	240	
14	KECAMATAN CONGGEANG													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	110	100	121	100	133	100	364	Kecamatan Conggeang

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	67,71	72,92	83,33	421	93,75	463	100	509	100	1.393	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	7	100	8	100	8	100	23	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	17	100	18	100	20	100	55	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	8,33	50	66,67	28	83,33	30	100	33	100	91	
15	KECAMATAN PASEH													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	75	100	83	100	90	100	248	Kecamatan Pasoh

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	62,5	68,75	75	421	93,75	463	100	509	100	1.393	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	35	100	39	100	42	100	116	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	77	100	30	100	33	100	140	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	10	50	70	70	80	124	100	180	100	374	
16	KECAMATAN TANJUNGSARI													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	211	100	254	100	280	100	745	Kecamatan Tanjungsari

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	100	493	100	544	100	599	100	1.637	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	116	100	127	100	154	100	397	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	88	100	97	100	106	100	291	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	100	100	100	119	100	143	100	178	100	439	
17	KECAMATAN PAMULIHAN													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	125	100	137	100	151	100	414	Kecamatan Pamulihan

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	83,33	87,88	92,42	514	95,45	565	100	622	100	1.701	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	39	100	52	100	58	100	148	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	48	100	52	100	57	100	157	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	54,55	63,64	72,73	82	90,91	100	100	110	100	293	
18	KECAMATAN CISARUA													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	105	100	136	100	169	100	410	Kecamatan Cisarua

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	62,5	71,43	89,29	440	94,64	484	100	532	100	1.456	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	70	100	77	100	85	100	232	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	70	100	77	100	36	100	183	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	0	57,14	71,43	100	85,71	150	100	176	100	426	
19	KECAMATAN GANEAS													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	183	100	201	100	221	100	605	Kecamatan Ganeas

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	50	62,5	75	377	87,5	414	100	456	100	1.247	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	21	100	23	100	25	100	70	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	41	100	29	100	32	100	101	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	12,5	25	50	70	75	76	100	84	100	230	
20	KECAMATAN UJUNGJAYA													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	160	100	176	100	193	100	529	Kecamatan Ujungjaya

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	74,07	86,42	91,36	523	96,30	582	100	640	100	1.744	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	42	100	46	100	51	100	139	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	85	100	87	100	96	100	268	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	8,33	50	66,67	81	83,33	92	100	101	100	274	
21	KECAMATAN TANJUNGPURTA													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	112	100	123	100	136	100	371	Kecamatan Tanjungpurta

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	67,71	72,92	83,33	469	93,75	516	100	568	100	1.554	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	15	100	16	100	18	100	48	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	38	100	42	100	46	100	126	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	8,33	50	66,67	67	83,33	82	100	90	100	239	
22	KECAMATAN SUMEDANG UTARA													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	292	100	321	100	353	100	966	Kecamatan Sumedang Utara

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	83,33	89,74	94,87	2.642	97,44	2.906	100	3.197	100	8.746	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	64	100	70	100	77	100	211	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	121	100	23	100	26	100	171	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA / Kelurahan minimal Berkategori Baik	Persen	80	100	100	171	100	188	100	207	100	566	
23	KECAMATAN WADO													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	85	100	94	100	128	100	306	Kecamatan Wado

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	81,25	87,5	93,75	177	100	388	100	526	100	1.092	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	6	100	7	100	13	100	26	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	120	100	132	100	164	100	416	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	10	50	80	21	100	23	100	70	100	114	
24	KECAMATAN CIBUGEL													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Point	100	100	100	93	100	119	100	141	100	352	Kecamatan Cibugel

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	28,57	42,86	71,43	529	85,71	625	100	754	100	1.907	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	25	100	32	100	38	100	95	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	26	100	30	100	35	100	91	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	14	29	43	115	72	169	100	200	100	484	
25	KECAMATAN TANJUNGMEDAR													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	120	100	165	100	204	100	489	Kecamatan Tanjungmedar

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	80,25	86,42	92,59	368	96,30	417	100	492	100	1.277	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	20	100	40	100	50	100	110	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	38	100	30	100	35	100	103	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	55,56	66,67	77,78	70	88,89	140	100	175	100	385	
26	KECAMATAN JATINUNGGAL													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	Persen	100	100	100	135	100	157	100	172	100	464	Kecamatan Jatinunggal

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	50	62,5	75	435	87,5	509	100	557	100	1.501	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	17	100	25	100	28	100	69	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / pengaduan / konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	33	100	28	100	30	100	90	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik	Persen	55,56	66,67	77,78	73	88,89	91	100	95	100	259	
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan	Persen	73,33	40	94,17	176	95,83	594	100	662	100	1.432	Badan Kesatuan

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Karakter Kebangsaan	karakter kebangsaan												Bangsa dan Politik
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah orang yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Orang	0	100	250	4.130	100	4.143	100	4.397	450	12.670	
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Ormas yang di bina kategori aktif	Persen	19,38	19,38	38,76	110	100	121	100	285	100	516	
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah orang yang dibina dilingkup bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Orang	0	150	180	357	210	393	260	432	260	1.182	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang tertangani	Potensi Konflik	15	15	14	4.179	13	4.597	12	5.056	12	13.832	
X	NON URUSAN													
X.XX														
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP perangkat daerah	Kategori	A	A	A	770.092	A	847.316	A	931.869	A	2.549.277	Dinas Pendidikan
A				A	A	447.431	A	474.868	A	499.759	A	1.422.059	Dinas Kesehatan	
A				A	A	25.351	A	38.891	A	38.891	A	121.062	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
A				A	A	8.479	A	9.327	A	10.260	A	28.067	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				A	A	A	14.400	A	15.710	A	16.661	A	46.771	Satuan Polisi Pamong Praja
				BB	A	A	2.784	A	3.057	A	3.361	A	9.203	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				A	A	A	10.281	A	9.972	A	10.666	A	30.919	Dinas Sosial
				A	A	A	8.239	A	9.143	A	10.061	A	27.444	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				BB	BB	BB	25.059	BB	27.538	A	30.104	A	82.701	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				BB	A	A	9.267	A	10.047	A	10.978	A	30.292	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				BB	A	A	8.230	A	8.758	A	9.488	A	26.476	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				BB	BB	BB	13.352	BB	8.758	A	16.156	A	38.266	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				BB	BB	BB	20.613	A	23.022	A	25.288	A	68.924	Dinas Perhubungan
				A	A	A	8.134	A	8.252	A	8.445	A	24.831	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				A	A	A	12.427	A	13.670	A	15.037	A	41.134	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
				BB	A	A	9.613	A	10.574	A	11.631	A	31.818	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				BB	A	A	9.066	A	9.973	A	10.970	A	30.010	Dinas Arsip dan Perpustakaan
				A	A	A	15.754	A	17.439	A	19.293	A	52.485	Dinas Perikanan dan Peternakan
				A	A	A	8.615	A	9.477	A	10.425	A	28.517	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				A	A	A	37.115	A	38.686	A	38.399	A	114.201	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				A	A	A	59.666	A	65.633	A	72.196	A	197.496	Sekretariat Daerah
				A	A	A	49.072	A	52.110	A	55.811	A	156.994	Sekretariat DPRD
				BB	A	A	13.664	A	15.031	A	16.534	A	45.228	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				BB	A	A	109.548	A	127.375	A	147.491	A	384.415	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				A	A	A	15.318	A	16.770	A	18.446	A	50.535	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				A	A	A	10.209	A	11.230	A	12.353	A	33.791	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				A	A	A	16.748	A	18.428	A	20.261	A	55.437	Inspektorat Daerah
				A	A	A	3.048	A	3.160	A	3.283	A	9.490.889.363	Kecamatan Wado
				A	A	A	2.570	A	2.779	A	3.064	A	8.412	Kecamatan Jatinunggal
				A	A	A	3.555	A	3.844	A	4.065	A	11.465	Kecamatan Darmaraja
				A	A	A	2.633	A	2.788	A	2.972	A	8.394	Kecamatan Cibugel
				A	A	A	2.906	A	3.193	A	3.292	A	9.391	Kecamatan Cisitu
				A	A	A	3.403	A	3.733	A	4.015	A	11.151	Kecamatan Situraja
				A	A	A	3.153	A	3.468	A	3.815	A	10.437	Kecamatan Conggeang

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				BB	A	A	3.131	A	3.452	A	3.753	A	10.335	Kecamatan Paseh
				A	A	A	2.527	A	2.786	A	2.941	A	8.254	Kecamatan Surian
				A	A	A	2.605	A	2.795	A	3.057	A	8.457	Kecamatan Buahdua
				A	A	A	3.338	A	3.635	A	3.964	A	10.937	Kecamatan Tanjungsari
				A	A	A	2.768	A	2.978	A	3.192	A	8.938	Kecamatan Sukasari
				A	A	A	3.548	A	3.783	A	4.170	A	11.502	Kecamatan Pamulihan
				BB	A	A	3.175	A	3.266	A	3.593	A	10.034	Kecamatan Cimanggun g
				A	A	A	3.476	A	3.845	A	4.230	A	11.551	Kecamatan Jatinangor
				A	A	A	3.203	A	3.486	A	3.670	A	10.359	Kecamatan Rancakalonn g
				A	A	A	7.699	A	8.661	A	9.487	A	25.846	Kecamatan Sumedang Selatan

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				A	A	A	7.273	A	7.498	A	7.745	A	22.516	Kecamatan Sumedang Utara
				A	A	A	2.469	A	2.721	A	2.993	A	8.183	Kecamatan Ganeas
				A	A	A	2.827	A	3.102	A	3.412	A	9.340	Kecamatan Tanjungker ta
				A	A	A	2.718	A	2.876	A	3.078	A	8.672	Kecamatan Tanjungme dar
				A	A	A	3.248	A	3.548	A	3.738	A	10.535	Kecamatan Cimalaka
				A	A	A	3.200	A	3.459	A	3.823	A	10.482	Kecamatan Cisarua
				A	A	A	2.295	A	2.452	A	2.687	A	7.434	Kecamatan Tomo
				A	A	A	3.210	A	3.528	A	3.881	A	10.618	Kecamatan Ujungjaya
				A	A	A	3.038	A	3.359	A	3.645	A	10.041	Kecamatan Jatigede
				BB	A	A	4.793	A	5.272	A	5.799	A	15.864	Badan Kesatuan

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bangsa dan Politik

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada Bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, untuk menggambarkan capaian kinerja pemerintahan daerah secara umum digunakan indikator makro.

8.1. INDIKATOR MAKRO

Indikator makro adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Lebih lanjut penetapan Indikator Makro Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang disajikan pada Tabel 8.1 berikut.

Tabel 8.1
Indikator Makro Kabupaten Sumedang
Tahun 2024-2026

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			KONDISI AKHIR
			2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,11-73,99	73,74-74,59	74,40-75,30	74,40-75,30
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,50-7,26	9,43-7,40	9,28-7,25	9,28-7,25
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,00-6,47	6,75-5,94	6,22-5,15	6,22-5,15
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,30-6,50	5,50-6,82	5,65-7,00	5,65-7,00
5	Gini Ratio	Poin	0,36-0,33	0,35-0,32	0,34-0,31	0,34-0,31
6	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	36,20-38,32	38,18-40,24	40,15-42,72	40,15-42,72

8.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang disajikan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,69	72,40-73,37	73,11-73,99	73,74-74,59	74,40-75,30	74,40-75,30
2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,72	8,81-9,00	8,89-9,05	9,00-9,10	9,06-9,20	9,06-9,20
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,99	13,05-13,12	13,06-13,16	13,07-13,17	13,08-13,18	13,08-13,18
4	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,91	72,70-73,20	73,00-73,32	73,24-73,63	73,33-73,69	73,33-73,69
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	95,09	95,26-95,44	95,19-95,62	95,29-95,16	95,38-95,69	95,38-95,69
6	Indesk Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	72,23	70,25-71,15	70,95-72,18	71,77-73,43	73,00-75,05	73,00-75,05
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	75,32	74,5	75	75,5	76	76
8	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	44	45	46	47	48	48
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,03	5,20-6,20	5,30-6,50	5,50-6,82	5,65-7,00	5,30-6,50
10	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	6,85	5,00-5,85	7,56-8,45	8,04-9,23	8,23-10,61	8,23-10,61
11	Laju pertumbuhan sector perdagangan besar, Eceran, reparasi mobil dan sepeda Motor	Persen	4,71	4,84-5,60	5,59-7,50	6,37-8,28	7,18-9,09	7,18-9,09

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
12	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	4,18	2,44-3,59	3,28-4,94	3,48-5,15	3,69-5,35	3,69-5,35
13	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	8,15	3,25-3,81	8,01-9,75	9,44-10,13	9,82-10,86	4,96-5,53
14	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	77,64	80,43	81,4	83,17	84,62	84,62
15	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen	-29,03	10	10	12	13	13
16	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,14	9,70-7,56	9,50-7,26	9,43-7,40	9,28-7,25	9,28-7,25
17	Gini Ratio	Ratio	0,39	0,37-0,34	0,36-0,33	0,35-0,32	0,34-0,31	0,34-0,31
18	Nilai komposit FSVA	Persen	59,71	62,21	64,71	67,21	69,71	69,71
19	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta (Rp)	34,46	33,85-34,70	36,20-38,32	38,18-40,24	40,15-42,72	40,15-42,72
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,72	8,18-6,95	7,00-6,47	6,75-5,94	6,22-5,15	6,22-5,15
21	Indeks Desa Membangun	Poin	0,77	0,78	0,79	0,8	0,81	0,81
22	Indeks Resiko Bencana	Poin	119,39	114,39	109,39	104,39	99,39	99,39
23	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,49	0,52	0,53	0,54	0,55	0,55
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,35	63,83	65,55	66,96	70,53	70,53
25	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	71,03	74,52	78,02	81,51	85	85
26	Indeks Profesional ASN	Poin	63,78	65	68	71	74	74
27	Nilai Sakip Kabupaten	Kategori / Skor	BB (76)	A (80)	A (82)	A (82)	A (86)	A (86)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
28	Nilai LPPD Kabupaten	Skor	3,4	3,65	3,76	3,78	3,8	3,8
29	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,66	4,7	4,71	4,72	4,75	4,75
30	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,52	4,2	4,3	4,35	4,4	4,4

8.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah ukuran yang menggambarkan keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tingkat dampak (impact) disajikan pada Tabel 8.3. dan Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tingkat hasil (Outcome) disajikan pada Tabel 8.4.

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat Dampak (Impact)
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum (Persen)	46,84	53,53	58,88	64,77	71,25	71	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
2	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum (Persen)	26,77	30,11	33,12	36,43	40,08	40		
3	Nilai Siswa dengan Tingkat Karakter yang memenuhi kriteria Minimal (Skor)	0	2,10	2,16	2,23	2,29	2		
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ratio Kematian Ibu (Rasio)	0,001	0,00095	0,0009	0,00085	0,0008	0,0008	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah
2	Ratio Kematian Bayi (Rasio)	0,018	0,016	0,014	0,012	0,01	0,01		
3	Akreditasi RS Sesuai Standar Nasional (Persen)	84	85	86	88	90	90		
4	Prevalensi Stunting (Persen)	12	9	8	7	6	6		
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) (IKM) Bidang Kesehatan (Poin)	91	92	93	94	95	95		
6	Angka Kematian Karena Penyakit DBD (CFR DBD) (Persen)	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Presentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Persen)	68,62	70,02	71,35	72,55	73,68	73,68	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (Persen)	81,56	81,95	82,10	82,63	83,16	83,16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
3	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak (Persen)	95,84	95,91	96,12	96,36	96,61	96,61	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
4	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata (Persen)	66,25	68,75	73,75	78,75	83,75	83,75	1. Program Penataan Bangunan Gedung 2. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (Persen)	86,54	90,85	91,50	93,43	94,72	94,72	Program Penyelenggaraan Jalan	
6	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan (Persen)	n/a	n/a	33,34	66,68	100	100	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
7	Ketaatan Terhadap RTR (Persen)	69,64	70,00	72,25	73,31	75,38	75,38	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
8	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Poin)	29	30	31	32	32	32	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)	80,21	80,26	80,32	80,37	80,43	80,43	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada (Persen)	91	92	92	93	96	96	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (Persen)	90	90	90	90	90	90	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
4	Persentase Penanganan Pra Bencana (Persen)	100	100	100	100	100	100	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan
5	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Persen)	100	100	100	100	100	100		
6	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persen)	100	100	100	100	100	100		
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhannya (Persen)	65	75	80	85	90	90	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 4. Program Penanganan Bencana 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	16	20	20	21	23	23	1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Persen)	10	12	21	26	31	31		
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan dan perlindungan hukum (Persen)	23,94	26,6	29,55	38,87	77,67	77,67	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 6. Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	93,9	94,2	94,5	94,7	95,0	95,0	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi (Persen)	100	100	100	100	100	100	1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pengawasan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Persen)	54	56	70	75	80	80	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 5. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) (Poin)	127,88	130,18	130,35	131	131,45	131,45		
3	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Poin)	58,82	61,04	61,15	61,25	61,5	61,5		
4	Persentase peningkatan pengembangan generasi lingkungan (Persen)	0	33,33	50	66,67	70	70		

5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Poin)	25	28	35	39	41	41	(KEHATI) 7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH 8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 10. Program Pengelolaan Persampahan
---	---	----	----	----	----	----	----	--

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan (Persen)	97	98	99	99	99	99	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (Persen)	93	93	94	95	96	96		
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan (Poin)	91	92	93	93	94	94		
VII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Presentase Status Desa Mandiri dengan optimalisasi potensi desa (Persen)	30	50	61,11	68,52	81,48	81,48	1. Program Penataan Desa 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
VIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Total Fertility Rate (TFR) (Kelahiran)	2,07	2,04	2,04	2,02	2,00	2,00	1. Program Pengendalian Penduduk 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 3. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
2	Persentase Keluarga Pra Sejahtera (Persen)	3.97	3.76	2,81	2,78	2,75	2,75		

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Perlindungan Anak
IX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
1	Cakupan Kelancaran, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Persen)	45,80	50,80	56,13	58,97	61,8	61,8	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase Masyarakat dalam Memahami Program Prioritas Pemerintah Daerah (Persen)	n/a	60	70	80	90	90	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
2	Indeks Layanan SPBE (Poin)	3,4	3,4	3,8	4	4,2	4,2		
XI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Koperasi Modern (Persen)	0,80	1,99	3,98	5,98	7,97	7,97	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 6. Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 7. Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
2	Jumlah Usaha Mikro Yang Berkembang (Unit Usaha)	14.888	15.038	15.188	15.338	15.488	15.488		
XII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Jumlah nilai investasi di Sumedang (Juta Rupiah)	1.927.391	2.505.608	3.000.000	3.500.000	3.750.000	10.250.000	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pelayanan Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) Bidang Perizinan (Poin)	92,10	93	93	93	95	95		

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
XIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Presentase Organisasi Pemuda yang aktif (Persen)	51,55	56,70	58,76	60,82	62,89	62,89	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
2	Jumlah prestasi olahraga yang di Raih dalam satu tahun (Orang)	20	20	20	20	20	60		
XIV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
1	Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	n/a	n/a	3	3,5	4	4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
XV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Score Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Poin)	350	400	450	475	500	500	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
XVI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Jumlah objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dikelola secara terpadu (OPK)	11	11	11	11	11	11	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3. Program Pembinaan Sejarah 4. Program Pelestraian dan Pengelolaan Cagar Budaya 5. Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
XVII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	12,44	12,54	12,64	12,74	12,84	12,84	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Arsip Dan Perpustakaan
XVIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen)	24	40	56	65	73	73	1. Program Pengelolaan Arsip 2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Arsip Dan Perpustakaan
C	UNSUR URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Produksi Perikanan (Ton)	9821,07	10093,69	10386,74	10744,88	11174,07	11174,07	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	Kunjungan wisata (Orang)	700.000	n/a	1.050.000	1.207.500	1.388.625	1.388.625	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (Sub Sektor)	16	16	16	16	16	16	2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kepemudaan Dan Olahraga
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian (Persen)	-7,68	1,19	1,49	1,99	2,48	2,48	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4. Program Penyuluhan Pertanian 5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Peningkatan Produksi Peternakan (Persen)	5,88	5,248	5,67	6,33	7	7	6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 9. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
3	Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Persen)	23,08	80,77	80,77	80,77	80,77	80,77		
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
1	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Poin)	58,82	61,04	61,15	61,25	61,50	61,50	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat Stabilisasi Sektor Perdagangan (Persen)	100	100	100	100	100	100	1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 4. Program Pengembangan Ekspor 5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil (Persen)	5,12	6,84	8,57	10,29	12,02	12,02	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
VII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Trasmigran Yang di tempatkan (Orang)	71	76	81	86	91	91	1. Program Pembangunan Kawasan Trasmigrasi 2. Program Pengembangan Kawasan Trasmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi
D	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
I	INSPEKTORAT								
1	Kapabilitas APIP (Level)	3	3	4	4	4	4	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
2	Maturitas SPIP (Level)	3	3	4	4	4	4		
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
I	PERENCANAAN								

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Persen)	91,92	92,3	92,66	92,96	93,34	93,34	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
II	KEUANGAN								
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan (Predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Badan Keuangan dan Aset Daerah 2. Badan Pendapatan Daerah
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan (Persen)	17,77	18,99	22,67	25,9	30,4	30,4	3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
III	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Indeks Sistem Merit (Poin)	315	340	350	355	360	360	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Persen)	91,92	92,3	92,66	92,96	93,34	93,34	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
F	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
I	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	100	100	100	100	100	100	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
2	Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang Perekonomian dan Pembangunan (Persen)	100	100	100	100	100	100		

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	SEKRETARIAT DPRD								
1	Tingkat fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Persen)	100	100	33,23	32,72	34,05	34,05	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
VIII	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif (Persen)	100	100	100	100	100	100	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 2. Program Pemberdayaan	Badan Kesatuan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Tingkat Bina Demokratisasi (Persen)	100	100	100	100	100	100	Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 5. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bangsa dan Politik
IX	UNSUR KEWILAYAHAN								

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) (Persen)	86	90	90,5	90,6	90,75	90,75	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cimalaka

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	88,40	90,00	90,50	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Buahdua

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	88,28	90	90,5	90,5	90,5	90,5	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Rancakalong

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	89,77	90	90,5	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sumedang Utara

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	87,98	90,00	90,50	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sumedang Selatan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	87,98	90	90,5	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Jatigede

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	89,34	90	90	90	90	90	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tomo

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	87,98	90	90,20	90,30	90,35	90,35	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Jatinangor

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	88,28	90	90,30	90,50	90,70	90,70	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Situraja

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	88	88	90,3	90,5	90,6	90,6	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cimanggung

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	88	90	90	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sukasari

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	88,05	90	91	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Surian

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	87,98	90	90,50	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Darmaraja

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	87,63	90	90,5	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cisitu

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	89	90	90,5	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Conggeang

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	88,41	90	90,5	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Paseh

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	89	90	90,5	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tanjungsari

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	87,1	90	90	90,51	90,71	90,71	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pamulihan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	88,24	90	90,5	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cisarua

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	90	90	90,5	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ganeas

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	87,63	90	90,5	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ujungjaya

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	88,28	90	90,5	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tanjungkerta

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	87,98	90	90,5	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wado

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	88,56	90	91	92	93	93	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cibugel

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	88,05	90	90,5	90,58	90,99	90,99	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tanjungmedar

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	87,80	90	90	90	90	90	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Jatinunggal
X	NON URUSAN								
1	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	77,33	80	82	84	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan
2	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	87,4	90	92	94	95	95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	89,44	90	92	94	95	95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum
4	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	81,15	82	84	86	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	68	75	80	82	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	69,23	80	82	84	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	70,79	75	80	82	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	86,53	87	89	91	94	94	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
9	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	81,2	82	84	86	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	80,53	82	84	86	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	87,4	89	90	92	95	95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	78,49	80	82	84	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	74,25	80	82	84	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	75,13	80	82	84	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
15	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	84,3	85	87	89	92	92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	71,43	75	80	82	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
17	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	93,75	94	95	96	97	97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	76,05	80	82	84	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Arsip dan Perpustakaan
19	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	72,1	80	82	84	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	88,59	90	92	94	95	95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
21	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	57,2	80	82	84	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	88,83	90	92	94	95	95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
23	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	77,76	80	82	84	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat DPRD
24	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	94,88	95	96	97	98	98	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Pengembangan Daerah
25	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	89,39	90	91	93	95	95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Keuangan dan Aset Daerah
26	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	85,63	87	89	91	94	94	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Pendapatan Daerah
27	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	82,9	85	87	89	92	92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	88,92	90	91	93	95	95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Inspektorat Daerah
29	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	78,14	80	82	84	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	85,01	87,1	88	89	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Wado
31	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	83,65	75	75	78	80	80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Jatininggal
32	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	84,98	85	87	89	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Darmaraja

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	85,03	87	89	90	91	91	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Cibugel
34	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	72,33	75	80	82	85	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Cisitu
35	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	76,1	80	82	84	85	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Situraja
36	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	74,63	75	80	82	85	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Conggeang
37	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	80	85	88	89	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Paseh

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	84,9	85	87	89	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Surian
39	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	65,95	75	80	82	85	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Buahdua
40	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	76.53	80	82	84	87	87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tanjungsari
41	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	50,88	75	80	82	85	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Sukasari
42	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	78,44	80	82	84	87	87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Pamulihan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	77,65	80	82	84	87	87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Cimanggung
44	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	85,14	87	88	89	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Jatinangor
45	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	82,4	83	85	89	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Rancakalong
46	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	84,2	85	87	89	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Sumedang Selatan
47	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	79,83	81	85	87	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Sumedang Utara

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	76,04	78	80	82	85	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Ganeas
49	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	78,93	80	82	84	87	87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tanjungkerta
50	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	84,9	85	87	89	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tanjungmedar
51	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	79,43	80	82	84	87	87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Cimalaka
52	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	84,1	85	87	89	90	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Cisarua

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	78,29	80	82	84	85	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tomo
54	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	67,44	75	80	82	85	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Ujungjaya
55	Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah (Nilai)	70,43	75	80	82	85	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Jatigede

Tabel 8.4
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat Hasil (Outcome)
Tahun 2024-2026

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD (Persen)	89,39	91,89	94,39	96,89	98,89	98,89	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP (Persen)	90,27	92,27	94,27	96,27	98,27	98,27		
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan (Persen)	53,47	63,47	73,47	83,47	93,47	93,47		
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini (Persen)	92,04	93,74	95,44	97,14	98,84	98,84		

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka (Persen)	21,61	40,30	68,34	94,33	100	100	Program Pengembangan Kurikulum	
6	Proporsi GTK penggerak (Persen)	5	10	25	30	30	30	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (Rasio)	0,17	0,19	0,22	0,23	0,25	0,25	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat (Persen)	50	55	60	65	70	70		
3	Presentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Persen)	28	33	40	50	60	60		
4	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (Persen)	100	100	100	100	100	100		

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang sesuai standar (Persen)	84	85	86	88	90	90		
6	Presentase Tenaga Kesehatan yang memiliki standar kompetensi (Persen)	86	87	88	89	90	90	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
7	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar (Persen)	84	86	87	88	92	92	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
8	Presentase Desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri (Persen)	20	26	31	36	41	41	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Luas Lahan yang terairi (Ha)	20633,40	21054,31	21454,31	21814,31	22154,31	22154,31	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota (Rumah Tangga)	244.688	245.847	246.288	247.888	249.488	249.488	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
3	Persentase kapasitas pelayanan sarana prasarana pengelolaan sampah permukiman terhadap jumlah rumah tangga (Persen)	n/a	22	26	29	32	32	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi (Persen)	95,8	95,9	96,1	96,4	96,6	96,6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Persentase bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi (Persen)	15,5	36,5	57,6	78,7	99,7	99,7	Program Penataan Bangunan Gedung	
7	Jumlah kumulatif Bangunan dan Lingkungannya yang tertata (Bangunan)	53	55	59	63	67	67	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
8	Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Persen)	60,04	61,49	62,13	64,07	65,36	65,36	Program Penyelenggaraan Jalan	
9	Persentase tenaga Operator/Teknis/Analis yang memiliki Sertifikat Kompetensi (Persen)	71,8	64,21	72,8	81,34	89,90	89,90	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
10	Persentase ketersediaan RTR (Persen)	38,0	42,3	50,0	57,7	61,5	61,5	Program Penyelenggaraan	

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Persentase pelayanan pemanfaatan ruang (Persen)	24,6	49,2	64,36	77,18	90,00	90,00	n Penataan Ruang	
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Jumlah rumah layak huni yang terlayani (Unit)	30	55	80	105	130	130	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Persen)	81,34	81,34	81,97	82,43	82,89	82,89	Program Kawasan Permukiman	
3	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Dicegah (Ha)	154.835	154.835	154.835	154.835	154.835	154.835	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
4	Persentase permukiman yang tertata (Persen)	10,5	26,6	51,1	75,5	100	100	Program Pengembangan Permukiman	
5	Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (Persen)	38,36	53,43	83,56	91,78	100	100	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan	

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Utilitas Umum (PSU)	
V URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman) (Persen)	72	78	83	89	94	94	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani (Persen)	91	92	92	93	96	96	Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani	
3	Rasio Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang setiap RT) (Rasio)	0,67	0,74	0,81	0,89	0,98	0,98	Rasio Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang setiap RT)	

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	760687	798721	838657	880589	924618	924618	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Oran)	2935	3081	3235	3396	3565	3565	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	2538	2411	2290	2175	2066	2066	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit)	15	15	15	15	15	15	Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Satuan Polisi Pamong Praja
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima bantuan sosial melalui pemberdayaan social (Persen)	7,22	9,03	12,64	16,25	19,86	19,86	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
2	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan social (Persen)	58,33	58,33	66,67	75,00	83,33	83,33		

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima bantuan sosial kebutuhan dasar (Persen)	58,47	65,30	71,66	78,02	84,33	84,33	Program Rehabilitasi Sosial	
4	Persentase masyarakat (DTKS) yang menerima jaminan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (Persen)	61,77	62,12	62,47	62,83	63,19	63,19	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (Persen)	100	100	100	100	100	100	Program Penanganan Bencana	
6	Persentase pengelolaan Makam Pahlawan (Persen)	100	100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (Persen)	15,24	17,77	20,31	21,33	25,39	25,39	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (Orang)	50	100	150	200	250	600		
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (Persen)	10,2	15,19	20,18	25,17	30,16	30,16	Program Penempatan Tenaga Kerja	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (Persen)	10	11,5	21	26	31	31	Program Hubungan Industrial	
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase OPD Responsip Gender (Persen)	45,16	61,29	65	75	100	100	Program Pengarusutamaan Gender dan	Dinas Pengendalian Penduduk dan

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Pemberdayaan Perempuan	Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Persen)	100	0,0035	0,0036	0,0042	0,0047	0,0047	Program Perlindungan Perempuan	
3	Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan (Persen)	100	16,53	33,06	66,13	80	80	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
4	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak (Persen)	100	33,3	42	71	100	100	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	
5	Persentase forum anak, termasuk forum anak yang ada di kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Persen)	46,15	65,38	69,07	75,65	100	100	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
6	Persentase Pendampingan Khusus terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan (Persen)	100	0,02	0,023	0,026	0,028	0,028	Program Perlindungan Khusus Anak	

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Ketersediaan pangan Pokok (Kg/Kapita/Tahun)	233,36	245,03	257,28	270,15	283,66	283,66	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Non Terigu (Kg/Kapita/Tahun)	14,98	15,43	15,89	16,37	16,86	16,86	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
3	Presentase Tertanganinya Daerah kerawanan pangan (Persen)	100	100	100	100	100	100	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
4	Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (Nomor Register)	30	50	70	90	110	270	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Penanganan Sengketa Tanah yang di fasilitasi (Kasus)	2	2	2	2	2	10	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2	Jumlah lokasi ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan (Lokasi)	9	15	20	25	30	30	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Dokumen)	0	0	8	3	2	13	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Jumlah dokumen hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup (Dokumen)	0	17	97	97	97	291	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan (Unit)	2	2	4	8	15	15	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
4	Persentase tindakan verifikasi terhadap permohonan perizinan berusaha pengelolaan Limbah B3 (Persen)	100	100	100	100	100	100	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
5	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Persen)	100	100	100	100	100	100	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase kecamatan yang teridentifikasi dan memiliki MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH yang diakui (Persen)	n/a	n/a	25	50	25	100	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	
7	Persentase lembaga/keompok masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyukluhan lingkungan hidup (Persen)	n/a	n/a	23,00	32	41	41	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
8	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup (Penghargaan)	0	0	30	30	30	90	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti (Persen)	n/a	n/a	100	100	100	100	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
10	Persentase Pengelolaan Sampah (Persen)	35,14	43,58	51,66	59,77	65,89	65,89	Program Pengelolaan Persampahan	
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Perekaman KTP Elektronik	98	99	99	99	99	99	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (Persen)	33	43	47	50	53	53		
3	Persentase Kepemilikan KK (Persen)	97	98	99	99	99	99		
4	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun (Persen)	98	99	99	99	99	99	Program Pencatatan Sipil	

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Persentase Kepemilikan Akte Kematian (Persen)	15	20	40	50	60	60		
6	Persentase Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim (Persen)	50	60	61	63	64	64		
7	Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (Instansi)	52	52	52	52	52	52	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
VII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase desa yang tertata (Persen)	22,22	25,00	26,00	30,00	37,00	37,04	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	Persentase Desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa (Persen)	0	0	0,37	0,74	1	1,11	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
3	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai aturan (Persen)	30	50	61,11	68,52	81,48	81,48	Program Administrasi Pemerintahan Desa	

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif (Persen)	89	60	80	80	100	100	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	
VIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Jumlah Dokumen kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan (Dokumen)	5	5	10	10	10	10	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (Persen)	100	85	40	60	100	100		
3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (Persen)	75,37	75,67	75,97	76,27	76,57	76,57	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) (Persen)	9,05	9,04	9,01	8,98	8,95	8,95		
5	Cakupan kelompok ketahanan yang aktif (Persen)	18,3	20,87	50	60	70	70	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	
6	Persentase keluarga berwirausaha (Persen)	n/a	n/a	1,17	1,21	1,25	1,25		
7	Rata-rata usia kawin pertama (Tahun)	22,75	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1		
IX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
1	Konektivitas Kabupaten Kota (Persen)	45	53,03	64,94	69,97	75	75	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
2	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan (Persen)	46,39	46,59	47,26	47,93	48,59	48,59		
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan	60	60	70	80	90	90	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika,

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Prioritas Pemerintah Daerah (Persen)								Persandian Dan Statistik
2	Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik (Persen)	100	100	100	100	100	100	Program Aplikasi Informatika	
XI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Persentase rekomendasi pelayanan izin usaha simpan pinjam (Persen)	4,38	6,37	7,97	9,96	11,95	11,95	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
2	Persentase pengawasan dan pemeriksaan Koperasi (Persen)	23,90	39,84	59,76	79,68	100	100	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
3	Persentase jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi (Persen)	23,90	39,84	59,76	79,68	100	100	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase koperasi yang mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian (Persen)	29,88	39,84	49,80	59,76	69,72	69,72	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
5	Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan (Persen)	9,96	30,28	60,16	80,08	100	100	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
6	Persentase Pemberdayaan usaha mikro (Persen)	29,41	30,62	31,36	32,09	32,82	32,82	Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
7	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil (Persen)	1,79	2,39	3,35	4,32	5,28	5,28	Program Pengembangan UMKM	
XII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Persentase minimal pemberian insentif penanaman modal (Persen)	45	47,37	52,63	58	63	60	Program Pengembangan Iklim	Dinas Penanaman Modal

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Penanaman Modal	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persentase minat investasi di Sumedang (Persen)	n/a	20	20	30	50	50	Program Promosi Penanaman Modal	
3	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terasilitasi (Persen)	80	93	93	93	95	80	Program Pelayanan Penanaman Modal	
4	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP (Persen)	70	75	75	80	80	80	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
5	Persentase Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota (Persen)	80	83,33	85	85	85	85	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
XIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA								

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakata (Orang)	94582	95282	95982	96682	97382	97382	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
2	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	60	30	20	21	70	70	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
3	Jumlah organisasi kepramukaan (kwardcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi (Organisasi)	1	1	1	1	1	1	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
XIV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik (Persen)	0	0	100	100	100	100	Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
XV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Tingkat Kematangan keamanan Informasi (Indeks KAMI) (Persen)	54,26	62,02	69,77	73,64	77,52	77,52	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
XVI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Presentase OPK yang dikembangkan (Persen)	36,36	45,45	55	73	100	77,52	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
2	Presentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan (Persen)	25	30	40	50	60	0	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
3	Presentase sejarah lokal yang direvitalisasi dan inventarisasi (Persen)	13,51	15,2	17	19	20	100	Program Pembinaan Sejarah	
4	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (Persen)	13,61	15,31	17	19	20	60	Program Pelestraian dan Pengelolaan Cagar Budaya	

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Jumlah pengunjung museum (Orang)	1850	2000	2250	2500	2750	20	Program Pengelolaan Permuseuman	
XVII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	Tingkat Kegemaran Membaca (Persen)	48,71	50,6	60,60	65,60	70,60	70,6	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Arsip Dan Perpustakaan
XVIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persen)	16,48	26,76	38,35	48,68	60,43	60,43	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Arsip Dan Perpustakaan
2	Tingkat Keberadaan Arsip (Persen)	80	100	100	100	100	100	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
C	UNSUR URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Poduksi Perikanan Tangkap (Ton)	1409,36	1519,58	1641,15	1780,65	1940,91	1940,91	Program Pengelolaan	Dinas Perikanan

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Perikanan Tangkap	dan Peternakan
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	8411,71	8574,11	8745,59	8964,23	9233,16	9233,16	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
3	Wilayah Perairan Umum Darat yang Diawasi Sumberdaya Perikanannya (Wilayah)	10	10	11	11	11	11	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
4	Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Persen)	33,33	25	40	42,86	50	50	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	Presentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang dikembangkan (Persen)	35,71	37,5	44	50	55	55	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Jumlah Destinasi Pariwisata Daerah yang dipromosikan (Lokasi)	1	1	2	3	3	3	Program Pemasaran Pariwisata	
3	Jumlah Karya Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI (Karya)	8	10	12	14	16	16	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
4	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan (Orang)	200	445	515	585	655	655	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian (Ton)	910.715	921.559	935.276	953.853	977.549	977.549	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Peningkatan Populasi Ternak (Persen)	5,85	5,5	6,47	7,5	8,34	8,34	Sarana Pertanian	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) (Kali/Tahun)	2,38	2,43	2,47	2,52	2,57	2,57	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Jumlah Infrastruktur Peternakan yang Disediakan dan Dikembangkan (Unit)	13	6	26	26	26	26		Dinas Perikanan dan Peternakan
5	Persentase Jumlah Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dikendalikan (Persen)	96,76	96,85	96,92	97,44	100	100	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
6	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Persen)	13,77	14,05	14,33	14,62	14,91	14,91	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7	Jumlah Wilayah yang Terkendali dari Bencana	22	26	26	26	26	26		Dinas Perikanan

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Wilayah)								dan Peternakan
8	Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan (Rekomendasi)	4	10	10	10	10	10	Program Perizinan Usaha Pertanian	
9	Cakupan bina kelompok petani (Persen)	26,86	33,58	40,29	47,01	53,72	53,72	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
1	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (Poin)	63	64	65	66	66	66	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
1	Persentase fasilitasi perizinan pendaftaran perusahaan (Persen)	100	100	100	100,00	100,00	100	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (Persen)	77,78	78	88,89	88,89	100,00	100	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perindustrian Dan Perdagangan
3	Tingkat ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Persen)	94,74	100	100	100,00	100,00	100	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
4	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir (Persen)	75	75	83,33	91,67	100,00	100	Program Pengembangan Ekspor	
5	Persentase alat metrologi yang sesuai standar (Persen)	32,03	34,14	36,26	38,37	40,49	40,49	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
6	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang (Persen)	55	63,33	71,67	80	88	88,33	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	Jumlah dokumen regulasi perencanaan dan pembangunan industri (Dokumen)	n/a	1	1	1	1	1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
2	Persentase saran teknis terhadap izin yang dikeluarkan (Persen)	75	83,33	87,5	90	91,67	91,67	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
3	Persentase pelaku industri yang mengakses sistem informasi industri nasional (Persen)	5,12	6,84	8,57	10,29	12,02	12,02	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
VII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya (KK)	71	76	81	86	91	258	Program Pembangunan Kawasan Trasmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Jumlah satuan pemukiman yang dibina (KK)	25	25	25	25	25	75	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	
D	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
I	INSPEKTORAT DAERAH								
1	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti (Persen)	72	75	80	85	90	90	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
2	Presentase Pemenuhan Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP (Persen)	68	75	80	84	88	88	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
II	PERENCANAAN								
1	Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Program pembangunan daerah (Persen)	96,3	97,04	97,78	98,52	99,26	99,26	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Pembangunan Daerah	Dan Pengembangan Daerah
2	Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persen)	94,01	94,51	95	95,39	95,74	95,74	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Persen)	84,23	84,65	85,06	85,49	85,84	85,84		
4	Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)	90,07	90,89	91,55	92,21	92,88	92,88		
III	KEUANGAN								
1	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran (Waktu)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Persentase realisasi penyerapan anggaran belanja terhadap rencana anggaran kas (Persen)	95	97	97	98	99	99		

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Persentase Ketepatan Penyampaian LKPD (Persen)	95	96	98	100	100	100		
4	Persentase Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) (Persen)	90	91	91	93	95	95	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
5	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Persen)	43,47	45,67	44,62	45,15	47,9	47,9	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
IV	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan (Persen)	86	87	88	89	90	90	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia
2	Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan (Persen)	84	85	86	87	88	88		
3	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi (Persen)	84	86	87	88	89	89		

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase ASN yang berkinerja baik (Persen)	95	96	97	98	99	99		
V	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase Implementasi Hasil Penelitian dan Inovasi (Persen)	89,78	90	90,9	91,81	92,73	93,58	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
2	Indeks inovasi daerah (Ketegori)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif		
F	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
VI	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang ditindaklanjuti (Persen)	n/a	n/a	100	100	100	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
2	Presentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewilayahan (Persen)	100	100	100	100	100	100		

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Presentase Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang ditindaklanjuti (Persen)	n/a	n/a	100	100	100	100		
4	Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Persen)	100	100	100	100	100	100		
5	Persentase dokumen kesepakatan Kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama (Persen)	95,52	100	100	100	100	100		
6	Presentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti (Persen)	n/a	n/a	100	100	100	100	Program Perekonomian dan Pembangunan	
7	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang diselenggarakan (Persen)	n/a	n/a	90	95	100	100		
8	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	2	5	3	4	5	5		
VII	SEKRETARIAT DPRD								

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD (Persen)	100	100	33,94	32,12	33,94	100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
2	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD (Persen)	100	100	32,52	33,33	34,15	100		
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
VIII	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (Persen)	73,33	40	94,17	95,83	100	100	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Jumlah orang yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (Orang)	0	100	250	100	100	450	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan	

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Etika Serta Budaya Politik	
3	Cakupan Ormas yang di bina kategori aktif (Persen)	19,38	19,38	38,76	100	100	100	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
4	Jumlah orang yang dibina dilingkup bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Orang)	0	150	180	210	260	260	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
5	Jumlah potensi konflik sosial yang tertangani (Potensi Konflik)	15	15	14	13	12	12	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
H	NON URUSAN								

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP perangkat daerah (Kategori)	A	A	A	A	A	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan
		A	A	A	A	A	A		Dinas Kesehatan
		A	A	A	A	A	A		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		A	A	A	A	A	A		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		A	A	A	A	A	A		Satuan Polisi Pamong Praja
		BB	A	A	A	A	A		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		A	A	A	A	A	A		Dinas Sosial
		A	A	A	A	A	A		

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		A	A	A	A	A	A		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		BB	BB	BB	BB	A	A		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		BB	A	A	A	A	A		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		BB	A	A	A	A	A		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		BB	BB	BB	BB	A	A		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Perlindungan Anak
		BB	BB	BB	A	A	A		Dinas Perhubungan
		A	A	A	A	A	A		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		A	A	A	A	A	A		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		BB	A	A	A	A	A		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		BB	A	A	A	A	A		Dinas Arsip dan Perpustakaan
		A	A	A	A	A	A		Dinas Perikanan dan Peternakan
		A	A	A	A	A	A		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
		A	A	A	A	A	A		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		A	A	A	A	A	A		Sekretariat Daerah
		A	A	A	A	A	A		Sekretariat DPRD

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		BB	A	A	A	A	A		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		BB	A	A	A	A	A		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		A	A	A	A	A	A		Badan Pendapatan Daerah
		A	A	A	A	A	A		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		A	A	A	A	A	A		Inspektorat
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Wado

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Jatinunggal
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Darmaraja
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Cibugel
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Cisitu
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Situraja
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Conggeang
		BB	A	A	A	A	A		Kecamatan Paseh
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Surian
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Buahdua
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Tanjungsari

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Sukasari
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Pamulihan
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Cimanggung
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Jatinangor
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Rancakalong
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Sumedang Selatan
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Sumedang Utara
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Ganeas
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Tanjungkerta

No	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Program	Perangkat Daerah
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Tanjungmedar
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Cimalaka
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Cisarua
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Tomo
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Ujungjaya
		A	A	A	A	A	A		Kecamatan Jatigede
		BB	A	A	A	A	A		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen transisi untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan selama 3 (tiga) tahun yang berakhirnya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pada Tahun 2023. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan tahap IV dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumedang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan RPD sebagai berikut:

1. Pejabat (Pj.) mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.
2. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026.
3. Seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang agar melaksanakan program – program dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.
4. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan Tahun 2026.

5. Pejabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD secara periodik yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
6. Pemerintah Daerah melakukan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah maupun akuntabilitas kinerja pemerintah daerah setiap tahunnya dengan berpedoman kepada RPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Keberhasilan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, perlu dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang.


BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR